

KUDETA 1 OKTOBER 1965

SEBUAH STUDI TENTANG
KONSPIRASI

Victor M. Fic

Pengantar:

John O. Sutter

**KUDETA 1 OKTOBER 1965:
Sebuah Studi tentang Konspirasi**

Victor M. Fic

KUDETA 1 OKTOBER 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Pengantar:
John O. Sutter

Penerjemah:

Rahman Zainuddin (Daftar Isi - Bab IV)
Bernard Hidayat (Bab V - Bab IX)
Masri Maris (Bab IX - Selesai)

Yayasan Obor Indonesia
Jakarta 2007

Victor M. Fic

KUDETA 1 OKTOBER 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi; penerjemah:
Rahman Zainuddin, Bernard Hidayat, Masri Maris; pengantar: John O.
Sutter; edisi: 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2005.

xlvi + 448 hlm. 17.5 x 25 cm.
ISBN: 978-979-461-555-3

Judul Asli:

*ANATOMY of the Jakarta Coup: October 1, 1965: The Collusion with China
which Destroyed the Army Command, President Sukarno and the Communist
Party of Indonesia*

Copyright © 2004 oleh Victor M. Fic
Allright reserved
Diterbitkan pertama kali di New Delhi, India
Oleh Abhinav Publications

Diterbitkan pertama kali ke dalam bahasa Indonesia
oleh Yayasan Obor Indonesia
Anggota IKAPI DKI Jakarta bekerjasama dengan
Working for Democratic World Federation

Cetakan pertama: September 2005
Cetakan ke kelima: Februari 2008
YOI: 494.23.14.2005
Desain sampul: Aji Soeroso

Alamat penerbit:
Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230
Telp: (021) 31926978; (021) 3920114
Faks: (021) 31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>

Untuk Mengenang

Semua korban GESTAPU,
baik yang tidak bersalah maupun yang bersalah
yang telah binasa dalam Tragedi Nasional yang Besar itu
di Lubang Buaya di Pondok Gede di Halim
tanggal 1 Oktober 1965, di Pulau Buru
dan di tempat-tempat lain kemudian,
atau telah mengalami penderitaan yang hebat
dan diskriminasi selama bertahun-tahun



DAFTAR ISI

Daftar Dokumen	xi
Daftar Gambar dan Peta	xii
Prakata Penulis	xxiv
Ucapan Terimakasih	xxxi
Pengantar untuk Edisi Indonesia	xxxiii
Kata Pengantar oleh Dr. John O. Sutter	xxxv

PENDAHULUAN

	1
Tiga Teori tentang Asal-Usul GESTAPU	2
Apa yang Diperlihatkan Bukti-bukti itu?	5
Audit Menyalahkan Presiden atas Kekalahan itu	25
Sebuah Versi Terdahulu dari Studi ini	30
Sumber-Sumber yang Digunakan dan Tingkat Kredibilitasnya	32
Haruskah Larangan terhadap Marxisme-Leninisme Dicabut?	37
Mencari Kebenaran	40
Peringatan (Caveat)	46

BAB I OFENSIF REVOLUSIONER 1964-1965

	51
Dilemma PKI: Menuju Kekuasaan Secara Damai atau dengan Kekerasan	51
PKI Mengubah Porosnya: Dari Moskow ke Peking, 1964	54

BAB II PKI KE DALAM ANGKATAN BERSENJATA 1964-1965

	61
Biro Khusus Didirikan: 1964	61
Struktur Biro Khusus	63
Angkatan Darat sebagai Targetnya	65

BAB III	
INDONESIA DALAM STRATEGI CINA 1965	74
Sukarno Jatuh Pingsan di Istana Merdeka: 4 Agustus 1965	74
Mao Mendesak Aidit untuk Memukul Lebih Dahulu. Zhongnanhai, Peking : 5 Agustus	76
Perjanjian Rahasia Sukarno-Mao-Aidit. Istana Bogor: 8 Agustus	82
Poros Cina-Indonesia dalam Ujian: Juni-Juli	90
Sukarno Harus Menepati Janjinya Lalu Pergi	97
BAB IV	
SUKARNO DAN ANGKATAN DARAT BERSEBERANGAN 1965	104
Doktrin Strategi Angkatan Darat: “Bahaya dari Utara”, Bandung: 5 April	104
Sukarno Memerintahkan Untung Menghabisi Para Jenderal: Istana Merdeka, 4 Agustus	108
Sukarno Mengutip Carlyle untuk Membenarkan Pembunuhan itu: Istana Merdeka 30 September	109
BAB V	
POLITBIRO DAN RENCANA BESARNYA 1965	114
Rapat Pertama: Markas Besar PKI, Kramat Raya 81, Jakarta: 9 Agustus “Purge Command [Komando Pembersihan]” Ditetapkan: Kediaman Aidit, Jakarta: 12 Agustus	114 119
Divisi Siliwangi Dinetralsir. Mayjen Rukman, Bandung: 25 Agustus	121
Rapat Kedua. Markas Besar PKI, Kramat Raya 81, Jakarta: 26 Agustus	124
Rapat Ketiga. Markas Besar PKI, Kramat Raya 81, Jakarta: 28 Agustus	131
Komando-komando Kelompok untuk Merebut Kekuasaan di Seluruh Negeri	133
BAB VI	
JADUAL KUDETA: RINCIAN LANGKAH-LANGKAHNYA 1965	136
Sepuluh Kali Rapat “Komando Pembersihan”: 6-30 September	136
Tiga Opsi Aidit untuk Melengserkan Presiden	147
Omar Dhani Mempersenjatai Pasukan Penculik: 30 September	154

BAB VII
JENDERAL SUHARTO: KUDA HITAM 1965 157

Suharto dan KOSTRAD: Sebuah Faktor X (Tidak Diketahui) dari sebuah Persamaan	157
Latief Mengunjungi Suharto di Rumahnya: 29 September	159
Latief Gagal Membujuk Suharto: Rumah Sakit Tentara, Jakarta: 30 September	161

BAB VIII
PRESIDEN MELOLOSKAN DIRI DARI PERANGKAP AIDIT 165

Pusat Komando Halim: 1 Oktober 1965	165
Enam Jenderal Dibunuh dan Tidak Diperoleh Bukti: 04.00	167
Aidit Memasang Perangkap di Rumah Susanto	171
Presiden Memerintahkan Penghentian Semua Aksi: 10.30	175
Supardjo Meninggalkan Aidit dan Bergabung dengan Presiden: 10.30 ..	180
Aidit Menyerang Presiden: 11.00	183
“Kekuasaan Kembar”. Presiden <i>versus</i> Aidit: 10.00-16.00	187
Aidit Mengangkat Presiden Kembali: 13.00	189

BAB IX
LAKON WAYANG KULIT KOLOMONGSO
SAAT MAKAN SIANG
Rumah Komodor Susanto: 1 Oktober 1965 194

Musyawahar Besar: 12.00-23.00	194
Presiden Menyerahkan Kabinetnya ke Tangan Aidit: 13.00	197
Aidit Tidak Mau Merangkul Presiden: Kesalahan Fatal: 13.30	200
Serangan Kedua Aidit terhadap Presiden: 14.00	203
Sukarno Mendapatkan Lagi <i>Wahju Tjakraaningrat</i> , Berakhirnya Kekuasaan Kembar: 16.00	209
Presiden dan Suharto Saling Berhadapan: 12.00-20.00	216
Suharto Mencegah Terbentuknya Duumvirat Sukarno-Aidit: 12.00-16.00	217
CENKO II Menyimpulkan bahwa GESTAPU telah Gagal: 16.00-20.00	222
Aidit Meninggalkan Jakarta dan Pergi ke Jawa Tengah: 20.00-01.00	227

BAB X	
OFENSIF SUHARTO	
1 Oktober 1965	233
Suharto Mengikuti Presiden – Bintang Pedomannya: 07.20-23.00	233
Lakon <i>Wayang Kolomongso</i> Berakhir, Presiden Berangkat ke Bogor: 20.00-23.00	239
BAB XI	
AKIBAT-AKIBAT KUDETA YANG GAGAL ITU	
2 Oktober 1965	243
Aidit Membentuk Pemerintahan Sementara di Yogyakarta: 2 Oktober ...	243
Di Solo PKI Terpecah karena Perbedaan Pandangan dan Konflik Intern : 2 Oktober	248
Surat Aidit kepada Presiden Tanggal 6 Oktober: “Kebohongan Terbesar Sepanjang Masa”	250
Aidit Menyalahkan Presiden atas Kegagalan GESTAPU itu	254
BAB XII	
PENGHANCURAN PKI: AGEN KEKUATAN ASING	263
Presiden Memberi Mandat Suharto untuk Memulihkan Keamanan dan Ketertiban: 2 Oktober	263
Nasution dan Angkatan Darat Membalas : 1-6 Oktober	266
Pusat Persengkokolan itu Pindah ke Bogor: 2 Oktober	273
Sidang Paripurna Kabinet di Bogor: 6 Oktober	278
Mempertahankan Status Hukum PKI	283
Pembantaian Besar-besaran Tiada Tara	286
KESIMPULAN	289
Mengapa Aidit Gagal?	289
Situasi Revolusioner Tidak Ada di Indonesia	292
Kesalahan Fatal: Aidit Bertaruh dengan Kesehatan Presiden	296
Catatan	300
Dokumen-dokumen	241
Daftar Pustaka	411
Indeks	433
Perihal Penulis dan Pemberi Kata Pengantar	443

DAFTAR DOKUMEN

Dokumen No. 1:	Surat Aidit kepada Presiden Sukarno, 6 Oktober 1965	343
Dokumen No. 2:	Surat Aidit tanggal 10 November 1965; Instruksi-intruksi Tetap	346
Dokumen No. 3:	Instruksi 28 September 1965. CC PKI	350
Dokumen No. 4:	“OTOKRITIK” Supardjo	352
Dokumen No. 5:	Pernyataan Brijend H. Soegandhi	368
Dokumen No. 6:	Dokumen Gilchrist	370
Dokumen No. 7:	Surat Victor M. Fic kepada Presiden Suharto, 31 Oktober 1966	373
Dokumen No. 8:	Komunike/Pengumuman Gerakan 30 September, 1 Oktober 1965	376
Dokumen No. 9:	Keputusan No. 1 Dewan Revolusi, 1 Oktober 1965 ...	379
Dokumen No. 10:	Perintah Jenderal Suharto, 1 Oktober 1965	382
Dokumen No. 11:	Keputusan No. 2 Dewan Revolusi, 1 Oktober 1965 ...	383
Dokumen No. 12:	Perintah Harian Men/Pangau, 1 Oktober 1965	384
Dokumen No. 13:	Pernyataan Presiden, 1 Oktober 1965	385
Dokumen No. 14:	Perintah Harian Presiden, 1 Oktober 1965	386
Dokumen No. 15:	Pernyataan Men/Pangal, 1 Oktober 1965	387
Dokumen No. 16:	Pernyataan Men/Pangau, 2 Oktober 1965	388
Dokumen No. 17:	Radiogram Men/Pangak, 1 Oktober 1965	389
Dokumen No. 18:	Prospek: Perkiraan CIA, 10 September 1965	390
Dokumen No. 19:	Pernyataan Indonesia tentang Kemampuan Nuklir: 11 Agustus 1965	401
Dokumen No. 20:	Sumber Daya CIA di Indonesia: 23 Agustus 1965 ...	408

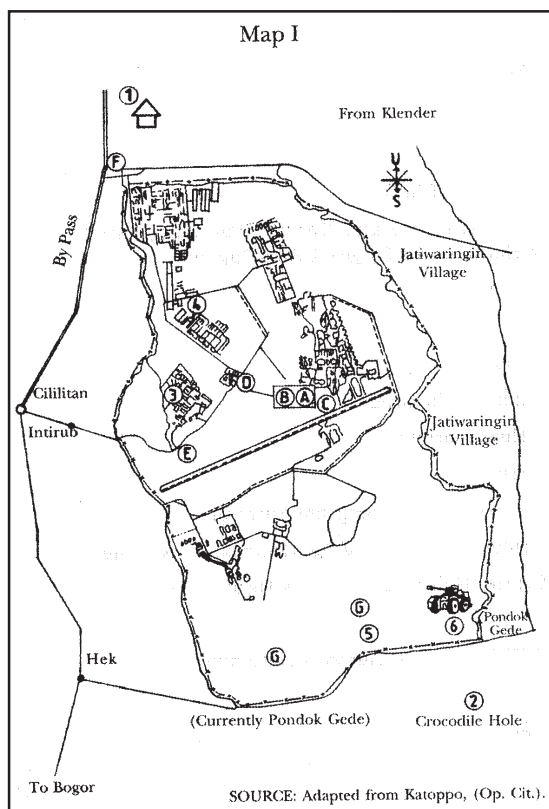
DAFTAR GAMBAR DAN PETA

Gambar

Gambar I	: CENKO I: Pusat Survei Udara, Penas	xv
Gambar II	: CENKO II: Markas Besar GESTAPU: Sjam, Untung, Supardjo, Latief, Sujono, Heru, Walujo, Pono; Rumah Sersan Udara Anis Sujatno	xv
Gambar III	: Istana Merdeka	xvi
Gambar IV	: Radio Republik Indonesia (RRI)	xvi
Gambar V	: Gedung Pusat Telekomunikasi	xvii
Gambar VI	: Markas Besar KOSTRAD: Komando Strategis Angkatan Darat	xvii
Gambar VII	: Markas Besar Tjakrabirawa, Pengawal Istana	xviii
Gambar VIII	: Markas Besar Garnisun Jakarta	xviii
Gambar IX	: Markas Besar Aidit di Halim; Rumah Sersan Udara Suwardi	xix
Gambar X	: Markas Besar Presiden Sukarno di Halim: Rumah D-1 Komodor Udara Susanto	xix
Gambar XI	: Pusat Komando Operasi, Halim, Markas Besar Omar Dhani	xx
Gambar XII	: Lubang Buaya	xx
Gambar XIIa	: “Gedung’ Pengadilan Rakyat, Lubang Buaya	xxi
Gambar XIII	: Raja Airlangga Memegang Tjakraningrat: koleksi penulis	xxi
Gambar XIV	: D. N. Aidit	xxii
Gambar XV	: Anggota-anggota Terkemuka PKI	xxiii

Peta

Peta I	: Pangkalan Udara Halim; Markas Besar Para Pemain Utama; Pondok Gede; Lubang Buaya; Komunikasi dan Logistik; 1 Oktober 1965 ar Dhani	xiii
Peta II	: Medan Merdeka: 1 Oktober 1965	xiv



Peta I : Pangkalan Udara Halim; Markas Besar Para Pemain Utama; Pondok Gede; Lubang Buaya; Komunikasi dan Logistik; 1 Oktober 1965.

- ① Gedung Penas di luar wilayah Pangkalan Angkatan Udara Halim yang digunakan oleh G30S sebagai Cenko I, tanpa izin Kepala Penas/Angkatan Udara.
- ② Desa Lubang Buaya digunakan sebagai tempat latihan pasukan sukarela di bawah komando Mayor Udara Soejono, dan kemudian menjadi tempat di mana jenazah para jenderal yang menjadi korban G30S itu ditemukan.
- ③ Rumah Sersan Udara Anis Soeijatno, anggota Resimen PPP di Kompleks Perumahan bintang, yang telah digunakan oleh G30S sebagai Cenko II.
- ④ Rumah Sersan Udara Soewardi (bintara Pelatih Resimen PPP), yang digunakan sebagai tempat markas D. N. Aidit.

Beberapa Catatan
tentang Pangkalan Udara Halim
Perdanakusuma
tahun 1965

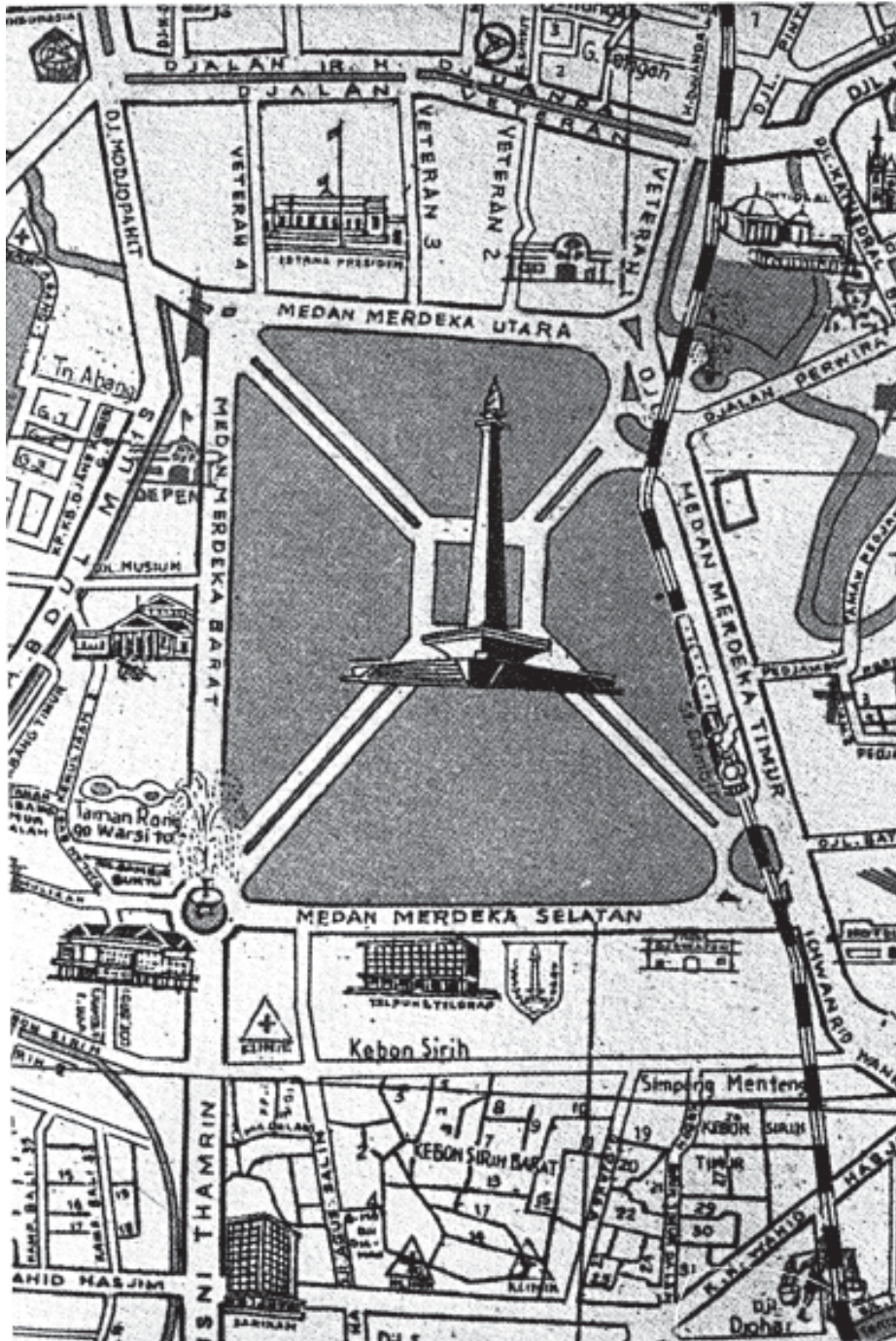
Satu-satunya jalan masuk/keluar melalui desa Kebonpala-Cililitan E atau melalui Kompleks Trikora dekat Jalan Inspeksi

Kali Malang ke Jalan By-Pass E.

- (A) Daerah Koops
Tempat di mana Presiden Sukarno tiba di Halim tanggal 1 Oktober 1965 dan diterima oleh Men/Pangau dan Komandan Koops.
- (B) Rumah Komodor Udara Soesanto, di mana Presiden Sukarno tinggal dan memanggil Waperdam II Dr. Leimena, Para Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata dan Jaksa Agung.
- (C) Angkatan Ops dan Menara Pangkalan Angkatan Udara PLLU Halim P.
- (D) Daerah Kepolisian Angkatan Udara Halim P.
- (E) Pos Penjagaan Polisi Angkatan Udara pada gapura keluar/masuk Pangkalan Angkatan Udara Halim P. melalui Cililitan.
- (F) Pos Penjagaan Polisi Angkatan Udara pada gapura keluar/masuk Pangkalan Angkatan Udara Halim P., melalui By Pass.
- (G) Lapangan Latihan Pasukan Payung PGT (Daerah Tempat Terjun). Sekarang ini telah dikembangkan menjadi sebuah Lapangan golf Halim I dan Halim II, Daerah Skuadron-465/Paskhasau dan Kompleks Perumahan Angkatan Udara Dirgantara I, II, III.

5. Lokasi Pasukan Raiders/Yon-454 ketika akan bertempur melawan RPKAD (Sekarang ini telah menjadi Kompleks Perumahan Dirgantara III).
6. Lokasi Pasukan RPKAD ketika siap tempur melawan Yon-454/Raiders (Sekarang ini telah menjadi Wilayah Satharlan).

Catatan: Sebuah versi yang lain adalah bahwa RPKAD datang dari arah Hek, padahal dalam kenyataannya pasukan itu datang dari arah Pondok Gede.



Peta II: Medan Merdeka, 1 Oktober 1965



Gambar I : CENKO I: Pusat Survei Udara, PENAS.



Gambar II : CENKO II: Markas Besar GESTAPU: Sjam, Untung, Supardjo, Latief, Sujono, Heru, Walujo, Pono; Rumah Sersan Udara Anis Sujatno.



Gambar III : Istana Merdeka.



Gambar IV: Radio Republik Indonesia (RRI).



Gambar V : Gedung Pusat Telekomunikasi.



Gambar VI : Markas Besar KOSTRAD: Komando Strategis Angkatan Darat.



Gambar VII : Markas Besar Tjakrabirawa, Pengawal Istana.



Gambar VIII : Markas Besar Garnius Jakarta



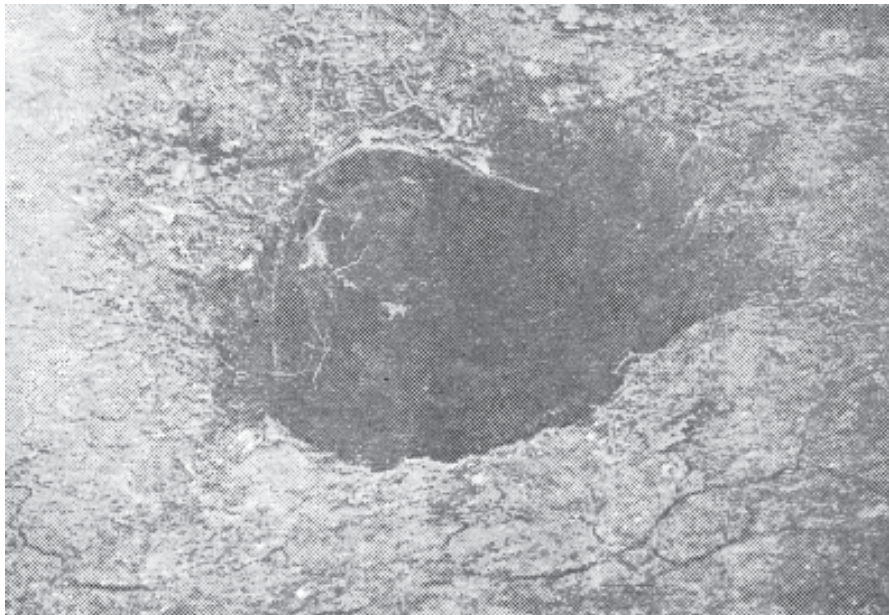
Gambar IX : Markas Besar Aidit di Halim; Rumah Sersan Udara Suwardi.



Gambar X : Markas Besar Presiden Sukarno; Rumah D-1 dari Komodor Udara Susanto.



Gambar XI : Pusat Komando Operasi, Halim, Markas Besar Omar Dhani.



Gambar XII : Lubang Buaya.

XX



Gambar XIIa : “‘Gedung’ Pengadilan Rakyat”, Lubang Buaya



Gambar XIII : Raja Airlangga Memegang Tjakraningrat; koleksi penulis.



Gambar XIV : D. N. Aidit

xxii



Lukman



Njoto



Sakirman



Sudisman

Gambar XV : Anggota-anggota Terkemuka PKI: Lukman; Njoto; Sakirman; Sudisman.

PRAKATA PENULIS

Buku ini merupakan jilid terakhir dari sebuah serial tiga jilid tentang studi saya yang berjudul *INDONESIA: The Origin and evolution of Its Pluralism From the Hindu-Buddhist Era, Through the Islamic Period to a Modern Secular State (Indonesia: Asal-usul dan Evolusi Pluralismenya mulai dari Masa Hindu-Buddha, Melalui Periode Islam menuju sebuah Negara Sekular yang Modern)*.

Jilid I dari serial itu berjudul *THE TANTRA: Its Origin, Theories, Art and Diffusion from India to Nepal, Tibet, China, Mongolia, Japan and Indonesia (Tantra: Asal-Usul, Teori-Teori, Seni dan Penyebarannya dari India ke Nepal, Tibet, Cina, Mongolia, Jepang dan Indonesia)*. Jilid ini menelusuri asal-usul dan evolusi Tantrayana Hindu dan Buddhisme di India, dan penyebarannya ke sejumlah negara di Asia Tengah, Asia Utara dan Asia Tenggara, terutama sekali Indonesia. Di Jawa paham Shiwaisme Tantrayana diperkenalkan oleh Raja Sanjaya dengan mentahbiskan sebuah Linga Kerajaan pada tahun 732 A.D., menjadi sebuah *palladium* negara untuk melegitimasi pemerintahannya dan mendapatkan kemakmuran dan keamanan bagi daerah kekuasaannya. Palladium ini, yang dikenal sebagai Kultus Dewaraja, memberikan dasar-dasar ajaran dan ritual untuk melegitimasi kekuasaan politik sederet dinasti yang terdapat di Jawa dan Sumatra sampai jatuhnya Kerajaan Majapahit tahun 1527 A.D. Jilid ini memungkinkan kita untuk memahami berfungsinya berbagai sistem kerajaan di Indonesia—terlepas dari apakah penguasanya mengikuti bentuk-bentuk Tantrayana Siwaisme, Wisnuisme atau Buddhisme. Dengan demikian, tatanan pemerintahan dari sistem-sistem ini telah meletakkan dasar dari pelebagaan pluralisme dalam agama, budaya dan politik di Indonesia di masa-masa dahulu kala, sehingga menjadikan pluralisme itu sebagai tanda dari warisan budayanya.

Jilid II dari serial ini berjudul *FROM MAJAPAHIT AND SUKUH TO MEGAWATI SUKARNOPUTRI: Continuity and Change in Pluralism of Religion,*

Prakata Penulis

Culture and Politics of Indonesia from the XV to the XXI Century (Dari Majapahit dan Suku sampai Megawati Sukarnoputri: Kontinuitas dan Perubahan dalam Pluralisme Agama, Budaya dan Politik Indonesia mulai dari Abad XV sampai Abad XXI). Dalam BAGIAN I, buku ini membicarakan evolusi pluralisme agama, budaya dan politik yang telah dicetuskan di Singasari oleh Raja Kertanegara ketika masa pemerintahannya dari 1254 sampai 1292 A.D. Meskipun pada permulaannya raja ini memperbolehkan dualisme Hindu-Buddha di dalam kerajaannya di Jawa Timur, namun dengan segera dualisme ini diubah menjadi sungguh pluralis dengan memasukkan Wisnuisme ke dalam doktrin negaranya yang baru itu. Pelaksanaan konstitusional dan pemerintahan dari ajaran pluralisme ini telah menyebabkan diberikannya hak-hak agama, politik dan ekonomi yang terpisah untuk ketiga komunitas ini di bawah perlindungan mahkotanya. Dengan demikian, mahkota negara telah menjadi sebuah prinsip yang mempersatukan identitas-identitas yang terpisah-pisah dan berbeda-beda dari kerajaannya, sehingga menimbulkan sebuah doktrin negara yang telah disimpulkan dengan baik sekali oleh sebuah ungkapan BHINNEKA TUNGGAL IKA. Raja Hayam Wuruk, yang memerintah mulai 1350 sampai 1389 A.D. lebih lanjut memperluas doktrin negara ini dengan memasukkan agama Rsi dalam sifat pluralis negara Majapahit itu, untuk mengakomodasi makin meningkatnya “jawanisasi” nilai-nilai dan kelembagaan Hindu-Buddha karena pengaruh-pengaruh pribumi.

Perkembangan pluralisme yang multi-faset ini telah mencapai suatu tingkat yang baru dan lebih tinggi dengan didirikannya Candi Suku di Gunung Lawu, Jawa Tengah tahun 1437 A.D. Sintesis baru dan lebih tinggi ini merupakan sebuah campuran yang hebat yang mencakup kesuburan asli yang lama dan kultus-kultus nenek-moyang di masa-masa pra-Hindu, bentuk yang telah “diJawakan” dari Shiwaisme Tantrayana, kultus Bhima yang merakyat, dan nilai-nilai orang Kalang. Karena sifatnya yang serba-mencakup itu, maka Sintesis Besar ini merupakan nilai-nilai inti peradaban Hindu-Jawa di masa hampir datangnya Islam di Jawa pada awal abad ke-XV A.D.

Setelah menjelaskan latar-belakang, maka studi ini membuat sebuah upaya untuk merasakan adanya suatu pola umum pada saat ia muncul dari peminjaman, adaptasi, akomodasi dan interaksi timbal-balik dalam bagian-bagian komponen dari Sintesis Besar ini, dan kemudian membentuk tujuh prinsip kesinambungan dan perubahan yang berikut ini dalam agama, budaya dan politik sebagai warisan nasional dari rakyat Jawa:

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- 1) menjaga dan mendorong mekarnya pluralisme yang multi-faset itu dalam manifestasinya di bidang keagamaan, budaya, politik dan kawasan; dan dalam waktu yang sama membiarkan untuk menghilangkan komponen-komponen yang terbukti tidak mampu melestarikan identitasnya;
- 2) meningkatkan kemampuan untuk menciptakan dan menyerap masukan-masukan agama, budaya dan politik, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar, untuk membentuk kembali dan mengawinkannya dengan nilai-nilai yang telah mapan dan dengan demikian mempermudah suatu saling-tukar antara yang lama dan yang baru;
- 3) waspada terhadap kekuatan-kekuatan ortodoksi—baik yang bersifat agama, ideologi maupun politik—karena semuanya itu menghalangi pembaharuan dan pencangkokan (hibridisasi) serta memacetkan dinamika penukaran tempat (interchange) antara yang lama dan yang baru;
- 4) menjaga agar jangan sampai terjadi pertarungan saling bunuh antara sesama saudara, suatu perang saudara jenis Paregreg, di antara elemen-elemen utama yang membentuk pluralisme yang multi-faset itu;
- 5) menjaga agar jangan melibatkan kekuatan-kekuatan luar dalam menyelesaikan pertikaian-pertikaian dalam negeri;
- 6) menjaga agar jangan sampai aspirasi kekuatan-kekuatan luar yang bersifat hegemonistik diberi kesempatan masuk ke kawasan itu;
- 7) tetap membuka pilihan-pilihan untuk melibatkan kekuatan-kekuatan pengimbang baik yang bersifat regional maupun yang ekstra-regional dalam menghadapi aspirasi-aspirasi hegemonistik seperti itu untuk menjaga integritas territorial dan kemerdekaan negeri itu.

BAGIAN II buku itu membicarakan kedatangan Islam di Jawa dan Jawanisasi yang terjadi setelah itu melalui suatu masa interaksi yang panjang dengan nilai-nilai Hindu-Jawa dari sintesis Suku itu. Interaksi tersebut menghasilkan suatu bentuk pluralisme baru yang lebih tinggi lagi, yang dinamakan Koentjaraningrat *Agami Jawi*, agama Jawa. Ketika zaman kolonial beberapa bentuk agama Kristen, Confusionisme dan Taoisme juga telah menyumbang aspek-aspek baru terhadap pluralisme multi-dimensional ini di Jawa, yang terus berlangsung sampai Indonesia merdeka tahun 1945. Berdasarkan pengalaman ini, maka studi itu mengembangkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa pluralisme yang multi-faset itu merupakan sari-pati

Prakata Penulis

dari warisan sejarah bangsa Indonesia, dan bahwa hal itu harus dihormati dan dijaga oleh negara untuk mendapatkan harmoni kehidupan bersama serta perdamaian dan kestabilan dalam negeri yang kompleks ini. Lagi pula, hipotesis itu berpendapat bahwa apabila di waktu manapun di masa lalu pluralisme ini ditindas atau dilanggar oleh para penguasa, maka negara itu akan melalui suatu masa ketidak-stabilan dan kekacauan yang menimbulkan kemelaratan dan penderitaan bagi rakyatnya.

Hipotesis ini diuji dengan jalan menyelidiki nasib pluralisme itu ketika beberapa periode setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya: 1) negara kesatuan dan sekuler, 1945-1949; 2) negara federal, 1949-1950; 3) negara Demokrasi Terpimpin, 1959-1965; 4) peristiwa GESTAPU dan akibat-akibatnya antara 1965-1966; 5) pemasungan pluralisme di bawah Orde Baru Presiden Suharto sampai jatuhnya rezim itu tahun 1998. Bagian terakhir membicarakan kembalinya pluralisme sebagai akibat dari pemilu 1999, dan diperkukuh di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dan penggantinya Megawati Sukarnoputri dari tahun 1999 sampai 2002.

Studi itu diakhiri dengan menjelaskan sebuah ancaman yang sangat serius terhadap sifat pluralistik masyarakat Indonesia dan integritas territorial negeri itu sekarang. Ancaman itu disebabkan oleh kekerasan yang sedang terjadi akibat gerakan-gerakan separatis di Aceh, Papua dan Maluku, dan timbulnya suatu militansi Islam pada bulan-bulan yang terakhir tahun 2001. Militansi ini, yang mendapat dukungan dari luar, menuntut digantinya negara sekuler yang ada, yang telah ditetapkan oleh UUD 1945, dengan sebuah negara Islam dan dilaksanakannya Hukum Syari'ah di negara itu.

Namun, sebagaimana diperlihatkan dengan jelas oleh warisan nasional Indonesia di dalam studi ini, tidak ada sebuah alternatif lain yang realistis kecuali sifat pluralisme yang multi-faset dari masyarakatnya serta sifat sekuler dan kesatuan dari negeri itu, yang dinyatakan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pelajaran-pelajaran dari masa lalu dan sejarah kontemporer sudah jelas dan tegas sekali dalam masalah, bahwa hanya sebuah pemerintahan yang dipilih rakyat yang bertekad untuk melakukan pembaharuan ekonomi, sosial dan politik yang berdampak jauh, seraya menjaga sifat sekuler negara itu, didukung oleh angkatan bersenjata yang tidak mencampuri urusan politik, itulah yang dapat menciptakan perdamaian di dalam negeri serta stabilitas politik dan sosial bagi negara itu sehingga dapat tercipta suatu masa-depan yang lebih baik bagi rakyatnya. Dan setiap upaya untuk memperkenalkan sebuah negara Islam dan memaksakan Hukum Syari'ah sudah pasti akan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

ditentang oleh angkatan bersenjata, sehingga kemungkinan perang saudara jenis Paregreg bukanlah suatu kemungkinan yang menarik untuk ditempuh.

Para pemimpin Indonesia mungkin harus mengambil satu halaman dari warisan sejarah negara mereka dan mulai menetapkan tujuh prinsip yang mengatur kelanjutan dan perubahan dalam agama, budaya dan politik untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi negara itu dewasa ini. Studi ini memformulasikan prinsip-prinsip ini setelah memperhatikan alasan-alasan jatuhnya Kerajaan Majapahit tahun 1527 A.D. Semuanya itu jelas sekali sangat relevan dewasa ini untuk menghindari disintegrasinya dan tragedi Balkanisasi di negeri itu.

Jilid III dari serial ini berjudul *ANATOMY OF THE JAKARTA COUP: October 1 1965: The Collusion with China which Destroyed The Army Command, President Sukarno and the Communist Party of Indonesia (Anatomi Kudeta Jakarta: 1 Oktober 1965: Konspirasi dengan Cina yang telah Menghancurkan Komando Puncak Angkatan Darat, Presiden Sukarno dan Partai Komunis Indonesia)*, yang sedang Anda baca ini. Buku ini menjelaskan ancaman yang paling serius terhadap sifat pluralisme dari masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh suatu upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengambil-alih kekuasaan pada 1 Oktober 1965. Meskipun tentara di bawah Mayjen Suharto telah menggagalkan upaya itu, namun seandainya kudeta itu berhasil maka tidak dapat diragukan lagi bahwa suatu perang kelas yang intensif sudah pasti akan menghancurkan partai-partai politik, organisasi-organisasi agama dan seluruh kelas sosial yang bertekad untuk menjaga pluralisme yang multi-faset di negara itu.

Buku ini membicarakan didirikannya Biro Khusus oleh Ketua Partai Komunis, Dipa Nusantara Aidit tahun 1964, dan cara-cara yang digunakan direkturnya Sjam dan stafnya untuk melakukan penetrasi ke dalam tubuh angkatan bersenjata dan merekrut Marsekal Omar Dhani, Mayjen Pranoto, Brigjen Supardjo, Letkol Untung, Kolonel Latief dan sejumlah perwira lain demi mencapai tujuan-tujuan PKI.

Studi itu kemudian membicarakan jatuh pingsannya Presiden Sukarno tanggal 4 Agustus 1965 karena gangguan ginjal, dan perintahnya kepada Untung untuk menyingkirkan komando puncak Angkatan Darat (AD) untuk mencegah naiknya AD secara politik seandainya serangan penyakit ginjal itu menjadikan Presiden tidak berdaya lagi. Tiga rapat yang diadakan CC PKI, yang digelar pada pertengahan Agustus 1965, didokumentasikan untuk memperlihatkan bagaimana komite itu telah diperintahkan Aidit dan Politbiro untuk mengguna-

Prakata Penulis

kan Untung dan rekan-rekannya agar melaksanakan pembersihan itu, dan penculikan para jenderal komando puncak AD yang akan diikuti oleh pengambil-alihan kekuasaan oleh PKI.

Sejalan dengan itu, studi ini juga meninjau sepuluh rapat oleh Sjam dan tokoh-tokoh PKI lainnya, dengan kelompok Untung yang digelar dalam bulan September 1965 untuk merinci masalah-masalah teknis, logistik dan rincian-rincian lain dari operasi pembersihan itu. Aidit sendiri menghadiri pertemuan terakhir kelompok itu tanggal 30 September 1965, di mana ia menunjuk Mayjen Pranoto sebagai Men/Pangad yang baru untuk menggantikan Jenderal Yani, yang akan dibunuh oleh orang-orang Untung pada keesokan harinya. Sebuah surat yang berisikan instruksi-instruksi tetap yang ditulis Aidit tanggal 10 November 1965, dilampirkan di dalam buku ini sebagai *Dokumen No. 2*, telah melibatkan Presiden Sukarno dalam rencana ini. Instruksi-instruksi itu berbicara tentang saling-pengertian Presiden dengan Mao, yang telah dirundingkan oleh Aidit dengan Mao di Peking tanggal 5 Agustus, dan dengan Presiden tanggal 8 Agustus 1965 di Istana Bogor. Saling-pengertian itu memerlukan bantuan Cina terhadap rencana-rencana Sukarno untuk membangun sebuah “tentara rakyat” di Indonesia, pasokan senjata kepada kelompok Untung untuk melaksanakan pembersihan, dan pengunduran diri Sukarno ke Cina karena alasan kesehatan setelah diangkatnya Aidit menjadi perdana menteri dalam sebuah kabinet baru yang didominasi oleh PKI dan sekutu-sekutunya. Marsekal Chen Yi Menteri Pertahanan Cina merundingkan dengan Dr. Subandrio rincian dari pengunduran diri Sukarno ke Danau Angsa di Cina dalam kunjungannya ke Jakarta pada pertengahan Agustus 1965, yang bahkan merencanakan disingkirkannya Sukarno dengan kekerasan sekiranya langkah seperti itu diperlukan.

Buku Jilid III ini diakhiri dengan mengupas tindakan cepat Mayjen Suharto untuk menggagalkan upaya kudeta PKI itu, yang dimulai oleh kelompok Untung dengan membunuh enam jenderal Angkatan Darat pada subuh tanggal 1 Oktober 1965. Tekad militer untuk menghapus PKI dari peta kehidupan politik negeri itu karena telah bersekongkol dengan sebuah kekuatan asing dan membunuh enam jenderal AD, berikut mereka-mereka yang telah bekerja-sama dengan partai itu dalam konspirasi ini, berakhir dengan diturunkannya Presiden dan dihancurkannya PKI pada tahun 1966. Indonesia harus membayar harga yang luar biasa besar untuk petualangan PKI dan Presidennya, karena tidak hanya orang-orang yang bersalah karena telah bersekongkol itu akan tetapi juga banyak orang yang tidak berdosa telah terkena

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

imbas dari kekacauan itu. Mereka harus menghabiskan waktu puluhan tahun dalam penjara-penjara di Pulau Buru dan di tempat-tempat lain, sedangkan anggota keluarga mereka yang tidak bersalah menderita diskriminasi di pasar kerja dan di tempat-tempat lain selama sekian puluh tahun pula. Ketika jumlah korban itu, baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah, mencapai jutaan orang, maka percobaan kudeta PKI itu serta kejadian-kejadian yang mengiringinya telah memasuki buku-buku sejarah negeri itu sebagai hari-hari Tragedi Nasional.

V. M. F.



XXX

UCAPAN TERIMAKASIH

Suatu versi pendahuluan dan masih bersifat tentatif dari studi ini ditulis di Nanyang University di Singapura tahun 1968, dan dibacakan sebagai sebuah makalah seminar yang berjudul “THE SEPTEMBER 30 MOVEMENT IN INDONESIA, 1965: A Gambler That Failed”, di dalam forum the International Conference on Asian History yang digelar di Universitas Malaysia, Kuala Lumpur tanggal 5-10 Agustus 1968. Penelitian untuk makalah ini banyak sekali dibantu oleh tiga Direktur berturut-turut dari the Institute of Southeast Asian Studies di Singapura (ISEAS)—Harry J. Benda dari Yale University, USA; Joseph Silverstein dari Rutgers University, USA; dan John D. Legge dari Monash University, Australia—yang telah mempermudah saya dalam memakai koleksi sumber-sumber primer yang berharga di Institute itu mengenai pokok ini antara tahun 1968-1971.

Setelah konferensi di Kuala Lumpur itu, telah dilakukan dua kali perjalanan penelitian ke Indonesia. Kunjungan pertama saya lakukan dalam bulan September 1968. Ucapan terimakasih pantas diberikan kepada almarhum Drs. Nugroho Notosusanto, yang memberi kuliah tentang sejarah dan bertugas sebagai Pembantu Rektor untuk Urusan Mahasiswa di Universitas Indonesia tahun 1965, dan dalam bulan Desember tahun itu juga diangkat menjadi Direktur Pusat Sejarah ABRI dengan pangkat Kolonel. Tahun 1968 Nugroho merencanakan wawancara saya dengan dua tokoh yang terlibat langsung dalam kejadian-kejadian penting tahun 1965. Wawancara pertama dengan mantan Waperdam II Dr. Johannes Leimena, dan wawancara kedua dengan mantan Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo di tempat kediaman mereka. Ia juga merencanakan kemungkinan bagi saya untuk meninjau tulisan-tulisan pribadi Sjam untuk membuktikan bagi saya identitasnya, dan untuk memeriksa protokol-protokol penyelidikannya dan catatan-catatan pengadilan militer terhadapnya, mengingat beberapa orang pakar peserta konferensi Kuala Lumpur tahun 1968 telah menuduh bahwa orang seperti Sjam itu sebetulnya tak pernah ada, dia itu hanyalah sosok “hantu” yang diada-adakan saja oleh pihak militer

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Indonesia untuk melibatkan PKI dalam kudeta itu. Lagi pula, Nugroho Notosusanto mendapatkan izin bagi saya untuk mengadakan survei langsung di Pangkalan Udara Halim untuk menyelidiki posisi kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam kudeta 1 Oktober 1965 itu, dan rincian-rincian lain yang berhubungan. Rumah-rumah para personel Angkatan Udara di Halim—yang digunakan oleh Presiden Sukarno, Aidit, Untung dan lain-lain sebagai pusat operasi mereka ketika kudeta—juga telah disurvei. Foto-fotonya dimuat di dalam buku ini sebagai Gambar.

Perjalanan lapangan kedua ke Indonesia saya lakukan tahun 1971. Nugroho Notosusanto, yang ketika itu telah dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen dan kemudian terpilih sebagai Rektor Universitas Indonesia, merencanakan wawancara dengan beberapa anggota Tim Pemeriksa Pusat (TEPERPU) dari Brigjen A. Tahir, yang telah mendeklasifikasikan bagi saya beberapa dokumen penting berkenaan dengan kudeta tersebut, juga dimuat dalam buku ini.

Para kolega akademisi dan teman-teman di Jakarta, terutama sekali di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), banyak memberikan bantuan dalam mempersiapkan versi yang telah diperbaharui dari studi ini antara tahun 1996 hingga 1997, yang sekarang ini muncul sebagai *ANATOMY OF THE JAKARTA COUP: OCTOBER 1, 1965*. Saya ingin mengucapkan rasa terimakasih saya kepada Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, M. Hadi Soesastro, Thomas Aquinas Legowo dan Clara Joewono. Khususnya bagi Harry Tjan Silalahi karena telah membaca dan memberikan komentarnya terhadap versi yang terdahulu dari karya ini, dan kepada T. A. Legowo karena telah mempersiapkan Bibliografi.

Akhirnya terima kasih kepada John O. Sutter, PhD karena telah menulis PENGANTAR bagi buku ini. Ia seorang pengamat yang teliti dan pakar tentang kejadian-kejadian yang diterangkan dalam buku ini, terutama sekali pengetahuannya tentang the Cornell Paper yang telah ditulis oleh mantan rekan-rekan sekelasnya di universitas Amerika yang terkemuka itu.

V. M. F.



PENGANTAR UNTUK EDISI INDONESIA (TAMBAHAN SEBELUM NAIK CETAK, SEPTEMBER, 2005)

Dengan perasaan campur aduk, saya – salah seorang yang membantu mengedit edisi orisinal buku ini – menulis tambahan pengantar ini untuk edisi Bahasa Indonesia dan edisi Inggris yang diterbitkan Obor, *Anatomy of the Jakarta Coup: October 1, 1965*.

Hanya beberapa minggu setelah terbitnya edisi *hardcover*nya tahun 2004 di New Delhi India, karya ini yang butuh waktu beberapa dekade riset di Singapura dan Indonesia, dan ditulis di Kanada oleh Prof. Victor M. Fic dari Brock University di St. Chatarines, Ontario, sang penulis Dr. Fic meninggal dunia akibat stroke.

Kemudian, melalui kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia sebuah langkah penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan edisi baru Inggrisnya diupayakan untuk publik pembaca yang lebih luas baik untuk masyarakat Indonesia sendiri maupun untuk publik berbahasa Inggris di luar India.

Dengan memusatkan perhatian pada peristiwa pembunuhan yang mengerikan, *menyusul* kudeta yang gagal itu, persiapan-persiapan *sebelum* apa yang disebut GERAKAN 30 SEPTEMBER (Gestapu atau G-30-S) sering tidak diperhatikan lagi atau dianggap sepi sebagai bahan yang tak berharga untuk menjelaskan apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 yang menentukan itu. Sekarang, 40 tahun kemudian, teori-teori tentang konspirasi jahat itu masih dipandang sebelah mata. Dua kali dalam tahun ini (2005) saya menyaksikan publik yang telah disajikan – secara intensif sekali, di satu sisi, maupun digiring di sisi lain – pada suatu gambaran keliru tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di hari yang naas itu.

Saya sungguh berbahagia dapat bekerja sama dengan Obor, yang pendirinya adalah teman lama saya, jurnalis ternama Mochtar Lubis (yang meninggal tahun 2004 setelah lama menderita sakit). Koran *Indonesia Raya*

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

milik Mochtar telah dibreidel karena mengekspose korupsi di masa rezim Sukarno. (Setelah 1965 ia diperbolehkan menerbitkan kembali *IR*, akan tetapi lagi-lagi ditutup karena mengekspose korupsi di masa rezim Suharto).

“Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely” (Lord Acton, 1887).

Peringatan ini dapat diterapkan pada tiga konspirator utama di belakang Tragedi G-30-S, Aidit -Mao - Presiden Sukarno. Sayang sekali, begitu banyak pemimpin negara-negara yang baru merdeka (termasuk dua presiden pertama Indonesia yang praktis menjadi “presiden seumur hidup”) gagal untuk mencontoh sikap dan filosofi presiden pertama Amerika Serikat yang baru merdeka, George Washington. Terlepas dari popularitasnya yang demikian hebat, Washington menolak untuk tergoda pada kultus individu terhadap dirinya apalagi merasa bahwa hanya dirinya saja yang mampu mengatasi masalah-masalah bangsanya. Ia mengambil langkah lain, mengundurkan diri secara terhormat setelah delapan tahun berkuasa, dan memberi kesempatan kepada politisi lain untuk memimpin negara.

Dan di hadapan “para pakar” dan orang-orang lain yang berusaha menghindarkan atau menutup-nutupi peran Ketua PKI DN Aidit yang sangat *powerful* ketika itu, akhirnya pembaca dapat mempelajari dalam karya Dr Fic ini detail-detail peran Aidit, peran yang oleh kaum komunis Indonesia yang masih hidup tidak diungkapkan keluar.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada teman sekelas Tom Conlon di Yale Universitas tahun 1951-1952 (dulu bersama saya belajar bahasa, sejarah dan kebudayaan Indonesia); Dr. David Wurfel (Cornell); para kolega saya sewaktu di the Asia Foundation, Dr. Robert S Schwantes, Clifford L. Larsen dan William T. Fuller IV, atas bantuannya pada Mrs. Alexandra Fic dan saya dalam mempersiapkan edisi baru ini sehingga dapat dicetak.

John O. Sutter

Working for Democratic World Federation

San Rafael, California, 1 September 2005



KATA PENGANTAR

John O. Sutter

“HISTORIOGRAFI adalah: 1. Prinsip-prinsip atau metodologi studi tentang sejarah;
2. Penulisan sejarah.”

— *The American Heritage Dictionary*

Gerakan 30 September, yang disingkat GESTAPU atau G-30-S, telah menghasilkan bermacam-macam kisah tentang apa yang terjadi ketika persiapan-persiapan yang penting menuju tanggal itu dan saat terjadinya kudeta yang dicoba akan tetapi gagal itu pada 1 Oktober 1965, pada mulanya di Jakarta kemudian di bagian-bagian lain Indonesia. Bukan saja analisis-analisis yang berbeda-beda dalam perubahan besar yang terjadi dalam bulan-bulan dan kemudian tahun-tahun yang mengikutinya, namun tampaknya kisah-kisah itu marak kembali di Indonesia dewasa ini. Kebanyakan penuturan itu meninjau kisah laporan-laporan media massa yang terbit *setelah* kudeta yang gagal itu, sementara penelitian tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi sebelumnya umumnya terbatas pada desas-desus tentang sebuah Dewan Jenderal, yang gerakannya sebelum terlalu jauh, harus didahului lewat tindakan *pre-emptive* oleh PKI.

Kita beruntung memiliki Prof. Victor M. Vic yang melanjutkan studinya tentang tahun 1968 yang bersifat pionir itu dengan karyanya ini, sebuah karya, yang berdasarkan cinta, telah diselesaikan hampir empat dekade setelah peristiwa itu.

Sejumlah tulisan pakar lain yang dimaksudkan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi tanggal 1 Oktober 1965 itu bersimpati terhadap garis yang diajukan D. N. Aidit, Ketua PKI, yaitu bahwa terbunuhnya enam jenderal puncak AD semata-mata adalah “masalah intern Angkatan Darat” dan bahwa partainya tidak terlibat. Tulisan-tulisan yang menerima kebohongan Aidit ini terus

xxxv

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

bermunculan meskipun terdapat bukti sebaliknya yang selalu bertambah di dalam pers Indonesia, di dalam kesaksian-kesaksian di depan Mahkamah Militer Luar-Biasa (MAHMILLUB), dan bahkan juga dalam kritik-kritik yang ditujukan kepada Aidit oleh para aktivis PKI yang masih hidup di dalam dan di luar negeri tentang kesalahan-kesalahan penggerak utama di belakang GESTAPU itu, yaitu kepemimpinan elite partai mereka.

Profesor Fic, yang pernah menjadi Ketua Departemen Ilmu Politik di Nanyang University di Singapura dan Direktur dari Pusat Penelitiannya untuk Asia Tenggara, yang diberi akses untuk melihat sumber-sumber koleksi primer yang berharga tentang Indonesia di Institute of South East Asian Studies (ISEAS) di Universitas Singapura, heran mengenai apa yang terjadi di negara tetangga raksasa di sebelah selatan itu dan mulai mencari jawabannya. Namun pertama-tama, apa saja yang pernah ditulis pakar lain itu?

“Show me”: Motto dari Negara-Bagian Missouri

Bagaimana saya sebagai seorang penduduk asli Missouri yang skeptis masuk ke dalam gambar itu? Nah, hampir sepanjangi tahun 50-an, saya sudah tiga kali datang ke Indonesia untuk belajar dan menulis tentang “tanah-air saya yang kedua” ini, yang mencapai puncaknya dalam sebuah disertasi berjudul *Indonesianisasi*, sebuah sejarah ekonomi politik negara itu. Dan dalam banyak tahun di era 60-an saya bekerja di Federasi Malaya dan di Malaysia yang baru saja didirikan itu, termasuk tinggal sebentar di Borneo Malaysia. Di sana saya menjadi sadar tentang penetrasi atau subversi orang-orang Komunis Cina terhadap semua negara tetangga Cina, termasuk Malaya dan Singapura (di mana penetrasi itu dapat dicegah pada waktu yang tepat) dan Sarawak. Lagi pula, ketika saya tinggal sebentar di Borneo antara tahun 1963-1965, politik *Konfrontasi* yang digelegarkan oleh Soekarno/Subandrio/Aidit adalah sangat jelas.

Kemudian, karena saya lalu bekerja di San Francisco ketika terjadinya kudeta yang gagal itu, maka saya mengambil keuntungan dari koleksi Indonesia di Universitas California—Berkeley, mencoba untuk mempelajari lebih banyak tentang masalah itu. Bulan Desember 1965, saya berbicara tentang *Konfrontasi* di World Affairs Council di San Francisco, dan dalam bulan Juni 1966 tentang “The Anglo-Malaysian, Sino Indonesian Controversy” pada peresmian Asian Studies on the Pacific Coast (ASPAC).

xxxvi

Kata Pengantar

Dalam pada itu, Profesor Robert Scalapino, Editor *Asian Survey* (yang telah bertemu dengan saya di Jakarta tahun 1954 sebelum membawa sekelompok mahasiswa pascasarjana untuk ikut dalam perjalanan saya menelusuri sepanjang pulau Sumatra) meminta saya untuk mempersiapkan sebuah makalah untuk diterbitkan. Karena merasakan adanya hubungan antara konfrontasi eksternal pihak Indonesia dengan negara-negara tetangganya yang non-komunis bekerjasama dengan Cina dan konfrontasi dalam negeri menentang para pemimpin dan organisasi yang moderat dan non-komunis yang mencapai puncaknya pada peristiwa GESTAPU, dan karena kurang sekali tulisan-tulisan ilmiah dalam topik yang terakhir, maka saya mempersiapkan sebuah makalah yang berjudul “Two Faces of Konfrontasi: ‘Crush Malaysia’ and ‘GESTAPU’” [Dua Wajah *Konfrontasi*: ‘Ganyang Malaysia’ dan *GESTAPU*],” yang diterbitkan oleh *Asian Survey* dalam bulan Oktober 1966. Meskipun saya terus mengumpulkan bahan-bahan sebelum kembali bekerja di Malaysia dan kemudian di Indonesia, saya tidak pernah memiliki waktu untuk menghasilkan sebuah buku tentang masalah itu. Untunglah, Profesor Fic menyediakan waktunya.

“Cornell Paper”

Meskipun terdapat cukup banyak pakar spesialis tentang Indonesia di perguruan tinggi Amerika, terutama sekali di Cornell University, di mana saya mendapatkan gelar doktor, saya kaget sekali hampir-hampir tidak ada yang pernah mereka terbitkan—sekurang-kurangnya kalau ada, tidak secara terbuka. Apa yang memang muncul tampaknya telah dibangun dengan tesis *a priori* yang mengatakan bahwa Komunisme yang totalitarian itu pada tahun 1965 merupakan “gelombang masa depan,” bukan saja dalam hal Uni Soviet yang semakin agresif di bawah Brezhnev dan di bawah Maoisme yang menindas di Cina dengan Revolusi Kebudayaannya, tetapi juga di Indonesia, yang merupakan tempat tinggal Partai Komunis terbesar ketiga di dunia.

Berbicara di World Affair Council bulan Oktober 1965, mantan rekan sekelas saya di Cornell, Daniel Lev, yang ketika itu berada di Universitas California—Berkeley, mengatakan bahwa PKI mungkin sekali *tidak* terlibat dalam kudeta yang gagal itu, dan bahwa tajuk rencana dalam surat kabar PKI, *Harian Rakjat*, tanggal 2 Oktober yang mendukung GESTAPU mungkin sekali tidak mencerminkan kebijakan elite kepemimpinan PKI tetapi hanya

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pandangan dari beberapa anggota partai yang lebih muda yang bekerja di surat kabar itu—suatu kesimpulan yang aneh tentang cara kerja sebuah partai otoriter yang besar itu. Ketika Lev menulis tentang kejadian-kejadian tahun 1965 di Indonesia untuk *Asian Survey* (Februari 1966), ia tidak hanya menolak bahwa PKI berada di belakang *kudeta* yang gagal itu, tetapi juga menolak bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam perencanaannya. Sebagai peserta diskusi makalah saya di Konferensi ASPAC itu, ia mempermasalahkan beberapa hasil pengamatan saya. Ketika seorang anggota yang hadir bertanya kepadanya tentang sumber-sumber yang dia pakai, Lev menjawab bahwa ia telah menerima pesan-pesan dari Indonesia, termasuk dari para anggota PKI, yang menolak bahwa partai mereka ada hubungannya dengan GESTAPU.

Di Cornell, the Modern Indonesia Project kadang-kadang mengeluarkan *Interim Reports* (Laporan-Laporan Sementara), untuk mana profesor saya yang tua itu, Project Director George McT. Kahin, telah menulis sesuatu yang kedengarannya seperti sebuah undangan untuk tinjauan kritis sesama koleganya:

“Kami berharap bahwa *Laporan Sementara* kami ini akan mendapat kritik yang terus-terang dan terbuka dari orang-orang yang tertarik membacanya. Karena kami percaya bahwa dengan demikian kami akan mendapat manfaat, dan bahwa dalam banyak hal, kritik-kritik seperti itu akan menunjukkan jalan kepada analisis data-data yang lebih baik yang kami miliki dan/atau penelitian selanjutnya tentang segi-segi permasalahan itu yang sebegitu jauh belum diliput secara memadai.”

Dalam pada itu, para ilmuwan di Cornell serta para alumni telah mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan sejak GESTAPU, dan pada Januari 1966 hasil penelitian mereka diterbitkan dalam sebuah buku tebal yang berjudul *The Coup of October 1, 1965*. Dua peneliti utama terlibat dalam penulisan laporan itu. Yang pertama adalah Dr. Ruth T. McVey yang telah bercerita pada saya di Manila bagaimana kegembiraannya mengajar di Akademi Ilmu Sosial Aliarcham milik PKI di Jakarta, di mana para kadernya sedang dilatih dalam administrasi pemerintahan sebagai persiapan untuk menjalankan pemerintahan setelah PKI merebut kekuasaan. Peneliti yang kedua adalah Benedict R. Anderson yang karena keahliannya dalam bahasa Jawa, telah memberikan hasil itu suatu piagam ilmiah (patina) dengan menghiasinya dengan kutipan dari buku *Nagarakertagama* tulisan Prapantja.

Kata Pengantar

Orang-orang yang menghasilkan apa yang akan terkenal dengan nama “Cornell Paper” itu hanya mengulang kembali pernyataan elite PKI bahwa GESTAPU — sebuah istilah yang dihindari dalam paper itu — adalah semata-mata masalah intern AD, hanya merupakan sebuah konspirasi di dalam kalangan para perwira lapangan yang merasa tidak puas, terutama sekali dari Jawa Tengah.

Namun, berbeda sekali dari kebijakan untuk tinjauan kritis sesama kolega yang dikemukakan Profesor Kahin, dan bertentangan dengan persyaratan akademis yang objektif, maka “Cornell Paper” itu tampaknya seperti sebuah dokumen pemerintah yang sangat rahasia. Ia diberi stempel “STRICTLY CONFIDENTIAL,” dan masing-masing copynya—hanya untuk dibaca oleh para penerima yang telah dipilih secara teliti—dengan diberikan nomor kodenya sendiri. Meski para penulis itu mendorong para pembaca untuk menggunakan informasi yang telah dimuat di dalam Paper itu seluas-luasnya, namun para pembaca diperingatkan untuk tidak mengutip sumber atau merujuk dalam bentuk apa juga kepada risalah itu! Sayang sekali, saya bukan merupakan salah seorang dari mereka yang terpilih, dan permintaan saya untuk sebuah buku kepada para penulisnya, teman-teman sekelas saya dulu, diterima dengan diam seribu bahasa.

Di antara para pembaca yang dipercayai dan terpilih itu adalah para pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang berada dalam posisi untuk mempengaruhi kebijakan Amerika terhadap Indonesia, yang beberapa di antaranya mungkin telah terdorong untuk menerima sudut pandang Paper itu, dan salah seorang daripadanya, yang dulu pernah bekerja bersama saya di Kementerian itu menolak untuk membiarkan saya melihat copynya dengan alasan bahwa Paper itu bersifat rahasia! Dalam kenyataan, salah seorang penulis telah membrieffing para pejabat Kementerian itu dan meyakinkan mereka bahwa GESTAPU hanyalah sebuah masalah intern Angkatan Darat Indonesia. Mungkin dengan melupakan peribahasa lama bahwa ‘power can corrupt’, termasuk orang-orang Komunis itu sendiri, maka dia dengan berapi-api menyatakan bahwa “PKI is incorruptible!”

Bagi orang awam yang bukan spesialis, orang biasa yang tidak mempelajarinya secara mendalam, namun mungkin perlu memberikan kuliah atau menulis tentang masalah-masalah Indonesia, maka sebuah versi yang lebih pendek dari Cornell Paper telah disediakan, yang berfungsi lebih jauh untuk mengaburkan fakta bahwa PKI-lah yang telah menjadi dalang percobaan kudeta 1 Oktober 1965 itu. Tidak lama kemudian, cabang-cabang “anti-fascist” yang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

lebih keras muncul dalam publikasi-publikasi Marxis Belanda dan the *New Left Review*, yang diterbitkan di London oleh saudara laki-laki Ben Anderson yaitu Perry, namun dengan sebuah artikel yang dikatakan berasal dari Lucien Rey, yang tidak pernah bermaksud untuk menjadi seorang pakar tentang Indonesia dalam tulisan-tulisannya yang lain kepada majalah itu.

Tambahan: Lampiran-lampiran dalam Cornell Paper itu berisikan terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa Inggris yang luar biasa baik tentang sejumlah pengumuman/dekrit GESTAPU yang paling awal, dan untunghlah bahwa hal-hal ini tidak dirahasiakan dari para pakar dan publik yang merasa tertarik. Stensilan-stensilan serupa digunakan untuk menggandakan halaman 134-142, ketika terbitan yang pertama kali dari publikasi Cornell yang baru, *Indonesia*, yang muncul dalam bulan April 1966.

Bagian selanjutnya dari penelitian yang mendalam oleh Dr. McVey diterbitkan tahun 1967 dalam *A Preliminary Excursion Through the Small World of Lt. Col. Untung*, sebuah buku setebal kira-kira 145 halaman dengan ukuran cukup lebar yang memuat rincian dari data-data tentang para perwira AD yang diperoleh dari pers Indonesia pada umumnya *sebelum* kudeta. Lagi pula, dorongan untuk kerahasiaan menyebabkan timbulnya peringatan berikut di dalam catatan halaman cover-nya bagi para pembaca pilihan: “Jika ada poin-poin informasi yang ingin Anda kutip tanpa merujuk kepada sumber ini, mungkin sekali yang paling baik dilakukan adalah dengan merujuknya sebagai sebuah komunikasi dengan saya.” Dengan demikian, para penulis selanjutnya, seperti Rex Mortimer, dapat menggunakan sumber ini dalam karya-karya mereka.

Secara berangsur-angsur, keberadaan Cornell Paper itu mulai bocor. Ketika Profesor Kahin mengunjungi Indonesia tahun 1967, ia menemui Nugroho Notosusanto, yang sebelumnya telah menyebutkan bahwa Paper itu telah didanai oleh Modern Indonesia Project kepunyaan Kahin. Kahin mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan buku itu, sambil tertawa dan mengatakan kepada Nugroho bahwa hal itu hanyalah sebuah *kinderachtigheid* (“kekanak-kanakan” atau “sophomoric”), namun menolak permintaan Nugroho untuk membuat sebuah pernyataan pers guna mengklarifikasi masalah itu.

Sebuah kritik yang lebih luas atas Cornell Paper muncul pada tahun 1969 dalam buku *The Communist Collapse in Indonesia* oleh Arnold C. Brackman.

Akhirnya pada tahun 1971, lama setelah Cornell Paper itu dibagi-bagikan kepada para pendukung setia dan pada gilirannya juga dibocorkan kepada orang

Kata Pengantar

lain, maka Profesor Kahin menjadikannya tidak rahasia lagi (*declassified*), dan secara resmi diterbitkan dalam serial Interim Reports dari Projectnya itu. Cetakan ulang itu tampak seperti aslinya, namun ungkapan “STRICTLY CONFIDENTIAL” yang dicapkan dan nomor-nomor kode di seluruh buku telah diganti hanya dengan kata “CONFIDENTIAL” saja di kulitnya. Namun, prakata Dr. Anderson yang panjangnya dua halaman itu telah dihilangkan. Ia menyinggung Negarakertagama dan Mahabharata dengan kata mutiara berikut:

“Hanya 600 tahun saja kemudian, maka para keturunan Prapantja jelas sekali telah memulai tugas mengelaborasi sebuah legenda baru—tentang sebuah Majapahit Raya baru, dan dengan sekali lagi (syukurlah!) sebuah despotisme yang dirahmati Tuhan ... “ dan [Dengan menunjuk kepada Pandawa], “korban-korban kekerasan, pengkhianatan dan kekejaman dari Kurawa yang tidak beruntung itu ... mereka dipaksa untuk bergerak di bawah tanah, kemudian bersembunyi di hutan-hutan atau pergi dengan menyamar ke negeri-negeri asing. Namun giliran mereka pada akhirnya pasti akan datang, ketika dengan bantuan sekutu-sekutu yang bersahabat di luar negeri, mereka akan menyusun kekuatan mereka yang telah diperbaharui, dan bertempur sekali lagi dengan para pencaplok yang kotor dan angkuh itu” dan mencapai kemenangan.

Cukup sekian untuk “unbiased and objective scholarship [keilmiahan yang tak berbias dan objektif]” dari Cornell Paper itu.

Nugroho Notosusanto

Dalam pada itu, di bulan Desember 1965, kepala Pusat Sejarah ABRI, Drs. Nugroho Notosusanto (mantan wakil Rektor untuk Kemahasiswaan di Universitas Indonesia) menerbitkan sebuah studi yang berjudul *40 Hari Kegagalan “G.30.S”*, masih tetap dengan foto-foto para patron — yang wajib dilakukan — di halaman-halaman depan, dimulai oleh Yang Mulia Bung Karno, “Presiden (Seumur Hidup), Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan Pemimpin Besar Revolusi” bahkan pada saat kultus individunya telah mulai meredup. Dengan meminta maaf karena tergesa-gesanya buku itu ditulis, Nugroho menamakan buku itu sebagai “draft pertama,” yang diharapkan pada akhirnya akan diiringi oleh sebuah buku yang lebih baik, sebuah karya yang lebih definitif. Ia selanjutnya memberikan pokok-pokok dari kejadian GESTAPU, sebagaimana dikenal sampai saat itu, dan tentang keterlibatan PKI dan sejumlah perwira militer yang disogok, termasuk mereka yang berada di Jawa Tengah.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Setahun kemudian, sebuah penuturan yang telah diperbaharui dalam bahasa Inggris yang ditulis bersama dengan Ismail Saleh dibuat draftnya, dengan judul *The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia*, di mana penulis berdua itu mampu mengemukakan bukti-bukti yang terkandung di dalam protokol interogasi dan kesaksian-kesaksian dari MAHMILLUB. Semuanya ini memberikan rincian tentang PKI yang mendirikan Biro Khusus pada tahun 1964, sebuah badan rahasia untuk melakukan penetrasi, memberikan indoktrinasi dan mengorganisir para perwira menengah Angkatan Bersenjata, dan tentang kegiatan-kegiatan Ketua Aidit, yang mengembangkan rencana untuk melakukan serangan *pre-emptive* yang melibatkan para “perwira progresif-revolusioner” dalam pelaksanaannya. Meskipun menyebutkan upaya-upaya Presiden Sukarno untuk menutup-nutupinya setelah percobaan GESTAPU yang gagal, namun buku itu tidak membicarakan keterlibatan Sukarno yang sesungguhnya memang ada dalam konspirasi sebelum tanggal 30 September itu. Akhirnya pada tahun 1968, Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur telah mencetak manuskrip itu dan menyebarkannya dalam Conference on Asian History yang diadakan di kota itu bulan Agustus tahun itu. Selanjutnya, Nugroho banyak sekali membantu para ilmuwan lain yang mengadakan penelitian tentang GESTAPU, dengan menyediakan bagi mereka bahan-bahan arsip yang jika tidak demikian tidak dapat mereka peroleh.

Dari TAKARI sampai GESTAPU

Bersamaan dengan peninjauan kembali tentang apa yang terjadi pada dan setelah tanggal 30 September 1965, selain Victor Fic—yang kemudian mendapatkan banyak informasi penting mengenai apa yang telah terjadi *di belakang layar* atas diri Soekarno, Aidit dan lain-lain—yang sangat mengherankan adalah sangat sedikit yang ditulis orang tentang aktivitas-aktivitas *publik* dari PKI dan Soekarno sebelum tanggal itu, yang sudah begitu jauh dalam mempersiapkan pentas bagi kudeta yang sesungguhnya itu.

Di sepanjang tahun 1965 dan sampai tanggal 30 September, Pemimpin Besar Revolusi, Presiden — dan juga — Perdana Menteri Soekarno, perdana menteri *de factonya* adalah Wakil Pertama Perdana Menteri I (Waperdam I) Subandrio, dan para pengikutnya di Partindo, dan sayap pro-komunis Ali-Surachman dari PNI, bersekongkol dengan Aidit cs di PKI dan afiliasinya dan

Kata Pengantar

organisasi-organisasi *underbow*-nya, melancarkan suatu kampanye penyebaran rasa kebencian yang mendalam dengan serentetan serangan frontal maupun secara tidak langsung terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh. Mereka yang dimusuhi itu adalah kaum intelektual demokratis, para mahasiswa, kaum nasionalis dan orang Islam moderat, di samping para perwira senior AD, yang dicap sebagai “*kabir* (kapitalis-birokrat yang mengacu pada kelompok veteran AD yang mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda setelah dinasionalisasikan tahun 1959), maling dan koruptor” yang harus dienyahkan. Namun, para perwira senior AD yang *Soekarnoist* dikecualikan dari pembunuhan.

Dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus yang sebagian ditulis oleh Wakil Ketua II PKI Njoto dan berjudul “TAKARI,” Presiden Soekarno menyerang “para koruptor dan kaum kontra-revolusioner”. Golongan orang-orang yang “ditembak” secara tidak langsung itu ialah Jenderal A. H. Nasution, Menko Hankam/KASAB. Bahkan pada saat itu Soekarno dan Aidit telah bersekongkol untuk menetralsir perlawanan terhadap tindakan-tindakan mereka yang semakin totaliter dengan jalan mengeliminir lawan-lawan politik mereka yang kuat. Dengan dalih untuk memukul kaum militer dan kaum reaksioner, Aidit telah membuat dan menyebarkan desas-desus bahwa sebuah “Dewan Jenderal” sedang bersiap-siap untuk menggulingkan Presiden dan merebut kekuasaan, sambil mengusulkan agar ancaman terhadap negara ini harus digagalkan dengan tindakan rakyat yang memukul lebih dahulu.

Dalam minggu terakhir bulan September 1965, perang psikologis yang sangat tajam dalam menentang kaum oposisi moderat—yang dikobarkan oleh Aidit/Soekarno/Subandrio dan para pengikut mereka—telah mencapai tingkat puncak kesibukannya. Hal itu dimulai dengan markas besar Front Pemuda Rakyat yang dikuasai kaum Komunis dan Soekarno. Para pembicaranya memanggil pemuda-pemuda untuk dibimbing oleh pidato TAKARI Soekarno, dan bersiap-siap untuk melancarkan aksi-aksi massa revolusioner, bersama dengan alat-alat revolusi yang patriotik, menyeret para koruptor, *kabir*, pencuri dan penipu ke tiang gantungan atau ditembak di depan umum. (Apakah ini petunjuk bagi peristiwa Lubang Buaya?). Pada hari Sabtu, tanggal 25, pada sebuah Kongres *Sarbupri*, serikat buruh tani yang dikuasai kaum Komunis, Aidit dengan suara yang makin lantang menyerukan para anggotanya untuk bersiap-siap melaksanakan perintah Subandrio untuk merebut perkebunan-perkebunan dari para *kabir*, pencuri dan koruptor, dan menghancurkan setan-setan itu sesuai dengan pidato TAKARI Presiden.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Hari Senin, tanggal 27, Subandrio dan Aidit, dalam sebuah rapat umum IPPI— sebuah perkumpulan pelajar sekolah menengah yang dikuasai PKI— memanggil mereka untuk ikut membantu mengganyang musuh-musuh revolusi, “setan-setan kota”—lagi-lagi *kabir*, pencuri dan koruptor. Pada hari Selasa, tanggal 28, para anggota persatuan buruh kereta-api yang komunis meminta pemerintah untuk melarang persatuan buruh kereta-api P.B.K.A. yang menjadi saingannya, dan menuduhnya sebagai sisa-sisa kontra-revolusioner dari Partai Sosialis Indonesia moderat dari Sjahrir yang telah dilarang. Pada hari Rabu, tanggal 29, sebuah rapat raksasa digelar untuk merayakan Kongres CGMI., persatuan mahasiswa yang dikuasai kaum Komunis. Di sini Aidit menyerukan untuk melarang HMI., Himpunan Mahasiswa Islam yang moderat, dan Soekarno mengancam bahwa mahasiswa yang tidak progresif-revolusioner akan disepak ke luar dari kelompok-kelompok mahasiswa dan bahwa kelompok-kelompok seperti itu akan dilarang.

Kartun Harian Rakjat

Walaupun penerbitan terakhir surat kabar Komunis *Harian Rakjat* telah disusun pada tanggal 1 Oktober 1965, namun ia baru diberi tanggal dan disirkulasikan pada keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 2 Oktober. Meskipun tafsiran Cornell Paper menyediakan banyak halaman untuk merasionalkan tajuk-rencana pendek harian itu untuk mendukung GESTAPU, namun para penulisnya meremehkan pentingnya deretan kartun politik yang dipertunjukkan di sepanjang bagian bawah halaman depannya yang menggambarkan peristiwa-peristiwa revolusioner di minggu yang baru saja berakhir itu. Meskipun disebutkan pada halaman 143 bahwa Paper itu memuat kembali kartun-kartun hanya untuk akhir minggu itu saja—dan tidak memasukkan semua kartun itu untuk seluruh minggu sehingga memperlihatkan mengerasnya secara berangsur-angsur sampai kepada *putsch* itu—pastilah telah terjadi pemikiran-ulang tentang kebijaksananya melakukan hal tersebut, karena tidak ada kartun itu yang diterbitkan kembali. Hal ini patut disayangkan, karena “sebuah gambar sama nilainya dengan seribu kata.”

Kartun-kartun politik ini memperlihatkan serentetan keberhasilan yang telah didapat kaum Komunis atas musuh-musuh dalam minggu itu, sebagaimana telah disebutkan di atas. Kartun hari Senin memperlihatkan seorang mahasiswa IPPI menyepak kepala “setan kota”. Kartun hari Selasa

Kata Pengantar

memperlihatkan kereta-api P.B.K.A. telah keluar dari relnya. Kartun hari Rabu sebuah tangan C.G.M.I. yang kuat menikamkan sebuah pisau belati pada lengan seorang anggota H.M.I. (yang memakai ban lengan C.I.A.). Kemudian hari Kamis-Jumat (30 September-1 Oktober), kartun itu memperlihatkan sebuah kepala tinju yang perkasa “Gerakan 30 September” menghantam seorang tokoh yang menggambarkan Dewan Jenderal yang didukung C.I.A., penuh dengan dollar Amerika, dan Paman Sam yang kaget. Kartun itu mau mengatakan bahwa Komandan TjakraBirawa Untung telah menyelamatkan Presiden dan Republik dari sebuah kudeta Dewan Jenderal.

Akhirnya, pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober—hanya beberapa jam saja setelah enam orang jenderal AD menghilang, yaitu diculik, disiksa, dibunuh dan dimasukkan ke dalam Lubang Buaya—gambar kartun yang tampil memperlihatkan dua jenderal yang tampaknya seperti Yani dan Nasution sedang dilemparkan ke dalam jurang. Karena hanya para anggota konspirator sajalah yang tahu siapa-siapa saja yang masuk dalam daftar para jenderal yang akan dihilangkan, maka agaknya terlalu cepat bagi *Harian Rakjat* untuk memperlihatkan habisnya Jenderal Nasution.

Dengan demikian, salah satu dari banyak kekurangan para penulis Cornell Paper itu adalah alpanya mereka untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting di Indonesia yang terjadi hanya seminggu saja sebelum kudeta tanggal 30 September. Penghilangan apa saja yang berhubungan dengan perkembangan situasi minggu itu—yang seluruhnya diliput dalam pers Indonesia—tampaknya jelas memperlihatkan bahwa monograph Cornell itu bukanlah sebuah analisis ilmiah yang tidak berbias, akan tetapi mungkin memiliki agendanya sendiri.

Victor M. Fic

Sejak tanggal 5 sampai 10 Agustus 1968 Internasional Conference on Asian History digelar di Universitas Malaya di luar Kuala Lumpur. Ia dibuka dalam suatu suasana yang amat suram, karena suatu “gelombang masa-depan” totalitarian yang seolah tak dapat dihentikan tampaknya sedang terus mendesak maju—seperti Mao Tse-tung dan Para Pengawal Merahnya melancarkan Revolusi Kebudayaan membersihkan para anggota partai yang tidak cukup radikal, atau seperti kekuatan Soviet dan Pakta Warsawa di bawah Leonid Brezhnev yang pada bulan yang sama menghancurkan “Musim Semi Praha” yang reformis itu. Adalah menarik sekali sekaligus menyedihkan, melihat

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

seorang akademisi wanita Czeko datang dari Oriental Institute di Praha untuk mempresentasikan sebuah makalah tentang drama Indonesia. Seorang warga Czeko lain yang hadir adalah Victor M. Fic, yang telah mengalami penderitaan hidup di bawah belenggu Nazi dalam Perang Dunia II dan kemudian di bawah kaum Stalinis setelah mencaplok kekuasaan dalam bulan Februari 1948, dan Fic berhasil meloloskan diri dari penjara pada tahun 1949.

Pada hari pertama Konferensi itu, Profesor Fic yang datang dari Singapura, di mana ia mengajar mata kuliah ilmu Pemerintahan dan Politik di Asia Tenggara dan mata kuliah lain dalam ilmu politik, mengagetkan peserta konferensi dengan makalahnya—yang terpanjang dalam konferensi itu—“THE SEPTEMBER 30 MOVEMENT IN INDONESIA, 1965: A Gambler That Failed”, [Gerakan 30 September di Indonesia: 1965—Sebuah Perjudian yang Gagal]. Sebegitu jauh inilah analisis terbaik dan paling mencerahkan tentang GESTAPU sampai saat itu, karena lebih banyak detail yang tersedia baginya sejak tahun 1965, yaitu: (1) bukti-bukti yang dikemukakan di depan pengadilan MAHMILLUB yang dimulai tahun 1966 tentang kegiatan-kegiatan Aidit, Sjam dan Biro Khusus PKI; kegiatan Presiden Soekarno dan Subandrio; dan kegiatan Omar Dhani, Supardjo dan perwira-perwira militer lain yang diarahkan oleh PKI yang telah ikut dalam GESTAPU; dan (2) banyaknya kritik terhadap strategi Aidit yang berasal dari orang-orang PKI yang masih hidup di Jawa, Peking, Moskow, Paris, Amsterdam, Praha, Tirana, Havana dan tempat-tempat lain.

Sayang sekali, kebanyakan peserta konferensi tidak bisa membaca makalah Fic itu terlebih dahulu, dan Dr. Fic hanya diberi waktu beberapa menit saja untuk menyinggung beberapa poin utama analisisnya tentang peran Aidit yang penting. Maka tak heran, tanpa membaca makalah Fic, maka Jeremo Brass dari Universitas California-Berkeley, Harry Benda dari ISEAS di Singapura (yang pada suatu kali pernah berpendapat bahwa kediktatoran Soekarno di bawah “Demokrasi Terpimpin” lebih sesuai dengan kejiwaan Indonesia dibandingkan dengan demokrasi liberal) dan Jaimie Mackie dari Australia, semua mereka menolak untuk menerima analisis Fic itu.

Namun adalah W. F. Wertheim, seorang Belanda pakar Sosiologi Marxis, yang menyerang paling bertubi-tubi posisi Fic itu. Ia mengulang-ulang pendapatnya yang pada saat itu sudah usang bahwa “kudeta Untung” itu hanyalah masalah intern Angkatan Darat sesuai artikelnya yang pernah dimuat dalam majalah *Pacific Affairs* terbitan musim semi-musim panas tahun 1966 (yang diterbitkan jauh kemudian), yang menjadi penting karena kurangnya sumber-sumbernya untuk “kudeta Untung” itu, dengan hanya mengutip Daniel

Kata Pengantar

Lev, Rey dan “seorang penulis yang tidak mau menyebutkan namanya” sejalan dengan penafsirannya yang naif dan mencerca saya karena penuturan saya tentang kejadian-kejadian itu. Ia juga mengeritik Fic, mengatakan bahwa pengadilan militer alias MAHMILLUB hanya “dibuat-buat saja,” dan monograf Fic itu sebegitu jauh hanyalah sampah. Dr. Sartono Kartodirdjo, sejarawan Indonesia yang terkenal itu yang juga ikut hadir dalam konferensi, menyatakan kepada saya rasa kecewanya dengan mantan guru-besarnya itu, yang seringkali membuat penafsirannya sendiri tentang Marxisme ke dalam analisis-analisisnya, memutar-balikkan fakta, dan membuat terlalu banyak generalisasi dari data-data yang secara relatif terpisah-pisah dan sedikit jumlahnya.

Tahun 1967, saya memang kembali bekerja di Malaysia, kali ini sebagai Perwakilan Asia Foundation, hal ini memberi saya kesempatan untuk ikut-serta dalam Konferensi on Asian History tersebut, untuk berdebat dengan Wertheim, dan bertemu dengan Dr. Victor Fic. Kami selalu berhubungan untuk beberapa lama, kemudian kami pergi menempuh jalan kami masing-masing. Untunglah, setelah pindah ke Canada tahun 1971, setelah ia mendirikan studi-studi graduate dalam Ilmu Politik dan Program Studi-Studi Asia, Dr. Fic memperluas monograf awalnya itu menjadi karya yang sangat rinci yang sekarang Anda baca ini. Sumber-sumber primer luas yang telah dikumpulkannya dalam beberapa kali perjalanan lapangannya ke Indonesia, dan wawancaranya dengan beberapa pelaku langsung dalam peristiwa-peristiwa ini, menjadikan bukunya ini sebuah karya yang kurang lebih definitif tentang pokok itu. Dr. Fic bukan saja menjelaskan “anatomi” *kudeta* itu dan mekanikanya, tetapi juga “psikologi” para pemainnya dengan cara memperlihatkan bagaimana mereka saling berinteraksi, sehingga seolah menjadikan keseluruhan drama *kudeta* itu sebuah lakon *wayang kulit*.

Dalam kenyataannya, pertemuan terakhir pelaku-pelaku utama itu di rumah Komodor Susanto di Halim pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965, disorot seluruhnya dari segi lakon *wayang kulit Kolomongso*. Victor datang dengan peralatan lengkap untuk membedah *kudeta* tersebut, karena telah mempelajari secara mendalam baik *realpolitik* kekuatan bahan mentah Eropa dan juga aliran kekuasaan yang pelik dan bersifat mistik dalam budaya Jawa.

Dalam bulan Januari 2003, Dr. Fic menemui saya, sambil menghadiahi saya kegembiraan membaca manuskripnya dan menulis pengantar ini. Meskipun perdebatan publik mengenai siapa nenek-moyang alias dalang GESTAPU tahun 1965 itu menjadi marak di Indonesia sekarang ini pasca

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

reformasi, namun *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, yang didirikan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001 untuk memastikan kebenaran tentang kejadian-kejadian ini, bertindak baik sekali dengan memulai pekerjaannya dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di dalam buku ini.

(Red Indonesia: Dr. Fic meninggal dunia Februari 2005, beberapa saat setelah punya ide mengontak Mochtar Lubis di Yayasan Obor Indonesia untuk melihat kemungkinan penerjemahan bukunya yang penting ini ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata Pak Mochtar sudah lebih dulu berpulang, 2 Juli tahun 2004).

San Rafael, California

John O. Sutter

1 Juli 2003

PENDAHULUAN

Tanggal 1 Oktober 1965, pada pukul 07.20 pagi, Jakarta ‘dibangunkan’ oleh sebuah komunike/pengumuman lewat Radio Republik Indonesia (RRI) yang mengatakan bahwa GERAKAN 30 SEPTEMBER, atau GESTAPU,¹ yang dipimpin Letnan Kolonel Untung dari Pasukan Pengawal Presiden, Tjakrabirawa, telah mengambil-alih kekuasaan. Lebih lanjut pengumuman itu mengatakan bahwa beberapa anggota Dewan Jenderal telah ditahan karena telah bersekongkol untuk menggulingkan Presiden Sukarno yang, berdasarkan hal ini, selamat dalam lindungan Gerakan 30 September itu. Komunike itu selanjutnya mengatakan bahwa sebuah Dewan Revolusi akan segera dibentuk sebagai kekuasaan negara tertinggi, dengan cabang-cabangnya di propinsi-propinsi untuk menggantikan tatanan politik dan sosial yang lama di seluruh negeri. Pengumuman itu tidak pelak lagi menunjukkan bahwa Indonesia berada di tengah-tengah sebuah kudeta klasik.

Ada sebuah kesepakatan di kalangan para akademisi, pakar analisis dan pengamat-pengamat lain bahwa peristiwa ini, yang akibat-akibatnya masih dapat dirasakan di Indonesia sampai sekarang, adalah sebuah kejadian yang paling penting dan paling mengerikan dalam sejarah negara itu, sebuah “tragedi nasional” sejak kemerdekaannya pada tahun 1945.

Beberapa alasan dapat menjelaskan kenapa GESTAPU itu memperoleh julukan yang tidak mengenakan ini: 1) pembunuhan atas enam jenderal senior

¹ CATATAN TENTANG EJAAN: Nama orang, tempat, dan nama-nama lain yang dikutip dalam studi ini dibuat ejaannya sama dengan ejaan yang muncul dalam sumber-sumber yang digunakan; misalnya Soekarno atau Sukarno, Djakarta atau Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1972, Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia mengumumkan sebuah perubahan ejaan untuk meningkatkan penggunaan bersama dari dua bahasa nasional itu. Untuk upaya membuat sebuah kamus Indonesia-Malaysia-Inggris, lihat sebuah tulisan John O. Sutter, yang erat hubungannya dengan pekerjaan itu, berjudul “Stung by a Spelling Bee” [Disingat Seekor Lebah Ejaan], dalam S. Udin (Ed.), *SPECTRUM: Essays Presented to Sutan Takdir Alisjahbana on his Seventieth Birthday*. Jakarta: Dian Rakyat, 1978, hlm. 103-106.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

AD pada subuh tanggal 1 Oktober 1965; 2) gagalnya kudeta pada pukul 11.00 siang hari itu juga, hanya 7 jam saja setelah dimulai pada pagi-pagi sekali pukul 04.00; 3) penghancuran sampai ke akar-akarnya PKI yang tadinya amat berkuasa, sebagai suatu kekuatan politik dan ideologis yang, dirasakan sebagai agen kekuatan asing, yang telah membanggakan diri mendapat dukungan dari 18 juta anggota dan simpatisannya; 4) jatuhnya Presiden Sukarno dari puncak kekuasaan tanggal 11 Maret 1966; 5) pembunuhan massal yang menimpa bangsa itu sebagai ‘ganti-rugi’ kepada Angkatan Darat (AD) yang terlukai, dan pembalasan dendam orang-orang yang ingin membalaskan dendam pribadi lama, suatu perkiraan yang dikatakan mencapai sejuta orang korban;² 6) naiknya militer, khususnya AD, ke atas panggung kekuasaan dan mendominasi seluruh lini kehidupan: politik, ekonomi, dan sosial-budaya di negara itu selama 32 tahun, mulai sejak Maret 1966 sampai jatuhnya rezim Suharto Mei 1998; 7) warisan pemerintahan militer yang, antara lain, menghalangi upaya Presiden Megawati untuk melakukan sebuah transisi kepada demokrasi pluralistik dalam masyarakat sipil di Indonesia.

TIGA TEORI TENTANG ASAL-USUL GESTAPU

Kepustakaan tentang asal-usul GESTAPU dan tujuan-tujuannya sudah banyak sekali. Karya-karya yang paling penting diberikan daftarnya di Bibliografi, dan semuanya ini dapat dibagi dalam tiga kategori penafsiran utama.

Penafsiran yang pertama mengatakan bahwa asal-usul GESTAPU itu harus dilihat pada polarisasi yang mendalam di kalangan AD tentara Indonesia pada tahun 1965, di mana para perwira “progresif-revolusioner” yang muda-muda dan yunior memukul para komandan puncak “reaksioner” dari AD itu yang telah bersekongkol dengan pihak asing untuk menggulingkan Presiden Sukarno karena kebijakan-kebijakan progresifnya. GESTAPU itu adalah seluruhnya “masalah intern Angkatan Darat” yang sedang gelisah itu, sedang PKI hanya memainkan peran tambahan saja, mengambil keuntungan dari perkembangan-perkembangan tersebut dengan jalan mendukung mereka yang progresif-

² Hermawan Sulistyono telah membuat tabulasi tentang berbagai perkiraan jumlah korban pembunuhan massal itu dalam karyanya yang berjudul *Palu Arit Di Ladang Tebu*. (The Hammer and Sickle in the Sugar Cane Field). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000, hlm. 44-46.

Pendahuluan

revolusioner.³ Namun, perintah Presiden Sukarno untuk membersihkan komando puncak AD yang diberikan kepada Untung pada tanggal 4 Agustus 1965, tiga rapat Politbiro PKI dalam bulan Agustus 1965 untuk secara *pre-emptive* melakukan kudeta sebagai sebuah jalan pintas untuk langsung memegang kekuasaan, penetrasi PKI ke dalam tubuh Angkatan Bersenjata melalui kegiatan-kegiatan Biro Khususnya sejak tahun 1964, dan kemudian mendirikan “Komando Pembersihan [Purge Command]” di bawah Untung yang komposisinya dengan tepat sekali terdiri dari para perwira revolusioner untuk memotong kepala Angkatan Darat, yang semuanya dimuat dokumentasinya di dalam buku ini, menjadikan teori Cornell Paper itu tidak masuk akal.

Teori yang kedua berpendapat bahwa GESTAPU itu direncanakan oleh suatu konspirasi bersama Inggris-Amerika untuk menghentikan lajunya Indonesia ke arah komunisme dengan menggulingkan Presiden Sukarno dan menghancurkan PKI. Teori ini menuduh bahwa pihak Inggris, namun di atasnya lagi Amerika, telah mendorong “teman-teman” mereka di jajaran puncak AD Indonesia untuk melakukan sebuah kudeta militer guna mencapai

³ Asal-usul teori ini adalah “Cornell Paper”, yang ditulis oleh Benedict R. O’G. Anderson dan Ruth T. McVey, yang berjudul *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1971. Paper ini pertama kali disiarkan sebagai sebuah studi pribadi dan penulis ini memperoleh satu copy dari Profesor Harry J. Benda tahun 1969.

Setelah gagalnya kudeta itu, PKI melakukan sebuah upaya untuk memakai beberapa orang akademisi terkemuka di Amerika Serikat dan di tempat-tempat lain untuk mempertahankan status hukumnya dengan menyebar-luaskan disinformasi Aidit yang mengatakan bahwa GESTAPU itu seluruhnya adalah masalah intern Angkatan Darat, di mana PKI tidak memainkan peran apapun di situ. Sebelum kudeta itu di tahun 1965, Dr. Ruth McVey menjadi seorang dosen tamu pada Institute Aliarcham untuk Ilmu-Ilmu Sosial kepunyaan PKI, di mana partai itu melatih para kadernya dalam administrasi negara agar mampu menjalankan lembaga-lembaga negara itu setelah berhasil memperoleh kekuasaan. Banyak pemimpin PKI mempunyai hubungan pribadi dengan para akademisi terkemuka spesialis Indonesia di Amerika Serikat, Negeri Belanda, Australia, dan di tempat-tempat lain. “...tanggal 20 November 65 sebuah ‘*Appeal of the Committee for the Defence of the PKI [Seruan dari Komite untuk Mempertahankan PKI]*’ telah diterbitkan di Djakarta, yang diterbitkan kembali dalam sejumlah organ komunis di luar-negeri yang menegaskan bahwa PKI sama sekali tidak bersalah dan mengucapkan terimakasih kepada kelompok-kelompok para sahabat di luar-negeri atas bantuan dan dukungannya. Secara tak disengaja, teman saya seorang perwira (AD) Indonesia mengatakan kepada saya tentang sebuah laporan yang menyatakan bahwa Njoto telah menulis kepada beberapa orang teman di Cornell di akhir tahun 1965 meminta dukungan mereka. (Apakah ada benarnya laporan ini, terus-terang saya tidak mengetahuinya.)” John O. Sutter dalam suratnya kepada Arnold Brackman tanggal 27 Maret 1969. Lihat juga KATA PENGANTAR Sutter untuk buku ini tentang Cornell Paper.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

tujuan-tujuan mereka.⁴ Saripati teori ini mempertahankan bahwa dengan jalan mendorong, atau sekurang-kurangnya membantu mendorong, *kudeta* GESTAPU itu, maka sayap kanan dari tentara Indonesia punya alasan untuk menghabisi saingan-saingannya di pusat AD, dan dengan demikian melapangkan jalan untuk menghabisi kaum kiri sipil yang sudah lama direncanakan, dan pada akhirnya mendirikan suatu kediktatoran militer. Dengan kata lain, GESTAPU hanyalah merupakan fase pertama saja dari “tiga fase kudeta sayap kanan”—sesuatu yang secara publik telah didorong dan secara rahasia dibantu oleh para juru-bicara dan pejabat Amerika. Akan tetapi, dokumen-dokumen CIA dan lain-lain yang sudah tidak dirahasiakan lagi (*declassified*) dan diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2001, dan dilampirkan dalam studi ini sebagai DOKUMEN No. 18 dan No. 19, menjadikan teori Scott itu tidak masuk akal, karena CIA, atas pengakuannya sendiri, tidak mempunyai aset-aset alias sumberdaya di Indonesia untuk melakukan “kudeta” secanggih itu untuk menurunkan Sukarno atau menghancurkan PKI.

Teori ketiga meyakini bahwa GESTAPU itu diatur oleh PKI sebagai jalan pintas untuk langsung berkuasa. Meskipun partai itu sebagai keseluruhan tidak memiliki sebuah rencana untuk mengambil-alih kekuasaan secara langsung, sambil berharap untuk mengadakan revolusi agraria di negara itu dalam lima tahun berikutnya, namun Politbironya dengan cepat memutuskan untuk mengadakan kudeta *pre-emptive*, sebagai suatu tindakan darurat, pada pertengahan bulan Agustus 1965 karena dua alasan. Pertama, karena kemungkinan Presiden Sukarno meninggal tiba-tiba atau lumpuh secara permanen, setelah ia jatuh pingsan tanggal 4 Agustus 1965. Kedua, karena Mao Zedong telah mendesak Aidit pada tanggal 5 Agustus 1965 untuk cepat bergerak dengan sebuah pukulan *pre-emptive* memenggal komando puncak AD untuk mengenyahkan pesaing utamanya menuju kekuasaan dan menggantikan Presiden dengan seorang kandidat dari PKI, namun sedapat mungkin bukan seorang anggota partai.⁵

⁴ Peter Dale Scott adalah pakar teori terkemuka tentang peran Amerika yang dituduhkan itu dalam konspirasi ini. Lihatlah makalahnya “The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967.” *Pacific Affairs*, Vancouver: University of British Columbia, Vol. 58, No. 2, musim panas 1985, hlm. 239-264.

⁵ Notosusanto, Nugroho, *The Coup Attempt of the “September 30 Movement” in Indonesia*. Djakarta: Pembimbing Masa, 1968; juga Brackman, Arnold C. *The Communist Collapse in Indonesia*. New York: W.W. Norton and Co. Inc., 1969. Lihat pula kumpulan dokumen yang diterbitkan oleh berbagai lembaga Pemerintah Indonesia dan dimuat daftarnya dalam Bibliografi.

APA YANG DIPERLIHATKAN BUKTI-BUKTI ITU?

Meskipun sumber-sumber yang digunakan penulis dan diselidiki dalam studi ini memperlihatkan bahwa dua teori yang pertama—”masalah intern AD” dan “konspirasi Inggris-Amerika”—sebagai skenario yang tidak masuk akal karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipercaya, namun sumber-sumber ini mendukung tanpa keraguan sedikit pun teori ketiga yang mengatakan bahwa kudeta itu telah diorganisir oleh Partai Komunis Indonesia.

Bukti memperlihatkan bahwa tujuan PKI yang pertama adalah menggunakan para perwira “progresif-revolusioner” (istilah lainnya yang sering muncul: “yang berpikiran maju”) untuk membersihkan komando puncak AD, menghilangkan kendala utama dalam lajunya menuju kekuasaan sebagai antisipasi bagi kemungkinan meninggalnya Presiden secara tiba-tiba. Setelah pembersihan itu, maka tujuan PKI yang kedua adalah membentuk Kabinet Gotong Royong,⁶ dengan Aidit sebagai perdana menteri, untuk meletakkan negara itu dalam arah perjalanan transisinya menuju Demokrasi Rakyat, di mana partai akan memonopoli kekuasaan. Pada tahun 1964, partai itu telah meninggalkan “strategi transisi damai” menuju komunisme di Indonesia dimana Moskow sebagai penasehat ideologisnya. Sebaliknya, PKI beralih ke gaya Peking yang menganjurkan sebuah “strategi pengambil-alihan kekuasaan secara revolusioner” dan, sesuai dengan itu, mengalang suatu gerakan “ofensif revolusioner” di tahun 1965 untuk mengubah konstelasi kekuasaan di Indonesia demi keuntungannya.⁷

Dalam lajunya menuju kekuasaan ini, PKI menemukan sekutu yang kuat dalam figur Presiden Sukarno, yang sendiri bertekad untuk menyingkirkan pimpinan puncak AD karena tiga alasan. Pertama, ia menganggap beberapa di antara mereka tidak loyal karena menentang visinya yang melihat nasib Indonesia harus makin erat berhubungan dengan Peking dan pertarungan historis ini semua adalah untuk kemenangan New Emerging Forces. Para jenderal senior AD menentang pendekatan Presiden dengan Peking, karena merasa bahwa Peking ini justru merupakan sebuah *Ancaman dari Utara* terhadap keamanan nasional Indonesia. Akibatnya, musuh-musuhnya yang

⁶ “Gotong-royong”, yang berarti saling membantu, adalah sebuah konsep kerjasama tradisional dan asli yang digunakan oleh para petani di desa-desa untuk saling memberi pertolongan ketika panen dan kerja pertanian musiman yang lain.

⁷ Atmadji Sumarkidjo, *Mendung Di Atas Istana Merdeka*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 137.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

sangat lantang membeberkan pandangan mereka dalam sebuah seminar Angkatan Darat yang diselenggarakan di Bandung tanggal 1-5 April 1965 sebagai suatu doktrin strategis baru untuk menggolkan kebijakan militer atas negeri itu.

Kedua, para jenderal itu menentang kebijakan Presiden untuk melakukan konfrontasi bersenjata dengan Malaysia, karena hal itu melibatkan negara mereka dalam menggelorakan tujuan-tujuan revolusioner Peking di Asia Tenggara, sehingga memaksa negara untuk mencari gara-gara dengan pemerintahan yang sah negeri-negeri tetangganya di kawasan itu.

Ketiga, pimpinan puncak AD dengan bersemangat sekali menentang rencana Presiden untuk membentuk suatu “Tentara Rakyat”, yang akan terdiri dari kaum tani dan buruh yang dipersenjatai dengan senjata-senjata yang akan dipasok oleh Cina. “Tentara Rakyat” itu, yang dengan tepat sekali dinamakan sebagai “Angkatan Kelima”—yang empat lagi adalah angkatan darat, laut, udara dan kepolisian—akan menjadikan komando tentara yang konservatif itu terkendali, memasok para pejuang di garis depan untuk “perang revolusioner” mengganyang Malaysia dan, pada akhirnya, mencetuskan revolusi kaum tani di Indonesia. Ide “Tentara Rakyat” diusulkan kepada Presiden oleh Chou Enlai (Menlu Cina) dalam kunjungannya ke Jakarta pada awal tahun 1965. Menurut Aidit, “Tentara Rakyat” itu nantinya akan beroperasi di bawah struktur “dwikomando”, yang terdiri dari para perwira profesional di satu pihak, dan “para *commisars* politik” di pihak lain, di mana yang belakangan ini akan ditunjuk oleh PKI untuk setiap kesatuan dari tentara revolusioner itu.

Ketika pada pertengahan tahun 1965 kebuntuan antara Presiden dan pimpinan puncak AD mengenai arah kebijakan politik luar-negeri dan kemiliteran telah menjadi tidak dapat ditenggang lagi, maka Presiden membuat keputusan untuk mengenyahkan mereka guna membuka jalan bagi pelaksanaan visinya tentang aliansi strategis dengan Cina. Putusan untuk menyingkirkan mereka itu dibuat di Istana Presiden di Tampak Siring, Bali, ketika terjadi sebuah diskusi setelah makan malam untuk merayakan ulang tahun Presiden yang ke-64 tanggal 6 Juni 1965.

Untuk memperhebat kemajuan perselisihan Presiden dengan para jenderal puncak AD, maka Dipa Nusantara Aidit, Ketua PKI, merekayasa sebuah siasat dalam bulan April 1965, sebagaimana kesaksian Walujo, tentang adanya sebuah “Dewan Jenderal” dan dituduhkan bahwa Dewan tersebut telah bersekongkol menggulingkan Presiden demi keuntungan Washington dan London. Aidit juga sigap menangkap peluang lain, yaitu tentang sebuah berita

Pendahuluan

yang dibikin-bikin yang dinamakan Dokumen Gilchrist, bertanggal 24 Maret 1965, yang melibatkan komando puncak AD tentang apa yang dituduhkan sebagai sebuah konspirasi Inggris-Amerika untuk mengarap Indonesia (DOKUMEN No. 6). Dokumen ini sebetulnya dibuat oleh Major Louda dari Dinas Intelijen Cekoslovakia, sebagaimana akan diperlihatkan oleh studi ini, atas nama Moskow untuk mencapai tujuan-tujuan politik Moskow di Jakarta dengan jalan memuaskan penyakit “paranoia” anti-Inggris dan anti-Amerika Presiden Sukarno, yang ketika itu sedang puncak-puncaknya. Dr. Subandrio, Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Indonesia, mempropagandakan tujuan-tujuan palsu ini sebagai suatu kebenaran, namun tanpa menyelidikinya, sebagaimana yang diakuinya kemudian ketika diadili oleh MAHMILLUB. Ia mengajukan sebuah teori konspirasi tanggal 24 Mei 1965, ketika berpidato dalam sebuah rapat raksasa untuk merayakan Ulang Tahun ke-45 berdirinya PKI. Teori konspirasi itu merupakan sebuah platform yang masuk akal untuk memobilisasi para perwira “progresif-revolusioner” di dalam tubuh angkatan bersenjata untuk menghadapi Dewan Jenderal yang diada-adakan itu dan untuk mempertahankan Presiden, serta menumpas akal bulus orang-orang Inggris dan Amerika yang sedang mengancam kedaulatan Indonesia.

Sedangkan mengenai tuduhan bahwa adalah CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat, yang mendorong pihak militer Indonesia untuk merencanakan kudetanya sendiri untuk tanggal 5 Oktober 1965 untuk mendahului PKI, maka bukti dokumen yang diterbitkan tahun 2001 membantah hal ini. Bukti itu memperlihatkan bahwa ketika George Ball, Wakil Menteri Luar Negeri di Washington, bertanya kepada seorang wakil CIA dalam sebuah pertemuan para pejabat tinggi pemerintahan Presiden Johnson, yang diadakan pada akhir Agustus 1965 di Kementerian Luar Negeri, tentang apakah CIA dapat menggunakan sumber dayanya untuk menahan arah meluncurnya Indonesia kepada komunisme, maka wakil CIA itu menjawab bahwa “Badan itu tidak memiliki sumber daya yang memadai di Indonesia dan tidak mampu berbuat banyak untuk mengubahnya.”⁸

⁸ Edward C. Kee (Editor). *Foreign Relations 1964 –1968, Vol. XXVI, Indonesia; Malaysia; Singapore; Philippines*. Washington: The United States Government Printing Office, 2001. Lihat Dokumen No. 20 yang dilampirkan pada studi ini. Kepedulian pemerintah Amerika terhadap melajunya Indonesia ke arah komunisme serta implikasi-implikasinya untuk Washington merupakan topik sebuah estimasi yang berjudul *Prospects for and Strategic Implications of a Communist Takeover in Indonesia*. Estimasi tersebut dipersiapkan oleh the Central Intelligence Agency, the Intelligence Organization of the Department of State dan the National Security Agency (NSA), dan telah disetujui oleh the U.S. Intelligence Board pada tanggal 10 September 1965. Lihat Dokumen No. 20 yang dilampirkan dalam studi ini.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Lagi pula, sebagaimana jelas dari estimasi itu, para tokoh terkemuka dari masyarakat intellijen Amerika itu percaya bahwa seandainya kecenderungan yang ada mengenai kerjasama Sukarno dan PKI berlanjut, maka besar sekali kemungkinan partai itu akan berkuasa dalam dua atau tiga tahun melalui sebuah transisi yang pada dasarnya bersifat damai. Berdasarkan kemungkinan ini, dokumen itu percaya bahwa tidak mungkin PKI akan “mengambil risiko untuk merebut kekuasaan”.

Namun, sebagaimana dari bukti-bukti yang didokumentasikan di dalam studi ini, ada empat faktor yang menjadikan PKI bersedia menanggung risiko itu saat mengambil langkah dengan melakukan kudeta tanggal 1 Oktober 1965 untuk langsung merebut kekuasaan. Pertama, Presiden sakit keras, sampai hilang kesadarannya sebanyak empat kali pada tanggal 4 Agustus 1965 menjadikan pertanyaan tentang siapa penggantinya merupakan sebuah masalah yang sangat mendesak. Kedua, para dokter Cina yang merawatnya melaporkan bahwa Presiden mungkin sekali akan meninggal dunia atau menjadi lumpuh secara permanen seandainya ia mendapat serangan yang lain. Ketiga, Mao Zedong menasehati Aidit tanggal 5 Agustus 1965 untuk sesegera mungkin menghancurkan pimpinan AD, dengan bekerjasama dengan Presiden untuk melapangkan jalan bagi transisi PKI menguasai negara itu. Keempat, Peking dengan mendesak sekali memerlukan agar masa transisi ini diselesaikan secepat mungkin untuk menjadikan Indonesia, di bawah pimpinan Aidit, mendukung dobrakan revolusionernya di Asia Tenggara melalui politik “konfrontasi dengan Malaysia”, dan setelah itu mendukung perjuangan Peking melawan Moskow mengenai pengendalian gerakan-gerakan pembebasan nasional di negara-negara Asia-Afrika.

Persekutuan politik antara Presiden dan PKI adalah berdasarkan keyakinan Presiden pada permulaan tahun 1965 ketika ia menyatakan dirinya seorang Marxis, bahwa “Demokrasi Terpimpin” yang telah ditetapkan di negara itu pada tahun 1959, telah berjalan baik dan tidak ada lagi suatu sistem politik lain yang dapat bertahan. “Demokrasi Terpimpin” itu adalah berdasarkan “segi-tiga besi”, yaitu sebuah konfigurasi kekuasaan yang menonjolkan PKI di sebelah kiri, tentara di sebelah kanan dan Presiden di tengah-tengah. Presiden bertindak sebagai penyeimbang yang terampil dan juru penengah terakhir, yang dengan mengendalikan kedua belah pihak yang bermusuhan itu, menjaga agar keseimbangan itu tetap berfungsi. Namun demikian, pada awal 1965, Presiden sampai kepada kesimpulan bahwa segi-tiga itu, yang pada dasarnya adalah suatu keseimbangan yang statis, harus dibongkar karena persekutuannya

Pendahuluan

dengan PKI, sehingga Presiden akan mampu mengimplementasikan visi strategisnya mengenai masa-depan negaranya sebagai bagian dari proses revolusioner global. Visi ini mengatakan bahwa pada akhirnya PKI akan naik ke tampuk kekuasaan negeri itu, dan naiknya Cina di panggung internasional, sebagai dua proses sejarah yang tak terelakkan terhadap mana negaranya harus menyesuaikan diri. Ia yakin bahwa Cina tidak hanya akan muncul sebagai kekuatan yang dominan di Asia saja, tetapi juga akan menggantikan posisi Uni Soviet sebagai pemimpin Dunia Ketiga yang sedang berjuang melawan “dunia kapitalisme dan imperialisme yang sedang membusuk” itu. Indonesia harus berada di pihak yang menang dalam konfrontasi bersejarah antara yang lama dan yang baru itu, yang sudah pasti pada akhirnya akan berakhir pada suatu zaman sosialisme di seluruh dunia, sebagai tahap perkembangan umat manusia selanjutnya dan gelombang masa-depan.

Meskipun ini adalah visi jangka panjang Presiden, namun perlu mengambil langkah-langkah yang kongkret ke arah realisasinya, ketika tanggal 4 Agustus 1965, Presiden jatuh sakit parah sekali karena ginjalnya, muntah-muntah dengan hebat sekali dan jatuh pingsan empat kali dalam sehari itu. Prognosis rombongan dokter Cina yang merawatnya meramalkan kematiannya, atau lumpuh, seandainya ia menderita suatu serangan yang lain. Karena keadaan yang nyaris fatal itu menjadikan Presiden sadar akan kematiannya, maka ia memanggil Letkol Untung, dari pasukan Tjakrabirawa Pengawal Presiden, untuk datang ke Istana Merdeka tanggal 4 Agustus 1965. Di sana, dalam kesendirian kamar tidurnya, ia memerintahkan Untung untuk langsung mempersiapkan pembersihan para jenderal yang ikut dalam Dewan Jenderal, karena ketidak-setiaan mereka dan karena telah berkomplot dengan pihak asing untuk menentangnya dan republik. Tanpa mengesampingkan kemungkinan bahwa Presiden mungkin akan meninggal atau menjadi lumpuh seandainya datang suatu serangan lain dari penyakitnya, maka Presiden memutuskan untuk memecah kekuatan AD untuk membuka jalan ke arah suatu transformasi sosialis dari Revolusi Indonesia. Tahap ini akan dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan progresif, dengan dipimpin PKI, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses revolusi dunia. Seandainya ia nanti meninggal dunia atau lumpuh, hal ini akan merupakan warisannya bagi negara itu.

Letkol Untung — seorang anggota lama dari PKI, sebagai seorang prajurit muda ia telah ikut dalam pemberontakan Komunis yang gagal di Madiun bulan September 1948 yang dipimpin Muso, yang baru saja tiba dari Uni Soviet — langsung memberitahukan kepada Aidit dan Omar Dhani, Men/Pangau, melalui

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

perantara seorang PKI yang bernama Walujo, tentang tugas yang telah dipercayakan Presiden kepadanya. Meskipun kaitan resmi Untung dengan PKI telah terputus semenjak waktu itu—ini sejalan dengan suatu kebijakan baru PKI yang mengatur hubungan-hubungan dengan para anggota dan pendukungnya di kalangan militer—ia tetap berhubungan dengan partai melalui Walujo, seorang anggota Biro Chusus.

Biro Chusus itu sendiri adalah sebuah badan khusus yang didirikan tahun 1964 dengan tugas melakukan penetrasi ke dalam tubuh angkatan bersenjata dan memberikan indokrinasi kepada para anggota dan simpatisan yang dapat direkrutnya dalam hal ideologi Marxis. Ketua PKI, D.N Aidit, adalah kepalanya yang menghubungkan Biro Chusus itu dengan Politbiro partai. Pengelolaan dan operasi Biro itu berada di tangan Sjam, alias Kamarusaman bin Ahmad, yang dibantu oleh Pono, Walujo, Ramin, Sujono Pradigdo, Suwandi dan Ismail di pusat di Jakarta, sedangkan jaringan agen-agensya sangat luas beroperasi di tiap-tiap propinsi.

Pada tahun 1965, PKI melalui Biro Chususnya ini, mengoperasikan sebuah jaringan yang terdiri dari kira-kira 700 orang “perwira progresif” dari keempat angkatan bersenjata di negara itu melalui Sjam. Di antara orang-orang yang direkrut, yang paling menonjol adalah Brigjen Supardjo, Mayjen Pranoto, Kolonel Abdul Latief, Komodor Udara Siswadi, Kolonel Udara Sudiono, Letkol Udara Heru Atmodjo, Mayor Udara Suyono, Brigjen Polisi S. Sutarto, Komisioner Polisi Iman Supuyo, Komisioner Polisi Anwas Tanuamidjaja, dan lain-lain. Masing-masing mereka telah dibina oleh seorang anggota Biro Chusus, dan dinilai sesuai dengan tingkat komitmennya terhadap PKI. Men/Pangau Omar Dhani, dinilai “sangat loyal” kepada PKI, dan partai serta AURI menganggapnya sebagai calon mereka untuk Presiden seandainya Presiden Sukarno meninggal. Men/Pangal Laksamana Madya E. M. Martadinata, juga dianggap PKI sebagai sekutu dan pendukung, meskipun bukan seorang yang sangat vokal.

Presiden Sukarno sendiri berada di bawah binaan Njoto, anggota ranking ketiga Politbiro PKI, meskipun bukan seorang anggota jaringan Biro Chusus. Ia seringkali datang ke Istana Merdeka, membantu Presiden dalam menyusun pidato-pidato, utamanya pada hari besar nasional yang penting, dengannya Presiden sering asyik mendiskusikan dialektika, filsafat, dan aspek-aspek Marxisme yang lain.

Persekutuan antara Presiden dan PKI diperluas sampai mencakup Mao Zedong ketika pertemuan Aidit dengan Mao di Peking tanggal 5 Agustus 1965, di mana Aidit memberitahukan kepada Mao bahwa PKI dan Presiden akan

Pendahuluan

bekerjasama dalam memprakarsai tahap sosialis dari perkembangan Revolusi Indonesia. Namun, Presiden sakit keras, jatuh pingsan beberapa kali tanggal 4 Agustus dan mungkin sekali akan meninggal tiba-tiba, sedangkan AD dilaporkan sedang merencanakan suatu upaya *pre-emptive* untuk merebut kekuasaan jika terjadi hal seperti itu, bahkan kalau perlu juga sebelum peristiwa itu. Mao memberi nasehat pada Aidit agar Presiden harus didorong untuk langsung membersihkan AD guna membuka jalan bagi suatu transformasi ke arah sosialisme, namun memperingatkan bahwa segera setelah itu dilaksanakan, Presiden harus digeser dan diganti oleh seseorang yang lebih dapat dipercaya, yang mungkin bukan seorang anggota PKI, dan bahwa Aidit harus mengepalai pemerintahan sebagai perdana menteri. Presiden Sukarno bukan hanya sekutu yang tidak tetap pendirian, tidak stabil, dan tidak dapat diandalkan, tetapi juga sedang sakit parah dan harus beristirahat di Cina untuk merawat kesehatannya setelah mengangkat Aidit ke tampuk kekuasaan dan mengabsahkan pemerintahannya dengan memasang mantel legitimasi di pundaknya. Dalam hubungan ini, Mao menjanjikan bantuan langsung kepada Presiden untuk mempersenjatai pasukan pemukul untuk membersihkan jenderal-jenderal puncak AD, bantuan militer dan bantuan lain-lain untuk mempersenjatai Tentara Rakyat untuk mengawasi angkatan bersenjata yang reguler, meningkatkan “konfrontasi” dengan Malaysia dan melancarkan revolusi agraria. Lebih lanjut Mao menjanjikan bantuan untuk mendirikan Markas Besar the New Emerging Forces di Jakarta untuk menandingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana Indonesia telah mengundurkan diri pada tanggal 1 Januari 1965, dan memberikan sambutan istimewa kepada Presiden di Cina untuk merawat kesehatannya setelah Aidit mengambil-alih kekuasaan. Janji-janji Mao ini juga berhubungan dengan penyempurnaan syarat-syarat dari sebuah perjanjian yang komprehensif antara Indonesia-Cina bulan Desember 1964, yang ketentuan-ketentuannya memuat kerjasama dalam bidang militer, ekonomi dan politik, serta koordinasi kebijakan luar-negeri mereka. Presiden Sukarno serius sekali dalam menepati komitmen Indonesia-Cina, sehingga ketika dalam perundingan bulan Desember 1964, Presiden mendesak Marsekal Chen Yi agar Cina segera memasok teknologi nuklir dan sebuah bom nuklir ke negaranya, untuk memberi sinyal kepada baik kawan maupun lawan tentang status internasional baru Indonesia sebagai sebuah kekuatan regional.

Segera setelah Aidit kembali dari Peking ia mengunjungi Presiden tanggal 7 Agustus di Istana Merdeka, dan setelah itu tanggal 8 di Istana Bogor untuk melaporkan pertemuannya dengan Mao dua hari sebelumnya. Dalam

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pertemuan di Bogor inilah Aidit menyampaikan usul-usul dan janji-janji Mao kepada Presiden, dengan menyatakan dalam suratnya tanggal 10 November 1965 (DOKUMEN No.2) bahwa ia telah bertindak sebagai seorang juru penengah antara keduanya. Usul-usul itu dapat diterima Presiden, dan berdasarkan hal itu, membuat sebuah persetujuan dengan Mao—tampaknya melalui kontak-kontak partai dan bukan melalui saluran diplomatik biasa—yang menjanjikan kepada Aidit dalam waktu yang sama bahwa setelah pembersihan para jenderal, ia akan menunjuk sebuah Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Aidit, untuk membuka jalan kepada suatu transformasi sosialis di negara itu.

Masalah Presiden mengambil cuti sakit ke Cina mungkin merupakan suatu hal yang sangat mendesak karena Chen Yi, Menteri Pertahanan Cina, yang datang ke Jakarta dalam rangka Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1965, mengatakan kepada Subandrio bahwa ia telah menemukan tempat yang cocok bagi Presiden di sebuah villa di Danau Angsa, Cina.

Tindakan terakhir Presiden yang menyetujui pembersihan komando puncak AD adalah pidatonya, yang disampaikan persis pada senja di hari pembersihan itu, sore tanggal 30 September di Stadion Olahraga Senayan di hadapan para peserta Musyawarah Besar Tehnisi, setelah menerima sepucuk surat dari Untung yang mengatakan bahwa Jam H pembersihan para jenderal telah ditentukan pada pukul 04.00 esok pagi. Dengan mengutip *Mahabharata*, Presiden memotivasi kelompok Untung itu, dan cabang-cabangnya di seluruh negeri, untuk memukul sesama saudaranya yaitu para jenderal di semua tempat, karena itu adalah *dharma* mereka, sebuah tugas yang mulia, sebagaimana yang terjadi dengan Arjuna yang memukul saudara-saudara sepupunya di medan perang Kurukshetra.

(Tambahan untuk edisi Indonesia: A.H. Nasution dalam buku kecilnya, 1 Oktober 1965, Kebangkitan 1966, Koreksi/Pembaharuan Pembangunan: beberapa keterangan ceramah, dialog dengan generasi muda 1965-1974, hlm. 8: Ganeco. Bandung 1974, mengutip bagian akhir pidato penting itu:

Ini cerita Mahabarata ada pertentangan yang hebat antara dua negara, negara Hastina dengan negara milik Pendawa. Dua negara ini konflik hebat. Tetapi pimpinan-pimpinan dan panglima-panglima Hastina itu sebenarnya masih keluarga dari pemimpin-pemimpin dan panglima-panglima Pendawa. Jadi masih saudara satu sama lain. Arjuna yang harus mempertahankan negara Pendawa, yang harus bertempur dengan orang-orang Hastina, Arjuna berat dia punya hati karena ia melihat di barisan tentara Hastina itu banyak ipar-iparnya karena isteri Arjuna itu banyak

Pendahuluan

lho! Bahkan gurunya ada disana, guru peperangan yaitu Durno ada di sana.

Arjuna lemas, lemas, lemas. Bagaimana aku harus membunuh kawan lamaku sendiri. Bagaimana aku harus membunuh guruku sendiri. Bagaimana aku harus membunuh saudara kandungku sendiri, karena Suryoputro sebetulnya keluar dari satu ibu. Arjuna lemas, Kreshna memberi ingat kepadanya. Arjuna, Arjuna, Arjuna engkau ini ksatria. Tugas ksatria adalah berjuang. Tugas ksatria ialah bertempur bila perlu. Tugas ksatria adalah menyelamatkan, mempertahankan tanah airnya. Ini adalah tugas ksatria. Ya benar di sana ada engkau punya saudara sendiri. Engkau punya guru sendiri. Mereka itu mau menggempur negeri Pendawa, gempur mereka kembali. Itu adalah tugas kewajiban tanpa hitung-hitung untung atau rugi. Kewajiban kerjakan.

Ini adalah sebuah pesan yang kuat sekali, dan Aidit, yang juga hadir, segera meninggalkan stadion itu setelah mendengarnya untuk menemui Mayjen Pranoto di rumah Sjam di Jalan Salemba Tengah, Jakarta, untuk menawarkan kepadanya jabatan Panglima AD, karena Yani, komandannya yang sekarang, akan dihabisi dalam beberapa jam lagi.

Berdasarkan kesepakatan antara Mao, Sukarno dan Aidit inilah akhirnya Aidit meyakinkan Politbiro PKI dalam tiga kali rapatnya di bulan Agustus 1965 untuk memutuskan mengadakan pukulan *pre-emptive* terhadap para jenderal. Di sana Aidit menjelaskan bahwa pukulan itu akan dilakukan oleh Untung dan kelompok perwira progresif berdasarkan perintah Presiden, yang akan diiringi penunjukan pemerintahan Kabinet Gotong Royong oleh Presiden dan cuti panjangnya ke Cina karena alasan kesehatan. Karena yakin bahwa kesempatan bersejarah seperti itu tidak akan terulang lagi, maka Politbiro memutuskan bahwa jalan pintas menuju kekuasaan ini harus maju terus “dengan atau tanpa” Presiden, yang berarti bahwa akan lebih baiklah jika Presiden bekerjasama sepenuhnya dalam petualangan ini, namun jika tidak berhasil menepati janji-janjinya kepada Mao dan Aidit di tahap manapun dari operasi itu, maka Presiden pun akan disingkirkan.

Rencana Besar ini, sebuah jalan pintas yang memikat menuju kekuasaan telah diputuskan di dalam tiga kali rapat Politbiro tanggal 11, 16, dan 28 Agustus 1965, di mana rapat yang terakhir meletakkan tanggung jawab pelaksanaannya di tangan sebuah Komite Tetap (Standing Committee) yang beranggotakan tiga orang: Aidit sebagai ketua, Lukman dan Njoto. Rencana Besar itu adalah: menangkap tujuh Jenderal komando puncak Angkatan Darat, dan mereka akan diadili oleh sebuah “Pengadilan Rakyat” di Pondok Gede berdasarkan bukti-

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

bukti yang didapat dari mereka di sana, dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka karena telah melakukan pengkhianatan besar. Setelah ini, Presiden akan mengundang Aidit untuk menyelesaikan akibat-akibat politik dari pembersihan itu dan menunjuk Pemerintahan Gotong Royong yang dipimpin Aidit, dengan Omar Dhani mengambil jabatan Presiden menggantikan Sukarno setelah ia mengundurkan diri ke Cina. Para jenderal yang akan diamankan itu adalah Abdul Haris Nasution, Menko Hankam/KASAB; Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat; S. Parman, Kepala Intelijen AD; R. Suprpto; S. Harjono Mas Tirtodarmo; Donald Isack Panjaitan dan Sutojo Siswamihardjo.

Dalam mengantisipasi otorisasi Politbiro itu, Aidit memanggil Sjam tanggal 12 Agustus 1965 dan memerintahkannya untuk menstrukturkan "Komando Pembersihan [Purge Command]", yang terdiri dari para perwira revolusioner yang telah dibina melalui Biro Khusus PKI, untuk melaksanakan pembersihan itu atas perintah Presiden. Tidak lama kemudian, Sjam memberikan kepada Aidit sebuah daftar yang memperlihatkan Untung sebagai Komandan kelompok, dengan Supardjo, Latief dan lain-lain sebagai anggota, sedangkan tindakan mereka itu akan dinamakan GERAKAN 30 SEPTEMBER (GESTAPU). Aidit setuju dan kemudian memberi kuasa kepada Sjam untuk pada tanggal 6 September 1965 mengadakan pertemuan bersama pertama dari kelompok militer Untung dengan para anggota Biro Khusus, dengan Aidit sendiri mengarahkan operasi dari belakang layar atas nama PKI. Mulai saat itu dan seterusnya, pertemuan bersama antara pihak militer dan para anggota konspirasi PKI telah berapat sepuluh kali di rumah Sjam, di rumah Walujo, dan di rumah Latief di Jakarta, untuk merencanakan rincian-rincian teknis militernya, sedangkan Aidit memegang komando secara keseluruhan, baik mengenai masalah politik maupun masalah militer.

Pertemuan terakhir dan yang paling penting diadakan pada tanggal 30 September, di waktu senja, di rumah Latief di Jalan Tjawang, Jakarta. Dengan memperhatikan perimbangan kekuatan, Sjam melaporkan bahwa ia dan Aidit telah berkunjung ke Bandung tanggal 25 Agustus dan berhasil menetralsir Divisi Siliwangi setelah mendapatkan jaminan kerja sama Jenderal Rukman dalam sebuah pertemuan di rumah Jenderal Rukman sendiri, yang juga dihadiri oleh Supardjo. Latief ketika itu mengatakan bahwa ini adalah berita baik, namun kekuatan yang dapat dikerahkan G-30-S di Jakarta dan sekitarnya hanya berjumlah 7.000 personil pasukan saja. Ia memperingatkan bahwa di Jakarta saja dan di daerah sekitarnya, ditempatkan pasukan reguler sebanyak 60.000 orang, dan berdasarkan keadaan yang tidak seimbang ini maka Panglima KOSTRAD, Jenderal Soeharto, harus diundang untuk ikut-serta dalam operasi

Pendahuluan

G-30-S. Karena Suparjo dan Untung menolak untuk mendekati Suharto dan bertatap-muka dengannya, maka Latief menyanggupi untuk sendiri menemui jenderal itu di rumah-sakit militer kira-kira pukul 23.00 malam 30 September. Jenderal itu sedang menunggu anaknya Tommy, yang sedang dirawat karena luka ketumpahan sup panas saat makan malam hari sebelumnya.

Setelah menjelaskan bahwa sekelompok perwira progresif akan melakukan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal dalam beberapa jam lagi atas perintah Presiden, maka Latief mengundang Suharto untuk ikut dalam operasi itu. Suharto menjawab bahwa masalah Dewan Jenderal itu masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut; Suharto jelas sekali menahan diri, yang dipahami oleh Latief bahwa ia tidak akan ikut-serta dalam operasi sekaligus juga tidak akan menentanginya karena hal itu merupakan perintah Presiden, panglima tertinggi. Ketika Latief kembali setelah tengah malam untuk bertemu dengan teman-temannya di Pondok Gede di Pangkalan Udara Halim dan melaporkan pemahamannya tentang maksud-maksud Suharto, maka diputuskan untuk memulai operasi itu tanpa Suharto.

Sebagaimana akan kita lihat, pada saat-saat terakhir dari persiapan untuk membersihkan komando puncak AD, dan kemudian melaksanakan persetujuannya dengan Presiden tentang penyelesaian politik setelah terjadi pembersihan, Aidit bertemu dengan Mayjen Pranoto di rumah Sjam tanggal 30 September malam. Setelah pertemuan ini, Aidit dan Pranoto dibawa ke rumah Sersan Suwardi di Halim pukul 23.00, dari tempat itu Aidit mengarahkan seluruh operasi, terutama sekali penyelesaian politiknya setelah dibersihkan para jenderal itu.

Dalam pada itu, kelompok Untung telah berkumpul di pusat survei udara PENAS, yang digunakan sebagai CENTRAL COMMAND I (CENKO I), dan setelah ditangkapnya para jenderal, mereka pindah ke rumah Sersan Anis Sujatno di Halim (CENKO II), agar dekat dengan Aidit. Dibuat pula persiapan-persiapan di rumah Komodor Susanto di Halim tempat di mana Presiden akan bertemu Aidit untuk penyelesaian politik setelah pembersihan itu, membentuk Pemerintahan Gotong Royong dan membuat rencana pengunduran diri Presiden, berikut segala kelengkapannya yang sesuai dengan martabat Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Pemimpin Besar Revolusi.

Operasi berdarah itu dimulai sebagaimana direncanakan pada pukul 04.00 pagi tanggal 1 Oktober, saat pasukan Pasopati memukul kekuatan-kekuatan yang mengawal rumah kediaman tujuh jenderal AD yang telah dijadikan target. Mereka menembak mati di tempat tiga jenderal (Yani, Haryono, Panjaitan) membawa hidup-hidup tiga orang lagi (Suprpto, S. Parman, Sutoyo)

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dan perwira pertama ajudan Nasution (Tendean) ke Lubang Buaya, di mana mereka ditembak atas perintah Sjam, tanpa mendapatkan dari mereka pengakuan bersekongkol menentang Presiden. Jenderal Nasution lolos dan bersembunyi di pelataran kediaman Dr. Leimena di Jalan Teuku Umar, Menteng. Ketika Leimena menelpon Presiden, yang ketika itu berada di rumah kediaman isterinya Ibu Haryati di Grogol, bahwa beberapa jenderal telah dibunuh, namun Nasution yang terluka dapat meluputkan diri, maka Presiden segera mengirimkan sepasukan resimen Tjakrabirawa, di bawah pimpinan Letkol Ali Ebram, untuk mencari tempat persembunyian Nasution dan menghabisinya. Fakta bahwa Nasution yang terluka dan pasti berang itu, Presiden tahu bahwa ada masalah baru yang harus dihadapi, karena Nasution pasti akan memburu para pembunuhnya itu dengan tekad untuk memberi balasan yang setimpal.

Setelah “kecelakaan awal” ini, sektor lain dari operasi itu juga tidak berjalan mulus sebagaimana direncanakan Aidit, dan dalam kenyataannya semua menjadi berantakan pada pukul 11.00. “Kecelakaan kedua” yang menimpa Aidit ketika Supardjo diiringi delegasi dari keempat angkatan pergi ke Istana Merdeka kira-kira pukul 06.00 pagi untuk menjemput Presiden dan membawanya ke rumah Susanto di Halim, di mana ia akan menjadi tawanan Aidit untuk memuluskan segala tujuan praktisnya. Di sanalah, dalam kesendiriannya, akan disusun penyelesaian politik oleh Presiden dengan menunjuk Pemerintahan Gotong Royong dengan Aidit menjadi perdana menteri, mengatur pengunduran diri Sukarno ke Cina dan mengangkat Omar Dhani sebagai Presiden baru. Sayang sekali, ketika Supardjo sampai di istana, Presiden tidak berada di sana, melainkan sedang berada di Grogol, dan kemudian datang ke Halim atas kehendak sendiri; lebih celaka lagi, bukan ke rumah Susanto seperti yang diskenariokan, akan tetapi ke Pusat Komando (KOOPS), dengan demikian meluputkan diri dari perangkap Aidit. Kemudian Supardjo melaporkan kepada Presiden di KOOPS di Halim itu setelah pukul 10.00 pagi, dengan mengatakan bahwa para jenderal “telah diamankan” dan telah terjadi pertumpahan darah, namun Nasution berhasil lolos dan bahwa tidak ada bukti tentang komplotan Dewan Jenderal yang dapat diperoleh dari mulut mereka. Lagi pula, Supardjo memberikan kepada Presiden daftar nama-nama anggota Dewan Revolusi, tetapi nama Sukarno tidak tercantum dalam daftar itu, yang akan disiarkan di radio.

Setelah itu Presiden untuk kedua kalinya memperlambat rencana Aidit, sehingga mengacaukannya sama sekali. Meskipun ia memuji Supardjo karena telah melaksanakan pembersihan para jenderal dan mengatakan bahwa itu semua hal biasa saja dalam sebuah revolusi, namun pada saat yang sama

Pendahuluan

Presiden memerintahkan Supardjo untuk menghentikan semua aktivitas GESTAPU itu. Tambahan pula, Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa ia berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan tetap memegang Pimpinan Negara dan Revolusi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan setelah itu mengirim sinyal pesan yang kuat kepada Aidit, melalui Supardjo, bahwa ia tidak bermaksud sedikit pun untuk menyerahkan jabatan kepresidenan dan mengundurkan diri ke Cina. Lagi pula, ia memanggil para panglima angkatan bersenjata—Laksamana Madya Omar Dhani dari AURI, Laksamana Madya Martadinata dari Angkatan Laut dan Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo dari Kepolisian—juga Waperdam II Dr. Leimena dan Jaksa Agung Brigjen Sutardjo, ke rumah Susanto di Halim untuk pertemuan presidium Kabinet Dwikora itu.⁹ Di sana Presiden menolak mengakui Dewan Revolusi dan Ketuanya Untung tanpa terlebih dahulu diakui posisinya sebagai Presiden, dan menggunakan Supardjo, bukannya Untung, untuk berkomunikasi dengan Aidit. Pada tahap ini, Supardjo putar haluan ke pihak Presiden dan mulai menentang kebijakan Aidit yang ingin menyingkirkan Presiden dan maju terus tanpa dia. Sebaliknya, Supardjo menganjurkan bahwa Aidit seharusnya “merangkul” Presiden dan bersama dengannya bertarung melawan AD, karena kombinasi ini akan mendapat dukungan dari angkatan bersenjata yang lain dan semua kekuatan progresif, hal itulah menurut Supardjo merupakan suatu resep yang pasti untuk menang. Ia merasa dengan kuat sekali bahwa kebijakan Aidit untuk maju terus “tanpa” Presiden akan memencilkan PKI dan GESTAPU dari perpolitikan nasional yang luas.

Pada tahap ini, Presiden juga ingkar janji kepada Aidit untuk menyelesaikan aspek-aspek politik dari pembersihan itu dengan menunjuk Kabinet Gotong Royong dan kemudian mengundurkan diri ke Danau Angsa di Cina. Perubahan sikap Presiden ini menggagalkan sama sekali “Rencana Besar” Aidit, dengan memaksanya untuk mengubah rencananya dari menit ke menit dan membuat kesalahan demi kesalahan yang bersifat strategis pada saat ia mencoba untuk menentang prakarsa-prakarsa Presiden. Presidenlah, dan bukan Aidit, yang menguasai situasi pada saat ini dan untuk seterusnya, dan nasib Aidit dan GESTAPU-nya itu menjadi terjungkir-balik.

Memang, pada titik ini, sebagaimana ditulis oleh Supardjo dalam *OTOKRITIK*, satu-satunya kemungkinan yang terbuka bagi Aidit, jika ia mau

⁹ Singkatan DWIKORA itu terdiri dari tiga istilah berikut: a) DWI, b) Komando, c) Rakyat, atau Dua Komando Rakyat yaitu: 1) memperkuat pertahanan Revolusi, dan 2) mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Malaya, Singapura dan Borneo Inggris, perjuangan yang dikenal sebagai KONFRONTASI, yaitu kampanye “Ganyang Malaysia”.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

melanjutkan strateginya sekarang ini untuk maju terus tanpa Presiden, adalah dengan menggulingkannya secara fisik. Namun, hal ini tidak dapat dilakukannya karena tiga alasan. Pertama, sudah terlalu terlambat karena pada saat itu basis militer Aidit telah menurun secara dramatis. Ia tidak dapat memerintah kekuatan militer yang cukup besar di saat ini, karena Batalyon 530 Diponegoro, yang menjaga istana dan objek-objek lain di Lapangan Merdeka, telah membelot ke KOSTRAD. Kedua, Omar Dhani sudah merasa putus-asa dan tidak akan mungkin bertindak menentang Presiden, padahal Aidit telah mempercayainya untuk nantinya memangku jabatan presiden. Ketiga, Nasution, Menko Hankam/KASAB, telah mengangkat Panglima KOSTRAD Jenderal Suharto sebagai pimpinan sementara AD menggantikan Yani. Lagi pula, Nasution telah memerintahkan Suharto untuk menghancurkan GESTAPU dan membebaskan Presiden dari kendalinya. Pukul 12.00 tengah hari, Aidit dan Sjam menerima berita intelijen bahwa Suharto telah memobilisasi kekuatan untuk tujuan itu.

Namun bukannya “merangkul” Presiden di bawah kondisi yang tidak menguntungkan ini, Aidit malah dengan cepat mengadakan serangan balik dan membiarkan *Dekrit No, 1* Dewan Revolusi itu disiarkan pada pukul 11.00 untuk memperlihatkan bahwa bukan Presiden, akan tetapi Dewan Revolusi itulah yang merupakan “kekuasaan tertinggi” di negara itu, sambil dalam waktu yang sama membubarkan Kabinet Dwikora. Dengan demikian, Sukarno telah digulingkan baik sebagai Presiden maupun sebagai perdana menteri Kabinet Dwikora. Dekrit itu juga menyerukan kepada kelompok-kelompok pemberontak di propinsi-propinsi untuk mulai mendirikan Dewan Revolusi daerah dan lokal. Mulai dari saat itu dan selanjutnya, negara jelas berada dalam “Kekuasaan Kembar”, yang ironisnya sumber dari kedua kekuasaan itu berada di Halim dari tempat yang tidak berjauhan antara yang satu dan yang lain. Presiden berada di rumah Susanto, sedangkan Aidit berada kira-kira 300 meter jaraknya dari tempat itu di rumah Sersan Suwardi (Peta I).

Pertarungan untuk supremasi antara Presiden dan Aidit terjadi di rumah Susanto, antara pukul 12.00 tengah hari hingga pukul 16.00, dan dijelaskan dalam Bab IX dari studi ini, dengan judul *Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang*. Pertunjukkan *wayang kulit* adalah sebuah permainan boneka Jawa yang memainkan kejadian-kejadian penting dari Mahabharata, Ramayana dan kesusasteraan Jawa klasik. Hanya lakon *Kolomongso* itu didasarkan pada kosmologi Jawa-Hindu yang menggambarkan perubahan seluruh alam semesta ini melalui aliran kekuatan-kekuatan kosmik yang mengganti utara dengan selatan, timur dengan barat. Dipercayai bahwa proses

Pendahuluan

ini terjadi secara berkala dalam evolusi alam semesta, dengan perubahan itu menandakan berakhirnya sebuah era, dan memberitahukan akan datangnya sebuah era baru. Di tingkat manusia, transisi kosmik ini menyatakan dirinya melalui “perputaran elite politik”, di mana kekuasaan dan legitimasi orang-orang yang sedang berkuasa menjadi menurun dan pindah kepada sosok baru pemegang kekuasaan.

Sebagaimana akan diperlihatkan oleh Bab IX, dan tanpa menjangkau terlalu jauh ke masa depan, maka transisi kekuasaan itu telah terjadi di Pangkalan Udara Halim tanggal 1 Oktober 1965. Aidit dan PKI telah muncul sebagai pemegang kekuasaan yang baru di negeri itu pada pukul 10.30 pagi hari itu setelah menghabsi komando puncak AD, membubarkan kabinet Dwikora dan menggulingkan Presiden dengan Dekrit No. 1 Dewan Revolusi. Akan tetapi kekuasaan itu kemudian menyelinap pergi dari tangan Aidit dan PKI dan jatuh ke tangan Presiden pada pukul 11.00 siang, ketika Presiden menegaskan kembali legitimasinya sebagai kepala negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata melalui siaran Perintah Hariannya. Namun di sore harinya, Jenderal Suharto muncul sebagai pemegang kekuasaan baru. Dengan menghancurkan GESTAPU pada pukul 04.00 sore dan meminta Presiden untuk meninggalkan Halim dan menuju ke Bogor pada jam 08.00 malam, di mana ia akan berada di bawah penjagaan Suharto, maka kekuasaan telah pindah ke tangan jenderal itu dan AD, dan tetap berada di sana untuk jangka waktu 32 tahun lamanya. Namun, sebuah perputaran baru dari perubahan roda *Kolomongso* itu telah menjatuhkan jenderal besar itu pada tanggal 21 Mei 1998.¹⁰

¹⁰ Mengenai hubungan antara nilai-nilai budaya-psikologi Jawa dan kekuasaan politik, lihatlah Benedict R. O'G. Anderson, “The Idea of Power in Javanese Culture”, dalam Claire Holt (Ed.). *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972, hlm. 1–70; Petr Carey, “The Role of the ‘Wayang’ in Dipanegara War”. *PRISMA*, No. 7, 1977, hlm. 15–27; Ki Hasto, “Bung Karno dan Wayang”. *Warta Wayang*, No. 2, 1979, hlm. 9–10.

Presiden Suharto dan Orde Baru juga menggunakan wayang untuk menyiarkan pesan-pesan untuk membenarkan kebijakan-kebijakannya; lihat G. J. Resink, “From Old Mahabharata to the New Ramayana Orde”. *BTLV*, No. 131: 2/3, 1975, hlm. 212–213.

Untuk hubungan antara tradisi mistik Jawa dan gerakan-gerakan revolusioner di Indonesia lihat Paul Stange, “Javanese Mysticism in the Revolutionary Period”, dalam *Conference on Modern Indonesian History*, Madison: University of Wisconsin, Centre for Southeast Asian Studies, 1975, hlm. 171–87. Lucian Pye membuat sebuah survei yang paling konprehensif tentang hubungan antara tradisi-tradisi utama di Asia—Hindu, Buddha, Confucius dan Islam—dan kekuasaan politik, dalam bukunya *Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.

Pertikaian kebijakan di dalam elite kepemimpinan PKI mengenai penggunaan nilai-nilai budaya-psikologi Jawa untuk meningkatkan tujuan-tujuan politik partai, terutama nilai-nilai yang dianjurkan oleh lakon wayang yang memiliki suatu jangkauan kerakyatan yang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Tata-ruang rumah Susanto itu sangat ideal untuk dijadikan pentas bagi drama yang bertaruhan tinggi ini. Pada saat Presiden dan presidium kabinetnya menempati kamar-kamar di bagian depan, yaitu ruang tamu dan ruang makan, maka Supardjo menggunakan pintu belakang untuk tempat para pembantu untuk masuk ke dalam rumah itu untuk bertemu Presiden di salah satu kamar samping guna berkonsultasi secara pribadi. Pertama kali ia hanya datang atas undangan Presiden saja, akan tetapi kemudian ketika garis pembatas antara teman dan musuh telah kian kabur dan konfrontasi mereka itu berubah menjadi sebuah *musyawarah besar* (perundingan untuk mencapai kesatuan pendapat), maka Supardjo muncul atas kehendak sendiri, berbicara dengan bebas dengan para anggota kabinet “yang telah diberhentikan” itu dan melapor kembali kepada Untung di CENKO II mengenai perkembangan terakhir di dalam kubu “musuh”. Segala laporannya itu lalu disampaikan oleh Sjam kepada Aidit di markas-besarnya, yang pada gilirannya mengeluarkan perintah-perintah bagaimana Sjam, Untung dan Sapardjo harus bertindak. Karena Aidit harus memutuskan rincian-rincian yang sekecil-kecilnya dari operasi itu, maka Sudisman memberikan kesaksian bahwa tata-cara pembuatan keputusan yang tidak praktis ini merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya kudeta itu.

Pada saat Aidit berusaha keras untuk maju terus “tanpa” Presiden, Sukarno merasa bahwa ia duduk dengan kukuh di atas pelana dan mulai mencari tempatnya di Dewan Revolusi itu dengan syarat ia tetap menduduki kursi kepresidenan dan posisi Pangti ABRI, meskipun di bawah kekuasaan baru. Jadi inilah yang menentukan suasana untuk *musyawarah besar* itu, dimana Presiden bersedia memberikan segala konsesi kepada seorang Aidit yang tidak mau menyerah itu. Namun, keras kepala Aidit telah menghancurkan

besar sekali, dibicarakan oleh Ruth McVey, “The ‘Wayang’ Controversy in Indonesia Communism”, dalam Mark Hobart & Robert H. Taylor (Eds.), *Context, Meaning and Power in Southeast Asia*, Ithaca, N.Y., Cornell University, Southeast Asia Program, 1986, hlm. 21-52.

Para penantang gagasan bahwa partai harus menggunakan wayang untuk meningkatkan jangkauannya di kalangan rakyat mencap segala tradisi ini sebagai “feodal dan reaksioner”, dan menekankan “perjuangan kelas” sebagai instrumen utama untuk memajukan revolusi.

Beberapa orang dari kalangan mistik Jawa mengidentifikasikan Jenderal Suharto dengan Hanuman, pahlawan Ramayana, dan penghancurannya terhadap PKI setelah upaya kudeta yang gagal 1Oktober 1965 itu, sebagai suatu pembalasan karena telah membawa ke negeri itu suatu budaya asing, ideologi asing dan karena telah mengkhianati negara untuk kepentingan sebuah kekuatan asing. Bagi mereka PKI dan sekutu-sekutunya merupakan kekuatan dari “Kerajaan Rahwana yang Jahat”, yang dengan sigap sekali dikalahkan oleh Hanuman dan bala tentaranya.

Pendahuluan

kesempatan terakhir bagi berhasilnya gerakan itu, padahal kalau ia mau, dengan Sukarno sebagai kepalanya, ini adalah sebuah harga yang murah saja untuk dibayar bagi keuntungan jangka panjang dari persekutuan ini.

Presiden memulai sidang tawar-menawarnya dengan Aidit dengan memperlihatkan kepada para menteri kabinetnya, yang sedang berkumpul di meja makan di rumah Susanto, daftar para anggota Dewan Revolusi yang telah dibuatkan konsepnya oleh Aidit dan meminta komentar mereka. Dalam diskusi yang menyusul setelah itu, Presiden memperlihatkan keinginannya untuk mendapatkan sebuah tempat dalam Dewan itu, menarik pandangan mereka ke arahnya dan mendapatkan persetujuan untuk memasukkan nama-nama mereka sebagai anggota. Bahkan Men/Pangak Sutjipto, yang akan mencap tindakan Untung itu sebagai sebuah kudeta dan pada permulaannya terusterang menolak namanya dicantumkan dalam daftar itu tanpa persetujuannya, karena ia datang terlambat, namun karena Presiden memasukkan namanya, ia mulai merasa reda dan mengatakan bahwa ia akan mengikuti Presiden, dan mempersilahkan Presiden memutuskan masalah itu. Dengan muslihat ini, Presiden membawa para anggota terkemuka dari Kabinet Dwikora itu ke bawah atap Dewan Revolusi sebagai anggotanya. Setelah itu, Dewan ini, yang akan terdiri dari darah “revolusioner” baru, akan diubah menjadi Kabinet Gotong Royong, yang dipimpin Aidit, ke mana Dewan Revolusi itu akan menyerahkan kekuasaannya dan membubarkan diri, sehingga dengan demikian telah menyelesaikan peran sejarahnya.

Setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota kabinet, Presiden berpaling kepada Omar Dhani dan memintanya untuk menghubungi Supardjo di CENKO II, dan memanggilnya untuk segera melapor kepada Presiden. Secepatnya Supardjo tiba, masuk ke dalam rumah itu melalui pintu belakang, dan selama berkonsultasi secara pribadi, Presiden mengusulkan padanya bahwa nama-nama anggota kabinet yang hadir di rumah Susanto itu ditambahkan ke dalam daftar para anggota Dewan Revolusi, dan agar ia dikukuhkan kembali sebagai Presiden. Melalui proses yang dijelaskan di atas, Aidit setuju, mengubah daftar itu sehingga mencakup nama-nama mereka dan mengizinkan untuk disiarkan tidak lama setelah pukul 14.00, setelah disiarkannya *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi. Presiden mendengarkan siaran ini dari sebuah radio transistor kecil yang dibawa oleh Brigjen Sabur ke dalam kamar di rumah Susanto itu, dan meskipun merasa puas bahwa nama-nama anggota kabinet Dwikora dimasukkan ke dalam daftar, namun ia marah karena posisinya sebagai Presiden tidak dikukuhkan dan bahwa kabinet Dwikoranya telah dibubarkan,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

kendaraan menuju sistem Gotong Royong dan kemajuan revolusioner, terhadap mana ia sendiri telah menyatakan komitmennya kepada Aidit.

Terlepas dari kekecewaan itu, Presiden membuka diri kepada Aidit sekali lagi dengan jalan mengundangnya untuk mengusulkan seorang calon sebagai Men/Pangad sementara untuk menggantikan Jenderal Yani. Presiden sekali lagi memanggil Supardjo, yang kembali dengan nama Mayjen Pranoto sebagai calon Aidit, dan Pranoto langsung diangkat dengan menyisihkan calon-calon lain yang juga dipertimbangkan, seperti Mayjen Ibrahim Adjie, Mursjid dan Suharto. Presiden, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, mengeluarkan sebuah perintah pada pukul 16.00 yang menyatakan bahwa ia sendiri telah mengambil-alih komando atas AD, dan mengangkat Pranoto Ass.III Men/Pangad sebagai *caretaker*, dan memerintahkan penghentian segala bentuk permusuhan secara langsung di semua pihak, dan memberikan sebuah salinan dari perintahnya itu untuk disampaikan kepada Aidit untuk menghentikan segala operasinya. Namun Aidit tidak mematuhi, malahan mengirim Pranoto ke KOSTRAD untuk menetralkan Suharto dengan jalan mengambil-alih komandonya dan memerintahkan semua kesatuan AD di seluruh negeri untuk memberikan dukungan kepada Dewan Revolusi. Sayang sekali bagi Aidit, Pranoto tidak berhasil dalam misinya untuk berusaha membalikkan kecenderungan yang menghancurkan ini, karena setelah sampai di KOSTRAD, Suharto dan Nasution boleh dikatakan telah menjadikan Pranoto “dalam tahanan”, sehingga menggagalkan rencana Aidit.

Ketika Supardjo muncul di CENKO II dengan sebuah copy dari perintah Presiden di tangannya, maka hati Untung cs amat kecewa. Setelah suatu perdebatan panjang dan sengit, maka pertemuan mereka itu sampai kepada suatu kesimpulan bahwa GESTAPU telah gagal, dan memutuskan bahwa semua aktivitas yang mencoba menggulingkan Presiden harus dihentikan, akan tetapi pertempuran akan tetap berlanjut untuk mempertahankan Presiden dalam menghadapi NATO, sebuah singkatan yang dibuat untuk kekuatan NASUTION-SUHARTO yang sedang dimobilisasi oleh KOSTRAD. Di sini berakhirilah “Kekuatan Kembar” itu, dengan Presiden berada di puncak segala kejadian itu, dan Dewan Revolusi menghilang ke dalam sejarah sebagai sebuah kudeta yang gagal.

Pada pukul 20.00 Sjam, Untung dan Supardjo diambil oleh Mayor Udara Sujono, dalam mobil pimpinannya, untuk menemui Aidit di markas besarnya guna melaporkan kegagalan GESTAPU dengan terus melanjutkan usaha “tanpa” Presiden dan bila perlu menentanginya. Namun kenyataannya, mereka

Pendahuluan

mengusulkan bahwa sekarang ini PKI haruslah membela dan mempertahankan Presiden dalam menghadapi Suharto dan mengajurkan agar Aidit meninggalkan Halim dan pergi ke Yogyakarta untuk mendirikan sebuah Pemerintahan Sementara di sana, dan membuat persiapan-persiapan untuk memindahkan Presiden ke kota itu. Tidak semuanya hilang, demikian keyakinan mereka. Di Yogyakarta, Aidit dapat menyusun sebuah “serangan balasan revolusioner” untuk mempertahankan Presiden dan Pemerintahan Sementara yang dipimpinnya, sebagaimana diharapkan bahwa pada waktu itu Jawa Tengah dan Jawa Timur akan berkobar-kobar karena Dewan Revolusi telah mengambil-alih kekuasaan setempat. Pada pukul 20.00, Aidit, dengan mengakui kalahnya gerakan itu di Jakarta, mulai membuat persiapan-persiapan untuk terbang ke Yogyakarta dengan sebuah pesawat yang disediakan Omar Dhani dan berangkat terbang setelah tengah malam. Dhani sendiri naik sebuah pesawat, berputar-putar di atas pulau Jawa selama enam jam, memerintahkan beberapa pesawat tempur untuk dipersenjatai dengan roket, mengirim ultimatum untuk membom KOSTRAD, dan akhirnya mendarat di Malang dalam keadaan lelah luar-biasa, sambil mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa dia dan AURI tidak ada hubungannya sama sekali dengan GESTAPU.

Ketika mengadakan rapat dengan Sjam, Untung dan Supardjo di markas besarnya sebelum berangkat ke Yogyakarta, Aidit mempertimbangkan kemungkinan untuk maju terus “dengan” Presiden, dan bukan mencoba menyingkirkannya, sebagaimana yang disarankan Supardjo sebelumnya. Namun bagaimanapun, keadaan sudah terlalu terlambat untuk *berubah pikiran*, karena seorang pemain baru yang kuat, Suharto dan kekuatan KOSTRAD-nya, telah muncul di layar panggung *wayang*. Dalam beberapa jam saja, Suharto telah menjadi pemain yang menonjol, dan dengan memerintahkan Presiden untuk dipindahkan dari Halim ke Istana Bogor, Suharto telah membebaskan diri Presiden dari pengendalian Aidit, dan dengan demikian menghancurkan rencananya untuk memindahkan Presiden ke Yogyakarta untuk memimpin Pemerintahan Sementara di bawah perlindungan PKI.

Kita telah melihat bahwa Jenderal Suharto, dengan gaya bahasanya sendiri yang khas Jawa, telah menolak undangan Latief untuk ikut-serta dalam GESTAPU, yang ditawarkan kepadanya pada pukul 23.00 tanggal 30 September di rumah sakit militer, dengan memilih sikap menunggu untuk melihat sendiri bagaimana Panglima Tertinginya, Presiden, akan bertindak. Karena mendengar di radio pada pukul 07.20 pagi bahwa Untung telah mengambil-alih kekuasaan, bahwa para jenderal telah diculik dan Presiden berada di dalam “perlindungan”

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Untung, maka Suharto mencap tindakan itu sebagai sebuah kudeta, dan memutuskan untuk menghancurkan konspirasi itu, membebaskan Presiden, dan untuk sementara mengambil tugas komando AD untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Legitimasi dan konstitusionalitas tindakannya ini mendapat dorongan besar ketika perintah Nasution dari tempat persembunyiannya untuk tujuan yang sama tiba di KOSTRAD lewat seorang utusan pada pukul 09.00 pagi. Saat pagi telah hampir tengah hari, Suharto dengan dibantu Mayjen Basuki Rachmat dan Mayjen Sobirin Mochtar, melakukan negosiasi penyerahan diri Batalyon 530. Pukul 18.00 ia mengambil alih pemancar radio dan Pusat Komunikasi dari pasukan Supardjo, dan tidak lama kemudian pergi ke pemancar radio untuk menilai kudeta itu sebagai petualangan kontra-revolusioner yang telah dipukul mundur itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Dalam pada itu ia mengumumkan pula bahwa Presiden berada dalam aman dan sehat wal'afiat dan bahwa operasi peumpasan gerakan kontra revolusioner yang menamakan dirinya "gerakan 30 September" sedang berjalan dengan bantuan massa rakyat yang progresif revolusioner.

Pada akhir sore itu, Ajudan Presiden, Kolonel Bambang Setyono Widjanarko muncul di KOSTRAD untuk meminta Pranoto agar ia melapor kepada Presiden sebagai pemimpin sementara AD. Namun, Suharto mengirimkan sebuah pesan kepada Presiden bahwa ia sendiri telah melaksanakan komando itu dan tidak akan mengizinkan Pranoto meninggalkan KOSTRAD. Pada akhirnya, ia memerintahkan Widjanarko untuk memindahkan Presiden dari Halim dan membawanya ke Bogor, karena ia merencanakan untuk menyerang Halim untuk menghancurkan kantong terakhir kekuatan GESTAPU.

Pesan Suharto kepada Presiden, yang dilaporkan kepadanya oleh Widjanarko kira-kira pukul 20.00, menjadikan Presiden panik karena terlempar ke dalam sebuah pusaran dua tekanan yang saling berlawanan. Widjanarko, Leimena, Sutjipto, dan isteri Presiden Dewi yang waktu itu sudah datang, menganjurkan Presiden untuk pergi ke Bogor. Sementara Omar Dhani, yang membawa Presiden ke sebuah kamar samping untuk suatu pertemuan pribadi, mendesaknya untuk terbang bersamanya ke Yogyakarta, dan siap untuk memanggil pesawat-pesawat jet tempur bersenjata untuk menjadi pengiring. Usul terakhir ini ditolak keras oleh semua orang dengan gigih sekali, karena mereka takut Dhani akan menculik Presiden dan siapa tahu juga malah menerbangkannya ke Cina untuk pensiun di sana secara paksa. Persis pada saat itu, Leimena membuat sebuah keputusan yang penting, dan dalam kata-katanya sendiri "membimbing tangan Presiden seperti seorang bocah kecil" dan membawanya ke sebuah mobil yang menuju ke Bogor pada kira-kira pukul

Pendahuluan

23.00. Karena melihat Presiden telah lolos dari tangannya dan ambisinya untuk menjadi Presiden telah hancur, maka Dhani meninggalkan rumah Susanto dengan penuh kemarahan, naik ke sebuah pesawat dan terbang ke suatu masa depan yang tidak pasti, untuk mendarat di Madiun untuk memisahkan dirinya dari kudeta itu dengan sebuah pernyataan bahwa ia dan AURI tidak ada hubungannya sama sekali dengan GESTAPU.

Pada saat para pemain utama meninggalkan tempat *wayang kulit* di rumah Susanto, maka kelap-kelip lampu minyak kelapa mulai menghilang dari layar putih, kesunyian segera menyelubungi kamar-kamar itu, dan drama terbesar di Indonesia modern telah masuk ke dalam kotak sejarah, untuk dikisahkan kembali dalam studi ini, lebih dari tiga dasawarsa kemudian.

AIDIT MENYALAHKAN PRESIDEN ATAS KEKALAHAN ITU

Dalam bagian penutup, studi ini berusaha untuk menjawab pertanyaan kenapa Aidit gagal? Penulis yakin bahwa Aidit benar dalam meletakkan kesalahan utama atas kehancuran GESTAPU itu pada pundak Presiden, karena telah mengingkari janjinya yang terdahulu untuk menunjuk sebuah Kabinet Gotong Royong setelah dihabisinya para jenderal puncak pimpinan AD (DOKUMEN No. 2), dan karena telah mengubah pikirannya mengenai mengundurkan diri ke Danau Angsa [Swan Lake] di Cina dengan alasan kesehatan.

Kenapa Presiden melakukan hal itu, hanya dapat dikira-kira saja, karena ia membawa rahasia itu sampai ke liang kubur di Blitar di mana ia dimakamkan tahun 1970. Alasan yang paling mungkin, disamping pertimbangan-pertimbangan tambahan lain, adalah keadaan kesehatannya yang menjadi jauh lebih baik. Sebagaimana dikatakan Dr. Leimena kepada penulis, dan Dr. Mahar telah bersaksi kemudian, Presiden waktu itu kuat seperti “Banteng Ketaton”, penuh semangat, kekuatan dan karisma dalam beberapa minggu langsung setelah dihabisinya para jenderal itu. *Wahyu tjakraningrat*-nya belum meninggalkannya.¹¹

¹¹ *Wahyu* berarti suatu penyingkapan rahasia dari Tuhan, atau inspirasi; *tjakraningrat* berarti piring suci yang digunakan raja dalam memerintah kerajaannya, sebuah lambang Jawa-Hindu untuk kekuasaan sekuler, *danda*, dari raja itu. Secara lebih tepat, ungkapan ini berarti hak ketuhanan raja.

Sebagai seorang tokoh mistik Jawa yang melaksanakannya, konsep ini sangat penting bagi Presiden karena hal itu mengabsahkan pemerintahannya dengan menghubungkannya dengan tradisi-tradisi kuno raja-raja Jawa. GAMBAR XIII memperlihatkan Raja Airlangga (1019-1049) dari Kediri, yang telah berinkarnasi sebagai Visnu, sedang mengendarai Garuda, dan memegang di tangannya *tjakra* atau *cakra*, dari *Cakrawartin*, penguasa dunia.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Di bawah kondisi yang bugar ini Presiden tentu tidak ingin pensiun, akan tetapi tetap berkuasa. Jelas sekali, ia ingin memimpin negara itu sebagai Presiden dan Pangti ABRI, meskipun harus bergandeng tangan dengan Aidit sebagai perdana menteri, menuju tahap selanjutnya dari revolusi. Ia ingin selalu menjadi pujaan orang—"Pemimpin Besar Revolusi dan Penyambung Lidah Rakyat"—yang ia cintai sedemikian rupa. Andai kata inilah tujuan-tujuannya yang faktual, maka seharusnya ia menyetujui, segera setelah Supardjo melapor kepadanya di Pusat Komando Halim kira-kira pagi pukul 10.30, didirikannya Dewan Revolusi, yang menempatkan dirinya sebagai kepala dan sekaligus juga Presiden, menunjuk Kabinet Gotong Royong dengan Aidit sebagai perdana menteri, dan langsung mengumumkan di radio ke seluruh negeri tentang rezim yang baru itu. Ini akan memberikan sinyal yang benar bagi Aidit, untuk "merangkul" Presiden dan maju bersama dengannya dan bukan menentangnya, sebagaimana telah dianjurkan Supardjo. Itu juga dengan jelas sekali akan memberi sinyal kepada Jenderal Suharto di KOSTRAD, yang sedang menunggu untuk melihat sendiri di mana berdirinya Presiden, ke arah mana Presiden akan pergi dan arah angin berhembus untuk menjadikan dia mengikuti bintang pedomannya, dan paling mungkin Suharto akan ikut dalam barisan. Meskipun di Pusat Komando Halim, Presiden telah menyetujui pembersihan itu dan menegaskan kembali posisinya sebagai kepala negara, namun ia tidak menyetujui adanya Dewan Revolusi, yang memaksa Aidit merubah rencananya semula dan makin keras dalam putusannya untuk maju terus tanpa Presiden.

Meskipun Presiden memperbaiki situasi itu ketika makan siang di rumah Susanto dengan menyerahkan kabinetnya ke bawah atap Dewan Revolusi dan dengan menunjuk calon Aidit, Pranoto sebagai panglima sementara AD, namun Aidit gagal memahami secara sigap kenyataan bahwa Presiden mulai jatuh ke tangannya. Semestinya Aidit membuka tangan, langsung merangkul Presiden sebagaimana yang dikatakan Supardjo dalam *OTOKRITIK*-nya (DOKUMEN No. 4), dengan jalan mengakuinya sebagai kepala negara. Besar sekali kemungkinannya bahwa Presiden dan Aidit akan mencapai kesepakatan dalam suatu tawar-menawar yang baru—dengan Presiden mengakui Dewan Revolusi dan menunjuk Kabinet Gotong Royong di bawah Aidit, sedangkan Aidit membiarkan Presiden tetap berada di pucuk pimpinan negara—seandainya Jenderal Suharto tidak campur-tangan dalam proses itu. Artinya, andaikan Presiden dan Aidit memiliki waktu lebih banyak untuk mewujudkan tawar-menawar yang baru itu. Dalam pandangan Supardjo di sinilah—dalam

Pendahuluan

kegagalan Aidit menangkap kesempatan yang muncul ketika Presiden mulai jatuh ke tangannya—terletak bagian pertanggung-jawaban Aidit atas kegagalan GESTAPU itu.

Dalam *OTOKRITIK*-nya Supardjo menganjurkan strategi mana yang harus diikuti Aidit, setelah hilangnya kesempatan yang lebih disenangi untuk maju “bersama” Presiden kepada penyelesaian politik setelah pembersihan di Pusat Komando Halim pada kira-kira pukul 10.30, dan sebelum Presiden memanggil para menteri-menteri. Di sini Supardjo menyiratkan bahwa Aidit semestinya harus maju terus dan radikal “tanpa” Presiden. Jalan radikal ini tentu memerlukan tindakan dijatuhkannya Presiden dengan jalan memerintahkan Untung untuk menahannya, atau dengan menggunakan kekuatan Pemuda Rakyat dan Gerwani dari Pondok Gede untuk menyingkirkannya, sambil menempatkan Omar Dhani di kedudukan Presiden, sebagaimana telah disetujui sebelumnya, menunjuk sebuah kabinet baru, mengeluarkan sebuah dekrit untuk langsung mendirikan Tentara Rakyat, dan menghadapkan bangsa itu kepada suatu *fait accompli* atas rezim yang baru itu. Seandainya hal ini dilakukan sebelum tengah-hari, dan seandainya hal ini disertai pula oleh seruan Presiden baru Omar Dhani untuk mengadakan pembangkangan umum di propinsi-propinsi untuk mengambil-alih kekuasaan secara lokal, untuk mana fondasinya telah diletakkan oleh Biro Khusus sejak bulan Agustus, maka pastilah GESTAPU akan berhasil.

Terlepas dari bagaimana skenario yang radikal ini tampaknya logis bagi Supardjo, yaitu maju terus “tanpa” Presiden sebagai satu-satunya jalan yang masih terbuka bagi Aidit setelah pilihan untuk bekerjasama “dengan” Presiden telah hilang di Pusat Komando Halim, Supardjo sendiri meremehkannya dalam *OTOKRITIK*-nya sebagai problematis, karena dalam pandangannya, Omar Dhani tidak ingin bertindak melawan Presiden. Jelas, Dhani telah mengubah pikirannya setelah melihat Presiden bersikukuh mempertahankan diri di pusat kekuasaan dan strategi Aidit telah runtuh di Pusat Komando Halim pukul 11.00 siang itu. Dengan demikian sebagai kesimpulan, strategi Aidit untuk maju terus “tanpa” Presiden, dengan mencoba untuk menyingkirkannya, adalah tidak realistis berdasarkan kondisi yang berkembang di Halim ketika itu.

Namun, sebuah kesempatan baru datang lagi kepada Aidit ketika sepanjang hari tanggal 1 Oktober 1965 itu, semakin jelas bahwa Presiden tidak dapat disingkirkan dan Omar Dhani tidak mau bekerjasama dalam rencana ini, namun dalam pada itu Presiden mulai jatuh ke tangan Aidit dengan mengangkat menteri-menteri puncaknya menjadi anggota Dewan Revolusi. Situasi yang berubah ini seharusnya menjadikan Aidit mengubah strateginya

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dengan cara maju “bersama” Presiden dan merangkulnya, sebagaimana disarankan Supardjo, untuk membuat sebuah kesepakatan baru. Bagaimanapun, hal ini seharusnya cepat-cepat dilakukan pada permulaan permainan, tentulah sebelum kekuatan Jenderal Suharto muncul di tempat itu sebagai suatu ancaman yang masuk akal untuk menghancurkan kemungkinan persetujuan. Benar bahwa Aidit tidak akan dapat memenangkan segala yang diharapkannya, namun ia akan memperoleh waktu dengan bersiasat lebih lanjut dengan Presiden berada di pihaknya. Dengan demikian, kesehatan Presiden yang membaik itu, yang mengakibatkan ia tidak mau mengundurkan diri telah menjadi faktor penentu yang bermain di hari terjadinya kudeta tanggal 1 Oktober 1965 yang menentukan itu.

Jadi berdasarkan analisis ini, mungkin seharusnya Aidit mendengarkan ramalan Dr. Mahar ketika bertemu dengannya tanggal 17 Agustus 1965 tentang kemungkinan sembuhnya Presiden, akan tetapi tentu saja semestinya ia membantu Presiden memotong leher Angkatan Darat dan dengan demikian menghilangkan kendala utama yang menghalangi jalan ke kekuasaan bagi partainya. Setelah ini, Aidit semestinya menghentikan hasratnya untuk mengesampingkan Presiden dari kepemimpinan negara, dan justru sebaliknya harus bekerjasama dengannya untuk memantapkan kedudukan PKI dalam kekuasaan dan mendirikan Tentara Rakyat. Akan tetapi, di bawah kondisi yang baru itu, ketimbang melakukan revolusi agraria sebagai jalan menuju kekuasaan—ketika itu partai mungkin telah berada di tampuk kekuasaan—maka tujuannya adalah menegakkan kolektivisasi tanah di pedesaan dan nasionalisasi segala sumber daya dan industri, dan makin meminggirkan kedudukan AD yang telah mulai sirna itu. Bagi PKI, mundur dari jalan “revolusioner” ini pada dasarnya berarti kembali kepada strategi Moskow tentang peralihan secara damai kepada Demokrasi Rakyat di Indonesia, yang telah ditinggalkan pada tahun 1964. Strategi ini, setelah keberhasilan Presiden mengebiri komando puncak AD pada tanggal 1 Oktober, jelas sekali merupakan jalan kepada kekuasaan yang harus ditempuh PKI, sebuah jalan yang langgeng hidupnya, murah modalnya, dan tidak banyak risikonya.

Supardjo memiliki visi ke depan dan keberanian untuk mempertahankan strategi ini ketika menghadapi Presiden di Pusat Komando Halim pada pukul 10.30 tanggal 1 Oktober 1965, persis di tengah upaya Aidit menyingkirkannya dari kekuasaan, di mana Supardjo menentang upaya Aidit dengan jalan bersatu dengan Presiden. Bahkan ketika itu, belumlah begitu terlambat untuk mengubah haluan. Akan tetapi, untuk ini Aidit tidak siap, dan ketika ia telah

Pendahuluan

siap pada sore harinya, keadaan sudah begitu terlambat, karena kekuasaan telah pergi menyelinap baik dari Presiden maupun Aidit ke tangan Jenderal Suharto dan tidak ada lagi waktu yang tinggal untuk melaksanakan kesepakatan baru antara Presiden dan Aidit.

Apa yang terjadi setelah itu membuktikan bahwa Dr. Mahar benar dalam hal kesehatan Presiden, karena Presiden lebih panjang umurnya ketimbang Aidit sebanyak lima tahun, setelah tertangkapnya Aidit di desa Sambeng dekat Surakarta tanggal 22 November 1965, dan selanjutnya ia ditembak mati. Presiden wafat tanggal 21 Juni 1970. Di saat itu, semestinya Aidit telah berada di tampuk kekuasaan lewat peralihan kekuasaan secara damai, sehingga tidak perlu melibatkan partainya dalam penderitaan akibat kekalahan dan kemudian penghancurannya, dan tidak perlu melibatkan negara dalam penyembelihan besar-besaran dan bermandikan darah yang demikian mengerikan yang terjadi setelah itu.

Sebaliknya, adalah pasti pula bahwa ketika itu, penjara-penjara negeri itu dan kamp-kamp kerja paksa telah dipenuhi oleh para tahanan politik, “musuh-musuh rakyat”, saat pertarungan kelas bertambah hebat pada saat tahap-tahap permulaan ditanamkannya diktatur proletariat di bawah sistem Demokrasi Rakyat. Sudah pasti bahwa jumlah mereka mencapai jutaan orang, jauh melampaui jumlah korban penyembelihan massal yang telah dilakukan di negara itu oleh GESTAPU yang gagal itu. Sebagaimana diperlihatkan oleh kepustakaan mutakhir, ditegakkannya kediktatoran Marxis telah menimbulkan biaya yang luar-biasa besar di abad yang baru lalu, dan percobaan-percobaan mereka yang gagal dalam melakukan rekayasa sosial dalam ukuran seluas mungkin telah meninggalkan sebuah warisan penderitaan dan kehancuran yang menakutkan pada saat umat manusia memasuki abad ke-XXI.¹²

Kata terakhir dari studi ini memberikan pujian kepada Jenderal Suharto karena telah melakukan intervensi tepat pada waktunya, waktu yang dipenuhi oleh kemungkinan terbentuknya persekutuan yang tidak terhormat antara Sukarno dan Aidit di rumah Susanto di Halim pada sore tanggal 1 Oktober 1965, yang “duumviratnya” mungkin bakal meletakkan negeri ini di jalan menuju Demokrasi Rakyat. Hal ini telah menyelamatkan negara dari keharusan untuk melalui kira-kira dua-puluh tahun lamanya akibat perkembangan mundur, karena sistem diktatur ini, dan sistem-sistem lain yang menyerupainya, setelah kehancuran Soviet pada tahun 1988, telah memasuki sebuah jalan yang

¹² Stephane Courtois (Ed.), *The Black Book of Communism: Crime, Terror, Repression*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

menjurus ke arah berbagai bentuk pluralisme politik dan demokrasi, yang memperkenalkan berbagai tingkat mekanisme pasar ke dalam perekonomian mereka. Ketika itu, model pembangunan Marxist-Leninis telah mati. Musim semi Praha yang dilakukan Dubcek dan teorinya tentang “Sosialisme dengan Wajah Kemanusiaan”, “Komunisme Goulash” oleh Kadar di Hongaria, teori Mao “Lompatan Besar ke Depan” di Cina, “Padang Pembantaian” milik Pol Pot di Kamboja, “desa bersama” milik Ho Chi Minh di Vietnam, dan “Perestroika” Gorbachev di Rusia, semuanya itu merupakan batu nisan yang menandai kuburan model pembangunan Marxis-Leninis itu.

Duumvirat Sukarno-Aidit mungkin saja telah memasukkan model ini secara diam-diam ke Indonesia, jika tidak dihentikan oleh Jenderal Suharto dan kaum militer yang berkumpul di bawahnya pada tanggal 1 Oktober 1965 yang menentukan itu. Dengan demikian, satu-satunya faktor yang tetap di cakrawala politik Indonesia di hari itu adalah bintang pedoman Presiden Sukarno. Aidit telah membayar dengan mahal sekali karena telah melanggar dalil ini karena telah coba-coba untuk maju terus sendirian tanpa Presiden, sementara Jenderal Suharto meraih keuntungan politik yang amat besar dengan melakukannya, yang menjadikannya tetap berkuasa selama tiga dekade yang panjang.

SEBUAH VERSI TERDAHULU DARI STUDI INI

Setiap buku sejarah pun memiliki sejarahnya sendiri. Sebuah versi terdahulu dari buku ini, bersifat pendahuluan, dan masih dalam tahap percobaan, berdasarkan bukti-bukti yang terdapat ketika itu, telah ditulis di Nanyang University, Singapura, di mana saya bertugas sebagai Ketua Departemen Pemerintahan dan Administrasi Publik, dan sebagai Direktur Pusat Studi Asia Tenggara, dari tahun 1962 sampai 1971. Kemudian studi ini dibacakan pada Internasional Conference on Asian History yang digelar di Universitas Malaya di luar Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 5-10 Agustus 1968, dengan judul “THE SEPTEMBER 30 MOVEMENT IN INDONESIA, 1965: A Gambler That Failed”.¹³

Setelah konferensi itu, saya mengunjungi Jakarta pada September 1968 untuk melakukan penelitian *in situ* (di tempat kejadian), dan dalam hubungan

¹³ Diterbitkan sebagai Monografi oleh Lembaga Studi Asia Tenggara, Nanyang University, Singapura, 1968.

Pendahuluan

ini sempat berwawancara dengan dua peserta langsung dalam *musyawarah besar* yang diadakan di rumah Susanto di Halim saat drama *wayang kulit* waktu makan siang tanggal 1 Oktober 1965 itu berlangsung. Wawancara pertama dengan Dr. Johannes Leimena, mantan Waperdam II dalam Kabinet Dwikora, di tempat kediamannya di Jakarta tanggal 20 September 1968, mulai pukul 06.30 sampai pukul 08.30 pagi. Wawancara kedua dengan Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, di tempat kediamannya di Jakarta tanggal 21 September 1968 dari pukul 08.30 sampai pukul 10.00 pagi.

Dalam kunjungan ke Jakarta itu, saya mengumpulkan banyak bahan dari sumber primer, terutama sekali dari Dr. Kolonel Nugroho Notosusanto, Direktur Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan. Ia mengatur kunjungan saya ke Pangkalan Udara Halim, Pondok Gede dan Lubang Buaya, sumur tua tempat dilemparkannya jenazah para jenderal yang telah dibunuh itu. Ia juga memintakan izin bagi saya untuk membuat foto-foto di Halim, rumah-rumah di mana para pelaku utama saling terlibat dalam permainan adu kekuatan yang dilakukan di rumah Susanto. Rumah Komodor Udara Susanto difoto dan diselidiki. Inilah markas besar Presiden Soekarno dari mana ia berunding dengan Aidit, dengan dikelilingi oleh Dr. Leimena, Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, Marsekal Udara Omar Dhani, Laksamana Martadinata dan Jaksa Agung Brigjen Sutardjo. Demikian pula rumah Sersan Udara Suwardi difoto dan kamar-kamarnya diselidiki. Inilah yang menjadi markas besar pimpinan politik PKI dari mana tiga anggota Politbironya—Aidit, Lukman dan Njono—mengarahkan seluruh operasi.

Juga rumah Sersan Udara Anis Sujatno difoto dan diselidiki, markas besar Central Komando (CENKO II), yang memimpin operasi militer GESTAPU, yang terdiri dari Letkol Untung bin Sjamsuri, Brigjen Mustapa Sjarif Supardjo, Letkol Udara Heru Atmodjo, Mayor Udara Sujono, Letkol Abdul Latief, Sjam alias Kamarusaman, Direktur Biro Khusus PKI, dan Walujo dan Pono, keduanya pembantu Sjam. Foto-foto itu dimuat dalam buku ini dalam halaman Gambar.

Di Jakarta, pertama-tama saya mengunjungi KOSTRAD, kemudian markas besar Resimen Pengawal Presiden Tjagrabirawa, markas besar Garnisun Jakarta, Stasiun Radio (RRI), Pusat Komunikasi dan Istana Merdeka. Di istana, saya diberi kesempatan untuk membaca dokumentasi pengadilan Sjam.

Kunjungan penelitian saya yang kedua ke Indonesia terjadi dalam bulan April 1971, untuk mengumpulkan bahan sumber tambahan mengenai GESTAPU dan melakukan wawancara. Di kantor TEPPERPU (Tim Pemeriksa Pusat) Brigjen A. Tahir, maka Letkol Djiwo Sugondo, yang kami wawancarai

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

secara panjang-lebar tanggal 29 April 1971, telah berbaik hati memasok dan menata klasifikasi dari sejumlah dokumen. Dr. Nugroho Notosusanto, yang ketika itu telah dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen, kami wawancarai tanggal 29-30 April 1971, dan lagi-lagi di sini diperoleh sumber-sumber primer yang penting.

Sayang sekali, ketika kembali ke Singapura, tugas-tugas dan tanggung-jawab akademik dan administratif di Nanyang University telah menghalangi saya untuk melanjutkan kerja mengolah dokumentasi yang diperoleh di Jakarta dalam dua kunjungan studi di atas. Bahan-bahan itu disimpan dan kemudian dipak dengan hati-hati sekali dan saya bawa ke Kanada pada tahun 1971 untuk ikut terlibat mengelola Brock University di St. Catharines yang baru berdiri, sebagai ketua Departemen Ilmu Politiknya. Di sini juga saya tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengolah kisah GESTAPU karena tanggung-jawab berkenaan dengan membangun departemen itu, Program Studi Asia, dan kemudian juga sebagai Direktur Pusat Studi Kanada dan Asia Pasifik di universitas tersebut. Bahan-bahan tadi menjadi terlantar, tergeletak dalam gudang Pusat Studi itu sampai tahun 1996, ketika datang sebuah kesempatan untuk tinggal setahun di Jakarta.

Selama tinggal di Jakarta ini, terutama hubungan saya dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menghidupkan lagi perhatian saya untuk kembali mengerjakan kisah GESTAPU, dan berdasarkan ini, saya menulis surat kepada Presiden Suharto tanggal 31 Oktober 1996 meminta waktu untuk wawancara. Sayang sekali, permintaan ini tidak ditanggapi. Padahal saya ingin mewawancarainya tentang peristiwa amat penting: pertemuannya dengan Latief di rumah-sakit militer di Jakarta tanggal 30 September 1965 pukul 23.00, ketika Latief membesuk anaknya Tommy yang dirawat akibat ketumpahan sup panas pada malam sebelumnya. Dalam pertemuan itulah Latief mengundang Suharto untuk ikut-serta dalam GESTAPU, tetapi ditolak oleh jenderal itu.

SUMBER-SUMBER YANG DIGUNAKAN DAN TINGKAT KREDIBILITASNYA

Studi ini terambil dari sumber-sumber primer berikut. Pertama, dokumen-dokumen yang diterbitkan PKI dalam periode 1963-1965, terutama sekali Laporan Politik Aidit kepada Sidang Pleno ke-IV CC PKI, yang disampaikan

Pendahuluan

tanggal 1 Mei 1965,¹⁴ dan *The Thesis on the 45th Anniversary of the Foundation of the PKI*, yang diterbitkan tanggal 7 Mei 1965.¹⁵ Sebuah sumber primer yang penting adalah surat Aidit keada Presiden Sukarno tanggal 6 Oktober 1965, dan kemudian suratnya tentang *Instruksi-instruksi Tetap Aidit kepada Seluruh CDB Se Indonesia* tanggal 10 November 1965. Keduanya itu termasuk dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan pada studi ini.

Kedua, notulen MAHMILLUB, yang mengadili orang-orang yang mengorganisasi GESTAPU dalam sebuah pengadilan terbuka, dan kesaksian-kesaksian mereka disiarkan Radio Jakarta dengan panjang-lebar (waktu itu nama kota masih ditulis Djakarta), dan dimonitor di luar negeri. Dalam hubungan ini, studi kami menggunakan *Summary of World Broadcast: Far East* (Ringkasan Siaran Dunia: Timur Jauh), yang diterbitkan oleh the Monitoring Service of the British Broadcasting Corporation, Caversham, Reading, Berkshire, the United Kingdom.

Ketiga, catatan pengadilan yang diterbitkan saat diadilinya pemain-pemain utama dalam peristiwa GESTAPU: Untung, Supardjo, Latief, Njono, Sudisman, Subandrio, Omar Dhani dan lain-lain. Namun, sumber tunggal yang paling penting adalah catatan pengadilan Sjam, alias Kamarusaman, Direktur Masalah-Masalah Khusus Biro Politik PKI, yang dikenal sebagai Biro Khusus, yang didirikan Aidit pada tahun 1964. Sjam ditangkap tanggal 9 Maret 1967, dan pengadilannya dimulai tanggal 9 Februari 1968.¹⁶ Dalam kategori sumber-sumber primer ini termasuk dua buah dokumen tentang kritik terhadap diri-sendiri, *OTOKRITIK* Supardjo dan Sudisman, juga kesaksian Jenderal Nasution dan Brigjen Sugandhi. Sebuah kumpulan yang cukup luas tentang catatan-catatan pengadilan itu, dan materi sumber primer yang lain, disimpan

¹⁴ D. N. Aidit, *Perhebat Ofensif Revolusioner Disegala Bidang*, Laporan Politik Kepada Sidang Pleno Ke-IV CC PKI Jang Diperluas tanggal 11 Mei 1965, Jajasan 'Pembaruan', Djakarta 1965.

¹⁵ *Harian Rakjat*, Djakarta, 7 Mei 1965.

¹⁶ Sjam mengenal Aidit di Yogyakarta antara tahun 1945 dan 1946, dan sempat kehilangan kontak dengannya, tetapi bertemu sekali lagi tahun 1949. Ketika itu Aidit sedang kembali dari Cina dengan sebuah kapal, dan ketika mendarat di Tanjung Priok di Jakarta, ia ditahan karena tiket dan surat-suratnya tidak beres. Sjam, yang ketika itu adalah seorang pengurus serikat buruh di pelabuhan itu, mengusahakan agar Aidit dikeluarkan dari penjara, dan pada gilirannya Aidit mengundangnya untuk ikut dalam PKI, yang memang ia lakukan. Dari tahun 1951-1954 Sjam adalah seorang anggota Dewan Serikat Buruh Nasional, SOBSI, dan mulai tahun 1957 menjadi asisten pribadi Aidit. *Perkara Sjam*, tanggal 19 Februari sampai 9 Maret, 1968. *MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA*, Berkas No. PTS-027/MLB-I/K/1968, hlm. 80, paragraf. 338.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

di perpustakaan Institute of Southeast Asian Studies di Singapura. Kebanyakan penelitian untuk studi ini telah dilakukan di perpustakaan Institute tersebut antara tahun 1968 hingga 1971.

Keempat, wawancara dengan Dr. Leimena, Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, Brigjen Nugroho Notosusanto, Kolonel Sunardi, Letkol. D. Sugondo dan perwira-perwira lain Tim Pemeriksa Pusat (TEPERPU) Brigjen A. Tahir, yang diadakan tahun 1968 dan 1971.

Kelima, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perdebatan sengit di kalangan PKI sendiri yang mengevaluasi sebab-sebab dilakukannya kudeta, dan sebab-sebab kegagalannya, yang diterbitkan oleh sayap PKI yang pro-Moskow dan yang pro-Peking, setelah terpecahnya partai itu lantaran konsekuensi-konsekuensi yang menghancurkan dari kekalahan itu.

Keenam, dokumen-dokumen CIA, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Gedung Putih yang telah dideklasifikasikan berkenaan dengan Indonesia dari tahun 1964 sampai 1965, dan diterbitkan pada tahun 2001.¹⁷ Bukti ini digunakan untuk menyelidiki tuduhan bahwa CIA dan badan-badan Amerika Serikatlah, yang telah menghasut militer Indonesia untuk merencanakan sebuah kudeta, yang akan dilaksanakan dalam bulan Oktober 1965, untuk mendahului PKI dalam usaha merebut kekuasaan.

Sejak awal pekerjaan mempelajari GESTAPU tahun 1965, penulis sangat mementingkan keterhandalan dan dapat dipercayainya sumber-sumber yang digunakan, karena sadar sekali tentang sebuah peribahasa lama yang mengatakan bahwa setiap potong karya ilmiah adalah sama baiknya dengan keterandalan sumber-sumbernya.

Namun, keterandalan sumber-sumber yang digunakan dalam studi pendahuluan saya tentang kudeta itu telah mendapat serangan dari Profesor Wertheim saat dibacakan pada Internasional Konference on Asian History yang digelar di Universitas Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 5-10 Agustus 1968, dengan judul "THE SEPTEMBER 30 MOVEMENT IN INDONESIA, 1965: A Gambler That Failed". Profesor Wertheim menuduh bahwa dokumen-dokumen PKI yang dikutip dalam makalah saya itu telah dibuat-buat oleh pihak militer untuk melibatkan PKI dalam kudeta; dan bahwa peristiwa itu sendiri pun adalah petualangan Jenderal Suharto sendiri yang bertujuan untuk

¹⁷ Edward C. Kee (Editor). *Foreign Relations 1964-1968, Vol. XXVI, Indonesia; Malaysia; Singapore; Philippines*. Washington: The United States Government Printing Office, 2001.

Pendahuluan

menghancurkan PKI; bahwa Sjam, “tokoh misterius” itu, tidak pernah ada dan hanya merupakan sebuah ‘sosok fiktif’ yang diciptakan oleh pihak militer; dan bahwa mereka yang dituduh terlibat telah diadili dalam sebuah pengadilan tidak sah yang melanggar HAM karena tidak adanya proses yang wajar dan karena mendapat pengakuan mereka dengan cara paksa, sambil memperbandingkannya dengan cara kerja pengadilan yang mengadili kaum Nazi.

Untuk menjawab tuduhan mengada-ada itu, saya minta Profesor John F. Cady, yang mengetuai sidang, untuk memberi izin saya memaparkan dalam sidang itu dokumen-dokumen asli yang digunakan dalam studi saya, dan kemudian mengeluarkan semuanya itu dari tas untuk memperlihatkan bahwa ini adalah benar-benar dokumen-dokumen PKI yang asli dengan izin penerbitannya jelas tampak tertera di halaman-halaman judul serta bukti-bukti lain yang memperkuatnya. Setelah itu, Profesor Harry J. Benda meminta berbicara dan menjawab segala pertanyaan tentang mahkamah militer luar biasa. Ia mengatakan bahwa ia familiar dengan sistem pengadilan yang ditinggalkan Belanda di negeri itu. Ia yakin bahwa sistem itu kuat sekali dalam hal kaidah-kaidah prosedur, hukum pembuktian, dan perlindungan-perindungan lain yang menjamin pengadilan yang adil dan tidak memihak. Lagi pula, kata Profesor Benda, ia telah membaca tuduhan-tuduhan pihak penuntut umum terhadap beberapa orang yang tertuduh itu, bukti yang dikemukakan pihak kejaksaan, pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pengacara penuntut, pembela dan hakim-hakim yang mengetuai sidang, dan setelah itu menjawab Profesor Wertheim bahwa dalam pandangannya pengadilan ini bukanlah pengadilan tidak sah yang mirip dengan pengadilan atas kaum Nazi.

Setelah konferensi itu, saya mendiskusikan masalah kemungkinan Sjam yang palsu itu dengan Kolonel Nugroho Notosusanto dalam kunjungan saya ke Jakarta bulan September 1968. Untuk memastikan identitas Sjam, saya bersikeras untuk diberi kesempatan yang tidak terbatas untuk melihat keseluruhan arsip-arsipnya, bukan berkas-berkas tertentu saja, sehingga saya dapat menyelidikinya tanpa ada campur-tangan dan pengawasan. Permintaan itu diberikan, dan selama sehari penuh saya dapat meneliti keseluruhan berkas Sjam itu, dengan seorang penjaga bersenjata berdiri di sudut kamar yang juga memberi saya teh bercangkir-cangkir. Satu-satunya pembatasan yang diwajibkan kepada saya adalah membuat catatan-catatan dan menyalin

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dokumen-dokumen itu, karena ini masih merupakan sebuah “berkas yang aktif”, dengan interogasi yang sedang berlangsung atas beberapa tersangka yang disebutkan di dalam berkas itu. Saya setuju sekali, karena tidak melihat hal ini sebagai pelanggaran kebebasan penyelidikan akademis. Pada akhir hari, saya tinggalkan berkas dengan keyakinan bahwa Sjam adalah seorang manusia yang riil dan merupakan tokoh kunci di Biro Khusus PKI itu, mengatur kudeta itu sebagai pembantu Aidit, dan mengarahkan atas nama PKI, Supardjo, Untung, Latief dan anggota-anggota militer utama yang lain dalam konspirasi itu.

Keyakinan saya akan kredibilitas segala kesaksian dan pengakuan dari para tersangka itu diuraikan dalam tuduhan penuntut umum terhadap mereka—apakah semua pengakuan itu tidak didapat dengan menggunakan paksaan—terbukti lebih sukar lagi. Saya tidak diizinkan untuk mewawancarai beberapa tahanan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada mereka. Meskipun risalah pengadilan yang telah diterbitkan telah dipelajari untuk mencari bukti-bukti pemaksaan dan manipulasi barang bukti, hanya ketidak-konsekuensi kecil-kecil saja yang ditemui tentang waktu yang tepat dari beberapa kejadian dan rincian lainnya. Ini sama sekali bukan berarti bahwa beberapa dari pengakuan dan kesaksian tidak diperoleh dengan cara paksa. Seperti diperlihatkan oleh catatan pengadilan, banyak dari tersangka itu yang menolak untuk mengakui kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi dinyatakan bersalah dengan kesaksian para tersangka yang lain ketika diadakan pemeriksaan berulang-ulang bagi mereka dan pada saat kesaksian mereka dikonfrontasikan.

Namun, terlepas bahwa semua kesaksian itu diperoleh secara paksa atau tidak, sebuah terobosan penting tentang masalah ini terkuak dalam tahun 1971, ketika saya memperoleh satu copy dari *OTOKRITIK* Supardjo, yang ditulis di tempat persembunyiannya, yang dapat dicegat oleh pejabat penjara ketika Supardjo berusaha menyelundupkannya ke dalam sel penjara Omar Dhani melalui perantara. Dengan memberikan tanggal, waktu dan tempat, dan dengan menjelaskan dalam bentuk yang sangat terperinci aktivitas-aktivitas para pelaku utama di Halim dan di tempat-tempat lain, dokumen Supardjo ini sepenuhnya menyalahkan Presiden Sukarno, Omar Dhani, Pranoto, Aidit, Sjam, Untung, Latief dan lain-lain, terlepas dari apakah mereka mengemukakan pengakuan itu di bawah tekanan atau tidak, menyanggah aktivitas-aktivitas mereka atau sama sekali menolak untuk memberi kesaksian. Setelah mempelajari dokumen Supardjo itu, saya tidak melihat adanya alasan yang kuat lagi untuk tidak

Pendahuluan

menggunakan dalam studi saya bukti-bukti yang dikemukakan oleh catatan pengadilan karena OTOKRITIK Supardjo ditulis di tempat persembunyian ditemukan November 1966, setahun setelah kejadian, dan tentu bebas dari tekanan penyidikan.¹⁸

HARUSKAH LARANGAN TERHADAP MARXISME-LENINISME DICABUT?

Kotak-kotak berisi bahan-bahan tentang GESTAPU, yang telah dikumpulkan dalam tiga kali kunjungan lapangan saya ke Jakarta tahun 1968, 1971 dan 1996-1997, baru dibuka dan dihilangkan debu-debunya di Kanada tahun 1997 sehingga studi ini dapat diselesaikan setelah terlambat sekitar 35 tahun. Dalam menghidangkan studi ini kepada pembaca, kini penulis hanya mempunyai satu tujuan saja, yaitu memberikan sebuah sumbangan yang sederhana kepada perdebatan yang sedang seru-serunya di Indonesia dewasa ini dan menghimbau agar dinilai kembali sejarah mutakhirnya, terutama sekali peristiwa GESTAPU tahun 1965, karena dampaknya yang dahsyat masih tetap belum terungkap. Menteri Pendidikan dalam Pemerintahan Presiden Wahid, Yahya Muhaimin, membentuk sebuah tim ilmuwan untuk meninjau ulang buku-buku sejarah di sekolah-sekolah untuk meyakinkan bahwa semuanya itu menggambarkan dengan tepat apa yang telah terjadi di Indonesia kala itu. “Ini penting sekali, sehingga anak-anak kita dapat mengetahui fakta-faktanya,” demikian ia menambahkan.¹⁹ Juga peringatan tahunan Hari Kesaktian Pancasila, yang diadakan tiap tanggal 1 Oktober 2000, diberi nama kembali sebagai “Peringatan Tragedi Nasional karena Mengkhianati Pancasila”.²⁰

Sayang sekali, tidak banyak karya ilmiah Indonesia atau internasional yang baru dan mendalam yang telah dilakukan mengenai GESTAPU dalam hari-hari pertama yang mengiringinya pada tahun 1965, menurut Dr. Hermawan

¹⁸ Untuk sebuah penyelidikan yang hati-hati tentang keabsahan kesaksian-kesaksian yang diajukan dalam pengadilan itu, terutama sekali yang berasal dari Bambang Widjanarko, lihatlah Anthonie C. A. Dake, *In the Spirit of the Red Banteng: Indonesian Communists between Moscow and Peking 1959-1965*. The Hague: Mouton, 1973.

¹⁹ “Indonesia’s Reformist Government Reviews History Textbooks”. *The Straits Times*. Singapore, 3 Oktober 2000.

²⁰ “New Theme for Pancasila Day”. *The Jakarta Post*, 1 Oktober 2000; “Betrayal of Pancasila Tragedy Commemorated”. *The Jakarta Post*, 2 Oktober 2000.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Sulistyo, Direktur dari Research Institute for Democracy and Peace (RIDEP) di Jakarta, yang baru-baru ini telah menyelidiki bibliografinya.²¹

Perlunya studi-studi yang serius dan berdokumentasi baik tentang GESTAPU ditonjolkan oleh kontroversi nasional yang meledak setelah Presiden Wahid, yang biasa dipanggil “Gus Dur”, mengucapkan rasa menyesal secara publik, kepada para korban pembunuhan massal dan keluarga mereka, karena penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, dan setelah itu usulnya agar larangan yang dikenakan kepada ajaran Marxisme-Leninisme lewat TAP MPRS No. XXV tanggal 6 Juli 1966 dicabut. Lagi pula, Presiden berusaha mengadakan kerja-sama yang lebih erat dengan Partai Komunis Cina, dan pada tanggal 20 September 2000 menyambut delegasi Cina yang terdiri dari delapan orang di Istana Presiden, yang diundang ke Jakarta oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai baru yang didirikannya setelah kejatuhan Suharto. Delegasi itu dipimpin oleh Dai Bingguo, Ketua Departemen Urusan Internasional, Komite Sentral Partai Komunis Cina, yang mengatakan bahwa tujuan dari kunjungannya itu adalah untuk menjalin “suatu hubungan yang lebih erat lagi antara Partai Komunis Cina dan Partai Kebangkitan Bangsa”.²²

Argumentasi paling meyakinkan yang mendukung usul Presiden dikemukakan oleh J. Soedjati Djiwandono, seorang analis senior dari CSIS, yang mengatakan bahwa larangan itu telah melanggar Pasal 18 dari the Universal Declaration of Human Rights, dimana Indonesia adalah salah satu penanda-tangannya. Lagi pula, ia berdalih bahwa mantan Presiden Suharto telah melarang PKI tanggal 12 Maret 1966 sebagai sebuah organisasi politik, berdasarkan SUPERSEMAR (surat perintah 11 Maret 1966), namun keberadaan dokumen itu sendiri sudah agak lama juga dipertanyakan orang.²³ Demikian pula, katanya, larangan itu telah didasarkan atas sebuah tuduhan bahwa PKI telah merencanakan GESTAPU, namun tuduhan ini “belum pernah dibuktikan secara pasti”. Lebih jauh, Soedjati mengemukakan bahwa larangan terhadap

²¹ Hermawan Sulistyo, (Op. Cit.), hlm. 4-92.

²² “Gus Dur Meets Chinese Party Delegates”. *The Jakarta Post*, 21 September 2000.

²³ “Controversy over Elusive Document Revives Interest in Indonesian Coup”. *The Jakarta Post*, 31 Maret 2000. Dalam kunjungannya ke Arsip Nasional tanggal 4 Mei 2001, Megawati Sukarnoputri yang ketika itu menjadi Wapres, memerintahkan lembaga arsip itu untuk menelusuri dokumen asli dengannya bapaknya telah melimpahkan kekuasaan kepada Jenderal Suharto tanggal 11 Maret 1966. Ketika ia bertanya kepada Mukhlis Paeni, Direktur Arsip Nasional tentang dokumen yang hilang itu, diberitahukan kepadanya bahwa meskipun yang aslinya telah hilang, namun dua versinya masih terdapat di badan arsip itu: yang satu dikeluarkan oleh Pusat Penerangan Angkatan Darat, dan yang satu lagi oleh Sekretariat Negara. Direktur itu mengatakan bahwa ada perbedaan-perbedaan yang mencolok antara keduanya. “Vice President Orders Search for Supersemar “. *The Jakarta Post*, 4 Mei 2001.

Pendahuluan

PKI tanggal 12 Maret 1966 itu bahkan tidak menyebutkan Marxisme-Leninisme sama sekali, dan bahwa ideologi komunis itu kemudian dilarang dengan diundangkannya TAP MPRS No. XXV, oleh “Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak tahu-menahu itu” tanggal 6 Juli 1966.²⁴

Malah sebaliknya, J. Soedjati Djiwandono berargumentasi secara meyakinkan sekali bahwa “Sesungguhnya, untuk mencegah munculnya komunisme, baik sebagai ideologi maupun sebagai suatu sistem kepercayaan, atau sebuah gerakan politik dalam bentuk sebuah partai komunis, adalah tidak efektif dengan cara melarangnya—yang hanya akan memperlihatkan tidak adanya kepercayaan diri kita, dan tidak adanya kepercayaan terhadap ideologi, keyakinan, agama, atau sistem politik kita sendiri. Cara paling efektif adalah dengan meningkatkan keadilan sosial. Negara harus membuktikannya dalam kenyataan. Kita dapat mencegah kemenangan komunis itu dengan cara menggagalkan rencana-rencana mereka.” Dalam mempertahankan perspektif ini, Djiwandono mendasarkan pendapatnya pada kegagalan partai-partai komunis untuk memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan umum di negara-negara Eropa Barat, seperti Prancis, Italia dan Inggris.

Meskipun penulis studi ini sependapat dengan J. Soedjati Djiwandono bahwa TAP MPRS tahun 1966 harus dibatalkan, namun itu hanya mungkin setelah lembaga-lembaga dan proses-proses demokrasi telah tertanam dengan baik dalam jaringan politik negeri ini. Soedjati nyata sekali salah saat menegaskan bahwa TAP MPRS yang melarang itu hanya berdasarkan tuduhan-tuduhan saja tanpa bukti kuat. Ketika TAP itu dikeluarkan, para penuntut militer memiliki protokol, pengakuan, dan kesaksian di tangan mereka dari banyak pemain utama konspirasi itu, yang sepenuhnya menjadikan PKI menjadi pihak yang bersalah. Misalnya Njono, anggota Politbiro PKI dan ketua SOBSI ditahan pada tanggal 3 Oktober 1965, dan buktinya cukup meyakinkan. Latief, yang menjadi komandan pasukan untuk “mengamankan” para jenderal, ditangkap tanggal 9 Oktober 1965. Untung, Komandan GESTAPU, ditahan tanggal 11 Oktober 1965, dan menyalahkan Presiden karena telah memerintahkannya tanggal 4 Agustus 1965 untuk melaksanakan “pembersihan” terhadap para jenderal itu. Omar Dhani ditahan tanggal 21 April 1966. Aidit ditangkap tanggal 22 November 1965, dan dihukum mati setelah menulis sebuah protokol tentang PKI dan GESTAPU. Dengan demikian, pada tanggal 12 Maret 1966,

²⁴ J. Soedjati Djiwandono, “Lifting Ban on Communism is Belated Thinking”. *The Jakarta Post*, 29 Maret 2000.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

hari dijatuhkannya larangan terhadap PKI, maka Jenderal Suharto sudah memiliki banyak sekali bukti-bukti kuat di tangannya yang menyalahkan PKI karena telah merencanakan GESTAPU, dan berdasarkan hal ini kemudian melarang partai itu.

Namun, semenjak Presiden Wahid menyerukan pada tanggal 27 Maret 2000, agar TAP MPR No. XXV/1966 dicabut, bangsa ini telah “bangun” dan berpolemik hebat sekali mengenai soal ini, sebagaimana jelas ditunjukkan oleh perdebatan yang muncul di kalangan publik.²⁵ Setelah menghadiri peringatan tahunan para korban GESTAPU, yang dipimpin oleh Wapres Megawati di Lubang Buaya tanggal 1 Oktober 2000, Amien Rais mengatakan bahwa “Komunisme sebagai sebuah ideologi belum mati. Ia selalu bekerja siang-malam untuk maju terus. Sebagai suatu bangsa, kita telah diingatkan bahwa tahun 1965 adalah saat yang paling gelap dalam sejarah negeri ini, dan hal itu tidak boleh terulang lagi.”²⁶

MENCARI KEBENARAN

Dengan demikian, debat publik tentang masalah ini akan terus berlanjut ketika *Antara* tanggal 22 Desember 2000, memberitakan bahwa Presiden sedang mempertimbangkan permintaan Dr. Subandrio untuk merehabilitasi nama baiknya. Gus Dur sekali lagi menyerukan dicabutnya larangan terhadap ideologi Marxis tanggal 1 Oktober 2002. Berbicara pada saat diluncurkannya sebuah buku oleh Dr. Ripka Tjiptaning Proletariyati, yang berjudul *Aku Bangga Jadi Anak PKI*, ia mengatakan bahwa TAP MPRS itu harus dibatalkan karena

²⁵ “Gus Dur Renews Call for Lifting Ban on Communism”. *The Jakarta Post*, 27 Maret 2000; “Gus Dur Holds Firm on Lifting Communist Ban”. *The Jakarta Post*, 1 April 2000; “Gus Dur Unyielding Over Communism”. *The Jakarta Post*, 12 April 2000; “Lifting Ban on Communism is Belated Thinking”. *The Jakarta Post*, 29 Maret 2000; “Maintain the Decree on Communism: MUI”. *The Jakarta Post*, 24 Maret 2000; “The Communist Specter”. *The Jakarta Post*, 28 Maret 2000; “Government Told to be Careful in Lifting Ban on Communism”. *The Jakarta Post*, 28 Maret 2000; “New Wave of Protests Target Plan on Communism”. *The Jakarta Post*, 8 April 2000; “Truth Commission Urged to Unveil 1965 Bloodshed”. *The Jakarta Post*, 12 April 2000; “Truth Commission Will Be Set Up to Probe Communism”. *South China Morning Post*, Hong Kong, 23 Maret 2001; “TNI to Study Lifting ban on Communism”. *The Jakarta Post*, 6 April 2000; “Communism vs Democracy”. *The Jakarta Post*, 3 April 2000; “Red Threat Remains”. *The Jakarta Post*, 1 April 2000. Juga “Betawi Leaders Warn of New Communism”. *The Jakarta Post*, 17 Maret 2001.

²⁶ “Betrayal of Pancasila Tragedy Commemoated”. *The Jakarta Post*, 1 Oktober 2000.

Pendahuluan

melanggar Konstitusi yang menjamin kebebasan berserikat dan kebebasan untuk menyatakan pendapat.²⁷

Sebuah seruan lain untuk mencabut TAP MPRS yang melarang ideologi Marxis dan PKI datang dari seminar berjudul *Mencari Solusi Konflik Sejarah dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, yang digelar di Jakarta tanggal 30 September 2002. Di sini seruan untuk menulis sejarah kembali datang dari Dita Indah Sari, seorang anggota senior Partai Rakyat Demokrasi (PRD) yang beraliran kiri; Letjen Agus Widjodo, seorang anggota MPR dan anak dari Jenderal Soetojo Siswomihardjo yang telah terbunuh itu; dan Harry Tjan Silalahi, seorang pengamat politik dari CSIS, yang mengatakan bahwa “Sekarang menulis ulang sejarah adalah suatu keharusan untuk mengungkapkan kebenaran.”²⁸

Sebuah kelompok lain yang menuntut agar pemerintah membeberkan kebenaran tentang GESTAPU itu bertemu tanggal 30 September 2002 di Jakarta pada waktu peluncuran sebuah buku yang ditulis Catherine, anak perempuan tertua dari Bigjen D. I. Pandjaitan yang terbunuh, yang berjudul *Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam*. Pertemuan itu dihadiri oleh beberapa anak dari para Pahlawan Revolusi, dan juga dihadiri oleh banyak keturunan dari para pendukung PKI yang telah uzur atau meninggal, yang berusaha untuk berdamai. Catherine, penulis buku itu membangun suasana perdamaian yang mungkin bagi mereka dengan pernyataannya bahwa “tidak ada dari anak-anak para jenderal itu yang memendam rasa benci terhadap para pendukung PKI dan keturunan mereka.”²⁹

Petunjuk serius pertama perubahan sikap pemerintah terhadap GESTAPU muncul kemudian tanggal 1 Oktober 2002, ketika Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz tidak menghadiri peringatan tahunan di monumen para jenderal yang telah jatuh menjadi korban GESTAPU di Lubang Buaya pada tahun 1965. Perubahan ini dicatat oleh keturunan para jenderal yang terbunuh itu, ketika Amelia Yani, anak perempuan tertua almarhum Jenderal Yani, yang berbicara atas nama mereka mengatakan bahwa “Kami merasa bahwa kematian orang-tua kami tidak lagi dihormati.”

Perdebatan publik mengenai masalah ini memanaskan kembali ketika Wapres Hamzah Haz mengatakan, tidak lama setelah diterbitkannya buku Dr. Ripka itu, bahwa “Jika motivasinya adalah untuk menyebar-luaskan komunisme maka buku itu harus dilarang”, yang setelah itu Ripka sendiri, seorang anggota partai

²⁷ “Ban of Communism Should be Revoked: Gus Dur”. *The Jakarta Post*, 1 Oktober 2002.

²⁸ “Calls for Truth Behind the ‘PKI Coup’ “. *The Jakarta Post*, 1 Oktober 2002.

²⁹ *loc. cit.*

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Megawati yang memiliki kartu tanda anggota, berbicara tentang kemungkinan mendirikan sebuah partai politik baru di negeri itu berdasarkan ideologi komunis. Dalam wawancaranya dengan Devi Asmarani, ia mengharapkan agar Kantor Kejaksaan, Kepolisian dan badan Intelijen mempelajari bukunya untuk mencari bukti adanya bahan-bahan subversif. Selanjutnya ia menyesalkan bahwa ia tidak memperoleh izin praktek sebagai dokter karena kaitan bapaknya dengan PKI di masa lalu, bahwa para pemimpin masyarakat telah coba mencegah orang untuk bertemu dengannya untuk berkonsultasi di sebuah klinik milik sebuah yayasan swasta, dan bahwa selama bertahun-tahun keluarganya hidup bersembunyi, “dengan memakan kucing dan tikus, tidur di terminal bis dan di dapur-dapur orang.” Meskipun publik di Indonesia bersikap waspada tentang komunisme, menurut sebuah jajak-pendapat *KOMPAS*, sebuah harian terkemuka, di mana mayoritas dari 825 orang responden menunjuknya sebagai sesuatu “yang jahat”, namun 80 persen dari responden menyambut baik mantan anggota PKI dalam lingkungan mereka, hanya para responden itu tidak ingin mereka menjabat suatu kedudukan di badan pemerintahan atau di badan-badan penegak hukum.³⁰

Sebuah catatan tampaknya tepat dikemukakan di sini tentang setiap upaya di masa depan untuk pergi ke akar-akar sebab-musabab GESTAPU, terutama berkenaan dengan sumber-sumber dan bukti-bukti dokumentasinya. Meskipun bukti-bukti sudah cukup berlimpah untuk dikemukakan, tanpa dapat diragukan lagi, bahwa PKI telah mendalangi GESTAPU sejak hari pertamanya sampai selesai, namun bukti-bukti tentang keterlibatan Presiden Sukarno dalam peristiwa itu tidaklah demikian luas diketahui karena alasan-alasan berikut. Dari studi saya tentang notulen MAHMILLUB yang mengadili mereka yang terlibat dalam GESTAPU, jelas bahwa mahkamah itu telah melindungi Presiden agar jangan sampai dituntut. Wawancara saya dengan para anggota TEPERPU, yang dilakukan pada tahun 1968 dan 1971, meyakinkan saya bahwa meskipun para pengusut itu telah mengumpulkan bukti yang banyak sekali yang jelas-jelas menunjukkan keterlibatan Presiden dalam peristiwa itu, namun bukti ini tidak digunakan oleh para penuntut untuk menjadikan Presiden duduk di kursi pengadilan sebagai saksi dalam sebuah pengadilan terbuka. Dan karena bukti-bukti itu tidak diajukan kepada mahkamah dan dicatat dalam notulennya, maka bukti-bukti itu tidak berada di kawasan publik.

Namun demikian, bukti yang paling penting dalam kawasan publik tentang keterlibatan Presiden dalam peristiwa itu adalah kesaksian dari mantan

³⁰ Devi Asmarani, “New Book Revives Ghosts of Abortive Coup in Indonesia”. *The Straits Times*, Singapore, 7 October 2002.

Pendahuluan

Ajudannya Kolonel Bambang Setyono Widjanarko, yang diberikan lima tahun setelah peristiwa itu dan tiga bulan setelah wafatnya Presiden Sukarno pada tanggal 21 Juni 1970. Kesaksian pertama Widjanarko itu diberikan pada tanggal 3 Oktober 1970, ketika mantan Presiden itu sudah jauh dari jangkauan setiap orang yang mungkin menjadi penuntut. Berdasarkan hal ini, setiap “Komisi Kebenaran” yang ingin menyelidiki GESTAPU sepatutnya pergi kepada protokol penyelidikan dari para pelaku itu, dan sumber-sumber lain yang tidak diajukan ke MAHMILLUB, yaitu menyelidiki dua bukti paling penting mengenai keterlibatan Presiden, yang justru telah dibuka secara tersamar oleh Aidit sendiri dalam *Instruksi-instruksi Tetap*-nya bertanggal 10 November 1965 (DOKUMEN No. 2). Dokumen pertama yang dikemukakan Aidit adalah sebuah perjanjian rahasia yang dibuat oleh Presiden dengan Mao, setelah terjadinya pertemuan antara Aidit dan Mao di Peking tanggal 5 Agustus 1965. Meskipun ketika kedatangan saya di Jakarta tahun 1971 saya telah meminta kepada pihak yang berwenang untuk memberikan satu copy daripadanya, namun mereka tidak mau memberikan.

Bukti kedua yang pantas dicari adalah catatan-catatan yang berkenaan dengan rencana yang dibuat oleh Marsekal Chen Yi, dengan Menteri Luar Negeri Subandrio, tentang pensiunnya Presiden ke sebuah villa di Danau Angsa Cina pasca kudeta itu. Para pejabat yang telah menginterogasi Dr. Subandrio setelah ia ditahan, sama sekali tidak menyinggung-nyinggung masalah ini, demikian menurut sebuah pernyataan Kolonel Djiwo Sugondo, mantan anggota TEPPERPU itu.³¹

Kenapa Jenderal Suharto melindungi Presiden dari segala tuntutan karena keterlibatannya dalam pembunuhan enam jenderal? Pertama, bukti-bukti bahwa PKI sebagai perencana GESTAPU itu sudah demikian berlimpahnya sehingga tidak perlu lagi untuk mengadili Presiden. PKI, dan bukan Presiden, yang menjadi tujuan utama Suharto untuk diadili. Kedua, secara politik akan sama sekali tidak bijaksana, dan malah berbahaya, menempatkan Presiden yang sedang berkuasa itu pada tempat yang tidak terhormat sebagai penjahat kriminal yang sedang dituntut. Ketiga, Suharto merupakan salah seorang pengagum dan pendukung paling loyal Presiden, seorang Sukarno model lama yang sesungguhnya, yang baginya Presiden adalah sebuah bintang pedoman yang harus diikuti. Akhirnya, keduanya adalah orang Jawa, yang memiliki hubungan hampir seperti bapak dengan anak, dan keduanya sama-

³¹ Aristides Katoppo (Ed.). *Menyingkap Kabut Halim 1965*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 47-48.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

sama menghayati mistik Jawa. Tabu-tabu yang amat kuat ini tertanam begitu kuat mengakar dalam perilaku budaya orang Jawa kontemporer, bahwa adalah tidak mungkin bahwa Suharto akan menempatkan Bapaknya pada tempat kehinaan, diadili di depan umum. Lagi pula, upaya untuk melindungi Presiden terhadap pembuktian keterlibatannya di depan umum tidak hanya jelas di pihak penuntut di MAHMILLUB, tetapi juga di pihak yang berseberangan dengannya, di mana para pelaku yang tertuduh itu dalam banyak hal menolak untuk memberi kesaksian yang memberatkan Presiden. Ada suatu kampanye bisik-bisik untuk melindungi Presiden yang dilakukan oleh para tahanan senior di gang-gang ruang interogasi dan di penjara.

Dua kawasan penelitian tambahan lain juga harus diperhatikan. Pertama adalah masalah rencana-rencana darurat apa saja yang dimiliki AD seandainya Presiden tiba-tiba saja wafat. Dan kedua, kenapa pihak militer gagal mengantisipasi GESTAPU, jika diingat langkah-langkah persiapan untuk memukul para jenderal itu telah mulai dilakukan sejak permulaan Agustus 1965, yang jelas sekali tampak di banyak tempat di Jakarta dan di propinsi-propinsi, di mana telah terlibat sejumlah besar personel militer. Apakah ini merupakan kegagalan besar intelijen di pihak Mayjen S. Parman, kepala intelijen AD, yang sendiri ikut menjadi korban dalam peristiwa itu? Ataukah Jenderal Ahmad Yani, Panglima AD, juga telah gagal bertindak berdasarkan laporan intelijen yang sudah pasti ada dalam tangannya, bahan paling akhir yang diberikan kepadanya oleh ajudan Presiden Brigjen Sugandhi, pada pagi tanggal 30 September 1965, kegagalan yang menjadikan Yani korban dari peluru para pembunuh empat-belas jam setelah itu?

Bertemu dengan Jenderal Yani di kantornya pada hari naas itu, Brigjen Soegandhi melapor bahwa tiga hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 27 September, Sudisman dan Aidit mengatakan kepadanya bahwa dalam dua-tiga hari ini PKI akan mengambil-alih kekuasaan, malah mengundangnya untuk ikut karena partai itu akan menang dengan jalan mengambil prakarsa dan mendahului memukul. Aidit menambahkan bahwa ia telah memberitahu Presiden mengenai soal itu. Soegandhi menolak untuk ikut dengan mengatakan bahwa agamanya dan SAPTAMARGA-nya (Tujuh Ikrar Sumpah Militer) melarang bahwa AD tidak akan ikut PKI, karena "jelas bahwa PKI merencanakan sebuah kudeta." Ketika Sugandhi bertemu Presiden di Istana Merdeka pada pagi hari tanggal 30 September, dan melaporkan pembicaraannya dengan Sudisman dan Aidit, yang telah dilakukannya tiga hari sebelumnya, Presiden menegaskan bahwa ia mengetahui tentang rencana pembersihan itu dan

Pendahuluan

mendukungnya. Ketika Sugandhi mengatakan bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada dan bahwa Yani loyal kepada Presiden, maka Presiden mengutip Thomas Carlyle untuk membenarkan perintahnya untuk mengenyahkan para jenderal, bahwa dalam sebuah revolusi “bapak dapat saja memakan anak-anaknya sendiri.” Ketika Sugandhi menjawab tandas bahwa Presiden telah masuk PKI, ia ditampik Presiden dengan kasar “Diam kamu, tak tempeleng pisan kowe mengko. Sudah pulang sana. Yang ngati-ati”. (DOKUMEN No. 5). Di sini Yani telah diberitahu bahwa kepala konspirasi itu bertempat-tinggal di istana, dan kenapa Yani tidak bertindak berdasarkan informasi itu, atau bagaimana ia bertindak dalam situasi itu, tetap merupakan salah satu dari teka-teki yang tidak terpecahkan hingga hari ini.

Apakah komando AD telah menjadikan demikian saling-terpolarisasi, demikian jatuh moralnya, dan telah keropos dari dalam karena aktivitas-aktivitas Biro Khusus Aidit sehingga Yani tidak tahu lagi siapa saja yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak? Apakah komando puncak AD telah demikian terpecah-belahnya sehingga tak mampu melakukan suatu tindakan bersama untuk menanggapi sejumlah informasi intelijen yang ada tentang rencana PKI untuk mengadakan kudeta, yang sudah pasti terendus oleh aparat intelijen AD? Atau apakah komando tertinggi AD menganggap perlu bertindak untuk menggagalkan rencana PKI itu namun tidak melakukannya, dan sengaja memberi kesempatan kepada PKI untuk lebih dulu memukul, karena telah mengetahui dengan baik bahwa pemimpin konspirasi itu bertempat tinggal Istana Merdeka, dan bahwa suatu persiapan yang tindakan balasan AD yang terlalu cepat akan membenarkan dalih Presiden dan PKI untuk melakukan tindakan *pre-emptive*? Di sinilah para jenderal itu telah tertangkap di dalam apa yang dinamakan *catch-22* [situasi yang mengandung kondisi saling-bergantung dan saling-bertentangan yang tidak dapat diselesaikan, pent.]

Penulis buku ini percaya bahwa memang inilah yang terjadi, bahwa para jenderal itu menunggu agar mereka yang berkomplot itu memukul lebih dahulu dan memperlihatkan tangan mereka, sambil dalam pada itu bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran yang akan terjadi, dan bahwa mereka hanya gagal mengetahui waktunya yang tepat. Dari sinilah berasal kejutan itu, pembunuhan enam jenderal dan kekacau-balauan yang mungkin dipercayai bakal menimpa struktur komando puncak AD pada tanggal 1 Oktober 1965. Dipandang dari sudut militer, PKI yang lebih dahulu memukul itu adalah suatu sukses gemilang karena ia memiliki keuntungan unsur kejutan, sebuah kasus *text-book* tentang strategi dan taktik, suatu keuntungan yang semestinya

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dengan langsung dan kejam terus merangsek setelah mendapat berita bahwa Nasution dapat lolos dan masih hidup, sebagaimana yang dikatakan Supardjo dalam *OTOKRITIK*-nya. Aidit dan para pemimpin lain, kata Supardjo, “telah kehilangan akal dan tidak melakukan apa-apa Selama dua-belas jam, artinya dalam keseluruhan hari itu, musuh berada dalam keadaan panik.” Dan Supardjo benar, sebagaimana akan kita lihat bagaimana Jenderal Suharto dengan perlahan dan hati-hati mengembangkan aksi perlawanannya, sambil melihat kepada bintang-pedomannya, Presiden, untuk melihat gerakannya ke mana akan menuju.

PERINGATAN (CAVEAT)

Akhirnya, sebelum meninggalkan Pendahuluan ini, maka sekarang ini dan di sini harus dimasukkan sebuah peringatan (*caveat*). Studi ini bukanlah, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi, sebuah kata akhir dan pasti tentang asal-usul GESTAPU, melainkan hanya mengajukan sebuah perspektif tertentu yang dicapai berdasarkan dokumen-dokumen yang ada pada penulis saat melakukan penulisan. Hal ini menyebabkan penulis untuk membuat kesimpulan “tanpa keraguan yang berarti”, sampai terdapatnya bukti baru di kemudian hari, bahwa PKI adalah dalang (*progenitor*) dan pengatur GESTAPU. Peringatan “sampai terdapatnya bukti baru di kemudian hari” juga berlaku untuk keabsahan rekonstruksi penulis tentang beberapa kejadian penting di mana bukti itu tidak lengkap. Diharapkan bahwa bukti “baru” tersebut dapat disingkap oleh *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* dan oleh penelitian yang dilakukan baik oleh para ilmuwan Indonesia maupun oleh para ilmuwan asing di masa depan. Sebagaimana telah kita lihat, mantan Presiden Wahid mengemukakan sebuah rencana untuk mendirikan komisi tersebut ketika ia menjadi Presiden. Dan pada tanggal 1 Oktober 2001, Abdul Malik Fajar, Menteri Pendidikan dalam pemerintahan Megawati, mengungkapkan harapannya untuk menulis kembali buku-buku sejarah bagi sekolah-sekolah Indonesia dalam kurun waktu dua tahun, terutama mengenai kejadian-kejadian yang berkenaan dengan asal-usul GESTAPU itu.³²

Namun, kemungkinan bahwa suatu bukti baru tidak akan mendapat kesempatan untuk segera muncul, meskipun sudah pasti bahwa itu ada, tidak

³² Devi Samarani, “Indonesia Plans to Rewrite History Books on Abortive 1965 Coup.” *The Straits Times*, Singapore, 3 Oktober 2001.

Pendahuluan

seluruhnya dapat dikesampingkan karena “mencari kebenaran” itu telah dipolitisir dengan hebat sekali di Indonesia sekarang ini. Beberapa pengamat mencurigai bahwa dorongan untuk mencari kebenaran oleh Presiden Megawati mungkin dimotivasi oleh “dendam sejarah”-nya dalam menghadapi rezim Suharto yang telah menyingkirkan bapaknya dari kursi Presiden pada tahun 1966. Anak perempuan Sukarno yang lain, yaitu Rachmawati Sukarnoputri, meminta pemerintah pada tanggal 30 September 2001, untuk membatalkan TAP MPRS tahun 1967 yang dipercayainya telah merendahkan martabat ayahnya sehingga menjadi tahanan politik.

Perjuangan antara kedua saudara perempuan itu mengenai dampak warisan politik bapak mereka dan upaya rehabilitasinya adalah sama, namun agenda politik mereka berdua tentang soal-soal lain agak berbeda, sehingga perbedaan visi dan strategi politik mereka berbenturan hingga mencapai titik yang tidak dapat kembali lagi ketika Rachmawati tidak lama kemudian mendirikan sebuah partai baru untuk menandingi saudara perempuannya, dengan Gus Dur sebagai mentornya. Sementara tokoh lainnya, Eros Djarot, karena berseberangan visi dengan Megawati, telah meninggalkan partai Megawati, dan berdasarkan gagasan-gagasan Sukarno, mendirikan partai baru Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK). Ia menyerukan agar Megawati mengundurkan diri karena kebijakan-kebijakannya tidak memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat kecil. Partai yang baru itu juga mendukung demonstrasi massal mahasiswa yang lumayan besar semenjak keributan tahun 1998 yang menjatuhkan Presiden Suharto, mengenai kenaikan antara 6 hingga 22 persen harga minyak tanah, jasa telpon, listrik dan bahan-bahan kebutuhan pokok lain, sebuah tantangan yang serius terhadap pemerintahan Megawati yang berumur 18 bulan itu. Beberapa orang analis memberikan peringatan bahwa pemecatan Eros Djarot merupakan suatu langkah berbahaya yang akan menjerumuskan negara itu lebih jauh ke dalam instabilitas, dan banyak orang “lalu akan lebih suka memilih pemerintahan militer yang otoriter namun stabil ketimbang *chaos* sepenuhnya.”³³ Dan Pramono Anung, Wakil Sekjen partai Megawati, sampai mengungkapkan kesan bahwa demonstrasi jalanan benar-benar bertujuan untuk menghilangkan legitimasi pemerintahan Mega berdasarkan sebuah rencana untuk membentuk sebuah Presidium untuk menggantikan pasangan Mega-Hamzah.

³³ Berni K. Moestafa, “Megawati’s ouster Too Risky to Purse, Analysts Warn.” *The Jakarta Post*, 14 Januari 2003; “Anti-government Protests Continue Across the Country.” *The Jakarta Post*, 11 Januari 2003.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Prospek suatu ketidak-stabilan di negara itu dianggap serius oleh para panglima angkatan bersenjata yang berdiri di belakang Presiden: Letjen A. M. Hendropriyono, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN); Jenderal Endriartono Sutarto, Panglima TNI; dan Jenderal Da'i Bachtiar, Kapolri. Ketika mengucapkan pidato kepada mereka tanggal 16 Januari 2002, Menkopolkam, Susilo Bambang Yudhoyono, menyingkapkan bahwa laporan-laporan intelijen berbicara tentang sebuah rencana untuk mengorbankan para mahasiswa yang melakukan protes dan lain-lainnya karena akan menggulingkan Presiden. Laporan itu berbicara tentang sebuah rencana mendirikan sebuah Presidium "untuk menggantikan pemerintah yang sah sekarang ini apabila mereka yang melakukan protes itu telah menjadi syahid," demikian tambahnya.³⁴

Para penantang Megawati pergi ke tempat terbuka pada saat mereka bertemu di Jakarta untuk mendirikan Koalisi Nasional, sebuah kekuatan politik kiri yang baru di negara itu, dengan tujuan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang "imperialistik" dan untuk mendirikan sebuah pemerintahan baru melalui cara-cara demokratis. Pertemuan itu digelar oleh Eros Djarot dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), wakil-wakil dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), dari Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), dan para pembangkang dari partai Megawati sendiri, PDI-P. Namun, pemerintah lalu membalikkan arah karena tekanan publik dan dengan cepat kembali menurunkan harga-harga yang telah dinyatakan naik itu pada tanggal 20 Januari 2003.

Bagaimanapun, masalah-masalah ekonomi tetap mengejutkan, dengan hutang luar-negeri mencapai US \$ 73 milyar dan hutang dalam-negeri mencapai Rp 650 trilyun pada permulaan tahun baru, dengan korupsi mencapai US\$ 28,4 milyar setahun, sebagaimana dilaporkan Kwik Kian Gie, Menteri Perencanaan Pembangunan. Defisit sebanyak Rp. 34,4 trilyun dalam APBN harus ditutup baik dengan meningkatkan lagi harga bahan-bakar dan minyak, atau "secara unilateral menyatakan penangguhan pembayaran hutang luar-negeri dan dalam-negeri."³⁵ Korupsi demikian merajalelanya sehingga Sekretaris Eksekutif BAPPENAS, Koensatwanto Inpasiharjo, memperingatkan the Consultative Group on Indonesia (CGI) tanggal 25 Januari 2003, bahwa

³⁴ "Street Rallies Aimed at Delegitimizing Megawati's Government: PDIP Leader". *The Jakarta Post*, 16 Januari 2003; juga "Beware of Possible Plot to Topple Government, Says Minister". *The Jakarta Post*, 17 Januari 2003. Tiarna Siboro, "Minister Warns of Plot Against the Government". *The Jakarta Post*, 17 Januari 2003.

³⁵ "Reform or Bust", *Editorial, The Jakarta Post*, 17 Januari 2003.

Pendahuluan

kira-kira 20 persen dari hutangnya yang sebanyak US \$ 27,7 milyar untuk membantu mendanai defisit APBN untuk tahun 2003 mungkin telah dirampok oleh para pejabat yang korup. Ada laporan yang memperkirakan bahwa kira-kira 30 persen dari piutang Bank Dunia telah menguap dikorupsi selama masa pemerintahan Suharto, yang mencapai jumlah kira-kira US\$ 10 milyar. Begawan ekonomi Indonesia, alm. Sumitro Djojohadikusumo, bahkan telah menyatakan bahwa kerugian yang diakibatkan korupsi itu sampai mencapai 30 persen dari APBN.³⁶ Karena masalah korupsi ini merupakan penyakit menular dan tidak mau pergi menjauh dengan sendirinya, maka kisah korupsi itu kelihatannya sangat biasa. Apakah kita mengamati di jalanan Jakarta dan kota-kota lain suatu lingkaran baru permainan *wayang kolomongso*, suatu putaran yang lain dari roda keberuntungan, sebagaimana ditandai oleh banjir air, banjir lumpur, kegiatan gunung berapi dan tanda-tanda alam lain yang tampak di negara itu sekarang ini, sebagaimana yang dipercayai oleh beberapa pengamat? Megawati menanggapi segala tantangan ini dengan menyatakan tekadnya untuk tetap memegang kekuasaan sampai Pemilu berikut yang akan digelar tahun 2004, sambil menambahkan bahwa ia akan tetap mencalonkan dirinya sebagai kandidat Presiden. (*red*: Megawati kalah secara menyakitkan oleh bekas menterinya sendiri, SBY, namun meninggalkan kesan baik, bahwa ia berhasil meletakkan dasar bagi pemilihan presiden secara langsung yang berjalan jujur, adil dan mulus).

Din Syamsudin dari Muhammadiyah, (organisasi Islam terbesar kedua di negara itu), mengingatkan bahwa “penulisan kembali sejarah tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan peran orang-orang komunis dalam kudeta 1965 yang gagal itu”, karena mereka telah melakukan “kekejaman luar-biasa terhadap orang Islam” di masa lalu, dan hal ini tidak boleh dilupakan. Dan peringatan paling penting datang dari Brigjen Busri Boer, Kepala Pusat Sejarah ABRI, yang mengatakan bahwa “setiap upaya untuk mencari kebenaran di belakang kudeta yang gagal tahun 1965 harus dilaksanakan dengan jujur, dan tidak boleh digunakan sebagai suatu pembenaran *post hoc* dari tindakan partai-partai yang terlibat dalam kejadian itu. Meskipun setiap orang berhak untuk mendiskusikan kejadian-kejadian itu untuk mendapatkan kebenaran di balik tragedi tahun 1965, namun semua argumentasi harus didukung oleh data-data objektif”, demikian ia menambahkan.³⁷

³⁶ “Bappenas Official Warns of Embezzlement of CGI Loans”. *The Jakarta Post*, 25 Januari 2003. Juga “Embezzling Foreign Loans”. *The Jakarta Post*, 27 Januari 2003.

³⁷ “Honesty Sought in Attempting to Clarify the 1965 PKI Coup Attempt”. *The Jakarta Post*, 10 Oktober 2001.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Adalah lemari-lemari baja (red: setidaknya di tahun 70-an) di Lembaga Pusat Sejarah ABRI, MAHMILLUB dan badan militer lain, yang menjadi tempat simpanan arsip-arsip PKI yang berhasil disita, bukti persetujuan Sukarno-Mao yang ditengahi Aidit pada tanggal 8 Agustus 1965, surat-surat Presiden kepada Aidit dan sebaliknya setelah terjadinya kudeta; juga protokol-protokol interogasi yang menyatakan Presiden Sukarno ikut bersalah dalam pembunuhan enam jenderal, namun memang tidak pernah diajukan ke MAHMILLUB, dan karena itu tidak berada di dalam kawasan publik; dan pastilah juga berisikan catatan-catatan dari rapat-rapat komando puncak AD dan badan intelijennya, serta segala kemungkinan rencana yang telah mereka kembangkan untuk menanggapi aksi-aksi provokasi PKI, atau bahkan mungkin juga ada rencana untuk memukul terlebih dahulu dalam sebuah gerakan *pre-emptive* untuk mengalahkan Aidit dan partainya.

Dan mungkin di sinilah terletak pokok persoalan. Dengan memperhatikan politisasi masalah itu oleh partai-partai utama yang merasa berkepentingan, maka sukar sekali untuk mengatakan sekarang ini bukti mana yang akan “dipilih” dari lemari-lemari arsip itu dan dipergunakan tidak hanya untuk menulis ulang buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah di Indonesia akan tetapi menjadikannya dapat diakses oleh para penulis Indonesia dan dunia ilmiah internasional yang lebih luas. Namun, pendekatan ini tidak akan berlaku. Apa yang benar-benar diperlukan adalah membuka arsip-arsip ini dan memberi izin tanpa kekangan dan tanpa pembatasan apa pun terhadap semua dokumen yang ada hubungannya agar dapat dimanfaatkan oleh setiap ilmuwan dalam dan luar negeri bagi suatu penelitian yang bebas.

Penulis buku ini jelas akan termasuk dalam golongan peneliti pertama yang akan bergegas mendatangi arsip-arsip ini untuk dapat memperoleh dokumen-dokumen terbaru (jika masih ada) tentang GESTAPU untuk kemudian menulis ulang kisah itu sesuai data terbaru tersebut, dan akan menerbitkannya sebagai edisi revisi buku ini. Namun, walaupun nanti tiba waktu seperti itu dan muncul bukti-bukti baru, adalah cukup jujur untuk mengatakan bahwa arah utama dari kisah itu tetaplah sama, yaitu bahwa PKI—karena didorong oleh upayanya untuk langsung merebut kekuasaan di Indonesia berdasarkan kemungkinan Presiden tiba-tiba wafat, dan karena upayanya untuk ikut mensukseskan tujuan-tujuan revolusioner Peking di Asia Tenggara—adalah dalang GESTAPU yang sesungguhnya.



I

OFENSIF REVOLUSIONER 1964-1965

DILEMA PKI: JALAN MENUJU KEKUASAAN SECARA DAMAI ATAU DENGAN KEKERASAN

Landasar teoretis, yang meletakkan dasar bagi rencana PKI untuk mengorganisir seluruh isu GESTAPU, diberikan dalam Laporan Politik yang disampaikan Dipa Nusantara Aidit kepada Sidang Pleno ke-IV CC PKI pada tanggal 11 Mei 1965. Partai itu memiliki kira-kira tiga juta anggota dalam barisannya dan mengklaim mendapat dukungan dari kira-kira 15 juta orang dalam berbagai ormas di seluruh negeri pada waktu itu. Karena basis massa yang besar ini, maka partai itu mampu memobilisasi pendukungnya untuk melakukan berbagai bentuk *clash action* di tingkat akar rumput. Pada gilirannya, hal ini memungkinkan partai untuk mempengaruhi secara kuat lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat, propinsi dan kabupaten hingga ke desa-desa dalam koalisi nasional partai-partai politik yang dikenal dengan nama NASAKOM, yang terdiri dari unsur-unsur NASIONALIS, AGAMA, dan KOMUNIS. Meskipun dengan aset yang luar-biasa besar ini dan kemampuan memobilisasi massa yang sangat mengesankan, sehingga PKI mendominasi lapangan politik di negeri itu di tingkat akar-rumput, namun elite kepengimpinannya tetap cemas mengenai pengaruh marjinal yang dimainkan partainya di pusat kekuasaan negara, terutama sekali di dalam kabinet. Partai itu hanya memiliki tiga orang menteri saja, yaitu Aidit dan Lukman sejak tahun 1962, dan Njoto sejak tahun 1964. Berdasarkan hal ini, maka Politbiro partai memutuskan untuk melancarkan sebuah prakarsa yang berani, yang dikenal sebagai

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

sebuah “ofensif revolusioner [revolutionary offensive]”, untuk menonjolkan pengaruh luar-biasa besar yang dimilikinya di kalangan masyarakat umum, dan membawanya masuk ke dalam kabinet dan badan-badan lain dari kekuasaan negara. Dengan kata lain, telah tiba waktunya bagi PKI untuk mempergunakan segala modalnya ini untuk memulai transisi perubahan dari tahap “revolusi demokrasi nasional” di Indonesia ke suatu tahap proses revolusioner “yang lebih tinggi”, yaitu “demokrasi rakyat”, serta membuka jalan ke arah tujuannya yang tertinggi, yaitu memonopoli kekuasaan dalam kediktatoran kaum proletar [diktator proletariat].

Penjelasan teoritis tentang alasan mengapa PKI harus menggelorakan kondisi ofensif revolusioner dikemukakan oleh D. N. Aidit, Ketua PKI, dalam pidatonya di depan Sidang Pleno ke-IV CC PKI tanggal 11 Mei 1965, di mana ia menyatakan bahwa Indonesia telah menemukan dirinya pada permulaan situasi revolusioner yang makin meningkat dan bertambah matang itu (“hamil tua”), yang mana partai harus memimpin sampai ke tujuan akhirnya. Aidit berkata:

“Dewasa ini Indonesia menemukan dirinya dalam sebuah situasi revolusioner yang semakin meningkat dan semakin matang yang memiliki ciri-ciri berikut:

- (1) massa rakyat sedang berjuang dengan aktif untuk perubahan-perubahan yang mungkin sekali menjadi penolong dalam memperbaiki kondisi kehidupan mereka;
- (2) aspek-aspek kekuasaan politik yang anti-rakyat semakin lama semakin digantikan oleh aspek-aspek kerakyatan, sedangkan kebijaksanaan pemerintah semakin dibentuk oleh tuntutan-tuntutan rakyat;
- (3) aksi-aksi massa rakyat semakin meluas, yang mengakibatkan peranan massa yang selalu bertambah besar dan kepentingan mereka yang menentukan dalam kehidupan masyarakat dan dalam membentuk kebijaksanaan negara;

Tugas kita sekarang ini adalah mengadakan ofensif revolusioner, terus mengembangkan situasi revolusioner, dan mematangkannya.”¹

PKI blak-blakan dalam tujuan yang ingin dicapai dengan melancarkan ofensif revolusionernya itu. Sasarannya adalah mencapai suatu masa transisi, melalui sebuah aksi revolusioner, dari Kabinet Dwikora yang ada di mana PKI

Ofensif Revolusioner 1964-1965

hanya punya dua menteri, menuju suatu Kabinet Gotong Royong, yang berdasarkan prinsip persamaan NASAKOM di mana PKI akan memperoleh jumlah jatah menteri yang sama dengan unsur nasionalis dan unsur agama di dalam kabinet.

Pembenaran dari transisi tersebut dijelaskan dari segi apa yang dikenal sebagai “*teori dua aspek kekuasaan negara*” di Indonesia:

“Dewasa ini, kekuasaan negara Republik Indonesia menyangkut dua aspek: aspek anti-rakyat dan aspek pro-rakyat. Kekuasaan pro-rakyat itu selalu bertambah besar, sambil memegang prakarsa dan melakukan ofensif; sedangkan aspek anti-rakyat, meskipun masih tetap sangat kuat, semakin lama semakin terpojok. PKI harus memperhebat perjuangannya untuk memperkuat aspek pro-rakyat itu dalam kekuasaan negara dan pada akhirnya memungkinkannya untuk mendominasi, dan menjadikan aspek anti-rakyat itu dienyahkan dari kekuasaan negara.”²

Meskipun sasaran dari ofensif revolusioner itu tampaknya sederhana, namun pembentukan Kabinet Gotong Royong dengan suatu perwakilan komunis yang kuat, disertai oleh aksi massa di seluruh bangsa yang dapat diorganisir PKI, akan menempatkan PKI dalam sebuah posisi dari mana ia dapat meluncurkan suatu proses transformasi secara berangsur-angsur dari sistem Demokrasi Terpimpin yang ada menjadi suatu sistem Demokrasi Nasional. Dalam konfigurasi politik yang baru ini, yang serupa dengan konfigurasi politik di Eropa Tengah bagian Timur sejak tahun 1948 dan dikenal sebagai Demokrasi Rakyat, maka PKI akan menjadi kekuatan politik yang mendominasi sistem yang baru, sedangkan dalam waktu bersamaan ia mempertahankan bentuk-bentuk penampilan luar dari Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian, pembentukan Kabinet Gotong Royong akan menyelesaikan tahap nasional dari revolusi Indonesia,³ dan membuka jalan bagi transformasi sistem politik negeri itu menjadi suatu Demokrasi Nasional. Namun, hal ini hanya merupakan suatu tahap antara saja dalam proses revolusi, yang harus melapangkan jalan bagi transisi kepada sesuatu yang lebih maju lagi, yaitu sebuah negara Marxis di masa depan, di mana diktator proletariat akan menjadi ciri utamanya dan sebuah masyarakat komunis menjadi tujuan akhirnya.

Ketika PKI memutuskan untuk meningkatkan ofensif revolusioner itu guna mencapai perubahan mendasar dalam konstelasi kekuatan-kekuatan dalam badan tertinggi kekuasaan negara, yaitu mengubah Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Gotong Royong, maka masalah tersebut dipandang dari segi-

segi praktisnya akan direduksi sehingga menjadi pilihan sarana, strategi, taktik dan waktu yang tepat.

PKI MENGUBAH POROSNYA: DARI MOSKOW KE PEKING, 1964

Adalah penting untuk dicatat bahwa di dalam kurun waktu ini, yaitu dari tahun 1956-1964, PKI mengikuti konsep strategi Moskow, yaitu “transisi damai menuju komunisme”, sebuah strategi yang telah dirintis dan dengan berhasil diujicobakan di negara-negara Eropa Tengah bagian Timur sejak berakhirnya Perang Dunia II. Ketika diterapkan di Indonesia, maka yang menjadi sasaran dari strategi ini, seperti telah dikemukakan tadi, adalah mendapatkan kekuasaan tertinggi bagi PKI dengan jalan mendirikan pemerintahan Demokratis Nasional, yang akan diwujudkan dalam bentuk Kabinet Gotong Royong. Dari segi teoritis, para pemimpin PKI yakin bahwa mendirikan Kabinet Gotong Royong itu merupakan sebuah penemuan penting yang asli Indonesia, dan merupakan sumbangan penting bagi pengembangan yang kreatif dari ajaran Marxisme-Leninisme dan penerapannya untuk mengarahkan proses revolusioner di negara-negara berkembang.⁴

Meski demikian, pada saat perpecahan (skisma) antara Moskow dan Peking mengenai ajaran berikut strategi besar yang telah diintensifkan, maka PKI memindahkan kepatuhannya dari Moskow ke Peking di tahun 1963 dan 1964 dan mulai memunculkan sebuah gagasan tentang suatu revolusi agraria sebagai jalannya menuju kekuasaan.

Dengan memperhatikan pentingnya perubahan ini, baiklah secara pendek kita ringkas ciri-ciri utama dari kedua konsep strategis itu, karena mengandung dua arah jalan yang berbeda untuk diikuti PKI. Perubahan itu didorong oleh suatu diskusi internal yang mendalam di dalam partai, yang menggambarkan bagaimana persaingan yang mendalam antara Moskow dan Peking tentang sejumlah persoalan. Dari sudut pandang PKI, masalah yang paling penting adalah mengenai pemahaman yang benar akan watak proses revolusioner itu di dunia yang sedang berkembang, terutama sekali di Asia Tenggara, dan strategi yang benar untuk dianut partai-partai komunis agar dapat merebut kekuasaan.

Apabila mengikuti garis Moskow, PKI akan mendasarkan strateginya pada teori perubahan yang damai menuju komunisme, untuk mana partai telah merumuskan kembali bagi dirinya di Kongres Nasional ke-VII, yang digelar

Ofensif Revolusioner 1964-1965

pada bulan April 1962.⁵ Dalam kasus ini, PKI akan menggunakan konsep strategis itu yang telah dikembangkan pada Kongres ke-XX Partai Komunis Uni Soviet dalam bulan Februari-Maret 1956, dan kemudian disetujui sebagai Deklarasi Dua-Belas Partai Komunis dan Partai Buruh dalam bulan November 1957,⁶ dan pada akhirnya diubah di bawah tekanan Peking dan disetujui dalam bulan Desember 1960 dengan nama Moscow Statement.⁷

Di bawah pilihan ini, PKI akan menginfiltrasi departemen-departemen pemerintahan yang utama dan melakukan mobilisasi besar-besaran para anggotanya, didukung oleh ormas-ormas, yang berada di bawah kendali operasionalnya kira-kira 18 juta orang. Dalam proses itu, PKI akan memenangkan dukungan kekuatan-kekuatan jalan-tengah, dan dengan Front Nasional yang telah dibentuk akan melakukan tekanan terhadap kekuasaan negara untuk mengenyahkan kekuatan-kekuatan konservatif daripadanya dan dengan demikian mendapatkan transisi dari Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Gotong Royong. Karena dukungan massa yang luar-biasa besar itu, maka operasi itu akan menjadi satu-demi-satu, secara terus-menerus, tetapi pada intinya bersifat damai, meskipun di beberapa tempat konfrontasi mungkin meningkat menjadi pemogokan-pemogokan yang militan, aksi massa yang bersifat kekerasan dan pengenyahan musuh-musuh. Hal itu akan serupa dengan “Taktik Salami” yang digunakan oleh Rakosi dalam mendirikan Demokrasi Rakyat di Hongaria antara tahun 1945 dan 1947, dan dengan kebijakan Transformasi Damai kepada Komunisme, yang dianut oleh Partai Komunis India di bawah arahan Moskow dengan para pemimpinnya Ajay Ghosh., P. C. Joshi dan S. A. Dange.⁸

Akan tetapi, seandainya kekuatan-kekuatan oposisi itu melakukan tindakan kekerasan untuk menentang gerak-maju PKI, maka gerakan massa politik ini akan ditingkatkan menjadi sebuah aksi revolusioner untuk menghancurkan musuh dalam pertarungan bersenjata. Di bawah pilihan ini, sementara merencanakan sebuah operasi transisi damai, PKI dalam kenyataannya harus mempersiapkan diri untuk operasi bersenjata, sebagai pilihan terakhir, seandainya proses transisi damai itu menghadapi perlawanan.

Dalam menerapkan strategi transformasi damai itu menuju komunisme di Indonesia, maka PKI pada mulanya mengikuti pengalaman Partai Komunis Czechoslowakia dalam gerak-lajunya kepada kekuasaan antara tahun 1947-1948. Untuk tujuan itu, PKI tidak hanya melakukan pengendalian terhadap ormas-ormas yang kuat di negeri itu, tetapi juga secara sistematis melakukan penetrasi alias penyusupan ke dalam kementerian-kementerian pemerintah, berbagai organisasi umum dan khusus, dan ke empat cabang Angkatan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Bersenjata. Namun, “dalam menghadapi TNI-nya Nasution, metoda ini tidak jalan.” Juga kemajuan dalam menyusup ke dalam angkatan bersenjata sangat lambat, dan karena itu, menurut Sjam, adalah “jelas bahwa cara Ceko itu tidak dapat digunakan PKI”.⁹

Pilihan kedua yang dipertimbangkan PKI adalah konsep strategis yang dikembangkan Peking, yang disetujui pada Sidang Pleno Ke-2 CC PKI, yang digelar pada bulan Desember 1963, sebagai kelanjutan dari kunjungan Aidit yang cukup lama di Cina dalam musim gugur 1963. Dalam kunjungan itulah Aidit mengesampingkan Moskow, dan menerima arahan strategis Mao.¹⁰ Konsep ini menolak gagasan Moskow tentang “sifat demokratis borjuis daripada Revolusi Indonesia” dan jalan damai yang sesuai dengannya menuju kekuasaan untuk PKI, dan malah sebaliknya mengajukan argumentasi bahwa revolusi Indonesia itu pada dasarnya bersifat agraris, dan bahwa kekuatan utamanya haruslah merupakan suatu pemberontakan bersenjata dari kaum tani, dan strateginya menghendaki dikepungnya kota-kota oleh desa-desa, dan dihancurkannya semua aparat negara yang lama. Konsep itu membayangkan kekerasan revolusioner dalam skala besar, yang tidak hanya dengan mengubah kabinet guna membuka jalan secara langsung untuk mendirikan “diktatur proletariat”. Inilah yang menjadi sari-pati dari jalan Mao menuju kekuasaan, yang memerlukan persiapan-persiapan langsung untuk suatu pemberontakan agraris bersenjata di negeri itu.

Perpecahan Cina-Soviet tentang jalan menuju kekuasaan yang bersifat damai atau yang revolusioner, sebagaimana terbayang di dalam diskusi internal PKI, telah didokumentasikan dengan baik:

“Telah banyak dilakukan penjelasan klasik untuk mempertahankan sudut pandang bahwa revolusi itu dapat diefektifkan dengan cara kekerasan, yaitu suatu revolusi bersenjata dalam menghadapi suatu kontra-revolusi yang bersenjata pula. Sebaliknya, terdapat pula cukup banyak bukti yang mengatakan bahwa Marx, Engels dan Lenin tidak percaya bahwa revolusi itu sudah pasti harus dikembangkan di sepanjang garis-garis militer; mereka bersikeras bahwa hal itu dapat pula diefektifkan dengan cara damai, meskipun dalam masa hidup mereka, kesempatan untuk ini memang kecil sekali dan gagasan itu tidak memiliki konfirmasi praktis. Adalah tidak pada tempatnya untuk mendiskusikan masalah ini *per se* dalam karya ini. Cukuplah jika hal itu menarik perhatian Anda apa yang sejalan dengan kesepakatan kita sebagaimana dikemukakan dalam Deklarasi dan Pernyataan Moskow itu: ... bahwa di dalam kondisi historis yang ada sekarang, terutama sekali setelah timbulnya sistem sosialis

Ofensif Revolusioner 1964-1965

dunia, *terdapat kesempatan-kesempatan* untuk kemenangan revolusi dengan cara damai. Apakah revolusi itu dikembangkan secara damai atau tidak, pada umumnya tergantung dari kondisi kesejarahan yang kongkret dalam masing-masing negara.

Konstitusi PKI menunjukkan dalam hubungan ini bahwa karena kita sendiri yang berkepentingan, maka cara kita haruslah dengan pengorbanan sekecil mungkin, yaitu jalan damai. Pengalaman Indonesia mengajarkan kepada kita bahwa untuk menggunakan kesempatan-kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, yaitu mengikuti jalan damai, maka kita harus:

Pertama, yakin bahwa jalan damai ini terbuka untuk kita dan, bertindak berdasarkan asumsi yang optimistik ini, persiapkanlah segala kondisi yang akan menjadi instrumental dalam mencapai kemenangan revolusi dengan cara damai;

Kedua, kita sama sekali tidak boleh menciptakan sebuah ilusi bahwa tidak akan ada kesempatan lain, yaitu cara yang tidak damai, sehingga memperlemah kewaspadaan ideologis, politis dan yang bersifat organisasional.

Pendek kata, untuk mencapai kemenangan revolusi dengan cara damai, maka kita harus siap untuk dua alternatif itu dan berusaha keras untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang telah dijelaskan di atas.

Namun, kemudian segi-pandangan ini telah mengalami beberapa perubahan dan berubah menjadi lawannya, yaitu menjadi kepercayaan bahwa revolusi itu akan menang hanya jika dilakukan dengan kekuatan senjata, sedangkan rasa pesimisme dinyatakan terhadap perkembangan revolusioner dengan cara damai.

Pendapat subjektif ini bahwa revolusi akan dapat dimenangkan hanya jika dilakukan dengan kekuatan senjata memiliki dampak hipnotis terhadap kita dan secara drastis mengubah arah Revolusi kita, dengan mendorongnya ke jalan yang salah. Segi-pandang revisionis yang bersifat kiri ini adalah instrumental dalam melapangkan jalan teoritis bagi perjudian yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September ...”¹¹

Dalam bulan Mei dan Juni 1965 terjadi diskusi-diskusi intensif di dalam Biro Politik PKI, yang memikul tanggung jawab untuk mengintensifkan “ofensif revolusioner” untuk mencapai pembentukan Kabinet Gotong Royong dan untuk memutuskan tentang alat perlengkapan, strategi dan taktik yang akan digunakan. Kelihatannya kedua pilihan strategis itu diperhatikan dengan teliti

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

sekali, tidak ada di antaranya yang tampak praktis dalam situasi yang ada di Indonesia saat itu.

Mengenai pilihan damai, meskipun mungkin untuk memobilisasi partai dan ormas-ormas, namun analisis kekuatan-kekuatan kelas, terutama sekali yang berhubungan dengan Islam, menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin, dan besar kemungkinan mereka tidak akan mau bekerja sama dengan PKI dalam operasi apapun yang akan mengakibatkan perpindahan ke arah kiri dalam spektrum politik di negeri itu. Polarisasi kekuatan-kekuatan Islam ke arah kanan muncul dalam bulan Januari 1965, dan di banyak tempat tercetuslah pertikaian-pertikaian yang keras dengan para pengikut PKI. Karena itu, hal ini menghancurkan kemungkinan pilihan transisi damai, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang persiapan dari komponennya yang militan—yang merupakan jaring pengamannya. Angkatan Darat sangat waspada, mendukung golongan Islam dalam menghadapi PKI, dengan melawan putusan Presiden yang melarang beberapa surat kabar, dan dalam bulan Maret 1965 melakukan intervensi dengan aktif sekali di belakang para mahasiswa Islam yang mengobrak-abrik markas-besar PKI di Surabaya. Jadi, dalam kenyataan, AD telah meningkatkan oposisinya sendiri terhadap Presiden dalam menghadapi pengaruh PKI, dan memerintahkan beberapa surat kabar yang telah dilarang Presiden untuk meneruskan saja penerbitannya. Dengan AD waspada sampai ke tingkat ini, boleh dikatakan tidak mungkin sama sekali untuk melaksanakan setiap mobilisasi untuk menempatkan sebuah jaring pengaman untuk mendukung proses transisi damai, meskipun transisi damai tersebut dapat dilakukan.

Untuk memahami aktivitas-aktivitas politik AD, kita harus menyadari bahwa semuanya itu telah dilaksanakan di bawah sebuah doktrin yang dikenal sebagai *Dwifungsi ABRI*. Fungsi pertama bersifat militer, termasuk di situ mempertahankan kedaulatan negeri itu terhadap ancaman-ancaman dari luar dan integritas teritorialnya, menjaga UUD 1945, dan menegakkan hukum dan ketertiban di waktu keadaan darurat nasional. Fungsi kedua bersifat sosial-politik, termasuk di dalamnya pembangunan bangsa dengan jalan memberi kesempatan kepada tentara untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan rakyat-sipil: ideologi, politik, ekonomi dan sosial lainnya. Tugas rangkap dua Angkatan Bersenjata ini dijabarkan di dalam “*Doktrin Pertahanan-Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*”.

Pilihan kedua, kemungkinan untuk mengorganisir sebuah pemberontakan bersenjata berdasarkan massa agraris, bahkan lebih jauh lagi. Adalah

Ofensif Revolusioner 1964-1965

benar bahwa PKI telah memalingkan wajahnya kepada para petani dalam bulan Desember 1963 di bawah pengaruh ajaran Peking, dan bahwa di tahun 1964 “integrasi menyeluruh dari semua aktivitas partai dengan para petani” telah menjadi semboyan utama partai itu. Namun, para pemimpin partai merasa bahwa adalah tidak mungkin mempersiapkan suatu pemberontakan agraris bersenjata dalam waktu yang demikian pendek, dan bahwa partai tidak siap untuk melakukan tugas seperti itu. Partai malah mengakui telah gagal mengambil keuntungan dari “aksi-aksi individual” dari para petani yang telah berupaya melaksanakan, dengan kekuatan sendiri, *land reform* dengan menentang kehendak para tuan-tanah di banyak tempat di desa-desa negeri itu, sambil menyalahkan dirinya sendiri karena ketidak-aktifannya itu telah memungkinkan pihak yang berkuasa menindas gerakan agraris yang baru mulai itu yang memiliki potensi besar sebelum mendapat kesempatan untuk berkembang. Banyak pemimpin partai yang percaya bahwa jika diarahkan dan didukung dengan semestinya, maka tindakan revolusioner para petani itu dapat meningkat menjadi suatu tahap pembukaan dari revolusi agraris di beberapa kawasan yang penting di negeri itu.

Para pemimpin Cina terbukti sangat tertarik dengan kemungkinan ini dan menawarkan bantuan senjata untuk mengembangkannya. Chou En-lai mengusulkan kepada Sukarno pada awal bulan Januari 1965 bahwa kira-kira 21 juta petani semestinya dipersenjatai untuk membentuk “Angkatan Kelima”. Mereka membicarakan konsep sebuah “perang rakyat”, dimana Peking akan membantu mempersenjatainya. Namun, AD menolak sama sekali usul ini, termasuk juga usul Sukarno membentuk “tentara rakyat”, yang dikemukakan Presiden pada konferensi tahunan para panglima daerah AD, yang diadakan di Lembaga Pertahanan Nasional di Djakarta pada akhir Mei 1965. Konferensi itu juga menolak usul Aidit untuk mencoba mengorganisir “Nasakomisasi” angkata bersenjata dengan memperkenalkan *commissar* politik ke dalam struktur komando mereka.¹²

Dengan demikian, pada akhir Mei 1965, sedikit sekali prospeknya bagi PKI untuk coba mengorganisir sebuah pemberontakan agraris di negeri itu. Masalah ini dengan jelas sekali harus ditangguhkan sampai tibanya “kondisi objektif” di masa depan. Mungkin kira-kira 5 sampai 10 tahun lagi, ketika itu baru mungkin bagi PKI mengembangkan sebuah revolusi agraris dalam segala percabangannya dan mematangkannya sebagai suatu “kekuatan historis yang sudah tak tertahankan lagi”. Sjam memberi kesaksian bahwa PKI mempertimbangkan tahun 1970 sebagai tanggal sasaran yang mungkin, di mana

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

ketika itu semua hal yang diperlukan telah siap untuk sebuah revolusi agraris di negeri itu.¹³



II

PKI MENGINFILTRASI ANGKATAN BERSENJATA: 1964-1965

BIRO CHUSUS DIDIRIKAN: 1964

Diskusi-diskusi di dalam Biro Politik PKI dalam bulan Mei 1965 menunjukkan bahwa tidak ada persiapan untuk mempercepat ofensif revolusioner, untuk melaksanakan strategi baik Peking maupun Moskow, yang secara realistis dapat dilakukan selama kekuatan Angkatan Darat tidak dihancurkan. Bukan saja AD merupakan penghalang utama bagi upaya-upaya PKI untuk melancarkan ofensif revolusionernya, namun kewaspadaannya dan aktivitasnya sejak bulan Januari di tahun itu tidak memberi pertanda baik untuk masa depan. Meskipun jelas sekali bahwa AD semakin mengukuhkan dirinya dalam mengimbangi pengaruh PKI terhadap Presiden, namun sangat meyakinkan pula bahwa AD merupakan kubu pertahanan dari kekuatan-kekuatan “anti-rakyat” di negeri itu, yang berusaha membendung upaya PKI yang manapun bahkan bila perlu mengurangi atau menghilangkan secara keseluruhan pengaruh unsur ini dari kehidupan publik. Dengan demikian, pada permulaan tahun 1965 telah menjadi sangat jelas bagi para pemimpin PKI bahwa partai harus memukul AD untuk melumpuhkan komando puncaknya agar dapat membuka jalan menuju kekuasaan, baik dengan menggunakan konsep Moskow maupun konsep Peking, yaitu jalan damai atau jalan revolusioner menuju kekuasaan.

Meskipun AD, dan angkatan bersenjata pada umumnya, telah menjadi target penetrasi mata-mata PKI sejak lama, baru pada permulaan tahun 1964 partai melakukan upaya serentak untuk mengintensifkannya. Ketika itu Aidit, sebagai Ketua PKI, mendirikan sebuah badan yang dikenal sebagai Biro Chusus,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

yang bertanggung-jawab hanya kepadanya saja. Direktornya Kamarusaman, alias Sjam, anggota CC PKI, bertugas untuk mencari orang-orang yang bersimpati pada partai di dalam AD, sedangkan wakilnya Pono mencarinya di Angkatan Laut dan Kepolisian. Walujo bertugas di bidang urusan intelijen dan keuangan, dan mencari anggota di kalangan Angkatan Udara (baca: AURI). Pendidikan dan indoktrinasi oknum-oknum yang telah direkrut itu berada di tangan Ramin, Sujono Pradigdo dan Ismail, sedangkan Suwandi bertugas sebagai sekretaris Biro Khusus. Biro itu diciptakan dengan tujuan yang jelas, yaitu: menginfiltrasi Angkatan Bersenjata negeri itu, mendirikan sel-sel rahasia di dalam unit-unit mereka yang terdiri dari para perwira yang membangkang dan mereka yang bersimpati dengan garis-kebijakan PKI, dan menetralsir orang-orang yang memusuhi partai.¹⁴

Namun demikian, harus ditekankan bahwa Konstitusi PKI dengan jelas sekali melarang rekrutmen para perwira dan orang-orang yang bertugas di dalam angkatan bersenjata untuk menjadi anggota langsung partai, dan para anggota tim Sjam dari Biro Khusus mematuhi keputusan ini.¹⁵

Meski Biro Khusus itu bukanlah sebuah badan PKI yang sesuai dengan statuta yang tercantum dalam Konstitusinya, menurut Njono, Politbiro telah menyetujui laporan Aidit tahun 1964 bahwa ia telah mendirikan organisasi Biro Khusus ini untuk membantu melaksanakan tugasnya dalam “masalah-masalah militer”. Ketika terlibat dalam jenis pekerjaan ini selama hampir sepuluh tahun, Politbiro bahkan telah menugaskannya dengan tanggung-jawab ini sejak tahun 1955, namun barulah pada tahun 1964 Aidit memutuskan untuk menempatkan mandatnya dalam sebuah dasar keorganisasian yang lebih kokoh, karena konfrontasi yang sudah tak terelakkan lagi antara AD dan partai. “Aidit tidak menjelaskan kepada kami personalia dan organisasi Biro itu, karena telah disetujui bahwa ia diberi kepercayaan dengan diizinkan untuk mendirikan sebuah organisasi yang cocok untuk tugas itu. Lagi pula, juga telah disetujui bahwa Aidit diberi izin untuk menyimpang dari norma-norma umum PKI agar mampu mendekati anggota-anggota angkatan bersenjata secara individual. Mereka tidak harus saling kenal, dan tidak boleh ada hubungan antara Biro Khusus itu dan partai.” Ketika memberi izin kepada Aidit untuk mendirikan Biro Khusus, maka para anggota Politbiro mengemukakan pasal 70 dari konstitusi partai yang menyatakan bahwa “Jika karena perkembangan situasi, partai tidak mampu untuk berfungsi secara normal, maka bentuk-bentuk organisasi dan metode bekerjanya partai harus ditentukan oleh Komite Sentral”,¹⁶ sebuah badan yang terdiri dari 46 orang anggota pada tahun 1965.

PKI Menginfiltrasi Angkatan Bersenjata: 1964-1965

Lalu ketentuan ini menjadikan Biro Khusus itu berada di bawah atap konstitusi PKI, sehingga tidak berlaku lagi penolakan oleh beberapa pemimpin partai setelah hancurnya GESTAPU, bahwa Biro itu bukanlah sebuah badan partai yang konstitusional dan bahwa Aidit telah bertindak secara tidak sah saat mendirikanannya. Meskipun pada mulanya Biro itu berfungsi di dalam kewenangan khusus Aidit sebagai ketua partai, namun rapat Politbiro PKI tanggal 28 Agustus 1965, meletakkan tanggung jawab untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas Biro Khusus itu di tangan *Dewan Harian* (Dewan Harian Politbiro, atau Komite Tetap), yang terdiri dari Aidit, Lukman, Njoto dan Sudisman, meskipun Aidit tetap merupakan jurubicara satu-satunya.¹⁷

Struktur organisasi Biro Khusus itu terdiri dari Biro Pusat di Jakarta, Biro-Biro Regional di semua propinsi di negeri itu, para koordinator dan tutor, yang mendidik para rekrutmen di dalam tubuh angkatan bersenjata, serta kelompok dan sel yang berfungsi di dalamnya. Biro-Biro Regional itu masing-masing terdiri dari 2-3 pemimpin, yang telah merekrut jumlah personalia Angkatan Bersenjata di bawah ini, dan orang-orang lain, untuk meningkatkan kepentingan PKI.

STRUKTUR BIRO KHUSUS¹⁸

Wilayah	Tutor	Rekrut	
BIRO PUSAT	Aidit, Sjam, Pono, Walujo, Ramin, Sujono Pradigdo, Ismail, Sugando	8	n/a
1. Jakarta:	Sulis, Sjawal, dan 3 lainnya	5	40-50
2. Jawa Barat:	Haryana, Kastono dan Tadi	3	80-100
3. Jawa Tengah:	Salim, Darmo, dan 3 lainnya	5	250
4. Jawa Timur:	Hasjim, Sumo, Harto	3	200
5. Sumatera Utara:	Natsir, Sujono, dan 3 lainnya	5	40
6. Sumatera Barat:	Hanafi, Rivai, Djajusman, Trisno	4	30
7. Sumatera Selatan:	Pratknjo dan 2 lainnya	3	n/a
8. Kalimantan Selatan:	Sunar	1	n/a
9. Sulawesi Selatan:	Sjamsudin dan 2 lainnya	3	n/a
10. Bali:	Wijadji, Wisnu	2	30
11. Aceh:	Gani	1	n/a
12. Riau:	Sutjipto	1	n/a
Jumlah Keseluruhan		44	700

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Sebagaimana ditunjukkan oleh ringkasan di atas, Biro Khusus itu adalah sebuah organisasi yang besar. Ia memiliki 44 orang anggota tetap yang bekerja di 12 propinsi negeri itu, karena telah merekrut kira-kira 700 perwira dari berbagai angkatan bersenjata, untuk memperkuat garis kebijakan partai. Sumber utama keuangan Biro itu adalah Aidit, yang secara berkala tetapi rahasia “memberikan” sejumlah besar uang di tempat-tempat yang telah ditentukan terlebih dahulu di berbagai bagian negeri itu. Kemudian, semua dana ini diinvestasikan untuk memberikan uang-masuk yang tetap dalam berbagai usaha dagang: bengkel dan reparasi mobil, toko-toko bahan bangunan dan kontraktor, toko-toko yang memasok berbagai barang dari logam, taksi dan angkutan bus, apotek dan usaha-usaha lainnya.

Biro itu dilarang menggunakan semua fasilitas yang menjadi milik partai, dan pengelolaannya diringkas sampai sekecil mungkin untuk menghindari catatan tertulis yang terlalu banyak. Anggota Biro Khusus itu menerima “iuran” sebagai gaji dan “kompensasi” untuk membayar perumahan, ongkos pengobatan, serta pengeluaran-pengeluaran pribadi yang lain, dan biasanya memiliki sebuah pekerjaan tetap untuk kamuflase saja; mereka juga dilarang tampil di pertemuan-pertemuan umum yang diadakan partai, juga dilarang berhubungan dalam bentuk apapun dengan anggota partai yang biasa. Kebanyakan dari mereka bekerja dalam lembaga yang berbeda-beda dengan menggunakan nama-nama palsu, beberapa di antaranya dikenal memiliki empat atau lima nama alias, sebagaimana kemudian ditunjukkan oleh notulen pengadilan militer yang mengadili mereka. Untuk memberikan teknik-teknik yang pantas untuk para anggota Biro Khusus itu, yaitu teknik yang diperlukan untuk menyusup ke dalam tubuh angkatan bersenjata dan merekrut para perwiranya, dan bertugas sebagai tutor untuk mengindoktrinasi orang-orang yang ditugaskan bagi mereka, maka diadakanlah untuk mereka program pelatihan dan seminar khusus, di mana diajarkan kepada mereka ideologi Marxisme-Leninisme, psikologi, sosiologi, dan mata pelajaran yang lain. Para instruktur itu terambil dari dalam kalangan Biro itu sendiri. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu, beberapa anggota partai yang lebih tinggi tingkatnya diundang untuk memberikan kuliah, seperti Sujono Pradigdo, seorang kader terkemuka dari Komisi Verifikasi PKI.

ANGKATAN DARAT SEBAGAI TARGETNYA

Pada permulaan tahun 1965, Aidit dan Biro Khususnya mulai meletakkan dasar-dasar untuk melawan komando puncak AD, yang terdiri dari empat operasi yang bertujuan: (1) mencemarkan komando itu dengan tuduhan terlibat dalam konspirasi menentang Republik Indonesia, karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika; (2) menuduh komando puncak AD itu telah mendirikan sebuah “Dewan Jenderal” yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Sukarno; (3) mengorganisir di kalangan para perwira militer yang tidak puas kelompok-kelompok oposisi yang akan bertindak melawan Dewan Jenderal dan menjaga Presiden dalam menghadapi rencana-rencananya; dan (4) mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain, terutama memenangkan kerja sama AURI dalam menghadapi AD.

Pertama-tama muncullah di atas panggung politik itu “Dokumen Gilchrist” (DOKUMEN No. 6). Dokumen ini adalah bagian dari beberapa surat yang dipalsukan hasil garapan dinas intelijen Czekoslowakia dan Soviet yang dimaksudkan untuk mengenyahkan kepentingan-kepentingan Amerika di Indonesia. Kampanye disinformasi ini, yang diberi kode *Operasi Palmer*, telah dimulai oleh Mayor Louda di Departemen D dari dinas intelijen Czech di Praha tahun 1964. Setelah kunjungan seorang perwira intelijen Soviet, Jenderal Ivan Agayants, ke Jakarta dalam bulan April 1965, maka operasi itu diperluas, berdasarkan rekomendasinya, untuk membuat dokumen-dokumen asli tapi palsu tentang adanya sebuah rencana Inggris-Amerika untuk menyerang Indonesia dari Malaysia. Serangan ini akan dilaksanakan dengan bantuan beberapa elemen dari Angkatan Darat Indonesia.¹⁹

Pemalsuan itu, yang berupa sebuah draft surat yang tidak memiliki tanda-tangan bertanggal 24 Maret 1965, yang dituduhkan ditulis oleh Dutabesar Inggris Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri di London, dikirim oleh seseorang yang bernama Bahar atau Kahar ke alamat rumah Dr. Subandrio dalam bulan Mei 1965, dengan sebuah nota penjelasan yang mengatakan bahwa surat itu telah ditemukan di bungalow Bill Palmer di Tugu dekat Bogor, ketika para pemuda yang melakukan demonstrasi mengobrak-abriknya pada tanggal 1 April 1965. Bill Palmer sendiri adalah seorang agen pemesanan film Amerika. Surat itu mengatakan bahwa Inggris dan Amerika merencanakan suatu serangan terhadap Indonesia, yang akan dibantu oleh “our local army friends”, yang berarti beberapa orang perwira di dalam komando puncak Angkatan Darat Indonesia. Meskipun surat itu tidak ada tanda-tanggannya, namun Subandrio

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

yakin bahwa surat itu asli, demikian pula Sukarno, yang kepadanya Subandrio menyerahkan surat itu sebagai sesuatu yang benar, namun tanpa memeriksa lagi keaslian dan keabsahannya.²⁰

Setelah itu muncullah dalam panggung politik itu desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal, yang dituduh terdiri dari lima jenderal AD terkemuka yang akan merencanakan kudeta terhadap Presiden. Menurut Pono, Dewan Jendral itu terdiri dari Jenderal A. H. Nasution, A. Yani, Suprpto, Sukendro dan S. Parman. Sedangkan M.T. Harjono, Sutojo dan D. I. Pandjaitan dianggap tidak loyal kepada Presiden dan memiliki sikap anti-komunis yang fanatik. Menurut Sjam, Aidit meluncurkan konsep Dewan Jenderal itu untuk pertama kalinya pada bulan April 1965, dan di belakang asal-usulnya terdapat keyakinan Aidit yang salah bahwa aktivitas politik dan ekonomi yang semakin giat dari kaum militer di negeri itu, yang mengalir dari Jakarta ke daerah-daerah dan kemudian ke desa-desa, pastilah diarahkan secara terpusat dari suatu badan khusus yang didirikan oleh Staf Umum AD (SUAD) untuk tujuan ini. "PKI berpendapat bahwa pasti ada sebuah badan khusus di dalam staf umum yang memerintah segala operasi politik ini. Badan khusus ini memiliki sebetulnya hubungan dengan suatu dewan tertentu, yang keanggotaannya terdiri dari beberapa jenderal. Karena keanggotaannya ini, Aidit menamakan dewan ini "Dewan Jenderal", yang dianggapnya diberi tanggung-jawab dengan tugas untuk mengatur segala aktivitas politik ini."²¹

Namun demikian, Walujo memberi kesaksian pada tanggal 28 September 1968, bahwa ia sendiri, dan anggota-anggota Biro Khusus yang lain, telah membesar-besarkan konsep Aidit ini dan mengada-adakan "sebuah Kabinet Dewan Jenderal", yang akan mengambil-alih kekuasaan setelah Presiden Sukarno digulingkan. Dalam kabinet ini, Nasution akan menjadi perdana menteri; Jenderal Yani, wakil perdana menteri dan menteri pertahanan; Hadisubeno, menteri dalam-negeri; Ruslan Abdulgani, menteri luar-negeri; Jenderal Sukendro, menteri perdagangan luar-negeri; Jenderal S. Parman, jaksa agung; K. H. Rusli, menteri agama; Jenderal I. Adjie, panglima AD; Komodor Udara Rusmin, Panglima AURI; Jenderal Jasin akan mengepalai kepolisian, dan lain-lain.²²

Dengan demikian, kisah yang dikarang-karang Aidit tentang adanya Dewan Jenderal, dan konspirasinya yang jahat terhadap Presiden dan republik, telah dibumbui dan dibesar-besarkan oleh para anggota Biro Khusus untuk memberikan sebetulnya kepercayaan baginya sebelum menyebar-luaskannya dengan gencar ke seluruh negeri. Biro itu tidak hanya menggunakan saluran-

PKI Menginfiltrasi Angkatan Bersenjata: 1964-1965

saluran PKI saja untuk menyebar-luaskan kisah itu di kalangan aparat partai baik di pusat maupun di daerah, tetapi juga dengan bantuan mereka menyebarkan desas-desus itu ke seluruh negeri melalui saluran berbagai organisasi massa, seperti serikat buruh SOBSI yang kuat itu, berbagai organ Front Nasional, partai-partai politik, dan badan-badan lain baik yang umum maupun yang khusus.

Ketika Aidit ditanya oleh para anggota yang menghadiri Rapat Politbiro PKI yang Diperluas pada tanggal 28 Agustus 1965, mengenai asal-usul laporan tentang adanya Dewan Jenderal dan rencana jahatnya, ia mengatakan bahwa ia memperoleh laporan-laporan ini dari beberapa sumber. “Namun sumber yang paling dipercaya,” kata Aidit, “adalah Brigjen Polisi Sutarto, Kepala Staf BPI (Badan Pusat Intelijen).” Lebih jauh Aidit menganggap laporan-laporan ini benar, dan berdasarkan itu, ia telah menyampaikan segala dokumen yang berkenaan dengan Dewan Jenderal yang diperolehnya dari berbagai sumber itu, kepada Presiden Sukarno, Dr. Subandrio dan Ali Sastroamidjojo. “Saya mengharapkan agar Anda semuanya menjadi aktif mencari informasi tentang Dewan Jenderal. ... Saya sendiri percaya bahwa dewan itu benar-benar ada ... yang diperkuat oleh sikap yang diperlihatkan pimpinan AD terhadap kekuatan-kekuatan revolusioner progresif di negara kita.”²³

Berita yang dibuat-buat Aidit tentang adanya Dewan Jenderal dan dapat dipercayainya berita itu, yang dibunga-bungai oleh Biro Khusus dan kemudian disebar-luaskan melalui berbagai saluran, terbukti merupakan sebuah berita disinformasi yang luar-biasa efektif, yang dengan cepat menyebar ke seluruh negeri seperti api kebakaran hutan yang hebat. Sebuah bukti untuk hal ini adalah kenyataan bahwa Sutarto telah mendapatkan informasi ini dari Harjowisastro, seorang anggota PKI di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, yang menerimanya dari saluran-saluran internal partainya. Jenderal itu juga diberi-tahu oleh Sjarifudin Tandjung, seorang kader Marhaenis.

Namun, aspek paling penting dari “siaran terbatas” yang dioperasikan oleh Biro itu memperlihatkan bahwa Sutarto telah dilatih oleh Biro itu dan telah mempelajari Marxisme-Leninisme untuk sekian waktu lamanya. Sebagai sebuah aset dari banyak aset jaringan PKI yang beroperasi di dalam angkatan bersenjata, maka Sutarto itu sudah pasti diberi berita oleh tutornya tentang adanya dan rencana-rencana dari Dewan Jenderal, maka informasi ini lalu muncul di dalam laporan resminya kepada Aidit. Badan Pusat Intelijen Kepolisian telah mendapatkan informasi serupa dari ketua cabang SOBSI pabrik

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

gula Kadipaten di Cirebon, karena desas-desas itu sekarang tersebar melalui saluran-saluran SOBSI.²⁴

Dengan demikian, desas-desus yang telah dibuat-buat Aidit itu telah kembali lagi kepadanya bagai bumerang setelah berjalan melalui berbagai saluran, putaran disinformasi dan pabrik propaganda, yang mana semuanya itu di bawah pengendalian operasional PKI atau Biro Khusus. Pada bulan Mei, isu itu kembali kepada Aidit untuk memberikan kepadanya “bukti dari berbagai sumber” tentang adanya Dewan Jenderal dan rencana-rencananya yang akan berkhianat itu, yang diajukannya kepada CC PKI dalam bulan Agustus 1965. Jadi berdasarkan “bukti” inilah, ketika siaran itu telah ditutup, partai, Presiden serta para perwira progresif di bawah Untung, memutuskan untuk melakukan petualangan yang paling membawa petaka dalam sejarah modern negeri itu.

Presiden Sukarno menjadi korban pertama dari kelicikan Aidit ini, meskipun ia mau karena punya alasannya sendiri, ketika ia mengemukakan dua tuduhan itu terhadap komando puncak AD—dituduh terlibat dalam sebuah konspirasi dengan negara-negara asing berdasarkan Dokumen Gilchrist, adanya Dewan Jenderal berikut rencana-rencananya—dalam sebuah rapat KOTI (Komando Operasi Tertinggi) di Istana Merdeka tanggal 26 Mei 1965, pada pukul 10.00 pagi.

Rapat itu, yang dihadiri oleh para panglima dari keempat angkatan, yaitu AD, AL, AURI dan Kepolisian, dipanggil Presiden Sukarno segera setelah Dr. Subandrio menyodorkan kepadanya sebuah “dokumen, dalam bentuk draft sepucuk surat oleh Gilchrist”. Setelah Presiden membacakan dokumen itu kepada para panglima yang berkumpul, Presiden berpaling kepada Jenderal Yani dan langsung bertanya tentang “unsur-unsur AD” yang disebut-sebut dalam dokumen itu, dan tentang keberadaan dan aktivitas Dewan Jenderal. Yani menjawab bahwa tidak ada perwira yang berhubungan dengan orang Inggris atau Amerika, selain yang telah diberi tugas khusus untuk itu. Mayjen Sukendro diberi kewenangan untuk berhubungan dengan Amerika, sedangkan Mayjen Parman dengan Inggris, dan keduanya melaporkan hasilnya dalam diskusi-diskusi mereka kepada Yani. Lalu Presiden bertanya lagi kepada Yani, “Bagaimana mengenai desas-desus tentang keberadaan ‘Dewan Jenderal’, yang membuat penilaian tentang kebijakan saya?” “Itu tidak benar”, jawab Yani, sambil mengatakan bahwa “pada suatu kali atas permintaan mereka, saya memang telah memanggil para perwira senior untuk bersama-sama mengadakan pertukaran pendapat tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh revolusi kita. Saya memberi kesempatan sepenuhnya kepada mereka untuk

PKI Menginfiltrasi Angkatan Bersenjata: 1964-1965

mengemukakan pendapat, mengeluarkan unek-unek. Namun, apa yang memang kami miliki adalah sebuah dewan untuk mengajukan rekomendasi tentang kenaikan pangkat para perwira senior.”²⁵ Di sini Jenderal Yani menunjuk pada WANJAKTI.

Namun adalah Dr. Subandrio yang telah menciptakan teori konspirasi itu dengan jalan mengkaitkan isi yang terkandung dalam Dokumen Gilchrist dengan tuduhan tentang adanya Dewan Jenderal dan rencananya untuk *eng-coup* Presiden Sukarno. Tuduhan yang berani dan amat sangat sensitif ini meluncurkan teori konspirasi, yang dikemukakan dalam sebuah rapat raksasa tanggal 26 Mei 1965, saat merayakan Hari Jadi ke-45 berdirinya PKI. Berbicara di depan rapat raksasa itu, sebuah upacara yang disiarkan langsung ke seluruh negeri bukan saja oleh pers partai tetapi juga oleh seluruh media yang dikendalikan pemerintah, Dr. Subandrio mengatakan bahwa Presiden telah memiliki “bukti-bukti dokumentasi” dari sebuah konspirasi kontra-revolusioner yang tidak akan lama lagi akan merongrong Indonesia dan menyerang Presiden secara pribadi.²⁶

Undangan pada Subandrio untuk berpidato di depan rapat raksasa PKI itu adalah cara Aidit yang lihai dan sudah sangat diperhitungkan untuk membentuk sebuah persekutuan antara presiden dan partai, serta melibatkannya dalam pukulan PKI terhadap komando AD, sebagaimana yang akan kita lihat sebentar lagi. Tuduhan Dr. Subandrio itu menyajikan bagi mesin propaganda partai sebuah teori yang sangat masuk akal, karena dikemukakan oleh menlu yang merangkap kepala dinas intelijen negeri itu. Aparatus propaganda PKI mempergunakan teori ini, dan membesar-besarkannya dengan sindiran-sindiran dan melaju dengan gencar sekali untuk menyebar-luaskan teori itu ke seluruh negeri, dengan tendensi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh kepala dinas intelijen itu telah “membuktikan” adanya Dewan Jenderal yang terlibat dalam sebuah konspirasi merongrong Indonesia dan Presidennya, yang akan dilaksanakan dengan bantuan negara-negara asing.

Selanjutnya, PKI mulai membentuk kelompok-kelompok konspirasi di dalam tubuh angkatan bersenjata, yang terdiri dari para perwira menengah yang merasa tidak puas atau termotivasi secara ideologis untuk menggagalkan rencana kekuatan-kekuatan asing yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia, juga untuk menjaga Presiden dari setiap upaya Dewan Jenderal yang ingin menyingkirkannya. Untuk mempermudah mengumpulkan para konspirator yang potensial di kalangan para perwira militer itu, yang sendiri ingin sekali melaksanakan pembersihan komando puncak AD agar menggagalkan rencana-

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

rencananya, maka *Tesis PKI pada Hari Ulang Tahunnya yang ke-45* itu menghimbau langsung kepada mereka. Himbauan itu mendapatkan titiknya yang paling kuat dengan jalan menegaskan kembali bahwa Angkatan Bersenjata merupakan alat sesungguhnya dari Revolusi Indonesia, dan bahwa bersama dengan kekuatan-kekuatan revolusioner lainnya, ini berarti PKI, mereka harus mengubah kondisi yang ada sekarang ini dan membuka jalan bagi gerak-majunya negara ke arah sosialisme. Karena mayoritas terbesar dari angkatan bersenjata adalah putera-putera dari kaum buruh dan tani, serta berasal dari latar-belakang kelas marjinal lainnya, maka PKI sebagai partai yang mewakili kepentingan-kepentingan kelas buruh dari rakyat Indonesia, punya “saham yang besar” dan tanggung-jawab untuk membangunkan kesadaran politik mereka. Lagi pula, adalah tugas PKI untuk memperkuat persekutuan antara angkatan bersenjata dan rakyat, sehingga mayoritas angkatan bersenjata itu akan selalu berdiri teguh di pihak rakyat dan revolusi dalam menentang kekuatan-kekuatan reaksioner.²⁷

Ada dua unsur di kalangan AD yang menjadi sumber pengerahan potensial bagi para operator PKI dari Biro Khusus, ketika keduanya mulai diarahkan dan disuarakan guna mengumpulkan mereka untuk melaksanakan tujuan partai untuk memecah kekuatan AD. Unsur pertama terdiri dari para perwira dan orang-orang yang merasa tidak puas dengan kebijakan promosi, gaji, kondisi hidup dan kekurangan-kekurangan lain yang menjangkiti kehidupan mereka sehari-hari dalam barak-barak. Unsur kedua terdiri dari para perwira dan orang-orang yang condong ke kiri, yang dikenal sebagai “progresif-revolusioner”, namun di atas dari segalanya terdiri dari orang-orang yang bersimpati terhadap PKI yang telah diorganisir dalam sel-sel konspirasi rahasia oleh para pengumpul dana dari Biro Khusus untuk sekian waktu lamanya. Kedua kelompok ini termakan betul oleh teori konspirasi, yang demikian meyakinkan dikemukakan oleh Dr. Subandrio, sehingga beberapa dari mereka menyatakan siap untuk ikut dalam setiap tindakan untuk menggagalkan rencana-rencana jahat negara-negara asing terhadap Indonesia dan membela Presiden terhadap konspirasi Dewan Jenderal yang ingin menggulingkannya.²⁸

Dalam bidang propaganda, aktivitas diarahkan kepada segenap jajaran angkatan bersenjata, untuk mendapatkan dukungan mereka bagi kebijakan-kebijakannya, sehingga PKI mendapat sukses luar-biasa sejak menjadikan tentara sebagai target rekrutmen dan berbaikan dengan mereka pada tahun 1964. Para pemimpin PKI memperkirakan bahwa setiap operasi revolusioner

PKI Menginfiltrasi Angkatan Bersenjata: 1964-1965

yang diorganisir oleh partai di negeri itu, di mana partai dan Presiden tampak berada di pentas yang sama dan berjuang untuk tujuan-tujuan yang sama, akan didukung oleh tiga-puluh persen anggota Angkatan Bersenjata.²⁹

Bagaimanapun, dalam menata kelompok-kelompok konspirasi di dalam angkatan bersenjata, baik dengan metode “sistem tiga orang”, atau pun “sistem pembangunan sel” itulah, PKI mencatat keberhasilan yang sangat mengesankan, dan dalam kenyataannya sangat menentukan dalam merencanakan pukulan terhadap komando puncak AD, membuka jalan kepada tahap sosialis dari revolusi di negeri itu. Menurut Sjam, Biro Khusus memiliki jumlah perwira yang berikut ini di bawah kendali operasinya pada tahun 1965: 400-500 orang dalam AD; 30-40 orang di AL, dan 40-50 orang di AURI. Dari mereka yang berhasil direkrut ini, beberapa perwira telah menjadi konspirator utama yang pada akhirnya melaksanakan pembersihan terhadap komando puncak AD, dengan membunuh enam jenderal atas nama PKI dan Presiden pada subuh tanggal 1 Oktober 1965.

Dalam barisan Angkatan Darat, Biro Khusus mengendalikan para perwira berikut ini, yang pada akhirnya melaksanakan pembunuhan atas para jenderal itu: 1) Letkol Infanteri Untung bin Sjamsuri, dari Pasukan Pengawal Istana Presiden Tjkrabirawa, yang secara ideologis adalah seorang komunis sejak pemberontakan komunis pertama di Madiun tahun 1948, namun bukan seorang anggota resmi partai, yang menyatakan pada waktu ia diadili bahwa ia selalu menempatkan kepentingan partai di atas kewajiban dan tanggung-jawab seorang prajurit dari sumpahnya;³⁰ Pono adalah guru pribadinya. 2) Mayjen Pranoto Reksosamodro, seorang mistik Jawa; 3) Brigjen Mustapa Sjarif Supardjo, yang dididik Sjam sejak tahun 1958, yang mengepalai kelompok oposisi terhadap Jenderal Nasution dalam kalangan AD dan mengomandoi operasi “*konfrontasi*” terhadap Malaysia di Kalimantan. Bahkan sejak Maret 1965, ketika Latief memberitahu Supardjo tentang adanya Dewan Jenderal, maka Supardjo memberi kuasa kepada Latief untuk mengatakan kepada Sjam bahwa ia siap ikut dalam setiap aksi menentang para jenderal, menggagalkan rencana-rencana mereka yang ingin merongrong Presiden. Dan kemudian, dalam bulan April 1965, setelah memdiskusikan dengan Omar Dhani tentang keresahan di dalam kalangan AD yang diarahkan untuk menentang jenderal-jenderal puncaknya, maka Supardjo sekali lagi mengirim sebuah pesan kepada Sjam yang mengatakan bahwa partisipasinya sangat diharapkan dalam setiap gerakan menentang para jenderal itu oleh para perwira yang sependapat dengannya.³¹ 4) Kolonel Latief, Komandan Brigade Infanteri I dari Komando Militer V yang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

ditempatkan di Jakarta, yang telah untuk beberapa waktu berada di bawah bimbingan Pono.

Dalam tubuh AURI, Biro itu mempertahankan hubungan yang rapat melalui Walujo dengan: 1) Omar Dhani, Panglima AURI; 2) Pono mengendalikan Mayor Sujono, Komandan Pangkalan Udara Halim; dan 3) Kolonel Heru Atmodjo, Asisten Direktur Departemen Intelijen AURI.

Dalam Angkatan Laut, Biro Khusus mengendalikan: 1) Mayor Pramuko Sudarmo, 2) Letkol Ranu Sunardi, dan 3) Komodor Suradi, dan beberapa dari rekan-rekannya.

Dalam Kepolisian, Biro Khusus telah membina: 1) Brigjen Polisi S. Sutarto, Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI); dan 2) Komisioner Polisi Imam Supoyo dan Anwas Tanuamidjaja.

Sebuah unsur lain, yang bermain langsung ke tangan Aidit, adalah persaingan yang sudah lama mencekam Angkatan Bersenjata, yang telah memisahkan Angkatan Darat dan angkatan-angkatan lain, yang dicap komandonya sebagai “kekuatan reaksioner”. Terutama AURI mengambil sikap memusuhi AD, dan menyekutukan dirinya dengan posisi PKI dalam segala perkara yang penting saat itu. Menurut kesaksian Marsekal Muda Udara Leo Wattimena, komando AURI pernah mengadakan sebuah rapat di Tjiboro dalam bulan Juli 1965, di mana dibicarakan hubungan antara Dokumen Gilchrist dan keberadaan Dewan Jenderal serta rencana-rencananya. Rapat itu memutuskan bahwa Dewan Jenderal adalah sebuah konspirasi kontra-revolusioner, dan bahwa AURI adalah sebuah kekuatan progresif yang akan berdiri bersama dengan kekuatan-kekuatan revolusioner, sekiranya meletus sebuah pergolakan di dalam negeri. Rapat itu juga membicarakan Presiden Sukarno dan masa depannya, dan memutuskan bahwa jika terjadi sesuatu padanya, maka Omar Dhani akan menggantikan karena ia didukung oleh seluruh kekuatan progresif di negeri itu, yang berarti PKI dan sekutu-sekutunya.³²

Dengan demikian pada bulan Juli 1965, tersedialah semua bahan yang penting guna melakukan sebuah operasi untuk melumpuhkan AD. Sasarannya adalah menghilangkan kendala utama ini yang selalu menghalangi garis kebijakan PKI untuk meningkatkan ofensif revolusionernya di negeri itu agar mengenyahkan unsur-unsur reaksioner dari badan-badan kekuasaan negara, dan dengan demikian mencapai sebuah transisi dari Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Gotong Royong dalam perjalanan menuju monopoli PKI atas kekuasaan. Dengan sasaran ini dalam pikiran, Aidit serta para pemimpin PKI yang lain,

PKI Menginfiltrasi Angkatan Bersenjata: 1964-1965

meninggalkan negeri itu pada akhir Juni untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa ibu-kota negara komunis, termasuk Peking dan Moskow, untuk menyiagakan para pemimpinnya tentang kejadian-kejadian yang tidak lama lagi akan terjadi di Indonesia, dan meminta nasehat serta dukungan moril dan material untuk sebuah aksi yang berbahaya itu. Saat itu adalah waktu terbaik bagi PKI untuk bergerak, sebagai salah satu dari partai yang paling besar di seluruh gerakan komunis internasional, di mana PKI telah sering dikritik karena dianggap tidak aktif dan kehilangan arah.

Perpecahan Cina-Soviet, dan hasrat Moskow dan Peking agar Jakarta berada di kubu mereka, menambah sebuah dimensi lain yang memaksa PKI untuk merebut kekuasaan. Meskipun Aidit dan teman-temannya juga melakukan kunjungan ke Moskow, namun Indonesia telah hilang dari konsep strategis para pemimpin Kremlin. PKI telah memindahkan porosnya dari Moskow ke Peking pada permulaan tahun 1964, dan kepada Presiden Sukarno dalam bulan Desember tahun itu, sebagaimana akan terlihat sebentar lagi.



III

INDONESIA DALAM STRATEGI CINA 1965

SUKARNO JATUH PINGSAN DI ISTANA MERDEKA:
4 AGUSTUS 1965

Aidit meninggalkan Jakarta sebagai salah seorang anggota tim 80 orang yang menyertai Presiden Sukarno untuk menghadiri Konferensi Asia-Afrika II, yang akan diadakan di Aljazair, dan tiba di Kairo tanggal 26 Juni 1965. Tujuan dari delegasi yang besar ini adalah untuk menggolkan pada agenda acara konferensi itu kasus “konfrontasi” Indonesia-Malaysia, dan membentuk dalam rangka ini sebuah front internasional bersatu yang mewakili the New Emerging Forces. Dalam front ini, Indonesia akan memainkan peran utama karena pusat kisaran dari revolusi dunia telah pindah ke Asia Tenggara. Masalah ini didorong ke depan oleh Subandrio ketika mencari dukungan dalam diskusi-diskusi pendahuluan dengan para delegasi yang diadakan di Kairo, dengan jalan mengajukan argumentasi bahwa negaranya sedang melakukan suatu perang revolusioner menentang Malaysia sejak tahun 1963, karena Malaysia dianggapnya adalah ciptaan konspirasi neo-kolonialis Inggris-Amerika di Asia Tenggara. Subandrio juga menyebarkan Dokumen Gilchrist kepada semua ketua delegasi negara-negara yang sedang menunggu di Kairo untuk masuk ke Aljazair, dan menjelaskan hubungan isi dokumen tersebut dengan rencana Dewan Jenderal sebagai bukti dari bagaimana ofensifnya neo-kolonialisme Inggris-Amerika yang akan terjadi di kawasan itu.³³ Setelah diundurnya konferensi itu menjadi tanggal 5 November 1965, karena tuan-rumah Ben Bella, telah digulingkan ketika itu, maka Aidit mengunjungi beberapa negara komunis, hingga pada akhirnya mendarat di Peking.

Indonesia dalam Strategi Cina 1965

Dalam pada itu, Presiden Sukarno kembali pulang dalam kondisi kesehatan yang sangat menyedihkan karena penyakit ginjal yang serius. Ia mendapat serangan terakhirnya pada bulan Juli 1965, cukup gawat, sehingga para spesialis pengobatan Cina, yang beberapa di antaranya telah mengobatinya sejak tahun 1960, yakin bahwa ia tidak akan dapat hidup lagi jika datang serangan lain. Pada saat soal penggantinya menjadi masalah yang riil dan tak dapat dielakkan lagi, Presiden menginstruksikan Dr. Subandrio untuk memanggil Njono dan Aidit dari luar-negeri, Njono untuk membantu membuat sebuah draft pidato kepresidenan untuk perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1965. Subandrio mengirim telegram ke Moskow dan Peking untuk memanggil kedua pemimpin komunis itu. Aidit menjawab dari Peking kepada Sukarno, Subandrio dan M. H. Lukman tanggal 3 Agustus, bahwa ia sedang siap-siap untuk pulang dengan segera.

Dalam pada itu, tanggal 4 Agustus Presiden mendapat serangan lain lagi yang sangat gawat, di mana ia muntah-muntah sebelas kali dan hilang kesadaran sebanyak empat kali. Dr. Mahar Mardjono, Profesor Neurologi di Universitas Indonesia, langsung dipanggil. Ketika ia masuk ke kamar Presiden, sebuah tim yang terdiri dari delapan orang dokter Cina telah lebih dulu bekerja; mereka telah merawatnya sejak tanggal 22 Juli dan terus merawatnya sampai mereka kembali ke Cina tanggal 1 September 1965. Serangan itu dilaporkan demikian seriusnya, sehingga desas-desus dan spekulasi menyebar yang mengatakan bahwa kematian Presiden sudah tidak akan lama lagi. Walujo, yang bertugas sebagai penghubung antara Istana Kepresidenan dan Omar Dhani, diberi kabar oleh Untung tentang kondisi kritis Presiden, dan Untung sendiri memberitahu Dhani pada hari yang sama bahwa Presiden mungkin meninggal dunia kapan saja.

Dhani sadar sekali bahwa seandainya Sukarno meninggal dunia maka akan meledaklah suatu pertarungan kekuasaan yang hebat dan “sesungguhnya” antara AD dan PKI, dan karena menganggap dirinya seorang kandidat kuat untuk menjadi presiden, Dhani memanggil sebuah rapat para penasehat puncaknya tanggal 5 Agustus 1965 untuk menentukan posisi AURI dalam situasi yang gawat ini. Rapat ini membicarakan prospek pertarungan antara PKI dan AD dan memutuskan bahwa pertumpahan darah itu harus dihindari. Sebaliknya, sesuai dengan putusan yang dibuat di Tjiboro dalam bulan Juli 1965 yang menentukan bahwa AURI akan berpihak kepada “kekuatan-kekuatan progresif” dalam setiap krisis politik di negeri itu, maka rapat itu memutuskan untuk mendirikan sebuah komando waspada yang dinamakan *Komando*

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Operasi Utuh, untuk menjaga persatuan negeri itu dan kepentingan AURI.³⁴ Dengan demikian, AURI adalah yang pertama melakukan mobilisasi, bersiap-siap menghadapi konfrontasi bersejarah yang tidak terelakkan lagi antara AD dan kekuatan-kekuatan progresif di negeri itu, dengan dipimpin oleh PKI, tentang warisan Sukarno dan arah baru Revolusi Indonesia.

MAO MENDESAK AIDIT MEMUKUL LEBIH DULU: ZHONGNANHAI PEKING: TANGGAL 5 AGUSTUS

Ketika mengadakan konferensi dengan para pemimpin beberapa negara komunis di Eropa Timur dan Rusia, Aidit memiliki pengetahuan yang baik sekali tentang kondisi kesehatan Presiden, yang mengalami gagal-ginjal pada akhir bulan Juli, melalui dua saluran. Pertama, Dr. Subandrio, sebagai Menlu, selalu memberi informasi kepada Aidit melalui misi diplomatik Indonesia pada setiap negara yang dikunjunginya tentang kondisi Presiden yang kritis itu. Kedua, PKI sendiri punya saluran komunikasi internal partai yang menghubungkannya dengan Departemen Internasional dari partai komunis di Moskow, Peking, dan di tempat-tempat lain, yang memberitahukan kepada Aidit tentang krisis penggantian presiden yang tidak dapat dielakkan lagi karena menurunnya kondisi kesehatan Presiden Sukarno dengan cepat sekali.

Seperti telah kita lihat, ketika Presiden terserang penyakitnya itu pada akhir bulan Juli, ia sendiri yang memerintahkan Subandrio untuk mengirim telegram kepada kedutaan-besar di Peking untuk diteruskan kepada Aidit memanggilnya untuk langsung kembali ke Jakarta, dan Aidit membalas tanggal 3 Agustus bahwa ia akan pulang tanggal 6 Agustus.

Mengingat kesehatan Presiden Sukarno yang gawat itulah, maka Aidit melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan para pemimpin senior Cina di partai, pemerintahan dan kemiliteran, ketika kunjungan delapan harinya di Peking pada akhir Juli hingga awal Agustus 1965. Para pejabat ini memiliki pengetahuan yang baik tentang kesehatan Presiden dari para dokter yang merawatnya, kedutaan besar, dan informan-informan lain yang beroperasi di Indonesia. Diskusi itu pasti terpusat pada pelaksanaan persyaratan-persyaratan Persetujuan Cina-Indonesia tanggal 3 Desember 1964, sebuah persetujuan yang komprehensif tentang koordinasi dalam politik luar-negeri kedua negara dan kerjasama mereka di bidang ekonomi, militer dan lain-lain karena kebutuhan yang diperlukan Indonesia lantaran konfrontasinya dengan Malaysia. Lagi pula,

diskusi ini mungkin sekali berhubungan dengan cara-cara mengenai pemasokan senjata untuk Angkatan Kelima yang direncanakan itu, atau Tentara Rakyat, pasokan material yang diperlukan untuk membangun markas besar the New Emerging Forces di Jakarta untuk menandingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta masalah-masalah lain yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan visi strategis Peking yang dipercayai ketika itu. Visi strategis ini menghimbau Indonesia untuk memajukan momentum “revolusioner” dari konfrontasi militernya dengan Malaysia, tetap berpendirian teguh dalam penarikan diri dari keanggotaannya di PBB tanggal 1 Januari 1965, dan membangun sebuah sekretariat di Jakarta untuk the New Emerging Forces, sehingga kebijakan-kebijakannya dapat dikoordinasikan secara lebih efektif. Peking percaya bahwa Asia Tenggara adalah titik-pusat terbaru revolusi dunia, di mana Indonesia yang saat ini berada di bawah Presiden Sukarno, dan kemudian akan berada di bawah hegemoni PKI, harus menjadi kekuatan utamanya.

Diskusi Aidit dengan para pemimpin senior Cina sudah pasti berhubungan dengan semua masalah di atas dalam jangka panjangnya. Namun, rubuhnya Presiden tanggal 4 Agustus, dan penilaian para dokter Cina terhadap kematiannya yang tak terelakkan lagi siap menjemput, atau lumpuh, adalah kemungkinan realistis yang menyuntikkan unsur mendesak ke dalam misinya sehingga ia diterima oleh Mao. Dari urutan-urutan peristiwa tampak bahwa mereka bertemu keesokan harinya, tanggal 5 Agustus, untuk menilai situasi baru itu, dan mengembangkan koordinasi kebijakan untuk mengeksploitasi kesempatan yang diciptakannya.³⁵ Mao menerima Aidit di markas-besar partai Cina di Zhongnanhai, sebuah perkampungan di dalam dinding-dinding Kota Terlarang di Cina.

Aidit mungkin sekali mulai dengan mengatakan kepada Mao bahwa PKI adalah murid yang patuh pada ajaran-ajarannya, sebagai pakar teori dan praksis Marxisme-Leninisme terbesar yang masih hidup semenjak masa Lenin. PKI sedang melaksanakan teori-teorinya tentang perlunya perjuangan anti-imperialis yang tegas dengan jalan berkonfrontasi terhadap Malaysia sejak tahun 1963, dan ajarannya bahwa satu-satunya jalan kepada kekuasaan bagi partai Marxisme-Leninisme seperti PKI adalah lewat revolusi agraria. Untuk tujuan itu partai menggelorakan pendekatan ofensif revolusioner yang memiliki basis massa yang luas semenjak tahun 1964, termasuk upaya untuk menggolkan konsep Tentara Rakyat, yang terdiri dari kaum buruh dan tani, yang akan dibentuk dengan bantuan Peking, sebagai kekuatan utama revolusi agraria itu.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Meskipun tujuan partai untuk mendirikan tentara rakyat secepat mungkin mendapat dukungan penuh dari Presiden Sukarno, namun masalah yang paling besar baginya dan bagi partai justru datang dari jenderal-jenderal terkemuka Angkatan Darat, yang tidak hanya menentang didirikannya tentara rakyat itu, tetapi juga tidak begitu menyukai orientasi revolusioner dari politik luar-negeri Presiden, konfrontasi dengan Malaysia dan persekutuan dengan Cina.

Dan sangat-sangat dapat dipercaya bahwa Aidit lebih jauh mengatakan kepada Mao bahwa berita kemarin dari Jakarta menjadikan suatu kemestian bagi partai untuk langsung bersiap-siap guna melakukan tindakan darurat untuk menghadang tantangan, dan bahwa di akar tantangan itu terdapat kesiapan AD untuk memukul PKI terlebih dahulu demi kekuasaan, terlepas dari apakah Presiden meninggal atau tidak. Berdasarkan bahaya baru ini, dan dengan mempertimbangkan panggilan Presiden untuk segera pulang guna membantunya menghadapi krisis itu, maka sudah pasti Aidit meminta nasehat kepada Mao tentang tindakan apa yang harus dilakukan PKI. Tanggapan Mao adalah cepat dan lugas sekali.

- “Mao : Kamu harus bertindak cepat.
Aidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalang.
Mao : Baiklah, lakukanlah apa yang saya nasehatkan kepadamu: habisi semua Jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu.
Aidit : Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.
Mao : Di Shensi Utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja.”³⁶

Seperti disimpulkan PKI sayap pro-Moskow kemudian dalam kritik tajam mereka mengenai kebijakan-kebijakan Aidit yang pro-Peking, ketika itu Mao dan Aidit memusatkan perhatian dan penilaian terhadap karakter pribadi khas Presiden Sukarno “yang negatif dan yang positif”. Penilaian ini membicarakan sampai sejauh mana kemampuan Presiden, berdasarkan kondisi kesehatannya yang ada sekarang, untuk ikut menggelorakan tujuan-tujuan revolusioner Cina di Asia Tenggara dan sasaran PKI di front dalam-negeri, dan kemudian “mengambil keuntungan” dari hal-hal yang mereka percayai paling kondusif bagi tujuan bersama mereka.³⁷

Mengenai promosi tujuan jangka panjang kedua partai itu, jelas bahwa Presiden tidak dapat diharapkan lagi bisa memenuhinya. Pertama, kesehatannya yang memburuk dan kemungkinan meninggal dunia secara tiba-tiba atau menjadi lumpuh secara permanen. Setelah itu Mao dan Aidit tampaknya sangat yakin bahwa bahkan seandainya kesehatan Presiden makin membaik, ia pasti sudah tidak berdaya lagi, tidak sanggup memikul tuntutan-tuntutan baru yang diletakkan di atas bahunya oleh keperluan suatu promosi aktivitas revolusioner yang cepat di dalam-negeri dan di luar-negeri. Lagi pula, sama sekali tidak dapat dipastikan, malah dalam kenyataan diragukan, apakah Presiden bersedia pergi sampai ke tujuan akhir yang mungkin telah dibuatkan baginya oleh Mao dan PKI.

Kedua, sifat gampang marah secara meledak-ledak dan sembrononya Presiden, yang telah dialami oleh Marsekal Chen Yi ketika berunding dengannya tentang Persetujuan Cina-Indonesia tanggal 3 Desember 1964, mungkin pula menjadi faktor pertimbangan lain mereka tentang “potensi revolusioner” Presiden. Dalam pertemuan itu, Presiden menuntut agar Cina berbagi teknologi nuklirnya dengan Indonesia, dan bahwa sebuah ledakan nuklir harus diuji di wilayah Indonesia karena hal itu akan memberi dampak psikologis yang besar baik kepada kawan maupun lawan, dan Presiden secara histeris memukul meja dengan tinjunya ketika ia dibantah.

Ketiga, Presiden tidak menyerahkan the Afro-Asian Non-aligned Movement ke pihak Peking, dan gagal mendapatkan dukungannya untuk kerjasama Peking-Jakarta tentang kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia pada Perayaan Ulang-Tahun ke-X lahirnya gerakan Asia-Afrika, yang diadakan di Bandung pada akhir bulan April 1965. Upaya keduanya untuk memperbaiki catatan yang mencemaskan ini, dilakukan di Kairo ketika rapat-rapat pendahuluan para delegasi yang berkumpul di sana untuk Konferensi Puncak II gerakan itu, terbukti tidak efektif. Upaya ini pada akhirnya gagal juga karena konferensi puncak itu yang rencananya akan diadakan di Aljazair dalam bulan Juni 1965, telah dibatalkan karena kekacauan melanda Aljazair yang sedianya menjadi tuan rumah, dan Presiden harus kembali pulang dengan tangan hampa, apalagi dalam keadaan sakit yang gawat. Pada saat itu, prestise Presiden Sukarno di dunia Asia-Afrika sedang compang-camping, sehingga menjadikan Indonesia berdiri sendirian saja dan dalam keadaan terisolir dari pergaulan internasional, suatu partner yang meragukan bagi ambisi jangka panjang Mao, sebagaimana akan kita lihat sebentar lagi.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Akan tetapi, manfaat jangka-pendek Presiden diakui oleh keduanya, baik Mao maupun Aidit; dalam kenyataannya Presiden tidak dapat dikesampingkan begitu saja untuk mencapai tujuan-tujuan mereka yang langsung maupun yang berjangka pendek. Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, adalah dalam kekuasaannya untuk memberhentikan atau menghabisi para jenderal AD yang menentang kedekatannya dengan Cina, konfrontasi bersenjata dengan Malaysia, serta ambisinya untuk mempersenjatai buruh dan tani. Lagi-lagi, segera sesudah menghabisi para jenderal yang keras kepala itu, Presidenlah yang dapat menunjuk sebuah kabinet Gotong Royong di mana PKI akan menjadi pemain yang dominan, yang selanjutnya akan membuka jalan ke arah transformasi sosialisme sepenuhnya di negeri itu.

Namun, setelah melegitimasi transisi ini dengan wewenang dan kewibawaannya, yang disarankan Mao kepada Aidit, Presiden harus pensiun, atau dipensiunkan, untuk kemudian digantikan oleh seseorang yang “bukan-komunis”, sedangkan Aidit akan memegang jabatan “perdana menteri”,³⁸ guna mengendalikan seluruh lini kekuasaan di negeri itu. Dengan memperhatikan kondisi kesehatan Sukarno yang gawat, serta potensi revolusionernya yang telah kehabisan tenaga, tampaknya Mao dan Aidit setuju bahwa Cina akan menyambut Sukarno dengan baik untuk tinggal di suatu tempat peristirahatan yang nyaman, di mana ia dapat langsung menerima perawatan kesehatan yang amat diperlukan itu dan dari jauh dapat memainkan peran seorang negarawan senior. Kemungkinan untuk mengistirahatkan Presiden ke Cina bukanlah sebuah pemikiran yang tak bermakna, karena di dalam jangka waktu 10 hari kemudian, Marsekal Chen Yi, mengunjungi Jakarta untuk ikut hadir dalam perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1965, mengatakan kepada Dr. Subandrio bahwa Peking siap untuk menyambut Presiden, dan bahwa Chen Yi telah berhasil menemukan sebuah tempat yang tenang baginya di Danau Angsa di Cina.³⁹

Dengan demikian, jelaslah bagi Mao dan Aidit bahwa kepentingan strategis jangka panjang Peking dan PKI hanya dapat dipromosikan oleh Aidit dan tidak lagi oleh Sukarno, dengan Indonesia secara kokoh berada dalam kendali PKI, namun transisi ke arah itu dilakukan dengan bekerja-sama dengan Presiden. Jadi, melakukan transisi “dengan” Presiden jelas merupakan opsi yang disenangi. Namun, seandainya Presiden ternyata enggan menerima butir-butir persetujuan Mao-Aidit itu dan menolak bekerja-sama dalam rencana mereka, tampaknya keduanya setuju dengan opsi yang kedua. Opsi ini memerlukan suatu putusan agar para jenderal reaksioner itu dijatuhkan dan

transisi itu dilaksanakan “tanpa Presiden”,⁴⁰ dan bahkan menentangnya seandainya ia menolak, untuk menghilangkan dua kendala yang menghalangi PKI untuk merebut kekuasaan. Dalam kesimpulan pertemuan mereka itu, Mao meminta Aidit menyampaikan opsi pertama itu kepada Presiden, mendapatkan daripadanya sebuah persetujuan tertulis dan melaporkan kembali hasilnya, sebagaimana jelas dari surat Aidit tanggal 10 November 1965, di mana ia berbicara mengenai “pasal-pasal perjanjian yang telah kami sampaikan secara /R dalam bulan Agustus yang lalu ...” dari Mao kepada Presiden.⁴¹

Sebelum berpisah, Aidit mendapat janji Mao yang akan segera memasok bagi Presiden 30.000 pucuk senjata untuk memukul para jenderal reaksioner, dan kemudian mengirim dengan kapal laut sejumlah besar senjata untuk perlengkapan Angkatan Kelima. Inilah yang merupakan saripati dari pesan yang Mao ingin disampaikan Aidit kepada Sukarno, setibanya kembali di Jakarta, dan mendapatkan persetujuannya atas butir-butir perjanjian rahasia Sukarno-Mao-Aidit.

Dalam perjalanan pulang dari Peking ke Jakarta tanggal 7 Agustus dengan sebuah pesawat yang disediakan Cina, Aidit dan Njoto, tokoh PKI lainnya yang dalam pada itu telah tiba dari Moskow, didampingi oleh dua orang “dokter”, Dr. Wang Hsin Te dan Dr. Tan Min Hsuen, untuk menyertai tim Cina yang telah merawat Presiden. Dengan memperhatikan kudeta yang hampir terjadi, maka adalah masuk akal bagi kita untuk memperkirakan bahwa salah satu dari dokter itu, jika bukan kedua-duanya, mungkin merupakan perwira intelijen tingkat tinggi untuk mengadakan garis komunikasi langsung dan sangat rahasia yang menghubungkan para pemimpin puncak Cina dengan Sukarno dan PKI. Rombongan itu mendarat di Kemayoran tanggal 7 Agustus pukul 12.00 tengah hari. Aidit juga mengatakan dalam suratnya tentang pentingnya mempertahankan komunikasi antara dirinya dan Presiden melalui jaringan intelijen yang dioperasikan di Indonesia oleh Cina.⁴²

Dengan demikian, strategi global Peking dan persaingan dengan Moskow mengenai arah partai-partai komunis dunia, ditambah lagi dengan krisis yang terjadi di Indonesia lantaran jatuh pingsannya Presiden Sukarno tanggal 4 Agustus 1965, itulah yang mendorong Aidit membuat rencana-rencana untuk melakukan pukulan langsung menantang AD, yang akan dipayungi oleh Presiden dan dilaksanakan oleh Untung serta perwira-perwira progresif-revolusioner lain.

“Para Kawan Cina itu tidak menentang kita mengambil kesempatan dari sifat karakter Presiden Sukarno, baik yang positif maupun yang negatif.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Ketika mengerjakan hal itu mereka sepakat dengan kepemimpinan Partai kita untuk menjamin kemenangan konsep burjuis kecil mereka tentang hegemoni politik mereka di Asia dan Afrika, dan menggantikan kebijakan front anti-penjajahan internasional dan perjuangan untuk perdamaian dengan 'Poros Jakarta-Peking' ...

Setelah kembalinya para pemimpin kita dari perjalanan ke luar-negeri, yang juga mencakup sebuah negara Asia (Cina, Ed.), dalam bulan Juli-Agustus, maka dapat diketahui bahwa kepemimpinan Partai telah mengambil sebuah putusan yang terlalu tergesa-gesa dalam memulai persiapan-persiapan untuk memainkan peran sebagai seorang 'penyelamat' dengan atau tanpa Presiden Sukarno dan kekuatan-kekuatan demokratik lainnya ... ⁴³

Karena waktu dan sifat yang tepat dari keseluruhan operasi PKI itu tergantung dari evaluasi tentang kesehatan Presiden, maka Aidit dan Njoto tiba di Jakarta dari Peking tanggal 7 Agustus didampingi oleh dua orang Cina "spesialis pengobatan", dan sebagaimana telah dikemukakan, orang-orang ini mungkin sekali adalah perwira tinggi intelijen untuk mengadakan hubungan komunikasi yang langsung antara Presiden, Mao dan Aidit pada senja hari dari perkembangan-perkembangan yang demikian pentingnya. Sebagaimana diperlihatkan oleh buku catatan para tamu, Aidit mengunjungi Presiden di Istana Merdeka tanggal 7 Agustus langsung setelah ia tiba pada pukul 12.00 tengah hari, secara ringkas melaporkan kepada Presiden tentang perjalanannya ke luar-negeri, namun karena seriusnya topik yang dibicarakan, maka ia merasa perlu untuk sekali lagi menghadap Presiden keesokan harinya, tanggal 8 Agustus, di Istana Bogor.

PERJANJIAN RAHASIA SUKARNO DENGAN MAO: ISTANA BOGOR, TANGGAL 8 AGUSTUS

Dalam pertemuan Aidit dengan Presiden di kamar-tidurnya berdua saja di Istana Bogor itulah, Aidit menyampaikan pokok-pokok utama pesan Mao, sudah tentu dengan bahasa yang paling halus yang dapat dicarinya. Meskipun tidak ada catatan tertulis dari percakapan rahasia yang sangat penting ini, namun adalah mungkin untuk kita lakukan rekonstruksi atas pokok-pokok utama yang dibicarakan, tidak dalam rincian tetapi dalam garis-besarnya saja, yakni berhubungan dengan tiga hasil utama, dan yang telah dikenal, yang menyusul pembicaraan itu dengan rentetan yang cepat.

Aidit mungkin sekali mulai dengan menyampaikan ucapan terima kasih Mao tentang kebijakan progresif dalam-negeri dan luar-negeri Presiden, dan keprihatinannya terhadap kondisi kesehatan Presiden Sukarno dan mengharapkan kesejahteraan di masa depan. Setelah semua pendahuluan standard ini, besar sekali kemungkinannya bahwa pembicaraan pindah kepada masalah kebutuhan Presiden, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, untuk memberhentikan jenderal-jenderal yang tidak loyal, dan setelah itu, menunjuk Kabinet Gotong Royong untuk memulai transisi revolusi Indonesia ke tingkatnya yang lebih tinggi, dan membentuk Tentara Rakyat, yang terdiri dari kaum buruh dan tani, sebagai kekuatan penyeimbang untuk menjaga agar militer tetap berada di tempatnya. Titik penting ketiga dari pesan Mao, masalah sensitif tentang pengunduran-diri Presiden setelah memudahkan jalan bagi naiknya PKI ke kekuasaan, sudah pasti didasari masalah kesehatan itu. Karena upaya restrukturisasi masyarakat Indonesia mengikuti garis-garis sosialis sudah barang tentu akan menguras energi yang besar sekali, dan dengan mempertimbangkan kesehatannya, mungkin sekali Aidit menganjurkan kepada Presiden bahwa cara paling baik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengambil masa istirahat panjang yang sangat diperlukan itu di sebuah tempat peristirahatan di Cina, untuk mana Mao telah menyampaikan undangannya yang paling hangat. Gagasan beristirahat di Cina ini mungkin sekali menarik bagi Presiden, apalagi setelah ia demikian terhuyung-huyung karena pengaruh jatuh pingsannya itu, yang hampir saja menyebabkan kematiannya hanya empat hari sebelumnya, dan bertatapan muka dengan kematiannya sendiri dan dengan masalah warisan yang akan ditinggalkannya di belakang.

Dalam konteks ini, Presiden pasti merasa gembira oleh tawaran Mao karena hal itu menjelaskan kepadanya masalah utama yang menyibukkannya setelah ia mempertaruhkan nasibnya kepada PKI di depan umum bulan Mei lalu. Bagaimana nasib masa depan Indonesia di bawah komunisme, yang dipercayainya tidak dapat dielakkan lagi, ia siap menerimanya, sebagai suatu keniscayaan sejarah.

Berdamainya serta penerimaannya terhadap hal yang tidak terelakkan itu jelas sekali pada tahun 1965 bahkan dalam pernyataan-pernyataannya di depan umum. Berbicara di Stadion Olahraga Jakarta pada tanggal 24 Mei 1965 ketika merayakan Hari Jadi PKI yang ke-45, Presiden dengan gamblang menyatakan: "Ya, saya merangkul PKI karena ia adalah sebuah kekuatan revolusioner Kebijakan kita sekarang ini adalah mempersatukan seluruh kekuatan revolusioner progresif, karena itu tidaklah mengherankan apabila

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

saya merangkul PKI.” Ia menambahkan bahwa ia bermaksud untuk me-NASAKOM-kan the New Emerging Forces, dan untuk itu markas-besarnya yang baru sedang dibangun di Jakarta dengan bantuan Cina.⁴⁴ Aidit mencatat dalam pidatonya pada kesempatan ini bahwa “potret Sukarno tergantung di dinding bersama dengan potret Marx, Engels, Lenin dan Stalin”, dan bahwa di beberapa ibukota daerah juga diperlihatkan potret Mao.⁴⁵

Perayaan itu adalah suatu peristiwa besar yang dihadiri delegasi delapan negara komunis. Delegasi Cina dikepalai oleh Cheng Peng dan lima orang anggota Komite Sentral, dan delegasi Vietnam Utara menyambut baik kebijakan konfrontasi Sukarno terhadap Malaysia sebagai bagian tak terpisahkan dari pertarungan revolusioner di Asia Tenggara untuk mengalahkan neo-kolonialis dan kaum imperialis Inggris-Amerika yang memporak-porandakan kawasan itu. Bahkan dalam musim gugur tahun 1964, PKI telah mengirim ke Vietnam Utara 14 orang kader senior untuk mempelajari dan berlatih perang gerilya di akademi-akademi militernya, yang setelah kembali pulang akan mendirikan sekolah latihan seperti itu apabila PKI telah mengeluarkan seruan untuk hal tersebut. Salah satu dari mereka, mungkin sekali, adalah adik Aidit sendiri yang bernama Asahan Aidit.⁴⁶

Tampaknya, pada pertengahan tahun 1965, Presiden merasa yakin bahwa ketegangan yang ada antara AD dan PKI segera akan mencapai puncaknya dalam sebuah pertikaian bersenjata, dan bahwa ia tidak akan mampu lagi menahannya dengan jalan mengadu-domba antara pihak yang satu dengan yang lain untuk menghindarinya. Karena PKI memiliki dukungan massa yang sangat besar, maka memisahkan AD dari ketiga angkatan lainnya di negeri itu, serta ketidak-puasan dan faksi-faksi yang cukup mendalam di dalam AD itu sendiri, maka PKI akan menjadi pemenang, sehingga menjadikan partai itu tuan di bidang politik yang tak dapat dibantah lagi. Dalam konteks ini, sudah tampak jelas baginya bahwa masa-depannya terletak pada menyekutukan dirinya dengan kekuatan politik yang sedang naik daun di dalam negeri, yaitu PKI, dan secara internasional dengan Peking. Aidit merupakan kunci bagi Presiden untuk menemui kedua pemain dominan yang sedang muncul itu dan mengadakan sebuah persekutuan dengan mereka, dan di dalam kamar-tidurnya Istana Bogor, dan pertemuannya dengan Aidit di sana tanggal 8 Agustus, adalah tempat dan waktu yang pas untuk melakukan hal itu.

Garis cara berpikir Presiden sudah tampak dalam pidatonya tanggal 11 April 1965, ketika ia mengatakan bahwa Indonesia tidak lama lagi akan memasuki “tahap sosialis” dari perkembangannya, di mana *land reform* akan

disempurnakan dan modal asing akan dihilangkan.⁴⁷ Namun, terlepas dari segala kepercayaan diri dan kesaksian ini yang memperlihatkan bahwa di depan umum ia menyerahkan peruntungannya kepada PKI sebagai “gelombang masa-depan”, pikiran Presiden sudah pasti tetap terganggu oleh pertanyaan yang selalu belum terjawab mengenai nasib pribadinya, nasib Pemimpin Besar Revolusi: apa yang akan terjadi terhadapnya setelah PKI berkuasa? Cukup masuk akal apabila ia berharap bahwa kekuatan-kekuatan baru yang akan muncul itu, jika ia bekerjasama dengannya, akan memujinya bukan saja karena telah memuluskan jalan bagi mereka untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi juga karena telah menjadikan segalanya ini mungkin dalam situasi tahun 1965 itu, karena revolusi agraria sebagai jalan kepada kekuasaan tetap merupakan suatu target yang masih jauh bagi PKI.

Dalam pada itu, sebagai seorang pengamat sejarah yang tajam, sebagaimana akan kita lihat sebentar lagi, Presiden gemar mengutip pendapat Thomas Carlyle tentang kecenderungan revolusi, yang hampir merupakan “hukum besi dalam perjalanannya melalui berbagai tahap”, untuk juga memakan anak-anaknya sendiri dalam proses itu.

Sejarah sistem komunis di berbagai belahan dunia sejak tahun 1918, peristiwa tahap-tahap Teror dan Thermidor dari evolusi mereka yang berdarah-darah itu, dipenuhi oleh contoh-contoh yang mencengangkan dahsyatnya. Pembersihan Besar di masa Stalin, perburuan Mao dan setelah itu dibasminya “musuh-musuh kelas” di lingkaran teman-temannya terdekatnya yang telah mengadakan revolusi bersamanya, dan di atas itu semua, kejatuhan Presiden Eduard Benes dari Czechoslowakia pada bulan Februari 1948, seorang “demokrat revolusioner” yang bukan-komunis, sudah pasti berada dalam pikiran Presiden Sukarno dalam merenungkan masa-depannya sendiri di bawah pemerintahan Aidit. Karena telah terpojok, dari segi ajaran Marxisme-Leninisme, sebagai seorang “nasionalis revolusioner” yang berguna, baik oleh Aidit maupun oleh Mao, terlepas apakah ia senang akan julukan ini atau tidak, maka Presiden Sukarno sudah pasti benci sekali terhadap pemikiran akan mengalami nasib yang sama dengan Benes. Setelah menyerahkan negaranya ke tangan Gottwald dan Stalin dalam bulan Februari 1948, Benes dicampakkan saja secara tidak terhormat sehingga tidak dikenal lagi di mana ia meninggal di bulan September tahun itu sebagai seorang yang dilupakan dan dianggap kriminal, terlepas dari pengorbanannya yang besar di masa lalu untuk kepentingan revolusi komunis di negerinya.

Kita harus ingat akan peringatan Aidit dalam suratnya kepada para kader PKI tanggal 10 November 1965, sambil menunjuk pada jatuhnya “hukum

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

karma” atas Presiden, dan bahwa Presiden bila perlu akan “dikorbankan”,⁴⁸ seandainya ia ingkar memenuhi janjinya kepada Mao dan Aidit. Jelas sekali bahwa janji-janji itu mencakup pengunduran dirinya ke sebuah villa di Danau Angsa di Cina karena alasan kesehatan, setelah menyerahkan kekuasaan atas negeri itu ke tangan Aidit.

Aspek yang penting dari situasi itu, di mana Presiden menemukan dirinya di kamar-tidurnya di Istana Bogor sambil mendengarkan Aidit menyampaikan pesan Mao, sudah pasti adalah kesadarannya tentang cara bekerjanya “hukum besi” itu secara tak kenal ampun, yang menentukan perjalanan yang harus ditempuh oleh revolusi-revolusi komunis. Ini berarti bahwa tahap sosialisme dari revolusi Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan oleh seorang “nasionalis revolusioner” sebagai kepala negara seperti Sukarno, terlepas dari kedekatan hubungan pribadinya dengan Aidit dan Mao. Tentu saja ia sadari bahwa setelah penyerahan kekuasaan, ia harus pergi, dan bahwa mundurnya dia secara sukarela, dengan segala gelarnya sebagai Pemimpin Besar Revolusi, ke Danau Angsa di Cina akan merupakan jawaban yang tepat pada waktunya untuk masa depan yang penuh dengan ketidak-pastian, baik secara kesehatan maupun secara politik, dan lebih disenangi daripada suatu “kematian yang dipaksakan” dari lapangan politik.

Karena pesan Mao yang dikemukakan Aidit kepada Presiden Sukarno itu di kamar-tidurnya di Istana Bogor tanggal 8 Agustus 1965 itu tampaknya menjawab pertanyaan yang bermain di dalam pemikirannya, tentang masa-depannya di bawah pemerintahan PKI, maka Presiden mengambil keputusan bersama Mao dan Aidit dan menerima tawaran Mao. Karena itu dengan memperhatikan konteks ini, sudah dapat dikatakan pasti bahwa ia meyakinkan Aidit bahwa ia akan mengikuti putusannya untuk memecah kekuasaan para jenderal AD, yang telah dilakukannya di Istana Tampak Siring di Bali tanggal 6 Juni 1965, sebagaimana akan kita lihat sebentar lagi, dan bahwa setelah disingkirkannya pada jenderal, ia akan menunjuk sebuah Kabinet Gotong Royong untuk membuka jalan bagi tahap sosialis dari revolusi Indonesia dan memikirkan untuk pensiun.

Tetapi tidak jelas apakah “upaya-upaya” Presiden ini dituliskan di atas kertas atau hanya merupakan janji-janji lisan belaka, dan apakah ia mengirim semuanya itu melalui saluran Aidit kepada Mao, atau melalui Marsekal Chen Yi, yang tiba di Jakarta beberapa hari kemudian untuk menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1965. Selama kunjungannya di Jakarta itu, Chen Yi bertemu Dr. Subandrio di kantornya, juga mengadakan pertemuan

rahasia dengan Aidit, di mana ketika itu janji-janji Presiden kepada Mao sudah pasti dibicarakan. Surat Aidit tanggal 10 November 1965 berbicara jelas sekali tentang “pasal-pasal” dari sebuah “perjanjian” antara Sukarno-Mao, yang berisi janji-janji dan kewajiban-kewajiban Presiden terhadap Mao, sebagaimana juga janji-janji Subandrio, yang akan diumumkan oleh PKI, andai kata mereka gagal memenuhinya. Ini akan merupakan “lonceng kematian dan kehancuran bagi Sosro (Sukarno, Ed.) dan Tjeweng (Subandrio, Ed.).”⁴⁹

Dengan tuntasnya misi kepada Presiden, Aidit meninggalkan kamar-tidur Presiden dan lama sekali berkonsultasi dengan para pakar pengobatan dari Cina di kamar yang lain di Istana Bogor itu, yang menegaskan kembali pendapat mereka bahwa serangan selanjutnya akan membunuh Presiden atau akan membuatnya lumpuh. Telah menjadi pendapat “profesional” mereka, terlepas dari siapakah dari antara mereka yang sungguh dokter, bahwa Aidit lalu meyakinkan partai untuk memukul lebih dulu komando puncak AD, karena diperintahkan oleh Presiden dan dilaksanakan oleh Untung dan para perwira revolusioner lainnya, namun diarahkan oleh Biro Khusus Aidit. Dengan memperhatikan perlunya Mao untuk melibatkan Indonesia dalam menggelorakan aksi-aksi revolusionernya di Asia Tenggara, yang hanya dapat dipacu oleh pengendalian Aidit yang efektif terhadap negeri itu, maka tidaklah mengherankan apabila para dokter itu “memalsukan” temuan-temuan mereka untuk memberikan suatu alasan yang masuk akal bagi Aidit untuk “bertindak cepat”, sebagaimana dinasehatkan Mao padanya ketika pertemuan di Peking beberapa hari sebelumnya.⁵⁰

Sebagaimana dijelaskan di atas, rekonstruksi pertemuan Aidit dengan Presiden di kamar tidur Presiden di Istana Bogor tanggal 8 Agustus 1965, di mana Presiden tampaknya menerima persyaratan-persyaratan Mao, telah mendapat dasar asumsinya dalam tiga bukti yang terjadi secara berturut-turut dengan cepat sekali lewat peristiwa-peristiwa yang menyusul kemudian itu.

Yang pertama, segera setelah Aidit berangkat dari Bogor tanggal 8 Agustus, tampaknya Presiden memanggil Brigjen Sabur, Komandan Resimen Tjakrabirawa di Istana dan Kolonel Untung, ke kamar tidurnya, dan bertanya kepada Untung apakah dia “akan cukup berhati berani untuk menangkap para jenderal” yang tidak loyal kepada Presiden dan menentang kebijakan-kebijakannya. Untung menjawab bahwa ia akan melakukan hal itu “apabila diperintahkan”, di mana setelah itu Presiden memerintahkannya untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan “untuk menindak para jenderal itu”. Setelah pertemuan dengan Presiden, Untung melaporkan kejadian itu kepada

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Waluyo, yang selanjutnya membahas masalah itu dengan Aidit dan anggota-anggota Biro Khusus yang lain.⁵¹ Dengan demikian dalam waktu kira-kira sehari saja, Aidit telah memiliki di tangannya sebuah konfirmasi dari Presiden, dan sudah pasti memberitahukan hal itu kepada Mao melalui utusan-utusan yang dibawa bersamanya ke Jakarta dari Peking tanggal 7 Agustus 1965, atau melalui saluran-saluran lain.

Peristiwa kedua yang tampaknya memperkuat dugaan kita tentang janji-janji yang dibuat Presiden kepada Mao dalam pertemuannya dengan Aidit tanggal 8 Agustus di Bogor, adalah peristiwa yang terjadi kira-kira seminggu kemudian, yakni hadirnya Marsekal Chen Yi di Jakarta untuk ikut-serta dalam perayaan Hari Kemerdekaan negeri itu tanggal 17 Agustus 1965. Chen Yi, yang sebelum keberangkatannya dari Peking besar sekali kemungkinannya telah bertemu Mao, dengan memperhatikan sangat pentingnya perkembangan-perkembangan yang tidak lama lagi akan terjadi di Jakarta. Ia menegaskan kepada Dr. Subandrio bahwa ia telah mempersiapkan sebuah “tempat tinggal yang nyaman untuk Sukarno di Danau Angsa di Cina”,⁵² di mana Presiden akan berada di dalam perawatan para dokter untuk memulihkan kembali kesehatannya, yang mungkin sekali akan membutuhkan waktu sangat lama.

Dengan demikian, nasib Presiden akan agak mirip dengan nasib Presiden Norodom Sihanouk beberapa tahun kemudian, setelah ia melapangkan jalan untuk mengkomunikasikan Kamboja oleh Pol Pot, lalu ia sendiri digulingkan oleh Jenderal Lon Nol saat sedang berkunjung ke Moskow. Ketika Kremlin menolak untuk menawarkan tempat-tinggal bagi Sihanouk, maka Peking dengan cepat mengundangnya ke Cina, sambil menawarkan untuk merawat kesehatannya dan menyediakan sebuah kehidupan yang menyenangkan dan mewah, di mana pangeran itu dan isterinya, Princess Monica, menerimanya dan menikmatinya (sampai ia kembali ke Kamboja setelah ada perubahan peta politik).

Peristiwa ketiga yang memberi suatu tingkat kepercayaan yang valid pada rekonstruksi kami terhadap diskusi antara Presiden dan Aidit di Istana Bogor tanggal 8 Agustus 1965, adalah berkenaan dengan maksud Presiden untuk menunjuk sebuah Kabinet Gotong Royong langsung setelah dilenyapkannya para jenderal yang tidak loyal itu. Bukti tersebut datang dari rapat kedua Politbiro PKI di Jakarta tanggal 26 Agustus 1965, yang akan dikupas nanti di dalam buku ini. Setelah laporan Aidit tentang perimbangan kekuatan di Jawa antara para perwira revolusioner dan mereka yang loyal kepada Dewan Jenderal, maka rapat itu membicarakan perlunya Presiden membentuk Kabinet Gotong Royong setelah dipenggalnya komando puncak AD. Rapat itu selanjutnya

membicarakan komposisi keanggotaan pemerintahan yang baru itu yang akan memberikan perwakilan seluas mungkin kepada kekuatan-kekuatan revolusioner di dalamnya, dan mekanisme yang akan menjamin hegemoni PKI dalam kabinet baru ini untuk membawa revolusi Indonesia ke tahap sosialisnya. Rapat itu memutuskan bahwa pandangan Politbiro tentang keanggotaan Pemerintahan Gotong Royong itu harus diajukan kepada Presiden, dan mempercayakan kepada Aidit dengan sebuah misi untuk menemuinya secepat mungkin. Dan ketika Aidit bertemu Presiden tidak lama setelah itu untuk mengemukakan pandangan Politbiro tentang komposisi keanggotaan kabinet yang baru itu, maka Presiden “berhasil dimenangkan” sehingga menyetujui usul tersebut, demikian Aidit melaporkan kemudian.⁵³

Kita akan kembali kepada perjanjian Sukarno-Mao-Aidit ini kemudian di dalam buku kita ini, karena persyaratan-persyaratannya penting sekali dikupas untuk memahami pertarungan kekuasaan yang hebat antara Sukarno-Aidit yang akan dimainkan di Pangkalan Udara Halim di sepanjang hari tanggal 1 Oktober 1965. Pertarungan di antara dua orang ini, sebuah perang urat syaraf yang melelahkan sepanjang hari itu, menyerupai sebuah lakon *wayang kulit*, yang dipertarungkan persis masalah pembentukan Kabinet Gotong Royong itu. Di sana di Halim, ketika Presiden ingkar janji setelah terbunuhnya enam jenderal di tangan orang-orang Untung, Aidit mengalami kekalahan dalam pertempuran itu, dan kemudian diiringi oleh hancurnya GESTAPU secara tidak terhormat.

Jadi, dengan tidak adanya prospek realistis yang tampak untuk mengembangkan sebuah revolusi agraria di negeri itu pada pertengahan tahun 1965—PKI telah mengantisipasi bahwa tahap permulaannya hanya dapat diluncurkan pada tahun 1970—maka Aidit di tangannya tanggal 8 Agustus telah memiliki sebuah cetak biru untuk jalan pintas merebut kekuasaan, hanya empat hari yang pendek setelah Presiden rubuh dan terbaring tidak sadarkan diri di Istana Merdeka tanggal 4 Agustus 1965. Cetak biru itu terdiri dari tiga unsur. Pertama, memenggal komando puncak AD atas perintah Presiden; kedua, Pemerintahan baru oleh Kabinet Gotong Royong yang langsung ditunjuknya akan menempatkan negeri itu di bawah kekuasaan PKI; ketiga, setelah Presiden memayungi transisi ini dengan legitimasi dan kewibawaannya secara terhormat, maka ia langsung mengundurkan diri ke suatu tempat pemandian air panas di Cina dengan alasan kesehatan. Dipandang dari ukuran apapun, rencana Aidit ini adalah suatu upaya yang amat licik.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Sekarang, marilah kita telusuri evolusi dari masing-masing dari tiga komponen cetak biru Aidit sebagai jalan-pintas kepada kekuasaan itu sejak akhir tahun 1964, dan bagaimana semuanya itu sampai berada di tempatnya yang tepat pada tanggal 8 Agustus 1965.

POROS CINA-INDONESIA DALAM UJIAN: JUNI-JULI

Di antara banyak faktor yang menyebabkan memburuknya hubungan antara Presiden dan komando puncak AD pada tahun 1965, ada tiga persoalan yang tampaknya paling penting. Faktor pertama berhubungan dengan oposisi AD terhadap orientasi politik luar-negeri Presiden yang semakin pro-Peking, karena hal itu menempatkan negeri itu bertentangan dengan tetangga-tetangganya di Asia Tenggara, yang menjadikannya terlibat dalam sebuah konfrontasi yang mirip perang, namun tidak membawanya ke mana-mana, dengan Malaysia. Faktor kedua adalah ambisi Presiden untuk menjadi pemain utama di dunia Asia-Afrika, dan upayanya untuk menyekutukan Indonesia lebih rapat lagi dengan aspirasi-aspirasi revolusioner Peking, dan bertindak sebagai wakil Peking di bagian-bagian dunia ini. Faktor ketiga adalah niat Presiden untuk mendirikan Angkatan Kelima, tidak hanya untuk sekedar memiliki sebuah kekuatan militer miliknya sendiri yang akan mengimbangi para jenderal yang berkuasa itu, tetapi juga untuk menempatkan dirinya sendiri di puncak sebuah koalisi kekuatan-kekuatan baru yang diyakininya, di bawah kepemimpinan bersama Sukarno-PKI, akan membentuk masa-depan Indonesia sebagai pemain di kubu sosialis dunia itu. Alhasil, kekakuan segi-tiga besi yang tertanam di dalam sistem Demokrasi Terpimpin tidak dapat lagi dipertahankan. Berdasarkan hal ini, dalam merapatkan dirinya dengan PKI, maka Presiden melihat satu-satunya kemungkinan untuk tetap berada di puncak tahap baru dari revolusi Indonesia ini yang, sebagai suatu keniscayaan sejarah, akan dilaksanakan di bawah hegemoni PKI.

Dengan demikian, dalam bulan Agustus 1965, terbentuklah suatu kerjasama erat secara kebetulan saja (*fortuitous alignment*) antara PKI, para perwira progresif dalam AD, Presiden Sukarno, dan Peking, di mana perlunya suatu pembersihan langsung terhadap komando puncak AD berfungsi sebagai satu-satunya mata rantai yang menghubungkannya, yang jika tidak demikian, masing-masing pemain itu punya kepentingan-kepentingan jangka-panjang sendiri yang saling bertentangan.⁵⁴

Indonesia dalam Strategi Cina 1965

Ketika di front dalam-negeri, sistem Demokrasi Terpimpin berada dalam keadaan tidak bergerak pada tahun 1964, namun di front internasional ia melaju cepat sekali karena didorong oleh keyakinan Presiden Sukarno, dan Menteri Luar-Negerinya Dr. Subandrio, sebagaimana telah dicatat sebelumnya, tentang tak terelakkannya lagi kemenangan akhir sosialisme atas kapitalisme dalam konfrontasi global. Kedua pemimpin itu yakin bahwa Dunia Barat, yang mereka sebut secara peyoratif dengan nama Kekuatan-Kekuatan Lama, telah kalah dalam menghadapi Kekuatan-Kekuatan Baru, yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Cina, yang bersama dengan Kekuatan-Kekuatan Baru yang Muncul (the New Emerging Forces) dari gerakan-gerakan kemerdekaan nasional Asia-Afrika, akan menciptakan sebuah Tata Dunia Baru yang penuh perdamaian, kemakmuran, keadilan sosial dan kerjasama.

Untuk mendapatkan posisi terhormat bagi Indonesia dalam Tatanan Baru itu, maka kebijakan luar-negeri Sukarno-Subandrio adalah pertama-tama membawa negeri itu ke dalam suatu kerjasama yang erat dengan Moskow, dan kemudian meninggalkan Kremlin karena lebih condong ke Cina pada tahun 1964, dengan membentuk Poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang, yang mereka percayai sebagai strategi baru dari persekutuan yang menang di Asia. Presiden meletakkan dasar poros itu dalam pidatonya di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1964, Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam mengutip pidatonya, Peking melaporkan bahwa “Tidak ada arwah jahat, tidak ada jin, tidak ada setan, yang akan mampu mencegah Korea, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia ... dalam menyatukan diri mereka dalam gerak-maju ke arah sebuah Dunia Baru.” Dalam kenyataan, Aiditlah yang harus diberi pujian karena telah menciptakan istilah “poros” itu, ketika memberi komentar terhadap pidato Presiden sebagai telah meletakkan dasar bagi “front pertahanan” ini.⁵⁵ Untuk memperkuat poros itu, maka Presiden, Dr. Subandrio, dan jurubicara utama Dr. Subandrio, yaitu Ganis Harsono, terbang dari Jakarta ke Kamboja dalam suatu misi rahasia pada tanggal 2 Maret 1965.⁵⁶

Cina menjadi anggota poros itu ketika Marsekal Chen Yi dua kali berkunjung ke Jakarta, yaitu dalam bulan November dan Desember 1964. Chen Yi ketika itu adalah Menlu RRT, yang tidak hanya bertemu dengan Presiden Sukarno, Dr. Subandrio dan para pejabat pemerintahan lain, tetapi juga dengan Aidit. Beberapa rincian dari kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan-pertemuan ini dikemukakan oleh Dr. Subandrio dalam pidatonya yang disampaikan kepada para diplomat Indonesia yang berkumpul di dalam Misinya ke PBB di New York tanggal 9 Desember 1964. Ini adalah suatu

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pertemuan tingkat tinggi, yang mencakup para dutabesar Indonesia di Kanada, Meksiko, Belgia, Amerika Serikat, PBB dan beberapa negara lainnya.

Dalam pidatonya, Dr. Subandrio mengatakan bahwa telah ada sebuah “persetujuan militer rahasia, yang akan melibatkan Cina di belakang terobosan berskala penuh Indonesia terhadap Malaysia Cina telah setuju bahwa Indonesia akan memiliki Singapura, yang dengan mudah sekali dapat diambil dengan sebuah serangan kilat, Borneo dan wilayah-wilayah lain juga akan direbut.”⁵⁷ Indonesia, sebaliknya, telah “setuju bahwa Cina dapat menduduki wilayah Malaysia di sebelah utara Singapura.” Kekuatan-kekuatan yang akan digunakan dalam serangan itu, sebagaimana dikemukakan garis-besarnya oleh Dr. Subandrio, akan terdiri dari dua unsur: pertama, 10.000 orang gerilyawan Indonesia, akan dimobilisasi melintasi Selat Malaka ke arah Malaysia Tengah dan Selatan; kedua, gerilyawan Komunis Cina “yang telah lama bersembunyi di perbatasan Thailand sejak pemberontakan mereka yang gagal sepuluh tahun lalu di Malaysia juga akan bergerak.” Subandrio yakin bahwa Armada Ketujuh Amerika Serikat tidak akan campur-tangan, dan bahwa kekuatan-kekuatan Persemakmuran di Malaysia tidak akan mampu menahan serangan yang bercabang dua ini. Operasi itu, menurut Dr. Subandrio, mengakibatkan tiga hal berikut:

- “1. Pangkalan militer Inggris dan Amerika di Asia Tenggara harus dipindahkan. Untuk mencapai hal ini, Partai Komunis Cina dan Rusia telah menjanjikan bantuan mereka.
2. Strategi Indonesia saat ini mengkonsentrasikan segala sesuatunya untuk ganyang Malaysia, dan karena itu menghindari serangan propaganda langsung terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan itu, termasuk Filipina.
3. Karena itu, sangat penting memecah-belah Inggris dan Amerika mengenai kebijakan mereka terhadap Asia Tenggara.”

Dalam salah satu artikelnya yang melaporkan pidato Dr. Subandrio itu, harian *The New Herald Tribune* menambahkan bahwa pejabat-pejabat resmi yang mengetahui hal tersebut di PBB meragukan bahwa Cina akan memberikan kepada Indonesia “jaminan sepenuhnya” (*blank cheque*), terutama sekali di tingkat militer. Sedangkan para pejabat Amerika Serikat, kata surat kabar itu, “memperlakukan laporan-laporan tentang kemungkinan Indonesia sedang

mempersiapkan sebuah perang habis-habisan terhadap Malaysia dengan hati-hati sekali. Mereka tidak mengesampingkan adanya permusuhan seperti itu; mereka hanya mempertanyakan kemungkinan mobilisasi itu.”

Meskipun kebanyakan pengamat percaya bahwa Dr. Subandrio telah melebih-lebihkan persetujuan baru Indonesia-Cina itu, terutama dalam soal rencana bantuan militer Cina, Marsekal Chen Yi yang secara pribadi telah mengalami sendiri bagaimana watak pemberang dan gampang berubah-ubah dari Presiden Sukarno ketika berunding dengannya di Jakarta bulan November dan Desember 1964, ternyata juga suka melebih-lebihkan persoalan, bahkan lebih daripada Menlunya, Dr. Subandrio. Dalam sebuah pertemuan itu, Presiden bersikeras agar Cina memasok sebuah bom atom kepada Indonesia, sehingga bom itu dapat diledakkan pada permulaan tahun 1967, untuk menggelorakan semangat rakyatnya dan mengirim sinyal yang patut diperhitungkan, baik kepada kawan maupun lawan. Ketika Chen Yi menolak gagasan itu, kabarnya Presiden menjadi marah besar dan memukul meja dengan tinjunya, sambil mengatakan bahwa “Hal ini harus dilakukan, bagaimanapun juga!”⁵⁸ Chen Yi secara berani melaporkan kesannya ke Peking tentang seorang Presiden yang tidak memiliki kesabaran dan sembrono, yang mungkin sekali akan berguna untuk mengantarkan PKI ke puncak kekuasaan, namun ia harus secepat mungkin dipensiunkan begitu penyerahan kekuasaan terjadi. Dan sebagaimana telah kita lihat, bahwa Mao, Chen Yi, Aidit dan Subandrio juga merencanakan hal serupa itu.

Meskipun dibungkus dalam bahasa diplomatik, namun Pernyataan Bersama (Joint Statement) yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 1964 itu dengan jelas memberikan garis-besar dari Persetujuan (Agreement) Cina-Indonesia yang komprehensif itu, dan kita telah melihat Dr. Subandrio menyempurnakan beberapa rinciannya ketika berpidato di depan para diplomat puncaknya di New York tanggal 9 Desember 1964. Pernyataan Bersama itu menyatakan bahwa Cina dan Indonesia berencana untuk meng-koordinasikan politik luar-negeri mereka sehingga dapat saling memperkuat untuk menjadi lebih efektif. Pernyataan Bersama itu menegaskan kembali dukungan Peking terhadap perjuangan Indonesia untuk “mengganyang Malaysia”, karena konspirasi neo-kolonialis ini mengancam perdamaian negara-negara di kawasan Asia Tenggara, melumpuhkan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Lebih jauh Pernyataan Bersama ini menyatakan bahwa kedua negeri itu telah mencapai sebuah saling-pengertian dalam banyak persoalan dan setuju bahwa perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

adalah saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Ia mencatat bahwa kedua negeri itu telah bertukar informasi dan pengalaman pada tahap yang sekarang ini dari perjuangan bersama, bahwa mereka telah mendiskusikan berbagai masalah yang menghadang dunia sekarang ini dan di masa-depan yang dekat, dan menelusuri berbagai cara untuk meningkatkan perjuangan bersama mereka ke sebuah tingkat baru dan lebih tinggi.⁵⁹

Masalah-masalah lain yang merupakan bagian dari Persetujuan Cina-Indonesia tanggal 3 Desember 1964 itu sudah pasti berhubungan dengan 1) dorongan Peking terhadap maksud Indonesia untuk mengundurkan diri dari PBB; 2) ambisi Indonesia untuk menjadi pemimpin gerakan negara-negara yang tergabung dalam non-Blok dan Asia-Afrika; 3) rencana untuk mendirikan markas-besar the New Emerging Forces di Jakarta; 4) rencana untuk membentuk sebuah “tentara rakyat”, yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai, untuk ganyang Malaysia dan mendorong sebuah revolusi agraria di negeri itu; dan 5) ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan bantuan keuangan yang besar untuk mendukung semua aktivitas ini.

Menyusul diterbitkannya Pernyataan Bersama Cina-Indonesia tanggal 3 Desember 1964 tersebut, diambillah beberapa langkah praktis untuk melaksanakan beberapa dari ketentuan itu segera. Pertama, Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaannya di PBB tanggal 2 Januari, pukul 12.01 tengah malam 1965. Ketua delegasi Indonesia pada badan ini, Duta Besar Lambertus N. Palar, memberitahukan secara lisan kepada Sekjen PBB, U Thant mengenai hal itu tidak lama sebelum tengah malam, hanya satu menit setelah Malaysia menduduki tempatnya di Dewan Keamanan. Para diplomat Indonesia menyambut langkah ini dengan gembira karena hal itu telah membebaskan negeri mereka dari kewajiban-kewajiban hukum di bawah Piagam PBB mengenai mempertahankan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara.

Pengunduran diri ini telah memungkinkan Presiden mengkampanyekan isu dan aksi militer untuk ganyang Malaysia, dan rencana-rencana revolusioner lain di kawasan itu bekerjasama dengan Cina. Karena tidak lagi menjadi anggota PBB, Peking juga secara hukum tidak terikat oleh piagamnya.⁶⁰

Kedua, dalam sebuah pernyataan bersama, PKI dan Front Nasional yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 1965, Aidit menuntut agar pemerintahan Indonesia melatih dan mempersenjatai 15 juta buruh dan tani sebagai “sokoguru revolusi” dan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia. Tuntutan ini didukung oleh sebuah rapat raksasa Organisasi Pemuda PKI, Pemuda Rakyat, yang diadakan pada hari yang sama.⁶¹

Indonesia dalam Strategi Cina 1965

Ketiga, pada tanggal 30 Januari 1965, kantor berita *Antara* mengumumkan bahwa Cina telah memberikan piutang sebanyak US\$100 juta kepada Indonesia untuk mendanai berbagai proyek sebagai pelaksanaan dari beberapa butir persetujuan Cina-Indonesia yang telah dirundingkan Dr. Subandrio pada akhir tahun 1964.⁶²

Keempat, untuk memuncaki pendekatan yang cepat antara kedua negeri itu, Dr. Subandrio memimpin sebuah delegasi terbesar yang pernah ada ke Peking, yang terdiri dari para pejabat tinggi, para pemimpin politik dan perwira militer, pada akhir bulan Januari 1965. Sebuah Pernyataan Bersama yang dikeluarkan pada akhir perundingan yang berlangsung selama lima hari itu, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 1965, menegaskan persetujuan bersama mengenai semua masalah internasional utama saat itu, putusan untuk memperluas perdagangan, kerjasama dalam masalah-masalah teknis dan perhubungan, dan memperkuat kerjasama di bidang militer. Pada akhir perundingan, Subandrio mengundang Chou En-lai untuk datang menghadiri perayaan Ulang Tahun Ke-X gerakan non-Blok, yang akan digelar di Bandung dalam bulan April 1965.⁶³

Bukanlah perkara mudah bagi Peking untuk mencabut genggamannya Moskow yang sudah terlanjur dominan terhadap politik luar-negeri Jakarta, karena bantuan Kremlin yang banyak sekali di masa lalu berupa bantuan militer, ekonomi, dan keuangan, tidak akan dapat ditandingi Cina yang sumberdayanya kecil sekali. Pada tahun 1965, Rusia telah memasok militer Indonesia, dengan cara dihutangkan, kira-kira 60 buah MIG-15 dan MIG-17, 40 buah pesawat jet bomber Ilyushin-20, 30 buah bomber Tupolev-16, dan beberapa pesawat tempur MIG-21. Antara tahun 1960-1963, Indonesia telah menerima dari Moskow dan sekutu-sekutunya kira-kira 200 buah pesawat.⁶⁴ Ongkosnya mahal sekali. Dalam bulan Mei 1968, Adam Malik, Menlu Indonesia di masa awal Orde Baru, mengumumkan bahwa hanya ke Moskow saja, tanpa menyebutkan bantuan dari sekutu-sekutu Moskow lain di Eropa Timur, Indonesia telah berhutang kira-kira sejumlah US \$ 800 juta untuk semua pasokan militer ini dan untuk sumber keuangan yang berhubungan dengan sejumlah proyek yang belum selesai.

Pernyataan bersama PKI dan Front Nasional tanggal 28 Januari 1965, seperti telah dicatat di atas, memperingatkan Inggris dan Amerika Serikat bahwa Peking tidak akan tinggal diam apabila kedua negeri itu “berani” memaksakan perang kepada rakyat Indonesia. Pernyataan itu selanjutnya mendukung tindakan pemerintah Indonesia keluar dari PBB, karena tindakan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

ini akan memberikan sebuah *impetus* alias daya dorong baru terhadap perjuangan rakyat Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk menata kembali badan pasca Perang Dunia II tersebut. Penataan kembali ini penting, karena setelah dimanipulasi oleh kaum imperialis yang dikepalai Amerika Serikat, badan internasional itu telah banyak melakukan tindakan-tindakan jahat. “Kasus yang sangat menonjol adalah bahwa Republik Rakyat Cina yang mewakili 650 juta manusia, telah dilucuti dari hak-haknya yang sah di dalam PBB, sedangkan apa yang dinamakan Malaysia, yang baru saja dibikin oleh kaum imperialis Inggris dan Amerika, secara tidak sah telah diberi kedudukan di Dewan Keamanan PBB.”

Pelaksanaan aspek-aspek lain dari Persetujuan Cina-Indonesia yang komprehensif itu yang diumumkan dalam Pernyataan Bersama di Jakarta tanggal 3 Desember 1964, selanjutnya telah menjadi topik-bahasan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung dua-belas jam antara Subandrio, yang ditemani oleh Njoto, dengan Chou En-lai di Canton pada awal Juni 1965,⁶⁵ dan kemudian antara Sukarno dan Chou En-lai di Shanghai dalam bulan Juli 1965. Dalam pertemuan yang terakhir ini, Chou En-lai menjanjikan untuk memasok Indonesia dengan 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Kelima dan membantu untuk mendirikan di Jakarta sebuah Sekretariat the New Emerging Forces untuk menandingi PBB.

Semua masalah ini dibicarakan dalam beberapa kali pertemuan yang diadakan dengan pemimpin Cina itu di Shanghai, yang dihadiri oleh Presiden, Aidit, Ali Sastroamidjojo, Sjafiudin, Suhri, dan Kusumowidagdo.⁶⁶ Presiden kemudian mengirim sebuah misi militer ke Peking, dipimpin oleh Dr. Subandrio, dan terdiri dari Jenderal Mursjid, Laksamana Muljono Herlambang dan pejabat-pejabat penting lainnya dalam angkatan bersenjata. Dalam memberikan arahan pernyataan misi kepada delegasi ini, Presiden menekankan bahwa hal itu “hendaknya kedengaran sebagai sikap Cina yang sesungguhnya berkenaan dengan kemauan mereka untuk memberikan bantuan material kepada Indonesia”, karena temuan ini akan menentukan arah kebijakan Indonesia di masa-depan di bidang militer dan luar-negeri. Delegasi itu kemudian melapor kepada Presiden, sekembali ke tanah-air, bahwa Cina bersedia untuk membantu Indonesia jika diserang oleh negara asing, dan dengan cepat akan memberikan senjata dan bantuan militer lainnya, dan bahwa kedua negara harus menambah kerjasama mereka dalam perjuangan the New Emerging Forces.⁶⁷

Indonesia dalam Strategi Cina 1965

Dalam bulan September 1965, terjadi sejumlah besar lalu-lintas bolak-balik yang begitu sibuknya antara Jakarta-Peking, karena Presiden mengirim delegasi-delegasi berikut ke Cina: 1) misi Dewan Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang dikepalai Chairul Saleh, untuk ikut dalam perayaan 1 Oktober, Hari Nasional Cina; 2) misi ekonomi yang dikepalai Menteri Surjadi; 3) misi Staf AURI dan Sekolah Komando; 4) misi Lembaga Pertahanan Nasional, dikepalai Gubernur Jenderal Wilujito Puspojudito; 5) misi kebudayaan yang dikepalai Ibu Hadajat; dan 6) misi para wartawan Indonesia. Masing-masing misi itu diberi kuasa oleh Presiden dengan tugas khusus dan kemudian melapor kepadanya apabila pulang nanti.⁶⁸

Salah satu jalur komunikasi utama antara Presiden dan Menlu Subandrio dengan Peking dan kedutaan besarnya di Jakarta, adalah Oei Tjoe Tat, yang telah diangkat Presiden sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Dwikora, atas rekomendasi dari Partai Indonesia, PKI dan Subandrio. Oei Tjoe Tat ini adalah seorang tokoh terkemuka dari masyarakat Cina di Indonesia yang terlibat dalam merencanakan berbagai jenis bantuan Peking kepada Indonesia, termasuk senjata, dan memainkan sebuah peran yang sangat penting dalam merundingkan tentang status para penduduk Cina di negeri itu. Presiden dan Subandrio telah mempercayainya dengan tugas memobilisasi bantuan untuk kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia di kalangan masyarakat Cina di Hong Kong, Malaysia, dan Singapura, dan pada pertengahan tahun 1965, Presiden menguasai kepadanya untuk mentransfer sejumlah dollar Amerika yang sangat besar kepadanya untuk tujuan itu dari dana khususnya.⁶⁹

SUKARNO HARUS MENEPATI JANJINYA DAHULU DAN SETELAH ITU PERGI

Kesimpulan Persetujuan Cina-Indonesia yang komprehensif tanggal 3 Desember 1964, dan kesibukan aktivitasnya di bulan-bulan pertama tahun 1965 itu, menandakan puncak dari pendekatan yang cepat sekali antara kedua negeri itu, karena tidak lama kemudian timbullah keretakan-keretakan dalam landasan kekuatan poros di Asia Tenggara itu. Petunjuk pertama bahwa Peking mulai meragukan komitmen “manusia sembrono” di Jakarta itu mulai menjadi jelas ketika Dr. Subandrio gagal “mendapatkan jaminan penuh bantuan militer Cina yang dicarinya” dalam kunjungannya ke Peking, pada saat memimpin sebuah delegasi besar yang terdiri dari pejabat militer dan sipil, dan bertemu dengan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Mao, Chen Yi, serta pemimpin Cina lainnya. Pengalaman Chen Yi dengan seorang Sukarno yang marah meledak-ledak dan memukul meja dengan kepala tangannya, ketika pertemuan mereka dalam bulan November dan Desember 1964, sudah pasti mempengaruhi Mao untuk mengambil sikap lebih hati-hati, yaitu tidak serta-merta memberikan kepadanya jumlah senjata yang pernah dijanjikan (100.000 pucuk), karena ia mungkin saja melibatkan Cina dalam kesukaran dan petualangan yang tidak diketahui sebelumnya, tetapi memasok senjata untuk masing-masing proyek tertentu yang mendesak saja, seperti senjata yang dijanjikan kepada Aidit untuk menghabisi para jenderal.

Para pengamat diplomatik di Hong Kong, dalam menilai hasil kunjungan itu, yakin bahwa “Cina tidak ingin melibatkan diri dalam posisi untuk menanggung akibat segala sesuatu yang mungkin dilakukan Indonesia.”⁷⁰ Tak heran, Dr. Subandrio menegaskan kembalinya dari Peking bahwa kerjasama militer antara kedua negeri itu “tidak mencakup senjata, perlengkapan militer atau manusia”.⁷¹ Kemunduran sikap ini mungkin sekali merupakan dampak yang sangat kuat dari penilaian Peking terhadap Sukarno sebagai seorang sekutu, dan menghasilkan pengurangan secara berangsur-angsur janji pasokan senjata kepada Indonesia, mulai dari janji Chou En-lai kepada Sukarno 100.000 pucuk dalam bulan Juli, sampai kepada janji Mao kepada Aidit pada tanggal 5 Agustus 1965 yang hanya 30.000, akan tetapi untuk tujuan-tujuan khusus memudahkan pukulan Sukarno guna memenggal komando puncak AD.

Faktor kedua yang mendorong Mao untuk menilai kembali Sukarno sebagai seorang sekutu yang mampu meningkatkan tujuan-tujuan revolusioner jangka-panjangnya di Asia-Afrika adalah tidak berhasilnya Presiden itu membangun gerakan non-Blok. Presiden telah mengundang lebih dari 60 negara ke Jakarta dan kemudian ke Bandung dalam bulan April 1965 untuk merayakan Ulang Tahun ke-X Konferensi Asia-Afrika pertama, yang pernah diselenggarakan di Bandung dalam bulan April 1955. Ia menghiasi kota Jakarta dengan semangat pesta, memampangkan bendera dan panji-panji di seluruh kota, mendirikan gaba-gaba kemenangan, dan mengimpor mobil-mobil mewah untuk kendaraan para tamunya. Cina mengirim delegasi paling besar, terdiri dari 33 orang, memasok 20 ton kembang-api dan menjanjikan bantuan keuangan untuk menonjolkan pertaruhan mereka dalam keberhasilan pertemuan itu. Untuk meresapi pertemuan itu dengan semangat revolusioner poros Jakarta-Peking, maka Presiden mengundang Korea Utara, Vietnam Utara dan Vietkong dari Vietnam Selatan, Pathet Lao dari Laos dan kaum revolusioner dari Kalimantan Utara, yang telah berupaya menggulingkan Sultan Brunei tahun 1962. Segera

setelah para tamu itu sampai di hotel mereka, delegasi Cina dan Indonesia melakukan lobby-lobby intensif untuk mendepak Moskow dan Kuala Lumpur dari Konferensi Asia-Afrika II, yang sedianya akan diselenggarakan di Aljazair dalam bulan Juni 1965. Ketika konferensi itu dibuka di Bandung tanggal 18 April 1965, dengan hanya 30 negara saja yang mengahadirinya, maka acara kerjanya tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan oleh Jakarta dan Peking, karena sebagaimana dilaporkan, pertemuan itu kacau karena “perpecahan dramatis”, yang tidak memberi pertanda baik bagi Konferensi Puncak Asia-Afrika, yang akan diadakan di Aljazair.⁷² Lagi pula, Presiden Mesir, Nasser, tidak setuju terhadap usul Sukarno untuk memindahkan sekretariat organisasi itu dari Kairo ke Jakarta.

Sebuah pukulan yang lebih telak terhadap Poros Cina-Indonesia itu dilakukan oleh Konferensi Negara-Negara Islam Asia-Afrika, yang diadakan di Bandung dalam bulan Maret 1965. Di sini sebuah resolusi yang disponsori Cina, yang menyerukan negara-negara peserta untuk mendukung konfrontasi Indonesia untuk “ganyang Malaysia”, ditolak. Meskipun Presiden Sukarno melakukan serangan yang tajam sekali terhadap Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara-negara imperialis, tetapi komunike akhir yang dikeluarkan konferensi itu, meski mengecam imperialisme dan kolonialisme secara umum, namun tidak menyebutkan nama kedua negara itu.⁷³

Kekalahan terakhir aspirasi Sukarno untuk mendapatkan dukungan bagi konfrontasinya terhadap Malaysia, dan untuk mendapatkan kepemimpinan organisasi negara-negara Asia-Afrika agar mendukung tujuan-tujuan Persetujuan Cina-Indonesia tanggal 3 Desember 1964, terjadi pada tanggal 20 Juni 1965. Pada hari itu, Presiden Aljazair, Ahmad Ben Bella, digulingkan oleh Kolonel Houari Boumedienne. Meskipun Presiden Sukarno meninggalkan Jakarta dengan pesawat Jet Starnya tanggal 26 Juni 1965, ia berhenti di Kairo, dan ketika ia diberi tahu bahwa konferensi itu diundur sampai tanggal 5 November, maka ia kembali pulang dengan tangan hampa. Dari diskusi-diskusi pendahuluan di kalangan orang-orang yang mengorganisirnya yang diadakan di Kairo sebelum konferensi yang telah direncanakan itu, dan ketika “kepala-kepala telah dihitung”, jelaskan bahwa tidak ada dukungan sama sekali terhadap usul-usul Cina-Indonesia. Lagi pula, Aljazair, sebagai calon negara tuan-rumah bagi konferensi penting itu, mengingatkan Chou En-lai dan Sukarno bahwa seandainya mereka memaksakan agenda mereka dimasukkan dalam konferensi, maka usul itu akan dikalahkan.⁷⁴

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Karena India berada di belakang koalisi delegasi-delegasi moderat yang ingin mengerem kemajuan loby-lobby Cina-Indonesia di Aljazair, setelah kembali ke tanah-air dengan sebuah kegagalan yang menghinakan, maka Presiden Sukarno memerintahkan para demonstran untuk menyerang kedutaan-besar India di Jakarta dengan slogan-slogan yang men-cap India sebagai antek-antek imperialisme Inggris-Amerika.⁷⁵ Kebijakan yang berisikan ekspansionisme Cina-Indonesia bekerja, sebagaimana diumumkan oleh Jenderal A. H. Nasution, Menko Hankam/KASAB, pada tanggal 19 Juni 1965, bahwa negaranya tidak akan memulai sebuah perang terbuka dengan Malaysia, namun akan mempertahankan diri apabila diserang.⁷⁶

Tingkat keterpencilan Indonesia dari masyarakat Asia-Afrika, yang demikian jelasnya pada bulan Juni 1965, sudah pasti meyakinkan Cina bahwa tidak ada tujuan-tujuan jangka-panjang dari Persetujuan Cina-Indonesia tanggal 3 Desember 1964 dapat dipromosikan lebih jauh dengan bergantung pada kepemimpinan Presiden Sukarno, keadaan telah menjadi problematis dan tidak pasti, karena karakter Presiden yang tidak-stabil dan selalu berubah-ubah. Peking telah memiliki bukti-bukti kuat tentang ketidak-stabilannya itu ketika tidak lama setelah hancurnya Persetujuan MAPHILINDO, sekelompok perwira AD dikirim ke luar-negeri untuk mencari, atas nama Presiden dan dengan keinginannya, sebuah penyelesaian damai dari konfrontasi dengan Malaysia.⁷⁷

Pada pertengahan 1965, para pemimpin Cina itu menjadi yakin bahwa meskipun Indonesia tetap penting bagi tujuan-tujuan strategis mereka di Asia Tenggara, namun hal ini harus dilakukan tanpa Sukarno, dan Indonesia berada di bawah kekuasaan Aidit. Inilah yang menjadi saripati penting dari pembicaraan Mao-Aidit di Peking pada tanggal 5 Agustus 1965: memanfaatkan dia untuk menghabisi para jenderal dan dengan begitu menghancurkan pucuk komando AD untuk membuka jalan bagi berkuasanya PKI, tetapi pada yang sama menyingkirkan Presiden juga melalui cara yang bermartabat dan terhormat. Inilah yang merupakan akhir jalan bagi persekutuan Cina-Indonesia di bawah Sukarno, sebuah pokok masalah yang kepustakaan ilmiahnya sudah demikian luas dikupas.⁷⁸ Sekarang Mao memutuskan untuk menukar kuda tunggangannya, karena Presiden telah kehilangan daya “potensi revolusioner”-nya dan tidak akan sanggup memenuhi peran historisnya sebagai seorang “nasionalis revolusioner” dengan jalan memuluskan naiknya PKI ke kekuasaan. Di bidang doktrin, Sukarno tidak dapat memimpin tahap sosialis Revolusi Indonesia, sebagaimana telah kita catat sebelumnya. Lagi pula, dengan memperhatikan karakter yang sering berganti-ganti arah, maka Presiden akan

merupakan sumber masalah dan merupakan beban berat di masa depan, di mana ketika itu sudah sangat sukar untuk menghilangkannya.

Namun, sepanjang ada hubungannya dengan manfaat langsungnya, yaitu untuk memecah kekuatan AD, Presiden Sukarno sudah benar dalam tekadnya untuk menghabisi para jenderal puncak itu. Mereka ini harus dihilangkan karena menentang orientasi kebijakan politik luar-negeri Indonesia yang pro-Peking dan rencana Aidit untuk mendirikan Tentara Rakyat, Angkatan Kelima, di negeri itu. Dalam kenyataannya, Angkatan Kelima itu adalah gagasan Aidit, yang telah mulai memikirkan masalah itu sejak bulan Januari 1965. Chou En-lai hanyalah mengangkat konsep ini dengan Presiden di Jakarta bulan April 1965, dan kita telah melihat bagaimana Presiden membuat seruan yang kuat agar konsep itu didukung dalam pertemuannya dengan Chu En-lai di Shanghai bulan Juli 1965, sehingga mendapatkan sebuah janji darinya untuk memasok 100.000 buah pucuk senjata. Tanggal 14 September 1965, diputuskanlah sebuah perjanjian dengan Peking tentang penyerahan senjata-senjata ini, dan tidak lama kemudian, Presiden mengutus Omar Dhani dalam sebuah misi rahasia ke Cina untuk mengatur pengirimannya dengan kapal, namun menentang pulang sebagian kecil ke Jakarta dalam pesawat Herculesnya untuk mempersenjatai pasukan Untung memukul para jenderal. Omar Dhani akan mendarat di “wilayahnya sendiri”, yaitu sebuah pangkalan udara yang berada di luar pengawasan petugas bea-cukai dan imigrasi, dan di luar jangkauan pihak AD yang mencurigainya. Omar Dhani juga memberitahu pihak Cina bahwa Indonesia telah menyerahkan dua pesawat pemburu MIG kepada Pakistan, untuk mendukung konspirasi dengan Pakistan dalam menghadapi India. Angkatan Laut Indonesia juga telah mengapalkan sejumlah senjata artileri lapangan, dan beberapa tank asal Rusia, kepada Pakistan.⁷⁹

Omar Dhani adalah seorang pendukung Aidit yang kuat dan pendukung gagasan Presiden untuk membentuk Angkatan Kelima, dan dalam bulan Juni 1965 menyatakan di depan umum bahwa “ia setuju dengan gagasan Presiden” bahwa Angkatan Kelima itu akan terdiri dari para sukarelawan.⁸⁰ Tidak lama kemudian, Omar Dhani yang diangkat oleh Presiden sebagai Panglima Siaga Mandala dari seluruh operasi Konfrontasi dengan Malaysia, membuka sebuah fasilitas latihan bagi para sukarelawan, yang dikerahkan oleh PKI, di Pondok Gede, sebuah kawasan yang berdampingan dengan Pangkalan Udara Halim, dan menunjuk Mayor Sujono sebagai komandan mereka. Beberapa satuan telah dilatih di sana sejak bulan Mei 1965. Mayor Sujono dibantu oleh Njono, yang telah ditunjuk Aidit sebagai seorang *commissar politik* untuk berhubungan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dengan Dhani, Panglima Siaga Mandala, sehingga konfrontasi itu sekarang didorong oleh PKI dan sukarelawan bersenjata, dengan menganggap sepi begitu saja Angkatan Bersenjata.

Dengan demikian, di Pondok Gede itulah diletakkan dasar bibit Angkatan Bersenjata Rakyat di masa depan, yang satuan-satuannya akan berada di bawah komando para prajurit profesional, akan tetapi dikendalikan oleh *commisar-commisar* politik yang telah ditunjuk oleh PKI, dengan Cina menyediakan sebagian besar peralatan untuk mempersenjatai kekuatan ini dalam tahap awalnya.

Dan Omar Dhani, sebagai Panglima Siaga Mandala, dengan rajin sekali, setelah mendapatkan senjata-senjata yang diperlukan dari Cina, berdasarkan perintah Presiden, sebagaimana telah kita lihat, telah bersiap-siap untuk suatu saat ketika Aidit dan Omar Dhani, akan mengatur negeri itu. Dalam kenyataannya, pada akhir musim panas 1965 beberapa kesatuan elite AD telah dipanggil kembali ke Jawa dari pos-pos terdepan mereka di perbatasan dengan Malaysia.

Dan hanya dengan kerjasama yang erat dengan PKI sebagai kekuatan politik yang sedang naik daun itulah, Omar Dhani dapat meraih ambisi-ambisinya. Pada bulan Juni 1965, ia bersiap-siap untuk membawa seluruh jajaran AURI ke dalam ruang-lingkup PKI dengan alasan bahwa “Marxisme harus dijadikan mata-kuliah dasar pada Sekolah Staf dan Komando AURI (SESKOAU). Kita harus memahami Marxisme yang digunakan oleh Bung Karno sebagai suatu cara berpikir dan cara bertindak”,⁸¹ ketika melihat bahwa Presiden sendiri telah melibatkan diri pada Marxisme dan telah mengambang di dalam orbit partai itu dan membuat perjanjian-perjanjian dengan Aidit. Panglima Angkatan Laut, Laksamana Madya Martadinata, mengikuti langkah-langkah Dhani dalam membawa Angkatan Laut ke dalam pelukan PKI. Dengan mengadakan suatu “kunjungan ke markas-besar PKI di tahun 1965”,⁸² ia adalah panglima pertama yang sedang bertugas yang melakukan hal seperti itu, dan setelah itu ia menyatakan persetujuannya di depan umum mengenai pembentukan Angkatan Kelima, sehingga dapat dimengerti apabila surat kabar *ANGKATAN BERSENJATA* yang dikuasai oleh AD tidak melaporkannya.⁸³

Pada musim-panas tahun 1965, tampaklah sebuah pola yang jelas dari kebijakan militer Peking terhadap Indonesia. Presiden akan dipasok dengan sejumlah senjata yang cukup baginya untuk menghancurkan komando puncak AD demi mempermudah naiknya Aidit ke kekuasaan, sedangkan pengapalan senjata dalam jumlah besar akan diberikan kepada Indonesia hanya apabila

Indonesia dalam Strategi Cina 1965

ada di bawah pengendalian Aidit. Dengan demikian, bantuan militer Peking ke Jakarta diukur dan disesuaikan dengan sebaik-baiknya hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang bersifat jangka-pendek dan langsung saja, agar sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan strategis jangka-panjangnya.



IV

SUKARNO DAN ANGKATAN DARAT BERSEBERANGAN, 1965

DOKTRIN STRATEGIS ANGKATAN DARAT:
“BAHAYA DARI UTARA”, BANDUNG: 5 APRIL

Sebuah momentum menentukan yang makin memperdalam perbedaan pendapat antara pucuk pimpinan AD dan Presiden, ketika perbedaan visi itu kian terbuka, adalah sebuah seminar yang diorganisir oleh para jenderal terkemuka di gedung SESKOAD, Bandung, tanggal 1-5 April 1965. Seminar itu dihadiri oleh delapan jenderal berikut: Rachmat Kartakusumah, J. Mokoginta, Suwarto, Djamin Gintings, Suprpto, Sutojo, M.T. Harjono dan S. Parman.⁸⁴ Meskipun ada empat makalah yang disajikan, namun analisis yang paling sensitif berpusat pada perlunya memperhatikan bahwa ancaman utama terhadap Indonesia datang dari Utara, yaitu ekspansi komunisme Cina melalui konflik bersenjata di Vietnam, Laos dan Kamboja. Berdasarkan hal ini, maka kekosongan strategis karena menurunnya kehadiran militer Inggris-Amerika di kawasan-kawasan yang mengelilingi Indonesia harus diisi oleh Indonesia sendiri dan bukan oleh kebijakan ekspansionis Cina dan negara-negara sekutunya.

Memberi komentar tentang doktrin yang baru itu, Jenderal Yani kemudian mengatakan bahwa “Konsep pertahanan kita harus mencakup seluruh Asia Tenggara. ... Kerajaan-kerajaan Indonesia dahulu kala telah mempertahankan hegemoni atas daerah itu selama berabad-abad lamanya melalui penguasaan lautan. Bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan mengabaikan tuntutan sejarah, dan telah menjadi kesimpulan saya sejak tahun 1963 bahwa pada suatu waktu nanti Angkatan Laut Indonesia akan mengambil-alih tugas Armada Ke-VII

Amerika Serikat dan Armada Timur Jauh Inggris di Asia Tenggara.”⁸⁵ Sesuai dengan itu, kepemimpinan AD telah memprakarsai penjajakan dengan Kuala Lumpur dalam bulan Agustus 1965 mengenai kemungkinan mengakhiri konfrontasi, penjajakan itu dilaksanakan melalui perwira-perwira intelijen KOSTRAD, Kolonel Ali Moertopo dan Kolonel Benny Moerdani.⁸⁶

Karena makalah-makalah yang diajukan pada seminar Bandung itu secara langsung menantang visi strategis Presiden Sukarno, yang memandang pertikaian itu dari segi konfrontasi antara Kekuatan Baru dan Kekuatan Lama, maka pada hari kedua seminar itu, tanggal 2 April 1965, Presiden memanggil semua peserta ke Istana Bogor untuk menyangkal kecenderungan “berpikir sendiri yang berbahaya” ini dari para komandan militer puncaknya. Meskipun pada awal kemarahannya, Presiden memuji dan menghormati kecerdasan Jenderal Yani dan penguasaannya terhadap hal-hal rinci yang kecil-kecil, namun Presiden lebih lanjut mengatakan bahwa elite kepemimpinan AD tidak boleh hanya berpikir dari segi taktis saja, tetapi juga seyogyanya memperhatikan kondisi strategis global yang lebih luas, terutama sekali di Asia Tenggara. Teori yang diajukan dalam seminar itu bahwa Indonesia mendapat ancaman dari Utara adalah tidak benar, demikian Presiden berargumentasi berapi-api, karena hal itu dipropagandakan oleh NEKOLIM, yaitu kekuatan-kekuatan imperialisme yang berniat untuk mematahkan kekuatan-kekuatan baru yang muncul di Asia. Berdasarkan hal ini, neo-kolonialisme itu harus ditolak, dan sebaliknya AD Indonesia harus loyal mengikuti garis politik negara-negara Non-Blok itu, yang telah dikemukakan Presiden garis-besarnya dalam pidatonya di Kairo tahun 1964. Pimpinan AD harus memahami peran yang harus dimainkan Indonesia dalam perjuangan revolusioner memerangi Malaysia, ciptaan NEKOLIM itu, dan memahami pentingnya Poros Pyongyang-Peking-Phnom Penh-Jakarta bagi konfrontasi global terhadap Kekuatan-kekuatan Lama yang dilakukan oleh Kekuatan-kekuatan Baru.

Terhadap teguran Presiden ini, para peserta seminar itu tetap bersikukuh dalam pendirian mereka, dengan hanya membuat sebuah konsesi kecil saja terhadap Presiden dalam salah satu butir dari draft mereka yang terakhir, yang mengatakan bahwa adalah penting bagi Indonesia untuk mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara the New Emerging Forces. Setelah diedit untuk terakhir kalinya, dokumen itu diberi judul *TRI UBAYA ÇAKTI*, dicetak dan kemudian disebar-luaskan di kalangan para perwira AD.

Presiden lalu merasa seperti dipermalukan oleh visi strategis yang berbicara tentang *Bahaya dari Utara* yang diformulasikan oleh *TRI UBAYA*

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

ÇAKTI, yang diadopsi AD sebagai doktrin strategis-politisnya, sebuah doktrin yang menempatkan kepentingan nasional Indonesia di atas aspirasi revolusioner Presiden di luar-negeri. Doktrin itu menolak baik kebijakan dalam-negeri maupun kebijakan luar-negeri Presiden, karena di dalam negeri ia telah condong merapat ke PKI, dan di dunia internasional ia ikut mengkampanyekan tujuan-tujuan strategis Peking di Asia Tenggara dan di dunia pada umumnya. Karena hal inilah, Angkatan Darat segera seolah berupaya menggugurkan skema Presiden dengan jalan menolak rencananya untuk membentuk Angkatan Kelima, “tentara rakyat”, yang merupakan inti dari aspirasi dalam-negeri dan luar-negeri Presiden, sebagaimana telah kita lihat. Namun, harga yang harus dibayar oleh Angkatan Darat ini, karena berani mengambil jalan sendiri, mahal sekali. Presiden segera menamakan ‘oknum-oknum’ yang terkait dengan pembentukan strategi ini sebagai jenderal-jenderal yang tidak loyal. Ia terutama sekali mencecar jenderal S. Parman, Harjono MT, Sutojo, Suprpto, dengan menuduh mereka itu termasuk Dewan Jenderal, yang kemudian ia perintahkan Untung untuk membersihkannya, bersama dengan jenderal Nasution, Yani dan Panjaitan.

Doktrin “*Bahaya dari Utara*” itu telah menjadi topik pembicaraan dalam diskusi yang diadakan di Istana Tampak Siring, Bali, tanggal 6 Juni 1965, setelah pesta untuk merayakan ulang tahun Presiden yang ke-64. Di antara para tamu yang hadir adalah Dr. Subandrio, Chairul Saleh, Dr. J. Leimena, Jusuf Muda Dalam, Brigjen Sjafiuddin, Gubernur Bali Sujeta, Komandan Polisi Bali, Brigjen Sabur, Kombes Sumirat, AKBP Mangil, Canaille Suparto dan Ajudan Presiden Bambang S. Widjanarko.

Presiden membuka diskusi dengan menyatakan bahwa ada beberapa jenderal di kalangan AD yang tidak loyal kepadanya. Mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang tahap perkembangan revolusioner dewasa ini yang sedang berkecamuk di banyak belahan dunia, terutama sekali di Asia Tenggara. Doktrin strategis mereka “*Bahaya dari Utara*”, yang dikembangkan dalam seminar di Bandung, adalah sebuah konsep yang salah dan berbahaya karena hal itu memang telah dicetuskan oleh NEKOLIM. Bahaya sesungguhnya bagi Indonesia, demikian Presiden, terletak pada kenyataan bahwa doktrin AD itu menentang Poros Jakarta-Peking, yaitu konsep strategis Presiden sebagai kebijakan negara, dimana Angkatan Bersenjata, termasuk di dalamnya Angkatan Darat, harus mengimplementasikannya. Konflik antara kedua doktrin ini telah menimbulkan sejumlah kesimpangsiuran pemikiran di kalangan perwira yang bekerja di bawah wewenang para jenderal yang tidak loyal itu, yang berani-

Sukarno dan Angkatan Darat Berseberangan, 1965

beraninya merumuskan konsepnya sendiri yang berbahaya. Berdasarkan hal ini, demikian Presiden menyimpulkan, komando puncak AD harus diganti secepatnya. Setelah itu Presiden berpaling kepada Jenderal Sjafiuddin dan memerintahkannya untuk menyelidiki siapa saja para jenderal yang tidak loyal itu dan memastikan pos-pos yang mereka pegang, yang dapat menggagalkan kebijakan-kebijakan Presiden yang berdasarkan Poros Jakarta-Peking itu. Setelah pertemuan ini, Jenderal Sjafiuddin beberapa kali melakukan kunjungan pribadi kepada Presiden di Istana Merdeka antara bulan Juni hingga September 1965, untuk melaporkan temuannya bahwa memang konsep Presiden itu ditantang oleh beberapa perwira dalam “lingkaran-lingkaran terdepan di jajaran Angkatan Darat.”⁸⁷

Pembalasan Presiden cepat sekali dan menentukan. Setelah pesta ulang tahun bulan Juni di Bali itu, Presiden mulai melakukan kampanye pembunuhan karakter, dalam bentuk fitnah, desas-desus, sindiran terhadap para jenderal yang berdiri di belakang doktrin militer AD tersebut. Kampanyenya itu, yang memperlihatkan watak terburuk dari pemimpin kawakan ini, dengan mengadudomba ke empat angkatan itu di antara sesama mereka. AURI sepenuhnya mendukung Presiden, karena ambisi Omar Dhani untuk memangku jabatan Presiden apabila ada yang salah dengan Sukarno, Angkatan Laut dan Kepolisian berdiri netral di samping, sementara pucuk pimpinan AD menjadi sasaran cemoohan, penghinaan dan rasa permusuhan yang diungkapkan secara terbuka. Jenderal Nasution dan Jenderal Yani, disamping mereka telah membuat doktrin militer yang baru itu di Seminar Bandung, seperti diketahui, telah menjadi musuh publik Presiden.

Persis di dalam periode waktu inilah, sebagaimana telah dicatat sebelumnya, Mayor Louda dari departemen disinformasi dinas intelijen Praha, dan Jenderal Agayants dari Soviet, memuaskan rasa paranoia anti-Inggris-Amerika Presiden dengan “mengada-adakan” Dokumen Gilchrist, dan Aidit menyulutnya dengan ilusi tentang Dewan Jenderal. Pada bulan September 1965, situasi di kalangan Angkatan Bersenjata telah menjadi demikian menyedihkan, terlihat dari sangat dominannya upaya-upaya untuk berebut posisi dengan jalan menjilat Presiden, sampai-sampai disediakan sebuah papan-tulis di kantin Istana untuk mencatat siapa yang masuk dan siapa pula yang keluar. Komando puncak AD telah diasingkan dari angkatan-angkatan lain, dihancurkan reputasinya dan dilumpuhkan oleh Presiden yang berpendirian berubah-ubah itu, yang menaburkan kecurigaan, rasa saling tidak-percaya dan ketidak-pastian di dalam barisannya tentang urutan kekuasaan dalam tatanan baru itu; sampai

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

ke tingkat bahwa komando AD itu tidak mampu lagi mengembangkan kebijakan bersama untuk mencegah pembunuhan enam jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965. Kelumpuhan dan penyakit internal itu demikian parah sampai-sampai meskipun Jenderal Yani pada tanggal 30 September telah menerima informasi, yang buktinya akan dapat dilihat sebentar lagi, bahwa PKI akan menghabisi pucuk pimpinan AD, termasuk Yani sendiri, dengan restu Presiden dalam dua-tiga hari ini, namun Yani gagal bertindak untuk menangkis rencana PKI-Sukarno itu, selain mengundang sebuah rapat untuk membicarakan masalah itu.

SUKARNO MEMERINTAHKAN UNTUNG UNTUK MENGHABISI PARA JENDERAL: ISTANA MERDEKA, 4 AGUSTUS

Setelah perintah pertama Presiden kepada Untung untuk bersiap-siap menghabisi para jenderal yang tidak loyal, dengan disaksikan Brigjen Sabur tanggal 4 Agustus, maka Presiden melanjutkan maksudnya membersihkan komando puncak AD itu dengan keuletan yang besar. Tanggal 15 September, kira-kira pukul 08.00 di Istana Merdeka, ia memerintahkan Brigjen Sabur dan Brigjen Sunarjo untuk melakukan aksi terhadap para jenderal, dengan kehadiran para pejabat berikut ini: Subandrio, Brigjen Sutardhio, Brigjen Polisi Sutarto, Mualif Nasution Djamin dan Hardjo Wardoyo.⁸⁸ Tanggal 23 September, pukul 07.00 pagi di Istana Merdeka di Jakarta, ketika Jenderal Mursjid melaporkan kepada Presiden mengenai ketidak-loyalan di kalangan komando puncak AD, maka Presiden menjawab bahwa harus dilakukan “tindakan cepat” terhadap para jenderal yang tidak loyal itu. Ia berpaling kepada Brigjen Sabur untuk menegaskan kembali perintahnya yang terdahulu untuk mempersiapkan dan melaksanakannya, dan memerintah Brigjen Sudirgo, Komandan Polisi Militer, yang juga hadir, untuk membantu Sabur dalam tugas ini.

Perintah Presiden ini untuk mengambil tindakan cepat terhadap para jenderal itu disaksikan oleh Dr. Subandrio, Chairul Saleh, Dr. Leimena, Brigjen Sunarjo, Marsekal Omar Dhani dan Djamin.⁸⁹ Brigjen Sudirgo bertemu Presiden sekali lagi, tanggal 26 September atau sekitar tanggal itu, dan melaporkan bahwa informasi tentang Dewan Jenderal adalah benar, dan untuk itu Presiden menambahkan: “Bagus, saya telah memerintahkan Sabur dan Sunarjo untuk

Sukarno dan Angkatan Darat Berseberangan, 1965

mengambil tindakan. Kamu harus berikan dukungan. Saya percaya kamu dan percaya Korps Polisi Militer kamu.”⁹⁰

Presiden menyinggung lagi masalah itu pada suatu rapat lain di Istana Merdeka tanggal 29 September 1965. Dalam rapat itu, Presiden meminta Brigjen Sabur untuk memberi laporan tentang status persiapan tindakan terhadap para jenderal yang tidak loyal itu, dan setelah mendengar Sabur menyatakan segala persiapan telah selesai dan tindakan akan segera menyusul, maka Presiden bertanya kepada Jenderal Mursjid apakah ia bersedia nanti menggantikan Jenderal Yani, Mursjid menjawab bahwa ia bersedia. Percakapan ini disaksikan oleh Marsyal Omar Dhani, Brigjen Sunarjo, Menteri Jusuf Muda Dalam, Mualif Nasution, Henny dan Adjudan Presiden Kolonel Bambang Widjanarko. Pada pukul 11.00 tanggal 29 September, Presiden menerima Omar Dhani dan Supardjo. Dhani melaporkan bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta tanggal 5 Oktober, tepat pada Perayaan Hari Angkatan Bersenjata, bahwa pasukan-pasukan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk maksud itu telah tiba di Jakarta, dan menyatakan kesediaan AURI untuk mendukung setiap tindakan menentang para jenderal itu yang telah diperintahkan Presiden. Supardjo melaporkan bahwa sekelompok perwira yang loyal kepada Presiden telah selesai dengan segala persiapan untuk memukul habis para jenderal itu demi membela Presiden dan menunggu perintahnya, bahwa banyak jenderal dalam AD yang tetap loyal kepadanya, dan bahwa cukup kekuatan militer yang berada di Jakarta untuk mendukung tindakannya dalam menghadapi lawan.⁹¹

SUKARNO MENGUTIP CARLYLE UNTUK MEMBENARKAN PEMBUNUHAN ITU: ISTANA MERDEKA: 30 SEPTEMBER

Tekad Presiden untuk terus dengan rencana membersihkan para jenderal yang tidak loyal itu jelas sekali tampak dalam percakapannya dengan Ajudannya, Brigjen H. Sugandhi, yang terjadi di kamar-tidur Presiden di Istana Merdeka tanggal 30 September pagi.

Menurut pernyataan Sugandhi, ia bertemu Sudisman dan Aidit tanggal 27 September 1965. Di situ, Sudisman mengundangnya untuk ikut dalam tindakan PKI terhadap para jenderal, dan ketika ia menolak karena punya agama, maka Sudisman menuduhnya sudah dicekoki Nasution. Sugandhi menjawab dengan sebuah peringatan bahwa PKI akan digilas habis oleh AD jika ia meneruskan rencananya itu. Sudisman tidak mau kalah menjawab bahwa

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

PKI tidak pernah dapat dihancurkan, bahwa PKI akan menang karena akan memegang prakarsa dan memukul lebih dulu, bahwa pukulan itu telah diperhitungkan masak-masak dan bahwa Sugandhi harus percaya itu. Pada titik ini, datanglah Aidit ikut dalam percakapan dan mengatakan kepada Sugandhi bahwa PKI akan memukul dalam dua-tiga hari ini, dan mengundangnya untuk ikut. Sugandhi memperingatkan bahwa dia sendiri dan angkatan bersenjata, tidak mau ikut PKI karena jelas partai itu mau adakan *coup*, dan bahwa ia punya doktrin sendiri, SAPTAMARGA. Aidit menjawab dengan mengatakan bahwa janganlah dibilang *coup*, itu perkataan jahat. PKI hanya akan memperbaiki (*ndandani*) revolusi yang tentu akan jauh lebih bermanfaat bagi negeri itu ketimbang yang dilakukan Dewan Jenderal. Sambil menegaskan kembali bahwa pukulan itu akan dimulai dalam dua-tiga hari ini, ia sekali lagi menawarkan apakah Sugandhi mau ikut apa tidak, sambil menyimpulkan bahwa semua hal itu telah diberitahukannya kepada Presiden. Ini isyarat bahwa Sugandhi semestinya tidak usah menjauh, akan tetapi masuk ke dalam barisan, karena pukulan itu telah mendapat persetujuan Presiden.

Dengan informasi ini di tangan, Sugandhi menemui Presiden pada pagi hari tanggal 30 September 1965 di Istana Merdeka. Ia memberitahukan bahwa dari Sudisman dan Aidit langsung ia mengetahui bahwa PKI akan mengadakan kudeta dalam dua-tiga hari ini, dan bahwa Aidit mengaku telah memberitahukan hal itu kepada Presiden, jadi ia mengkonfirmasi apakah Presiden sudah tahu atau belum. Presiden dengan nada marah, menghardik Sugandhi supaya jangan PKI-phobi, dan bertanya kepadanya apakah ia tahu tentang rencana Dewan Jenderal, dan memperingatkannya agar hati-hati kalau bicara. Sugandhi menjawab bahwa jika ada jenderal-jenderal brengsek, semestinya dipecat saja, karena Presiden memiliki wewenang untuk melakukan hal itu. Namun tidak ada yang namanya Dewan Jenderal itu, kata Sugandhi, yang ada hanyalah WANJAKTI, yang tugasnya membantu Men/Pangad untuk menilai kolonel-kolonel yang akan dipromosikan ke tingkat jenderal, jadi bukan untuk tujuan lain. Presiden menukas bahwa Sugandhi tidak usah ikut campur, cukup diam saja, dan bertanya apakah 'wis dicekoki' Nasution. Sugandhi terus membandel, mengatakan Dewan Jenderal itu benar-benar tidak ada, sambil menambahkan bahwa Jenderal Yani sendiri bukankah telah menjelaskan masalah itu kepada Presiden, bahwa Yani sangat setia kepada Presiden, dan bahwa ia benar-benar tangan kanan (*rechterhand*) Presiden. "Sudah", hardik Presiden lagi, "jangan banyak bicara, jangan ikut-ikutan. Kamu tahu dalam Revolusi menurut Thomas Carlyle, seorang bapak dapat memakan anaknya sendiri." Pada saat itu,

Sukarno dan Angkatan Darat Berseberangan, 1965

Sugandhi menjadi tidak menyerah, ganti membalas, “Waduh, kalau begitu Bapak ini sudah jadi PKI.” “Diam kamu,” teriak Presiden kembali, “*tak tempeleng pisan kowe*. Sudah pulang sana. Yang *ngati-ati*.”⁹²

Brigjen Sugandhi demikian terganggu dengan sikap Presiden sehingga dari Istana Merdeka, ia langsung pergi melapor kepada Jenderal Yani tentang pembicaraannya dengan Sudisman, Aidit, juga Presiden, sambil mengatakan bahwa kudeta itu telah mendapatkan persetujuan Presiden, dan mungkin sekali Yani menjadi sasarannya. Setelah digagalkannya kudeta itu oleh Mayjen Suharto tanggal 1 Oktober 1965, Sugandhi juga menemui Nasution untuk melaporkan kejadian ini.⁹³

Setelah pertemuannya dengan Sugandhi, Presiden memperlihatkan tekadnya untuk maju terus, dengan memberikan persetujuan akhir dan di depan umum dengan “sebuah isyarat” yang sangat simbolis pada sore hari menjelang malam pembersihan itu, tanggal 30 September 1965, yang disiarkan oleh Radio Indonesia ke seluruh negeri. Ketika itu, Untung mengawal Presiden ke *Mubes Teknik* yang digelar di Stadion Olah raga Senayan Jakarta, dan dalam kesempatan itu, Untung menerima sepucuk surat dari Sogol alias Nitri, seorang DKP, Penjaga Keamanan Presiden, yang dengan segera disampaikannya kepada Ajudan Kolonel Bambang Widjanarko dengan permintaan untuk segera diteruskan kepada Presiden yang sedang duduk di atas mimbar.

Menurut Widjanarko, surat itu melaporkan bahwa semua persiapan untuk menghancurkan para jenderal telah dilaksanakan dengan sempurna, bahwa operasi itu akan dimulai pada pukul 04.00 subuh keesokan harinya.⁹⁴ Surat itu selanjutnya memberitahu Presiden bahwa setelah ini, sebuah delegasi yang terdiri dari para perwira yang loyal yang mewakili seluruh angkatan, dengan dipimpin oleh Brigjen Supardjo, akan datang ke Istana Merdeka untuk menjaganya terhadap kemungkinan tindakan balasan oleh Dewan Jenderal dan membawanya ke Pangkalan Udara Halim untuk keamanannya.

Setelah menerima surat itu, Presiden bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke toilet, diiringi oleh Kolonel Saelan dan Kolonel Widjanarko, kemudian pergi ke luar ke beranda, membaca surat itu, mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memasukkan surat itu ke dalam saku jasnya dan kembali ke tempat duduk di atas mimbar. Pada saat pakar kesehatan Cina Dr. Wu Chieh Ping, yang selalu mendampingi Presiden, bangun dari tempat duduknya untuk mengikuti Presiden, ada orang yang percaya bahwa sakitnya Presiden kambuh dan memerlukan suntikan. Namun kesan ini hilang ketika Presiden kembali ke mimbar dan pergi ke tempat mikrofon untuk mengucapkan pidatonya di depan kumpulan massa dan kepada seluruh bangsa.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Melihat Presiden berdiri di atas mimbar itu—dengan penguasaan penuh terhadap suara, bahasa dan gerak-gerik tubuhnya—Widjanarko memberi kesaksian kemudian bahwa “pidatonya itu sangat bersemangat, baik tentang isinya maupun cara penyampaiannya” di mana ia mengemukakan sebuah adegan dari Mahabharata,⁹⁵ yang memperlihatkan Sri Krisna sedang menasehati Arjuna yang ragu-ragu itu, bahwa orang harus melakukan tugasnya terlepas dari akibat apapun yang akan menimpa. Adegan ini merupakan salah satu contoh yang paling terkenal dari ajaran moral Hindu tentang kewajiban seorang ksatria, memperlihatkan Sri Krisna sedang menjadi kusir Arjuna dalam kereta-perangnya menuju medan pertempuran di Kurukshetra untuk melakukan perang saudara dengan para sepupunya sendiri. Pada saat Arjuna ragu-ragu untuk membunuh kerabatnya sendiri, Sri Krisna memotivasi dia untuk “maju terus, itu adalah dharmamu, kewajibanmu, kamu harus memukul bahkan bila berhadapan dengan sedarahmu sendiri, karena apa yang kamu perjuangkan adalah benar, kamu akan menang.” Dengan mengemukakan makna adegan ini, Presiden memberi isyarat melalui radio kepada Untung, dan para perwira progresif revolusioner lain di berbagai penjuru negeri yang sedang bersiap-siap untuk membunuh saudara-saudara para perwira atasan mereka sendiri, untuk maju terus, karena “perjuanganmu adalah benar, saya bersamamu, kemenangan adalah milikmu.”

Makna dari pesan yang kabur karena sangat simbolis ini, dalam konteks penculikan yang akan terjadi beberapa jam lagi, adalah pasti, yaitu memotivasi sekaligus memberikan solusi bagi Untung cs atas dilemma moral yang membebani mereka, karena harus menghabisi saudara-saudara mereka sendiri, para jenderal. Dapat dikatakan mereka tidak asing dengan makna yang menonjol dari pesan itu, yang telah ditanamkan di dalam jiwa mereka semenjak masih anak-anak melalui *wayang kulit*, di mana penyelesaian dari dilemma moral yang besar ini telah dimainkan berulang kali sejak zaman dahulu kala yang entah kapan sudah tidak bisa dilacak lagi.

Aidit, yang juga hadir di stadion itu, memahami betul pesan tersebut. Ia bangkit dari tempat duduknya, dan langsung berangkat ke rumah Sjam untuk sebuah rapat yang telah diatur lebih dahulu dengan Mayjen Pranoto Reksosamodro, yang telah dibina oleh Biro Khusus untuk sekian waktu lamanya, dan menawarkan kepadanya tugas sebagai Men/Pangad menggantikan Yani, sebab Aidit tahu persis bahwa posisi ini akan kosong dalam beberapa jam lagi.⁹⁶ Pertunjukan Presiden sebagai Dalang Besar di Stadion Olahraga Senayan senja itu adalah sebuah drama nasional dalam tingkatnya yang paling

Sukarno dan Angkatan Darat Berseberangan, 1965

tinggi, yang dimainkan di pentas terbesar yang mungkin pernah ada, dengan taruhan sangat tinggi pula. Lagi-lagi di sini, interaksi dari budaya, seni dan politik, sebuah ciri nasional yang besar dari rakyat Indonesia, berada di puncaknya yang tertinggi.⁹⁷ Untuk menutup drama besar ini, Presiden mengundang Waperdam II, Dr. Johannes Leimena, ke atas mimbar untuk mendendangkan sebuah lagu cinta Maluku, yang menyebabkan para hadirin meninggalkan stadion itu dengan suatu perasaan gembira luar-biasa.



V

POLITBIRO DAN RENCANA BESARNYA

RAPAT POLITBIRO PERTAMA: MARKAS BESAR PKI KRAMAT RAYA 81, JAKARTA 9 AGUSTUS 1965

Pada 8 Agustus 1965 kita telah melihat adegan Aidit menemui Presiden di kamar tidurnya di Istana Bogor, dimana Presiden membuat perjanjian dengan Mao dan Aidit. Tak lama kemudian kita temui Aidit di kamar sebelah, yang mendapat penegasan pandangan dari dokter-dokter asal Cina bahwa satu serangan lagi bisa menewaskan Presiden atau membuatnya lumpuh secara permanen, dan kita mencatat bahwa keesokan harinya Aidit bertemu Walujo, yang melaporkan kabar gembira tentang Presiden memerintahkan Untung untuk “mengambil semua langkah-langkah yang perlu” terhadap para jenderal.

Dengan semua informasi itu di tangan, Aidit tidak buang-buang waktu lagi dan menyelenggarakan rapat pertama dari tiga rapat Politbiro di markas besar partai di Kramat Raya 81, Jakarta, untuk mengevaluasi situasi terkini dan mengembangkan strategi-strategi yang tepat untuk mencapai tujuan partai di bawah kondisi-kondisi domestik dan internasional yang telah banyak berubah, yang menuntut langkah-langkah darurat yang cepat. Rupanya rapat pertama itu diselenggarakan pada 9 Agustus, menyusul pertemuan Aidit dengan Presiden sehari sebelumnya, yang kemudian diikuti dengan dua rapat tambahan pada 26 dan 28 Agustus 1965. Mengingat selama diskusi-diskusi di ketiga rapat itu dibuat keputusan-keputusan mendasar yang mengkaitkan partai dengan perjanjian Mao-Sukarno-Aidit, yang memicu kudeta yang gagal pada 1 Oktober 1965 itu, maka diskusi-diskusi itu akan direkonstruksi dalam studi ini sampai ke tingkat yang diizinkan oleh sumber-sumber yang tersedia. Dengan demikian,

Politbiro dan Rencana Besarnya

satu *caveat* (peringatan) harus digarisbawahi di sini, yaitu bahwa pemaparan diskusi-diskusi itu harus tetap bersifat tentatif dan bersifat provisional (sementara) sampai diketemukan bukti lebih lanjut yang lebih lengkap.⁹⁸

Dalam ketiga rapat itu, Politbiro mengembangkan sebuah Rencana Besar – jalan pintas untuk meraih kekuasaan—yang terdiri dari unsur-unsur berikut: 1) partai akan mengorganisir suatu pukulan *pre-emptive* terhadap para jenderal yang tidak loyal untuk mendorong negeri ini memasuki tahap revolusi sosialis; 2) serangan itu akan diperintahkan oleh Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata; 3) perwira-perwira progresif-revolusioner (istilah waktu itu: yang berpikiran maju) dalam Angkatan Bersenjata akan melaksanakan serangan itu sebagai “masalah intern AD”; 4) meskipun begitu, Komite Tetap Politbiro akan memfasilitasi dan mengarahkan seluruh operasi melalui anggota-anggota Biro Khusus; 5) menyusul aksi tersebut, Presiden akan menunjuk suatu Kabinet Gotong Royong, yang akan terdiri dari koalisi kekuatan-kekuatan revolusioner yang, di bawah hegemoni PKI, akan menghentikan tahap Demokrasi Nasional dari revolusi Indonesia dan mengawali transisi menuju sosialisme; 6) langsung sesudah menunjuk kabinet baru itu Presiden akan diistirahatkan ke Cina, atau kalau tidak mau, akan disingkirkan paksa.

Rapat pertama Politbiro yang terdiri dari 8 anggota itu diselenggarakan pada 9 Agustus 1965, dan dihadiri oleh 7 anggota tetap: Aidit, Lukman, Sudisman, Ir. Sakirman, Anwar Sanusi, Njoto, dan Njono. Adjitorop, anggota kedelapan, tidak hadir karena tengah berkunjung ke Cina.

Aidit mula-mula melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri. Ia menyebutkan kontak-kontaknya dengan para pemimpin Partai Komunis Perancis dan Rumania, dan kemudian melaporkan pertemuan-pertemuan yang ia hadiri di Moskow dan Peking. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa menunda kunjungan ke Vietnam Utara karena kawat dari Dr. Subandrio menyuruhnya pulang, dan bahwa ia kembali pada 7 Agustus. Ia menambahkan bahwa kedua dokter Cina itu, yang menemani dia dari Peking, percaya bahwa Presiden sakit begitu parah sehingga hanya ada dua kemungkinan: kalau ia mengalami serangan lagi, ia bisa menjadi lumpuh secara permanen atau meninggal dunia. Meskipun begitu, kata Aidit, jika Presiden mengikuti anjuran dokter-dokter Cina, ada kemungkinan cukup besar ia akan sembuh. Tetapi mengingat aktivitasnya yang luar biasa dan tekanan pekerjaan – Presiden sering harus memutuskan bahkan sampai detail-detail paling kecil karena para pembantunya dianggapnya tidak bisa diandalkan—maka sangat kecil kemungkinan Presiden akan pulih seperti sedia kala, sehingga harus melepaskan tugas-tugasnya.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Karena itu, tandas Aidit, PKI harus mendasarkan rencana-rencananya pada kemungkinan terakhir tersebut. Tetapi masalahnya menjadi kompleks oleh satu unsur yang paling urgen, yaitu bahwa kepemimpinan AD tahu terlalu banyak tentang gawatnya penyakit Presiden dan memperhitungkan juga kemungkinan ia tidak akan hidup lebih lama. Kenyataannya, kata Aidit, AD sudah membentuk Dewan Jenderal untuk merebut kekuasaan andaikata Presiden meninggal mendadak, atau lumpuh, dan kemudian akan menghabisi PKI. Brigjen Polisi Sutarto, Kepala Staf BPI (Badan Pusat Intelijen), memberi Aidit informasi mengenai keberadaan Dewan Jenderal dan rencana-rencananya. Lebih jauh lagi Aidit mengatakan bahwa informasi itu kemudian dicek oleh Dr. Subandrio, Menlu merangkap Kepala Badan Pusat Intelijen itu, dan juga oleh Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Dr. Subandrio sudah menyerahkan dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Presiden Sukarno mengenai Dewan Jenderal dan rencananya yang akan mengambil langkah *pre-emptive* untuk menggeser Presiden, terlepas dari prospek kesehatannya, dengan operasi yang akan dimulai pada atau sekitar 5 Oktober 1965.

Rapat Politbiro itu kemudian mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil PKI untuk menangkal rencana jahat AD dalam situasi tersebut. Jelas sekali, jawaban terhadap pertanyaan itu tergantung pada analisis tentang korelasi kekuatan-kekuatan kelas yang ada pada waktu itu, kata Aidit, dan pada penilaian tentang sekutu-sekutu yang mau bergabung dengan PKI dan mendukung langkah-langkahnya melawan para jenderal yang berniat melakukan kudeta.

“...PKI membuat analisa finalnya dan secara aljabar merumuskan keseimbangan kekuasaan di Indonesia pada waktu itu sebagai berikut:

kekuatan tengah + kekuatan kanan > kekuatan kiri
kekuatan tengah + kiri > kekuatan sayap-kanan

Itu berarti bahwa dalam mengambil sesuatu tindakan yang bisa mengarah pada instabilitas kekuatan tengah dan kecenderungan mereka untuk bergabung dengan sayap kanan, situasi itu sangat tidak menguntungkan bagi Partai dan seluruh langkah itu akan gagal total.

Adalah perlu untuk mencamkan pada saat yang sama bahwa formula sayap-kiri + tengah > sayap-kanan dibenarkan dalam kerangka kerja perjuangan anti-imperialis, dan bahwa hal itu tidak dapat diterapkan

Politbiro dan Rencana Besarnya

dengan mudah untuk melawan Dewan Jenderal...”⁹⁹

Dengan demikian Politbiro dan PKI sadar betul bahwa meskipun mustahil untuk mengorganisir suatu *joint action* dengan kekuatan tengah dalam menghadapi bahaya dari luar terhadap negeri itu, namun kecil kemungkinan bahwa kekuatan tengah itu akan membantu PKI dalam suatu gerakan melawan komando puncak AD. Dari kutipan di atas, jelaslah bahwa setiap usaha PKI untuk merangkul kekuatan tengah untuk bekerja sama melawan AD akan membuahkan “instabilitas dan kecenderungan mereka untuk bergabung dengan sayap kanan,” yang pada gilirannya akan mengisolasi PKI. Dengan demikian dua hal menghalangi PKI dalam upaya untuk mendapatkan dukungan kekuatan tengah dalam aksinya melawan AD:

“Kekuatan-kekuatan reaksioner memperoleh kekuatan tambahan lumayan besar dari sayap-kanan kekuatan tengah itu, yang telah dikeluarkan dari Front Marhaenis, sebagai hasil dari semakin mengkristalnya kekuatan tengah.

Partai-partai agama lebih bersimpati pada Dewan Jenderal, yang cenderung mereka lihat sebagai penyelamat agama dari ancaman ateisme.”¹⁰⁰

Dengan demikian Politbiro menyimpulkan bahwa PKI harus melancarkan suatu serangan *pre-emptive* yang cepat dan menentukan melawan komando AD, bahwa hal ini tidak dapat diorganisir atas dasar NASAKOM, dan bahwa partai harus bertindak sendirian. Meskipun begitu, Politbiro merasa bahwa setiap usaha harus dilakukan untuk mengamankan dukungan para pemimpin sayap-kiri individual dari partai-partai politik utama, anggota-anggota struktur NASAKOM, untuk bekerjasama dengan PKI, meskipun dukungan partai-partai mereka, secara keseluruhan, tidak dapat diperoleh. Adalah sangat penting, begitu keyakinan Politbiro, bahwa beberapa dari pemimpin-pemimpin sayap-kiri individual ini dimasukkan ke dalam Kabinet Gotong Royong yang baru, ditunjuk oleh Presiden langsung sesudah langkah pembersihan para jenderal sehingga kabinet baru itu, meskipun didominasi oleh PKI, setidaknya dari luar, akan tampak seperti koalisi nasional luas model NASAKOM lama.

PKI mengharapkan agar dukungan individual dari pemimpin-pemimpin itu bagi tindakannya melawan para jenderal akan datang hanya dalam bentuk-bentuk politis, dengan tidak melibatkan mereka dalam setiap operasi militer

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

seandainya operasi semacam itu harus diambil. Tetapi adalah wajib bahwa setiap gerakan militer melawan para jenderal harus tetap sepenuhnya di tangan PKI karena konsekuensi-konsekuensi politisnya, yaitu tampilnya partai sebagai kekuatan politik utama di negeri itu akan memaksa Presiden menunjuk calon-calon PKI sebagai anggota Kabinet Gotong Royong. Gerakan militer akan menempatkan PKI dalam posisi kuat untuk mendirikan sebuah pemerintahan baru, yang hanya memasukkan individu-individu radikal saja dari partai-partai politik lain yang mendukung tindakan PKI, dan yang sekarang bersedia bekerja di bawah hegemoni PKI. Selain itu, gerakan militer melawan para jenderal akan memungkinkan PKI memecah-belah dan memperlemah partai-partai politik, sehingga mengarah pada penghapusan struktur NASAKOM lama berikut Kabinet Dwikora-nya, sekaligus melibas “sayap-sayap reaksioner” mereka.

Dengan demikian Politbiro mengantisipasi bahwa secara keseluruhan perkembangan-perkembangan politik itu akan menghentikan tahap Demokrasi Nasional dari revolusi Indonesia, yang menjadikan transisi menuju tahap sosialis sebagai kemungkinan yang praktis dan relatif mulus, karena kekuatan-kekuatan yang menentanginya sudah dilumpuhkan atau ditumpas sekalian. Proses pembersihan “para reaksioner dan penentang” transisi itu, tak pelak lagi, menuntut pembentukan kamp-kamp kerja paksa, aneka macam gulag, dan regu-regu tembak. Hal ini adalah wajib jika ditinjau dari pengalaman negeri-negeri lain menyangkut transisi dari tahap demokrasi nasional ke tahap demokrasi sosialis.

Dari sumber-sumber yang tersedia, tampaklah bahwa selama rapat Politbiro itu Aidit tidak mengungkapkan diskusinya dengan Mao di Peking pada 5 Agustus, dan kemudian dengan Presiden di Bogor pada 8 Agustus, bahkan tidak menyinggung sama sekali adanya suatu perjanjian antara kedua pihak itu, setelah ia sendiri menyampaikan syarat-syarat Mao kepada Presiden. Mengingat seriusnya perjanjian itu, tampak bahwa Aidit pada saat itu merahasiakannya, dan hanya mengungkapkannya pada anggota-anggota Komite Tetap Politbiro setelah rapat pada 26 Agustus 1965. Sebagaimana akan terlihat sebentar lagi, rapat itu memberikan kewenangan pada tiga orang anggota – Aidit, Lukman, dan Njoto—untuk memutuskan kapan memberikan lampu hijau pada Sjam dan Untung untuk memulai operasi GESTAPU dengan jalan menculik para jenderal di rumah mereka masing-masing. Rupanya Aidit secara terbuka mengacu pada syarat-syarat perjanjian Mao-Sukarno-Aidit untuk pertama kalinya dalam suratnya yang bertanggal 10 November 1965. Tetapi

Politbiro dan Rencana Besarnya

ini jelas merupakan tindakan orang putus asa yang berusaha memaksa Presiden, melalui “senjata pamungkas” PKI, sebagaimana ia katakan, untuk berpegang teguh pada syarat-syarat perjanjian yang telah ia buat dengan Mao dan Aidit. Meskipun pada waktu itu Presiden telah melaksanakan poin pertama dari perjanjian itu, yaitu bahwa ia telah memerintahkan pembersihan para jenderal yang mengakibatkan tewasnya enam jenderal pada 1 Oktober 1965, namun tidak melaksanakan poin kedua, yaitu penunjukan Pemerintahan Kabinet Gotong Royong. Karena itu, kata Aidit, partai siap “mengorbankan” Presiden jika ia gagal lagi melaksanakan hal itu secepatnya, karena dengan demikian “mengkhianati” Peking maupun PKI.

“KOMANDO PEMBERSIHAN” DITETAPKAN: KEDIAMAN AIDIT, JAKARTA, 12 AGUSTUS

Menyusul rapat Politbiro tersebut, Aidit mengundang Sjam ke rumahnya pada 12 Agustus 1965, untuk memberitahu dia mengenai keputusan Politbiro untuk melancarkan suatu pukulan *pre-emptive* yang cepat dan menentukan untuk memenggal pucuk pimpinan AD, dan memerintahkan dia membangun sebuah komando, yang terdiri dari perwira-perwira progresif-revolusioner, untuk melaksanakannya. Ketika mendiskusikan hal tersebut, Sjam menanyakan apakah tidak lebih baik jika membiarkan para jenderal itu menyerang lebih dulu, membiarkan mereka buka kartu terlebih dulu, dan barulah kemudian melancarkan serangan balasan dengan tindakan berbasis massa luas secara nasional yang akan melibatkan jutaan pengikut partai. Aidit menjawab bahwa “ini adalah masalah intern AD, dan kita harus tetap di balik layar. Andaikata operasi itu dilancarkan dengan melibatkan massa, akan jelas bagi setiap orang bahwa operasi itu telah disiapkan secara nasional oleh kita. Kemudian kita akan diekspos sebagai organisatornya.” Karena itu, pukulan terhadap para jenderal harus distrukturkan sedemikian rupa untuk memberikan kesan bahwa hal itu adalah sepenuhnya masalah intern AD.¹⁰¹ Aidit kemudian mengarahkan Sjam untuk membentuk sebuah komando yang terdiri dari para perwira progresif-revolusioner, dengan menandakan bahwa yang harus dipertimbangkan adalah mereka yang sepenuhnya bisa diandalkan, yang telah lama dibina oleh Biro Khusus. Kemudian kelompok itu harus mengumpulkan intelijen militer dan politik di kalangan Angkatan Bersenjata mengenai sikap mereka, menyiapkan perkiraan mengenai perimbangan kekuatan di masing-

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

masing wilayah dan kemudian membuat rekomendasi-rekomendasi yang tepat untuk Aidit.

Otoritas yang diberikan Aidit pada Sjam pada 12 Agustus 1965 untuk membangun sebuah komando untuk menculik para jenderal puncak AD segera menggerakkan aspek paling menonjol dari keseluruhan GESTAPU itu. Sjam langsung mendiskusikan instruksi-instruksi Aidit dengan pembantu-pembantunya, Pono dan Walujo, dan bersama mereka meneliti nama-nama para perwira yang, dalam pengalaman mereka, sepenuhnya bisa diandalkan untuk direkrut sebagai pemimpin operasi. Sebagaimana telah kita lihat di muka, angkatan bersenjata sudah lama dijadikan target penetrasi ekstensif oleh PKI, dan arsip-arsip Biro Khusus berisi nama-nama dari sekitar 600 perwira yang telah dikendalikan oleh agen-agensinya di masa lalu. Diskusi-diskusi Sjam, Pono dan Walujo difokuskan pada Kolonel Latief, Komandan Brigade Infanteri I Garnisun Jakarta. Ia adalah penentang para jenderal puncak AD, dan secara terbuka mendukung kebijakan-kebijakan PKI, dan memimpin sekelompok perwira-perwira radikal dalam Garnisun Jakarta. Pono dan Walujo kemudian mengusulkan nama Mayor Udara Sujono alias Pak Joyo, Komandan Resimen Keamanan AURI di Pangkalan Udara Halim, yang menjadi pendukung terbuka PKI. Mayor ini telah mengizinkan Pemuda Rakjat mendirikan sebuah pusat pelatihan di Lubang Buaya yang dekat dengan Pangkalan Udara Halim, wilayah yang ada di bawah yurisdiksinya, dan mengizinkan anggota-anggotanya menggunakan senjata-senjata serta perlengkapan AURI dengan dalih untuk melatih sukarelawan melawan Malaysia. Pilihan berikutnya jatuh pada Letkol Untung, Komandan Batalyon Pengawal Istana Cakrabirawa, yang sudah dekat dengan PKI sejak kudeta gagal yang dilancarkan oleh Musso di Madiun pada September 1948. Lebih jauh disepakati bahwa Sjam akan memegang urusan politik, dan Untung akan mengomando aspek militer operasi. Nama-nama dari ketiga kandidat itu diserahkan kepada Aidit, yang kemudian menyetujui usulan tersebut.

Tetapi lebih jauh Aidit menginstruksikan Sjam untuk mengusulkan nama-nama tambahan yang sesuai, dan Pono mengusulkan pada Sjam nama Agus Sigit, Mayor Infanteri dalam Komando Regional Jakarta, dan Kapten Artileri Wahjudi. Kemudian Sjam mengundang Brigjen Mustafa Sjarif Supardjo, mantan Komandan Resimen Divisi Siliwangi, yang ditempatkan di Jawa Barat, untuk bergabung dengan kelompok itu. Pada awal 1965 Supardjo telah digeser dari pos ini karena aktivitasnya yang dianggap memberontak dan pro-komunis dan dikirim ke Kalimantan Barat untuk memimpin Grup Tempur 4 KOSTRAD di Menggaian melawan Malaysia.

Politbiro dan Rencana Besarnya

Kelompok 9 orang itu, yakni 3 anggota Biro Khusus PKI dan 6 perwira progresif, dikukuhkan menjadi komando operasi pembersihan jenderal-jenderal AD. Komando itu beroperasi di bawah Sjam, yang mengkoordinasikan aspek-aspek militer dan politis operasi itu, dibantu oleh Pono, dan Walujo memimpin seksi intelijen. Tetapi keseluruhan komando ada di tangan Aidit.¹⁰² Dengan demikian ada jarak yang nyaman antara ke-6 perwira itu, yang semua tentara profesional, yang bertindak sebagai lengan eksekutif rencana kudeta, dengan Komite Tetap Politbiro PKI, organ pengarahnya, yang terdiri dari Aidit, Lukman dan Njoto.

DIVISI SILIWANGI DINETRALISIR: MAYJEN RUKMAN, BANDUNG: 25 AGUSTUS

Selain memberi otoritas pada Sjam pada 12 Agustus 1965 untuk membentuk kelompok komando untuk merencanakan aspek-aspek militer dari pembersihan para jenderal sebagai masalah intern AD, Aidit juga mempercayakan pada Sjam tugas mengevaluasi perimbangan loyalitas dalam angkatan bersenjata di wilayah-wilayah utama negeri itu. Ia tertarik pada evaluasi perimbangan loyalitas dan kekuatan politik antara perwira-perwira revolusioner, yaitu di satu pihak pengaruh politis, moral dan psikologis mereka pada seluruh jajaran angkatan bersenjata, dan di pihak lain kekuatan-kekuatan yang loyal pada penguasa militer di Jakarta, yang bisa diandalkan oleh para jenderal itu dalam menghadapi perwira-perwira revolusioner tadi di setiap wilayah utama negeri itu.

Dalam salah satu rapat mereka, anggota-anggota Biro Khusus menyimpulkan bahwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur pengaruh politis perwira revolusioner tidak hanya lebih besar daripada para loyalis, tetapi bahkan secara militer kekuatan militer efektif sudah bergeser ke arah yang menguntungkan perwira revolusioner. Pergeseran itu terjadi berkat suatu “kevakuman” yang diciptakan oleh penarikan 68 batalyon dari kedua propinsi tersebut keluar Jawa untuk menghadapi Malaysia. Meskipun begitu, rapat itu mempertanyakan perimbangan kekuatan di Jawa Barat, dimana terdapat Divisi Siliwangi yang kuat, dan merekomendasikan agar diambil langkah-langkah untuk menetralkan divisi itu.

Ketika Sjam melaporkan hasil pertemuan itu pada Aidit, maka Aidit menganggap rekomendasi itu begitu penting dan kritis sehingga ia dan Sjam

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

berangkat ke Bandung, markas besar KODAM VI SILIWANGI, pada 20 Agustus, untuk mengevaluasi sendiri situasi secara *on the spot* dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menetralsir divisi itu. Sementara Aidit tinggal di Hotel HOMANN, Sjam menginap di rumah Haryana, alias Rudianto alias Li Tung Tjong alias Urdin alias Marsidi bin Li Atjit alias Rachman alias Achmad alias Hamind, yang mengepalai Biro Khusus di Jawa Barat. Di rumahnya Sjam bertemu dengan beberapa agen rahasia Biro Khusus untuk meletakkan fondasi bagi aktivitas-aktivitas di propinsi itu berkaitan dengan serangan terhadap para jenderal itu nanti.

Dalih resmi untuk kunjungan Aidit ke Bandung adalah untuk menghadiri sebuah upacara militer, yang akan diselenggarakan pada 25 Agustus, ketika Presiden Sukarno akan menyampaikan Pataka Sam Karya Nugraha pada Komando Militer VI Siliwangi, yang akan dihadiri oleh banyak perwira yang berdinasti di divisi yang terkenal itu di masa lalu. Pada hari upacara itu Sjam meminta Haryana untuk menemui Mayjen U. Rukman, Kepala Staf Divisi Siliwangi, meminta waktu untuk suatu pertemuan mendiskusikan masalah-masalah serius dengannya dan perwira-perwira lain yang akan diundang hadir. Menyusul hal itu, sebuah pertemuan diselenggarakan pada 25 Agustus sore di rumah Mayjen Rukman, yang dihadiri oleh Rukman, Sjam, Haryana, Walikota Bandung Kolonel Djukardi, dan Brigjen Supardjo. Yang disebut terakhir ini adalah seorang alumnus Siliwangi, yang sekarang di Kalimantan untuk memimpin operasi-operasi konfrontasi melawan Malaysia, dan Sjam lah yang mendekati dia di Bandung untuk mengundangnya agar menghadiri pertemuan itu. Telah kita lihat bahwa Supardjo pernah menyatakan komitmennya pada Sjam pada April 1965 untuk berpartisipasi dalam setiap aksi melawan para jenderal dan, karena itu, kehadirannya dalam pertemuan itu amat sangat penting untuk perekrutan perwira-perwira Siliwangi lainnya.

Dalam pertemuan itu Sjam pertama-tama menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan Presiden yang memburuk telah menciptakan sebuah situasi baru, yang menimbulkan masalah mendesak tentang suksesinya. Dengan mengacu pada arti penting Dokumen Gilchrist dan hubungan-hubungannya dengan Dewan jenderal dalam konteks situasi kritis itu, Sjam memperingatkan tentang bahaya jenderal-jenderal yang tidak loyal akan melancarkan kudeta jika Presiden wafat atau mengalami lumpuh secara permanen. Karena alasan itu, lanjut Sjam, dan karena adalah penting untuk mendahului para jenderal itu, maka PKI telah menggariskan sebuah “konsep tentang suatu gerakan militer” melawan para jenderal, maupun sebuah konsep politik untuk mengubah

Politbiro dan Rencana Besarnya

pemerintahan yang sudah ada dan menggantinya dengan sebuah pemerintahan Kabinet Gotong Royong untuk membuka jalan menuju transisi ke sosialisme.

Dalam diskusi yang menyusul analisis Sjam itu, Mayjen Rukman langsung menyepakati perlunya suatu sistem politik baru, tetapi tidak begitu yakin mengenai tindakan militer melawan para jenderal. Tetapi Sjam mengeluarkan detail-detail lebih lanjut mengenai bahaya suatu kudeta *pre-emptive* yang mungkin dilakukan oleh para jenderal berikut konsekuensi-konsekuensi politis jangka-panjangnya, misalnya pemerintahan diktator militer, dan menjelaskan bahwa gerakan militer PKI itu nanti sebenarnya bersifat defensif, yaitu untuk menghalangi para jenderal merebut kekuasaan, dan adalah perlu untuk bertindak sekarang juga, sebab kesempatan kedua seperti itu mungkin tidak akan muncul lagi di waktu dekat. Mayjen Rukman terkesan oleh argumen Sjam dan mengatakan “Kalau itu masalahnya, aku setuju.”

Setelah mendapatkan dukungan Mayjen Rukman bagi tindakan *pre-emptive* PKI dan kesepakatannya untuk menjadi salah seorang anggota kepemimpinan, Sjam kemudian berpaling pada Brigjen Supardjo dan menanyakan padanya apakah ia siap untuk bergabung, dan langsung dijawab, “Jika partai telah memutuskan demikian, saya akan patuh.” Untuk itu Mayjen Rukman menambahkan, “Saya akan bertindak sebaik-baiknya untuk menetralsir KODAM VI SILIWANGI dan pasukan yang ditempatkan di Jawa Barat sehingga mereka tidak akan menghalangi atau melawan gerakan militer yang akan PKI lakukan di Jakarta.”¹⁰³

Ketika keesokan harinya, 26 Agustus, waktu tengah hari, Sjam menemui Aidit di Hotel HOMANN untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Rukman dan Supardjo, juga mengenai pekerjaan Biro Khusus di Bandung, Aidit sangat terkesan dan langsung menelpon markas besar partai di Jakarta untuk meminta agar suatu Rapat Politbiro yang Diperluas diselenggarakan sore hari itu juga. Ia sendiri telah menghadiri upacara Bandung itu pada hari sebelumnya, duduk bersama Presiden dan tamu-tamu lain di atas podium dan melakukan penyelidikan sendiri untuk menyelami suasana hati dalam tubuh Siliwangi, dan divisi-divisi lain, dengan jalan bercakap-cakap dengan komandan-komandan mereka yang menghadiri upacara tersebut. Dengan caranya sendiri, tidak diragukan lagi bahwa ia mengisyaratkan pada orang-orang yang tahu bahwa hubungan antara Presiden dengan ketua PKI itu sedang bagus-bagusnya, dan bahwa keselarasan antara Presiden, perwira-perwira revolusioner dan PKI tetap kuat. Penyelidikan-penyelidikannya sendiri, dan laporan Sjam, pasti telah meyakinkan dia bahwa *mood* dalam Siliwangi, dan unit-unit lain, memberikan isyarat bagus bagi kesuksesan operasi pembersihan tersebut.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Sekarang Aidit mempunyai cukup bukti di tangan untuk melaporkan pada Politbiro tentang perubahan yang sangat menggembirakan dalam keseimbangan kekuatan di seluruh Jawa. Dari laporan awal Sjam, ia tahu bahwa penarikan 68 batalyon dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan sebagai hasil kunjungannya ke Bandung ia telah mengantongi janji Rukman untuk menetralsir Siliwangi selama serangan terhadap para jenderal itu berlangsung. Atas dasar inilah ia akan menekan Politbiro agar secara resmi menyetujui, sebagai kebijakan PKI, agar perwira-perwira progresif-revolusioner diperintahkan untuk segera mengambil langkah-langkah yang akan mengarah pada pembersihan komando puncak AD, diikuti dengan penunjukan Kabinet Gotong Royong oleh Presiden, yang akan memberikan kekuasaan pada PKI dan sekutu-sekutunya untuk memerintah negeri ini dan mengawali transisi menuju sosialisme.

RAPAT POLITBIRO KEDUA: MARKAS BESAR PKI, KRAMAT RAYA 81 JAKARTA: 26 AGUSTUS

Rapat Politbiro yang diselenggarakan pada 26 Agustus 1965 itu adalah yang paling penting dari ketiga rapat itu, di mana anggota-anggotanya mendiskusikan perlunya suatu tindakan pembersihan pucuk pimpinan AD, maupun konsekuensi-konsekuensi politisnya. Mengingat seriusnya masalah itu, maka rapat diperluas, dihadiri juga oleh Peris Pardede, anggota terkemuka Sekretariat CCI PKI, dan Rewang. Yang disebut terakhir ini alias Parto alias Karto alias Dono alias Siman, adalah anggota CC PKI, mengendalikan kubu-kubu partai di Jawa Tengah, yang Aidit anggap begitu menentukan bagi keberhasilan aksi yang direncanakan itu nanti.

Aidit membuka rapat dengan mengatakan bahwa kesehatan Presiden yang memburuk telah menempatkan PKI ke dalam situasi di mana partai harus bertindak, dan bertindak dengan cepat. Selama minggu pertama bulan Agustus Presiden telah menderita serangan ginjal, malah sampai pingsan beberapa kali pada 4 Agustus dan, menurut tim dokter Cina yang merawatnya, ia bisa meninggal atau lumpuh secara permanen jika terjadi serangan berikutnya. Ini akan menciptakan suatu situasi yang sangat berbahaya sebab bila Presiden meninggal atau lumpuh, berarti akan menghilangkan penyangga keseimbangan antara Angkatan Darat dengan partai, dua kubu yang saling bertentangan tersebut, yang tak pelak lagi akan berhadapan secara frontal. Karena pucuk

Politbiro dan Rencana Besarnya

pimpinan AD akan menjadi pihak pertama yang tahu jika Presiden meninggal atau lumpuh, maka mereka akan dengan cepat menyerang partai sehingga:

“dipastikan bahwa PKI akan dilenyapkan. Jadi masalahnya adalah, apakah kita akan membiarkan mereka mengambil langkah pertama, atau apakah kita akan mengambil inisiatif... Saya sudah memikirkan keuntungan dan kerugian jika partai mengambil inisiatif, dan juga jika AD mengambil langkah pertama. Jika mereka tahu lebih dulu (tentang kematian Presiden Sukarno, Ed.), mereka akan bisa, dalam waktu sangat singkat, mengendalikan situasi dan mendepak kita. Karena itu saya cenderung mengambil inisiatif, tetapi ada dua masalah mendasar yang masih tidak dapat kita pecahkan.”¹⁰⁴

Masalah pertama yang mengganjal solusi Aidit sebelum menghadiri pertemuan Politbiro itu adalah keyakinannya bahwa PKI, sebagai sebuah organisasi politik dan sendirian saja, tidak mampu melenyapkan pucuk komando AD, dan yang terpenting adalah bahwa partai tidak boleh dilibatkan secara langsung dalam upaya itu karena alasan-alasan politis, selain korban mengerikan yang akan jatuh jika rencana itu gagal. Masalahnya adalah siapa yang akan melaksanakan operasi pembersihan itu? Adalah jelas bahwa partai harus bertindak melalui suatu perantara, suatu pengganti. Masalah kedua yang mengganjal solusi Aidit sampai rapat Politbiro itu adalah keprihatinannya dengan evaluasi tentang peluang keberhasilan yang bisa diharapkan dari aksi seperti itu. Masalah mendasarnya adalah soal perimbangan kekuatan.

Ketika berpaling pada masalah pertama, Aidit memberitahu Politbiro bahwa ia telah menemukan sebuah solusi terhadap tugas paling kritis yang dihadapi partai. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai informasi yang bisa diandalkan tentang keberadaan sekelompok perwira progresif-revolusioner dalam tubuh AD yang menentang Dewan Jenderal dan siap untuk menghabisi para pemimpinnya itu. Kenyataannya, kata Aidit, perwira-perwira ini telah mendekati dia untuk menanyakan pendirian yang akan diambil PKI terhadap kudeta yang sudah agak lama direncanakan oleh Dewan Jenderal, dan menanyakan apakah tidak lebih baik untuk mengambil tindakan *pre-emptive* gabungan untuk menangkalnya dan melindungi Presiden dari maksud-maksud jahat mereka.¹⁰⁵ Saat menyebutkan pendekatan yang dilakukan padanya oleh perwira-perwira progresif itu, Aidit pastilah mengacu pada “komando pembersihan [*purge command*]” yang sudah dibangun oleh Sjam atas instruksi Aidit pada 12 Agustus 1965. Dengan demikian lengkaplah sudah lingkaran

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

itu. Aidit tengah menuai apa yang ia tanam lebih awal, dengan jalan mengadakan isu Dewan Jenderal di bulan April, dan kemudian memerintahkan Sjam untuk membangun sebuah komando yang terdiri dari agen-agen partai di dalam tubuh AD untuk memukul habis para jenderal. Dengan demikian, Aidit sekarang bisa menyodorkan pada Politbiro sebuah solusi realistis atas masalah siapa pihak ketiga yang harus menyerang para jenderal, tanpa keterlibatan langsung partai, dan secara tidak langsung menyinggung prospek yang menggiurkan dari meroketnya partai itu secara cepat, sebuah jalan pintas menuju kekuasaan, menyusul aksi militer itu tadi.

Berbicara mengenai masalah kedua, yakni perimbangan kekuatan, Aidit mengatakan bahwa pertarungan yang menentukan antara pihak militer yang membantu PKI dan AD akan terjadi di Jakarta di mana, sayangnya, “perwira-perwira progresif” di pusat angkatan bersenjata menjadi titik terlemah mereka. Karena itu, adalah perlu, kata Aidit, untuk memobilisasi kekuatan-kekuatan di bagian-bagian lain negeri ini dimana PKI dan sekutu-sekutunya dalam angkatan bersenjata berada dalam posisi yang lebih kuat.

“Pengaruh partai dalam angkatan bersenjata (di masing-masing daerah, Ed.) secara umum tercermin dalam kekuatan partai di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pengaruh kita di Jawa bagus, kecuali di Jakarta, dan (pengaruh, Ed.) yang terbaik kita adalah di Jawa Tengah. Mengenai detail-detail perimbangan kekuatan itu tidak dapat saya jelaskan secara panjang lebar, dan akan sangat berbahaya untuk mengungkapkan nama perwira-perwira tersebut. Kalau-kalau kita diinterogasi dan disiksa, tidak jelas apakah kita cukup kuat untuk menjaga rahasia itu. Jadi, jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.”¹⁰⁶

Di sini rupanya Aidit mengacu pada kinerja kelompok komando itu, yang telah ia instruksikan pada Sjam untuk dibentuk pada 12 Agustus, untuk mengumpulkan intelijen mengenai perimbangan kekuatan militer relatif di masing-masing propinsi, dan untuk mengevaluasi perimbangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berbicara panjang lebar mengenai posisi “perwira-perwira revolusioner” dalam angkatan bersenjata yang bersedia menyerang pucuk pimpinan AD, Aidit menyatakan bahwa “perwira-perwira yang akan mengambil inisiatif itu pada umumnya agak ragu-ragu. Jika Presiden Sukarno mengutuknya, aksi itu tidak akan berhasil.”¹⁰⁷ Pada titik ini, Aidit mengungkapkan pada anggota-anggota Politbiro evaluasinya sendiri mengenai perimbangan kekuatan dalam AD; ia

cukup optimistik.

“AD tidak kompak, dan kemampuannya untuk bertindak sebagai satu kekuatan yang padu dihalangi oleh fakta bahwa Nasution dan Yani tidak sepakat mengenai timing kudeta itu. Perpecahan dalam AD diperparah lagi oleh adanya sekelompok perwira progresif yang menentang Dewan Jenderal. Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian bisa dinetralisir, sebab mereka harus mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Tetapi AURI akan mendukung PKI dan bahkan memberikan fasilitas-fasilitas. Perimbangan kekuatan menguntungkan para perwira yang berpikiran maju. Seberapa besar kekuatan yang ada pada kendali perwira-perwira ini? Sepertiga? Jika begitu masalahnya, maka baguslah itu sebab pengalaman dengan kudeta-kudeta di seluruh dunia menunjukkan bahwa sepertiga dari angkatan bersenjata selalu ada di belakang inisiator mereka, dan jika massa mendukung tindakan mereka, kudeta itu sudah pasti berhasil.”¹⁰⁸

Terhadap sebuah pertanyaan apakah tindakan yang direncanakan itu akan sukses jika dilaksanakan hanya di luar Jawa, ia menjawab bahwa “Pada hemat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa saja yang menguasai Jawa akan menang,” karena tahu persis dari Sjam bahwa para perwira revolusioner akan menguasai Jawa Tengah dan Timur, sementara selama kunjungannya ke Bandung sehari yang lalu ia memperoleh janji dari Mayjen Rukman bahwa Divisi Siliwangi, dan kekuatan-kekuatan di Jawa Barat, akan dinetralisir. “Lihatlah pemberontakan PERMESTA,” lanjut Aidit, “yang praktis menguasai beberapa pulau di luar Jawa, tetapi karena mereka tidak melibatkan Jawa, mereka gagal.” Setelah diskusi yang agak panjang lebar mengenai berbagai aspek keseimbangan kekuatan, sebagaimana dikemukakan pada Politbiro oleh Aidit, anggota-anggotanya sependapat dengan pandangannya.

Meskipun begitu, terlepas dari evaluasinya yang optimistik mengenai korelasi antara kekuatan-kekuatan di negeri itu, tetapi yang terpenting mengenai perimbangan kekuatan antara perwira-perwira progresif dengan komando puncak AD, Aidit mengetengahkan sedikit keraguan mengenai hasil dari konfrontasi mereka, sebab ia kembali pada masalah kesiapan mental perwira-perwira progresif itu untuk menyerang atasan mereka sendiri. Untuk mengatasi “kelemahan” dan halangan-halangan moral ini, sebab mereka akan menghantam perwira-perwira teman mereka sendiri, Aidit mengatakan bahwa PKI sudah menyediakan bagi mereka sejumlah personil Pemuda Rakjat untuk mendapat latihan militer di Lubang Buaya, dan mengisyaratkan “orang-orang sipil

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

berdarah panas” ini yang akan melaksanakan pekerjaan kotor membunuh jenderal-jenderal yang tertangkap, setelah mereka ditahan oleh tentara berseragam. Orang-orang itu, yang kesemuanya berjumlah 3.000 orang, telah dilatih oleh AURI selama sebulan sebelumnya sebagai sukarelawan untuk konfrontasi melawan Malaysia, dan Njono bertugas mengkoordinasi aktivitas-aktivitas mereka dengan setiap aksi bersama PKI dan perwira-perwira progresif itu, untuk melawan komando puncak AD.

Tujuan operasi itu sudah cukup jelas. Karena pembunuhan yang aktual terhadap para jenderal itu akan dilaksanakan oleh orang-orang sipil sebagai suatu “pengadilan revolusioner,” maka kedok legal itu akan mengurangi beban pikiran dan beban moril personil militer Untung, dan jika perlu, tidak langsung terlibat dalam pembunuhan atasan dan sesepuh-sesepuh mereka sendiri. Selain itu, dan barangkali karena alasan-alasan doktrinal, elemen rakyat, orang-orang revolusioner itu sendirilah yang akan melaksanakan tindakan yang paling penting dari keseluruhan perjuangan untuk membuka jalan menuju transformasi negeri itu secara revolusioner.

Setelah memberitahu rapat itu bahwa sekelompok perwira progresif-revolusioner yang bersedia mengobrak-abrik kekuatan AD telah mengundang kerjasama partai dalam perjuangan mereka, dan setelah mengetengahkan pada rapat itu pandangan bahwa serangan mereka akan sukses karena perimbangan kekuatan di Jawa lebih menguntungkan mereka, dan akhirnya setelah menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh partai di bawah komando Njono di Lubang Buaya untuk memantapkan tekad perwira-perwira progresif-revolusioner untuk membasmi jenderal-jenderal mereka sendiri, maka Aidit kemudian berpaling pada kolega-koleganya dan menanyakan apakah “rapat ini setuju bahwa perwira-perwira itulah yang akan mengambil inisiatif?” sebagaimana kesaksian Pardede, karena tidak seorangpun menjawab, Aidit berkata, “Kalau begitu, apakah rapat ini setuju untuk menyerahkan masalah itu pada Dewan Harian Politbiro?”, yang berarti Politbiro mendelegasikan kekuasaan pembuatan keputusannya atas masalah itu pada Dewan Harian, yaitu Komite Tetap-nya. Dan karena sekali lagi tidak ada jawaban, maka Aidit menyimpulkan, “Oke, kalau begitu serahkan saja pada Dewan Harian!”¹⁰⁹ Dengan kesepakatan yang tersirat itu, karena tidak seorang pun berkeberatan, dan tidak ada suara menentang yang diajukan, maka soal itu dianggap telah disepakati.

Rapat kemudian membuat tiga keputusan besar. Pertama, Presiden akan diberitahu bahwa Dewan Jenderal tengah merencanakan kudeta terhadapnya

Politbiro dan Rencana Besarnya

pada 5 Oktober untuk merebut kekuasaan, bahwa sekelompok perwira progresif-revolusioner yang menentang para jenderal itu siap menggagalkannya dan membela Presiden dengan sebuah tindakan *pre-emptive*, dan perwira-perwira itu akan bertindak setelah menerima dukungan Presiden. Kedua, menyusul penyingkiran perwira-perwira reaksioner itu, suatu Dewan Revolusi untuk sementara akan mengambil-alih kekuasaan tertinggi di negeri itu, Kabinet Dwikora akan dibubarkan dan diganti dengan sebuah Kabinet Gotong Royong, yang akan ditunjuk oleh Presiden. Kabinet ini akan mampu menahan segala macam tekanan orang-orang reaksioner sebab kabinet itu akan mengerahkan semua kekuatan progresif di negeri itu untuk berdiri di belakang Presiden. Karena itu, beberapa pemimpin politik sayap-kiri terkemuka, sebagai individu, akan didekati untuk mengamankan dukungan politik mereka dalam menentang Dewan Jenderal, dengan imbalan keanggotaan dalam Kabinet Gotong Royong mendatang. Ketiga, semua organisasi partai regional dan lokal di seantero negeri akan diberitahu mengenai bahaya kudeta oleh Dewan Jenderal itu, dan disiagakan untuk mengantisipasi operasi-operasi darurat PKI guna menggagalkan kudeta tersebut, serta bersiap-siap memobilisasi anggota-anggota mereka guna menumpas setiap usaha oleh kekuatan-kekuatan reaksioner yang menghalang-halangi transisi menuju pemerintahan Gotong Royong.¹¹⁰

Seusai rapat itu Aidit menemui Presiden, dan meskipun tidak ada catatan resmi mengenai diskusi mereka, adalah masuk akal untuk berasumsi bahwa Aidit menyampaikan keprihatinan-keprihatinan Politbiro mengenai kudeta di waktu dekat oleh jenderal-jenderal yang tidak loyal itu, kesiapan perwira-perwira loyal untuk melancarkan serangan *pre-emptive* melawan mereka tetapi atas perintah Presiden, dan keputusan PKI untuk mendukung setiap tindakan yang mungkin akan diambil Presiden terhadap para jenderal itu. Akhirnya, sambil memberitahukan keputusan-keputusan Politbiro pada 26 Agustus, Aidit tidak diragukan lagi menandakan perlunya Presiden menunjuk suatu Kabinet Gotong Royong menyusul pembersihan para jenderal. Aidit meninggalkan Istana Merdeka dengan keyakinan bahwa Presiden memahami hal itu, siap untuk memerintahkan perwira-perwira loyal untuk melancarkan serangan *pre-emptive*, dan menunjukkan tekad untuk “memperbaharui pemerintahannya dengan mengikuti garis Kabinet Gotong Royong terlepas dari desakan kuat yang dihadapkan padanya oleh Dewan Jenderal.”¹¹¹ Jadi di sini lingkaran itu menjadi sempurna, karena Aidit tahu dari Heru, sebagaimana dicatat di muka, bahwa Presiden telah menanyai Untung pada 4 Agustus berani apa tidak untuk menangkap jenderal-jenderal tidak loyal yang menentang kebijakan-kebijakan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Sukarno, dan telah memerintahkan dia untuk melakukan semua persiapan yang diperlukan guna melaksanakan hal itu.

Tidak banyak keraguan bahwa pertemuan antara Presiden dengan Aidit, menyusul keputusan-keputusan Politbiro pada 26 Agustus, menjalin aliansi strategis di antara ketiga pemain utama dengan jalan menambahkan unsur terakhir pada segitiga itu. Ketika menemui Presiden di Bogor pada 8 Agustus, Aidit telah menyampaikan pesan-pesan Mao yang berkaitan dengan perjanjian Presiden dengan Peking. Sekarang ia berbicara dengan Presiden dengan otoritas Politbiro, sambil menyampaikan jaminan dukungan Politbiro atas setiap tindakan yang mungkin akan ia perintahkan dan atas langkah-langkah lebih lanjut, dan dengan demikian membuat solid persekutuan Presiden dengan PKI. Sekarang segitiga strategis itu lengkap sudah.

Menyusul rapat Politbiro 26 Agustus itu, PKI melakukan pendekatan-pendekatan pada PNU, Partindo, dan sebuah partai Muslim kecil Perti untuk mendapatkan dukungan politik mereka bagi tindakan Presiden yang tidak lama lagi akan diambil atas para jenderal, tetapi, yang lebih penting lagi, untuk mengamankan jaminan dukungan dari beberapa pemimpin keagamaan dan nasionalis yang progresif, sebagai individu, untuk keanggotaan dalam pemerintahan kabinet Gotong Royong mendatang.

Meskipun 26 Agustus merupakan hari yang sangat panjang bagi Aidit, ia mengundang Sjam untuk menghadiri rapat mendesak di rumahnya malam itu. Di sana ia menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Politbiro kepadanya di awal hari itu juga, sebagai ketua Komite Tetap, yang menyangkut kewenangan partai untuk diberikan pada perwira-perwira progresif-revolusioner untuk jalan terus dengan serangan *pre-emptive* membersihkan pucuk pimpinan Angkatan Darat. Ketika bertemu Sjam pada pukul 22.00, Aidit pertama-tama menyetujui nama-nama para perwira “Komando Pembersihan” itu, dan pembagian tanggungjawab mereka, yang disodorkan padanya oleh Sjam sesuai dengan instruksi Aidit pada 12 Agustus, sebagaimana akan diingatkan kembali. Lebih jauh Aidit memberi wewenang pada Sjam untuk memprakarsai rapat-rapat dengan anggota-anggota militer untuk menjelaskan pada mereka segala hal-hal operasi, peranan mereka di situ, dan setelah mengamankan kesepakatan mereka, mengundang mereka untuk merencanakan detail-detail teknis militer penculikan. Mula-mula, kata Aidit, Sjam harus mendekati masing-masing anggota militer itu secara sendirian, tetapi pada waktu yang tepat memperkenalkan mereka pada anggota-anggota lain dari Biro Khusus, setelah itu rapat-rapat gabungan harus diselenggarakan. Lebih jauh Aidit membriefing

Politbiro dan Rencana Besarnya

Sjam tentang keputusan Politbiro untuk mengganti Kabinet Dwikora yang ada dengan sebuah Dewan Revolusi menyusul pembersihan terhadap para jenderal, dan menginstruksikan Sjam untuk merancang sebuah usulan yang menyangkut keanggotaannya, bentuk organisasinya, dan aktivitas-aktivitasnya.¹¹²

RAPAT KETIGA POLITBIRO: MARKAS BESAR PKI, KRAMAT RAYA 81 DI JAKARTA: 28 AGUSTUS

Rapat ketiga Politbiro PKI, yang dibuka pada 28 Agustus 1965 malam, kembali diselenggarakan di markas besar partai di Kramat Raya 81 di Jakarta. Rapat yang diperluas itu dihadiri oleh Aidit, Lukman, Sudisman, Sakirman, Anwar Sanusi, Njoto, dan Njono. Peris Pardede dan Suwandi alias Djojo alias Seger, Sekretaris CDB untuk Jawa Timur, berpartisipasi sebagai tamu undangan.

Di sini, menurut Sudisman, keputusan-keputusan resmi dibuat “dengan suara bulat”¹¹³: 1) operasi PKI melawan para jenderal itu harus dilakukan tanpa ditunda lagi; 2) itu adalah operasi pembersihan pucuk pimpinan AD, yang akan dilaksanakan oleh para perwira progresif-revolusioner sendiri; 3) pembersihan itu akan menghasilkan sebuah Dewan Revolusi, sebuah otoritas baru tetapi bersifat sementara di negeri ini, yang akan secepatnya membubarkan Kabinet Dwikora yang sudah ada; 4) untuk menggantikan struktur lama, Presiden akan menunjuk sebuah Kabinet Gotong Royong dengan Aidit sebagai perdana menteri; 5) sementara Komite Tetap Politbiro, yang terdiri dari D.N. Aidit, M.H. Lukman dan Njoto, akan mengarahkan seluruh operasi itu, pelaksanaan aspek politis dan militernya akan mengikuti garis komando tunggal yang ditempatkan di tangan Aidit; 6) Njono, sebagai ketua Komite Jakarta Raya PKI, akan mengerahkan kekuatan para-militer cadangan yang terdiri dari 2.000 anggota Pemuda Rakyat, yang pada waktu itu sedang menjalani latihan militer oleh AURI di Lubang Buaya, yang bisa diperbantukan pada perwira-perwira revolusioner saat menghabisi para jenderal.¹¹⁴

Rapat kemudian mendiskusikan aspek-aspek militer, politis, dan teknis dari operasi itu, juga persiapan-persiapan untuk operasi-operasi serupa yang akan dilaksanakan di masing-masing propinsi di seluruh negeri. Badan-badan lokal yang bertugas melakukan persiapan untuk menculik komando-komando AD lokal adalah Biro-biro Penghubung Regional. Di bawah pengarahan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Sudisman, biro-biro itu beroperasi di semua wilayah utama Indonesia, menyampaikan instruksi-instruksi Politbiro dari Jakarta ke CDB PKI. Sudisman pertama-tama mengarahkan pekerjaannya dari sekretariat PKI di Kramat Raya dan kemudian dari markas besar darurat partai yang ia dirikan di Kayuawet pada 25 September, dengan memerintahkan anggota-anggota CC ke daerah-daerah khusus untuk mengarahkan operasi-operasi lokal. Maka Lukman pergi ke Semarang dan Ir. Sakirman ke Yogyakarta di Jawa Tengah; Rusain Widjajasastra, Munir dan Asmu ke Surabaya di Jawa Timur; Suwardiningsih ke Palembang di Sumatra Selatan, dan Peris Pardede ke Medan di Sumatra Utara. Njoto mengikuti rombongan Dr. Subandrio ke Sumatra pada 28 September,¹¹⁵ dengan sebuah pesawat terbang yang diparkir di Medan, mungkin untuk membawa Presiden ke tempat peristirahatannya di Cina, setelah menunjuk Kabinet Gotong Royong, dengan Aidit sebagai perdana menteri. Sebagaimana dicatat di muka, Chen Yi telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan yang tenang untuk Presiden di Danau Angsa, suatu tempat di Cina, di situ Presiden akan menerima perawatan medis terbaik untuk memulihkan kesehatannya, setelah penempatan PKI ke pucuk kekuasaan setelah sukses membesihkan pucuk pimpinan AD oleh Untung cs.

Instruksi-instruksi pertama dari Central Biro Khusus di Jakarta kepada Biro-biro Penghubung Regional selesai dikirim tanggal 21 Agustus. Instruksi-instruksi itu menyiagakan badan-badan lokal mengenai bahaya kudeta terhadap Presiden dalam waktu dekat oleh Dewan Jenderal, mengarahkan partai dan organisasi-organisasi massa untuk memobilisasi anggota-anggota mereka agar siap bertindak jika diperintahkan untuk menggagalkan kudeta tadi, dan menunggu sebuah pengumuman lewat Radio Republik Indonesia bahwa kudeta itu telah dihancurkan dan sebuah Dewan Revolusi telah ditetapkan di Jakarta. Setelah mendengar isyarat dari Jakarta, bukan sebelum itu, tindakan-tindakan lokal mereka harus dimulai. Keesokan harinya, 22 Agustus, Sjam, Pono dan Walujo mengadakan rapat di rumah Sjam dan memutuskan bahwa para pemimpin dari semua Biro Propinsi harus dipanggil ke Jakarta, satu per satu, untuk dibriefing oleh Sjam, dan briefing itu akan dimulai pada pertengahan September. Sesuai dengan rencana, Sjam di rumahnya membriefing Endo Sulistio dari Jakarta Raya; Nazir alias Amin dari Sumatra Utara; Burhanudin Hanafi, alias Rivai, dari Sumatra Barat; Haryana dari Jawa Barat; Salim dari Jawa Tengah; dan Hasjim dari Jawa Timur.¹¹⁶

KOMANDO-KOMANDO KELOMPOK UNTUK MEREBut KEKUASAAN DI SELURUH NEGERI

Segera sesudah keputusan-keputusan resmi diambil oleh Politbiro PKI di Jakarta pada 28 Agustus untuk menculik para jenderal, instruksi-instruksi yang menyangkut persiapan-persiapan di daerah-daerah menjadi lebih spesifik. Pada akhir Agustus Sjam memberitahu Mohammad Nazir, yang mengepalai Biro Penghubung Regional di Sumatra Utara, bahwa untuk melawan kudeta para jenderal dan konsekuensi-konsekuensinya yang luas secara nasional, semua Biro Penghubung Regional harus mengorganisir Komando-komando Kelompok lokal dan Dewan-dewan Revolusi Propinsi.¹¹⁷ Sementara semua persiapan harus dibuat di muka dan secara diam-diam, kedua lembaga itu baru boleh bertindak setelah mendengar lewat radio bahwa suatu Dewan Revolusi telah dibentuk di Jakarta. Komando-komando Kelompok itu, yang terdiri dari para perwira progresif, akan membersihkan komando-komando AD lokal dan menghilangkan dari mereka semua elemen anti-komunis. Dewan-dewan Revolusi propinsi kemudian akan membubarkan struktur-struktur pemerintahan yang ada yang berfungsi di semua tingkat, dan mengambil-alih kendali atas pemerintahan propinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintahan rakyat yang terbentuk di seluruh negeri itu akan membuka jalan menuju Demokrasi Rakyat dan sosialisme.

Persiapan-persiapan paling intensif, untuk menciptakan perkembangan itu, dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dua kubu terkuat PKI di negeri itu. Di Jawa Tengah, Rewang, anggota CC PKI, memimpin persiapan-persiapan itu, sementara Dahlan Ravi, anggota Central Secretariat, bekerja di Jawa Timur. Pekerjaan yang sangat intensif dilakukan di Sumatra Utara, Tengah dan Selatan, dimana kehadiran elemen-elemen anti-komunis dalam AD secara tradisional kuat, untuk mencegah tidak hanya kemungkinan mereka menggagalkan perebutan kekuasaan lokal tetapi juga, yang terpenting, kemungkinan intervensi bersenjata oleh mereka dalam operasi-operasi yang dilakukan oleh PKI di Jakarta. Dan sejauh menyangkut Jawa Barat, kita telah melihat Mayjen Rukman menjanjikan pada Sjam di Bandung pada 25 Agustus untuk menetralkan Divisi Siliwangi, dan kekuatan-kekuatan lain yang ditempatkan di sana.

Sementara aparat PKI tengah meletakkan pondasi bagi pembentukan Dewan-dewan Revolusi Propinsi, Sjam dan perwira-perwira progresif di Jakarta mengirim operator-operator mereka sendiri dalam angkatan bersenjata ke masing-masing propinsi untuk mendirikan Komando-komando Kelompok sehingga pembersihan para perwira AD lokal bisa dilakukan oleh personil AD

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

lokal, tanpa keterlibatan langsung anggota-anggota PKI lokal.

Dengan demikian pada akhir September 1965 sebuah jaringan kelompok-kelompok persekongkolan militer dan politis ada di seantero negeri. Semua dibentuk oleh Biro Khusus, yang menunggu pengumuman lewat radio nasional bahwa sebuah Dewan Revolusi telah dibentuk di Jakarta, untuk merampas kendali atas pemerintahan lokal di semua tingkat.

Terlepas dari persiapan-persiapan terperinci yang dilakukan oleh Biro Khusus untuk merebut kekuasaan di semua wilayah utama negeri itu, karena instruksi-instruksi penting diberikan secara lisan melalui saluran-saluran intern Biro dan para perantaranya, CC PKI mengantisipasi bahwa di beberapa daerah, dimana “perimbangan kekuatan” tidak menguntungkan para perwira progresif-revolusioner, usaha-usaha untuk merebut kekuasaan mungkin gagal. Mengingat hal itu, dan dengan melanggar prosedur kerahasiaannya sendiri, CC kemudian mengeluarkan sebuah memorandum tertulis kepada semua organisasi regionalnya pada 28 September 1965, yang menginstruksikan pada mereka apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi pada saat yang sama menginstruksikan mereka agar membakar teks itu secepatnya setelah dibaca. Memorandum itu menginstruksikan para pemimpin partai untuk berpura-pura secara sukarela membubarkan organisasi, menyerah di hadapan orang-orang reaksioner, dan menandatangani (bila perlu dengan darah) pernyataan apapun yang mereka tuntutan, tetapi menyembunyikan senjata-senjata dan menunggu kedatangan pasukan-pasukan bersahabat yang akan membebaskan mereka. Pasukan-pasukan pembebas itu harus diberi akomodasi dengan benar, ditunjukkan tempat-tempat penyimpanan senjata, dan diberi daftar nama musuh-musuh rakyat yang harus dienyahkan (DOKUMEN No.3).

Meskipun begitu, dan terlepas dari peringatan untuk berhati-hati yang diungkapkan dalam memorandum di atas, CC PKI begitu yakin bahwa jalan pintasnya menuju kekuasaan, Rencana Besar itu, akan sukses sehingga tidak mengembangkan rencana ofensif alternatif apapun karena, sebagaimana Aidit biasa menjawab orang-orang yang menanyakan tentang hal itu, “itu tidak perlu.” CC hanya mengeluarkan *PLAN K** pada 25 September 1965, seperangkat instruksi lisan untuk operasi-operasi defensif dan penyelamatan jika terjadi kegagalan, yang kemungkinannya kecil, dalam tahap-tahap awal dari upaya

* red YOI: Istilah yang dipakai Aidit dalam Dokumen No. 2: “program K”

Politbiro dan Rencana Besarnya

merampas kekuasaan itu secara lokal. Rupanya rencana itu menuntut suatu “kampanye kilat” humas intensif untuk mencap GESTAPU sebagai “masalah intern Angkatan Darat”, usaha dengan cepat melepaskan partai dari “masalah” ini di semua tingkatan, berdiri dengan teguh disamping Presiden dengan segala pengorbanan dan bekerja dengannya untuk mencapai “penyelesaian politik” bagi masalah-masalah berikutnya, dan menjauhkan partai dari anggota-anggotanya yang “tertangkap basah” dalam masalah itu, dengan menuduh mereka melakukan aktivitas-aktivitas tanpa otorisasi untuk melindungi legalitas dan ketidak-bersalahan partai. Beberapa dari individu-individu itu akan dikorbankan dengan jalan secara terbuka mengusir mereka dari partai karena melanggar disiplin partai. Meskipun penulis ini tidak berhasil mendapatkan salinan dari *PLAN K* tersebut, rencana yang dikemukakan oleh Aidit dalam suratnya *Instruksi-instruksi Tetap Central Committee Partai Komunis Indonesia* (DOKUMEN No. 2), tertanggal 10 November 1965, mengetengahkan beberapa hal mengenai *PLAN K*.



VI

JADUAL KUDETA: RINCIAN LANGKAH-LANGKAHNYA

SEPULUH KALI RAPAT “KOMANDO PEMBERSIHAN”: 6-30 SEPTEMBER

Setelah Politbiro PKI secara aklamasi menyetujui Rencana Besar itu pada 28 Agustus 1965, implementasinya diserahkan ke tangan tiga anggota Komite Tetap-nya –Aidit, Lukman, dan Njoto—dengan Aidit memainkan peran sentral sebagai kepala Biro Khusus. Setelah diberi mandat oleh Aidit pada 26 Agustus untuk memulai persiapan-persiapan realisasinya, maka Sjam menemui masing-masing anggota militer dari “Komando Pembersihan” itu secara terpisah untuk menjelaskan hal ihwal operasi itu, mengevaluasi masing-masing secara pribadi apakah cocok untuk tugas itu dan kemudian mengundang mereka untuk merencanakan aspek-aspek teknis militernya, dengan membuka rapat gabungan pertama di rumah Wahjudi pada 6 September 1965. Antara tanggal itu dengan D-Day 1 Oktober 1965, para konspirator itu bertemu sepuluh kali untuk menyempurnakan detail-detail teknis militer dari Rencana Besar yang telah disetujui Politbiro pada 26 Agustus itu, dan yang disampaikan kepada Sjam oleh Aidit pada malam hari itu.

Karena kesaksian-kesaksian Sjam di depan pengadilan militer memberi kita pemaparan yang boleh dikatakan lengkap dari hari-ke-hari mengenai diskusi-diskusi dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam rapat-rapat itu, maka menjadi mungkinlah bagi kita untuk merekonstruksi anatomi kudeta itu dengan segala langkah-langkah rinciannya dengan akurasi yang lumayan besar.¹¹⁸ Dalam hal ini Rencana Besar memberi kita suatu bukti dokumenter untuk

Jadual Kudeta: Rincian Langkah-langkahnya

sebuah studi kasus yang menarik mengenai mekanika suatu kudeta yang dicoba oleh sebuah partai komunis, karena fakta bahwa setelah kegagalannya di Jakarta, para pelakunya ditangkap, dan berdasarkan bukti yang diperoleh, diadili dalam pengadilan terbuka dan tidak langsung ditembak mati, sebagaimana biasa terjadi dalam banyak contoh serupa. Sayangnya, tidak banyak yang bisa kita pelajari mengenai mekanika dari perebutan kekuasaan jenis seperti ini dari kudeta-kudeta yang pernah sukses, sebab para pemenang biasanya menghancurkan bukti-bukti untuk menghilangkan jejak setelah mereka berkuasa. Perebutan kekuasaan oleh orang-orang komunis di Praha dalam bulan Februari 1948, yang menggulingkan Presiden Edward Benes, adalah contoh yang bagus, karena alasan-alasan sesungguhnya yang membuat Benes menyerah pada Gottwald pada waktu itu masih tetap membingungkan para sejarawan periode itu sampai sekarang.¹¹⁹

RAPAT PERTAMA: 6 SEPTEMBER¹²⁰

Rapat gabungan pertama dari para konspirator itu, yang mewakili anggota-anggota Biro Khusus dan para perwira militer, diselenggarakan di rumah Wahjudi, Jalan Sindanglaja, Jakarta, pada 6 September 1965, pukul 8 malam. Rapat itu dihadiri oleh Sjam, Pono, Letkol Infanteri Untung, Kolonel Infanteri A. Latief, Mayor Udara Sujono, Mayor Infanteri Agus Sigit dan Kapten Artileri Wahjudi. Setelah saling memperkenalkan diri, Pono mempersilakan Sjam sebagai seorang pemimpin terkemuka PKI, yang mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan situasi yang ada di negeri itu dengan jalan mengulangi argumen yang telah ia terima dari Aidit: sakitnya Presiden, rencana Dewan Jenderal untuk melakukan kudeta pada 5 Oktober untuk menggulingkan Presiden, perlunya tindakan *pre-emptive* untuk menggagalkannya, yang akan diorganisir dan dipimpin oleh orang-orang yang dikumpulkan itu. Sjam kemudian meminta pada masing-masing yang hadir untuk memikirkan analisisnya mengenai situasi tersebut, dan minta agar mereka siap tampil ke depan pada rapat berikutnya sambil membawa komentar-komentar dan saran-saran mengenai alur tindakan yang telah direncanakan itu.

Selama diskusi yang berlangsung kemudian semua orang menerima analisis Sjam, tidak menanyakan bukti yang menyangkut keberadaan Dewan Jenderal dan rencananya itu, dan sepakat bahwa persiapan-persiapan untuk serangan *pre-emptive* untuk menangkalnya harus dilaksanakan oleh kelompok itu secepatnya.

RAPAT KEDUA: 9 SEPTEMBER¹²¹

Rapat ini kembali digelar di rumah Wahjudi dan dihadiri oleh Sjam, Pono, Untung, Latief, Sujono, Sigit dan Wahjudi. Sjam membuka rapat dengan menanyakan semua yang hadir pandangan mereka mengenai keputusan-keputusan dari rapat terakhir, dan ketika semua menyepakati keputusan-keputusan itu, ia mengarahkan diskusi untuk mengevaluasi kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan dalam operasi. Sehubungan dengan hal ini, Latief dan Sujono menyarankan agar operasi itu dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan yang bersahabat di Jakarta, misalnya 4 kompi BRIMOB, 2 kompi Brigade Infanteri, dan 3 kompi Tjakrabirawa. Rapat memutuskan bahwa suatu evaluasi akan dilakukan mengenai sesuainya pasukan-pasukan yang diusulkan untuk melaksanakan tugas itu, dan bahwa calon-calon lain akan juga dipertimbangkan. Selain itu, akan dibuat suatu penilaian mengenai pasukan-pasukan mana saja yang bisa diantisipasi akan berpihak kepada Dewan Jenderal dan menentang serangan *pre-emptive* tadi. Diskusi ditutup dengan sebuah catatan bahwa pada rapat berikutnya dari kelompok itu akan dibuat suatu evaluasi mengenai perimbangan kekuatan pasukan-pasukan itu, yang akan saling berhadapan satu sama lain dalam konfrontasi tak terelakkan yang sebentar lagi akan terjadi.

RAPAT KETIGA: 13 SEPTEMBER¹²²

Rapat ini, yang dihadiri oleh orang-orang yang sama dengan rapat sebelumnya, diselenggarakan di rumah Latief di Jalan Tjawang, Jakarta. Setelah mengulas keputusan-keputusan dari dua rapat terdahulu, mereka yang hadir di situ membuat sebuah penilaian positif pada pasukan Tjakrabirawa, yang akan digerakkan di bawah komando Untung, batalyon yang ada di bawah komando Sigit, dan unit artileri. Organisasi pasukan pemukul ini, dan detail-detail pengerahannya, akan diputuskan pada rapat berikutnya.

RAPAT KEEMPAT: 15 SEPTEMBER¹²³

Rapat itu, yang juga diselenggarakan di rumah Latief, dihadiri oleh orang-orang yang sama dengan rapat terakhir, kecuali Sigit. Mengingat ketidakhadirannya

Jadual Kudeta: Rincian Langkah-langkahnya

menimbulkan keraguan mengenai partisipasi pasukannya dalam operasi itu, Sjam mengamankan janji-janji dari Untung, Sujono, dan Latief bahwa pasukan mereka harus betul-betul bisa diandalkan untuk ikut ambil bagian dalam operasi. Sehubungan dengan hal itu, Latief mengajukan diri untuk menemui Sigit guna memastikan bahwa ia dan pasukannya akan siap sedia. Sementara Wahjudi memperingatkan hadirin bahwa sampai sejauh itu ia belum bisa mengkonfirmasi partisipasi pasukannya sendiri, ia memastikan pada Sjam bahwa ia secara pribadi mempunyai komitmen pada aksi itu dan akan bekerjasama dalam realisasinya dengan segala cara yang mungkin. Sjam memberitahu hadirin bahwa dua batalyon dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tak lama lagi akan tiba di Jakarta untuk ambil bagian dalam perayaan Hari Angkatan Bersenjata yang akan diselenggarakan pada 5 Oktober. Laporan-laporan awal mengisyaratkan bahwa pasukan mereka bisa diandalkan untuk memberikan dukungan bersenjata pada serangan *pre-emptive* untuk menculik para jenderal, kata Sjam, sambil berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut pada waktunya nanti.

RAPAT KELIMA: 17 SEPTEMBER¹²⁴

Semua anggota “Komando Pembersihan”, sebagaimana dalam rapat terakhir, berkumpul lagi di rumah Latief. Diskusi kembali difokuskan pada ketersediaan pasukan-pasukan yang bisa diandalkan untuk serangan itu, karena hal ini tergantung pada orientasi ideologis perwira-perwira komandan mereka dan pengaruh mereka terhadap anak buah. Menurut evaluasi terakhir, sebagaimana dilaporkan oleh Untung, kesatuan-kesatuan berikut ini akan berpartisipasi dalam operasi itu: 1) satu kompi di bawah Untung; 2) satu batalyon di bawah Latief; satu kompi di bawah Wahjudi; 4) sekitar 800 sampai 1.000 sukarelawan yang dilatih di Pondok Gede di bawah Sujono, yang mengatakan bahwa walaupun ia telah melatih sekitar 3.000 sukarelawan sejak September lalu, ia membutuhkan waktu 10 hari lagi untuk membuat pasukan yang terdiri dari 1.000 orang itu betul-betul siap tempur; 5) Batalyon 454 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah; 6) Batalyon 530 dari Divisi Brawidjaja Jawa Timur. Penempatan pasukan-pasukan itu akan diputuskan pada rapat berikutnya. Untung bersikeras bahwa harus diupayakan untuk mendapatkan sebuah kesatuan kavaleri yang terdiri dari sekitar 30 tank dan kendaraan lapis baja lain dari Divisi Siliwangi, yang disiapkan di Bandung, untuk mendukung serangan itu. Ini akan secara

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

substansial memperkuat daya gempur pasukan pemukul itu, khususnya jika terjadi komplikasi-komplikasi yang bisa menggagalkan operasi, dan untuk menekan perlawanan, karena alasan ini, tank-tank itu akan menjadi cadangan strategis untuk seluruh operasi. Rupanya tidak ada langkah lebih lanjut yang diambil dalam arah ini, karena kemungkinan besar Sjam menyebutkan kunjungannya dengan Aidit ke Bandung pada 25 Agustus, dimana mereka telah mendapatkan janji Mayjen Rukman tentang upaya menetralsir Divisi Siliwangi dan pasukan-pasukan lain di Jawa Barat.

RAPAT KEENAM: 19 SEPTEMBER¹²⁵

Sjam menyelenggarakan rapat ini di rumahnya, Jalan Salemba Tengah, Jakarta, yang dihadiri oleh semua kecuali Sigit, yang oleh Latief dilaporkan sedang sakit.

Sebagian besar diskusi menyangkut salah satu aspek yang tak kalah penting dari keseluruhan operasi, yaitu logistik untuk mengamankan partisipasi Batalyon 454 dan 530 dalam aksi itu. Di sini Sjam menjelaskan bahwa segera sesudah diketahui bahwa Panitia Perayaan Hari Angkatan Bersenjata yang ditunjuk lebih awal oleh Presiden untuk merencanakan dan kemudian mengorganisir perayaan pada 5 Oktober, telah mengundang kedua batalyon itu ke Jakarta untuk mewakili divisi-divisi mereka, ia mengontak Salim dan Hasim, kepala Biro Khusus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, untuk mendapatkan penilaian mereka mengenai kesetiaan para perwira berikut anak buahnya itu. Kontak-kontak itu ganti melaporkan bahwa kedua batalyon itu punya sejumlah perwira progresif yang berpengaruh besar pada anak buah, sudah merekrut mereka untuk melaksanakan aksi itu, dan merekomendasikan agar mereka dikontak secepatnya setelah tiba di Jakarta. Untuk membedakan antara kawan dari lawan, demikian lapor Sjam, dan memfasilitasi kontak yang aman dengan dia di Jakarta, Salim dan Hasim menggunakan metode identifikasi gaya lama namun bisa diandalkan. Mereka menyobek beberapa potong kertas dalam bentuk tertentu, menyerahkan sebagian kepada para komandan progresif sementara mengirim sobekan-sobekan yang lain pada Sjam melalui saluran-saluran Biro. Setelah itu Sjam kemudian akan menyerahkan sobekan-sobekan itu pada Untung, yang akan menyatukan potongan-potongan itu untuk identifikasi diri para perwira-perwira yang akan datang sebagai kontak yang benar ketika mendekati mereka di barak-barak di Jakarta untuk memberikan instruksi-instruksi mengenai peranan mereka dalam operasi itu.

Jadual Kudeta: Rincian Langkah-langkahnya

Episode ini menjadi salah satu dari aspek-aspek yang paling aneh tentang GESTAPU ini secara keseluruhan. Dengan demikian sementara PKI menonjol-nonjolkan kedatangan Batalyon 454 dan 530 di Jakarta sebagai bukti paling kuat dari rencana kudeta para jenderal itu, ironi terbesar dari situasi itu adalah fakta bahwa para perwira dua batalyon itu telah mereka rekrut, bahkan sebelum tiba di Jakarta, untuk menjadi komponen militer utama sebuah pasukan yang justru hendak menumbangkan para jenderal.¹²⁶

Sjam juga memberitahu orang-orang yang berkumpul itu bahwa seorang jenderal AD telah mengkonfirmasi dukungannya bagi operasi tersebut, tetapi mereka baru akan mengetahui namanya dan bertemu dengannya persis menjelang permulaan operasi. Jenderal itu akan memimpin sebuah delegasi dari keempat angkatan ke Istana Merdeka untuk memberitahu Presiden bahwa sebuah aksi yang diorganisir oleh perwira-perwira loyal untuk “mengamankan” Dewan Jenderal sudah di tengah jalan, dan akan menempatkan Presiden di bawah perlindungan jenderal itu, sebagai langkah berjaga-jaga, untuk menggagalkan setiap rencana jahat terhadap diri Presiden.

Rapat kemudian menyepakati pembagian tanggungjawab yang terkait dengan operasi *pre-emptive* untuk menculik para jenderal: 1) aksi-aksi politik akan diarahkan oleh Sjam dan Pono; 2) Untung dan Latief akan memimpin aksi militer, pasukan mereka akan dipecah menjadi unit pemukul, teritorial, dan cadangan, dan yang disebutkan terakhir akan menyediakan pelayanan komunikasi, transportasi dan dukungan lain. Bono akan mengarahkan operasi intelijen dan pengamatan.

RAPAT KETUJUH: 22 SEPTEMBER¹²⁷

Semua anggota kelompok, kecuali Sigit dan Wahjudi, berkumpul di rumah Sjam pada pukul 20.00 malam hari itu. Di situ sandi-sandi dari Mahabharata diberikan pada masing-masing gugus tugas. Pasukan pemukul (Pasopati) akan dipimpin Letnan Infanteri Dul Arief, tetapi di bawah komando Latief. Pasukan teritorial (Bhimasakti), akan dipimpin Kapten Infanteri Suradi, tetapi di bawah komando umum Latief. Pasukan cadangan (Gatotkaca), akan dipimpin Mayor Udara Gathut Sukrisno, meliputi para sukarelawan yang dilatih di Pondok Gede oleh Sujono. Jakarta akan dibagi menjadi enam sektor militer: utara, tengah, selatan, timur, barat, dan Tanjung Priok.

Rapat kemudian mendiskusikan tugas-tugas operasional dari ketiga kelompok bersenjata tersebut dan memutuskan bahwa Pasopati akan menculik

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

para jenderal dari rumah kediaman mereka, dengan mengantisipasi bahwa kekerasan yang digunakan bisa menimbulkan pertumpahan darah.¹²⁸ Bhimasakti (pasukan territorial), akan mengamankan istana Presiden, stasiun radio, pusat komunikasi, kantor pos, dan objek-objek vital lainnya di kota. Pasukan Gatotkaca akan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas di Pondok Gede, menyediakan sarana komunikasi dan secara umum bertindak sebagai pasukan cadangan. Pada akhir rapat, Sjam memberi kuasa pada Untung untuk mengontak para komandan Batalyon 454 dan 530 setiba mereka di Jakarta pada 25 September, dengan menyerahkan padanya sobekan-sobekan kertas untuk tujuan identifikasi. Sebagaimana direncanakan, Untung mengontak komandan-komandan mereka pada waktunya, dengan memberi mereka tugas menyediakan personil untuk pasukan teritorial Bhimasakti di bawah komando Latief, untuk mengamankan istana Presiden dan objek-objek vital lainnya terutama di sekitar Lapangan Medan Merdeka.

RAPAT KEDELAPAN: 24 SEPTEMBER¹²⁹

Anggota-anggota yang sama dari “Komando Pembersihan” itu, yang hadir dalam rapat terakhir, berkumpul kembali di rumah Sjam pada 24 September pukul 8 malam. Rapat itu mengulas kehandalan pasukan-pasukan sukarelawan yang dilatih oleh Sujono di Pondok Gede dan, setelah mendapati bahwa kinerja mereka cukup memuaskan, sepakat untuk menggunakan mereka dalam operasi itu. Sujono kemudian diberi tugas menemukan tempat yang sesuai untuk Central Komando, atau CENKO. Badan ini akan mengarahkan tahap-tahap awal serangan dan harus ditempatkan dekat dengan Pangkalan Udara Halim, yang menjadi pusat dari seluruh operasi.

Sjam menyampaikan briefing mengenai konsekuensi-konsekuensi dan perkembangan-perkembangan politik sesudah diamankannya para jenderal. Segera sesudah mereka dienyahkan, kata Sjam, sebuah lembaga yang disebut Dewan Revolusi akan dibentuk, yang terdiri dari wakil-wakil dari elemen-elemen progresif dalam masyarakat, membubarkan Pemerintahan Dwikora yang ada, merebut kekuasaan sebagai otoritas tertinggi di negeri itu dan menASAKOM-kan semua institusi publik. Harus diingat bahwa Aidit telah meminta Sjam pada pertengahan September untuk mengusulkan kandidat-kandidat yang sesuai untuk keanggotaan dalam Dewan Revolusi dan bahwa Sjam, setelah memberitahu Pono dan Walujo, mengusulkan agar orang-orang

Jadual Kudeta: Rincian Langkah-langkahnya

berikut ini akan membentuk “Dewan Militer”: Untung, Latief, Supardjo, Heru, Omar Dhani, dan Martadinata. Meskipun begitu, pada waktu itu Aidit menolak konsep “Dewan Militer” karena dianggapnya terlalu sempit, dan mengarahkan Sjam untuk memperluas keanggotaannya dengan memasukkan juga nama tokoh-tokoh progresif terkemuka untuk dicantumkan. Mengingat luasnya cakupan otoritas politik yang akan dimiliki lembaga ini, Aidit menyarankan agar lembaga itu diberi nama Dewan Revolusi.

Orang-orang yang berpartisipasi di dalam rapat itu menerima penjelasan-penjelasan Sjam mengenai perlunya membentuk Dewan Revolusi menyusul pembersihan para jenderal, sebagai pemerintahan baru negeri tersebut, tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Mereka juga menerima tanpa bertanya lagi atas pernyataan Sjam bahwa Untung dan kolega-kolega militernya, akan menjadi anggota Presidium Dewan Revolusi. Hanya Untung yang dengan nada menyetujui menambahkan bahwa ia memahami perlunya membentuk sebuah pemerintahan baru, yang akan didasarkan pada sebuah koalisi nasional luas dari kekuatan-kekuatan NASAKOM.

Arti penting legal dan politis dari rapat ini betul-betul besar. Di sinilah anggota-anggota militer dari kelompok itu melewati batas-batas sempit aksi pembersihan itu, sebagai masalah intern AD, dan dengan menyepakati pembentukan Dewan Revolusi dan menerima keanggotaan dalam lembaga ini berarti menerima program revolusioner PKI menyangkut masa depan negara, dan dengan demikian menempatkan diri mereka sepenuhnya sebagai pelayan partai itu. Di sini kedok GESTAPU, yang ditonjol-tonjolkan sebagai sebuah masalah intern AD, rontok sudah.

RAPAT KESEMBILAN: 26 SEPTEMBER¹³⁰

Rumah Sjam menjadi tempat rapat ini, yang diselenggarakan pada 26 September pukul 9 malam, dengan anggota-anggota yang sama dari “Komando Pembersihan” yang menghadiri rapat dua hari sebelumnya. Sjam mengusulkan agar Halim dijadikan pangkalan, dari situ keseluruhan operasi akan diarahkan. Ruang terbuka di sekitarnya memberikan areal yang sesuai bagi pasukan pemukul untuk berkumpul tanpa menarik perhatian publik, dan karena tempat itu mudah diakses dari luar melalui hubungan-hubungan transportasi yang sangat bagus. Faktor lain dalam memilih Halim adalah kedekatannya dengan Pondok Gede, dimana pasukan sukarelawan telah dilatih oleh Sujono, yang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

bisa dengan mudah dipersenjatai dengan senjata-senjata yang dikeluarkan untuk mereka dari gudang-gudang AURI di dekatnya. Rapat menyetujui usulan Sujono bahwa CENTRAL KOMANDO (CENKO) itu harus ditempatkan di PENAS, yaitu Pusat Survei Udara yang berlokasi sedikit di luar pintu masuk utama Halim, yang nanti disebut CENKO I (GAMBAR I), dari mana operasi penculikan para jenderal akan diarahkan. Setelah itu pusat akan dipindahkan ke wilayah hunian Pangkalan Udara Halim, yang akan disebut CENKO II. Pusat ini akan ditempatkan di rumah Sersan AURI Anis Sujatno di Kompleks Perumahan Bintara (GAMBAR II), yang akan bertindak sebagai markas besar bagi Sjam, Untung, Supardjo, Latief, dan anggota-anggota lain dari Komando Pembersihan.

Satu unsur yang sangat mendesak diperkenalkan dalam rapat itu ketika mendiskusikan keprihatinan Politbiro mengenai konsentrasi sekitar 20.000 anggota pasukan di Jakarta, yang akan berpartisipasi dalam perayaan Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober. Rapat Politbiro, yang juga diselenggarakan pada 26 September, mempertimbangkan kedatangan mereka sebagai suatu perkembangan yang sangat berbahaya, dan mendesak agar serangan terhadap para jenderal harus dilaksanakan sebelum konsentrasi penuh mereka tercapai untuk meminimalisir bahaya campur-tangan mereka dalam operasi itu.

Dengan latar belakang itulah Sjam bersikeras, ketika rapat Komando Pembersihan di rumahnya pada 26 September malam itu, agar semua persiapan operasi dirampungkan secepatnya, dan agar D-Day ditetapkan 29 September. Bertentangan dengan usulan ini, Untung berargumen bahwa operasi itu tidak boleh dilancarkan sebelum dilakukan usaha-usaha lebih lanjut untuk mendapatkan kendaraan lapis baja dari Divisi Siliwangi di Bandung, dan bahwa bagaimanapun juga permulaannya harus ditunda selama satu hari akibat kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam mengumpulkan pasukan Pasopati, dan juga akibat kurangnya kesiapan umum pasukan itu. Sebelum rapat bubar, semua yang hadir sepakat bahwa segala persiapan akan dicek sampai tuntas, dan semua peralatan dan instalasi fisik akan diinspeksi, untuk memastikan agar tidak satu hal lain pun yang tiba-tiba muncul secara tidak terduga.

RAPAT KESEPULUH: 29 SEPTEMBER¹³¹

Kembali Sjam menyelenggarakan rapat itu di rumahnya di Jalan Salemba Tengah di Jakarta pada 29 September pukul 9 malam. Rapat itu dihadiri oleh

Jadual Kudeta: Rincian Langkah-langkahnya

orang-orang yang sama sebagaimana rapat terakhir, dengan satu tambahan penting, yaitu Brigjen Supardjo, yang dipanggil Sjam dari Kalimantan sehari sebelumnya. Sjam memperkenalkan Supardjo sebagai jenderal bintang satu yang akan ikut dalam operasi itu dan memimpin sebuah delegasi dari keempat angkatan bersenjata ke Istana untuk menemui Presiden. Supardjo akan memberitahu Presiden bahwa nyawanya dalam bahaya karena rencana kudeta Dewan Jenderal, bahwa persis pada saat itu sebuah aksi tandingan tengah diorganisir oleh perwira-perwira yang loyal, dan bahwa demi alasan keamanan, Presiden harus pergi ke Pangkalan Udara Halim di bawah pengawalan Supardjo. Jika Presiden menolak dikawal ke Halim, Supardjo akan membawanya secara paksa.¹³² Telah kita lihat bahwa sebelum itu pada tanggal yang sama, yaitu 29 September, Supardjo dan Omar Dhani telah menemui Presiden di Istana Merdeka, melapor bahwa sekelompok perwira yang loyal telah siap untuk menangkap anggota-anggota Dewan Jenderal, bahwa serangan itu akan dilakukan sebentar lagi, dan bahwa Brigjen Supardjo, yang memimpin delegasi dari keempat angkatan, akan muncul di istana untuk melaporkan hasil-hasilnya dan menyelamatkan Presiden ke Halim untuk melindunginya dari aksi-aksi balasan yang tidak dikehendaki dari para pengikut para jenderal.

Sebagai mata acara pertama, rapat itu mengulas semua persiapan yang sampai sejauh ini sudah dilakukan, rencana untuk mengerahkan pasukan dari Batalyon 454 dan 530, dan kesiapan pasukan cadangan di Pondok Gede. Sjam mengusulkan, dan rapat menyetujui, bahwa delapan jenderal akan dijadikan target gugus tugas Pasopati: Jenderal Abdul Haris Nasution, Menko Hankam/KASAB; Letjen Achmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat; Mayjen Suwondo. Parman, Kepala Intelijen AD; Mayjen Suprpto; Mayjen M.T. Harjono; Brigjen D.I. Pandjaitan; Brigjen Sutojo Siswomihardjo; dan Brigjen Achmad Sukendro.

Nama para jenderal itu telah diberikan kepada Sjam oleh Aidit sekitar 20 September 1965, dengan instruksi lebih lanjut bahwa setelah diambil dari rumah masing-masing, mereka dibawa ke Halim. Dalam rapat itu Sjam mengusulkan pada Aidit agar M. Hatta, Chairul Saleh dan Sukarni juga “diambil”, untuk membangun hubungan politis yang lebih luas di antara mereka dengan para jenderal itu. Tetapi Aidit menolak gagasan tersebut.

Dalam memimpin rapat Komando Pembersihan di rumahnya pada 29 September malam itu, Sjam lebih jauh membeberkan apa yang rupanya menjadi intisari dari instruksi Aidit menyangkut penangkapan para jenderal: setiap usaha harus dilakukan untuk mendapatkan para jenderal itu hidup-hidup;

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

lalu semua harus dibawa ke Pondok Gede, untuk mengorek pengakuan mereka tentang keberadaan Dewan Jenderal dan rencananya untuk menggulingkan Presiden dan merongrong republik; setelah ini, dan berdasarkan pengakuan-pengakuan yang diperoleh, sebuah Pengadilan Rakyat akan mengadili mereka dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negeri sendiri; setelah memutuskan bersalah dan menjatuhkan hukuman mati, Pemuda Rakyat akan mengeksekusi mereka, dengan demikian melaksanakan “pengadilan revolusioner” terhadap musuh-musuh rakyat.

Rapat kemudian mempertimbangkan aspek-aspek politis dari operasi itu, yang sekali lagi dijelaskan oleh Sjam. Ia mengatakan bahwa segera setelah operasi-operasi militer terhadap para jenderal selesai, sebuah Dewan Revolusi akan dibentuk. Aidit tengah menyiapkan sebuah daftar berisi nama anggota-anggotanya. Dewan Revolusi akan membubarkan Kabinet Dwikora dan bertindak sebagai “dewan tertinggi untuk mendesak Presiden agar menunjuk sebuah pemerintahan koalisi baru yang didasarkan pada NASAKOM,” yaitu Kabinet Gotong Royong. Jika Presiden menolak menunjuk kabinet baru ini, ia akan dilengserkan juga dari kekuasaan.¹³³

Menyangkut pasukan-pasukan yang tersedia untuk operasi itu, pada peserta rapat Sjam memberikan perhitungan sebagai berikut: (1) 2.000 personil dari Batalyon 454 dan 530; (2) 1.000 anggota pasukan Pengawal Istana dari Batalyon Tjakrabirawa; (3) 1.000 sukarelawan yang dilatih Sujono di Pondok Gede; (4) sekitar 3.000 pasukan dari Brigade Infanteri I dari Garnisun Jakarta; dan barangkali satu unit kendaraan lapis baja yang terdiri dari 30 tank dan kendaraan lain dari Divisi Siliwangi. Pada rapat itu Supardjo menawarkan untuk menerbangkan pula pasukannya sendiri dari Kalimantan, tetapi diberitahu bahwa hal itu tidak perlu karena pasukan yang tersedia sudah cukup memadai. Dengan demikian jumlah total pasukan yang akan ambil bagian dalam operasi itu adalah sekitar 7.000 personil, mungkin dibantu dengan sebuah pasukan tank.

Ke-7000 anggota pasukan itu dikelompokkan menjadi tiga satuan tugas, yang akan dikerahkan dengan cara sebagai berikut. Kelompok pertama terdiri dari Batalyon 454 dan 530, dan dikenal dengan nama Pasukan Bhimasakti. Tujuannya adalah mengamankan Istana Presiden (GAMBAR III), Stasiun Radio (GAMBAR IV), dan Pusat Telekomunikasi (GAMBAR V); yang semuanya terletak di tiga sisi Lapangan Merdeka. Sisi keempat lapangan itu diduduki oleh KOSTRAD (GAMBAR VI), dengan Garnisun Jakarta di dekatnya (PETA I).

Kelompok kedua terdiri dari Pengawal Istana dari Batalyon I Tjakrabirawa (GAMBAR VII) dan beberapa sukarelawan dari Pemuda Rakyat. Kelompok ini

Jadual Kudeta: Rincian Langkah-langkahnya

dikenal dengan nama Pasukan Pasopati, dan tugasnya adalah mengamankan para jenderal. Kelompok ini dipimpin oleh Letnan Dul Arief, di bawah komando Latief.

Kelompok ketiga terdiri dari unit-unit AURI dan Pemuda Rakyat, dan dinamakan Gatotkaca, sebuah pasukan cadangan, yang akan ditempatkan di Pangkalan Udara Halim dan Pondok Gede (PETA II).

Keseluruhan operasi itu, yang diberi sandi TAKARI, harus bertindak secepat kilat untuk mencapai sasaran-sasaran politik dan militer utama dengan kekuatan pasukan yang begitu kecil, sebab sebagaimana Latief perhitungkan dalam rapat itu, ada sekitar 60.000 pasukan ditempatkan di dalam dan di sekitar Jakarta, yang bisa dengan mudah dihubungi oleh para jenderal dan dikerahkan untuk meredam gerakan itu. Pasukan ini terdiri dari unit-unit KOSTRAD (GAMBAR VI) yang ditempatkan di Jakarta; beberapa pasukan dari Brigade Infanteri I dari Garnisun Jakarta (GAMBAR VIII) dan unit-unit lain, dan RPKAD (pasukan para-komando) yang ditempatkan sekitar 12 mil di luar Jakarta.

Butir terakhir dalam agenda rapat di rumah Sjam pada 29 September itu adalah diskusi mengenai penetapan D-Day dan H-Hour untuk operasi itu. Atas saran Sjam, jadual itu ditunda dari 30 September dinihari menjadi 1 Oktober. H-Hour ditetapkan pukul 04.00 pagi, sebab pasukan Pasopati yang akan mengamankan para jenderal, sebagaimana telah kita lihat, membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan diri. Tetapi operasi itu tetap harus dinamakan GERAKAN 30 SEPTEMBER (GESTAPU), dan puncaknya adalah pembentukan Dewan Revolusi sebagai otoritas politik tertinggi di negeri itu, tandas Sjam dalam komentar-komentar penutupnya. Sebelum rapat bubar, disepakati bahwa keesokan harinya, 30 September, semua anggota kelompok itu harus bertemu di Lubang Buaya pada pukul 10 pagi untuk briefing dan koordinasi mereka.

TIGA OPSI AIDIT UNTUK MELENGSERKAN PRESIDEN

Kamis, 30 September, adalah hari yang luar biasa sibuk bagi komplotan itu. sebagaimana telah disepakati, suatu briefing diselenggarakan di Lubang Buaya pada pukul 10 pagi, yang diberikan oleh Untung dan dihadiri oleh Latief, Sujono, Supeno, Suradi, Sukrisno, Kuntjoro, Dul Arief, Sjam, Pono, dan lain-lainnya. Karena masalah-masalah yang disampaikan bersifat militer, Sjam dan Pono tetap di latar belakang saja. Mengingat beberapa dari perwira-perwira yang hadir baru saja tahu tentang operasi itu, Untung mengulangi argumen

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

tentang rencana Dewan Jenderal untuk melakukan kudeta, dan tentang alasan-alasan bagi aksi *pre-emptive* yang akan dilakukan oleh orang-orang yang hadir di situ untuk menggagalkannya. Operasi itu disebut TAKARI, dan akan dilaksanakan pasukan yang mencapai jumlah satu divisi dan disebut AMPERA. Lebih jauh Untung menjelaskan lokasi CENKO I sebagai titik *rendezvous*, metode komunikasi di antara unit-unit yang berpartisipasi, koordinasi aktivitas-aktivitas mereka, kode sandi-sandi, logistik, transportasi, suplai senjata dan detail-detail teknis militer lainnya. Setelah rapat, orang-orang itu berpencar untuk mengontak unit-unit mereka sendiri di berbagai bagian kota, membriefting mereka mengenai perkembangan-perkembangan terakhir, mengawasi persiapan-persiapan setempat, melakukan pengawasan lingkungan di sekitar target-target, mendapatkan senjata dan amunisi, mengamankan transportasi dan peralatan komunikasi, dan melengkapi tugas-tugas lain.

Begitulah, segala aktivitas persiapan dilakukan selama siang hari tanggal 30 September itu, yang terkait dengan aspek taktis operasi, namun rapat terpenting hari itu yang menyangkut aspek strategis dan tindak-lanjut politis pembersihan itu, dilangsungkan malam harinya.

Rapat itu diselenggarakan di rumah Sjam di Jalan Salemba Tengah, Djatibuntu, Jakarta, di malam hari.¹³⁴ Di situ Aidit muncul untuk pertama kalinya sebagai Panglima Komando keseluruhan operasi yang dilaksanakan oleh PKI untuk menghancurkan para jenderal, ditemani oleh sekretarisnya Kusno dan anggota Biro Khusus Walujo, sekitar pukul 10 malam. Aidit datang langsung dari Stadion Senayan, setelah di sana mendengar dengan mata kepala sendiri, Presiden memberikan isyarat rahasia di depan publik kepada Untung cs untuk jalan terus dengan gerakannya dengan mengutip Mahabharata tentang *dharma*, tugas mulia. Karena tahu betul bahwa dalam waktu beberapa jam saja AD akan kehilangan pucuk pimpinan akibat pendongkelan Menko Hankam/KASAB Jenderal Nasution, dan Men/Pangad Letjen Yani, Aidit telah mengundang Mayjen Pranoto Reksosamodro untuk menemuinya di rumah Sjam dan, ketika sendirian di sebuah kamar, menawarkan posisi Yani padanya, sementara posisi Nasution barangkali akan diberikan pada Untung. Dalam menempatkan Untung pada posisi menteri pertahanan, padahal Untung hanya memegang pangkat Letnan Kolonel, Aidit merancang *Keputusan No.2* dari Dewan Revolusi (DOKUMEN No. 11), yang menurunkan pangkat semua perwira yang lebih tinggi di seluruh jajaran Angkatan Bersenjata Indonesia ke pangkat itu, yang akan disiarkan pada 1 Oktober 1965 ke seluruh negeri. Baik Dhani dan Untung sudah bertahun-tahun dibina oleh Biro Khusus, keduanya dengan

Jadual Kudeta: Rincian Langkah-langkahnya

teguh mendukung PKI dan, tidak diragukan lagi, partai akan mendapatkan dalam diri mereka alat-alat yang loyal untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya dalam mengubah pemerintahan Indonesia menjadi suatu Demokrasi Rakyat. Sejauh menyangkut posisi Presiden Sukarno, PKI memutuskan untuk melengserkan dia dari kursinya, sebagaimana terlihat dari *Dekrit No. 1* (DOKUMEN No. 9). Dewan Revolusi, yang dirancang oleh Aidit dan disetujui oleh Politbiro, sepenuhnya menghapus nama Sukarno dari skema pemerintahan baru itu.

Bagaimanapun juga, di bawah rezim baru itu, partai berharap dapat mengambil oper kekuasaan yang sangat besar dari Presiden, dan meredusir Presiden menjadi tidak lebih dari tokoh simbolik yang mewakili negara. Ini dapat dicapai dengan jalan memisahkan Presiden — jabatan kepala negara — dari jabatan perdana menteri, kedua pos ini pada waktu itu dirangkap oleh Presiden; dan PKI akan merampas jabatan perdana menteri dari Presiden. Akibatnya, Presiden akan tinggal sebagai kepala negara, tetapi tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, yaitu memimpin rapat-rapat kabinet dan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Rupanya PKI memikirkan akan menunjuk Omar Dhani ke kedudukan Presiden yang sudah dilucuti itu, sementara Aidit akan menduduki pos kuat perdana menteri untuk memimpin pemerintah baru.

Sebagaimana telah kita lihat di muka, Omar Dhani mendapat dukungan PKI ketika AURI menominasi dia sebagai kandidat Presiden pada 5 Agustus 1965, jika terjadi sesuatu pada Sukarno. Rupanya keberangkatan Dr. Subandrio dan Njoto ke Medan pada 28 September, menjelang operasi GESTAPU, mungkin berhubungan dengan rencana PKI untuk mengosongkan kursi kepresidenan dengan jalan mengirim Sukarno ke Cina untuk pengunduran diri sukarela, atau paksa, karena “alasan kesehatan.” Sebagaimana telah kita lihat, rencana itu disepakati oleh Marsekal Chen Yi dan Dr. Subandrio dalam kunjungan Chen Yi ke Jakarta yang berkaitan dengan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1965, ketika Chen Yi memberitahu Subandrio bahwa ia sudah menyiapkan sebuah tempat yang tenang untuk Presiden di Danau Angsa Cina, dimana perawatan terbaik bisa diberikan untuk kesehatannya.

Karena Supardjo diberi tugas “mengamankan” Presiden di istana, maka Untung melakukan pengaturan-pengaturan awal dengan Kapten Suwarno dan Posko, untuk menghilangkan prosedur-prosedur keamanan normal istana, guna memuluskan akses bebas dan cepat Supardjo dalam menemui Presiden.¹³⁵ Diharapkan bahwa setelah mengamankan Presiden, Supardjo dan timnya akan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

mengawalnya langsung ke rumah Susanto di Halim, dimana Presiden praktis akan menjadi sandera pasukan Untung. Di sini, setelah Presiden diisolasi, strategi Aidit adalah menuntut sebuah rapat pribadi dengan Presiden untuk memaksanya memenuhi butir-butir perjanjiannya dengan Mao dan Aidit sendiri, yang dibuat di Istana Bogor pada 8 Agustus 1965. Syarat-syarat itu antara lain meliputi: Presiden menunjuk Kabinet Gotong royong menyusul pembersihan itu dan kemudian sepakat untuk meninggalkan negeri itu dan pergi beristirahat di Cina. Andaikata skema itu sukses *—harus ditekankan di sini bahwa skema tersebut dikemukakan di sini sebagai sebuah skenario tentatif sampai bukti lebih lanjut diketemukan—*Aidit akan, tidak pelak lagi, mengorganisir suatu pengasingan secara langsung dari Halim untuk Pemimpin Besar Revolusi itu, dengan menjamin segala macam hak istimewanya, dan pada saat yang sama menunjuknya sebagai Presiden Kehormatan Seumur Hidup. Pesawat Jet Star kepresidenan tengah menunggu untuk membawanya ke Medan untuk bergabung dengan Subandrio dan Njoto, yang akan mengawalnya ke Cina, dengan protokol diplomatik yang sepantasnya untuk seorang mantan Kepala Negara ketika mendarat. Kemungkinan besar Komodor Udara Leo Wattimena telah memilih rumah Susanto untuk tujuan ini, ketika menginstruksikan Kolonel Wisnu agar menyiapkan sebuah rumah yang sesuai di Halim untuk Presiden, agar dekat dengan pesawat jetnya.¹³⁶

Jika Presiden menolak untuk menepati janjinya menunjuk Kabinet Gotong Royong dan mengundurkan diri secara terhormat dan berwibawa, Politbiro telah memutuskan bahwa revolusi itu akan jalan terus tanpa Presiden, bahkan dengan menentang Presiden. Setelah memenggal habis pucuk pimpinan AD, kekuatan yang Presiden andalkan untuk mengimbangi PKI, nasib Presiden akan sepenuhnya berada di tangan Aidit. Di Halim ia akan berada di bawah “perlindungan” Supardjo dan Untung, dua antek Aidit, dikitari oleh para pejuang Pemuda Rakyat yang, tak diragukan lagi, akan mengamankan atau bila perlu membunuh Presiden atas perintah Aidit. Dan Aidit siap untuk itu jika Presiden ingkar memenuhi janji-janjinya pada Mao dan PKI, sebagaimana disebutkan dalam surat Aidit tertanggal 10 November 1965 (DOKUMEN No. 2). PKI membutuhkan Presiden untuk tampil ke pucuk kekuasaan dan membiarkannya melegitimasi pemerintahan baru, sebagaimana selalu dijelaskan oleh Aidit pada Politbiro dalam tiga rapat yang paling menentukan pada akhir Agustus ketika merencanakan jalan pintas menuju kekuasaan, tetapi setelah Aidit berkuasa Presiden harus disingkirkan. Bukan hanya karena Presiden telah kehabisan potensi seorang “nasionalis revolusioner” untuk

Jadual Kudeta: Rincian Langkah-langkahnya

mempromosikan tujuan-tujuan partai, tetapi juga karena wataknya yang pemberang, sifatnya yang berubah-ubah, perilakunya yang sulit diramalkan, dan kondisi kesehatannya yang memburuk.

Mengingat pertimbangan karakter Presiden itu tadi, partai akan menghadapi resiko lumayan besar jika membiarkan dia tetap duduk di kursinya. Maka sebagai strateginya, partai perlu menutup-nutupi agenda tersembunyi yaitu upaya merebut kekuasaan dengan berteman dekat dengan Presiden, namun setelah memegang kendali pemerintahan, Presiden harus dipinggirkan karena hanya akan menjadi beban dan kendala bagi perjuangan partai untuk menuju Demokrasi Rakyat. Njono, anggota CC PKI dan Ketua SOBSI yang kuat itu, yang ditahan pada 3 Oktober 1965, memberi kesaksian bahwa andaikata kejadian psca-pembersihan AD itu berhasil pada 1 Oktober, Presiden pasti “diamankan” juga.”¹³⁷

Dengan demikian sejauh menyangkut nasib Presiden, entah jalan terus “dengan” atau “tanpa” dia, rupanya Rencana Besar PKI akan menyangkut opsi-opsi dengan hirarki bertingkat sebagai berikut. Pertama, dan jalan yang paling disukai, adalah jalan terus bersama Presiden sampai tuntas: membersihkan para jenderal, memaksa Presiden mendukung pembentukan Dewan Revolusi dan menyepakati keanggotaannya, memaksa dia menunjuk Kabinet Gotong royong dan kemudian mengundurkan dia dari kehidupan publik karena alasan kesehatan ke Cina, dengan penuh kemuliaan sebagai Presiden Kehormatan Seumur Hidup, atau gelar lain yang hebat-hebat. Opsi kedua mengantisipasi jalan terus “dengan” Presiden sampai pembersihan itu, dan jika ia menolak untuk mendukung atau melegitimasi Dewan Revolusi, maka jalan terus “tanpa” dia, yaitu menggusur Presiden entah dengan cara baik-baik atau dengan paksa. Opsi ketiga, ini yang paling tidak disukai, memvisualisasikan kemungkinan jalan terus “tanpa” Presiden sejak awal sampai akhir. Jika Presiden ragu-ragu, atau menarik diri pada saat terakhir, maka pembersihan itu akan dilaksanakan “tanpa” dia, diikuti dengan pembentukan Dewan Revolusi dan penunjukan Kabinet Gotong Royong untuk secepatnya memulai transisi langsung menuju Demokrasi Rakyat, dan Presiden akan dilenyapkan dalam pergolakan itu.

Mana di antara ketiga opsi ini yang akan dilaksanakan tergantung pada pasang naik dan surutnya situasi revolusioner pada 1 Oktober. Sehubungan dengan kerangka waktunya, adalah realistis untuk mengharapkan bahwa partai akan berkuasa pada 1 Oktober, andaikata peristiwa-peristiwa di Jakarta berjalan sebagaimana direncanakan, dan andaikata kondisi objektif revolusioner pada saat yang sama menggelembung naik untuk merebut kekuasaan di seantero

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

negeri dan massa yang besar-besaran bersatu padu berdiri di belakang pemerintahan baru mengikuti jejak partai.

Barangkali kita bisa menyela di sini dengan jalan menyebutkan, tetapi tanpa menggapai terlalu jauh ke dalam narasi masa mendatang, bahwa tidak satupun dari ketiga opsi yang digariskan di atas bisa diimplementasikan pada 1 Oktober, D-Day itu. Alasannya adalah karena Rencana Besar Aidit berantakan sejak awal karena Supardjo tidak dapat membawa Presiden ke rumah Susanto di Halim untuk menyerahkannya ke dalam tangan Aidit sebagaimana direncanakan. Ketika delegasi Supardjo yang terdiri dari keempat angkatan bersenjata itu tiba di istana untuk “mengamankan” Presiden pada 1 Oktober sekitar pukul 6.30 pagi, Presiden tidak berada di sana. Ia berada di Grogol mengunjungi Ibu Haryati, salah seorang isterinya, dan baru kemudian tiba di Halim dengan pasukan keamanannya sendiri, yaitu sekitar pukul 9.30 pagi. Di Halim ia disambut oleh Omar Dhani, Leo Wattimena, dan yang lain-lain, dan, setelah dibawa ke Pusat Komando, KOOPS, ia tidak memanggil Aidit, tetapi malah memanggil beberapa anggota kunci kabinetnya, yaitu dua Waperdam, tiga Panglima Angkatan, dan Jaksa Agung, untuk memperkuat kedudukannya dalam menantang kemungkinan kedatangan Aidit. Jadi, Presiden tidak sendirian, sebagaimana diharapkan Aidit, sehingga Presiden lepas dari jebakannya. Ini membuat Aidit kehilangan keseimbangan, memaksanya meninggalkan skenarionya, dengan konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya.

“Dengan kehadirannya Bung Karno di Halim, maka persoalan telah menjadi lain. Pada waktu itu, kita harus tjepat dalam silat politik. Harus tjepat menentukan titik berat strategi kita. Apakah kita berdjalan sendiri, apakah kita berdjalan dengan Bung Karno. Kalau kita merasa mampu, segera tentukan garis djalan sendiri. Kalau kita menurut perhitungan, tidak mampu memenangkan revolusi sendirian, maka harus tjepat pula merangkul Bung Karno, untuk bersama2 menghantjurkan kekuatan lawan....” (DOKUMEN No. 4).

Perkembangan itu membuat Rencana Besar tergecet, yang membawa Supardjo pada kesimpulan dalam *OTOKRITIK*-nya bahwa perkembangan itu merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan rontoknya GESTAPU, sebab Aidit gagal menumbangkan Presiden pada saat itu untuk berjalan terus tanpa dia, atau “merangkulnya” dengan jalan menempatkannya sebagai Kepala Dewan Revolusi untuk jalan terus “dengan” dia. Di sini Aidit meninggalkan opsi kedua dari skenario asli yang merekomendasikan penyingkiran Presiden setelah

Jadual Kudeta: Rincian Langkah-langkahnya

pembersihan para jenderal, lalu mulai berimprovisasi tapi goyah, yang mengakibatkan cita-citanya pupus dalam waktu satu dua jam saja.

Setelah selingan yang pendek tetapi penting ini, marilah kita kembali pada pertemuan Aidit dengan Pranoto di rumah Sjam pada 30 September, yang berlangsung dari pukul 10.00 sampai 11.00 malam. Sementara Aidit dan Pranoto tengah membuat suatu kesepakatan di salah satu ruangan, sebuah rapat lain diselenggarakan di ruangan sebelah, yang dihadiri oleh Sjam, Hamim alias Assep Surjaman, Kusno, sekretaris kepercayaan Aidit, Pono, Walujo alias Bono, dan Mayor Udara Sujono; juga hadir Sujono Pragdigdo alias Basri, alias Legi, seorang anggota Komisi Verifikasi CC PKI dan Biro Khusus. Usai bertemu dengan Pranoto, Aidit menyampaikan pada Sjam sebuah amplop yang berisi teks *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi (DOKUMEN No. 9), yang dirancang lebih awal oleh Aidit dan disetujui oleh Politbiro. Ia menginstruksikan Sjam agar menyuruh dokumen itu ditandatangani oleh Untung, Supardjo, Heru, Sunardi, dan Anwas di CENKO I, untuk mengemban tanggungjawab menjungkalkan Sukarno sebagai Presiden maupun sebagai perdana menteri, dan kemudian menyiarkan di pagi harinya. Hal ini kemudian akan memantapkan rencana bagi pertemuan Aidit-Sukarno di rumah Susanto di Halim untuk memaksanya memenuhi penyelesaian politik setelah pembersihan para jenderal, termasuk pengunduran dirinya.

Pada titik itu Sjam meminta Mayor Sujono membawa Aidit, Pranoto, Kusno dan Walujo ke rumah Sersan Udara Suwardi di Pangkalan Udara Halim (GAMBAR IX), yang akan menjadi markas besar Aidit. Tampak bahwa Aidit tidak akan dibiarkan sendirian di rumah Susanto untuk membuat keputusan-keputusan penting mengenai implementasi Rencana Besar itu sebagai jalan pintas partai menuju kekuasaan, dan bahwa dua anggota Politbiro lainnya, Lukman dan Njono, diselipkan belakangan untuk berbagi tanggungjawab. Pagar-pagar yang mengelilingi Pangkalan Udara Halim mudah ditembus dari Pondok Gede, atau mereka mungkin dibawa masuk dari gerbang utama yang dikendalikan oleh Mayor Wisnu, yang bertanggungjawab atas keamanan, yang merupakan salah seorang anggota tim konspirator Omar Dhani di AURI. Rumah Susanto telah diseleksi lebih awal oleh Sujono atas instruksi Aidit melalui Pono dan Walujo, sebab Aidit harus ada di Halim untuk mengimplementasikan tahap kedua operasi tersebut, yaitu konsekuensi-konsekuensi politis dari penghancuran komando puncak AD dan pemahaman yang dicapai antara dia, Mao dan Presiden mengenai tahap sosialis dari revolusi Indonesia. Kolonel Wisnu juga menginstruksikan Mayor Sujono untuk mengamankan rumah

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Komodor Susanto No. D-1 (GAMBAR X), untuk Presiden, yang dekat dengan Pusat Komando Halim, MARKAS KOOPS (PETA I). Ketika bertemu dengan Aidit di rumah Susanto untuk merampungkan perjanjian mereka, Presiden akan dekat dengan pesawatnya, Jet Star, yang selalu penuh bahan bakar dan siap tinggal landas.

Sebagaimana sudah disebutkan, pilihan lokasi markas besar Aidit itu sudah dipikirkan masak-masak, tidak jauh dari rumah Susanto, sebab Aidit mengharapkan bahwa setelah penculikan para jenderal, Presiden akan mengundangnya, atau ia sendiri akan muncul dengan menguasai semua kartu di tangannya, untuk merundingkan penunjukan seorang Menko Hankam menggantikan Jenderal Nasution, dan seorang Panglima AD baru untuk menggantikan Jenderal Yani. Selain itu, Aidit mengharapkan agar Presiden kemudian akan menunjuk Kabinet Gotong Royong, sebagaimana sudah dijanjikan padanya, dan kemudian mengundurkan diri.

Setelah Mayor Sujono membawa Aidit dan Kusno ke rumah Suwardi di Halim pada pukul 11 malam, Walujo pergi untuk menjemput Jusuf Iskander Subekti, alias Suropto Kusen, anggota CC PKI, untuk diajak ke markas besar Aidit di Halim.

Setelah keberangkatan Aidit ke Halim, sebuah pertemuan lain diselenggarakan di rumah Sjam tak lama setelah pukul 11 malam tanggal 30 September, di mana Sjam, Pono, Supardjo dan Untung berpartisipasi untuk mengulas situasi. Yang jelas tidak hadir dalam rapat itu adalah Latief, sebab ia tengah melaksanakan salah satu misi paling penting dari keseluruhan operasi itu, yaitu mengunjungi Jenderal Suharto untuk mendapatkan partisipasinya, dan partisipasi KOSTRAD yang dipimpinnya, dalam operasi itu. Tidak hanya karena kapabilitas militer KOSTRAD tergelar di seantero negeri, tetapi juga karena markas besarnya terletak di sisi timur Lapangan Merdeka, Jalan Merdeka Timur No 3, berseberangan dengan istana kepresidenan, markas besar pengawal istana Tjakrabirawa, markas besar Garnisun Jakarta, gedung stasiun radio dan telekomunikasi –persis di tengah-tengah target operasi yang ditugaskan pada Batalyon 454 dan 530 (PETA I). Kenyataannya, kecuali Halim, semua operasi GESTAPU akan dijalankan sepanjang keempat sisi Lapangan Merdeka, dengan MONAS di tengahnya. Sayang bagi Latief dan kolega-koleganya, kegagalannya memperoleh dukungan Suharto, sebagaimana akan segera kita lihat, memastikan kehancuran GESTAPU dalam waktu beberapa jam saja, terlepas dari perencanaan yang sangat cermat oleh para penggagasnya.

OMAR DHANI MEMPERSENJATAI PASUKAN PENCULIK: 30 SEPTEMBER

Tanggal 30 September adalah hari yang ditandai dengan kejadian penting lain yang ikut menentukan keberhasilan misi menculik para jenderal dan membawa mereka ke Halim untuk dikorek pengakuan-pengakuannya, diadili dan dieksekusi, yaitu ketersediaan senjata dan transportasi. Karena senjata-senjata yang Dhani peroleh di Cina untuk mempersenjatai operasi itu dan kemudian Angkatan Kelima belum dibongkar pada waktunya dan, karena itu, tidak tersedia pada saat dibutuhkan oleh “Komando Pembersihan”, maka pada malam hari itu, kenyataannya malah persis menjelang pelaksanaan, Dhani mengatur usaha memasok Komando Pembersihan itu dengan senjata-senjata dan kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan dari gudang senjata AURI.

Pada dini hari 30 September, Walujo memberitahu Letkol Udara Heru Atmodjo –yang bertindak sebagai penghubung antara Biro Khusus dengan Marsekal Madya Udara Omar Dhani—bahwa D-Day untuk operasi itu telah ditetapkan subuh tanggal 1 Oktober, dan bahwa pada hari itu Brigjen Supardjo akan memimpin pasukan untuk menculik para jenderal. Kenyataannya, Dhani sudah diberitahu oleh Supardjo secara pribadi sehari sebelumnya mengenai rencana itu, tetapi Supardjo sendiri tidak dapat memberitahukan D-Day yang tepat, sebab saat tersebut harus diputuskan pada rapat keseluruhan penggagas pada 30 September malam.

Dhani sekarang membawa AURI ke dalam panggung lakon itu. Ia membuka rapat para penasehat puncaknya di rumahnya pada 30 September malam, yang dihadiri oleh Marsekal Madya Udara Maki, Komodor Dewanto, Komodor Handoko, Letkol Udara Heru Atmodjo, dan Komodor Leo Wattimena. Heru melaporkan tentang OPERASI TAKARI, penempatan pasukan-pasukan pemukul dan detail-detail yang berhubungan dengan penahanan dan eksekusi jenderal-jenderal AD. Rapat kemudian mendiskusikan permintaan Sujono agar senjata AURI, dan perlengkapan lain, disediakan untuk Supardjo, atau kalau tidak, ia akan membawanya secara paksa dari Depot Mampang, karena ia kekurangan senjata dan perlengkapan. Mengingat hal itu, rapat memutuskan bahwa senjata-senjata yang diminta akan disediakan. Karena itu, Komodor Handoko memerintahkan Kopral Muhammad Abang, yang mengomandani pasukan penjaga di pool kendaraan bermotor, untuk menyediakan 17 kendaraan ketika didatangi oleh orang-orang Supardjo. Juga larut malam tanggal 30 September itu, sejumlah pasukan pemberontak diizinkan memasuki gudang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

senjata Mampang untuk mengeluarkan 3.000 pucuk senapan, senjata-senjata laras pendek dan amunisi. Beberapa dari senjata-senjata itu dibawa dari Cina oleh Omar Dhani dalam pesawat Hercules pada akhir September dan disimpan di sana.¹³⁸

Selain itu, rapat yang diselenggarakan di rumah Dhani memutuskan untuk memobilisasi satuan-satuan AURI dan mengaktifkan *Komando Operasi Utuh*, yang sudah dibentuk pada 5 Agustus dengan tujuan untuk membantu kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner selama krisis dalam negeri yang bakal berkembang. Sekarang krisis itu akan segera meledak. Sebagai kandidat PKI untuk kursi kepresidenan, jika terjadi sesuatu atas diri Sukarno, Dhani mempunyai taruhan besar dalam pembersihan para jenderal AD itu. Sudah bertahun-tahun ia bekerjasama erat dengan PKI, menjadi corong bagi ide-ide PKI dalam pertemuan-pertemuan puncak angkatan bersenjata, dan dialah yang sebelum itu mengusulkan agar Angkatan Kelima harus dibentuk dan diakui sebagai bagian integral dari angkatan bersenjata negeri itu. Ia juga menyodokkan gagasan bahwa angkatan bersenjata harus di-NASAKOM-kan, dan bahwa wakil-wakil NASAKOM ditugaskan ke setiap angkatan sebagai penasehat politik. Pada akhir Agustus 1965 Presiden mengutus dia dalam sebuah misi rahasia ke Peking untuk merundingkan pasokan 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Kelima, yang dijanjikan oleh Chou En-lai kepada Subandrio dalam bulan Januari 1965 dan kemudian dirundingkan oleh Presiden sendiri dengan Chou En-lai di Shanghai dalam bulan Juli. Meskipun dalam misi Dhani sekitar 20.000 senjata siap untuk dikapalkan segera, dengan syarat orang-orang Indonesia sendiri yang mengambilnya, ia toh membawa sebagian kecil senjata langsung ke Halim dalam pesawat Hercules-nya, dengan menghindari prosedur-prosedur standar untuk pengambilan senjata. Sisa senjata-senjata yang belum diambil rencananya juga tidak diproses melalui saluran-saluran reguler, dan karena informasi mengenai kedatangan senjata-senjata itu harus dirahasiakan, maka senjata-senjata harus disimpan dalam gudang-gudang senjata AURI sendiri.¹³⁹ Meskipun beberapa dari senjata-senjata itu dijadwalkan tiba di pelabuhan Priok dengan kapal beberapa hari sebelum kudeta dalam kotak-kotak yang dinyatakan berisi bahan bangunan untuk Stadion New Emerging Forces,¹⁴⁰ sebagaimana terlihat di muka, namun rupanya senjata-senjata itu tidak bisa diproses tepat pada waktunya, sehingga para pemberontak itu harus dipersenjatai dengan senjata-senjata yang dipasok oleh AURI.



VII

JENDERAL SUHARTO: KUDA HITAM 1965

SUHARTO DAN KOSTRAD: FAKTOR X (TAK DIKETAHUI) DARI SEBUAH PERSAMAAN

Sekarang mari kita perhatikan kembali misi Latief yang gagal pada pukul 10 malam tanggal 30 September, hanya beberapa jam sebelum pasukan Pasopati akan meninggalkan markasnya pukul 4 subuh tanggal 1 Oktober 1965, dengan kendaraan yang disediakan oleh AURI, untuk menggelindingkan misi berdarahnya mengamankan para jenderal yang mulai bergerak mengepung rumah para jenderal pimpinan AD yang sudah dijadikan target.

Selama rapat konspirasi di rumah Sjam pada 29 September 1965, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Latief sudah menyatakan kekhawatirannya mengenai jumlah tentara reguler, sekitar 60.000 orang, yang ada di Jakarta pada malam kudeta yang tidak ikut dalam barisan. Karena para tentara itu tidak berada di bawah kendali para pemberontak, Latief melihat kemungkinan reaksi mereka—yang spontan karena kurang mendapat cukup informasi, atau muncul karena kekacauan yang melanda mereka pada siang harinya—merupakan faktor yang tak dapat diprediksi, yang bisa jadi memberi dampak sebaliknya bagi operasi penculikan pucuk pimpinan AD yang direncanakan.

Dalam kaitan inilah, maka faktor utama yang tidak diketahui alias faktor X adalah sikap yang akan diambil komandan mereka, Mayjen Suharto, terhadap pembersihan para atasan dan koleganya, serta sumber-sumber daya penting lainnya di seantero negeri yang bisa dimobilisasi dari sisi lain dari persamaan itu, dikerahkan secara cepat oleh KOSTRAD atas perintahnya, misalnya untuk mendukung atau sebaliknya melawan aksi tersebut.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Untuk memastikan sikap Suharto ternyata merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Sebab Suharto telah terbukti sebagai pendukung Presiden yang sangat loyal dan bahkan paling penuh pengabdian, dihormati oleh sesama perwira di AD dan semua orang yang menjadi bawahannya karena dia baik hati dan ramah, serta dianggap sebagai “pengayom” orang biasa terhadap perlakuan tegas tanpa kompromi birokrasi militer. Semua konspirator yang berlatar belakang militer punya hubungan pribadi yang hangat dan dekat dengan dia dan keluarganya; beberapa di antaranya selalu terkenang pada masa muda ketika sama-sama bertugas di Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Meski bukan simpatisan PKI, secara pribadi Suharto kenal dekat dengan para pemimpin G-30-S sejak dia melakukan negosiasi dengan Musso, Wikana, dan lain-lainnya dalam rangka menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 atas nama pemerintahan Presiden Sukarno.¹⁴¹

Sjam paling lama mengenal Suharto, tepatnya sejak tahun 1950-an. Pada waktu itu Sjam adalah anggota partai sosialis Sutan Sjahrir, PSI, dan berada dalam pengaruh paman Sjahrir, Djohan Sjahroezah, dan “sekitar periode yang sama dia juga berhubungan dengan Letkol Suharto, yang sekarang di tahun 1965 menjadi PANGKOSTRAD berpangkat Mayjen, dan sering menginap di rumahnya di Jogja.”¹⁴²

Kolonel Latief pun mengenal Suharto sejak dia berada di Jawa Tengah dan kemudian selama operasi pembebasan Irian Barat, ketika dia menjadi staf Suharto sebagai agen intelijen. Mereka menjadi sahabat dekat, begitu pula para isteri mereka, dan saling mengunjungi dan sering mengikuti acara-acara keluarga masing-masing pihak dan saling memberi hadiah.

Demikian pula Untung, mengenal Suharto sejak operasi pembebasan Irian Barat, dimana Untung mendapat medali militer untuk keberaniannya dalam operasi saat menjadi anak buah jenderal itu di markas besarnya di Sulawesi sebagai Panglima Komando Mandala. Pada bulan Februari 1965 Untung dipindah dari Divisi Diponegoro di Jateng ke Jakarta untuk memimpin batalyon Pengawal Presiden, atas rekomendasi Suharto sendiri, dan menduduki pos itu pada musim semi 1965. Kedekatan hubungan dua orang itu mendapat bukti paling akurat dari fakta bahwa pada akhir bulan April 1964 “Suharto pergi meninggalkan Jakarta menuju Kebumen di Jawa Tengah untuk menghadiri resepsi pernikahan Untung.”¹⁴³ Dan, akhirnya bahkan Supardjo pun kenal baik dengan Suharto karena dia menjadi bawahannya selama konfrontasi dengan Malaysia, ketika Suharto mengunjungi yang bersangkutan di markas besarnya di Pontianak, Kalimantan Barat menjelang tanggal 17 Agustus 1965 untuk mengkoordinasikan aksi militer melawan Malaysia di Sarawak.

LATIEF MENGUNJUNGI SUHARTO DI RUMAHNYA: 29 SEPTEMBER

Dari fakta yang ada bahwa pasukan KOSTRAD merupakan faktor X alias unsur yang belum diketahui sikap dan posisi strategisnya dalam rangka operasi pembersihan pucuk pimpinan Angkatan Darat, dan meskipun semua pentolan unsur militer dari konspirator itu punya hubungan pribadi dan ikatan yang dalam dengan Suharto, namun tak seorang pun yang hadir dalam rapat di rumah Latief tanggal 29 September 1965 berani mengambil resiko menebak sikap apa yang akan diambil Suharto terhadap operasi yang telah direncanakan. Tampaknya berdasar konteks itulah maka dalam rapat itu diputuskan untuk mengutus Latief untuk mengunjungi Suharto di rumahnya guna memastikan keikutsertaannya. Berdasar pengakuan Latief kemudian, dia dan keluarganya mengunjungi Suharto di rumahnya di Jalan Agus Salim dua hari sebelum kejadian tanggal 1 Oktober 1965, mungkin 29 September 1965. Di sana, menurut kesaksian Latief:

“Selain berbincang-bincang mengenai masalah keluarga, saya juga bermaksud menanyai dia beberapa hal menyangkut informasi yang telah saya terima tentang Dewan Jenderal, dan sekaligus melapor padanya “segala yang telah saya ketahui”. Dia sendiri memberitahu saya demikian: sehari sebelumnya dia telah tahu dari bawahannya dari Jogja, namanya Subagyo, bahwa ada informasi tentang Dewan Jenderal dalam AD, yang telah berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Sukarno dan pemerintahannya. Suharto berpendapat bahwa informasi itu harus diselidiki dulu. Namun karena begitu banyak tamu di ruangan itu maka kami pun beralih ke topik lain yang berkaitan dengan masalah rumah.”¹⁴⁴

Karena keadaan di rumah Suharto semakin tidak memungkinkan, maka Latief tidak bisa melapor padanya “segala yang telah saya ketahui,” misalnya bahwa serangan *pre-emptive* terhadap para jenderal akan terjadi dalam waktu dekat dan juga detail-detail lain. Meski Suharto mengatakan bahwa dia sudah tahu adanya laporan tentang Dewan Jenderal dan rencananya melawan Presiden, namun dia hanya menyarankan agar hal itu diselidiki, tanpa menunjukkan kekhawatiran yang mendalam atau menunjukkan tanda-tanda bahwa hal itu merupakan soal yang begitu mendesak.

Maka, ditilik dari tujuan utamanya berkunjung ke rumah Suharto, bisa dikatakan Latief tidak berhasil mengorek informasi apapun, terutama mengenai kepastian sikap Suharto menyangkut penculikan para koleganya di pucuk

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pimpinan AD yang hampir dilakukan, dan tentunya Latief merasa sangat terganggu oleh kegagalannya ini terutama ketika melaporkan hasilnya kepada Untung cs pada rapat berikutnya yang akan diselenggarakan di rumahnya sendiri pada tanggal 30 September 1965, pukul 6 sore. Rapat itu dihadiri oleh Sjam, Supardjo, Untung, Pono dan Latief. Yang paling menggelisahkan adalah laporan Latief bahwa meskipun Suharto telah mendapat informasi tentang adanya Dewan Jenderal, namun dia sama sekali tidak menganggap itu ancaman, hanya bermaksud menyelidiki dulu masalah itu, dan tidak mengatakan apapun, misalnya mengenai perlunya melakukan suatu tindakan untuk menghadapi Dewan Jenderal. Rapat itu lalu menengarai bahwa mereka tidak boleh mengambil resiko apapun, bahwa ada bahaya besar Suharto akan bertindak karena ketidaktahuannya yang justru bisa mengacaukan semua pekerjaan, dan dari sumber-sumber KOSTRAD yang ada, orang-orang itu berpendapat bagaimanapun Suharto harus didekati sekali lagi, namun kali ini dia harus benar-benar diberi informasi mengenai rencana tindakan *pre-emptive* itu dan argumen yang kuat akan dibuat untuk mendapatkan partisipasinya.

Perasaan betapa mendesaknya hal itu benar-benar menguasai suasana rapat, apalagi H-Hour semakin mendekat, dan operasi akan dilakukan hanya beberapa jam lagi. Hingga tahap itu Latief mengusulkan bahwa tiga kawan jenderal itu—Supardjo, Untung, dan Latief—harus mengunjunginya bertiga untuk memastikan partisipasinya, sebelum mereka meninggalkan rumah Latief. Namun Supardjo menampik usulan itu dengan dalih dia tidak begitu mengenal Suharto sehingga hanya Untung dan Latief lah yang harus ke sana karena relasi kekeluargaan mereka sangat erat dengan Suharto. Kali ini ganti Untung yang menolak, karena dia tidak berani menghadapi Suharto, begitu tulis Latief dalam bukunya, sehingga pada saat yang sama Latief mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak gentar dan siap secara sukarela melakukan misi itu sendirian. Rapat akhirnya memberi Latief kewenangan untuk melaksanakan misi “memperoleh dukungan” Suharto terhadap operasi berdarah mereka.¹⁴⁵

Karena tidak ada kepastian akan seperti apa pertemuan Latief–Suharto itu, mengingat Latief telah mengunjungi Suharto dua kali tanpa bisa mengorek kepastian tentang sikapnya dalam masalah ini, maka tampaknya para konspirator itu mempertimbangkan tiga kemungkinan berikut.

Kemungkinan terbaik adalah Suharto akan bersedia bergabung atau sekedar memberikan dukungan. Meskipun demikian, pertanyaan selanjutnya adalah dia akan memperoleh kedudukan apa nantinya; penghargaan apa yang akan diberikan padanya? Apakah dia akan diterima sederajat dan diberi

kedudukan yang sesuai dalam konspirasi, atau dijadikan sebagai penolong yang simpatik, orang luar yang tidak berada di bawah kendali mereka namun telah membantu mereka mencapai tujuan? Kemungkinan kedua, dia tidak bakal mau bergabung, namun juga tidak akan menghalangi. Hasil ini tidak begitu diharapkan namun lebih bisa diterima, meskipun setelah kemenangan itu Suharto harus terus diawasi dan dalam beberapa hal harus membayar penolakannya itu dalam bentuk lain. Kemungkinan ketiga adalah mungkin Latief akan merasa bahwa Suharto menentang aksi mereka, jika demikian namanya akan dimasukkan dalam daftar nama-nama jenderal yang harus “diamankan,” bukan karena dia termasuk dalam rencana kudeta Dewan Jenderal itu namun karena tindakannya bisa meningkat menjadi pengkhianatan kepada Presiden dan karenanya layak mendapat hukuman mati.”¹⁴⁶

Sebelum Latief meninggalkan rumahnya untuk memastikan keikutsertaan Suharto dalam aksi berbahaya itu, atau menyatakan sikapnya, semua peserta rapat yang hadir di rumah Latief sepakat bahwa mereka akan bertemu di Pondok Gede pada pukul 23.00 malam untuk mendengarkan laporan hasil misi Latief dan menyesuaikan rencana operasi bila dianggap perlu.

LATIEF GAGAL MEMBUJUK SUHARTO: RUMAH SAKIT TENTARA, 30 SEPTEMBER

Dengan pemahaman itu Latief bergegas menuju rumah Suharto di Jalan Agus Salim, Jakarta. Sampai di sana dia diberitahu bahwa Suharto dan isteri sedang menunggu putra bungsu mereka, Tommy di rumah sakit tentara di Jalan Gatot Subroto, yang dirawat karena luka bakar. Tommy telah ketumpahan sup panas pada malam sebelumnya ketika Latief berkunjung ke rumah keluarga Suharto, dan kini Latief bergegas ke rumah sakit, muncul di ruang perawatan Tommy pada pukul 22.00 untuk menemui Suharto. Kedua orang itu berbicara selama sekitar satu jam, membuat Latief datang terlambat dalam rapat bersama para kolega di Pondok Gede untuk melaporkan hasilnya. Suharto sendiri tetap berada di rumah sakit hingga tengah malam, sampai Ibu Tien menyuruh suaminya pulang karena putri mereka yang baru berusia satu tahun ditinggal sendirian hanya dengan seorang pembantu. “Maka saya ucapkan selamat malam pada Tommy dan ibunya, yang tetap bermalam di rumah sakit menunggu putranya, lalu pulang,” kenang sang jenderal dalam biografinya.¹⁴⁷

Tidak ada catatan mengenai pertemuan Latief-Suharto itu, apa yang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

terjadi di antara dua kawan lama itu, dan hanya secuil informasi saja yang dapat diperoleh mengenai topik itu, yang datang dari tiga wawancara: dua dengan Suharto dan satu dengan Latief. Dalam wawancara yang pertama dengan Arnold Brackman beberapa saat setelah gagalnya kudeta tahun 1965, Suharto mengatakan bahwa Latief datang menemuinya di rumah sakit bukan karena ikut prihatin akan sakitnya Tommy melainkan untuk mencari tahu tentang dia, artinya Latief merasa perlu mengamati apakah Suharto menunjukkan tanda-tanda yang bisa menjadi indikasi kesiapannya untuk mengambil suatu tindakan guna menggagalkan kudeta G-30-S itu, atau apakah perhatiannya yang tercurah habis pada anak bungsunya membuat Suharto tidak punya waktu untuk melakukan hal tersebut.¹⁴⁸ Dalam wawancara kedua dengan *Der Spiegel* pada bulan Juni 1970, ketika ditanya mengapa namanya tidak tercantum dalam daftar nama jenderal yang akan diculik, Suharto mengatakan bahwa Latief datang menemuinya di rumah sakit di malam penentuan itu untuk membunuhnya, namun urung melakukannya karena melihat banyak orang yang hadir di situ.¹⁴⁹ Dan dari Latief kita hanya mendapat referensi yang tidak jelas mengenai pertemuan itu dalam wawancara pertama pada tanggal 24 Mei 1998, dimana dia mengatakan bahwa dia telah mengunjungi Suharto tiga kali untuk membicarakan masalah itu pada bulan September 1965, dan bahwa hanya pada pertemuan terakhir pada 30 September itulah keadaan memungkinkannya mengatakan pada Suharto apa yang akan terjadi keesokan paginya, 1 Oktober 1965.¹⁵⁰

Karena tidak ada detail lain menyangkut pertemuan antara Latief-Suharto di rumah sakit tentara pada 30 September pukul 10 malam, kita hanya bisa mengasumsikan apa yang terjadi di antara dua orang itu. Mungkin Latief mengungkapkan sekilas tentang kudeta yang akan terjadi beberapa jam lagi dan hanya menyampaikan “versi ringkas” duduk perkara; bahwa operasi mereka telah mendapat restu Presiden; tujuannya adalah mencegah kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal terhadap Presiden; aksi *pre-emptive* oleh para perwira yang loyal pada Presiden, yang semua dikenal oleh Suharto dan sangat menghormatinya; aksi itu dilaksanakan dengan cara “mengambil” para jenderal itu di rumah mereka masing-masing sedangkan lainnya diserahkan pada kewenangan Presiden; operasi sepenuhnya didukung oleh segenap kekuatan progresif-revolusioner di seluruh negeri, yang akan membuat Presiden terus menjadi pemimpin negara dengan posisi sangat kuat dan tak tertandingi.

Mengingat sempitnya waktu, sangat tidak mungkin Latief mengungkapkan pada Suharto di rumah sakit itu seluruh persiapan operasi, lengkap dengan segala implikasi militer dan politik yang sangat dipahaminya sebagai

Jenderal Suharto: Kuda Hitam 1965

anggota kelompok perencana yang selalu hadir dalam setiap rapat yang digelar: a) pembersihan para jenderal didalangi oleh Aidit atas nama PKI; b) jenderal-jenderal yang menjadi target akan ditangkap oleh pasukan Latief, kemudian dibawa ke Lubang Buaya untuk dipaksa mengakui telah berencana meng kudeta Presiden; c) Pengadilan Rakyat akan mengadili mereka, menjatuhkan hukuman mati bagi mereka, yang akan dilaksanakan di tempat itu juga; d) usai pembersihan para jenderal, dibentuklah Dewan Revolusi dengan Untung sebagai pimpinan tertinggi di seluruh negeri; e) dewan ini akan membubarkan Kabinet Dwikora dan menggantinya dengan Kabinet Gotong Royong; f) PKI akan terus menjadi kekuatan dominan di negeri ini, memperkenalkan Demokrasi Rakyat; g) Presiden Sukarno akan mengundurkan diri dan dengan alasan kesehatan beristirahat di Cina, atau kalau tidak mau akan dilengser paksa.

Jika asumsi kita ini benar, bahwa Latief menyampaikan pada Suharto hanya cerita ringkas-sepintas tentang tujuan dan sifat operasi yang akan dilaksanakan pukul 4 subuh keesokan harinya, atau enam jam kemudian, maka ada kemungkinan Suharto memberikan indikasi kepada Latief bahwa dia enggan bergabung atau mendukung aksi itu, namun sekaligus juga memberi kesan bahwa dia tidak akan menentang. Bintang pedomannya dalam momentum yang kritis itu, bagi sang jenderal yang oleh kawan maupun lawan dikenal sebagai Sukarnois tulen, kemungkinan besar adalah keterlibatan Presiden sendiri, yaitu sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, terlibat dalam rencana aksi tersebut. Ketika berbicara dengan Latief, sang jenderal barangkali mengulur-ulur waktu untuk melihat bagaimana perkembangan berbagai hal besok pagi, untuk melihat sendiri bagaimana sikap Presiden nanti dan ke mana arah yang akan diambil Presiden. Sesudah itu barulah Suharto bisa memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Percakapan yang mendua, berbelit-belit, penuh simbolisme yang terkait dengan sikap menggurui dan keengganan ketika berhadapan dengan otoritas, yang sangat kental dalam Bahasa Jawa, tidak disangkal lagi mewarnai percakapan antara kedua orang Jawa itu. Aspek bahasa ini mungkin mengaburkan maksud sesungguhnya dari mereka berdua, membuat yang satu mengira dari kata-kata yang lain bahwa ia mendengar apa yang ia memang ingin dengar.

Asumsi kami bahwa kesetiaan Suharto kepada Presiden dan kepeduliannya akan nasibnya merupakan bintang pedoman yang memandu responnya terhadap pendekatan Latief di rumah sakit tentara pada malam 30 September, malam GESTAPU itu, rupanya dikonfirmasi oleh perilaku jenderal itu

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

keesokan harinya, yang akan dijelaskan secara rinci di bagian belakang nanti. Dengan siaran radio pukul 07.20 pagi hari tanggal 1 Oktober, para konspirator itu membuka kedok mereka sendiri dengan jalan menyandera Presiden, membubarkan Kabinet Dwikora dan menggantikannya dengan Dewan Revolusi yang diketuai oleh Untung sebagai penguasa di seluruh negeri, dan dengan tidak mencantumkan nama Presiden dari daftar Dewan Revolusi. Jelas sekali, Presiden telah ditumbangkan, begitu perhitungan Suharto. Dengan demikian, ini menjawab pertanyaan ke mana dia musti melangkah dan bagaimana memecahkan dilema malam sebelumnya, yang kemudian membuatnya bergerak secara kilat menentang Latief-Untung-Supardjo cs untuk menumpas operasi mereka dan membebaskan Presiden dari cengkaman mereka.



VIII

PRESIDEN MELOLOSKAN DIRI DARI PERANGKAP AIDIT

PUSAT KOMANDO HALIM: 1 OKTOBER 1965

Seperti kita ketahui, skenario asli Aidit menunjukkan bahwa Supardjo, setelah “mengamankan” Presiden di istana pada dini hari 1 Oktober, setelah penculikan para jenderal, akan membawanya ke rumah Susanto di Halim dimana Aidit akan berusaha mengimplementasikan satu dari tiga pilihan menyangkut penyelesaian politik dan akhir nasib Presiden. Sementara pertemuan mendadak itu akan dihadiri oleh Aidit sendiri, namun ada kemungkinan bahwa Untung dan Omar Dhani akan menunggu di serambi, dan akan dipanggil begitu perjanjian antara Presiden-Aidit berjalan mulus untuk melaksanakan suksesi, atau, jika yang terjadi sebaliknya, akan masuk ke dalam untuk menurunkan Presiden dan menggantinya dengan Omar Dhani. Dewan Revolusi selanjutnya akan mengeluarkan dekrit baru untuk mengesahkan segala kemungkinan ini, menyerahkan “kekuasaan tertinggi” ke tangan struktur penguasa yang baru, dan melebur ke dalamnya.

Meski demikian, perkembangan lain juga mungkin tidak boleh diabaikan dari pertimbangan, misalnya bahwa PKI, yang kemudian secara efektif berkuasa, akan mengizinkan Dewan Revolusi melaksanakan fungsi sebentar, dimanfaatkan untuk melaksanakan pembersihan partai-partai politik serta ormas-ormas dan perorangan yang tidak diinginkan, sementara PKI tetap aman terlindung dari keterlibatan langsung dengan segala urusan kotor ini. Pembersihan itu akan “menyederhanakan” sistem partai politik untuk pemilihan umum yang baru untuk memilih Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sebagaimana dijanjikannya dalam *Komunike*. Sistem perampangan partai dan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dekrit tentang pemilu yang diskriminatif, dikombinasikan dengan pembentukan kamp-kamp kerja paksa dan re-edukasi bagi “mereka yang secara politis tidak dikehendaki,” ciri tipikal tahap-tahap awal kekuasaan suatu rezim baru Demokrasi Rakyat di dunia, akan mengawali proses transisi sistem tersebut di Indonesia.

Sebagaimana telah disinggung di muka, skenario yang paling disukai dan dipilih Aidit adalah tetap maju terus *dengan* Presiden, melaksanakan pembersihan para jenderal, menyuruhnya mengesahkan pembentukan Dewan Revolusi beserta keanggotaannya, menunjuk Kabinet Gotong Royong dan selanjutnya mengundurkan diri dari kehidupan publik demi alasan kesehatan dan beristirahat di Cina dengan penuh kemenangan dengan gelar Presiden Kehormatan Seumur Hidup, atau dengan gelar-gelar besar lainnya. Pilihan yang kedua sebagai antisipasi adalah melanjutkan rencana “dengan” Presiden, melaksanakan pembersihan, dan jika dia menolak menjalankan tahap kedua menandatangani dan mengesahkan rezim baru, maka rencana tetap jalan terus “tanpa” dia, dengan menyingkirkannya dengan cara membujuk secara halus atau secara paksa. Pilihan ketiga, yang terakhir dan paling tak diinginkan, adalah mengantisipasi bila harus jalan terus “tanpa” Presiden, yaitu menyingkirkannya dari proses itu, menggantikan dengan Dewan Revolusi, mengangkat Presiden baru dan menyuruh Presiden baru ini membentuk Kabinet Gotong Royong dan memulai transisi menuju sistem Demokrasi Rakyat sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Semuanya berubah jadi bencana bagi Aidit dan segala rencananya, terlebih ketika dia menerima laporan bahwa tidak semua para jenderal berhasil diambil, dan menemui Presiden di rumah Susanto di Halim untuk mengimplementasikan tiga pilihan menyangkut penyelesaian politik pasca-pembersihan dan akhir nasib Sukarno. Berbagai hal mulai kacau begitu Supardjo dan delegasinya tiba di tempat dan sangat terkejut mendapati bahwa Presiden tidak berada di sana. Selain itu, ketika akhirnya Presiden tiba di Halim pada pukul 10.00 dia datang “atas kemauannya sendiri” dan *incognito*, dikawal oleh personil keamanannya sendiri. Dia disambut oleh Omar Dhani, Leo Wattimena dan perwira intelijen dan keamanannya sendiri, dan selanjutnya dibawa ke Pusat Komando Operasi di pangkalan itu, bukan ke rumah Susanto. Fakta yang tidak menyenangkan dari keadaan itu adalah Presiden ternyata tidak sendirian dan yang paling buruk dari semua itu kini Presiden berada di tempat yang salah. Dia tidak hanya lolos dari jebakan yang telah disiapkan Aidit di rumah Susanto tetapi juga bertindak atas kemauannya sendiri, merebut

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

dari Aidit elemen terpenting yang saat itu berperan sangat besar, yakni: inisiatif. Hal ini benar-benar memporakporandakan Rencana Besar itu, memaksa Aidit merusak skenarionya dan berimprovisasi, melakukan manuver dan beralih dari ekstrem yang satu ke ekstrem-ekstrem lainnya selama berada di Halim, mengirim pesan-pesan yang bertentangan yang membingungkan kelompoknya yang saat itu berada di markas CENKO II.

Dalam *OTOKRITIK* yang ditulisnya, Supardjo melihat perkembangan yang tidak diharapkan ini, menggempur gerakan itu dalam tahap politis dari pelaksanaannya, sebagai kemunduran serius GESTAPU. Tetapi dia juga berkata bahwa hal ini akan menjadi sangat fatal jika Aidit jadi memerintahkan Untung dan Omar Dhani, pada saat yang tepat untuk “mengamankan” Presiden saat Presiden berada dalam pengawasan Dhani dan para pengawalnya di Pusat Komando Operasi di pangkalan udara Halim (DOKUMEN No. 4).

Bagaimanapun, sebelum mendiskusikan keadaan yang memungkinkan Presiden lolos dari perangkap yang disiapkan oleh Aidit di rumah Susanto pada dini hari yang naas itu, ada baiknya kita kembali lagi ke berbagai persiapan yang dilakukan di Pondok Gede untuk mengamankan para jenderal, membawanya ke sana untuk menyimpulkan bukti tentang plot yang mereka rancang untuk melawan Presiden, mengadili mereka dengan pengadilan rakyat dan menghukum mati mereka. Bahkan bagian operasi ini tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam skenario karena banyak hal tak terduga menghadang pasukan Gatotkaca yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas sadis nan kejam itu.

ENAM JENDERAL DIBUNUH DAN TIDAK DIPEROLEH BUKTI: 04.00

Sementara itu para pelaksana benar-benar beraksi. Sore tanggal 30 September, kira-kira pukul 6.00, Sjam, Supardjo, Untung, Pono, dan Latief bertemu di rumah Latief, dan setelah berembuk selama beberapa jam, semua berangkat ke Pondok Gede kecuali Latief yang, seperti kita ketahui, meninggalkan rapat itu untuk menemui Jenderal Suharto. Di perjalanan Sjam dan koleganya mengumpulkan para komando Pasopati dan Bhimasakti untuk mengajak mereka briefing terakhir di Pondok Gede, dan mengungkapkan kembali persiapan yang telah dilakukan di sana, sampai pukul 1 dini hari.

Sementara itu Latief tiba di Pondok Gede dari pertemuan-satu jamnya dengan Suharto di rumah sakit tentara, dan melaporkan sikap sang jenderal

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

KOSTRAD yang mendua dengan menyimpulkan bahwa sang jenderal tidak akan mendukung maupun menentang operasi itu. Mendengar itu, Sjam memutuskan bahwa aksi harus tetap dilaksanakan tanpa mempedulikan sikap Suharto, dan menyuruh Untung mengontak para komandan batalyon 454 dan 530 untuk memerintahkan mereka mengawasi istana Presiden, stasiun radio, pusat-pusat telekomunikasi, dan instalasi vital lain di seantero kota. Kita juga melihat Aidit meninggalkan rumah Sjam menuju Halim pukul 11 malam hari sebelumnya, ditemani Pranoto yang kemudian disuruh Aidit pergi ke KOSTRAD begitu Presiden menunjuknya sebagai *cartaker* AD dan mengambil-alih komando dari Suharto karena Pranoto akan menjadi perwira atasannya. Beberapa saat setelah tengah malam Omar Dhani tiba di Halim ditemani oleh dokter pribadinya, menginap di Pusat Komando Pangkalan AURI (GAMBAR XI).

Begitu persiapan di Pondok Gede selesai maka para perancang pergi menuju PENAS, CENKO I, dan tiba kira-kira pukul 2 dini hari, sementara Latief tetap berada di Pondok Gede mengirim pasukan pelaksana penculikan para jenderal yang menjadi target. Dhani menginap di Halim menunggu kedatangan Presiden keesokan harinya, yang mustinya didampingi oleh Supardjo dan empat perwakilan dari semua angkatan. Aidit telah berada di pos komandonya di rumah milik Suwardi untuk melangsungkan tahap politik operasi itu begitu para jenderal sudah diamankan, dibawa ke Pondok Gede, segera setelah Presiden dibawa ke rumah Susanto. Harap diingat bahwa maksud skenario Aidit adalah setelah “mengamankan” Presiden di istana, Supardjo akan membawanya langsung ke rumah Susanto dimana Aidit akan menemuinya untuk melaksanakan kelanjutan politik setelah pembersihan dengan melaksanakan satu dari tiga rencana aksi, sebagaimana telah dibahas dalam bab terdahulu.

Kira-kira pukul 1.30 dini hari tanggal 1 Oktober, ketika tujuh skuadron tentara yang ditugaskan menculik para jenderal meninggalkan Pondok Gede, dengan hati-hati mereka mengitari rumah orang-orang yang telah ditandai. Pukul 3.30 pagi pengepungan itu selesai dan korban pertama, Jenderal Harjono, terbunuh karena melawan. Peristiwa itu kemudian berubah menjadi suksesi yang cepat: pada pukul 4.00 pagi batalyon 454 dan 530 mengepung istana dan mengendalikan stasiun radio dan pusat komunikasi di Lapangan Merdeka; pukul 4.00 dilakukan upaya penculikan terhadap Jenderal Nasution, namun dia lolos dengan luka di kaki sementara putrinya terluka parah; pada pukul 4.30 Jenderal Yani terbunuh di rumahnya; pukul 4.50 Jenderal Panjaitan

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

terbunuh pula; pukul 5.00 Jenderal Parman, Suprpto, dan Sutojo bisa dibawa hidup-hidup.¹⁵¹ Jadi ketika pasukan Latief kembali ke Pondok Gede laporan yang mereka berikan adalah: tiga jenderal mati, tiga hidup dan satu melarikan diri namun terluka.

Sementara Untung, Supardjo, dan Heru sibuk di PENAS mengatur penculikan para jenderal, sebuah salinan *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi disodorkan Sjam kepada mereka untuk disetujui dan ditandatangani, sebagai tanda bahwa Dewan tersebut telah mendapat dukungan dari keempat angkatan bersenjata. Dul Arief muncul di CENKO I kira-kira pukul 05.50, melaporkan bahwa para jenderal telah “diamankan” dan dimasukkan ke Lubang Buaya, namun Nasution berhasil lolos, yang langsung disampaikan kepada Aidit lewat Sujono. Sujono bertindak sebagai kurir bagi Sjam, Aidit, dan Omar Dhani.

Laporan tentang lolosnya Nasution membuat Aidit dan koleganya sangat terkejut, menyadari bahwa dengan Menko Hankam/KASAB terluka dan masih hidup, masalah besar akan menghadang. Meskipun sudah disarankan kepada Aidit, menurut Supardjo, operasi ofensif harus segera dilakukan sekali lagi, termasuk pemindahan Presiden, “para pemimpin hanya berkata YA, namun tak melakukan apa-apa.” Mereka “kehilangan akal dan tidak berbuat apa-apa.” Supardjo yakin bahwa suatu tindakan ofensif harus dilakukan saat itu juga, karena “Selama dua belas jam, berarti sepanjang hari, musuh berada dalam kondisi panik. Militer di kota bingung (saat itu saya berada di Istana dan melihat dengan mata kepala saya sendiri situasi di kota).”¹⁵² Dia yakin, itulah salah satu kesalahan yang dilakukan para pemimpin GESTAPU, yang akhirnya menjadi penyebab kehancurannya.

Berita bahwa para jenderal telah berhasil diculik diterima dengan rasa lega luar biasa di CENKO I, dimana mereka yang hadir saling berpelukan karena suksesnya salah satu tahap dari operasi mereka. Tak lama setelah itu sebuah pertanyaan datang dari Pondok Gede menyangkut apa yang mesti dilakukan dengan para jenderal yang masih hidup. Sjam mendiktekan pesan kepada Sujono yang menyatakan bahwa mereka harus dibunuh,¹⁵³ meskipun hal ini bertentangan dengan rencana asli yang mempertimbangkan pentingnya pengakuan mereka yang nantinya diperlukan untuk disampaikan kepada Presiden maupun kepada Pengadilan Rakyat, sebagai bukti aktivitas mereka yang menyebabkan mereka layak dihukum mati. Dengan instruksi tertulis di tangan, Sujono bergegas ke Pondok Gede dimana GERWANI yang telah diberi kewenangan menyiksa dan membunuh para jenderal yang masih hidup, melempar tubuh mereka ke sumur terdekat, yang dikenal dengan nama Lubang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Buaya. Tiga tahun kemudian sumur itu (GAMBAR XII) disemen dan direnovasi menjadi monumen Pahlawan Revolusi.

Dengan demikian, pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 05.30 fase militer OPERASI TAKARI diakhiri, meskipun tidak terlalu sukses karena Jenderal Nasution masih hidup dan lolos. Kini para perancang beralih melaksanakan tahap kedua dari rencana mereka, dengan Presiden Sukarno sebagai pemain sentral.

Segera setelah laporan tentang likuidasi para jenderal diterima, pukul 5 pagi Untung mengirim Brigjen Supardjo sebagai ketua delegasi empat angkatan pergi ke Istana Merdeka. Supardjo akan memberitahu Presiden bahwa Dewan Jenderal telah merencanakan sebuah kudeta untuk menentangnya, bahwa saat itu tindakan untuk menangkalnya telah diorganisir oleh Untung dan para perwira yang loyal pada Presiden, dan bahwa delegasi sudah datang untuk mengawalinya ke rumah Susanto di Halim untuk melindunginya dari tindakan pembalasan yang mungkin akan dilakukan musuh. Ketika Supardjo bertanya apa yang harus dilakukan jika Presiden menolak ikut, Untung menjawab bahwa dia harus “membawanya pergi” yang berarti membawanya dengan paksa,¹⁵⁴ karena jika Presiden tidak sampai berada di rumah Susanto dan berada di bawah kendali Untung dan Aidit berarti operasi itu gagal.

Tiba di Istana Merdeka, Supardjo dan kelompoknya mendapati bahwa Presiden tidak berada di sana dan, karena tak seorang pun tahu dimana dia berada, Heru membawa kelompok itu dengan helikopter CENKO I sekitar pukul 07.00 pagi. Bagi seluruh anggota komplotan itu, mendapati bahwa figur sentral Presiden yang menjadi andalan operasi tahap kedua tidak diketahui keberadaannya, membuat mereka terkejut luar biasa. Setelah sampai di Halim Supardjo pergi menemui Dhani di Pusat Komando Operasi di pangkalan udara dan melapor padanya likuidasi para jenderal dan bahwa mereka belum bisa mengetahui keberadaan Presiden. Tentu saja Dhani tahu benar segala detailnya karena selama beberapa jam pada hari itu dia diberitahu Heru bahwa pembersihan para jenderal telah dilaksanakan namun Nasution luput, dan Dhani sendiri telah bicara dengan Presiden melalui telepon mengatakan padanya segala detail ini, dan mendesaknya pergi ke Halim. Selain itu, sebelum pergi tidur pada malam sebelumnya Omar Dhani telah menginstruksikan ajudannya untuk membangunkan dia pagi-pagi sehingga dia bisa mendengar berita, dan ketika kembali mendengarkan radio transistornya dalam berita pagi pukul 07.00 dia mendengar pidato Untung, *Komunike*, tentang perebutan kekuasaan oleh GESTAPU. Sekarang di pusat Komando Dhani mengucapkan

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

selamat pada Supardjo atas kesuksesan OPERASI TAKARI namun juga menyesal karena lolosnya Nasution dan berkata, “bagaimana kita bisa luput menangkap Nasution padahal satu divisi pasukan Ampera digerakkan?”¹⁵⁵

Setelah menemui Omar Dhani, Supardjo kembali ke CENKO I sekitar pukul 09.00 pagi, dimana dia dengan bersemangat bertukar pendapat dengan Untung, Sjam, dan pentolan lainnya mengenai keberadaan Presiden dan mengenai aksi apa yang kemudian terjadi manakala dia tidak berada di tempat. Saat itu juga dia menerima informasi bahwa Presiden baru saja tiba di Halim. Sekarang Supardjo mulai, untuk kedua kalinya, melaksanakan misinya, dan tiba di Pusat Komando Halim menjelang pukul 10.00 pagi. Dengan diakhirinya fase operasi militer, dan dengan kehadiran Presiden di Pusat Komando Halim, fase politik dimulai, para pemrakarsa meninggalkan CENKO I, dan berada di luar lapangan Halim, dan akhirnya pindah masuk ke pangkalan, di rumah Anis Sujatno, untuk membentuk CENKO II, markas besar G-30-S dan Dewan Revolusinya.

Pada saat itu di CENKO II Sjam mengambil daftar nama anggota Dewan Revolusi yang diberikan Aidit malam sebelumnya dari kopornya, dan memberikannya kepada Supardjo untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk mengawali negosiasi mengenai masalah politik sebagai kelanjutan dari pembersihan itu. Sebagaimana telah Anda simak sebelumnya, Aidit berharap Presiden akan mengundangnya ke rumah Susanto dimana dia akan menepati janjinya menunjuk Kabinet Gotong Royong dan kemudian beristirahat di Cina. Presiden tahu bahwa Aidit akan berada di Halim untuk penentuan final.¹⁵⁶

AIDIT MEMASANG PERANGKAP DI RUMAH SUSANTO

Kita telah meninggalkan Presiden di Stadion Olah Raga Senayan pada malam 30 September. Dia datang ke sana pukul 7.00 malam ditemani oleh Wakil Komandan Pasukan Pengawal Istana Tjakrabirawa, Kolonel Saelan, dimana dia berpidato membuka rapat para teknisi. Kita telah melihat adegan itu, bahwa setelah membaca catatan Untung di toilet tentang waktu yang telah ditetapkan (H-hour) untuk pembersihan itu, Presiden dalam pidatonya memerintahkan para pemrakarsa untuk menyerang perwira teman seperjuangan mereka dengan mengingatkan mereka akan ceritera Mahabharata. Saat itu pula Aidit segera beranjak dari kursinya dan bergegas menuju rumah Sjam untuk bertemu Mayjen

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Pranoto dan, menawarinya jabatan Men/Pangad, karena dia tahu persis bahwa pemangku jabatan itu, Jenderal Yani, akan mati dalam beberapa jam lagi.

Begitu pula Presiden, dia mempercepat pidatonya dan begitu selesai langsung menuju ke istana, akhirnya tiba setelah pukul 11.30. Malam harinya Presiden meninggalkan istana lagi, dan setelah menjemput Dewi di Hotel Indonesia mereka masuk ke rumahnya. Sekitar pukul 5 pagi setelah diberitahu oleh Komisaris Polisi Sunarjo yang mendampingi, bahwa dia baru saja menerima laporan telepon tentang aksi terhadap para jenderal, lalu Sukarno meninggalkan rumah Dewi menuju istana, menunggu kedatangan Supardjo dan delegasinya di sana, sebagaimana telah direncanakan semula. Akan tetapi, saat itu Presiden dikontak oleh Kolonel Saelan melalui telepon-radio, yang memberitahunya bahwa istana dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal. Hampir bersamaan waktu, pesan telepon lain untuk Presiden diterima dari kediaman Waperdam II, Dr. Johannes Leimena, yang melaporkan ada usaha menangkap Jenderal Nasution di rumahnya di Jalan Teuku Umar Nomor 40, dan bahwa dia terluka dan melarikan diri.

Dalam keadaan seperti itu Presiden mengurungkan niat pergi ke istana dan memerintahkan sopirnya untuk membawanya ke rumah istrinya yang lain, Ibu Haryati di Grogol. Tahu dari Leimena bahwa Nasution masih hidup dan yakin bahwa sang jenderal akan pergi bersembunyi setelah usaha penculikannya itu, Presiden meminta Letkol Ali Ebram pergi ke rumah Haryati lalu mengutusnyanya ke rumah Nasution, mencari jenderal itu dan membunuhnya, begitu kelihatan.¹⁵⁷ Latief juga menyisir beberapa rumah sakit di Jakarta untuk mencari Nasution dengan tujuan yang sama. Presiden sarapan pagi di sana, dan pada pukul 7.20 mendengar siaran radio *Komunike* tentang Gerakan 30 September yang ditandatangani Untung sebagai pemimpinnya (DOKUMEN No.8). *Komunike* menyatakan bahwa gerakan itu telah mengamankan para jenderal yang berencana melawan Presiden, dan bahwa Presiden kini aman dan berada di bawah perlindungan gerakan tersebut, dan bahwa Dewan Revolusi akan dibentuk di Jakarta sebagai penguasa tertinggi di wilayah itu, dan bahwa Dewan Revolusi tingkat propinsi juga akan dibentuk di segala tingkat administrasi, bahkan sampai ke desa-desa.

Kecil kemungkinan Presiden sangat terkejut mendengar *Komunike*, karena dia telah menjalin “hubungan yang sangat dekat” dengan para pemimpin GESTAPU,¹⁵⁸ yang telah menjelaskan padanya secara singkat beberapa aspek operasi tersebut, sementara dia sendiri secara eksplisit telah memerintahkan beberapa dari mereka dan menunjukkan persetujuannya secara langsung

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

maupun secara tersirat kepada yang lain. Perlu diingat bagaimana dia telah menunjuk Untung, Sabur, dan lain-lain sejak 4 Agustus, untuk melakukan “tindakan yang segera dan cepat” atas para jenderal yang tidak loyal; bahwa dia telah membuat perjanjian dengan Mao dan setuju dengan Aidit mengenai penyelesaian politik pasca-pembersihan, termasuk penunjukan kabinet Gotong Royong dan turunnya dia dari jabatan. Kita juga telah menyaksikan dia pada malam sebelumnya di Stadion Olah Raga, setelah menerima pesan dari Untung tentang D-Day dan H-Hour operasi itu, memantapkan semua yang terlibat untuk melanjutkan pembersihan itu sebagai tugas suci, sesuai ajaran dalam Mahabharata.

Bagaimanapun, dalam satu hal, *Komunike*, yang didengar Presiden pada tanggal 1 Oktober 1965 di rumah Haryati, benar-benar tidak akurat, karena pada saat itu dia tidak berada dalam perlindungan Untung. Pagi-pagi buta hari itu juga Presiden ditemani oleh Komisaris Polisi Sunarjo, sementara Brigjen Sabur sedang dalam perjalanan ke Bogor untuk mencari Presiden, sedang Kolonel Saelan, Wakil Komandan Pasukan Pengawal Istana hanya berada di stasiun radio dan mengontaknya. Sesungguhnya, Sabur dan Untung kehilangan jejaknya. Untung yakin bahwa Presiden ada di istana dan, sebagaimana kita lihat, mewakilkan Supardjo pergi ke sana pukul 5.30 untuk melapor dan mengawalnya menuju rumah Susanto di Halim untuk penyelesaian politik pasca-pembersihan dengan Aidit. Jadi yang diumumkan Untung telah mendahului peristiwa sebenarnya, dan secara prematur mengakhiri rencana membuat Presiden berada dalam “lindungannya.”

Faktor ini saja, dalam implikasinya yang paling sempurna dan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa lainnya berlangsung pada saat itu juga, tidak bisa disangkal, menjadi jelas bagi Presiden. Presiden tentunya menyadari bahwa setelah menghancurkan komando puncak AD — kekuatan absolut yang menentang PKI yang waktu itu masih menjunjung tinggi dirinya — akhirnya dia mendapati kini tidak ada lagi yang bisa melindunginya dari ancaman Aidit dan Untung, dan terbukalah kemungkinan ancaman politik dan pemaksaan, termasuk bahaya fisik terhadap dirinya. Di atas semua itu, lolosnya Nasution yang teraniaya dan terluka hatinya, bisa membuat Presiden berhadapan dengan masalah besar dari segi itu. Semua itu merupakan pengalaman yang sangat baru bagi Presiden, penuh dengan resiko yang tak terduga, yang mungkin mempengaruhi segala perilakunya sepanjang hari itu, termasuk mengubah komitmennya dengan Mao dan Aidit.

Aspek kedua *Komunike*, yang tidak disangkal lagi membuat Presiden merasa stress berat dan gelisah, adalah fakta bahwa segala pengaturan yang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

akan terjadi tidak memperhitungkan dirinya, bahwa dia tidak akan memegang peran apapun di dalamnya. Bagaimanapun *Komunike* menyatakan bahwa sebagai “tindakan selanjutnya” Dewan Revolusi akan dibentuk di Jakarta, sebagai “kekuasaan tertinggi di negeri ini” dengan dewan-dewan serupa di seluruh propinsi dan kabupaten hingga ke desa-desa, dan berkaitan dengan itu nama Presiden juga tidak disebut-sebut sama sekali. Dengan demikian struktur kekuasaan baru berskala nasional tengah berdiri, sebuah pemerintahan baru tanpa Sukarno. Meskipun pengalamannya yang nyaris fatal pada 4 Agustus membuatnya memutuskan beristirahat demi kesehatan di Cina, seperti yang dibahasnya dengan Aidit di Istana Bogor empat hari sesudahnya, yang dilanjutkan dengan pertemuan terakhir antara Aidit dengan Mao, Presiden tampaknya merasa, ketika mendengarkan *Komunike* di rumah Bu Haryati, bahwa Aidit tampak terburu-buru supaya bisa secepatnya menyingkirkan dirinya.

Presiden tentunya tahu bahwa untuk mengesahkan penyelesaian politik pasca-pembersihan dan transisi sistem pemerintahan yang baru, dia, sebagai Presiden, harus menunjuk Kabinet Gotong Royong. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Aidit jelas-jelas membutuhkan dirinya untuk melakukan hal ini, dan mereka saling mengerti akan hal ini, kecuali, tentu saja, bila dia bermaksud menyingkirkannya, tebak Presiden. Bahwa *Komunike* tidak menyebut namanya dalam kaitan dengan transisi itu, tidak masuk akal. Segala sesuatu serba tidak masuk akal. Apakah Aidit mengkhianatinya?

Perasaan tidak menentu dan kecurigaan Presiden terbukti dalam diskusinya dengan para ajudan mengenai serangkaian tindakan yang harus diambilnya. Mereka mengusulkan agar dia segera meninggalkan Jakarta ke suatu tempat yang aman, atau menyelidiki dulu dan menunggu hingga laut kembali tenang. Akhirnya dia memutuskan bahwa dia harus segera ke Pangkalan Udara Halim, dimana pesawat kepresidenan, Jet Star, selalu siap sedia membawanya ke tempat yang aman jika ada bahaya. Omar Dhani juga telah mengontaknya lewat telepon dan mendesaknya datang ke Halim. Dhani tahu dari Heru detail-detail paling kecil dari rancangan kelanjutan politik dari kudeta itu, dimana Presiden dan Dhani akan memainkan peran sentral, dengan kemungkinan Dhani akan menjadi pengganti utamanya, tergantung Presiden akan dengan sukarela turun atau harus dipaksa turun. Sebenarnya Omar Dhani menelpon Presiden dari “markas komando” nya di Halim yang telah diserahkan padanya oleh para konspirator, dimana dia menginap malam itu. Dalam konteks inilah maka pada pukul 7 pagi rombongan Presiden meninggalkan rumah Bu Haryati menuju Halim.

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

Meskipun Presiden kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa dia berangkat ke Halim “atas kehendaknya sendiri,” dia memang tahu dari pengaturan sebelumnya, dan juga dari surat Untung yang disampaikan kepadanya di Stadion Utama Senayan malam sebelumnya, bahwa Halim akan menjadi tempat dimana penyelesaian politik dari pembersihan itu akan diputuskan. Pembentukan Dewan Revolusi, sebagaimana dengan jelas disebut dalam *Komunike*, akan termasuk dalam agenda itu, begitu pula komitmennya pada Aidit menyangkut penunjukan Kabinet Gotong Royong dan turunnya dia dari jabatan, akan menjadi bahasan. Masa depannya sendiri terancam, terlihat dari tanda-tanda mengejutkan dari pihak Aidit.

PRESIDEN MEMERINTAHKAN PENGHENTIAN SEMUA AKSI: 10.30

Sebelum Presiden tiba di Pangkalan Udara Halim, sebuah babak telah disiapkan untuk mempengaruhi keputusannya pergi ke akhir GESTAPU dengan menunjukkan padanya bahwa penculikan Untung terhadap para jenderal memperoleh dukungan seluruh Angkatan Udara. Penyerangan Untung mengamankan suatu ikatan yang penting, sebagaimana diumumkan oleh Omar Dhani dalam Perintah Harian, yang disiarkan pukul 9.00 pagi, yang sepenuhnya membenarkan aksi pembersihan itu dan menempatkan AURI sebagai pelaksana “gerakan progresif revolusioner” itu. Hal ini merupakan pencapaian penting GESTAPU yang sangat dini pada hari itu, mengirimkan isyarat-isyarat yang benar kesegenap angkatan bersenjata negeri ini.

Perintah Harian menyatakan bahwa Gerakan 30 September telah bertindak mengamankan revolusi Indonesia dan pemimpin besarnya dari subversi CIA. Karena itulah alasannya maka pembersihan dilaksanakan angkatan bersenjata terhadap elemen subversif asing yang membahayakan revolusi Indonesia. Meskipun demikian, elemen-elemen subversif dari negara asing tidak akan tinggal diam, tapi mungkin mengintensifkan kegiatan-kegiatan anti-revolusioner mereka. Melihat ini, AURI, sebagai alat Revolusi, akan selalu mendukung semua gerakan progresif dan, sebaliknya, dengan tegas menindak segala kekuatan yang mengancam revolusi Indonesia. Omar Dhani menutup siaran dengan memerintahkan semua anggota AURI untuk selalu waspada terhadap berbagai provokasi dan usaha memperlemah Revolusi Indonesia. Mereka harus siaga terhadap segala bentuk aktivitas musuh baik dari dalam maupun luar negeri (DOKUMEN No. 12).

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Kentara sekali Presiden memahami posisi AURI ketika dia tiba di pangkalan udara antara pukul 9 dan 9.30 pagi. Di sana dia bertemu Omar Dhani di Markas Besar Operasi, bertanya padanya, “Wat is er gebeurt”,¹⁵⁹ dan apakah dia telah mendengar berita dari radio. Dhani menjawab menurut laporan yang diterimanya, Untung telah melakukan aksi melawan sejumlah jenderal, namun Brigjen Supardjo akan tiba dalam waktu dekat untuk melapor kepada Presiden semua detail operasi yang telah usai maupun agenda selanjutnya.

Beberapa saat sebelum pukul 10.00 pagi Supardjo tiba naik mobil Nissan patrol didampingi oleh Letkol Udara Heru Atmodjo, Major Infanteri Sukirno, dan Major Infanteri Bambang Supeno, dua komandan batalyon pemberontak. Ketika memasuki gedung itu dia meletakkan pistolnya di meja, lalu oleh Omar Dhani ditunjukkan ruangan tempat Presiden menunggu. Supardjo memberi salam dan melaporkan bahwa dia, dan sekelompok perwira muda, telah melaksanakan perintah menggagalkan kudeta melawan Presiden yang diprakarsai oleh Dewan Jenderal, dan meminta Presiden memberi penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan itu. Selanjutnya dia berkata bahwa beberapa jenderal telah “diamankan” tapi Nasution lolos, yang oleh Presiden dikomentari bahwa hal seperti itu “biasa dalam sebuah revolusi,”¹⁶⁰ dan meminta informasi lebih lanjut mengenai lolosnya Nasution, kentara sekali kalau tengah mengantisipasi masalah. Setelah menerima laporan tentang “pengamanan” para jenderal dengan penuh penghargaan, Presiden mulai menekan Supardjo tentang bukti yang menunjukkan keberadaan Dewan Jenderal “yang ingin melakukan kudeta melawan dirinya”, dan bertanya “mana bukti aksi itu”.¹⁶¹ Supardjo jadi benar-benar tidak nyaman dan berkata bahwa laporan lengkap akan diberikan segera setelah dia memperolehnya dari Untung.

Musti diingat bahwa Latief seharusnya memaksa jenderal yang telah ditangkap untuk mengaku adanya Dewan Jenderal dan skenarionya untuk menentang Presiden sehingga mereka bisa diadili dengan pengadilan rakyat, dihukum mati karena mengkhianati negara dan dieksekusi. Latief, bagaimanapun, tidak bisa mengungkapkan pengakuan itu dari para jenderal karena tiga diantaranya terbunuh di rumah mereka dan jenazah mereka dibawa ke Pondok Gede, sementara tiga yang hidup dibunuh atas perintah Sjam di sana. Orang mati tidak bakal bisa bercerita tentang siksaan yang dilakukan Pemuda Rakjat terhadap mereka, sebelum akhirnya dilemparkan ke sumur tua, Lubang Buaya.

Di detik inilah, ketika sendirian dengan Presiden, Supardjo menunjukkan daftar anggota Dewan Revolusi yang ditandatangani Untung, menurut

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

pengakuan Widjanarko,¹⁶² pada saat yang sama juga memberitahu Presiden bahwa semua anggota gerakan itu telah setuju bahwa Untung adalah sosok yang paling cocok untuk memimpinnya. Presiden sekilas melihat ke daftar itu, menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa tindakan Untung sangat membantu NEKOLIM.¹⁶³ Dia tampak mengacu ke teks *Komunike* yang berisi informasi bahwa Untung mengumumkan rencana pembentukan Dewan Revolusi, menjadi penguasa tertinggi dan satu-satunya di seantero negeri, dan pada fakta bahwa namanya sama sekali tidak termasuk di dalam daftar Dewan Revolusi, atau kedudukannya sebagai Presiden tidak diperlihatkan dalam penetapan politik baru yang tengah berdiri ini. Pembersihan para jenderal memang satu masalah, tapi pembentukan struktur kekuasaan baru di negara ini lain lagi masalahnya. Presiden memang menerima yang pertama, tapi dia menolak yang kedua, kecuali dia sepenuhnya berkuasa, namun nyatanya tidak, seperti yang diketahuinya dari *Komunike* yang didengarnya lewat radio pukul 7.20 pagi di rumah Ibu Haryati sehabis sarapan.

Dalam konteks inilah kemudian Presiden dengan nada datar memberitahu Supardjo bahwa karena menganggap Supardjo sebagai salah satu pemimpin yang telah melenyapkan para jenderal reaksioner, dia menolak, pada tahap itu, untuk menyetujui implikasi politik *Komunike* dan daftar anggota Dewan Revolusi, dan menganggap Supardjo sebagai juru bicara bagi tatanan baru yang tersirat dalam kedua dokumen itu. Tetapi, Presiden juga tidak mengundang Untung, sebagai Ketua Dewan Revolusi, ataupun Aidit, ke meja perundingan untuk menentukan kelanjutan politis setelah pembersihan sesuai kesepakatan sebelumnya. Perubahan yang mengejutkan dari pihak Presiden ini tampak menghancurkan pilihan Aidit untuk melakukan negosiasi dengan Presiden, memperkuat niatnya untuk jalan terus “tanpa” Presiden apapun resikonya, dengan tidak menyebut nama Presiden dalam pengumuman tentang Dewan Revolusi. Di sinilah persekutuan antara Aidit-Presiden retak.

Menyadari tidak mungkin memindahkan Presiden ke fase kedua operasi itu, yaitu meminta persetujuan dan pengesahannya atas penyelesaian politik operasi tersebut, Supardjo menjadi goyah dan mulai memisahkan diri dari Untung, yang namanya sebagai pemrakarsa politis telah diumumkan lewat radio. Di Pusat Komando Operasi Supardjo kemudian berkata kepada Presiden bahwa dia tidak termasuk dalam rencana Untung terutama menyangkut penetapan kelanjutan politik setelah pembersihan,¹⁶⁴ dan bahwa keterlibatannya dengan Untung hanya sampai pada menggagalkan niat jahat Dewan Jenderal dan membela Presiden.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Setelah pertemuan pribadi ini, Presiden dan Supardjo pindah ke ruang utama dimana Presiden melihat gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang ada ketika Brigjen Sabur tiba pada pukul 10.00 pagi. Sabur menceritakan pada Presiden kaitan berbagai peristiwa yang terjadi di Istana Merdeka pada dini hari, dan berbagai detail mengerikan tentang penculikan para jenderal, yang telah dikumpulkannya ketika berkeliling kota setelah kembali dari mencari-cari Presiden di Bogor.

Sabur menyampaikan laporan kepada Presiden di hadapan Omar Dhani, Jenderal Sunarjo, Kolonel Saelan, Komodor Udara Leo Wattimena, Kolonel Suparto, dan Brigjen Supardjo, yang semuanya duduk di kursi, sedang Presiden di tengah diapit oleh Omar Dhani di sisi yang satu dan Supardjo di sisi yang lain. Presiden tampak terganggu oleh laporan Sabur terutama karena banyaknya pertumpahan darah dalam penculikan para jenderal, dan bahwa Jenderal Pandjaitan terbunuh di rumahnya seketika. Tentu saja Presiden telah diberi penjelasan singkat mengenai nasib mereka oleh berbagai sumber sebelum tiba di Halim, namun di sana dia memainkan kartu-kartunya dengan mendekapkan rapat-rapat di dada. Diapun beralih ke Supardjo dan bertanya apakah dia bisa menghentikan tidak hanya pertumpahan darah tapi juga seluruh operasi dalam sebuah gurauan dalam Bahasa Sunda, bahwa “jika tidak bisa, dia akan ganti dihabisi,” yang dijawab Supardjo bahwa dia bisa menghentikan semua gerakan operasi itu.¹⁶⁵

Dalam hal ini Presiden membuat tiga keputusan penting yang menohok ke jantung Rencana Besar Aidit, yang berharap Presiden akan diisolasi di rumah Susanto untuk penyelesaian politik setelah pembersihan para jenderal. Ketiga keputusan itu menghalangi Aidit dari inisiatif itu, dan menempatkan Presiden di kursi kendali, dan sejak saat itu giliran Presidenlah yang akan menembak.

Pertama, Presiden menyelenggarakan rapat presidium Kabinet Dwikora dan mengundang Perdana Menteri untuk hadir. Pesan radio dikirim kepada Waperdam I Dr. Subandrio, agar datang dari Sumatra, dan kemudian Waperdam II Dr. Leimena, dihubungi lewat pesan untuk segera datang ke Halim untuk rapat mendesak kabinet. Waperdam III Chairul Saleh, sedang memimpin team para pejabat berkunjung ke Cina. Presiden kemudian dikelilingi oleh tiga Panglima angkatan yang siap melaksanakan apapun. Pangal dan Pangak dipanggil karena untuk AURI sudah ada Dhani.

Kedua, Presiden memutuskan tidak mengundang Aidit ke Pusat Komando untuk menemuinya menegosiasikan penetapan politik pasca-pembersihan, meskipun dia duduk sebagai menteri di kabinet Dwikora. Jangan lupa, harapan

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

Aidit Presiden pasti sudah berada di bawah kendali Untung, dan saat ini juga sudah berada di rumah Susanto, mengundangnya menegosiasikan komposisi Dewan Revolusi, penempatan pengganti Nasution dan Yani, penunjukan Pemerintahan Gotong Royong di bawah pimpinan Aidit; dan turunnya Presiden dari jabatan dan beristirahat di Cina karena alasan kesehatan. Dan jika skema “secara baik-baik” ini gagal, segera gusur dia dan tempatkan Omar Dhani di posisi Presiden. Dhani harus siap di sana melaksanakan tugas itu begitu dipanggil Aidit.

Ketiga, seperti umumnya terhadap gerakan rakyat, Presiden memutuskan menggempur jantung skema Aidit dengan menegaskan kekuasaan penuhnya sebagai Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Indonesia dan Perdana Menteri Pemerintahan Dwikora.

Begitu beralih ke Brigjen Sabur, Presiden memerintahkannya untuk menulis pernyataan bahwa dirinya selamat, sehat, dan bisa sepenuhnya memegang kendali pemerintahan, yang segera disiarkan lewat radio. Pernyataan itu, dirancang bersama Supardjo, namun diketik oleh Brigjen Sabur sendiri dengan mesin ketik yang ada di Pusat Komando Dhani, berbunyi: “Untuk menghindari interpretasi-interpretasi dan laporan-laporan yang keliru, kami umumkan bahwa Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno berada dalam keadaan sehat wal’afiat dan tetap memimpin negeri ini!” (DOKUMEN No. 13). Pernyataan itu dikeluarkan atas nama Brigjen Sabur, Komandan Resimen Tjakrabirawa, yang bertugas menjaga keamanan Presiden.

Pernyataan itu secara akurat menunjukkan realita yang ada pada pukul 10.30 pagi tanggal 1 Oktober 1965. Ketika menegaskan kembali berlanjutnya kepemimpinan Presiden negeri ini, tidak dilakukan pengutukan atau persekutuan baik terhadap pembersihan para jenderal maupun terhadap rencana Untung tentang pembentukan Dewan Revolusi. Fakta bahwa Presiden meminta Supardjo membantu Sabur merancang deklarasi itu, dan dari nadanya, menunjukkan dengan signifikan realita yang tengah terjadi, yaitu bahwa kekuasaan efektif negara ini berada di tangan para pemberontak, dan bahwa Presiden hanya kepala nominalnya saja. Supardjo memberitahu Sabur bahwa pasukan yang ada di istana, stasiun radio, dan yang ada dimanapun di Lapangan Merdeka, berada dalam komandonya, dan bahwa dia sesungguhnya telah menyelamatkan nyawa Sabur karena namanya ada dalam daftar jenderal-jenderal yang diculik. Hal ini membuat Sabur berpikir bahwa deklarasi Presiden, jika bertentangan dengan Gerakan 30 September, tidak akan disiarkan oleh radio yang dikendalikan oleh pasukan Untung-Supardjo.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Dan Sabur benar mengenai dugaannya itu. Satu salinan dari pernyataan itu dia kirimkan ke Markas Besar Resimen Tjakrabirawa, pangkalan pribadi Untung yang mendukung komplotan itu. Di sini Letkol M.Santoso, Kepala Staf-nya, mengadakan konperensi pers sekitar pukul 11 siang untuk membacakan pernyataan itu, atas nama Sabur, Komandan Resimen. Tetapi ternyata siaran itu diblokir oleh Untung atas perintah Aidit hingga pukul 1.00 siang karena sebab-sebab yang akan dijelaskan kemudian.

SUPARDJO MENINGGALKAN AIDIT DAN BERGABUNG DENGAN PRESIDEN: 10.30

Salinan kedua pernyataan Sabur diserahkan Supardjo kepada Untung dan, melalui Sjam kepada Aidit, memberi pesan yang jelas bahwa Presiden tidak bisa disingkirkan begitu saja, dan bahwa dia sepenuhnya berada di atas sadel dan memiliki segala kekuasaan berkaitan dengan kedudukannya sebagai Kepala Negara maupun Perdana Menteri Kabinet Dwikora. Ketika Supardjo hendak meninggalkan Pusat Komando menuju CENKO II untuk menemui Sjam, Untung dan para kolega lainnya, sambil memegang pernyataan Sabur, dia minta Presiden “mengirim penghargaan untuk teman-temannya,” yang dijawab oleh Presiden “baik, kembalilah segera”, menepuk pundaknya sambil berkata “hati-hati, tunjukkan bahwa aku tidak tersingkir”.¹⁶⁶ Tampak sekali bahwa perkataannya yang terakhir menunjukkan fakta bahwa Sukarno tidak mendapati namanya maupun posisinya sebagai Presiden dalam daftar Dewan Revolusi yang diperoleh dari Supardjo, dan bahwa dia mengirim pesan kepada Aidit bahwa tidak ada penyelesaian politik apapun yang bisa dilakukan tanpa dirinya. Karenanya Supardjo pantas menerima tepukan pundak itu. Berkat partisipasinya merancang pernyataan Sabur, Supardjo membantu Presiden menegaskan kekuasaan penuhnya.

Tetapi, tindakan Supardjo itu diluar kewenangan yang diberikan oleh komandan GESTAPU, dan bertentangan dengan tujuan Aidit membuat Presiden dengan sukarela mengundurkan diri, atau secara paksa dilengserkan. Dukungan Supardjo terhadap kewenangan Presiden di saat kritis merupakan langkah yang berlawanan, karena melencengkan jalur strategis PKI yang telah disepakati oleh para anggota militer GESTAPU. Dengan keberhasilannya menarik Supardjo ke pihaknya, Presiden menyerang telak Aidit, yang koalisinya mulai kacau karena ditinggal Supardjo, salah satu pemain inti dalam konspirasi itu.

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

Supardjo memberi secercah sinar mengenai sikapnya pada tanggal 1 Oktober 1965 di Pusat Komando Halim ketika menemui Presiden dalam *OTOKRITIK* yang ditulisnya pada pertengahan bulan Oktober 1966. Dokumen yang jujur ini menganalisis tiga faktor, yang menurut Supardjo, berperan dalam kegagalan GESTAPU setahun sebelumnya, dan kehancuran total PKI, termasuk strategi partai yang salah karena pada waktu itu nekad menuruti apa kehendak Aidit.

Rencana semula yang akan dilakukan: Revolusi bertingkat tiba-tiba dirobah menjadi gerakan PKI seluruhnya. Bila gerakan dilakukan bertingkat, yakni taraf pertama hanya terbatas gerakan di dalam tubuh AD dengan teknisnya sbb: setelah berhasil merebut pimpinan AD, maka mulai mengganti para panglima dan para komandan yang mempunyai fungsi potensiil dengan unsur-unsur, atau perwira² demokratis revolusioner. Kemudian dalam taraf kedua baru revolusi yang dipimpin oleh partai. Dimulai dengan gerakan² massa yang dibayangi oleh militer² yang progresip. Persis seperti yang dilakukan oleh lawan terhadap pemerintah sekarang.

Bila rencana revolusi bertingkat ini ditempuh, maka keuntungannya adalah sbb: andaikata kita dipukul, maka partai yang tetap mempunyai legalitet dan untuk dapat melindungi kawan² militer. Bila aksi taraf pertama berhasil, maka suatu pijakan yang baik untuk meloncat ke taraf revolusi berikutnya. Menurut hemat kami, kegagalan revolusi kita kali ini disebabkan diantaranya, dipindahkannya rencana operasi yang semula bersifat intern AD, menjadi operasi yang langsung dipimpin oleh Partai, sehingga menyebabkan terseretnya Partai dan diabrak-abriknya Partai.¹⁶⁷

Tampaknya Supardjo menyalahkan elite partai karena memperlakukan dua proses sebagai satu, dan menyiratkan bahwa partai telah mengabaikan komponen militer dalam gerakan itu dengan bertindak terburu-buru. Bagaimanapun, kebenarannya ada di tempat lain. Pada mulanya, Supardjo bahkan telah menyetujui strategi Aidit “jalan pintas menuju kekuasaan dengan atau tanpa Sukarno”, dan telah menandatangani *Dekrit No. 1* tentang Dewan Revolusi di PENAS, CENKO I pada dini hari 1 Oktober sebagai Wakil Komandan GESTAPU. Berdasar *Dekrit* ini Dewan Revolusi akan menurunkan Sukarno dari jabatan Presiden dengan asumsi PKI adalah “penguasa tertinggi” di negeri ini dan membubarkan Kabinet Dwikora, dan tidak akan dipakai dalam segala fungsi pemerintahan. Selain itu, bukankah ketika dipilih oleh Sjam di rumah

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Mayjen Rukman di Bandung pada tanggal 25 Agustus 1965, Supardjo berkata bahwa dia akan selalu menuruti perintah partai tidak peduli apa itu?

Kelihatan sekali Supardjo berkhianat pada Aidit di Halim karena pertemuannya dengan Presiden yang, sebagaimana kita ketahui, memperlakukan dia dengan tingkat persahabatan yang khusus, yang membuatnya berubah haluan. Dalam *OTOKRITIK* Supardjo menjelaskan keberpihakannya pada Presiden dengan menyalahkan Aidit karena tidak memberitahu dirinya, dan para kolega militernya, tentang kalkulasi mengenai Presiden, yakin bahwa semua itu “akan membuat kita tahu bila saatnya tiba”. Dan selama diadili dia secara konsisten menyatakan bahwa tujuan operasi itu bukan menurunkan Presiden tapi hanya mengurangi dan menjadikannya symbol saja.¹⁶⁸

Supardjo bisa saja benar, dalam menentukan posisinya sendiri pada tanggal 1 Oktober 1965 ketika bertemu Presiden di Halim, jika tidak PKI pasti mengikuti doktrin strategis Moskow tentang “transformasi secara damai menuju komunisme”. Doktrin pergantian secara damai, *Salami Tactics*, telah diterapkan dengan sukses di Eropa Timur untuk mendirikan rezim-rezim Demokrasi Rakyat di belahan dunia itu tidak lama setelah akhir Perang Dunia II. Kita tahu bahwa PKI menggunakan strategi tersebut hingga tahun 1964 ketika para pemimpinnya berada dalam pengaruh teori Peking dan Mao. Jika memakai strategi pertama Sukarno bisa saja tetap memerintah negeri ini beberapa saat selama masa transisi, tapi partai tidak bisa menghindari masalah bagaimana menyingkirkannya. Strategi Peking tidak memungkinkan terjadinya hal ini. Kita telah menyaksikan—ketika mendiskusikan “faktor kesehatan Presiden”, persyaratan strategis jangka panjang dan masa kini tentang Peking di Asia Tenggara dan saran Mao kepada Aidit untuk menyingkirkan Sukarno sesegera mungkin—bagaimana perintah ini telah memaksa Aidit melempar bola ke keranjang, membuat dia pada bulan Agustus mendorong Politbiro mengadopsi suatu “jalan pintas menuju kekuasaan dengan atau tanpa Sukarno”, di bawah keadaan hari itu yang memaksanya melakukan sesuatu.

Tentu saja Supardjo tidak bisa memahami segala keadaan yang mendesak Aidit, dan PKI untuk bertindak saat itu juga. Seiring perkembangan keadaan di Pusat Komando Halim, Aidit tidak punya pilihan lain kecuali mulai menerapkan strategi jalan terus “tanpa” Presiden, karena Presiden melanggar perjanjian sebelumnya, menegaskan kembali kekuasaannya, menentanginya, dan mengiriminya pesan eksplisit melalui Supardjo bahwa mundur sukarela tidak ada dalam kartu. Aidit pastilah menyadari bahwa Presiden berubah pikiran dan bertindak di luar skenario.

AIDIT MENYERANG PRESIDEN: 11.00

Aidit paham benar, bahkan sebelum Supardjo kembali ke CENKO I sekitar pukul 12 siang untuk melapor kepada Sjam dan Untung tentang pertemuannya dengan Presiden, bahwa pilihannya mengenai jalan pintas menuju kekuasaan telah tumbang di Pusat Komando Halim. Tindakan yang dipilihnya untuk memperoleh kekuasaan berakhir dengan kemenangan telak bagi Presiden. Pertama, membuat Presiden mengumumkan secara terbuka pembersihan para jenderal. Kedua, memaksanya melepas kekuasaannya, juga secara terbuka, di belakang Dewan Revolusi untuk mengesahkan rezim baru. Ketiga, melalui negosiasi pribadi dengan Aidit dan calon penguasa baru, segera mengumumkan, turun dari segala macam posisi resmi, menunjuk Omar Dhani sebagai Presiden sementara dalam periode transisi sampai pelantikannya oleh MPRS untuk disahkan kembali. Keempat, beristirahat di Cina dengan alasan kesehatan, dengan segala atribut dan fasilitas yang bisa dibayangkan serta menyanjung gelar Pemimpin Besar Revolusi dan pahlawan nasional.

Aidit tahu bahwa Presiden telah memerintahkan Supardjo menghentikan seluruh gerakan, hal ini mengasumsikan kekuatan penuh Kepala Negara, dan bahwa Supardjo telah berkhianat dengan berperan-serta mengembalikan Presiden ke kedudukannya semula. Yang menyampaikan berita buruk ini tidak lain Major Udara Sujono, anggota staf Omar Dhani, yang telah mengamati berbagai kejadian ini di Pusat Komando, pembelotan Supardjo ke pihak Presiden, termasuk bagaimana dia dengan tergesa-gesa pergi ke markas Aidit untuk menyampaikan padanya, lewat jendela, pesan tertulis tentang dampaknya beberapa saat sebelum pukul 11 siang.¹⁶⁹ Sujono sebenarnya merupakan jalur penting yang menghubungkan Omar Dhani dengan CENKO II dan Aidit serta sebaliknya. Mengenakan seragam Major AURI, dia menggunakan kendaraannya untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain di Halim, dan punya akses ke telepon, teletypes, komunikasi radio, yang dia atur bersama Heru, untuk memungkinkan Aidit berkomunikasi dengan dunia luar, termasuk dengan Peking. Sujono juga yang membawa Sjam dari CENKO II ke markas Aidit di rumah Suwardi naik mobil, pada pukul 8.00 malam untuk melaporkan kegagalan gerakan tersebut. Kesimpulan itu diambil dalam konferensi di CENKO II, dihadiri oleh Sjam, Untung, Supardjo, Latief, Heru, Sujono, serta lain-lainnya yang bertugas menjelang sore.¹⁷⁰

Karena pada saat itu jelas bagi Aidit, Lukman, Njono, dua anggota Politbiro yang membantu Aidit menentukan nasib partainya di rumah Suwardi di Halim

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pada tanggal 1 Oktober, bahwa strategi menurunkan Presiden dengan negosiasi dan cara damai telah gagal, maka persneling harus dipindah ke jalan terus “tanpa” Presiden dengan cara terang-terangan menggulingkannya, dan sekaligus siap melenyapkannya secara fisik sebagai tujuan akhir apabila perlu. Meskipun Aidit mempunyai kekuasaan Politbiro untuk melakukan tindakan terakhir itu, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan adanya persiapan praktis untuk mengimplementasikannya.

Bagaimanapun sangat mungkin Aidit dan komando militer melaksanakan rangkaian aksi itu, tapi dari Supardjo kita tahu bahwa pemain utama, Omar Dhani, yang seharusnya berhadapan dengan Presiden, akhirnya tidak berani bertindak melawan Presiden. Mempertimbangkan semua itu, pengaturan yang paling efektif satu-satunya dalam menggulingkan Presiden secara terang-terangan adalah menyuruh Sjam menyiarkan teks *Keputusan no.1* Dewan Revolusi melalui radio pada pukul 11.00 pagi, tidak lama sebelum Supardjo kembali ke CENKO II satu jam kemudian, pada sore harinya. Selain itu, stasiun radio tidak diperbolehkan menyiarkan pernyataan Supardjo-Sabur bahwa Presiden benar-benar sehat dan tetap memerintah negara ini.

Disamping itu, penting sekali menyiarkan *Dekrit No. 1* saat itu juga untuk memberi pertanda yang kuat dan kewenangan yang besar dari pusat bagi pembentukan Dewan Revolusi di seantero negeri. Karena beberapa jam telah berlalu sejak penyiaran *Komunike* pukul 7.20 pagi maka dewan ini akan segera “dibentuk” di Pusat dan di seantero negeri. Selama empat jam itu, waktu yang relatif lama untuk sebuah revolusi jenis ini, kelompok revolusi yang disusun oleh Biro Khusus seluruh negeri, telah menanti-nanti dengan gelisah siapa penguasa nantinya dan instruksi mendetail dari Pusat untuk jalan terus membuang tatanan lama dan menggantikannya dengan agen regional dan lokal rezim baru. Jadi akhirnya pada pukul 11.00 siang, pesan yang benar telah datang memberi tahu mereka bahwa Dewan Revolusi telah dibentuk di Jakarta sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini, bahwa Kabinet Dwikora telah diganti, dan pada saat yang sama menyerukan untuk membentuk dewan yang sama di daerah, memberi mereka detail kekuasaan, keanggotaan, dan aspek-aspek lain dalam aksi mereka.

Siaran tentang *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi (DOKUMEN No.9) mengulang beberapa bagian dari *Komunike* pagi untuk memberi efek bahwa suatu pembersihan telah dilakukan malam itu terhadap Dewan Jenderal yang berencana melakukan kudeta pada Hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober. Usaha ini telah digagalkan dan beberapa jenderal ditangkap.

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

Inti *Dekrit* itu adalah pasal II, yang mengatakan:

Untuk melancarkan tindak lanjut daripada tindakan 30 September 1965, maka oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil dan orang-orang militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya. Dewan Revolusi dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September.”

Akan tetapi pasal III *Dekrit No.1* menyerang Sukarno tanpa ampun, sama sekali tidak menyebut nama serta jabatannya sebagai Presiden:

“Dengan jatuhnya seluruh Kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas Menteri berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Revolusi Indonesia cq. Menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.”

Pasal IV menyebutkan susunan kekuasaan baru yang ada di negara ini:

“Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah-daerah dibentuk Dewan Revolusi Propinsi (paling banyak 25 orang). Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 orang). Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang) dan Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang), terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

Dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di Propinsi dan Kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) masing-masing sedangkan Kecamatan dan Desa dibantu oleh Pimpinan Front Nasional setempat

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

yang terdiri dari orang-orang yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

Pasal V Dekrit itu menyatakan bahwa Presidium Dewan Revolusi terdiri dari para Komandan dan Wakil Komandan Gerakan 30 September. Ketua Dewan Revolusi adalah Komandan Gerakan itu, yaitu Untung, sementara Wakil Ketua Dewan adalah Wakil Komandan Gerakan itu. Pasal VI, pasal terakhir, menyatakan bahwa komposisi Dewan Revolusi Tingkat Propinsi harus disetujui oleh Dewan Revolusi di Jakarta. Dewan Revolusi Tingkat Propinsi kemudian akan menyetujui komposisi Dewan Revolusi Kabupaten, dan selanjutnya Dewan Revolusi Kabupaten akan menyetujui komposisi Dewan Revolusi Kecamatan, begitu seterusnya hingga tingkat Desa. Di sini “sentralisasi demokrasi”, salah satu aspek paling penting rezim komunis seluruh dunia, terlihat jelas dan tengah menyongsong masa depannya.

Dekrit No. 1 ditandatangani oleh Presidium — dengan 5 anggota dari Gerakan 30 September, terdiri dari Untung, sebagai Komandannya, dan Wakil Komandan yang mewakili keempat angkatan: Brigjen Supardjo mewakili AD; Letkol Udara Heru mewakili AURI; Kolonel Laut Sunardi mewakili Angkatan Laut; Komisar Besar Polisi Anwas mewakili Kepolisian.¹⁷¹

Pesan pokok dari dekrit itu bisa jelas dipahami. Sukarno telah digulingkan dari kekuasaan, dijadikan rakyat biasa, dan dia harus menuruti kesepakatan sebelumnya tentang mundurnya dia secara terhormat dari kancah politik dan pensiun di Cina. Pertama, Dewan Revolusi di Jakarta yang merupakan satu-satunya sumber kekuasaan politik negara ini dan penguasa yang sah, telah membentuk cabang-cabangnya di seluruh tingkat administrasi propinsi, kabupaten dan desa di seantero negeri. Sukarno bukan Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata lagi. Kedua, Kabinet Dwikora telah dibubarkan, dan semua menteri dibubarkan juga, termasuk Sukarno sebagai Perdana Menteri kabinet itu. Kabinet baru tidak akan ditunjuk oleh Presiden tetapi oleh Dewan Revolusi. Ketiga, semua kekuatan efektif di negara ini paling tidak, di atas kertas, berada di tangan Untung dan keempat wakilnya yang merupakan presidium Dewan Revolusi dengan Untung sebagai Ketua. Semua susunan politik lama, di semua tingkat pemerintahan, telah tamat keberadaannya. Negara sedang bergerak, paling tidak di atas kertas, dari Demokrasi Terpimpin di bawah Sukarno, menuju Demokrasi Rakyat, di bawah pimpinan Aidit.

KEKUASAAN KEMBAR: PRESIDEN VS AIDIT: 10.00-16.00

Ketika Aidit dan para anggota Politbiro ada bersama dengannya di Halim, untuk mencapai tujuan mereka, langsung menyerang tatanan lama dengan Sukarnonya, siaran tentang *Dekrit No. 1* meletakkan landasan hukum bagi tatanan baru di bawah hegemoni PKI. Melihat hal ini, revolusi belum selesai, dan karenanya harus disempurnakan dengan menggunakan kekuatan militer yang ada, juga perangkat lainnya, untuk memberi efek kepada penyampaian deklarasi dekrit itu sehingga tidak akan menjadi sekedar deklarasi kesanggupan di atas kertas tapi merupakan realita yang benar-benar didukung oleh kekuasaan.

Sesungguhnya, di tahap spesifik proses revolusi Indonesia ini, negara menampilkan suatu fitur yang disebut *Dual Power* (kekuasaan kembar) dimana tatanan lama dan tatanan baru berjalan bersama selama beberapa waktu, suatu keadaan yang harus diakhiri sesegera mungkin oleh salah satu kontestan untuk menegaskan dominasinya dengan jalan menghancurkan pihak lain. Kekuasaan tertinggi tidak bisa dibagi-bagi. Aidit dengan para kolega Politbironya di Halim, tidak disangkal lagi, merupakan murid yang bersemangat dalam revolusi itu, tahu benar bahwa kekuatan yang memadai pada tahap ini akan bisa mentransformasikan tujuan *Dekrit No. 1* menjadi kenyataan dan mengesahkan pengalihan kekuasaan dan penetapan tatanan baru. Dalam keadaan revolusioner seperti ini kekuatan politik hidup dari bedil. Mentor Aidit, Mao, akan mendesak dia untuk menggunakan kekuatan militer untuk merebut kekuasaan. Kalau saat itu Aidit masih berada dalam binaan Soviet, Lenin pasti juga mendesaknya untuk melakukan hal yang sama. Tidak bisa dipungkiri, untuk itu Lenin mencontohkan keputusan yang pernah diambilnya dalam mengakhiri *Dual Power* di Rusia dengan memerintahkan Petrograd Soviet menyerbu beberapa gerbang Istana Musim Dingin, dan di bawah panji *Seluruh Kekuasaan Bagi Soviet* menyerang Pemerintahan Darurat Kerensky.

Memang benar Untung dan Aidit hanya memimpin 7.000 pasukan, aplikasi dari strategi jalan terus “tanpa” Presiden, dan untuk secepatnya mengakhiri *Kekuasaan Kembar* yang berkepanjangan, Aidit mengambil langkah yang sama berikut ini, yaitu menginterpretasikan *Dekrit No. 1* dalam kenyataan dan menegaskan kekuasaan rezimnya, sebagai satu-satunya sumber kekuasaan dan otoritas yang sah di negeri ini, dengan cara:

Satu, melakukan kontrol fisik Pusat Komando dengan tindakan militer untuk memisahkan Presiden dari kelompok itu. Hal ini, tentu saja merupakan pekerjaan yang sangat sulit, dan kita tidak punya detail mengenai apa saja

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

yang mungkin dipikirkan Aidit untuk merebut kesempatan itu, kecuali beberapa indikasi yang tidak begitu jelas bahwa Presiden akan “diamankan.”

Kedua, menyuruh Untung, sebagai Ketua Dewan Revolusi, mengeluarkan dekrit lain untuk mengisi kevakuman kekuasaan yang terjadi karena “pengamanan” Presiden dan pembubaran tatanan lama. Dekrit ini akan menunjuk Omar Dhani sebagai Presiden, yang akan merangkap pula pos Menko/Hankam, menunjuk Aidit sebagai Perdana Menteri Kabinet Gotong Royong, dan Mayjen Pranoto sebagai Men/Pangad yang baru. Para pemimpin baru ini akan bertindak sebagai pengontrol keempat angkatan, menggantikan susunan komando lama dengan menunjuk staf baru yang mendukung rezim baru, dan atas perintah mereka hari itu juga mengerahkan Angkatan Bersenjata di belakang mereka untuk melakukan revolusi bersenjata. Menyesali kegagalan GESTAPU dalam *OTOKRITIK*-nya, Supardjo menyiratkan bahwa tindakan semacam itu seharusnya dilakukan segera setelah pembersihan para jenderal, dan para pemimpin partai harusnya memutuskan menentang dan jalan terus “tanpa” Sukarno saat mereka berada di Halim.

Ketiga, menyuruh Presiden Omar Dhani menyapa seluruh bangsa lewat radio, dengan berkata bahwa gerakan itu telah mendapat restu dari Presiden, yang, karena alasan kesehatan dan atas rekomendasi dokter pribadinya, tidak bisa melanjutkan tugasnya dan lebih baik menjalani perawatan kesehatan. Presiden baru akan membentuk Dewan Revolusi di seluruh negeri, untuk melengkapi susunan politik sistem pemerintahan baru yang dibentuk oleh revolusi dan atas dukungan angkatan bersenjata.

Empat, membiarkan PKI menggerakkan para anggotanya sendiri maupun ormas-ormas lain yang menjadi *underbow*-nya, untuk mendukung rezim baru dan menyingkirkan sisa-sisa tatanan lama dari kancah kehidupan publik, memberi ciri khas rezim baru suatu aura dan ethos murni “revolusi rakyat.” Tugas ini dilakukan oleh Biro Khusus dan cabang-cabangnya di daerah dalam rangka pembentukan kelompok revolusioner baru dalam komando AD tingkat daerah, dan dalam menggerakkan organisasi massa, sebagaimana kita ketahui, akan menjadi aset dan dukungan bagi rezim baru di seluruh negeri.

Apakah semua ini, atau langkah-langkah serupa yang diperintahkan oleh Aidit, memungkinkan rezim baru mengakhiri *Kekuasaan Kembar* secara cepat? Besar kemungkinan bahwa Aidit memikirkan semua itu dan aturan-aturan yang sama untuk memperkirakan bahwa Presiden tidak akan bekerjasama dalam implementasi segala sesuatu setelah pembersihan, dan partai harus jalan terus tanpa Presiden, bahkan menentanginya. Apakah Politbiro juga memper-timbangkan kemungkinan ini, itu masih rahasia.

AIDIT MENGANGKAT PRESIDEN KEMBALI: 13.00

Aidit dan para koleganya di rumah Suwardi di Halim gagal menerapkan serangkaian aksi itu meskipun pengingkaran Presiden terhadap perjanjiannya dengan Aidit benar-benar bisa menjamin dilakukannya tindakan itu, yang sepenuhnya sesuai dengan maksud Politbiro. Tetapi ternyata mereka justru kembali ke strategi jalan terus “dengan” Presiden, membatalkannya hanya beberapa saat lalu karena pengaruh pernyataan Sabur-Supardjo, ketika Presiden diasumsikan memiliki kekuasaan penuh dan menolak mengumumkan secara terbuka pembersihan para jenderal, menampik daftar nama anggota Dewan Revolusi yang disodorkan padanya oleh Supardjo. Sekarang mereka memasang dia kembali sebagai Presiden dengan mengizinkan RRI menyiarkan pernyataan Sabur-Supardjo pada pukul 1.00 siang, bahwa Presiden tetap bertindak sebagai Kepala Negara dan masuk untuk bernegosiasi dengannya—bukan melalui Aidit melainkan melalui Supardjo, sesuai pilihan Presiden—tentang komposisi Dewan Revolusi dan penggantian Yani. Apakah Rencana Besar yang bertujuan menyingkirkan Presiden, hanya karena pengingkaran perjanjian dengan Aidit itu, jadi benar-benar dibatalkan? Tentu saja tidak. Mendudukkan kembali Presiden saat itu semata-mata tindakan taktis untuk membuat presiden mau memulai kembali proses negosiasi.

Interpretasi tentang motif mereka ditarik dari pernyataan Sabur-Supardjo, yang kemungkinan besar dibuat untuk membuat Aidit percaya masih ada tempat baginya untuk bernegosiasi dengan Presiden demi mencapai tujuan-tujuannya. Meskipun memang benar pernyataan itu menegaskan kembali kepemimpinan Presiden, yang jelas-jelas merupakan serangan terhadap rencana Aidit untuk jalan terus “tanpa” Sukarno, pada saat yang sama pernyataan itu tidak mengutuk aksi Untung maupun menentang pembentukan Dewan Revolusi beserta cabang-cabangnya di seluruh negeri.

Tidak diragukan lagi, pembelotan Supardjo ke pihak Presiden pasti telah memainkan peranan cukup besar dalam keputusan Aidit untuk mengubah arah menjadi jalan terus “dengan” Presiden di titik itu, setidaknya untuk sementara. Rupanya adalah penting baginya untuk menguji kemungkinan merundingkan sesuatu penyelesaian dengan Sukarno, guna memastikan apakah hal itu masih mungkin atau tidak, sebelum melancarkan opsi yang paling tidak disenangi, yaitu menggusur Presiden secara paksa. Ujian itu teramat penting dipandang dari kreda Aidit, yang dikemukakan olehnya dalam rapat-rapat

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Politbiro di akhir bulan Agustus, bahwa jika anggota “Komando Pembersihan,” dan anggota Angkatan Bersenjata pada umumnya, dihadapkan pada dilema memilih antara Presiden atau PKI, mereka pasti akan memilih Presiden. Prospek memberikan wewenang pada Untung untuk melancarkan serangan terhadap Presiden sekarang –untuk secara fisik menggusur dia—tak pelak lagi sangat menggoda Aidit sebagai pilihan terakhir jika terpaksa. Tetapi untuk sementara ia harus menahan diri untuk mengevaluasi resiko akibat langkah ini, dan mengevaluasi kemungkinan reaksi dari mayoritas Angkatan Bersenjata dan masyarakat luas. Ada kemungkinan yang menggelisahkan bahwa satu gerakan yang keliru saja akan membuat partai sempoyongan, sendirian, dan terisolir.

Ketika mempertimbangkan kemungkinan menahan Sukarno, atau kalau tidak “mengamankan” dia pada waktu itu, Aidit di Halim pasti betul-betul menyadari, dan barangkali sepenuhnya dibuat lumpuh oleh, dilema serius yang dikenal sebagai “faktor Presiden Sukarno”:

“Kita sering mengatakan bahwa sedikit-dikitnya *tigapuluh persen* dari Angkatan Bersenjata adalah pengikut Palu Arit. Tetapi seringkali kita juga keliru karena melupakan berapa dari tigapuluh persen tadi yang loyal pada Partai dan berapa yang loyal pada Presiden Sukarno. Orang bisa mengatakan dengan pasti bahwa ketika Partai dan Bung Karno dipersatukan, ketigapuluh persen dari Angkatan Bersenjata itu bersumpah akan hidup mati membelanya. *Tetapi ketika mereka harus memilih antara Partai dan Presiden Sukarno, boleh dipastikan mayoritas akan menunjukkan kesetiaan lebih besar pada Sukarno; paling banter mereka akan menempati posisi yang tidak stabil. Itu sebabnya faktor Presiden Sukarno harus dicamkan betul.*”¹⁷²

Jika asumsi kita tepat, Aidit rupanya sampai pada kesimpulan bahwa sebaiknya tidak mendesak pasukan GESTAPU ke dalam aksi fisik apapun yang melawan Presiden, sebab jika harus memilih antara Presiden atau PKI, mayoritas orang akan memilih Presiden. Bahkan komando GESTAPU juga bakal terpolarisasi dalam masalah ini. Barangkali Untung dan Latief bisa diharapkan untuk membuktikan diri lebih loyal pada PKI ketimbang pada Presiden. Khususnya Untung, yang pernah mengalami kekalahan pemberontakan komunis di Madiun dalam bulan September 1948, tahu betul bahwa melangkah setengah-setengah pada saat-saat kritis adalah fatal, dan karena itu, kali ini, ia harus jalan terus sampai tuntas, apapun juga hasilnya. Tetapi posisi Supardjo berbeda, karena ia sudah memihak Presiden di Pusat Komando Halim. Omar Dhani, salah satu pemain utama yang lain, juga enggan bertindak melawan Presiden.

Presiden Meloloskan Diri dari Perangkap Aidit

Dalam salah satu rapat di bulan Agustus, Politbiro dan Aidit pernah mempertimbangkan menggunakan Pemuda Rakyat untuk melaksanakan pekerjaan kotor terhadap jenderal-jenderal yang tertangkap, untuk meredakan nurani para tentara profesional yang terganggu. Sekarang para sukarelawan itu, yang secara ideologis sedang garang-garangnya, bisa dibawa ke Halim dari Pondok Gede dalam tempo beberapa menit saja untuk menyalpkan orang-orang yang dijadikan target di Pusat Komando itu, termasuk Supardjo, mengingat “keberanian” para pemuda itu dalam membunuh jenderal-jenderal pada dini hari tadi. Rupanya gagasan itu dikesampingkan sementara untuk memberikan kesempatan pada upaya merundingkan penyelesaian, sampai tiba saat yang tepat untuk menyalpkan Presiden sebagai langkah penting menggerakkan revolusi memasuki tahap berikutnya. Pendirian ini, yakni pada akhirnya menyalpkan Presiden, tidak dapat Aidit tinggalkan.

Garis pemikiran itu langsung dilaksanakan. Aidit memanggil Sjam ke markas besarnya di rumah Suwardi dan memberitahu dia bahwa operasi harus dilanjutkan terlepas dari perintah Presiden untuk melakukan sebaliknya, dan bahwa ia harus mengumpulkan rekan-rekannya di CENKO II dan menyampaikan instruksinya pada mereka dan bertindak sesuai instruksi. Pada waktu itu orang-orang di CENKO II tengah goyah di bawah dampak kabar Supardjo, yang kembali sekitar pukul 2.00 siang dari pertemuannya dengan Presiden di Pusat Komando, saat memberitahu pada mereka bahwa Presiden telah memerintahkan dia agar menghentikan semua aktivitas, menegaskan kekuasaannya yang penuh sebagai Kepala Negara, tetapi tidak “merestui” maupun “mengutuk” pembersihan para jenderal itu. Sementara moril orang-orang yang duduk di meja atau berdiri di sekitarnya melorot, Sjam mendesak mereka dengan instruksi Aidit bahwa operasi harus diteruskan, mengambil dari tasnya sebuah salinan *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi, membacakan dokumen itu keras-keras dan menyuruh mereka masing-masing menandatangani, untuk kedua kalinya, sebagai ungkapan komitmen mereka yang lebih tegas terhadap perjuangan. Kecuali Supardjo,¹⁷³ semua memberikan tandatangan, yang pasti telah memperkuat tekad Aidit untuk menjalankan kebijakan yang sekarang, yaitu menentang Presiden. Kali pertama dokumen itu ditandatangani oleh semua orang, termasuk Supardjo, adalah pada waktu dini hari di CENKO I atas desakan Aidit. Dengan demikian koalisi Aidit dirasakan akan mampu bertahan, terlepas dari pembelotan Supardjo.

Ketika Mayor Bambang Supeno, Komandan Batalyon 530, kembali ke CENKO II sekitar pukul 12 siang, setelah bertemu Presiden sebagai salah seorang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

anggota delegasi Supardjo, ia melihat komando revolusioner itu dalam keadaan “berantakan”, anggota-anggotanya tertekan akibat tindakan Presiden, pembelotan Supardjo, dan instruksi-instruksi Aidit untuk meneruskan operasi. Sambil duduk atau berdiri di sekitar meja, dengan salinan *Keputusan No.1* Dewan Revolusi di atasnya, orang-orang itu meneliti daftar nama-nama para anggotanya, sambil mendiskusikan cara memaksa Presiden agar mendukungnya.¹⁷⁴ Letkol Untung pasti sangat tersengat oleh sikap Presiden yang tidak secara terbuka “merestui” tindakannya menculik para jenderal dan mengetuai Dewan Revolusi, sebab Presiden-lah yang memerintahkan dia untuk menghabisi para jenderal. Ia betul-betul marah, sampai bisa saja ia menyerbu Pusat Komando itu, bersama Pemuda Rakyat yang dipersenjatai, untuk “mengamankan” atau membunuh Presiden langsung di tempat. Tindakan seperti pasti akan melibatkan, kemungkinan besar, “mengamankan” Supardjo juga, sebagai pengkhianat perjuangan. Tentu saja, faktor pengendali dalam situasi itu adalah sikap Omar Dhani. Di Halim, di wilayahnya sendiri, ia bisa memanggil sejumlah besar pasukan AURI yang ditempatkan di pangkalan itu dan, mengingat pelatihan dan perlengkapan mereka yang lebih unggul, mereka bisa mengalahkan setiap operasi yang akan dilancarkan oleh pasukan GERWANI dan sukarelawan. Meskipun begitu, situasi akan sangat lain andaikata Dhani memutuskan untuk meninggalkan Presiden dan memihak Aidit. Dan hal ini, sebagaimana kita ketahui dari Supardjo, bukanlah kartu Dhani, sebab ia tidak siap untuk bertindak menentang Presiden.

Dengan demikian, jika dipertimbangkan dalam konteks ini, Aidit membuat keputusan yang tepat untuk tidak memberikan perintah menyerang Presiden pada pukul 11.00 siang ke Pusat Komando itu untuk menggesernya, sebab Aidit tidak memiliki dukungan publik, bahkan pribadi, untuk pembentukan Dewan Revolusi, tanpa menguji kemungkinan merundingkan penyelesaian dengan Presiden.

Meskipun betul bahwa di Pusat Komando itu Presiden menolak untuk memberikan pengakuan seperti mendukung atau “merestui” Dewan Revolusi, namun Presiden siap untuk membuat kesepakatan dengan Aidit di rumah Susanto, sebagaimana sebentar lagi akan terlihat, setelah tiba di sana pada pukul 1.00 siang. Lebih-lebih lagi, ditimbang dari perilaku Presiden di rumah Susanto, boleh dipastikan bahwa ia, secara pribadi, sebenarnya siap untuk memenuhi perjanjiannya dengan Mao dan Aidit di bulan Agustus yang lalu, kecuali satu hal, yaitu ia mengubah niatnya untuk beristirahat ke Cina dengan alasan kesehatan setelah pembersihan para jenderal. Kesehatannya ternyata

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

membaik sesudah jatuh pingsan nyaris meninggal pada 4 Agustus 1965, dan rupanya ia ingin tetap memegang kemudi negara sebagai Presiden.

Dengan demikian, di rumah Susanto, Presiden dihadapkan pada dua masalah besar. Yang pertama adalah masalah bagaimana mengikut-sertakan Waperdam II Dr. Leimena dan, yang paling penting, ketiga Panglima Angkatan Bersenjata, karena AURI sudah masuk, untuk mengakui Dewan Revolusi dengan jalan setuju menjadi anggota-anggotanya, dan dengan demikian melegitimasiannya di mata seluruh masyarakat. Sebagaimana akan kita lihat, Presiden bekerja keras untuk menyerahkan seluruh struktur kekuasaan ke tangan Aidit. Kedua, Presiden bertekad tetap sebagai kepala negara, dengan mengerahkan semua fungsinya di rumah Susanto dan memberikan isyarat-isyarat yang begitu gamblang tentang fakta ini kepada Aidit, tetapi Aidit ternyata lamban dalam menangkap fakta ini dan menyesuaikan strateginya. Andaikata Aidit menangkap isyarat bahwa Presiden siap mengakui Dewan Revolusi, dengan imbalan Aidit mengakuinya sebagai kepala negara, Aidit memang tidak akan mendapatkan satu kue secara utuh, tetapi setengah kue pasti sudah di tangannya. Hanya Supardjo yang mampu menangkap aspek paling penting dari keseluruhan strategi GESTAPU ini.

Sekarang kita harus mengikuti Presiden dan rombongannya ke rumah Susanto. Kita akan melihat Presiden di sana meraba-raba untuk membuat sesuatu kesepakatan dengan Aidit sebelum dan selama makan siang, dengan menyeret presidium pemerintahannya ke dalam kesepakatan itu, juga para panglima dari ketiga Angkatan Bersenjata, dan melancarkan pertarungan pribadi agar tetap bertahan sebagai kepala negara. Ketika tiba di rumah Susanto, di sakunya Presiden telah mengantongi daftar nama-nama dari para anggota Dewan Revolusi yang distensil, yang baru saja diberikan padanya oleh Supardjo di Pusat Komando Halim. Tetapi karena nama Presiden tidak tercantum dalam jajaran penguasa negeri, maka di rumah Susanto ia menjawab tantangan itu dengan mengirim isyarat yang jelas pada Aidit agar mau berkompromi. Sayangnya mereka berdua kehabisan waktu untuk mencapai suatu kesepakatan baru, sebab Jenderal Suharto dengan cepat mulai bergerak mendekat.



IX

LAKON WAYANG KULIT *KOLOMONGSO* SAAT MAKAN SIANG: RUMAH KOMODOR SUSANTO: 1 OKTOBER 1965

MUSYAWARAH BESAR 12.00-23.00

Sebelum Presiden meninggalkan Pusat Komando Halim dan berjalan ke arah rumah Susanto, yang ditandai sebagai D-1 (GAMBAR X) dan berlokasi di dekat Pusat Komando Halim, ia memutuskan untuk mengundang para Panglima dari keempat Angkatan, dan para Waperdam-nya, untuk menghadiri jamuan makan siang. Ia berpaling pada Komisaris Polisi Sumirat dan memerintahkan dia agar memanggil Men/Pangal Laksamana Madya R.E. Martadinata; Men/Pangak Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo; Jaksa Agung Brigjen Sutardjo dan Mayjen Umar Wirahadikusumah, Komandan Garnisun Jakarta. Kemudian ia mengirim pesawat kepresidenan ke Medan untuk menjemput Waperdam I Dr. Subandrio, yang telah pergi ke Sumatra pada 28 September. Dr. Johannes Leimena, Waperdam II, tiba di Halim dengan helikopter kepresidenan *Sikorsky* pada pukul 12.00 tengah hari. Laksamana Madya R.E. Martadinata tiba pada pukul 13.00, dan Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo juga tiba pada pukul 13.00 dengan helikopter. Dengan demikian semua datang kecuali Mayjen Umar dan Dr. Subandrio; yang disebut terakhir ini bersama Njoto sedang berada di Sumatra untuk membentuk cabang Dewan Revolusi di sana dan menjalankan sebuah misi yang terkait dengan pengaturan kemungkinan pengunduran diri

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Presiden ke Cina. Tetapi Mayjen Umar menolak panggilan Presiden dengan mengirim sebuah pesan yang menyatakan bahwa pertama-tama ia harus lebih dulu mendapat izin dari Jenderal Suharto, yang pada waktu itu sedang bercakap-cakap dengannya di KOSTRAD. Sukarno kemudian memerintahkan Sumirat dan Kolonel Widjanarko, Ajudannya, untuk pergi ke KOSTRAD menjemput Umar. Sekitar pukul 11.30 Sukarno, Dhani, Sabur, dan lain-lain meninggalkan Pusat Komando dan pergi makan siang ke rumah Komodor Susanto, dimana pengaturan-pengaturan telah dilakukan malam sebelumnya untuk menerima Presiden. Sebelum meninggalkan Pusat Komando, Presiden menulis sepucuk surat untuk Dewi, yang menyatakan bahwa ia sedang berada di tengah-tengah sebuah revolusi dan bahwa (Dewi) harus hati-hati dan tetap tinggal di rumah.

Di rumah Susanto, Presiden melakukan pertunjukan akrobat yang luar biasa, dan rumah itu betul-betul ideal untuk itu.¹⁷⁵ Presiden berkali-kali ngobrol dengan beberapa tamunya di satu kamar, dan kemudian pindah ke kamar lain untuk konsultasi pribadi dengan tamu-tamu lain. Terutama Omar Dhani yang Presiden undang untuk konsultasi pribadi sampai beberapa kali sepanjang siang itu, atau Dhani sendiri yang mendekati Presiden, sebab orang-orang di rumah Susanto itu bersama dengan Presiden merupakan bauran yang menggugah rasa ingin tahu, yang terdiri dari para pendekar kabinet Dwikora yang telah didemisionerkan dengan para simpatisan aksi Untung dan Dewan Revolusi. Presiden kemudian berkali-kali mengundang Supardjo untuk menerimanya secara pribadi di kamar lain. Sepanjang siang ia menemui Supardjo secara pribadi sampai empat kali, untuk melakukan –lewat dia— perundingan dengan Aidit dan para pemimpin Dewan Revolusi yang bertempat di CENKO II tidak jauh dari rumah Susanto. Supardjo berkali-kali datang dari belakang rumah melalui pintu masuk pelayan dan dapur, dan memasuki salah satu kamar samping tanpa harus melewati ruang tengah untuk menghindari kontak dengan tamu-tamu Presiden, meskipun ia melihat mereka. Tetapi, sementara waktu berlalu dan kekuasaan bergeser –dari Aidit ke Sukarno dan kemudian ke Suharto—dan ketika setelah tengah hari pertahanan Presiden melawan KOSTRAD Suharto menjadi masalah utama, Supradjo mulai bergerak bebas kesana-kemari di dalam rumah Susanto untuk ngobrol dengan semua yang hadir, khususnya Omar Dhani.

Dalam *setting* inilah, Presiden mempertunjukkan permainan akrobat dalam tradisi terbaik sinkretisme Jawa, dimana proposisi-proposisi yang bertentangan diperbolehkan hidup berdampingan dan berinteraksi sampai lama

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

tanpa pertarungan fisik, sampai salah satu dari mereka muncul sebagai dominan di bawah panduan intuitif sang dalang, yang memecahkan masalahnya tanpa kehilangan muka bagi siapapun. Di rumah Susanto, itu ibarat pertunjukkan *wayang kulit Kolomongso* dan *musyawarah*, sebab di kamar duduk rumah itu kekuasaan memproyeksikan diri sebagai sebuah *kontinuum*, sementara pasang naik dan surutnya bergeser dari tangan satu pemain ke tangan pemain lain, mengejawantahkan diri dalam bentuk-bentuk simbolik tanpa atribut fisik apapun.

Titik tolak dari masing-masing pemain utama –Aidit, Presiden, Suharto—terdiri dari hal-hal berikut ini pada pukul 11.30 pagi, 1 Oktober 1965. Aidit memulai hari itu dengan tangan yang terkuat. Pada pukul 5.00 pagi ia sudah berhasil menculik jenderal-jenderal; mulai pukul 10.00 ia sudah menguasai Presiden di Halim; dan mulai 11.00 ia berhasil membuat Presiden didepak dari kekuasaan dengan jalan membubarkan Kabinet Dwikora dan membentuk Dewan Revolusi sebagai otoritas tertinggi di negeri itu.

Meskipun begitu, Presiden membebaskan diri dari jebakan Aidit dengan jalan mengarahkan kekuasaan penuh sebagai kepala negara lewat pernyataan Sabur-Supardjo pada pukul 10.30, dan untuk sementara tidak mendukung atau mengutuk pembersihan itu serta Dewan Revolusi, ia berhasil memikat Supardjo agar membelot dari Aidit. Puncaknya adalah bahwa Presiden, yang sedang memegang kendali sebagai kepala negara, siap berunding dan berkompromi untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan Aidit yang masuk akal. Pada gilirannya Aidit meninggalkan strategi jalan terus tanpa Presiden, mengakui dia sebagai kepala negara dengan mengizinkan pernyataan Sabur-Supardjo disiarkan pada pukul 1.00 siang, dan siap berkompromi dengan Presiden dan merundingkan penggantian Yani, serta komposisi Dewan Revolusi sebagai pendahulu Pemerintahan kabinet Gotong Royong.

Jenderal Suharto memulai hari itu dengan posisi paling lemah. Di KOSTRAD, dari siaran *Komunike* pada pukul 7.20 dan kemudian *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi pada pukul 11 siang, ia menyimpulkan bahwa GESTAPU adalah sebuah *putsch* (kudeta militer), bahwa Presiden disandera dan bahwa ia harus membebaskan Presiden serta melawan persekongkolan itu.

Mari kita lihat bagaimana ketiga aktor kunci itu memainkan wayang-wayang mereka, bagaimana peruntungan mereka berubah, dan dimana mereka berdiri di akhir marathon delapan jam itu, persisnya pada pukul 8.00 malam, 1 Oktober 1965.

PRESIDEN MENYERAHKAN KABINETNYA KE TANGAN AIDIT: 13.00

Rombongan Presiden di rumah Susanto itu mewakili konsentrasi tertinggi otoritas politis di Indonesia pada saat itu, karena semua orang yang hadir, bahkan panglima-panglima angkatan, adalah menteri-menteri yang memegang jabatan dalam Kabinet Dwikora. Setiba mereka di rumah Susanto, pertama di ruang duduk dan kemudian di meja makan untuk santap siang bersama Presiden, duduklah Johannes Leimena, Waperdam II; Omar Dhani, Men/Pangau; R.E. Martadinata, Men/Pangal; Sutjipto Juidiodiohardjo, Men/Pangak; dan Brigjen Sutardjo, Jaksa Agung. Staf Presiden, perwira-perwira keamanan, komunikasi dan intelijen yang menjadi tamu-tamunya ditempatkan di daerah-daerah sekitar, yaitu di galeri depan, sebagaimana digambarkan oleh Bambang S. Widjanarko, atau berkeliaran di depan rumah dan di kebun, dimana makan malam belakangan disajikan. Tetapi Presiden tidak pernah meninggalkan rumah itu.¹⁷⁶

Sebelum dan selama makan siang, Presiden mengarahkan diskusi ke arah mengevaluasi kejadian-kejadian hari itu. Ia mengarahkan diskusi agar menjauh dari mengutuk pembunuhan terhadap para jenderal, menyinggung-nyinggung keberadaan Dewan Revolusi, dan bahwa sesuatu bentuk akomodasi terhadap Dewan itu harus dilakukan, dan kemudian meminta komentar-komentar serta saran-saran dari para menteri yang berkumpul. Presiden kemudian menyuruh Brigjen Sabur menyerahkan pada Dr. Leimena daftar nama-nama anggota Dewan revolusi, yang sebelumnya telah ia peroleh dari Supardjo di Pusat Komando,¹⁷⁷ untuk kemudian diedarkan pada menteri-menteri lain yang hadir, dan kemudian berpaling pada mereka, satu per satu, untuk mendengarkan pandangan-pandangan mereka.

Ruangan itu dipenuhi ketegangan antara Leimena dengan Sutardjo di satu pihak, dan Omar Dhani di pihak lain, akibat pandangan-pandangan mereka yang saling bertentangan. Leimena memberitahu hadirin bahwa rumahnya, yang berada disamping rumah Nasution, telah ditembaki pada dini hari tadi, dan bahwa mengingat adanya penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal, maka Presiden harus sangat hati-hati dan tidak mempercayai laporan-laporan yang berasal dari GESTAPU. Martadinata, yang berada di KOSTRAD sebelum tiba di rumah Susanto pada pukul 13.00, memberitahu Presiden bahwa Jenderal Suharto telah mengambil-alih sementara komando atas Angkatan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Darat, dan mengusulkan agar Presiden sebaiknya menghubungi dia, tetapi Presiden menolak.¹⁷⁸

Sebagaimana diceritakan kepada penulis oleh Dr. Leimena, diskusi yang menyangkut daftar nama anggota Dewan revolusi, dan apa sikap yang harus diambil terhadap Dewan itu, sangat kaku, tidak spontan, dan ditandai dengan keragu-raguan “wait and see” dan “after you” para menteri, yang menoleh ke arah Presiden untuk menunggu kepengimpinannya mengenai masalah itu. Terkecuali Omar Dhani, yang menyatakan perlunya mengakomodasi dewan itu dalam pembicaraan-pembicaraan pribadinya dengan para menteri sebelum rapat dan sekarang digelar secara terbuka.

Presiden bermanuver dan mengulur-ulur waktu dalam usahanya untuk mengendalikan diskusi di arah yang tepat untuk mengindikasikan preferensi-preferensinya sendiri dan dengan demikian mempengaruhi para menteri.¹⁷⁹ Tetapi tak lama kemudian ia bangkit kembali, menetapkan nada dasar diskusi itu dengan jalan menyatakan bahwa kejadian-kejadian seperti itu adalah biasa dalam sebuah revolusi, “hanya sebuah riak kecil di samudera,”¹⁸⁰ dan mulai condong ke arah pendirian Dhani dengan menyarankan agar anggota-anggota kabinet yang hadir itu menerima keanggotaannya dalam Dewan Revolusi karena revolusi Indonesia harus jalan terus. Para menteri memahami arah pesan Presiden dan mulai bermain mengikuti dia selama *musyawarah* yang terjadi kemudian, yang dengan terampil dipandu oleh Presiden untuk menghasilkan suatu konsensus. Dan ketika sang dalang merasa pertemuan ide-ide itu sudah cukup memadai, ia meminta Omar Dhani untuk memanggil Supardjo ke rumah Susanto untuk membuat kesepakatan dengan Aidit. Presiden yakin bahwa sekarang, setelah berhasil memandu kabinetnya, ia bisa memenuhi komitmennya pada Aidit dengan jalan menerima Dewan Revolusi dan pada saat yang sama menyodokkan posisinya sendiri dalam tatanan baru itu. Presiden dalam posisi di atas angin.

Omar Dhani mengirim pesan pada Letkol Udara Heru, perwira intelijen dan kontak utamanya dengan Sjam, Untung dan Supardjo, untuk pergi ke CENKO II dan membawa Supardjo ke rumah Susanto untuk bertemu Presiden.

Munculnya Heru di CENKO II, dengan pesan dari Dhani bahwa Presiden memanggil Supardjo untuk mengadakan pertemuan, pasti disambut gembira oleh Sjam, Untung, dan orang-orang lain yang hadir di situ. Baru satu jam yang lalu, ketika Supardjo kembali dari Pusat Komando pada pukul 12.00 tengah hari dengan membawa kabar buruk bahwa Presiden telah menegaskan kekuasaan penuhnya sebagai kepala negara, melalui pernyataan Sabur-

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Supardjo, tidak “merestui” aksi mereka dan memerintahkan agar semua operasi dihentikan, suasana hati mereka benar-benar putus asa. Tetapi pada saat yang sama pernyataan Sabur-Supardjo juga tidak mengutuk gerakan itu, dan undangan pada Supardjo dari Presiden membawa secercah harapan bahwa tidak semuanya terlepas dari tangan. Tidak diragukan lagi, Sjam pasti juga memberitahu Aidit di markas besarnya mengenai perubahan nasib itu. Bintang Supardjo juga mulai bersinar kembali berkat perubahan yang menakjubkan ini, yang seketika itu juga mengubahnya dari desertir dan pengkhianat cita-cita Aidit menjadi seorang perunding utama untuk menyelamatkan revolusinya dan menyelamatkan sisa-sisa yang ada dari kegagalan Rencana Besar itu.

Dengan latar belakang itulah Supardjo tiba di rumah Susanto pada sekitar pukul 1.00 siang, masuk lewat pintu belakang dan kemudian diantar memasuki sebuah kamar samping untuk pertemuan pribadi dengan Presiden. Telah kita lihat bahwa di Pusat Komando Halim, Presiden, sekitar pukul 10.30 siang, telah menolak merundingkan dengan Supardjo penyelesaian politis menyusul pembersihan itu sebab, pada waktu itu, ia tidak tahu persis apakah ia akan mampu membujuk kabinetnya agar merangkul Dewan Revolusi. Tetapi di rumah Susanto ia berhasil mengendalikan kabinetnya dan siap menyatakan komitmennya pada tatanan baru itu.

Pembicaraan apa yang dilangsungkan antara Presiden dengan Supardjo, ketika pintu ditutup dalam salah satu ruangan rumah Susanto pada pukul 1.00 siang itu, sama sekali tidak jelas. Rekaman-rekaman pengadilan sepenuhnya membisu mengenai hal ini, yang jelas untuk melindungi Presiden agar tidak terlibat dan dinyatakan bersalah, dan di sinilah letak kesulitannya. Tetapi dari wawancara saya dengan Leimena dan Judodihardjo, rupanya presiden siap membuat kesepakatan dengan Aidit. Agaknya Presiden bersikeras agar namanya ada dalam daftar anggota Dewan Revolusi, atau bahwa ia harus diakui sebagai Kepala Negara dengan suatu cara lain, dan bahwa daftar itu harus juga mencantumkan nama-nama Omar Dhani, Johannes Leimena, Judodihardjo, Martadinata, Sutardjo, menteri-menteri yang sedang duduk di ruang sebelah, Dr. Subandrio, dan barangkali beberapa kandidat lain.¹⁸¹ Untuk konsesi ini ia bersedia mengakui Dewan, yang ia harapkan akan membubarkan diri setelah penunjukan Kabinet Gotong Royong olehnya. Dalam mengusulkan pada Supardjo nama-nama para menteri yang duduk di kamar sebelah untuk keanggotaan dalam Dewan Revolusi, Presiden bertindak seakan-akan ia sudah mendapatkan persetujuan dari mereka terlebih dulu. Dan mungkin memang demikian halnya, lebih implisit ketimbang eksplisit, kecuali bagi Judodihardjo.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Men/Pangak polisi itu baru tiba di rumah Susanto setelah pukul 1.30 siang, dan karena itu tidak berpartisipasi dalam *musyawarah* untuk memberikan kewenangan pada Presiden untuk mengusulkan namanya pada Supardjo untuk dicantumkan dalam daftar nama anggota Dewan Revolusi. Meskipun ia berkeberatan pada Presiden karena Presiden menominasi dia tanpa persetujuannya, ia toh menerima nominasi tersebut.

AIDIT TIDAK MAU MERANGKUL PRESIDEN: KESALAHAN FATAL: 13.30

Ketika Supardjo kembali ke CENKO II dari pertemuan pribadinya dengan Presiden di rumah Susanto, kolega-koleganya bergembira ria melihat perubahan peruntungan mereka. Tetapi ternyata Aidit sulit diajak kompromi ketika mempertimbangkan laporan Sjam mengenai detail-detail posisi Presiden, sebagaimana diceritakan pada Sjam oleh Supardjo sekembalinya dari rumah Susanto. Meskipun Aidit menambahkan nama-nama yang diajukan Presiden pada daftar asli anggota Dewan Revolusi, ia menolak mencantumkan nama Sukarno, atau memasangnya sebagai Kepala Negara. Dengan demikian Aidit kembali ke garis keras, yaitu jalan terus “tanpa” Presiden, sehingga dengan tindakan ini mendepaknya sekali lagi, sekalipun satu jam yang lalu ia mengangkatnya kembali dengan jalan mengizinkan pernyataan Sabur-Supardjo disiarkan lewat radio. Taktik Aidit ini, untuk memaksa Presiden tunduk padanya guna mencapai penyelesaian politis setelah penculikan para jenderal itu, ternyata berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan langsung. Sebagaimana telah kita lihat, Presiden mulai membiarkan dirinya dimainkan oleh Aidit dengan jalan tidak hanya bergerak ke arah pengakuan Dewan Revolusi, tetapi yang terpenting adalah membawa presidium kabinetnya, termasuk panglima-panglima angkatan, ke bawah atap Dewan Revolusi. Ini adalah pencapaian yang tidak pernah diimpikan sebelumnya oleh Aidit. Tentu saja ada harga yang harus dibayar, yaitu bahwa ia harus membiarkan Presiden tetap memegang kemudi negara, setidaknya untuk sementara waktu dan selama periode transisi. Namun Aidit tidak mau menerima pengorbanan ini.

Jika ditengok lagi ke belakang, di sinilah Aidit membuat kesalahan terbesar di sepanjang karier politiknya. Bukannya “ide merangkul Bung Karno,” sebagaimana ditulis Supardjo dalam *OTOKRITIK*nya, untuk jalan bersama Presiden, membiarkan Presiden membawa kabinetnya ke dalam rangkulan

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Dewan Revolusi dengan harga: mengakui Sukarno sebagai kepala negara dan kemudian memensiunkan dia, Aidit justru memutuskan untuk melibasnya sekaligus, secepatnya, untuk kedua kalinya, barangkali dengan mematuhi seruan Mao agar melenyapkannya secara cepat, dan khawatir bahwa Presiden akan merintang lebih jauh lagi gebrakan Aidit menuju Demokrasi Rakyat. Ketika Presiden mendengar dari radio pada pukul 2.00 siang bahwa namanya tidak tercantum dalam daftar anggota Dewan Revolusi, atau diakui sebagai kepala negara, dan bahwa Kabinet Dwikora-nya telah didemisionerkan, ia dipenuhi dengan teka-teki, tetapi tidak terlalu parah sehingga tidak melepaskan perpaduannya dengan Aidit. Presiden telah memihak PKI dalam bulan Mei, sebagaimana telah kita lihat, dan tetap berkomitmen penuh pada Aidit sepanjang proses di rumah Susanto tersebut, sekalipun mengusahakan untuk dirinya sendiri sebuah pengakuan dalam tatanan pemerintahan baru nanti. Sementara Presiden ingin bertahan terus dan menjadi bagian dari tatanan baru itu sebagai kepala negara, Aidit lah yang menolak mengakui dia dalam peran ini dan bekerja keras untuk menggeser Presiden, bahkan sebelumnya memaksanya memberikan persetujuan dan legitimasi publik untuk tatanan baru tersebut. Bahwa Presiden tetap berkomitmen pada Aidit, meskipun pada jam yang sudah larut itu dan setelah didepak dari permainan baru itu, tampak jelas dari fakta bahwa Presiden mempersilahkan Aidit untuk menominasikan, melalui Supardjo, seorang kandidat Men/Pangad yang baru, untuk menggantikan Yani pada pukul 3.00 siang.

Mengingat di tahap ini strategi Aidit tidak ditujukan untuk “merangkul,” tetapi masih jalan terus “tanpa” Presiden, dan malah berusaha mendongkel Presiden secepatnya, maka ia harus menerapkan strategi itu secara konsisten. Langsung sesudah pengumuman *Dekrit No. 1* lewat radio pada pukul 2.00 siang, ia mustinya sudah bergerak merangsek terus agar Presiden digusur. Pengaturan-pengaturan keamanan di rumah Susanto akan menguntungkan manuver seperti itu.

Di rumah Susanto ia mendapatkan kesempatan terakhir untuk melakukan hal itu, setelah melewati satu kesempatan dengan jalan membiarkan Untung dan Pemuda Rakyat “mengamankan” Presiden di Pusat Komando, dimana pengaturan-pengaturan keamanan longgar dan agak kacau akibat kedatangan mendadak Presiden. Di rumah Susanto keamanan Presiden ada di tangan Kapten Udara Suwarta dan letnan Udara Suhardi, anggota-anggota staf Halim, sementara rumah itu sendiri dikepung oleh satu peleton pasukan PGT dan beberapa anggota Polisi AURI. Dengan demikian pasukan keamanan di rumah

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Susanto pada dasarnya berada di bawah komando Omar Dhani, sebagai Panglima AURI. Mustinya Dhani sudah bisa “mengamankan” Presiden demi kepentingan Aidit, karena ia sendiri salah seorang anggota komplotan dan diancangkan menduduki kursi kepresidenan oleh AURI dan PKI, jika PKI memberinya isyarat tepat pada waktunya. Bagaimana Omar Dhani akan bertindak dalam situasi ini sulit sekali dijelaskan. Apakah ia akan punya keberanian untuk “mengamankan” Presiden sedemikian rupa, sehingga ia bisa mengambil-alih jabatannya, atau apakah ia akan mengambil rute Supardjo dan meninggalkan tujuan utama Aidit yang jalan terus tanpa Presiden? Opsi kedua itu agaknya mempunyai kemungkinan lebih besar. Tetapi orang tidak bisa yakin betul bagaimana Dhani akan bertindak andaikata Aidit sendiri datang ke rumah Susanto dengan tekad untuk mendongkel Presiden. Supardjo dalam *OTOKRITIK*-nya menyimpulkan bahwa pada titik itu Omar Dhani mustinya sudah mengamankan Presiden, tetapi “ia tidak bersedia berkonfrontasi dengan Bung Karno, dan usulannya adalah melanjutkan revolusi bersama dengannya” (DOKUMEN No.4).

Tentu saja Supardjo barangkali tidak tahu bahwa Politbiro telah memutuskan untuk jalan terus “dengan” Presiden untuk melaksanakan pembersihan para jenderal, memaksanya melegitimasi Pemerintahan Revolusioner dan kemudian mengistirahatkan dia ke Cina, dengan alasan kesehatan, secepat mungkin. Dan andaikata mungkin untuk memaksa Presiden agar bekerjasama dalam skema ini, kemudian menggeser dia dan jalan terus “tanpa” dia pada tahap manapun dari operasi tersebut. Ini adalah strategi Rencana Besar yang mustinya tengah diimplementasikan oleh Aidit dan dua kawan anggota Politbiro yang jelas sedang berada dengannya, yang mengarahkan seluruh operasi dari rumah Suwardi di Halim.

Tidak jelas mengapa diambil keputusan untuk tidak membuka diri pada Presiden pada saat itu dan jalan terus “tanpa” dia. Barangkali nasehat Mao sangat dominan, begitu juga kekhawatiran mereka bahwa setelah mengakui dia sebagai kepala negara, dan membiarkan Presiden memperkuat kedudukannya kembali dalam memegang kendali sistem baru tersebut, akan sulit nanti untuk menggeser dia. Juga evaluasi tentang kesehatan Presiden mungkin ikut berperan. Harus diingat bahwa Aidit dulu merancang GESTAPU itu berdasarkan laporan yang “diramu” oleh dokter-dokter Cina, sebagai suatu serangan *pre-emptive* melawan bahaya-bahaya yang mengancam Presiden oleh dokumen Gilchrist dan Dewan Jenderal. Evaluasi-evaluasi itu dibuat sesudah jatuhnya Presiden pada 4 Agustus yang mendorong Aidit untuk menggapai melewati batas.

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Tetapi sejak itu, setelah dua bulan, Presiden ternyata tidak mengalami kemerosotan serius apapun, dan kenyataannya malah tambah bugar dan kuat hari demi hari. Ia memukau massa rakyat dalam perayaan Hari kemerdekaan 17 Agustus, dengan pidato TAKARI yang dirancang Njoto, kemudian pada 30 September di Stadion Olahraga, dan tampil penuh semangat dan prima selama masa simpang-siur di Halim, meskipun di malam yang larut itu ia tampak kelelahan, sebagaimana semua orang lain. Kartu kesehatan yang dimainkan Aidit sekarang gembos sudah, dan Dr. Mahar tepat ketika mengatakan bahwa kondisi kesehatan Presiden terlalu dibesar-besarkan dan dipolitisir. Aidit di Halim harus menghadapi prospek pemimpin yang pemberang dan sulit diramalkan itu merintangi transisi negeri itu menuju Demokrasi Rakyat. Gaya Presiden dalam meneguhkan kembali eksistensi dirinya di Halim, menggalang kabinetnya dan panglima-panglima angkatan bersenjata di belakangnya, menjadi pertanda buruk bagi masa depan Aidit.

Barangkali pertimbangan-pertimbangan itu, memandu dorongan Aidit untuk menentang Presiden pada titik itu, khususnya jika ia merasa bahwa Presiden telah mengingkari janji dan kesepakatannya dengan Aidit serta Mao dengan jalan menegaskan kembali kekuasaannya di Halim.

SERANGAN KEDUA AIDIT TERHADAP PRESIDEN: 14.00

Serangan kedua terhadap Presiden datang pada pukul 2.00 siang, ketika Aidit menyuruh radio mengumumkan *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi yang menyatakan bahwa Kabinet Dwikora telah dibubarkan, dan bahwa Dewan Revolusi kini menjadi sumber tertinggi kekuasaan negara, dan bahwa sebuah struktur kekuasaan baru sedang dibentuk di seluruh negeri.

Tak lama kemudian radio menyiarkan *Keputusan No. 1* Dewan Revolusi, yang berisi nama-nama dari ke-45 anggotanya, tanpa menyebut nama Presiden atau lembaga kepresidenan sama sekali. *Keputusan No. 1* ditandatangani oleh Untung dalam kapasitas gandanya sebagai Komandan GESTAPU dan Ketua Dewan Revolusi. Presidium Dewan Revolusi terdiri dari lima pemimpin GESTAPU: (1) Untung, Ketua Dewan, dan keempat Wakil Ketua: (2) Supardjo, (3) Heru, (4) Sunardi, dan (5) Anwas.

Kemudian menyusul daftar anggota-anggotanya: (6) Laksamana Madya Udara Omar Dhani; (7) Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo; (8) Laksamana Madya R.E. Martadinata; (9) Dr. Subandrio; (10) Dr. Johannes

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Leimena; (11) Surachman, unsur nasionalis; (12) Fattah Jassin, unsur agama; (13) Kjai H. Siradjudin Abas, unsur agama; (14) Tjugito, unsur komunis; (15) Arudji Kartawinata; (16) Sjauw Giok Tjhan; (17) Sumarno S.H.; (18) Mayjen KKO Hartono; (19) Brigjen Polisi Sutarto; (20) Zaini Mansjur, Front Pemuda; (21) Jahja S.H., Front Pemuda; (22) Sukatno, Front Pemuda (anggota Central Committee PKI); (23) Bambang Kusnohadi, PPMI; (24) A. Rachman, Wakil Sekjen Front Nasional; (25) Hardojo, mahasiswa; (26) Mayjen Basuki Rachmat; (27) Brigjen Ryacudu; (28) Brigjen Solichin; (29) Brigjen Amir Machmud; (30) Brigjen Andi Rivai; (31) Mayor Udara Sujono; (32) Komodor Udara Leo Wattimena; (33) Dr. Utami Surjadarma; (34) Kolonel A. Latief; (35) Mayjen Umar Wirahadikusumah; (36) Nyonya Supeni, wanita; (37) Nyonya Mahmudah Mawardi, wanita; (38) Nyonya Suharti Suwanto, wanita; (39) Kolonel Fatah; (40) Kolonel Suharman; (41) Kolonel Laut Samsu Sutjipto; (42) Suhardi, wartawan; (43) Drs. Sumartono, Komisaris Besar Polisi; (44) Djunta Suwardi; dan (45) Karim D.P., Persatuan Wartawan Indonesia.

Pasal II menyatakan bahwa Ketua dan Wakil-wakilnya merupakan Presidium Dewan Revolusi Indonesia, dan bahwa Presidium melaksanakan tugas harian Dewan di antara dua sidang lengkap. Pasal III menyatakan bahwa semua orang sipil yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Revolusi menerima pangkat Letnan Kolonel, dan bahwa semua personil militer yang lebih tinggi diturunkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel, sementara mereka yang berpangkat lebih rendah dinaikkan menjadi Letnan Kolonel.¹⁸²

Ciri menonjol dari *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi adalah bahwa Dewan Revolusi telah mendongkel Sukarno dari kekuasaan baik sebagai Presiden maupun Perdana Menteri; sebagai Presiden dengan jalan bersikap tidak menyinggung-nyinggung posisi kepresidenan di bawah sistem pemerintahan yang baru dibentuk itu; sebagai Perdana Menteri dengan jalan membubarkan Kabinet Dwikora, dimana Sukarno merangkap sebagai Perdana Menteri sampai pembubarannya dengan pengumuman pada pukul 2.00 siang, dan dengan siaran terdahulu pada pukul 11.00 siang. Dengan demikian Sukarno telah digulingkan dua kali oleh Aidit hanya dalam tempo tiga jam.

Untuk memaksa Sukarno ikut bergabung dan melegitimasi kekuasaan baru di negeri itu, Aidit meninggalkan daftar asli anggota-anggota Dewan Revolusi dan menyuruh siarkan versi revisinya pada pukul 2.00 siang, yang mencakup menteri-menteri yang diusulkan oleh Presiden pada Supardjo di rumah Susanto. Selain itu, daftar yang disiarkan pada pukul 2.00 siang itu dalam komposisinya mirip dengan sebuah struktur NASAKOM, dengan cara

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

memberikan perwakilan pada unsur-unsur nasionalis, agama, dan komunis. Daftar itu juga mempunyai anggota-anggota yang mewakili kelompok-kelompok karya, misal pemuda, mahasiswa, wanita, wartawan, Front Nasional, dan lain-lain. Keempat Angkatan Bersenjata diwakili juga oleh, termasuk dua perwira yang dikenal sebagai anti-komunis, Mayjen Umar dan Mayjen Basuki Rachmat, yang persis pada saat itu bekerjasama dengan Jenderal Suharto di KOSTRAD untuk menggulingkan Dewan Revolusi.

Dengan demikian keanggotaan Dewan Revolusi itu dari luar tampak sepenuhnya kredibel sebagai tindak lanjut dari pembersihan pucuk komando AD, tanpa pengaruh yang menyolok dari PKI, sebab partai itu hanya menempatkan dua anggota terbuka di dewan itu. Memang benar bahwa tidak ada nama-nama besar yang mewakili segmen-segmen nasionalis, agama dan komunis dalam masyarakat. Sebab beberapa dari pemimpin-pemimpin mereka pada saat itu tengah berada di Peking untuk merayakan ulangtahun ke-16 rezim Mao, dan jika perlu mereka bisa dikooptasi sekembalinya di rumah untuk memperluas karakter NASAKOM lembaga itu.

Meskipun para menteri yang duduk di rumah Susanto seakan tidak mendeteksi pengaruh terselubung PKI pada komposisi keanggotaan Dewan Revolusi, walaupun kecurigaan pasti ada di sana, dari kesaksian Sjam kita tahu bahwa Aidit-lah yang mengubah daftar asli itu untuk mengakomodasi nama-nama yang diusulkan Presiden.¹⁸³ Sayangnya, kita tidak mempunyai daftar asli dari nama-nama anggota Dewan Revolusi itu sebelum dimodifikasi oleh Aidit. Setelah GESTAPU ambruk, Latief memerintahkan, pada 2 Oktober, agar semua ruangan di markas besar Aidit dan CENKO II di Halim dibersihkan dan semua dokumen yang tertinggal dikumpulkan dan dibakar.¹⁸⁴

Meskipun berkesan sebagai masalah internal Angkatan Darat, keseluruhan GESTAPU dari awal sampai akhir adalah ulah permainan PKI. Dengan mencermati daftar keanggotaan Dewan Revolusi, tampaklah sejauh mana lembaga itu dikendalikan oleh PKI. Pertama-tama adalah kelima anggota Presidium: Untung, Supardjo, Heru, Sunardi, dan Anwas, yang kesemuanya sudah lama berada di bawah binaan Biro Khusus. Kemudian keenam anggota yang terlibat dalam komplotan itu: Omar Dhani, Subandrio, Sujono, Wattimena, Latief, Suherman (yang disebut belakangan ini mengorganisir pemberontakan di Jawa Tengah), yang semuanya sudah menjadi anggota jaringan kerja Biro Khusus. Kemudian orang-orang yang dikenal dekat dengan PKI: dari Front Pemuda Zaini Mansjur dan Jahja S.H.; dari Front Nasional Rachman; pemimpin mahasiswa Hardojo; Nyonya Supeni; Nyonya Mahmudah Mawardi dari

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Muslimat NU; Nyonya Suharti Suwarno; Karim dari Persatuan Wartawan Indonesia; dan akhirnya dua orang anggota terbuka PKI Tjugito dan pemimpin pemuda Sujatno. Dengan demikian PKI secara langsung mengendalikan 21 dari ke-45 anggota Dewan Revolusi, dan barangkali lebih banyak lagi andaikata para pendukung terselubung PKI di antara anggota-anggota itu diketahui.

Aspek terpenting dari *Keputusan No. 1* adalah tidak adanya nama Presiden dalam daftar anggota Dewan Revolusi, meskipun mencantumkan nama-nama lain yang dipilih Presiden sebagaimana diusulkan pada Supardjo. Sulit untuk memahami arti dari langkah Aidit ini. Apakah ia keliru membaca isyarat Presiden bahwa sebentar lagi ia akan menyerahkan seluruh kepemimpinan atas pemerintahannya, termasuk para panglima Angkatan Bersenjata, dan bahwa ia membutuhkan waktu lebih panjang untuk menggalang mereka di belakangnya dulu, untuk mempersolid “home front” sebelum secara terbuka bersikap mendukung Dewan Revolusi? Sebelum mengambil langkah itu, rupanya Presiden ingin tahu persis apakah sudah berhasil menggalang semua “pasukan” di belakangnya, dan menghindari resiko melangkah terlalu jauh sehingga tahu-tahu ternyata hanya sendirian di sana, kecuali bersama Omar Dhani dan orang-orang lain yang secara langsung terlibat dalam gerakan pembersihan itu? Atau apakah Aidit memperhitungkan bahwa dengan mencoret nama Presiden dari daftar penguasa baru, ia akhirnya akan berhasil memaksanya secara terbuka mengumumkan dukungannya pada tatanan baru? Ataukah ia percaya bahwa dengan adanya susunan kekuasaan baru itu, yang antara lain disarankan oleh Presiden, telah tercapai suatu titik dimana Aidit harus jalan terus tanpa Presiden, sebab ia sudah tidak dibutuhkan lagi? Andaikata ia mengakui Sukarno sebagai kepala negara di tahap ini, sehingga memapankannya dalam kekuasaan sebagai pemimpin dari struktur pemerintahan baru itu, apakah Aidit khawatir bahwa belakangan ia bisa menemui kesulitan-kesulitan untuk mendongkel presiden?

Langkah berikut yang diambil oleh Aidit mengisyaratkan bahwa ini adalah langkah kontingen terakhir yang membuatnya mencoret nama Presiden dari daftar struktur kekuasaan baru tersebut. Langkah itu adalah *Keputusan No. 2* Dewan Revolusi (DOKUMEN No. 11) yang disiarkan tak lama setelah *Keputusan No. 1*, yang isinya menurunkan pangkat semua perwira dalam struktur komando Angkatan Bersenjata Indonesia menjadi letnan kolonel, sementara menaikkan pangkat puluhan para perwira lebih rendah menjadi letnan kolonel, bukan atas dasar prestasi, melainkan karena murni alasan-alasan politis dan komitmen mereka pada tatanan baru itu.

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Benar-benar tidak bisa dimengerti mengapa Aidit menyuruh siarkan keputusan tersebut pada saat segenting itu, ketika berbagai hal mulai tampak menguntungkan baginya, dan ketika Presiden tengah menggalang kekuatannya untuk akhirnya berdiri di belakang barisan Aidit. Siaran itu terbukti sangat prematur, dan sangat tidak menguntungkan, tidak hanya karena membuahkan hasil-hasil yang bertentangan dengan yang diharapkan, tetapi juga karena hal itu benar-benar menghancurkan perjuangan Aidit sendiri. Pertama, para Menteri Panglima Angkatan yang merupakan komando tertinggi Angkatan Bersenjata dalam Dewan Revolusi terkejut ketika mendengar siaran radio di rumah Susanto yang menyiarkan penurunan pangkat mereka, sehingga sekarang menolak menerima penunjukannya sebagai anggota Dewan Revolusi. Kedua, ribuan perwira di seantero negeri yang dulu mempunyai komitmen pada Gerakan 30 September itu lalu meninggalkan Aidit dengan ucapan “silakan berjuang sendiri”. Hal ini ibarat memalu paku terakhir pada peti mati rencana-rencana Aidit untuk membangkitkan pergolakan revolusioner di seluruh negeri untuk mematahkan serangan balik dan memantapkan tatanan baru itu. Dan absennya nama Presiden dari semua pengumuman Dewan Revolusi menciptakan kebingungan besar di masyarakat umum, yang mulai mengkhawatirkan nasib Bapak Presiden, ikon nasional yang begitu dicintai, dikagumi dan dihormati itu. Bahkan barisan Aidit sendiri mulai goyah ketika ia merancang *Keputusan No.2* Dewan Revolusi mengenai penurunan dan kenaikan pangkat para perwira karena alasan-alasan politis, dan mengirimkannya ke CENKO II melalui Sujono sekitar pukul 1.00 siang, untuk disiarkan pada pukul 2.00 siang. Pada titik itu Walujo melayangkan sepucuk surat pada Aidit, melalui Sujono, yang menyatakan bahwa keputusan Aidit keliru karena alasan-alasan psikologis,¹⁸⁵ dan menyatakan keberatan pada penyiarannya karena mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi buruk yang sudah begitu gamblang bagi semua orang, kecuali Aidit.

Selain itu, tidak jelas berapa banyak anggota Dewan Revolusi yang sejak awal telah memberikan persetujuan mereka untuk dicantumkan dalam daftar nama tersebut. Mungkin tidak banyak, mengingat langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk mencegah kebocoran-kebocoran, wilayah yang ada di bawah tanggung-jawab Heru. Sedangkan mengenai para Menteri/Panglima angkatan bersenjata, Dr. Leimena dan beberapa kandidat lain, Presidenlah yang menominasikan nama mereka pada Supardjo, setelah mengusahakan suatu konsensus selama *musyawarah* saat makan siang di rumah Susanto.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Meskipun begitu, dengan menyarankan pada Supardjo nama Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, yang kebetulan belum hadir selama *musyawarah* besar itu, Presiden telah menggapai terlalu jauh. Jenderal itu tiba di rumah Susanto baru pada pukul 1.30 siang, dan pada waktu itu Supardjo sudah pergi ke CENKO II sambil membawa daftar nominasi Presiden. Mengingat hal itu, Judodihardjo memprotes pada Presiden karena namanya didaftar sebagai salah seorang anggota Dewan Revolusi Untung ketika mendengar tentang daftar itu dari siaran radio pada pukul 2.00 siang. Tetapi pada saat yang sama ia menerima nominasi itu dengan mengatakan bahwa hubungan antara Kabinet Dwikora dan Dewan Revolusi harus diserahkan ke tangan Presiden, dan bahwa ia akan menerima dan “mematuhi perintah-perintah Bung Karno.”¹⁸⁶

Tetapi mulai sekarang, Presiden pun mulai bermain aman dan menjadi sangat hati-hati terhadap Dewan Revolusi, mengingat adanya laporan-laporan yang sampai ke telinganya tentang masuknya Jenderal Suharto dan pasukan KOSTRAD ke panggung, yang diberi wewenang untuk bertindak melawan Untung oleh Jenderal Nasution, Menko Hankam/KASAB yang mengalami cedera itu. Sangat peka pada arus kekuasaan yang senantiasa bergeser, salah satu atribut dari mistikismenya, *mood* Presiden juga ikut berubah-ubah, mencerminkan dirinya dalam langkah mundur secara berhati-hati yang langsung ditangkap oleh para menterinya, yang seperti biasa lalu berbondong-bondong menyusul di belakang barisannya. Jika Omar Dhani mendominasi diskusi sebelum dan selama makan siang, dengan mendesak Presiden agar menerima hal yang “tak terelakkan” dan mengusahakan akomodasi dengan para calon penguasa baru, Jenderal Judodihardjo sekarang menjadi suara dominan, yang desakannya berhasil mencegah Presiden menyerah dan menyerahkan negeri itu ke tangan Aidit di atas sebuah nampan perak, lengkap dengan cap kepresidenan.

Dan di sinilah, setelah pukul 2.00 siang, di ruang makan di rumah Susanto, Rencana Besar Aidit mulai rontok dan pertanyaan-pertanyaan besar, yang semenit lalu seakan paling vital baginya, mulai menjadi akademik, yaitu bagaimana memaksa Presiden agar melegitimasi kudeta tersebut, bagaimana menggeser dia, dan bagaimana loyalitas-loyalitas yang terpecah-belah antara Presiden dan PKI akan merembet di kalangan militer di seantero negeri. Aidit tidak pernah bisa menguji pertanyaan-pertanyaan itu, sebab kejadian-kejadian dalam waktu dua jam berikutnya membuat pertanyaan-pertanyaan itu menjadi basi, dan memaksanya menggeser perhatian pada pertanyaan hanya mengenai kelangsungan hidup fisik dirinya maupun partainya. Begitu banyak hal akan segera berubah.

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Pertama, kekuatan militer Aidit merosot sampai pada titik di mana ia tidak mampu lagi menyerang Presiden secara fisik, bahkan andaikan pun ia punya niat untuk melakukan itu. Basis militernya mulai berantakan mulai sekitar pukul 1.00 siang ketika dua kompi dari Batalyon 454, dan hampir semua pasukan dari Batalyon 530, mulai membelot ke KOSTRAD, kecuali komandan Batalyon 530, Mayor Bambang Supeno. Sjam percaya bahwa titik balik dalam keseimbangan kekuatan antara GESTAPU dan KOSTRAD tiba antara pukul 1.00 dan 2.00 siang, pada saat mana GESTAPU kehilangan elemen kejutan dan sudah kehabisan tenaga, sementara KOSTRAD menjadi bertambah kuat dan mulai mengambil inisiatif.¹⁸⁷

Kedua, mulai pukul 1.00 siang, laporan-laporan pertama tiba di rumah Susanto, CENKO II dan markas besar Aidit bahwa Jenderal Suharto telah ditunjuk oleh Jenderal Nasution untuk mengambil-alih, untuk sementara, komando atas Angkatan Darat, dan diperintahkan untuk membebaskan Presiden serta menghancurkan GESTAPU. Ketika kabar tentang kejadian-kejadian yang kritis itu mulai sampai ke telinga para pemain utama di rumah Susanto di Halim, kabar itu memaksa mereka mulai menghitung alur-alur tindakan baru, dan dengan demikian secara serius mengubah keseluruhan setting strategis dan nasib para pemain itu juga.

SUKARNO MENDAPATKAN LAGI WAHYU CAKRANINGRAT, BERAKHIRNYA KEKUASAAN KEMBAR : 16.00

Segera sesudah Radio Jakarta mengudara pada pukul 2 siang, dan memulai siaran, Brigjen Sabur bergegas membawa sebuah radio transistor kecil, yang dipinjam oleh Kolonel Saelan dari staf rumah yang sedang melayani makan siang, ke kamar makan dimana Presiden dan para menterinya hilir-mudik di sekitar meja makan.

Pengumuman radio mengenai keanggotaan Dewan Revolusi yang tidak mencantumkan nama Presiden, pembubaran Kabinet Dwikora, dan penurunan pangkat semua perwira tinggi menjadi Letnan Kolonel, menghancurkan semua usaha Presiden untuk menyerahkan seluruh struktur kekuasaan ke tangan Aidit di atas sebuah nampan perak. Presiden benar-benar marah ketika mendengar bahwa ia sudah tidak dianggap sama sekali, dan para menteri/panglima angkatan sebagai jenderal-jenderal dan laksamana-laksamana, sekarang ditunjuk menjadi anggota Dewan Revolusi, dan diturunkan pangkatnya menjadi

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

letnan kolonel, membelot dari konsensus yang baru saja dihasilkan oleh Presiden beberapa waktu lalu. Giliran Presiden yang bingung sekarang, tidak mampu membuat keputusan, lalu berpaling pada para penasehatnya, khususnya pada Judodohardjo, untuk mendapatkan bantuan dan pengarahan.¹⁸⁸ Leimena keheranan melihat Presiden begitu tak mampu mengendalikan situasi, tidak seperti biasanya, dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya dimanipulasi dan digiring-giring sampai memasuki neraka seperti itu. Leimena mengenal Presiden sebagai seorang pejuang dan “binatang politik yang dipandu oleh respon-respon instingtual untuk ulet bertahan hidup secara politis,” ceritanya pada kami penulis, tetapi ia menambahkan, “betapa memelasnya melihat Presiden dalam situasi itu, khususnya ketika melihatnya beristirahat di siang yang panas itu di salah satu kamar tidur, hanya dengan mengenakan celana tinju dan kaus singlet.”¹⁸⁹ Sang kaisar yang tanpa busana, secara figuratif maupun harafiah.

Presiden marah besar khususnya karena pembubaran Kabinet Dwikora sebab ia bermaksud menggunakannya, setelah diperluas oleh orang-orang tunjukan Aidit, untuk transisi menuju Kabinet Gotong Royong. Menurut Judodihardjo, dalam menanggapi pembubaran Kabinet Dwikora, Presiden mengatakan bahwa “Aku tidak ingin dipaksa, ini kabinetku,” yang dijawab oleh jenderal itu bahwa “ini adalah kudeta,”¹⁹⁰ dan menyarankan pada Presiden agar ia menegaskan kekuasaannya sebagai kepala negara, membuat pernyataan demikian dan menyuruhnya disiarkan, menggalang kekuatan dan menunjuk seorang Men/Pangad baru untuk menggantikan posisi Yani, sambil mengusulkan Mayjen Ibrahim Adjie. Pada titik itu Presiden menjadi sewot, lalu mengatakan pada Judodihardjo, “Jangan mendikte apa yang harus aku lakukan. Aku tidak ingin dipaksa oleh siapapun. Aku akan memecahkan masalah ini sendiri.”¹⁹¹ Kemudian sambil berpaling pada Omar Dhani, ia menyuruhnya untuk memanggil Supardjo saat itu juga.

Segera sesudah Supardjo tiba di rumah Susanto melalui pintu belakang, Presiden menemuinya untuk konsultasi pribadi di salah satu ruangan samping, mengatakan padanya bahwa ada dua kandidat untuk menggantikan Jenderal Yani –Basuki Rachmat dan Pranoto—dan mengundang saran-saran dari kolega-koleganya di CENKO II, dan yang terpenting, dari Aidit. Sebagaimana dinyatakan dalam kesaksian Supardjo:

“Ada dua kandidat: Mayjen Basuki Rachmat dan Mayjen Pranoto. Saya mengusulkan pada Presiden bahwa saya harus menanyakan pendapat

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Untung. Saya kemudian pergi dan mengontak Untung, Latief dan Sjam.”¹⁹²

Kemungkinan besar dalam pertemuan itu masalah Menko Hankam/KASAB, Jenderal Abdul Haris Nasution, juga didiskusikan, sebab ia masih hidup dan masih memegang posnya, meskipun sedang cedera. Supardjo pasti ngotot berkeberatan pada penempatan kembali orang yang, baru beberapa jam lalu berusaha dibunuh oleh pasukannya, barangkali dengan memberitahu Presiden bahwa kepulangan Jenderal Nasution kembali ke kementerian itu sepenuhnya tidak bisa diterima dan secara politis menjadi beban berat. Barangkali itu sebabnya ketika Presiden kembali ke ruangan untuk bergabung dengan para anggota kabinetnya dan para panglima angkatan, nama Nasution tidak disebut-sebut.

Sementara itu, Supardjo bergegas kembali ke CENKO II, dan setelah berkonsultasi dengan Aidit, melalui Sjam, kembali ke rumah Susanto untuk mengusulkan pada Presiden dua orang kandidat: Mayjen Rukman dan Mayjen Pranoto.¹⁹³ Tetapi Pranoto adalah kandidat yang lebih mereka sukai karena, sebagaimana kita ketahui, Pranoto telah bertemu Aidit di rumah Sjam pada malam sebelumnya, 30 September, dimana Aidit menawarkan padanya pos ini. Pembicaraan rahasia antara Presiden dan Supardjo di balik pintu tertutup di rumah Susanto pada tahap itu, dan kenyataan bahwa Presiden tidak memerintahkan agar Supardjo ditahan ketika mendengar dari radio bahwa dirinya telah didongkel pada pukul 2.00 siang, maupun tingkah laku Omar Dhani, membuat Judodihardjo curiga, yang membuatnya yakin bahwa Presiden terlibat dalam masalah itu melebihi apa yang diungkapkan dan yang kasat mata pada saat itu.¹⁹⁴

Setelah menemui Supardjo untuk kedua kalinya dalam waktu sekitar 30 menit, Presiden kembali bergabung dengan menteri-menterinya di kamar sebelah dan membuka diskusi tentang penggantian Yani. Pada titik itu Supardjo memasuki ruangan utama, mengambil tempat duduk di antara para menteri dan berpartisipasi dalam diskusi yang menyangkut penunjukan pengganti Yani.¹⁹⁵ Omar Dhani menyarankan agar order tetap sebaiknya diikuti, dan di AURI praktek itu berarti menunjuk wakilnya untuk mengisi kekosongan. Presiden menanggapi dengan mengatakan bahwa di AD wakil pertama adalah Mayjen S. Mursjid, kemudian Mayjen Suharto, diikuti oleh Mayjen Suprpto. Setelah merenung sebentar ia menolak Jenderal Mursjid, karena orangnya pemaarah, begitu juga Jenderal Suprpto, tetapi bertanya “bagaimana Harto dari KOSTRAD?” Ia juga menolak ide itu karena ia merasa Suharto itu keras kepala,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

karena ia menghendaki orang yang tenang dan barangkali lebih bisa dibelokkan. Ketika pada titik ini Omar Dhani menyela dan menyodorkan nama Basuki Rachmat, Presiden dengan bercanda bahwa setiap kali ada masalah yang harus dipecahkan, jenderal itu pasti mendadak sakit dan tidak terlihat.

Canda ringan itu menghilangkan ketegangan yang lama bergayut di seantero ruangan itu dan mengubah suasana dari permusuhan dan kecurigaan terselubung menjadi suasana kerjasama yang lebih terbuka dan santai, kecuali Omar Dhani, yang bermanuver dan terlibat dalam pembicaraan yang mendua, sambil berusaha mengelak setiap kali ia menemukan dirinya dalam situasi sulit. Presiden kemudian mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk menunjuk Mayjen Pranoto sebagai *caretaker* Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Yani, dan menginstruksikan Brigjen Sabur untuk merancang sebuah Perintah Harian Presiden yang menyatakan keputusan tadi, untuk disiarkan ke seluruh negeri, tanpa memberinya instruksi spesifik mengenai detail-detail lain. Rupanya pada titik itu Supardjo meninggalkan rumah Susanto untuk kembali ke CENKO II guna melaporkan keputusan Presiden menunjuk Pranoto, kandidat Aidit.

Presiden kemudian memasuki sebuah kamar untuk beristirahat, sambil mengajak Sabur, dimana detail-detail perintah itu digarap. Ketika Sabur kembali untuk bergabung dengan menteri-menteri di kamar sebelah, sebuah komite *ad hoc* dibentuk atas sarannya, yang setelah diskusi pendek menyetujui poin-poin utama dari perintah kepresidenan itu sebagaimana dilaporkannya. Komite itu kemudian menyarankan agar Martadinata membantu Sabur dalam merancang dokumen itu, yang ditandatangani oleh Presiden tak lama setelah pukul 16.00 sore. Sabur mengetik dokumen itu dalam empat salinan: satu diberikan pada Supardjo untuk disampaikan pada Untung dan Aidit, yang kedua dikirim ke stasiun radio untuk disiarkan, yang ketiga untuk dikirim oleh Martadinata pada Jenderal Suharto di KOSTRAD. Sekitar pukul 17.00 sore Sabur mengutus Widjanarko untuk memanggil Pranoto dari rumahnya ke Halim guna melapor pada Presiden secepatnya.

Kenyataannya, Pranoto waktu itu sudah ada di Halim; ia tiba di sana bersama Aidit pada malam sebelumnya, sebagaimana akan diingatkan nanti. Tetapi sialnya, tak lama setelah perintah Presiden yang menunjuk Pranoto sebagai caretaker AD itu sampai di tangan Aidit via Supardjo tak lama setelah pukul 16.00, Aidit langsung mengutus jenderal itu ke KOSTRAD untuk memerintahkan Suharto, yang sekarang menjadi bawahan Pranoto, untuk menghentikan semua operasi menentang GESTAPU, dan untuk memerintahkan

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

semua unit AD di seluruh negeri berdiri di belakang Dewan Revolusi. Langkah itu, jika sukses, akan secara mendalam mengubah keseimbangan kekuatan PKI tidak hanya vis-à-vis Suharto, tetapi juga Presiden, sehingga akhirnya memberikan kemenangan di semua front ke tangan Aidit.

Dokumen itu, setelah menyebutkan semua gelar Sukarno –Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi—pertama-tama menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang Pimpinan Negara dan Revolusi. Lebih jauh lagi dokumen itu mengatakan bahwa Presiden mengambil-alih komando AD untuk sementara waktu, dan menunjuk Mayjen Pranoto sebagai *caretaker* untuk melaksanakan tugas-tugas harian. Dokumen itu diakhiri dengan menyerukan pada Angkatan Bersenjata agar tetap waspada, memerintahkan semua anggota mereka agar tetap berada di pos masing-masing dan hanya bergerak jika diperintahkan, dan menyerukan pada seluruh rakyat agar tetap tenang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional sekompak-kompaknya (DOKUMEN No. 14).

Bahkan sebelum Sabur menyerahkan salinan-salinan yang sudah selesai diketik tentang Perintah Harian itu kepada Presiden untuk ditandatangani di kamar tidur dimana ia sedang beristirahat, Presiden meminta Omar Dhani agar memanggil Supardjo untuk secepatnya melapor. Sutjipto Judodihardjo memberi kesaksian bahwa Supardjo datang sekitar pukul 3.30 siang, dan langsung masuk, tanpa diantar lagi oleh personil keamanan, ke dalam kamar tidur, menemui Presiden untuk mengadakan “pembicaraan pribadi sekali lagi.”¹⁹⁶ Meskipun kita tidak punya bukti langsung mengenai masalah-masalah yang dibahas di balik pintu tertutup itu, langkah-langkah berikut yang diambil oleh kedua orang itu memungkinkan kita membuat kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal. Presiden barangkali memberi pada Supardjo salinan Perintah Harian Kepresidenan itu untuk disiarkan, karena pasukan Untung masih menguasai stasiun radio, dan sebuah salinan lain untuk Aidit, dan kemudian, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, memerintahkan Supardjo agar menghentikan semua aktivitas GESTAPU saat itu juga. Dengan menegaskan kembali otoritasnya ia menuntut agar diakui oleh Aidit sebagai kepala negara, dengan mengirim sebuah pesan kategoris padanya bahwa otoritas tertinggi ada di tangannya dan tidak di tangan Dewan Revolusi. Sebagai imbalan, mungkin, ia menawarkan perlindungan pada anggota-anggota gerakan itu dengan menjanjikan pada Aidit bahwa ia akan mengusahakan suatu solusi politik atas jalan buntu konstitusional yang diciptakan oleh pembentukan Dewan Revolusi itu dan tindakannya yang merebut otoritas tertinggi di negeri

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

itu. Solusi politik itu, yang kendalinya ada di tangan Sukarno sepenuhnya, akan menurunkan derajat masalah konstitusional itu ke sesuatu posisi sekunder, yaitu diperlakukan sebagai masalah intern AD dan dipecahkan di tingkat itu. Sebagai Presiden, Perdana Menteri Kabinet Dwikora, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Menteri Pertahanan sementara, dan Panglima AD sementara, ia berada dalam posisi sangat bagus untuk mengalihkan masalah-masalah konstitusional dengan cara itu.

Mungkin juga bahwa dalam pertemuan itu suatu aliansi informal dijalin antara Presiden dengan Supardjo, untuk membela Presiden dari kemungkinan serangan terhadap Halim oleh pasukan KOSTRAD, karena laporan-laporan mengenai hal itu sudah sampai ke tangan Presiden dan orang-orang di CENKO II pada pukul 1.00 siang. Supardjo yakin bahwa pada pukul 10.00 pagi Jenderal Nasution, Suharto dan Umar sudah membangun sebuah komando di KOSTRAD untuk melancarkan serangan itu.¹⁹⁷ Ia menyebut kombinasi itu NATO, [NA singkatan dari Nasution, TO singkatan dari Suharto]. Dengan demikian sebuah transformasi lengkap dari setting strategis telah dicapai pada pukul 4.00 sore dan orang-orang itu, sebagaimana akan kita lihat sebentar lagi, yang baru dua jam lalu bertekad mendongkel Sukarno dari kursi kepresidenan, kini kembali putar haluan, dengan jalan tampil sebagai pembelanya.

Untuk mengamankan diri dari kemungkinan ancaman Jenderal Suharto dan pasukan KOSTRAD-nya, Presiden memanggil Mayor Udara Subardjono, pilot pesawat Jet Star kepresidenan, ke kamar tidurnya, dan memberinya sepucuk surat untuk Mayjen Ibrahim Adjie, Panglima Divisi Siliwangi di Bandung, memintanya agar siap datang untuk menyelamatkannya di Halim jika ia memanggil, dan agar memberikan keamanan bagi anak-anaknya dengan melindungi mereka. Pilot itu mempercayakan surat tersebut pada seorang kurir, yang diterbangkan ke Bandung dengan sebuah pesawat Dakota yang dipiloti oleh Kapten Djarkashi.¹⁹⁸ Menyusul hal itu, Jenderal Adjie mengeluarkan sebuah peringatan bahwa ia akan memerintahkan Divisi Siliwangi untuk bergerak memasuki Jakarta jika Presiden berada dalam bahaya dari pihak manapun.¹⁹⁹ Jelaslah, janji Mayjen Rukman, yang diberikan pada Sjam pada 25 Agustus, untuk menetralkan Divisi Siliwangi, gagal diwujudkan. Juga pada waktu inilah Presiden menginstruksikan Brigjen Sabur agar memanggil komandan pasukan RPKAD, agar siap melakukan intervensi jika Presiden dalam bahaya, menurut *OTOKRITIK* Supardjo (DOKUMEN No. 4).

Mulai waktu itu, Presiden, dan bukan Aidit, memegang semua kartu as, meskipun Aidit di subuh hari tadi menguasai semua kartu as. Bahwa Presiden merasa dalam posisi yang lebih nyaman nampak jelas setelah keberangkatan

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Supardjo dari rumah Susanto menjelang pukul 4.00 sore, dan Presiden dengan wajah murah senyum itu tampil sebentar dan bergabung dengan anggota-anggota kabinetnya. Pada titik itu, yang ditandai dengan kelelahan relatif setelah ketegangan tinggi yang berlangsung selama empat jam penuh, semua memutuskan untuk istirahat sedikit dengan tidur-tidur ayam.²⁰⁰

Hanya Omar Dhani yang dengan gelisah mondar-mandir dari kamar ke kamar. Setelah pukul 4.00 sore, Dewi Ratnasari muncul di rumah Susanto, ditemani oleh Letnan Kolonel Suparto dan Inspektur Abdul Sukri. Dewi mengkhawatirkan nasib suaminya setelah menerima sepucuk surat darinya, yang ditulis di Pusat Komando pada pagi hari itu, yang mengatakan bahwa Sukarno tengah berada di tengah-tengah sebuah revolusi. Dewi menjadi sangat cemas setelah mendengar dari radio kabar tentang Dewan Revolusi dan keanggotaannya, yang tidak menyebut-nyebut nama Sukarno. Ia membawa kabar segar dan pesan-pesan untuk Presiden dari kota dan mendiskusikan berbagai masalah dengan anggota-anggota kabinet, tetapi kebanyakan melewatkan waktunya di kamar tidur untuk menghibur Presiden. Presiden kemudian memerintahkan agar anak-anaknya, yang ditinggalkan di Istana Merdeka, dijemput dan dibawa ke Halim. Sekitar pukul 17.00 sore sebuah helikopter membawa Rachmawati, Sukmawati dan Guruh dari istana dan menerbangkan mereka ke Halim dan kemudian ke Bandung dengan pilot Kapten Udara Suhardono.²⁰¹

Untuk meredakan kebingungan yang merebak dalam jajaran angkatan laut dan kepolisian, yang diciptakan oleh fakta bahwa nama panglima-panglima dari kedua angkatan itu telah disiarkan sebagai anggota Dewan Revolusi, kedua panglima itu mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk GESTAPU dan menyangkal hubungan mereka dengannya. Sutjipto Judodihardjo mengirim sebuah radiogram kepada semua anggota stafnya (DOKUMEN No. 17), dan Martadinata mengeluarkan pernyataan serupa (DOKUMEN No. 15). Kedua pernyataan itu dikeluarkan pada sore hari 1 Oktober 1965 untuk menggalang pasukan mereka di belakang Presiden dan menghentikan sepak terjang agen-agen Biro Khusus di jajaran mereka.

Presiden sendiri memulai proses mundur dari keterlibatan dalam GESTAPU itu. Ia memberitahu anggota kabinetnya bahwa meskipun ia telah mendapatkan informasi lebih dulu mengenai keresahan dalam jajaran AD, ia menganggap GESTAPU adalah murni masalah intern, dan bahwa ia tidak tahu apa-apa mengenai dampak politisnya.²⁰² Formula Presiden ini menjadi sebuah mantra yang belakangan dipakai oleh banyak orang untuk berkelit dari keterlibatan mereka dalam GESTAPU. Omar Dhani menggunakan formula itu

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dalam pernyataannya yang dikeluarkan keesokan harinya, 2 Oktober 1965, yang disiarkan oleh Radio Madiun, dimana ia mendaratkan pesawatnya setelah berputar-putar selama sekitar enam jam di seantero negeri, menyusul rontoknya perjuangan di Halim malam sebelumnya (DOKUMEN No. 16).

Dengan demikian mulai pukul 4.00 sore, 1 Oktober 1965, aksi-aksi berani Presiden, yang diikuti oleh pengumuman-pengumuman Martadinata dan Judodihardjo yang memisahkan angkatan mereka dari GESTAPU, berhasil menghapus kebingungan yang diciptakan oleh “interregnum” itu dan menghentikan sistem *Kekuasaan Kembar* di negeri itu. Perjuangan Aidit pupus sudah tanpa bisa diselamatkan lagi.

PRESIDEN DAN SUHARTO SALING BERHADAPAN: 12.00-20.00

Dua peristiwa penting terjadi sementara Sabur dan Martadinata merancang Perintah Harian Presiden di rumah Susanto. Akan diingatkan nanti bahwa di Pusat Komando Halim itu Presiden telah mengutus Komisaris Polisi Sumirat dan Kolonel Widjanarko, Adjudan Presiden, untuk memanggil Panglima Angkatan Laut dan Kepolisian, Komandan Garnisun Jakarta Mayjen Umar, Waperdam II Leimena, dan lain-lain. Semuanya datang kecuali Umar, yang menolak dengan mengirimkan sebuah pesan untuk Presiden lewat kedua utusannya, yang menyatakan bahwa pertama-tama ia harus mendapat izin dari Jenderal Suharto, sebab pada waktu itu ia sedang berada di KOSTRAD. Ketika utusan-utusan itu, yang sudah kembali ke Halim tetapi kali ini ke rumah Susanto, melaporkan hal ini, Presiden menjadi marah karena penolakan Umar, dan langsung mengirim kembali utusan-utusan itu ke KOSTRAD, dengan perintah pada Umar agar melapor padanya secepatnya.

Tetapi, ketika di rumah Susanto itu, kedua perwira utusan tadi tidak hanya melaporkan penolakan Umar untuk memenuhi panggilan Presiden, tetapi juga menceritakan pada Presiden kejadian-kejadian yang mereka lihat di KOSTRAD, dari mana Jenderal Suharto mengarahkan sebuah aksi balasan terhadap Dewan Revolusi. Widjanarko melaporkan bahwa di KOSTRAD ia menemui Jenderal Suharto, yang menanyakan padanya tentang keberadaan Presiden dan kesehatannya. Widjanarko menjawab bahwa Presiden berada di Pangkalan Udara Halim dalam keadaan sehat walafiat dan aman, dan kemudian menyampaikan perintah Presiden yang memanggil Mayjen Umar ke Halim

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

saat itu juga, yang dijawab oleh Suharto bahwa “untuk sementara hal itu tidak mungkin.”²⁰³

Tetapi Jenderal Suharto tidak menempatkan dirinya sendiri dalam posisi membantah dan tidak mematuhi Presiden, dan kenyataannya telah mengirim utusannya, Kolonel Tjokropranolo, langsung ke Halim dengan sebuah pesan untuk Presiden, bahwa ia telah untuk sementara memegang komando atas AD, atas perintah dari Jenderal Nasution, Menko Hankam/KASAB, dan bahwa ia menempatkan dirinya di bawah Presiden dengan menunggu perintah lebih lanjut. Ketika Tjokropranolo menyampaikan pesan Suharto pada Presiden, di depan anggota-anggota kabinetnya di rumah Susanto, Presiden mengatakan “tunggu dulu,” sambil mengisyaratkan bahwa ia sudah menunjuk Mayjen Pranoto untuk menduduki posisi itu dengan Perintah Harian Kepresidenannya, dan bahwa Martadinata sudah dalam perjalanan ke KOSTRAD untuk menyampaikan salah satu salinannya pada Jenderal Suharto.

Dengan demikian Presiden dan Jenderal Suharto mendapati diri mereka berada dalam posisi berhadapan dalam masalah panglima sementara AD, untuk menggantikan Yani, yang mencerminkan tidak hanya konflik tentang dua otoritas penunjuk, tetapi juga tentang masalah-masalah yang lebih luas. Presiden, Aidit dan Supardjo berdiri di belakang Pranoto sebagai *caretaker* AD, sementara Jenderal Nasution, Menko Hankam/KASAB, menunjuk Jenderal Suharto untuk menduduki posisi itu. Mengingat Jenderal Nasution masih hidup tetapi tidak diajak konsultasi oleh Presiden ketika menunjuk Pranoto, inilah yang mustinya menjadi prosedur standar, maka penunjukan Pranoto mempunyai kedudukan hukum yang kabur. Tidak mengherankan, dan ini kuat alasannya, jika Presiden mengkhawatirkan kombinasi Nasution-Suharto, NATO itu, sebab baru beberapa jam lalu, Untung, atas perintahnya, berusaha membunuh Nasution. Sebagaimana ditangkap dengan tepat oleh intuisi Presiden di Pusat Komando pada pukul 10.10 pagi, ketika mendengar laporan Supardjo bahwa Nasution berhasil lolos dari para pengejanya, Nasution yang masih hidup dan murka karena teraniaya ini berarti masalah besar.

SUHARTO MENCEGAH TERBENTUK DUUMVIRAT SUKARNO-AIDIT: 12.00-16.00

Di muka kita telah menemui Jenderal Suharto di rumah sakit militer di Jakarta pada pukul 11.00 malam, 30 September, yang bersama Ibu Suharto tengah

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

menghibur putera mereka, Tommy, yang diopname karena luka bakar akibat ketumpahan sup panas ketika makan malam sehari sebelumnya.

Yang lebih penting, di rumah sakit tentara itu kita juga bertemu dengan Kolonel Latief, yang diutus oleh Sjam, Supardjo dan Untung untuk menghubungi Jenderal Suharto dalam rangka upaya terakhir mendapatkan kerja samanya dalam aksi pembersihan pucuk pimpinan AD, atau menegaskan sikap netralnya. Jika dia ternyata bersikap memusuhi, maka namanya akan ditambahkan pada daftar jenderal-jenderal yang akan diamankan. Telah kita lihat bahwa Latief gagal merangkul Suharto untuk melaksanakan aksi itu, percaya bahwa Suharto akan tetap netral, yang karenanya menasehati kolega-koleganya agar jalan terus dengan aksi pembersihan itu, dan mencoret nama Suharto dari perhitungan mereka. Dan menyangkut jenderal ini, telah kita lihat bahwa dia memberitahu Latief bahwa ia telah mendengar desas-desus tentang keberadaan Dewan Jenderal, tetapi menyarankan agar desas-desus itu diselidiki dulu sampai tuntas. Mengingat operasi pembersihan itu mendapatkan restu Presiden, maka Suharto mengulur-ulur waktu untuk melihat bagaimana berbagai hal akan terkuak keesokan harinya dan, sebagai seorang Sukarnois yang militan, nasib Presiden akan menjadi bintang pedoman yang akan mengarahkan tindakannya.

Siapa yang ditemui Suharto sepanjang malam itu setelah meninggalkan rumah sakit tentara sekitar tengah malam, dengan meninggalkan Ibu Suharto sendirian bersama Tommy putera mereka, *sama sekali tidak diketahui*, (dan bila ditanyakan sekarang, jawabannya pasti LUPA karena usia yang telah lanjut) dan sampai sekarang tetap menjadi salah satu aspek yang tidak pernah jelas dalam kariernya. Ketika berada di Jakarta, penulis meminta waktu wawancara dengan jenderal itu yang sudah menjadi presiden sekian lama dalam bulan November 1996, untuk menanyakan masalah ini, tetapi kesempatan wawancara itu tidak diberikan.

Tetapi, ketika di KOSTRAD pada 1 Oktober 1965, Suharto tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui nasib Presiden, bintang pedomannya itu. Pada pukul 07.20 pagi itulah ia mendengar dari *Komunike* GESTAPU, yang disiarkan pada waktu itu, bahwa Presiden berada di bawah “perlindungan” GESTAPU, dan kemudian ia tahu dari *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi, yang disiarkan pada pukul 11.00 siang, bahwa dengan perebutan kekuasaan tertinggi di negara itu, Presiden telah dijatuhkan dan Kabinet Dwikora dibubarkan. Nama Presiden, atau kedudukannya sebagai Presiden, bahkan tidak disebut-sebut.

Kedua kejadian itu menghentikan masa ketidak-pastian sang jenderal serta sikapnya yang mengulur-ulur waktu, sebab keprihatinannya pada

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

keamanan Presiden dengan jelas mendiktekan apa yang harus ia lakukan: menghancurkan kudeta Untung dan membebaskan Presiden dari kendalinya.

Suharto mulai menggugat Untung dalam keadaan terlambat, sesudah pukul 07.00 petang tanggal 1 Oktober, ketika ia tiba di kantornya di KOSTRAD, yang berlokasi di sisi timur Lapangan Merdeka yang berbentuk segi empat itu, dengan ketiga sisi lainnya dikuasai pasukan Supardjo. Karena alasan-alasan yang sudah disebutkan di muka, gedung KOSTRAD tidak direbut dalam tahap-tahap awal operasi GESTAPU itu; nama Suharto juga tidak tercantum dalam daftar jenderal-jenderal yang akan diculik. Setiba di kantornya, Suharto memanggil stafnya untuk briefing, mengarahkan mereka untuk mengumpulkan informasi mengenai kejadian-kejadian malam sebelumnya dan menganalisis arti *Komunike* GESTAPU yang disiarkan pada pukul 07.20 pagi hari itu.

Tak lama kemudian Mayjen Umar tiba di KOSTRAD —ia baru saja mengelilingi kota sejak dini hari sebagai Komandan Garnisun Jakarta—menyaksikan kejadian-kejadian utama dari jalannya kudeta itu di banyak tempat, dan melapor pada Suharto tentang penculikan dan penembakan jenderal-jenderal, perkembangan-perkembangan di Istana Merdeka, stasiun radio dan tempat-tempat lain. Mayjen Umar mengatakan bahwa pada pukul 5.30 pagi ia bertemu dengan Brigjen Supardjo di istana, yang tengah memimpin sebuah delegasi untuk menemui Presiden, tetapi Presiden tidak berada di sana dan keberadaannya tidak bisa diketahui.

Suharto langsung sadar bahwa Supardjo telah meninggalkan posnya di Kalimantan tanpa izin darinya —sebab Suharto adalah atasannya—bahwa ia tidak melaporkan kedatangannya di Jakarta, dan bahwa ia pasti tengah memimpin suatu kelompok tentara pemberontak yang melaksanakan pembersihan pucuk pimpinan AD di waktu subuh itu. Ketika mendengar dari Mayjen Umar bahwa Jenderal Yani, Panglima AD, telah dibunuh oleh pasukan pemberontak dan Nasution berhasil meloloskan diri dari para pengejarnya, Suharto langsung menyatakan bahwa ia untuk sementara memegang komando atas AD; kenyataannya ia memang berada di jalur suksesi untuk menggantikan Yani, dan hal itu disetujui oleh semua perwira yang hadir, termasuk Umar. Sekitar pukul 8.30 pagi, Menko Hankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution, mengadakan kontak dengan Suharto, dan memerintahkan dia agar menumpas gerakan Untung serta membebaskan Presiden, dan pada saat yang sama menunjuknya sebagai pejabat panglima sementara AD menggantikan Yani.

Suharto kemudian berpaling pada jaringan telekomunikasinya untuk mengontak berbagai angkatan bersenjata untuk memastikan seberapa luas basis

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

komplotan itu dan, yang terpenting, untuk merangkul sekutu-sekutu guna melawan Untung. Ada kesan mengelak dan keengganan yang kuat dari AURI untuk berbagi informasi, yang penjelasannya datang pada pukul 9.00 pagi, ketika Omar Dhani menyiarkan Perintah Harian-nya melalui saluran-saluran AURI, yang mengindikasikan dukungannya di belakang komplotan itu. Kemudian pada pukul 11.00 siang datang siaran *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi, dan pada pukul 1.00 siang para pemberontak itu menyiarkan bahwa Presiden dalam keadaan sehat wal'afiat dan masih memegang kendali negara. Kabar terbesar datang pada pukul 2.00 siang, ketika radio mengulangi *Dekrit No. 1* Dewan Revolusi, dan kemudian menyiarkan *Keputusan No.1* dan *Keputusan No.2* Dewan Revolusi. Ketiga pengumuman radio itu menjelaskan pada Suharto dan stafnya di KOSTRAD dampak politis dan sifat sebenarnya dari operasi tersebut. Jelaslah bahwa operasi itu bukan sekedar pembersihan komando AD, melainkan sebuah kudeta, yang telah membubarkan Kabinet Dwikora dan merebut kekuasaan tertinggi negara untuk diserahkan ke tangan Komando GESTAPU, yang terdiri dari Untung, Supardjo, Latief, Heru, Sunardi dan Anwas. Presiden jelas telah dijatuhkan dan keseluruhan sistemnya didongkel.

Perkembangan-perkembangan yang tak terduga itu, baik di sisi para pemberontak maupun di dalam AD akibat otorisasi Nasution, memberi Suharto dan stafnya di KOSTRAD sebuah mandat yang sangat kuat untuk melancarkan operasi bermata dua untuk membela tatanan konstitusi negara, pertama menyelamatkan Presiden, kedua menghancurkan komplotan Untung.

Sementara itu di rumah Susanto di Halim, Presiden menunjuk Mayjen Pranoto sebagai *caretaker* AD, dan memerintahkan ajudan Widjanarko mencari dia di rumahnya dan melapor pada Presiden di Halim saat itu juga. Karena tidak menemukan Pranoto di rumahnya Widjanarko pergi ke KOSTRAD sekitar pukul 19.00, dimana ia diberitahu bahwa Pranoto ada di situ, kemudian melihat Jenderal Nasution tengah menerima perawatan medis dan sadar bahwa jenderal itu pasti baru saja dibawa ke sana. Meskipun Suharto sudah mengontak Nasution pada pukul 08.30 pagi, Nasution tengah bersembunyi di sebuah tempat aman dan baru sore itu datang ke KOSTRAD. Widjanarko kemudian melapor pada Suharto bahwa Presiden telah menunjuk Pranoto sebagai *caretaker* AD dan menginginkan dia agar melapor pada Presiden saat itu juga.

"Dimana Bapak sekarang?" tanya Suharto. Ketika dijawab berada di Halim, Suharto mengatakan bahwa Pranoto tidak dapat datang karena "untuk sementara saya memegang pimpinan Angkatan Darat dan itu sebabnya, sejak sekarang, semua instruksi harus lewat saya. Bambang, usahakan agar Bapak

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

meninggalkan Halim.”²⁰⁴ Suharto kemudian mengirim pesan pada Brigjen Sabur, yang bersama Presiden di rumah Susanto di Halim pada waktu itu, untuk membawa Presiden segera di bawah perlindungannya dan memindahkan dia ke Bogor, sebab Suharto akan segera menyerang Halim untuk membuyarkan pasukan Untung.²⁰⁵

Pada saat itu juga Laksamana Madya Martadinata muncul di KOSTRAD sambil membawa salinan Perintah Harian, yang dikirim Presiden kepada Suharto, yang menyatakan bahwa Presiden telah memegang komando langsung atas AD dan menunjuk Pranoto sebagai *caretaker*. Sekarang Nasution ikut dalam diskusi dan baik dia maupun Suharto mencerca Men/Pangal itu habis-habisan, dengan menandakan agar dia dan yang lain-lain, maksudnya Presiden, jangan campur tangan dalam urusan yang murni intern AD. Seluruh urusan di Halim itu adalah sebuah rencana jahat, dan karena Menko Hankam/KASAB masih hidup, ia tidak dapat dilewati dalam masalah penunjukan jabatan di AD. Suharto kemudian menyuruh Martadinata agar memberitahu Presiden bahwa ia sendiri telah memegang komando sementara atas AD dengan persetujuan Nasution, sehingga Suharto tidak akan mengizinkan Pranoto melapor pada Presiden di Halim, dan bahwa jika Presiden membutuhkan bantuannya, ia bisa mengontaknya di KOSTRAD.

Sekitar pukul 08.00 malam Widjanarko kembali ke rumah Susanto di Halim untuk menyampaikan pada Presiden pesan Suharto bahwa ia harus secepatnya meninggalkan Halim karena alasan-alasan keamanan, dan juga karena Suharto merencanakan akan menyerang Halim segera sesudah Presiden berangkat ke Bogor. Selain itu, Widjanarko melaporkan bahwa di tengah perjalanan ke Halim, ia melihat adanya pasukan yang mengenakan badge kuning tengah memblokir jalan-jalan dan bergerak ke arah Halim, dan bahwa beberapa wilayah Halim sudah diduduki oleh pasukan serupa. Ketika melaporkan gerakan pasukan ini pada Presiden, Widjanarko tidak tahu bahwa tentara itu sebenarnya bagian dari Batalyon 454, dan bahwa Supardjo telah memerintahkan mereka agar melepaskan istana, dan objek-objek lain di Lapangan Merdeka pada sore hari itu, serta mundur ke Halim untuk melindungi Presiden dari pasukan KOSTRAD di bawah Jenderal Suharto, yang serangannya dianggap tak lama lagi akan dilancarkan.

CENKO II MENYIMPULKAN BAHWA GESTAPU TELAH GAGAL: 16.00-20.00

Aidit melakukan kesalahan strategis karena meninggalkan opsi yang lebih disukainya, yaitu jalan terus “dengan” Presiden, dalam fase pertama penyelesaian politis pasca-penculikan ketika berada di markas besarnya di Halim, dimana ia bergeser kepada strategi kebijakan jalan terus “tanpa” Presiden sepanjang pagi dan siang hari itu. Kesalahannya adalah tidak secara terbuka mengakui peranan Presiden dalam skema pemerintahan baru itu, terlepas dari jasanya dalam menyerahkan Kabinet Dwikora, termasuk panglima-panglima angkatan bersenjata ke bawah naungan Dewan Revolusi, sebagaimana disiarkan pada pukul 2.00 siang.

Garis keras Aidit yang menentang Presiden ini ambruk ketika Supardjo kembali ke CENKO II, setelah pukul 4.00 sore, sambil membawa salinan Perintah Harian Presiden, melalui mana Presiden mengambil komando atas AD sambil menunjuk Pranoto sebagai *caretaker* untuk mengurus tugas rutin harian, dan pada saat yang sama memerintahkan agar semua pertempuran dihentikan. Dampak dari laporan Supardjo terhadap kelompok yang berkumpul di CENKO II betul-betul meluluh-lantakkan. Hal itu membuat cerai-berai para anggota dalam masalah apakah akan menghentikan operasi atau tidak, membuat mereka terlibat dalam suatu diskusi berlarut-larut, sebab kebijakan lama yang dijalani oleh Aidit sampai sekarang dihajar oleh berbagai kejadian dan tidak mampu mengatasi keadaan dan kondisi-kondisi yang berubah sangat cepat.

Pertama, kekuasaan Presiden menjadi mantap dengan pernyataan Sabur-Supardjo dan kemudian dengan perintah kepresidenan yang baru saja diterima, sehingga sekarang ia tidak dapat digeser, dan usaha seperti itu seharusnya tidak dilakukan. Kedua, tiga kesempatan untuk menggeser Presiden telah terlepas. Yang pertama terjadi pada dini hari, ketika sebuah laporan diterima bahwa Nasution telah lolos. Kesempatan kedua datang tanpa diundang ketika Presiden berada di Pusat Komando setelah menerima Supardjo dan setelah mengeluarkan pernyataan Sabur-Supardjo. Kesempatan ketiga adalah di rumah Susanto, setelah pengumuman tentang keanggotaan Dewan Revolusi pada pukul 2.00 siang. Ketiga, pasukan NATO sekarang memegang inisiatif, tengah bergerak, dan tinggal masalah waktu sebelum mereka mengancam Presiden, dan kepemimpinan GESTAPU di Halim. Keempat, sekitar pukul 16.00, Sjam menerima sebuah laporan dari para informannya di kota bahwa pasukan

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

KOSTRAD dan pasukan khusus RPKAD siap memasuki Halim,²⁰⁶ dan kemudian pada pukul 18.30 sebuah laporan masuk bahwa Suharto telah merebut stasiun radio dan pusat komunikasi. Dan akhirnya, pada pukul 19.30, orang-orang di CENKO II mendengar pengumuman radio pertama oleh KOSTRAD bahwa objek-objek vital itu telah dibebaskan dari kendali GESTAPU dan bahwa pembebasan itu dilakukan oleh pasukan-pasukan yang tetap loyal pada Presiden dalam menghadapi kejadian-kejadian baru-baru ini. Lima, pasukan GESTAPU kacau balau, kehilangan semangat, dan sebagian besar telah meninggalkan posisi mereka di Lapangan Merdeka dan membelot ke KOSTRAD, yaitu dua kompi dari Batalyon 454 dari Jawa Tengah dan seluruh Batalyon 530 dari Jawa Timur. Pasukan yang tersisa kehilangan semangat karena kekurangan makan, yang oleh Supardjo disalahkan pada Sujono, dan nilai militer mereka menjadi problematis.

Bagaimanapun juga, pada pukul 18.00 stasiun radio diserbu oleh Suharto, dan pasukan Untung menyerah pada pukul 18.30 atau melarikan diri ke Halim. Satu-satunya pasukan yang tidak kehilangan semangat bagi GESTAPU adalah unit-unit Pemuda Rakyat di Pondok Gede. Meskipun para sukarelawan sipil itu hanya mendapatkan sedikit pelatihan militer, semangat revolusioner mereka berkobar-kobar dengan pengabdian pada perjuangan Aidit.

Diskusi di antara para pemimpin di CENKO II berlangsung berlarut-larut, sebagaimana pada rapat-rapat mereka yang lain, menyangkut bagaimana strategi yang tepat untuk menghadapi perkembangan-perkembangan paling mutakhir di Halim dan tempat-tempat lain. Banyak pandangan yang saling bertentangan diajukan, khususnya wacana panjang Latief, yang seringkali membingungkan, terbukti destruktif untuk sampai pada konsensus dengan cepat mengenai solusi dari masalah-masalah paling mendesak yang mereka hadapi. Kecemburuan pribadi juga masuk ke dalam gambaran ini. Memang benar bahwa Untung adalah Komandan GESTAPU dan Ketua Dewan Revolusi dengan mandat orisinil dari Presiden untuk melaksanakan penculikan, tetapi Presiden tidak menganggap dia sama sekali. Di pihak lain, Supardjo, yang baru dua hari sebelum D-Day bergabung secara aktif dengan gerakan itu, ternyata menjadi penghubung utama dengan Presiden, menafsirkan niat Presiden dan sebaliknya niatnya ditafsirkan oleh Presiden, dan dengan demikian praktis bertindak sebagai *policy maker* tak resmi bagi gerakan tersebut. Sikap Presiden terhadap kedua orang itu mungkin juga dipengaruhi oleh pangkat mereka masing-masing. Sulit membayangkan Presiden menerima perintah dari Untung. Situasi menjadi kacau, “siapa sebenarnya yang menjadi komandan. Apakah

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Sjam, Kawan Untung, Kawan Latief, atau Pak Djojo?”²⁰⁷ Perbedaan-perbedaan kebijakan juga memperparah diferensiasi intern dalam kelompok itu, ketika Untung menggagas perlunya menghentikan semua operasi saat itu juga sementara Sjam mendesak agar operasi diteruskan.²⁰⁸ Situasi dibuat menjadi lebih rumit lagi oleh “mekanisme konsultasi” yang sangat tanggung dan memakan banyak waktu, dimana setiap tindakan mereka harus disetujui oleh Aidit, padahal dia sendiri meraba-raba mencari suatu kebijakan baru dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sudah banyak berubah dari yang ia pikirkan malam sebelumnya. Sujono adalah penghubung komunikasi antara CENKO II dengan markas besar Aidit di rumah Suwardi di Halim.

Rupanya hasil dari diskusi di CENKO II, dimana Supardjo tidak diragukan lagi menjadi pembicara paling terkemuka, adalah tiga keputusan besar berikut ini. Pertama, semua aktivitas yang ditujukan untuk menggusur Presiden harus dihentikan saat itu juga. Kedua, otoritas konstitusional Presiden harus diakui, khususnya mengingat fakta bahwa Suharto telah merebut komando AD dengan menentang perintah Presiden yang menunjuk Pranoto ke posisi itu. Ketiga, operasi-operasi militer akan dilanjutkan untuk membela Presiden dari ancaman pasukan NATO dan serangan yang mereka rencanakan terhadap Halim.

Dengan demikian, di bawah panduan Supardjo GESTAPU melakukan suatu transformasi citra yang luar biasa. Transformasi itu meninggalkan citra lama sebagai sebuah kelompok pemberontak, yang bertekad mengubah tatanan konstitusional di negeri ini dan menggusur Presiden. Sekarang citra barunya adalah sebagai loyalis yang membela konstitusionalitas pemerintahan Presiden dan melindungi keamanan pribadinya dari ancaman Suharto, perampas komando AD. Maka secara keseluruhan kudeta itu dengan sukses direduksi menjadi sekedar masalah intern dalam tubuh AD, dan mengenakan pakaian lamanya, yaitu persaingan antar-angkatan.

Selain itu, pengambil-alihan komando AD oleh Presiden, dan penunjukan Pranoto sebagai *caretaker*, terbukti sangat menentukan bagi fase berikut dari apa yang mulai merekah itu, sebab di atas masalah inilah para anggota komplotan itu berharap akan menjalin kontak dengan Presiden, mengorganisir suatu aksi gabungan untuk membelanya dari ancaman Suharto, dan melegitimasi diri mereka dengan jalan membela otoritas konstitusional Presiden. Mereka percaya bahwa secara hukum kedudukan mereka kuat, yang akan membebaskan mereka dari keterlibatan dalam Dewan Revolusi dengan jalan membela Presiden dari bahaya yang dihadapkannya oleh pasukan NATO. Pada gilirannya, Presiden dan Pranoto akan melindungi orang-orang

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Untung dari tuduhan pengkhianatan terhadap negara yang diarahkan pada mereka oleh Suharto, dan pertempuran utama akan dilancarkan kembali di atas masalah intern AD, dengan Presiden duduk sebagai wasit tertinggi, tetapi yang akan lebih condong pada Pranoto dan Untung.

Karena itu, menjelang malam Sjam memerintahkan agar semua pasukan dari Lapangan Merdeka ditarik ke Halim untuk membela Presiden.²⁰⁹ Beberapa dari unit-unit itu dilihat oleh Widjanarko di dekat Halim ketika kembali dari KOSTRAD sekitar pukul 20.00 untuk melaporkan pertemuannya dengan Jenderal Suharto. Ketika pasukan itu mencapai gerbang Halim sekitar pukul 20.30, Kapten Kuntjoro pergi untuk menemui Kolonel Udara Wisnu dan Kapten Udara Hanafie, Perwira Intelijen pangkalan udara, meminta izin bagi pasukannya untuk memasuki pangkalan karena mereka telah diperintahkan ke Halim untuk melindungi Presiden. Setelah berkonsultasi dengan Komodor Leo Wattimena, Kolonel Wisnu menolak mereka masuk tetapi mengarahkan mereka untuk bergerak ke Pondok Gede, untuk bergabung dengan pasukan GESTAPU yang ditempatkan di sana. Belakangan, pada malam itu, Mayor Udara Gathot Sukrisno muncul di kantor Kolonel Wisnu untuk meminta izin untuk membawa sekitar 2.000 senapan dari depot AURI untuk mempersenjatai unit-unit di Pondok Gede, tetapi permintaannya ditolak. Terlambat sudah, mereka sudah kalah bertempur, dan tiba saatnya bagi AURI untuk menghapus jejak-jejaknya.²¹⁰ Situasi telah berubah begitu banyak sejak malam sebelumnya, ketika Omar Dhani mengizinkan AURI mempersenjatai pasukan-pasukan yang akan menangkap para jenderal dan membiarkan mereka mengeluarkan 17 kendaraan transportasi dan sekitar 3.000 pucuk senapan, senjata laras pendek dan amunisi dari gudang-gudangnya.

Perkembangan-perkembangan serupa, yang mengantisipasi kerjasama antara Presiden dengan pasukan GESTAPU yang membelanya, tengah terjadi di rumah Susanto. Segera sesudah Martadinata dan Widjanarko kembali ke rumah Susanto dan melaporkan pertemuan mereka dengan Suharto di KOSTRAD dan rencananya untuk menyerang Halim, Presiden pasti sudah sadar bahwa ia berada dalam kesulitan serius, karena Suharto sekarang berada dalam posisi yang mampu memberikan tekanan yang semakin besar padanya. Pertama, Menko Hankam/KASAB Nasution masih hidup, dan jelas bahwa dia, bersama Suharto, akan secara tak kenal ampun mengejar orang-orang yang berusaha membunuhnya. Kedua, Presiden berbenturan dengan Suharto dalam masalah panglima sementara AD, dimana Suharto menentang dia dan merebut komando itu untuk dirinya sendiri. Kemudian datang ancaman serangan Suharto

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

terhadap Halim, dan perintahnya pada Sabur dan Widjanarko untuk mengevakuasi Presiden ke Bogor.

Di titik persimpangan ini, Presiden pasti menyambut baik konsentrasi pasukan Supardjo di sekitar Halim. Menjelang pukul 6.00 sore, Supardjo, dengan inisiatifnya sendiri dan tanpa undangan dari Presiden, muncul di rumah Susanto untuk mendiskusikan dengan Presiden usaha membela Presiden dari serangan Suharto. Sekarang sebuah aliansi baru antara Presiden dan GESTAPU mulai dijalin, tetapi dengan basis politis baru. Kenyataannya, pada suatu titik Supardjo bahkan berharap akan meyakinkan Presiden untuk mengambil inisiatif dengan melawan Suharto melalui operasi-operasi ofensif, dan meminta otorisasi dari Presiden untuk menyerang pasukan Suharto di KOSTRAD. Tetapi usaha yang nekat untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan itu tidak disetujui oleh Presiden karena pada waktu itu ia sudah yakin bahwa perjuangan itu sudah kalah, yang membuatnya siap untuk meninggalkan sekutu-sekutunya dan menyerah pada Suharto. Keseimbangan kekuasaan telah bergeser begitu banyak menjelang sore itu. Omar Dhani bersaksi bahwa ia sendiri sudah memperingatkan Supardjo agar tidak menyerang pasukan Suharto di KOSTRAD. Kenyataannya, sekarang Presiden sendiri memerintahkan Supardjo agar melepaskan rencananya untuk menentang Suharto, agar menghentikan tembak menembak bahkan dalam membela dirinya, dan agar membubarkan pasukannya. Jelaslah, Presiden ingin masuk ke dalam naungan perlindungan Suharto dengan catatan yang bersih.

Adalah sebuah perkembangan yang luar biasa, jika diukur dengan segala macam standar, untuk melihat Supardjo datang ke dan pergi dari rumah Susanto dengan leluasa, memberikan informasi pada orang-orang di CENKO II, dan sebaliknya, berbicara secara langsung dengan Presiden mengenai pembelaan terhadap diri Presiden, ngobrol dengan Omar Dhani, Leimena, Dewi dan yang lain-lain, dan bergerak dari kamar ke kamar secara leluasa. Ketika Widjanarko melapor pada Presiden, sekitar pukul 20.00, mengenai pertemuannya dengan Jenderal Suharto di KOSTRAD, sambil menyampaikan pesan-pesannya, Supardjo duduk tanpa diundang disamping Widjanarko,²¹¹ dan mendengar seluruh laporan itu, termasuk respon Presiden serta diskusinya tentang apa yang Presiden harus lakukan di bawah situasi dan kondisi seperti itu. Tidak diragukan lagi, sekembalinya ke CENKO II, laporan Supardjo mengenai kunjungan Widjanarko ke KOSTRAD, diskusi-diskusi di rumah Susanto dan keputusan Presiden untuk tunduk pada Suharto dan pergi ke Bogor, memainkan peranan sentral yang membuat komando GESTAPU sampai

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

pada kesimpulan bahwa gerakan mereka telah gagal.²¹² Dalam konteks inilah, menjelang pukul 21.00, Sujono membawa Sjam, Untung dan Supardjo ke dalam mobilnya dan melarikan mereka ke markas besar Aidit untuk menyelenggarakan sebuah rapat darurat guna melaporkan kegagalan aksi mereka dan meminta instruksi-instruksi lebih lanjut.

AIDIT MENINGGALKAN JAKARTA DAN PERGI KE JAWA TENGAH: 20.00-01.00

Rapat darurat itu dihadiri oleh Aidit dan, rupanya, juga oleh Lukman dan Njono yang mewakili Politbiro; Sjam yang mewakili Biro Khusus; dan Untung, Supardjo dan Sujono yang mewakili Dewan Revolusi. Menurut Sjam, ia melaporkan bahwa gerakan itu telah gagal akibat pembelotan unit-unit dari Batalyon 454 dan 530 ke KOSTRAD, yang membuat gerakan itu kehilangan kekuatan militernya. Lebih jauh ia melaporkan bahwa Presiden telah memerintahkan penghentian semua tembak-menembak, dan telah memegang kendali atas AD sambil menunjuk Pranoto sebagai *caretaker* untuk mengurus masalah-masalah administratifnya.²¹³ Meskipun detail-detail lain mengenai rapat ini tidak diketahui, ada kemungkinan besar bahwa para peserta itu mendiskusikan pemahaman Supardjo mengenai situasi itu, dan apa yang harus dilakukan, yang ia peroleh dalam beberapa pertemuan pribadinya dengan Presiden, juga dengan duduk di antara para menteri ketika mendiskusikan perkembangan-perkembangan di KOSTRAD serta berubahnya keseimbangan kekuatan. Rekomendasi-rekomendasi Supardjo barangkali menyangkut poin-poin berikut ini: 1) mengakui Presiden sebagai kepala negara; 2) menghentikan semua usaha untuk menggulingkan dia dari kekuasaan pada tahap ini; 3) melindungi Presiden dari KOSTRAD; 4) mendesak agar Presiden dan Pranoto memberikan perlindungan hukum dan politis pada para anggota GESTAPU untuk menamengi mereka dari kemarahan dan pembalasan NATO; dan 5) konsisten dalam menurunkan derajat GESTAPU menjadi masalah intern AD, yang akan diselesaikan hanya oleh Presiden dan secara politis.

Agaknya rapat itu memutuskan untuk meninggalkan strategi saat itu, yaitu jalan terus tanpa Presiden dan berusaha menggusur dia, dan menggantikannya dengan aliansi yang baru saja dibangun dengannya atas dasar kerjasama melawan NATO. Dengan demikian, semua aktivitas bermusuhan melawan Presiden harus segera dihentikan, sementara perjuangan melawan pasukan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

NATO harus diteruskan dan dikembangkan lebih lanjut. Lebih jauh lagi diputuskan bahwa Aidit akan pergi ke Jawa Tengah untuk mengorganisir kebangkitan rakyat yang anti-NATO, berdasarkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan di sana oleh Biro Khusus sejak bulan Agustus. Selain itu, harus diusahakan untuk tidak membiarkan Presiden dibawa ke Bogor, membebaskan dia dari cengkeraman Suharto dan menyelundupkan dia ke Yogyakarta dan menjadikannya kepala Pemerintahan Darurat Dewan Revolusi, dengan mengandalkan gerakan massa revolusioner yang luas, yang menentang pasukan NATO yang mengendalikan Jakarta. Aidit mengungkapkan rencana ini segera sesudah ia mendarat di Pangkalan Udara Maguwa di Jawa Tengah dini hari 2 Oktober, sambil memberitahu para perwira yang menyambutnya bahwa tugasnya adalah mengatur “evakuasi” Presiden ke Yogyakarta dan mendirikan Pemerintahan Darurat di kota itu.²¹⁴ Jika Presiden tidak dapat dibebaskan dari kontrol NATO, jelaslah, Pemerintahan Darurat di Yogyakarta akan dipimpin oleh Omar Dhani, sebagai seorang Pejabat Presiden sampai Sukarno tiba, atau jika terjadi sesuatu pada Sukarno, maka Omar Dhani akan dikukuhkan menjadi Presiden.

Pada titik ini, rapat itu rupanya lalu bubar. Sementara Sujono membawa Sjam, Untung dan Supardjo kembali ke CENKO II, Lukman dan Njono diselundupkan keluar dari Halim untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang muncul dari garis kebijakan baru yang baru saja diadopsi dalam rapat darurat tadi. Setelah kembali ke CENKO II, Sjam meminta Sujono agar mendekati Omar Dhani untuk meminta sebuah pesawat bagi Aidit. Sujono melapor kembali menjelang pukul 23.00 bahwa ia telah mendapatkan sebuah pesawat, dan saat itu juga diputuskan bahwa Aidit harus pergi ke Yogyakarta, ditemani oleh sekretarisnya, Kusno, dan Walujo.²¹⁵ Segera setelah pesawat diisi bahan bakar dan siap, Sjam mengeluarkan Aidit dari rumah Suwardi dan membawanya ke landas pacu untuk menaiki pesawat itu, yang tinggal landas pada pukul 1.00 pagi tanggal 2 Oktober 1965 dengan tujuan Yogyakarta.

Sebelum Aidit naik ke pesawat dengan tujuan Yogyakarta, dua perkembangan penting rupanya telah terjadi. Pertama, rupanya segera setelah rekan-rekannya meninggalkan rumah Suwardi untuk pergi ke CENKO II, Aidit memanfaatkan fasilitas komunikasi khusus, atau saluran-saluran AURI, untuk berhubungan dengan Peking dan tempat-tempat lain, selama empat jam dari pukul 21.00 sampai keberangkatannya menjelang pukul 1.00 pagi.²¹⁶ Pada waktu itu barangkali ia memberitahu pihak Cina tentang rencana mentransfer Presiden maupun Pemerintah Darurat ke Yogyakarta, dan memulai suatu “counter-

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

offensive revolusioner” melawan pasukan NATO yang mendominasi Jakarta dan Jawa Barat. Teori perang tipe ini diajarkan di setiap akademi militer di negara-negara komunis sebagai salah satu doktrin militer unggulan, yang memadukan operasi-operasi tradisional dari pasukan bersenjata reguler dengan perang gerilya di belakang garis musuh, dimana sabotase, pembunuhan, penyanderaan, teror, dan propaganda menjadi ciri khasnya.

Rupanya Aidit juga berhubungan, melalui saluran-saluran AURI, dengan Subandrio dan Njoto di Sumatra, untuk meminta “pihak-pihak bersahabat,” maksudnya Cina dan Vietnam Utara, agar memberikan senjata dan bentuk-bentuk bantuan lain. Tidak satupun datang sampai November 1965, sebagaimana kita ketahui dari surat Aidit tertanggal 10 November 1965, dimana ia mengeluh bahwa banyak dari harapan-harapannya tidak dipenuhi bukan hanya oleh “partai-partai sekawan”, tetapi juga oleh Presiden dan Subandrio. “Jelas tidak membuktikan kesetiakawanan apalagi memenuhi kanji yang telah diucapkan.”²¹⁷ Barangkali Peking menilai peluang Aidit sudah sangat kecil jika jalan terus dengan Sukarno sebagai pemegang kemudi, sebab kita tahu bahwa Peking telah dikecewakan oleh kinerja Sukarno dalam Gerakan Asia-Afrika selama musim panas 1965, dan bahwa Mao pernah menasehati Aidit pada bulan Agustus untuk menggantikannya. Dan menyangkut Vietnam, meskipun Aidit telah mengirim 14 kader ke Hanoi untuk mendapatkan pelatihan perang gerilya, mereka, dan bantuan Hanoi, terlambat datang ke Jawa Tengah, sebagaimana telah kita lihat di muka dalam kajian ini.

Dalam perkembangan penting yang kedua, menyusul keberangkatan rekan-rekan Aidit dari markas besarnya di rumah Suwardi, Sujono dan Supardjo langsung pergi ke rumah Susanto. Di sini Sujono dan Supardjo membriefing Omar Dhani mengenai keputusan yang dicapai di markas besar Aidit menyangkut keberangkatan Aidit ke Yogyakarta, rencananya untuk memindahkan Presiden dan Dewan Revolusi ke kota itu, dan tentang perlunya mencegah Presiden dibawa ke Bogor. Strategi Aidit untuk tahap perkembangan berikutnya didasarkan pada kehadiran Presiden, Omar Dhani dan Dewan Revolusi di Yogyakarta. Sebagaimana akan segera terlihat, baik Omar Dhani maupun Supardjo berbicara dengan Presiden secara bersama dan secara individual di rumah Susanto untuk membujuknya agar mau pergi ke Yogyakarta. Dhani bahkan menyingkirkan Presiden dari orang-orang lain dan membawanya ke salah satu kamar untuk menjelaskan secara pribadi perlunya Presiden pergi ke Yogyakarta, bahwa sebuah pesawat AURI siap menerbangkannya ke sana, dan bahwa ia telah memerintahkan pengawalan bersenjata untuk menemani pesawatnya karena alasan keamanan.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Menyusul keberangkatan Aidit, Sjam kembali ke CENKO II sekitar pukul 01.30 pagi, menjemput Supardjo, dan keduanya berangkat ke Lubang Buaya, dan tiba di sana sekitar pukul 02.30 untuk mengimplementasikan keputusan rapat darurat tadi bahwa perjuangan melawan pasukan NATO harus dilanjutkan. Karena itu, sebuah rapat diselenggarakan sekitar pukul 06.00-06.30 pagi, yang dihadiri oleh Sjam, Supardjo, Latief, Sujono dan lain-lainnya. Kita mendapatkan catatan tentang jalannya rapat yang ditinggalkan untuk kita oleh Supardjo:

“Sementara itu, semua slagorde G-30-S telah berkumpul di LB. Disana-sini mulai terdengar tembakan dari RPKAD yang mulai mentjari kontak tembakan. Kw Sjam dan Kw Untung cs, mulai rapat tentang menentukan sikap. Maka ditempat tsb, Komandan Jon Djateng dan seluruh anggota bataljonnya hadir. Komandan Bataljon Jatim juga hadir tanpa pasukan. Kurang lebih seribu limaratus sukwan jg dilatih di LB. Melihat situasi jang gawat ini tidak ada pilihan lain: (a) bertempur mati2an atau (b) cepat menghilang, menjelamatkan diri.

Diskusi berdjalan lama tanpa keputusan. Achirnya kami sarankan agar seluruh komando diserahkan kepada kami, dan nanti bila situasi telah dapat diatasi, wewenang akan diserahkan kembali kpd Kw Untung. *Kw Untung tidak setuju, karena bertempur terus (menurut) pendapatnja sudah tidak ada dasar politiknja lagi.* Apa jang dimaksud dengan kata-katanja itu, kami tidak begitu mengerti. Dilain fihak Kw Sjam tidak memberikan reaksi atas usul kami. Kemudian saya desak lagi supaya segera mengambil keputusan, bila terlambat nanti, maka kita terdjepit dalam suatu sudut dimana tidak ada pilihan lain, melawanpun hancur dan laripun hancur. Karena posisi kita pada waktu itu sudah labil. Kemudian rapat memutuskan memberhentikan pertempuran dan setiap kawan diperintahkan kembali ketempat asal mereka masing2, dalam keadaan jang serba terlambat ini kemudian kami kami ambil inisiatif untuk menjelamatkan Kw pimp (Sjam) dan masuk kekota Djakarta (tak terbatja).

Kawan Untung dalam tjara membubarkan pasukannjapun melakukan kesalahan, seharusnya ia sebagai komandan langsung harus memberi petundjuk teknis bagaimana pelaksanaannya menjebar dan menjusup kembali. Karena di LB banyak kawan2 Sukwan jang berasal dari luar kota Djakarta, bahkan ada jang dari Djateng, mereka tentunja merasa asing dan tidak tahu djalan. Karena peraturannja “*Aur Manuk*” sadja atau dilepaskan sekehendak masing2 maka banjak jang tertawan dan mendjadi mangsa penjiksaan pasukan2 Nato cs.”²¹⁸

Lakon Wayang Kulit Kolomongso Saat Makan Siang

Menyangkut para sukarelawan yang telah dipersenjatai, Sjam percaya bahwa andaikata mereka diizinkan untuk bertempur, “Jakarta akan mandi darah, karena pasukan itu tidak terlatih, fanatik, dan sebetulnya illegal,”²¹⁹ dan mendesak agar tidak membiarkan mereka bergerak masuk ke kota dan menjerang KOSTRAD. Terlepas dari peringatan itu, semua sukarelawan itu belakangan dipersenjatai dan diperintahkan menjerbu jantung kota pada dini hari 2 Oktober, untuk “membebaskan” gedung-gedung publik yang sekarang sudah di bawah kendali Suharto, dimana pasukannya melucuti dan menawan mereka sebelum mampu mendatangkan kerugian besar.

Sjam dan Supardjo meninggalkan Lubang Buaya pada tengah hari 2 Oktober menuju rumah Pono, dimana diambil keputusan untuk mempercayakan keamanan Supardjo pada Wandu, dan setelah itu Sjam pulang ke rumahnya sendiri. Keesokan harinya, 3 Oktober, Sjam dan Pono bertemu dengan Sudisman di markas besar darurat PKI di Kayuawet, yang didirikan pada 5 September, hanya beberapa hari sebelum peluncuran GESTAPU. Pada hari itu semua dokumen penting partai telah dipindahkan untuk diamankan ke lokasi itu dan dipercayakan pada Sudisman.

Ini juga menjadi tempat regrouping bagi anggota-anggota Biro Khusus, dan orang-orang lain yang terlibat dalam operasi GESTAPU setelah keruntuhannya. Pada 4 Oktober Walujo tiba dari Jawa Tengah sambil membawa sepucuk surat dari Aidit untuk Sjam, yang menginstruksikan dia agar mengurus keamanan pribadinya sendiri, tetapi melanjutkan perjuangan sebagaimana telah diputuskan pada rapat darurat terakhir di markas besar Aidit di Halim pada 1 Oktober 1965 malam itu. Pada 5 Oktober Sjam pergi ke rumah Walujo untuk mengirim sebuah pesan untuk Aidit melalui kontak-kontak Walujo ke Jawa Tengah dan bermalam di sana sebagai tamu. Sementara itu Walujo memanggil Pono dan Hasim untuk rapat di rumahnya pada 6 Oktober, untuk mendiskusikan tugas itu, pengaturan-pengaturan keselamatan pribadi mereka, dan metode-metode melanjutkan perjuangan melawan pasukan NATO. Disepakati bahwa Sjam akan bekerja di Jawa Barat; Pono dan Walujo di Jawa Tengah; dan Hasim, Sujono dan Pradiono di Jakarta. Rapat merasa bahwa suatu kesepakatan mengenai pembagian tugas seperti itu penting dicapai sedini mungkin karena situasi dan kondisi yang terus berkembang tidak akan memungkinkan mereka bertemu kembali dalam waktu dekat.

Sjam akhirnya bergerak ke Bandung, agar dekat dengan istana kepresidenan di Bogor, dimana konsekuensi politis dari kehancuran GESTAPU itu akan diputuskan.²²⁰ Presiden mengundang sidang Kabinet Dwikora pada 6

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Oktober, dan Aidit memerintahkan Njono dari Jawa Tengah untuk hadir, menyampaikan suratnya pada Presiden, yang mengusulkan suatu solusi politis tentang GESTAPU sebagai murni masalah intern AD, dengan Presiden sebagai hakim tunggal, membela kebijakan-kebijakan PKI selama GESTAPU dan melindungi legalitas partai. Menyangkut Supardjo, Presiden membawanya ke dalam perlindungannya langsung dengan jalan mengundangnya untuk tinggal di istana, di pavilyun kanan, dekat Kebun Raya Bogor, dari tanggal 2 sampai 5 Oktober 1965, untuk menjaga kontak dengan gerakan itu dan melindungi Supardjo dari para pengejanya.



X

OFENSIF SUHARTO 1 OKTOBER 1965

SUHARTO MENGIKUTI PRESIDEN—BINTANG
PEDOMANNYA: 07.20-23.00

Meskipun Supardjo cs berharap bahwa mereka mudah-mudahan berhasil menyelamatkan diri dengan putar haluan memihak Presiden, yang digalang di rumah Susanto di Halim pada senja 1 Oktober, harapan mereka sirna tidak lama kemudian karena pada saat itu Jenderal Suharto telah berhasil menguasai keadaan dan meyakinkan pasukan-pasukan Untung dan Presiden melalui berbagai tekanan, hingga Presiden akhirnya tunduk pada larut malam 1 Oktober. Meski Suharto tidak mau menyerang Halim selama Presiden berada di situ, dengan menguasai kembali pusat radio dan komunikasi pada pukul 18.00, ia mengirim isyarat yang kuat ke Halim bahwa inisiatif militer dan politik berada di dalam tangannya, bahwa tidak ada harapan apapun lagi bagi Untung, dan bahwa Presiden lebih baik meninggalkan Halim dan pergi ke Bogor yang lebih aman. Presiden, yang selalu peka pada perubahan-perubahan konstelasi kekuasaan, menyadari bahwa kelangsungan hidup politiknya terletak dalam tangan Suharto dan, karena itu, kembali mengalihkan tempat berpijak dengan harapan bahwa *status quo ante* dapat dipulihkan, jika ia mengikuti kehendak Suharto, calon pewaris kekuasaan militer Indonesia, setelah pembersihan itu membuka jalan baginya.

Jenderal Suharto bergerak ke tingkat operasi ofensif terhadap komplotan Untung perlahan-lahan. Selain dari Halim, dalam kota sendiri tidak ada kegiatan pemberontakan, kecuali bahwa pemberontak menguasai istana,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

stasiun radio, dan pusat komunikasi, semuanya di Medan Merdeka, dan beberapa gedung dan objek-objek di vital lainnya di dalam kota. Penting untuk tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, dan melakukan segala persiapan itu tanpa menyolok mata sampai rencana politik komplotan itu sudah benar-benar nyata terlihat bersama implikasi-implikasinya.

“Saya memberi prioritas tinggi pada penghindaran pertumpahan darah. Saya sebenarnya dapat merebut kembali stasiun radio pada pagi hari itu. Tetapi ini akan menimbulkan tembak menembak, dan pada saat itu saya masih belum tahu latar belakang yang sesungguhnya dari Gerakan 30 September. Setelah Dewan Revolusi dan susunannya diumumkan melalui siaran radio, barulah kegiatan-kegiatan mereka yang sebenarnya tersingkap, yang meyakinkan kami bahwa kami tidak perlu lagi ragu-ragu untuk mengambil tindakan terhadap Gerakan 30 September.”²²¹

Begitu mengetahui dari siaran radio pada pukul 14.00 siapa-siapa di balik gerakan itu, Suharto bergerak melancarkan operasi-operasi ofensif yang terdiri dari, dan ini agak aneh, mengupayakan, melalui perundingan, penarikan sebagian besar anggota Batalyon 530 dari tugas mereka menjaga istana. Untuk taktik ini, ia mengutus Mayjen Basuki Rachmat, yang kenal dengan beberapa komandan pasukan ini dari Jawa Timur, Mayjen Sobirin Mochtar, bekas komandan Batalyon 530, dan Kolonel Ali Murtopo. Ketika Mayjen Rachmat, dan para perwira ini lewat untuk mencari bekas teman-teman mereka itu, para prajurit memberi hormat kepada mereka, bersikap bersahabat tetapi tampak bingung karena tidak tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi. Ketika Suharto diberi tahu bahwa para komandan kedua batalyon ini pergi ke istana dengan Supardjo pagi-pagi sekali, ia memanggil para wakil komandan kedua batalyon itu ke KOSTRAD, dan di situ mereka melaporkan bahwa mereka mendapat perintah untuk menjaga Presiden dari ancaman Dewan Jenderal. Suharto sangat ramah, dia yang membalas penghormatan mereka dalam parade pada hari sebelumnya, dan kepada mereka disampaikannya bahwa mereka telah kena tipu, membuat mereka berpikir bahwa “saudara-saudara mengawal Presiden, tetapi sebenarnya saudara-saudara telah dimanipulasi untuk melindungi”²²² sebuah *kudeta d’etat* yang dilakukan oleh Untung. “Yang jelas,” katanya, “saudara-saudara mengawal istana yang kosong, karena Presiden sekarang berada di Halim, sebagai tawanan Untung.” “Sekarang,” kata Suharto, “jika saudara-saudara masih setia kepada revolusi dan sumpah prajurit, kumpulkan anak buah saudara dan kembali ke sini melapor pada saya. Jika tidak, saya terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap saudara-saudara.”²²³

Ofensif Suharto 1 Oktober 1965

Karena pengaruh pertemuan yang bersahabat dengan KOSTRAD ini, Batalyon 530 terpecah, dan pada pukul 16.00 banyak prajurit yang meninggalkan Medan Merdeka dan melapor ke KOSTRAD, berputar haluan dan kemudian ikut-serta dalam operasi-operasi perbersihan para sukarelawan dari Lubang Buaya yang datang menyerang kota. Namun, Suharto tidak terlalu beruntung dengan anggota Batalyon 454. Mereka menolak berputar haluan, hanya dua kompi yang bersedia, selebihnya dengan gigih bertahan melaksanakan tugas menduduki dan mengawal stasiun radio dan pusat komunikasi sampai mereka menyerah esok hari pada waktu senja.

Karena mereka menolak bekerja sama, Jenderal Suharto mengeluarkan perintah agar stasiun radio dan pusat komunikasi itu direbut kembali dengan senjata. Tugas ini diberikan kepada RPKAD, pasukan para komando, yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhy, dan kepada sebuah batalyon Divisi Siliwangi, yang telah tiba di Jakarta beberapa hari sebelumnya untuk ikut latihan parade untuk Hari Angkatan Bersenjata, yang direncanakan dilaksanakan pada 5 Oktober. Pasukan ini ditugaskan di sekitar stasiun radio dan gedung telekomunikasi pada pukul 18.00, dengan perintah untuk menguasainya dengan senjata setelah batas ultimatum pada pukul 20.00 berakhir. Ketika komandan pasukan GESTAPU melihat pasukan elite ini dikerahkan untuk melawan mereka, pastilah terjadi komunikasi radio yang cepat dengan Supardjo di Halim, karena pasukan GESTAPU ini dengan cepat mengosongkan stasiun radio dan pusat telekomunikasi, naik truk dan mundur ke Halim pada sekitar pukul 18.30, tanpa melepaskan tembakan sebutir pun. Widjanarko melihat mereka berkumpul kembali di Halim, ketika ia dalam perjalanan kembali ke Halim setelah menemui Suharto di KOSTRAD, dan membawa perintah Suharto untuk Sabur agar membawa Presiden keluar dari Halim dan memindahkannya ke Bogor. Kekuatan yang digunakan RPKAD untuk merebut gedung-gedung ini, dan perintah untuk mundur yang menandai kebijakan baru kelompok Supardjo, mengisyaratkan penghentian pertarungan secara damai dan tertib, untuk menghindari konfrontasi terbuka dan pertumpahan darah pada malam yang telah larut itu, yang hanya akan membuat prospek bagi penyelesaian politik semakin rumit.

Ada satu lagi insiden yang patut dicatat, tetapi latar belakangnya tidak sepenuhnya jelas. Setelah menyerahkan kepada Suharto pusat telekomunikasi di Medan Merdeka Selatan, Batalyon 530 diberi tugas mengamankan daerah-daerah sekitar gedung itu untuk pasukan Suharto. Namun, tidak lama kemudian muncul beberapa truk membawa unit-unit Pemuda Rakjat dari Lubang Buaya

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

untuk menduduki gedung Front Nasional di dekat situ; mereka dalam waktu singkat dilumpuhkan oleh pasukan Suharto. Timbul pertanyaan yang penting: siapa yang mengeluarkan perintah bagi pasukan PKI ini untuk bergerak? Apakah perintah datang dari PKI, untuk mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin apa yang masih dapat diselamatkan setelah Supardjo menarik pasukannya dari tempat-tempat ini? Jika perintah itu datang dari PKI, itu berarti ada perpecahan yang tengah terjadi antara komponen PKI dengan komponen AD dalam komplotan itu di Halim, yang disebabkan oleh tekanan-tekanan dari perkembangan keadaan yang semakin tidak menguntungkan baginya. Supardjo, sebagai seorang prajurit, cenderung untuk menghentikan pertarungan dan mundur, tetapi beberapa elemen PKI barangkali tidak sepakat, dan mencoba pada detik-detik terakhir untuk merebut kembali posisi-posisi yang telah hilang dengan mengerahkan milisi bersenjata sendiri. Namun, tidak ada titik-titik terang dari sidang-sidang pengadilan tentang pertanyaan ini.

Barangkali milisi PKI ini dikerahkan untuk memperkuat, dan “membajakan,” semangat pasukan pemberontak, tetapi mereka tiba terlambat dan tidak tahu bahwa Supardjo sudah mengeluarkan perintah agar mereka menyerah dan mundur ke Halim. Juga mungkin bahwa semangat revolusioner milisi ini masih menggebu-gebu, tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di rumah Susanto dan di markas Aidit, tempat Sjam melaporkan kegagalan rencana mereka, dan bertindak atas inisiatif mereka sendiri.

Namun, insiden ini membawa pengaruh yang penting pada perkembangan strategi Suharto selanjutnya, karena interogasi atas pemuda-pemuda yang tertangkap mengungkapkan bahwa ada sekitar 3.000 dari mereka pada awalnya yang dipersenjatai oleh AURI, dan bahwa kelompok-kelompok milisi PKI inilah yang berkeliaran di sekitar Jakarta, siap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Milisi tersebut bukan terdiri dari prajurit-prajurit terlatih tetapi dari anak-anak muda radikal yang loyal kepada PKI, yang akan sulit dikendalikan, dan mungkin akan melakukan tindakan pengacauan jika terpojok. Milisi PKI itu dipersenjatai di Senayan, pada malam hari 1 Oktober, dengan senjata yang tiba sebelumnya dari Cina, dibawa oleh Omar Dhani, seperti dilaporkan kepada Presiden oleh Brigjen Sabur di Istana Bogor pada 2 Oktober 1965, di hadapan Leimena, Saelan, Sumirat, Mangil and Widjanarko.²²⁴ Suharto sekarang menyadari bahwa “tampaknya ada alasan yang kuat” untuk mengatakan bahwa pada pagi hari 2 Oktober akan terjadi kekerasan-kekerasan yang lebih banyak lagi, barangkali serangan umum, atau upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah di sekitar istana.”²²⁵ Karena itu, ia memutuskan untuk

Ofensif Suharto 1 Oktober 1965

mengamankan Halim malam itu juga, sebelum pasukan pemberontak sempat melakukan serangan umum atas kota Jakarta atau sebelum milisi yang sudah ada di kota melakukan tindakan pengacauan.

Tidak lama setelah pukul 18.30 pasukan Suharto merebut stasiun radio dan pusat telekomunikasi dan, setelah memperbaiki stasiun radio itu hingga dapat beroperasi kembali, lalu menyiarkan pengumuman pertama tentang situasi hingga saat itu pada pukul 19.00, bahwa gedung-gedung bersangkutan telah berhasil direbut kembali dan dibebaskan dari kendali kekuatan-kekuatan kontra-revolusi. Pembebasan dilakukan oleh angkatan bersenjata yang masih tetap loyal kepada Presiden pada waktu krisis itu. Sementara itu, pasukan Suharto terus mendesak pasukan pemberontak dan kelompok-kelompok Pemuda Rakyat, dan membebaskan dari bawah kendali mereka gedung-gedung pemerintah yang lain.

Pada saat itu, Jenderal Suharto telah berhasil mengendalikan keadaan sehingga dapat mengeluarkan pengumuman resmi yang pertama dari AD, sebagai pejabat sementara yang diangkat oleh Menko Hankam/KASAB Jenderal Nasution yang terluka. Pada pukul 20.50 Jenderal Suharto mengumumkan lewat siaran radio bahwa Gerakan 30 September adalah sebuah komplotan kontra-revolusi, sebuah komplotan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah, dan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut anggota komplotan itu telah menculik beberapa jenderal AD dan merebut stasiun radio, pusat komunikasi dan gedung-gedung strategis lainnya di ibukota Jakarta. Menko Hankam/KASAB Jenderal Nasution, dan Presiden Sukarno, selamat dan sehat wal'afiat, dan Jenderal Suharto telah mengambil alih komando AD untuk sementara. Situasi umum kota Jakarta sudah dapat dikendalikan, dan operasi-operasi keamanan dengan cepat dilancarkan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Rakyat hendaknya tetap tenang dan tetap melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa.²²⁶

Sekaranglah saatnya bagi Jenderal Suharto untuk bergerak merebut pusat persekongkolan itu, Pangkalan Angkatan Udara Halim. Namun, masalahnya adalah Presiden Sukarno. Selama Presiden ada di Halim, Suharto tidak mau mengeluarkan perintah untuk menyerang. Namun, pada pukul 20.00 Suharto memutuskan bahwa ia tidak dapat menanggguhkan operasi itu lebih lama lagi, dan “mengirimkan pesan meminta agar Presiden meninggalkan Halim karena ia akan mengambil tindakan.”²²⁷

LAKON WAYANG KOLOMONGSO BERAKHIR: PRESIDEN MENUJU BOGOR: 20.00-23.00

Semua perkembangan ini menyiapkan pentas bagi adegan terakhir drama *wayang kulit* yang digelar di Halim pada petang dan malam hari 1 Oktober, 1965.

Pertama, Aidit mengadakan rapat darurat bersama pimpinan PKI dengan pimpinan gerakan Untung, untuk mendengarkan laporan Sjam bahwa gerakan itu telah gagal, dan laporan Supardjo tentang pertemuannya dengan Presiden dan usul-usul untuk tindakan lebih lanjut, seperti telah kita lihat.

Ini adalah pertemuan pertama langsung Supardjo dengan Aidit di Halim, menurut bukti-bukti yang ada, untuk merencanakan langkah-langkah pertahanan bersama PKI dan Gerakan 30 September. Keputusan untuk memindahkan pusat pertahanan dari Jakarta ke Jawa Tengah jelas didasarkan pada pertimbangan pengaruh PKI yang sangat besar di situ, baik dari segi politik maupun segi militer. PKI memegang kendali yang cukup besar atas lembaga-lembaga pemerintahan propinsi, kabupaten, dan kecamatan, dan di bidang militer memiliki pengaruh yang besar atas beberapa unsur dalam Angkatan Bersenjata, terutama melalui penyusupan ke dalam Divisi Diponegoro, di Jawa Tengah, dan Divisi Brawidjaja di Jawa Timur. Satu batalyon Divisi Diponegoro, Batalyon 454, yang telah tiba di Jakarta pada akhir September untuk mengikuti latihan untuk Hari Angkatan Bersenjata, ikut-serta di bawah Untung menguasai istana, stasiun radio, dan pusat komunikasi.

Selain itu, Aidit pasti mengharapkan bahwa karena semua perkembangan ini, Dewan Revolusi setempat tentunya sudah memegang tampuk kekuasaan di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan bahwa sebuah Pemerintah Sementara Dewan Revolusi sudah terbentuk di Yogyakarta sebagai pemerintah baru Indonesia. Akhirnya, harus dilakukan usaha untuk meyakinkan Presiden untuk meninggalkan Halim dengan pesawat AURI menuju Yogyakarta, agar rencana Aidit untuk membentuk sebuah Pemerintah Sementara di kota itu dapat terlaksana. Rencana baru dengan Presiden ini, yang disusun di Halim pada saat kekalahan sudah membayang-bayangi dan mengingat ancaman Suharto, harus dilaksanakan, dan semua langkah harus diambil untuk mencegah jangan sampai Presiden jatuh secara fisik ke dalam tangan Suharto. Dengan Presiden dan Pemerintah Sementara di Yogyakarta, revolusi dapat diteruskan melawan pasukan-pasukan NATO, didukung oleh Peking, Vietnam dan gerakan-gerakan revolusioner di Asia Tenggara. Jelas inilah

yang dilihat Aidit sebagai langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya untuk mengubah kekalahan di Jakarta menjadi kemenangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kemudian di seluruh Indonesia, sebelum menaiki tangga pesawat terbang di Halim menuju Yogyakarta untuk mewujudkan rencananya.

Kedua, Omar Dhani, masih di rumah Susanto di Halim, memerintahkan *Komando Operasi Utuh* dalam kendalanya untuk bergerak dan mendatangkan beberapa pesawat B-25 dan B-26 dari pangkalan AURI di Malang dan Hussein Sastranegara ke Halim untuk mengevakuasi Presiden, ajudannya dan sejumlah pasukan Supardjo yang menjaganya. Ia juga memerintahkan agar sejumlah pesawat Mustang disiagakan untuk siap tempur. Langkah-langkah mobilisasi kekuatan AURI ini mengundang reaksi besar di KOSTRAD dan, mengantisipasi bahwa ini mungkin berarti akan terjadi serangan, Suharto memerintahkan evakuasi KOSTRAD dari markas besarnya dan memindahkan pos komandonya untuk sementara ke Istana Olahraga, dan memimpin operasi-operasi melawan Halim dari situ.²²⁸

Supardjo menjelaskan latar belakang manuver Omar Dhani ini:

“Setelah menerima berita bahwa Jenderal Harto menyiapkan *tegeaanval* (serangan balik) dan Laksamana Omar Dhani menawarkan integrasi untuk melawan pada waktu itu, harus disambut baik. Dengan menerima itu maka seluruh kekuatan AURI di seluruh tanah air, akan turut serta. Tetapi karena tidak ada kepercayaan, bahwa kemenangan harus ditempuh dengan darah, maka tawaran yang sedemikian pentingnya tidak mendapat jawaban yang positif. Pak Omar Dhani sudah bertindak begitu jauh sehingga telah memerintahkan untuk memasang roket-roket pada pesawat.”²²⁹

Presiden sekarang dihadapkan pada tekanan sangat berat dari berbagai penjuru yang bertentangan satu sama lain di rumah Susanto di Halim, yang dilukiskan dengan sangat rinci oleh Widjanarko.²³⁰ Di satu pihak, ada Widjanarko dan Sabur, yang melaksanakan perintah-perintah Suharto, mendesak Presiden agar segera meninggalkan Halim menuju Bogor. Dr. Leimena dan Sutjipto mendukung upaya mereka ini.

Di pihak lain, ada Omar Dhani dan Supardjo. Dhani mengusulkan agar Presiden terbang menggunakan pesawat AURI menuju Madiun atau Yogyakarta, bahwa pesawat telah siap, sementara Supardjo terus mendesak Presiden agar terbang ke Yogyakarta. Juga bahwa pesawat kepresidenan, *Jet Star*, sudah siap di pangkalan untuk membawa Presiden ke tempat tujuannya.²³¹ Pada sekitar pukul 20.00 Dr. Leimena dan Sutjipto meminta bertemu dengan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Presiden secara pribadi di kamar tidurnya di rumah Susanto untuk meyakinkan dia untuk pergi ke Bogor. Tetapi tepat pada saat ini Ibu Dewi muncul, ia masuk kamar tidur dan langsung menggandeng Presiden dan membawanya ke kamar sebelah untuk pertemuan empat mata, ia juga mendesak Presiden agar Presiden pergi ke Bogor. Melihat bahwa Presiden sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang terus mendesaknya agar ia pergi ke Bogor, Omar Dhani melakukan ikhtiar terakhir untuk membujuknya mengikuti rencana Aidit dan mendesaknya untuk menerima tawarannya untuk membawanya ke Madiun. Dhani cepat-cepat masuk ke kamar tempat Sukarno dan Dewi sedang berbicara, memotong pembicaraan mereka dan membawa Presiden ke kamar yang lain lagi, untuk meyakinkannya.²³² Namun ia gagal.

Begitu Dhani selesai berbicara dengan Presiden, Dr. Leimena masuk ke kamar itu, dan melihat Presiden dalam keadaan sangat khawatir, tampaknya disebabkan oleh desakan Dhani, menyampaikan kepadanya bahwa “telah tiba waktunya” dan membimbingnya seperti seorang anak kecil menuju mobil yang sudah disiapkan oleh Widjanarko.²³³ Jelas kegalauan hati Presiden disebabkan desakan Dhani, yang mencoba memaksanya untuk terbang ke Yogyakarta. Karena di KOSTRAD kepada Widjanarko telah dikatakan agar tidak percaya pada AURI, ia memperingatkan Presiden agar tidak terbang ke Bogor dengan pesawat AURI. Disampaikannya bahwa adalah berarti mempertaruhkan nyawa jika Presiden terbang dan karena pertimbangan keamanan, sebaiknya Presiden melakukan perjalanan ke Bogor lewat jalan darat. Widjanarko melihat ada kemungkinan Dhani menculik Presiden, dan menerbangkannya ke Madiun, Yogyakarta, atau tempat lain, bukan ke Bogor.

Kemudian timbul masalah yang sensitif, yakni soal susunan konvoi Presiden. Sementara Presiden menerima perintah Suharto untuk keluar dari Halim dan pergi ke Bogor, ia menolak pengawalan bersenjata dan mendesak untuk dibiarkan berangkat tanpa pengawalan. Konvoi Presiden terdiri dari dua mobil saja. Di kursi belakang mobil yang pertama, *Princess*, duduk Presiden dengan Dr. Leimena di kirinya, sedangkan tiga orang duduk di kursi muka, yaitu Widjanarko, pengawal Suharto dan pengemudi Lt. kolonel Suparto. Mobil kedua membawa Kolonel Saelan, Brigjen Sabur dan anggota staf Presiden yang lain. Konvoi meninggalkan Halim pada pukul 22.30 dan tiba di Bogor pukul 23.45, tidak lama sebelum tengah malam. Omar Dhani ingin ikut, ia mengantarkan Presiden ke mobil, tetapi harus tinggal karena mobil sudah penuh. Namun, sebelum berangkat, Saelan mengirim kurir ke KOSTRAD membawa pesan bahwa Presiden memutuskan untuk pergi ke Bogor, dan setelah rombongan-

Ofensif Suharto 1 Oktober 1965

an tiba di Istana Bogor, Suharto dan Jenderal Ibrahim Adjie, Panglima Daerah Militer Jawa Barat, diberitahu melalui telepon bahwa Presiden telah sampai dengan selamat.²³⁴

Selama perjalanan dari Halim ke Bogor Presiden dipenuhi rasa khawatir dan perasaan tidak enak serta pikiran-pikiran buruk tentang masa depannya. Menurut Widjanarko, “Ketika kami tiba di taman istana, saya sampaikan kepada Bung Karno, ‘Pak, tugas saya mengantarkan Bapak ke tempat yang aman telah saya laksanakan.’ Ketika kami tiba di paviliun di Istana Bogor dan Bung Karno masuk ke dalam, saya segera menelpon KOSTRAD dan melaporkan kepada Jenderal Suharto bahwa Bung Karno telah tiba di Bogor dan bahwa tugas saya telah dilaksanakan. Sabur berbicara juga melakukan hal yang sama, sebagai Komandan resimen Tjakrabirawa, melapor kepada Jenderal Suharto.”²³⁵

Selama perjalanan Presiden sangat gugup, dan tiga kali bertanya ke mana ia akan dibawa, dan meminta kepastian beberapa kali dari Leimena dan Widjanarko bahwa ia memang akan dibawa ke Bogor. Tidak diketahui dengan pasti apakah kemungkinan pergi ke Yogyakarta dan bergabung dengan dan menjalankan rencana Aidit, yang berarti perang saudara, atau rencana menyenangkan yang disusun Subandrio dengan koneksi Cinanya bagi Presiden untuk pergi ke Danau Angsa di Cina untuk beristirahat sambil berobat, termasuk hal-hal yang dipikirkan Presiden ketika itu. Namun, kita tahu pasti bahwa ia sangat khawatir mengenai operasi-operasi militer Suharto terhadap GESTAPU, yang sedang berlangsung di mana-mana, dan mungkin membayangkan pembalasan apa kira-kira yang akan dituntut Nasution yang terluka dan AD pada mereka yang terlibat, termasuk dirinya sendiri. Ketika mobil memasuki gerbang istana Presiden bertanya kepada Widjanarko apa pendapatnya mengenai “pergerakan pasukan KOSTRAD.” Ketika dia menjawab bahwa “ketika saya lihat pasukan-pasukan itu dan ketika saya dengar pembicaraan-pembicaraan di KOSTRAD, saya berkesimpulan bahwa serangan atas Halim dapat terjadi sewaktu-waktu,”²³⁶ Presiden tahu ia menghadapi masalah besar, dengan Nasution, Suharto dan AD sekarang sebagai pemegang kendali.

Aspek dominan dari situasi pada saat itu adalah kenyataan bahwa Presiden sekarang sudah terlempar ke sudut yang lain dalam segitiga strategis itu, dan bahwa setelah dibebaskan dari cengkeraman PKI ia sekarang masuk ke dalam kontrol ketat AD. Ini jelas bukan buah yang diharapkan akan dipetikinya ketika ia bersepakat dengan Aidit dan Mao pada Agustus lalu.



Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Keberangkatan Presiden dari Halim pada pukul 22.30 itu mengakhiri adegan terakhir dari pagelaran lakon *wayang kulit* terbesar sejarah modern Indonesia, yang digelar di rumah Susanto sejak makan siang pada 1 Oktober 1965. Ketika *dalang* mematikan pelita minyak kelapa yang kerlap kerlip dan kehidupan meredup dan lenyap dari *kelir*, hanya layar putih, kegelapan dan keheningan yang tinggal di kamar-kamar yang telah kosong itu. Sesuai dengan ciri khas drama tingkat tinggi seperti itu, tokoh-tokoh utamanya tidak pernah bertemu muka di atas pentas di rumah Susanto, tetapi mengirimkan *tjakraningrat* masing-masing melalui perantara. Setelah *dalang* memasukkan wayang-wayang ke dalam kotak dan menutup kotak itu, tokoh-tokoh yang sesungguhnya dalam kehidupan nyata berpecah ke segala penjuru dengan takdir masing-masing. Aidit ditembak mati dua bulan kemudian pada November 1965, Presiden dilucuti dari semua kekuasaannya dan pada Maret 1966 berstatus sebagai orang biasa, sementara Suharto menduduki singgasana sebagai Presiden baru Indonesia sampai Mei 1998, ketika bintangnya memudar dengan jatuhnya pemerintahannya. Tokoh-tokoh *wayang kulit* keluar masuk panggung dalam suatu lingkaran abadi kesinambungan dan perubahan budaya dan politik Indonesia. Yang permanen adalah perubahan.



XI

AKIBAT-AKIBAT KUDETA YANG GAGAL ITU: 2 OKTOBER 1965

AIDIT MEMBENTUK PEMERINTAHAN SEMENTARA DI YOGYAKARTA

Dengan keberangkatan Presiden Sukarno ke Bogor, ikatannya dengan komplotan itu terputus, tetapi hanya untuk sementara. Kita telah melihat bahwa Presiden memberikan perlindungan pribadi kepada Supardjo dan mengajaknya tinggal di Istana Bogor dari tanggal 2 -5 Oktober 1965. Setelah ini, Presiden dan Supardjo memulai surat-menyurat, dan pada kesempatan itu Presiden mendesak Supardjo untuk menyusun semua kekuatan yang masih loyal untuk mengambil tindakan guna melepaskannya dari kungkungan kontrol ketat Suharto. Presiden berharap bahwa PKI tetap berperan sebagai kekuatan pengimbang melawan AD, yang telah memegang kendali penuh sekarang dan membayang-bayangnya. Namun harapan Presiden sia-sia karena segitiga besi sekarang sudah betul-betul patah, tak dapat diperbaiki lagi, sehingga tidak mungkin lagi bagi pemimpin ulung itu untuk mengambil langkah-langkah penyeimbang untuk mempertahankan kekuasaan.

Namun, sementara itu, tugas paling penting yang dihadapi komplotan itu di Halim, setelah Presiden meninggalkan tempat itu, adalah menghentikan semua kegiatan di Jakarta dan menyelamatkan apa yang masih dapat diselamatkan untuk menyusun perlawanan bersenjata di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Karena itu, Supardjo bergegas ke Pondok Gede atas perintah Aidit, untuk melucuti milisi Pemuda Rakyat, mengembalikan senjata mereka kepada AURI

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dan membubarkan unit-unit mereka. Selain itu, pesawat pengangkut yang didatangkan oleh Dhani ke Halim diisi oleh sebagian pasukan Supardjo, untuk diterbangkan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, melanjutkan perjuangan di sana. Karena itu, pasukan Suharto, yang mengepung Halim pada pagi hari 2 Oktober dan diperkirakan akan mendapat perlawanan sengit, dapat menguasai pangkalan itu tanpa menembakkan peluru sebutir pun.

Setelah rencana evakuasi Halim selesai dilaksanakan—dengan membubarkan unit-unit pasukan dan anggota-anggotanya menyebar, atau membawa sebagian dari mereka ke Jawa Tengah—Aidit meminta Sjam menyiapkan sebuah pesawat untuk membawanya ke Yogyakarta, guna menyiapkan segala sesuatunya untuk memindahkan Dewan Revolusi ke kota itu, dan membangun dukungan kekuatan bersenjata untuk pemerintahan tandingannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dhani setuju, dan mendatangkan sebuah Dakota untuk Aidit; Aidit bertolak dari Halim pukul 1.30 lepas tengah malam pada 2 Oktober, dengan pesawat yang dipiloti letnan Hans, disertai oleh Walujo dan Kusno, sekretaris Aidit, seperti telah dibahas tadi di atas.²³⁷

Dhani juga bertolak dari Halim tidak lama kemudian dengan sebuah pesawat Hercules. Ia berputar-putar di atas Jawa selama enam jam, memberi perintah kepada AURI dari atas pesawat untuk mengerahkan segenap tenaga untuk melawan Suharto. Pada satu saat, pernah dikirimnya melalui radio sebuah ultimatum kepada Suharto, memperingatkannya agar tidak menyerang Halim, karena hal itu dapat memicu perang antar-Angkatan. Ketika ia akhirnya mendarat di Pangkalan AURI Iswahjudi di Madiun, dijelaskannya kepada Komodor Suwondho, dan ajudannya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Halim pada hari sebelumnya. Perkembangan keadaan di Halim, kata Dhani, dan karena tidak ada dukungan militer yang berarti bagi Dewan Revolusi dan Gerakan 30 September di Jawa Tengah, menyebabkan ia patah semangat untuk melanjutkan menyusun rencana bagi tindakan-tindakan lebih lanjut. Suwondho mendengarkan Dhani dengan seksama dan kemudian menyiapkan baginya rancangan Perintah Harian untuk Para Komandan AURI, yang menyatakan bahwa AURI tidak ada sangkut paut dengan komplotan Gerakan 30 September itu, dan mendukung pembersihan setiap organ revolusi sesuai dengan garis-garis besar yang ditetapkan oleh Presiden. AURI tidak campur tangan dalam urusan intern angkatan bersenjata yang lain, dan tidak tahu menahu tentang Dewan Revolusi dan susunannya. Perintah Harian itu kemudian disiarkan melalui stasiun radio Madiun.²³⁸ (DOKUMEN No. 16).

Akibat-akibat Kudeta yang Gagal Itu: 2 Oktober 1965

Juga Aidit pastilah sangat kecewa ketika mendarat di Yogyakarta, melihat tidak ada tanda-tanda “semangat revolusioner” untuk merebut kekuasaan di kota-kota, desa-desa dan dusun-dusun di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia segera memahami bahwa keadaan belum matang, paling tidak pada tahap ini, untuk mencoba melakukan “kontra-ofensif revolusioner,” yang tampak demikian mungkin dapat dilaksanakan ketika direncanakan di rumah Suwardi di Halim, ketika gerakannya gagal di Jakarta. Komodor Wonoindarsono, Komandan KORUND 7 di Yogyakarta, memberi kesaksian bahwa ia tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang kedatangan Aidit, dan bahwa Aidit mengatakan kepadanya bahwa ia datang untuk melihat situasi keamanan di wilayah itu mengingat ada kemungkinan Presiden akan dievakuasi ke Yogyakarta.²³⁹ Aidit menduduki jabatan Menteri Koordinator dalam Kabinet Dwikora, dan meminta untuk diperlakukan sesuai dengan jabatannya karena ia sedang menjalankan “tugas negara.”

Sepintas lalu, ini tampak sebagai situasi yang sulit dipercaya. Di satu pihak, hanya beberapa jam sebelumnya, Aidit membubarkan Kabinet Dwikora dan membentuk Dewan Revolusi untuk menggantikannya, tetapi sekarang ia mengaku sebagai anggota Kabinet Dwikora, dan meminta diperlakukan sesuai dengan jabatannya karena ia melakukan tugas atas nama kabinet itu. Namun, ini hendaknya jangan dilihat sebagai oportunisme tetapi sebagai solusi khas atas suatu masalah melalui sinkretisme Jawa, nilai budaya yang telah berurat akar dan dihormati sesuai tradisi, yakni dua hal yang bertentangan dibiarkan hidup berdampingan sampai salah satu dari keduanya menjadi dominan. Diterapkan pada masalah yang sedang dihadapi, Aidit mengatakan ia melakukan tugas Kabinet Dwikora agar dapat memperoleh semua perlakuan yang sesuai dengan jabatannya dan agar dapat mempertahankan status hukum dan konstitusional partainya, tetapi pada waktu bersamaan ia mengobarkan kegiatan-kegiatan revolusioner dan di luar hukum terhadap Kabinet Dwikora di Jawa Tengah dan Jawa Timur agar dapat menggantinya dengan Dewan Revolusi begitu keadaan mengizinkan. Pandangan filsafati dan moral ini, dan ini juga Marxisme-Leninisme yang baik, kemudian mendominasi semua kegiatan Aidit di Jawa Tengah sejak ia mendarat di Yogyakarta pagi-pagi pada 2 Oktober, sampai ia menemui ajalnya di tangan pasukan Suharto pada minggu ketiga November. Hanya dengan latar belakang ini dapat kita pahami kegiatan-kegiatannya di Jawa Tengah selama periode ini.

Ada beberapa sebab mengapa Aidit kecewa dengan aksi revolusioner di Jawa Tengah yang jauh di bawah harapannya, dan bahwa tidak akan mungkin

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

membentuk Pemerintah Sementara Dewan Revolusi di Yogyakarta dalam waktu dekat.

Sebab utama dari perkembangan yang mengecewakan ini adalah kenyataan bahwa rencana Biro Khusus bertitik tolak dari pengerahan aksi-aksi setempat, yang ditujukan untuk merebut kekuasaan setempat, begitu kudeta di Jakarta berhasil. Pimpinan setempat PKI dan sekutu-sekutu mereka dalam berbagai unit AD yang bertugas di Jawa, dan di banyak tempat lain di berbagai propinsi Indonesia, telah diperintahkan untuk mendengarkan Radio Jakarta untuk memperoleh instruksi-instruksi tentang pelaksanaan pembersihan pucuk pimpinan militer setempat. Hanya isyarat itu yang memberikan mereka wewenang untuk mendirikan Dewan Revolusi setempat dan membentuk gerakan organisasi-organisasi massa yang tangguh untuk mempertahankan Dewan Revolusi setempat itu, dan menangkal semua upaya untuk memulihkan tatanan lama. Memang benar bahwa pengumuman pertama dari kelompok Untung, *Komunike* GESTAPU, tentang sukses pembersihan di Jakarta, disiarkan melalui radio pada pukul 07.20 pagi pada 1 Oktober.

Namun disangsikan bahwa para pemimpin PKI setempat, dan kelompok-kelompok komando yang dibentuk oleh Biro Khusus di dalam unit-unit utama militer di propinsi, segera mengambil tindakan. Dan baru pada pukul 11.00 pagi, dan kemudian pada pukul 14.00 siang, ketika Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi di Jakarta, sebagai badan kekuasaan tertinggi di Indonesia disiarkan, para pemberontak setempat diperintahkan untuk membentuk Dewan Revolusioner setempat dan menggulingkan tatanan politik lama di propinsi-propinsi.

Jadi, sementara setelah pukul 14.00 para pemimpin setempat sudah dapat membentuk dewan-dewan setempat, namun sayangnya pada pukul 19.00 stasiun radio Jakarta sudah jatuh ke tangan Suharto, yang menyiarkan pernyataan bahwa gerakan Untung adalah komplotan kontra revolusioner yang tengah dibasmi oleh pasukan-pasukan yang loyal kepada Presiden. Pada pukul 20.50 Jenderal Suharto sendiri yang mengumumkan di depan corong radio bahwa kudeta di Jakarta telah dilumpuhkan, dan pada hari berikutnya *caretaker* Men/Pangad sendiri, Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro yang diangkat Presiden, mengutuk kudeta itu dalam siaran radio. Seperti dijelaskan Supardjo, “tetapi isi pidatonya pun tidak keruan, dan ia malah mengutuk G-30-S sebagai petualangan. Kata-kata ini otomatis melumpuhkan perangsang-perangsang revolusi di daerah-daerah, terutama di Jateng.”²⁴⁰

Supardjo benar, pernyataan Pranoto memang membawa pengaruh besar pada perkembangan kegiatan-kegiatan revolusioner setempat, menyebabkan

Akibat-akibat Kudeta yang Gagal Itu: 2 Oktober 1965

para pimpinan setempat menanggukkan semua operasi, atau mengambil sikap menunggu sampai perkembangan situasi di Jakarta sudah cukup jelas memperlihatkan “siapa pemainnya” dan ke arah mana keadaan akan berkembang selanjutnya.

Sebab lain mengapa tidak ada reaksi militan di kota-kota besar di Jawa—dan bahkan lebih-lebih lagi di tempat-tempat lain—terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta pada 1 Oktober, adalah kenyataan karena rencana awal Aidit adalah tidak lain melakukan pukulan cepat dan mematikan, tetapi terbatas, di sejumlah pusat kekuasaan di Jakarta dan ibukota propinsi. Politbiro dan Aidit percaya bahwa kekuasaan dapat direbut melalui serangkaian serangan kilat atas instalasi-instalasi kunci militer dan gedung-gedung pemerintah, dan bahwa tidak perlu menyusun kekuatan besar dan aksi-aksi langsung oleh ormas-ormas *underbownya*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tugas utama, yakni segera merebut kekuasaan. Aksi-aksi massa akan dilancarkan hanya setelah perebutan kekuasaan dilakukan oleh kelompok-kelompok komando untuk memastikan kemenangan mutlak.

Karena itu, ketika pimpinan setempat menanggukkan operasi utama mereka untuk merebut kekuasaan, setelah mendengar pernyataan Suharto bahwa kudeta di Jakarta telah dihancurkan pada malam 1 Oktober, dan kemudian pernyataan Pranoto, sebagai *caretaker* Men/Pangad yang baru saja diangkat, yang disiarkan pada 2 Oktober, mereka juga memerintahkan organisasi-organisasi massa—serikat buruh, pemuda, dan wanita—untuk tidak melaksanakan aksi-aksi revolusioner pada waktu itu. Singkatnya, gagalnya pukulan utama untuk merebut kekuasaan di Jakarta terjadi demikian cepatnya dan tidak disangka-sangka ketika kelompok-kelompok pemberontak setempat, di berbagai tempat, masih pada tahap mengadakan persiapan-persiapan untuk merebut kekuasaan, sementara baru di beberapa tempat saja kekuasaan telah benar-benar direbut.²⁴¹ Jadi, potensi revolusi yang besar dari berjuta-juta anggota ormas-ormas yang berada di bawah kendali PKI di seluruh Indonesia belum terpakai dan belum dikerahkan ke medan laga karena aspek kunci strategi PKI ini tidak melibatkan mereka.

Dan konsep aksi PKI inilah, yang dirancang dengan seksama dan diterima oleh pimpinannya seperti telah kita lihat di atas, yang dilupakan para pengeritik PKI ketika mereka mengajukan pertanyaan mengapa berjuta-juta orang itu tidak digunakan, sebagai alat pemukul utama operasi PKI, untuk menghantam para jenderal dan membuka jalan bagi tahap revolusi berikutnya. Dikatakan bahwa PKI memiliki tiga juta anggota, dan disamping itu didukung oleh ormas-ormas

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

berikut ini: serikat buruh (SOBSI) 3,5 juta; serikat petani (BTI) 8 juta; organisasi wanita (GERWANI) 1.5 juta, dan pemuda (Pemuda Rakjat) 2 juta; seluruhnya sekitar 18 juta. Namun, untuk memobilisasi pengikut yang sangat besar ini, diperlukan rencana operasi yang seluruhnya berbeda, dan persiapan-persiapan yang berbeda pula. Politbiro PKI, Aidit dan Biro Khusus, tidak melibatkan pengikut yang sangat besar ini pada 1 Oktober, 1965, karena tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka untuk melakukan aksi dengan melibatkan mereka.

DI SOLO PKI PECAH KARENA PERBEDAAN PANDANGAN YANG TAJAM DAN KONFLIK INTERN: 2 OKTOBER

Dari Pangkalan Angkatan Udara Maguwo Aidit bergegas menuju kota Yogyakarta untuk mengadakan pertemuan darurat dengan para pimpinan setempat. Ia melaporkan secara rinci peristiwa yang terjadi pada hari sebelumnya, dan menjelaskan sebab-sebab terjadinya komplikasi-komplikasi yang dialami kudeta di Jakarta. Pertemuan itu kemudian membahas penilaian tentang kemungkinan membentuk kelompok-kelompok bersenjata setempat untuk mendukung Dewan Revolusi Untung, dan menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin. Pertemuan memutuskan bahwa PKI cabang propinsi akan melancarkan aksi-aksi massa untuk membela Presiden Sukarno, yang sekarang sudah menjadi tawanan Suharto, dan bahwa kebijakan ini akan diterapkan selama Presiden tetap menjalankan garis kebijakan progresif dan sikapnya yang mendukung PKI tidak berubah.²⁴²

Kemudian siang hari setelah pertemuan pada 2 Oktober, Aidit meninggalkan Yogyakarta menuju Semarang, tempat Lukman, Sujono Atmo dan pemimpin puncak PKI propinsi mengadakan pertemuan darurat. Pertemuan ini sangat penting, karena menghasilkan sebuah pernyataan PKI yang berisi garis partai yang sekarang dianut, yakni bahwa Gerakan 30 September adalah persoalan di dalam tubuh AD, bahwa partai tidak ada sangkut paut dengan gerakan itu, dan bahwa tugas partai dalam menghadapi situasi sekarang ini adalah melakukan konsolidasi kekuatan untuk menangkal kemungkinan serangan dari kekuatan-kekuatan reaksioner atas partai dan Presiden.²⁴³ Aidit dan Lukman tentunya merasa sangat puas dengan perkembangan situasi yang membuktikan kebenaran strategi yang dijalankan

Akibat-akibat Kudeta yang Gagal Itu: 2 Oktober 1965

PKI untuk melaksanakan kudeta itu—yaitu memisahkan dengan tegas dan hati-hati antara partai dengan aksi Untung. Dan sekarang, dalam pertemuan Semarang, mereka berharap, karena pemisahan ini, legalitas partai dan partai dapat diselamatkan, dengan bantuan Presiden, dari langkah-langkah represif dan balas dendam AD yang meledak amarahnya dan sekarang memegang kendali atas seluruh negeri.

Pada larut petang pada 2 Oktober, Aidit dan Lukman berangkat menuju Bojolali dan kemudian Solo, tempat pertemuan juga diadakan dengan pimpinan partai propinsi dan pimpinan militer. Namun, di Solo, Aidit tidak berhasil mendapat persetujuan partai untuk menerima keputusan pertemuan Semarang. Cara Aidit melaksanakan operasi di Jakarta mendapat kecaman bertubi-tubi dari anggota-anggota yang radikal yang menuntut perjuangan bersenjata dengan segera, dan ketika diadakan pemungutan suara, Aidit kalah suara, oleh kombinasi suara Suwarno, Suwardi dan Utomo Ramelan, Walikota Solo yang berani itu. Pertemuan kemudian menyetujui sebuah kebijakan baru, yang diusulkan oleh Utomo Ramelan, bahwa PKI mendukung sepenuhnya operasi Gerakan 30 September dan tujuan-tujuannya, dan bahwa perjuangan bersenjata harus dilancarkan untuk mendukung gerakan itu, merebut kekuasaan pemerintah setempat, dan membela partai.²⁴⁴ Nama Presiden Sukarno, dan soal penjagaan keselamatannya, tidak pernah disebut-sebut.

Karena kebijakan yang disepakati di Solo dan garis umum partai yang disepakati di Semarang, jelas bertentangan satu sama lain, partai itu kemudian terbagi ke dalam sayap radikal dan sayap moderat beberapa jam kemudian, masing-masing mengambil jalan sendiri-sendiri, dengan akibat bahwa konflik mereka itu menjerumuskan seluruh kegiatan partai di seluruh Jawa ke dalam kekacauan luar biasa. Kita memiliki sebuah penilaian yang dapat dipercaya tentang perkembangan keadaan di Jawa, pada saat itu, oleh sekelompok pemimpin yang kelak menjadi sayap pro-Moskow PKI:

“Dalam waktu 24 jam pimpinan partai di propinsi-propinsi dan kabupaten-kabupaten ditangkap oleh pihak berwenang secara besar-besaran dan boleh dikatakan tanpa perlawanan. Pada hari-hari berikutnya, karena perasaan tidak puas dengan pimpinan dan rasa putus asa yang besar karena tekuk lutut massal pada pihak berwenang reaksioner itu, keluar pernyataan-pernyataan menyerukan pembubaran komite-komite partai (pembubaran komite-komite partai mengacu pada instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh CCPKI pada 28 September 1965, dikutip dalam DOKUMEN 3 buku ini, Ed.), disertai kecaman-kecaman atas pucuk

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pimpinan partai. Di pihak lain, mereka yang masih terus melakukan aksi menyerang pimpinan partai dari kiri, yang menjelaskan kenyataan mengapa dua kecenderungan yang saling bertentangan muncul di Jawa Barat: tekuk lutut massal yang memalukan berjalan bersama dengan berkembangnya kelompok-kelompok ultra-kiri. Kedua-duanya berasal dari satu sumber yang sama: rasa kecewa yang sangat besar dengan kepemimpinan politik Partai.

Perdebatan sengit terjadi di tingkat pucuk pimpinan Partai mengenai apakah Partai sebaiknya mematuhi perintah Presiden atau meneruskan perjuangan dan menangkis serangan balasan. Diputuskan untuk mengeluarkan pernyataan mendukung penyelesaian politik oleh Presiden, untuk menghadiri sidang pleno Kabinet untuk menekan Presiden pada waktu sidang untuk mengakui Dewan Jenderal (sic Revolusi, Ed.) dan untuk menyetujui pembentukan Kabinet NASAKOM; jika ini gagal, perlawanan dilanjutkan.”²⁴⁵

Perpecahan demikian dalamnya dan persoalan-persoalan yang dihadapi demikian mendasar sehingga tidak dapat disembuhkan. Perpecahan menjadi permanen, dengan para anggota satu sayap partai pergi ke pengasingan di Moskow, Praha dan Amsterdam, sedangkan anggota sayap yang lain pergi ke Beijing, Vietnam dan Albania, tergantung pada orientasi politik masing-masing.

AIDIT MENULIS SURAT KEPADA PRESIDEN TANGGAL 6 OKTOBER: “KEBOHONGAN TERBESAR SEPANJANG MASA”

Dalam keadaan partai terpecah sangat dalam seperti itu, diadakan pertemuan Politbiro pada 5 Oktober di Blitar, Jawa Timur—hanya Aidit dan Lukman yang hadir, dari enam anggota tetap dan dua calon anggota—untuk menyusun sebuah pernyataan Politbiro PKI, dan surat Aidit kepada Presiden.

Halaman-halaman di atas, telah membuktikan, dengan cukup rinci, keterlibatan Aidit dalam perencanaan GESTAPU sejak hari pertama, dan juga peran sertanya dalam pelaksanaan gerakan itu pada 1 Oktober 1965. Kita telah melihat Aidit, sebagai Dalang Besar, memanipulasi wayang-wayang dari markasnya di rumah Suwardi di Halim, dalam sebuah lakon *wayang kulit* yang penuh makna sejarah, yang dimainkan di rumah Susanto pada petang dan malam hari itu. Bukti-bukti dari dokumen-dokumen yang telah dikemukakan memungkinkan kita mengikuti kegiatan-kegiatannya di Halim secara rinci,

Akibat-akibat Kudeta yang Gagal Itu: 2 Oktober 1965

hampir dari jam ke jam. Berdasarkan latar belakang inilah maka surat Aidit dianggap “Kebohongan Terbesar Sepanjang Masa,” seperti kata salah satu dari rekan-rekan saya di Universitas Indonesia, Jakarta, tidak saja karena ia secara tidak tanggung-tanggung memutar balik fakta, tetapi juga karena kebohongan-kebohongannya menyangkal terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang kita ketahui dari banyak sekali bukti-bukti dari berbagai dokumen. Mari kita simak surat Aidit itu.

Aidit membuka suratnya, yang ditulis di Blitar pada 6 Oktober 1965, dengan kata-kata bahwa pada 30 September, pada tengah malam, seseorang berpakaian seragam Tjakrabirawa, yang tidak dikenalnya, datang menjemput dia dengan mobil. Kepada Aidit disampaikan bahwa Aidit diminta datang ke istana untuk rapat darurat kabinet. Namun, mobil itu tidak pergi ke istana tetapi ke Jatinegara. Dari situ dia dibawa dengan sebuah mobil lain ke sebuah kampung, dan ditempatkan di sebuah rumah kecil. Di situ kepadanya disampaikan bahwa akan diambil langkah-langkah untuk menangkap para jenderal yang terlibat dalam konspirasi Dewan Jenderal, dan pada hari berikutnya kepadanya disampaikan bahwa jenderal-jenderal itu telah ditangkap. Aidit kemudian bertanya pada orang yang menahannya apakah Presiden sudah diberi tahu, dan dijawab bahwa Presiden telah memberikan restunya untuk menindak para jenderal itu. Pada pagi-pagi sekali tanggal 1 Oktober, kata surat Aidit, ia diminta segera berangkat menuju Jawa Tengah, dengan pesawat yang disediakan Omar Dhani, untuk mengatur segala sesuatunya bagi kemungkinan evakuasi Presiden ke Yogyakarta, karena kota ini dinilai tempat terbaik untuk memindahkan Pemerintah Sementara. Aidit mengatakan bahwa kemudian ia dibawa ke Pangkalan Angkatan Udara Halim dan diterbangkan ke Pangkalan Angkatan Udara Maguwo di Jawa Tengah, dan di situ ia disambut oleh perwira-perwira AURI, dan menyampaikan bahwa tugasnya adalah mengatur segala sesuatu bagi kemungkinan mengevakuasi Presiden ke kota itu. Atas permintaannya, ia kemudian dibawa ke rumah Sutrisno, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Yogyakarta, dan tiba di sana telah larut malam.

Aidit selanjutnya dalam suratnya kepada Presiden mengatakan bahwa pada 2 Oktober ia pergi ke Semarang untuk memberi intruksi kepada CCPKI Jawa Tengah, dan di situ meminta Wakil Gubernur Sujono Atmo untuk menjalankan roda Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah seperti biasa. Dari Semarang, tulis Aidit, ia pergi ke Solo, bersama M. H. Lukman, untuk bertemu dengan Walikota Utomo Ramelan. Di Solo-lah ia mendengar dari radio pesan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pertama Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia, dan karena itu memerintahkan Lukman agar segera berangkat ke Jakarta.

Pada hari-hari berikutnya, tulis Aidit, yaitu pada tanggal 3, 4, dan 5 Oktober, ia berusaha mencegah terjadinya pertarungan di dalam Divisi Diponegoro, dan juga mencegah pembantaian akibat provokasi kelompok-kelompok yang didorong perasaan anti-Komunis dan anti-Nasakom. Ia juga berharap dapat menghadiri sidang lengkap kabinet, tetapi batal karena pesawat AURI yang akan membawanya ke Jakarta, rusak. Ia mengirim kawat menyampaikan rasa penyesalannya tidak dapat hadir kepada Presiden melalui Omar Dhani dan saluran-saluran AURI. Ia selanjutnya mengatakan bahwa pada saat itu ia berada di Jawa Timur, sedang berusaha mencegah kekerasan di kalangan prajurit, pembantaian penduduk sipil, dan memastikan Pemerintah Propinsi dan kehidupan politik tetap berjalan seperti biasa di wilayah itu.

Dusta Aidit yang terbesar terdapat dalam alinea yang mengungkapkan pandangannya mengenai GESTAPU. Di sini, katanya, Gerakan 30 September bukan kegiatan kontra-revolusi, tetapi gerakan untuk melindungi Presiden. “Saya, baik sebagai Ketua CCPKI maupun sebagai Menteri Kabinet Dwikora, sangat menyesalkan bahwa saya tidak mengetahui sebelumnya tentang adanya gerakan ini, sehingga tidak dapat menyalurkan potensi revolusi yang besar ini ke arah yang wajar. . . . Tidak dapat dibantah bahwa G30S adalah akibat daripada salah urus di dalam Angkatan Darat.”

Namun, bagian yang paling penting dari surat Aidit itu adalah enam usul yang diajukannya untuk mencapai penyelesaian politik bagi krisis yang ditimbulkan oleh GESTAPU:

1. Penyelesaian Dewan Jenderal dan G30S sepenuhnya harus berada dalam tangan PYM/Pangti/PBR.
2. Untuk itu diperlukan ketenangan, oleh karena itu dilarang adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat mengutuk baik Dewan Jenderal maupun G30S.
3. Semua alat revolusi terutama ABRI, orpol, ormas, koran-koran, dan radio, supaya bekerja seperti biasa, kembali seperti sebelum G30S.
4. Masalah keamanan supaya diserahkan kepada AKRI dengan dibantu oleh Front Nasional.
5. Kepada semua alat revolusi diserukan supaya berkompetisi melaksanakan Lima Azimat Revolusi.
6. Dilarang tuduh menuduh dan salah-menyalahkan (DOKUMEN No. 1).

Akibat-akibat Kudeta yang Gagal Itu: 2 Oktober 1965

Hanya perlu beberapa tambahan saja bagi pengelabuan besar ini, yang mencerminkan bahwa Aidit telah mengambil langkah mundur sepenuhnya. Pertama, ia mencoba menghapus jejak kehadirannya di Halim dengan cerita palsu bahwa ia dibawa ke sebuah kampung dan kemudian dibawa ke Yogyakarta untuk melakukan persiapan-persiapan untuk mengevakuasi Presiden dan “Pemerintahan Sementara” ke kota itu. Kedua, ia menggambarkan kegiatan-kegiatannya mencetuskan gejolak revolusi di Jawa sebagai upaya untuk meredakan persoalan di dalam tubuh AD dan untuk mencegah meledaknya kekerasan di propinsi. Ketiga, ia menutup-nutupi kegiatan-kegiatannya untuk menggulingkan Pemerintah Propinsi di Jawa Tengah dengan memberikan informasi yang bertentangan dengan kenyataan kepada Presiden, yaitu bahwa ia mendorong pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan tanggung jawabnya seperti biasa. Keempat, ia menyangkal sudah mengetahui sebelumnya mengenai GESTAPU, sedangkan dalam kenyataan dia dan Biro Khusus-nya telah merencanakan dengan cermat pembersihan jenderal-jenderal antara Mei hingga September 1965, sedemikian rapihnya sehingga kegiatan itu akan tampak keluar sebagai persoalan intern Angkatan Darat. Kelima, ia mengakui Sukarno sekarang sebagai Presiden dan perdana menteri Kabinet Dwikora, dan menyatakan dirinya anggota kabinet itu dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Keenam, ia mengusulkan penyelesaian politik bagi peristiwa pembunuhan jenderal-jenderal dengan meletakkan pada kedudukan yang sama dari segi politik, moral, dan hukum, GESTAPU pada satu pihak, dan aksi militer Jenderal Suharto untuk menumpas gerakan itu di pihak lain, dan menyatakan bahwa aksi militer Jenderal Suharto adalah kelanjutan dari kegiatan Dewan Jenderal, yang sebenarnya tidak pernah ada itu. Ia mengusulkan agar penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Usul ini berarti bahwa Presiden, sebagai satu-satunya penengah akhir, harus meletakkan kedua peristiwa itu pada kedudukan yang setara dan, jika Suharto ingin menyelidiki GESTAPU, Presiden harus memerintahkan agar kegiatan-kegiatan Suharto sendiri juga diselidiki sebagai kepanjangan tangan Dewan Jenderal. Aidit berharap dengan usulnya ini waktu dapat diulur, legalitas partai dapat dipertahankan, masalah itu akan menjadi rumit, kacau balau dan akhirnya sirna dalam kubangan Segitiga Besi yang diperbaharui. Tipu muslihatnya tampak dengan sangat jelas.

Setelah surat itu selesai disusun, Aidit memberikannya kepada Lukman, dengan instruksi agar segera kembali ke Jakarta dan mengontak Njoto untuk

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

menyampaikan kepadanya bahwa ia harus menjaga legalitas partai dengan menghadiri sidang kabinet, yang diadakan oleh Presiden pada 6 Oktober. Aidit meminta Njoto memohon pertemuan pribadi dengan Presiden untuk membahas surat itu dengan Presiden, dan, bila kabinet bersidang, untuk membacakan di depan sidang hanya bagian VI, yang mengusulkan penyelesaian GESTAPU, yang kemudian dikenal dengan nama *Pernyataan Biro Politik Partai Komunis Indonesia*. Di sini Aidit menerapkan bagian pertama dari formula sinkretiknya, yaitu dengan mengakui Sukarno sebagai Presiden ia menuntut hak-hak hukum dan politik bagi partainya sebagai bagian yang sah dari Kabinet Dwikora dan dari kerangka konstitusional yang lebih luas negara Indonesia.

Meski Njoto menghadiri sidang kabinet, bertemu secara pribadi dengan Presiden dan membacakan pernyataan untuk dicatat dalam notulen sidang, dan meski kabinet menerima usul Aidit bagi penyelesaian politik GESTAPU, jelas tidak ada kemungkinan sedikitpun bahwa persoalan itu dapat demikian mudah dimanipulasi dan dikeluarkan dari agenda nasional, betapapun cerdik usulnya itu. Sebabnya ialah bahwa AD yang telah terluka itu, yang sekarang berada di bawah pimpinan Jenderal Suharto, siap mengerahkan tenaga untuk memburu para pembunuh enam jenderal dan membongkar komplotan itu sampai ke akar-akarnya, menyeret mereka ke depan pengadilan, kecuali Presiden karena pertimbangan kepentingan nasional yang lebih besar menghendaki lain. Tekad Suharto ini segera mematikan langkah Aidit ketika Suharto menutup jalur konstitusional, jurus pertama formula sinkretik Aidit, dan melemparkannya ke dalam jurus revolusioner, jurusnya yang kedua. Perintah harian jurus revolusioner Aidit menyerukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan revolusioner untuk menggulingkan Kabinet Dwikora dan seluruh sistem politik negara itu, untuk diganti dengan Dewan Revolusi pada semua tingkat pemerintahan di seluruh negeri. Bagi Aidit situasi saat itu merupakan situasi yang tidak pasti, yang mengharuskan dia menerapkan kedua jurus itu berganti-ganti. Ia harus mengambil langkah-langkah dari kedua jurus itu untuk beberapa lama, ibarat menyalakan lilin di kedua ujungnya.

AIDIT MENYALAHKAN PRESIDEN ATAS KEGAGALAN GESTAPU

Dengan latar belakang inilah Aidit diam di persembunyiannya di Jawa pada 10 November 1965, untuk menulis suratnya yang terakhir, "Instruksi-instruksi Tetap," atas nama CCPKI, kepada semua komite daerah di seluruh negeri

Akibat-akibat Kudeta yang Gagal Itu: 2 Oktober 1965

sebelum ia dikejar dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan Suharto di sebuah desa dekat Surakarta—dan beberapa hari kemudian ditembak mati.

Karena itu surat ini dapat dilihat sebagai pernyataan politik ahli strategi brilian ini yang telah berhasil mengembangkan partainya dari kekalahan di Madiun pada September 1948 hingga kejayaannya selama tujuh belas tahun terakhir, tetapi juga membawanya ke bencana GESTAPU 1965. Ada baiknya kita lihat lebih cermat dokumen yang penting ini, yang ditulis “di suatu tempat” di Indonesia.

Aidit mulai dengan mengakui bahwa GESTAPU, meski seratus persen persoalan dalam tubuh AD, “telah membawa kehancuran yang luar biasa” pada partai meski segala kemungkinan mengenai kegagalannya telah dipertimbangkan seluruhnya dalam berbagai diskusi pucuk pimpinan partai dan dalam instruksi-instruksi yang dikeluarkan untuk semua unit partai di seluruh Indonesia. Dalam menghadapi bencana ini, “harus diakui,” kata Aidit, bahwa tidak semua perkiraan dan rencana, sebagai perkiraan arah perkembangan keadaan, terwujud. Untuk ini kesalahan harus diletakkan di pundak Presiden dan Cina, kata Aidit dengan tegas, karena mereka “tidak memberikan bukti-bukti mengenai solidaritas mereka,” dan mereka ingkar janji.

Di sini jelas yang dimaksud Aidit adalah sikap Presiden yang tidak mendukung dengan segera pembentukan Dewan Revolusi dan membentuk Kabinet Gotong Royong setelah pembersihan para jenderal ketika ia berada di Pusat Komando di Halim, dan yang tidak memenuhi janji-janjinya yang lain kepada Aidit pada waktu mereka bertemu di Istana Bogor pada 8 Agustus 1965. Namun, kesalahan bagi bencana itu juga jatuh dalam bobot yang sama ke pundak Peking karena Peking tidak memenuhi permintaan Aidit akan bantuan sebelum ia bertolak dari Halim menuju Yogyakarta pada pukul 01.30, 2 Oktober 1965, untuk membentuk Pemerintahan Sementara. Seandainya bantuan dikirim ke Jawa setelah dimintanya, dan ia sudah berada di Jawa selama sembilan hari saat itu, dengan semua lapangan udara militer di bawah kendali Omar Dhani sehingga mudah dapat dicapai dari luar, kekuatan-kekuatan perlawanan PKI dan para perwira menengah AD yang berpikiran maju akan memperoleh dorongan yang sangat penting untuk merebut kekuasaan dan menggulingkan sistem lama pada hari-hari pertama bulan Oktober, terlepas dari kegagalan GESTAPU di Jakarta. Sejauh menyangkut kegagalan Presiden, kita telah melihat bahwa tuduhan Aidit sepenuhnya benar. Analisis saya mengenai peristiwa-peristiwa ini yang telah saya kemukakan di

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

atas menyimpulkan bahwa seandainya Presiden menyetujui Dewan Revolusi pada saat pertama ia bertemu Supardjo di Pusat Komando Halim, buah dari seluruh peristiwa itu akan berbeda, dengan Aidit memegang tampuk kekuasaan barangkali pada tengah hari pada 1 Oktober.

Setelah menjelaskan sebab-sebab kegagalan upaya-upayanya di Jakarta pada 1 Oktober, Aidit menoleh ke situasi di Jawa Tengah saat ia menulis suratnya pada 10 November. Ia memperlakukan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah sebagai sebuah “latihan umum” untuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa datang, dan bahwa putaran roda keberuntungan akan menguntungkan PKI, jika Jenderal Suharto menerima pernyataan Presiden bahwa GESTAPU adalah “riak kecil di tengah samudera,” yaitu soal kecil, dan menerima usulnya bahwa Presidenlah semata-mata yang menyelesaikan persoalan itu secara politik. Dalam hal ini, pengejaran dan pembunuhan pengikut PKI mungkin akan berakhir, “sehingga kita dapat membentuk kekuatan kembali.” Aidit kemudian merujuk suratnya kepada Presiden tertanggal 6 Oktober 6 (DOKUMEN No. 1), dengan salinan yang telah dikirim kepada semua komite propinsi Partai, yang menekankan bahwa ia dan CC PKI yakin bahwa Presiden dan Subandrio mengupayakan dengan segala daya agar kabinet mau menerima usul Aidit tentang penyelesaian politik GESTAPU. Namun, hal yang lebih penting lagi adalah, kata Aidit, keyakinannya bahwa Presiden tidak dapat mengambil langkah yang lebih radikal sampai saat ini karena ia berada di bawah kendali yang sangat ketat dari Suharto dan jenderal-jendralnya. Dengan kata lain, Presiden tidak dapat mengabaikan mereka, atau bertindak tanpa melalui mereka.

Untuk menunjukkan bahwa Presiden masih tetap mendukung PKI dan bahwa Aidit selalu berhubungan dengan dia, ia menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa Presiden sudah setuju untuk sementara Aidit berlandung di Cina. Kenyataan bahwa Aidit akan dapat bertemu dengan Mao, kata Presiden, merupakan alasan yang kuat bagi kepergiannya ke Peking dan tinggal di sana untuk sementara. Selain itu, Omar Dhani setuju untuk mengirim sebuah helikopter untuk melarikan Presiden diam-diam pada malam hari dari wilayah yang dikontrol oleh Suharto. “Seandainya evakuasi ini berhasil,” kata Aidit selanjutnya dalam suratnya, landasan untuk perjuangan jangka panjang sudah diletakkan karena sekarang Presiden akan selalu “diingatkan mengenai kesepakatannya” dengan Mao. Dan setelah membawanya kembali ke bawah kendali PKI, dan jika ia tidak memenuhi kesepakatannya dengan Mao dan Aidit, maka Presiden “juga akan dikorbankan,” jika perlu, karena partai juga

Akibat-akibat Kudeta yang Gagal Itu: 2 Oktober 1965

sudah banyak melakukan pengorbanan untuk mewujudkan pikirannya dan cita-citanya bagi masa depan.

Dari surat Aidit jelas bahwa ia pasti telah mempertimbangkan kemungkinan menyelamatkan diri ke Cina, menghubungi Peking dari konsulat Cina di Jawa atau melalui jalur komunikasinya sendiri dengan Peking, karena surat itu berisi daftar sepuluh instruksi tentang apa yang harus dilakukan selama ia tidak berada di tempat. “Bila ketua berhijrah ke tetangga”, instruksi-instruksi berikut ini, seperti tercantum dalam paragraf ayat 6, harus dipatuhi: 1) legalitas dan kelangsungan hidup partai harus tetap dijaga; 2) daerah-daerah basis di Jawa harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan; 3) sebagai taktik untuk menjamin perjuangan jangka panjang, pimpinan mengusulkan agar unit-unit partai yang ada dibubarkan, tetapi segera setelah itu dibentuk unit-unit partai baru, dengan baju baru; 4) hindari semua perlawanan frontal, karena partai bertindak berdasarkan Program K (*Plan K*), sesuai instruksi CCPKI yang dikeluarkan pada 25 September; 5) tindakan pengamanan, menyandera, teror dan sabotase sebagai metode perang urat syaraf, harus dilaksanakan secara sistematis agar efektif; 6) pemerintah dan rakyat harus diyakinkan bahwa partai masih berdiri dan kuat; karena itu, departemen agiprop semua CDB/komite daerah harus diperkuat dan dikerahkan; 7) Khusus di Jakarta, harus dilakukan upaya-upaya untuk tidak saja meyakinkan Suharto, tetapi juga Presiden dan Subandrio, bahwa partai mewakili sebuah kekuatan yang berpotensi sangat berbahaya, sehingga tidak dapat dengan mudah disingkirkan dari kehidupan politik; 8) setiap anggota partai harus diperlakukan sebagai patriot dan informan; 9) setiap anggota partai adalah seorang prajurit dan seorang *liaison officer* [penghubung] dalam perang; 10) perlu dijamin komunikasi segitiga dengan Presiden dan Subandrio; cara paling aman adalah melalui perwakilan diplomatik Cina di sini.

Setelah membeberkan sepuluh butir pedoman bagi partai selama dalam situasi tidak menentu, yang pada dasarnya adalah sebuah strategi bertahan ini, Aidit berbicara tentang masa depan. Dalam pandangannya, karena semua akan tergantung pada langkah yang diambil Presiden, ia tidak dapat banyak berbicara dari sisi kebijakan praktis, dan ia tampaknya sudah tiba di ujung jalan.

Berbicara tentang waktu dekat di masa depan, suratnya mengatakan bahwa Desember 1965 hingga Januari 1966 adalah dua bulan yang menentukan. Dalam pandangannya, penting untuk memastikan bahwa Presiden tidak disingkirkan dalam periode itu oleh Suharto dan militer, atau

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

oleh partai-partai kontra-revolusi. Keyakinan Aidit tetap tidak goyah mengenai kemampuan dan kesediaan Presiden untuk menyelesaikan akibat-akibat GESTAPU secara politik, untuk memungkinkan PKI meluputkan diri dari implikasi telah melakukan kejahatan dalam peristiwa itu, karena sejauh ini tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Presiden akan meninggalkan partai pada jam-jam yang sulit ini.

Aidit terus terang mengakui bahwa partai tidak memiliki kekuatan efektif untuk mengemukakan kehendaknya pada saat itu. Karena nasib partai terletak dalam tangan Presiden, Aidit mengancam akan menghancurkan Sukarno dan Subandrio jika mereka tidak memenuhi janji-janji mereka:

“Tapi harus diingat kekuatan kita sekarang hanya satu: *perjanjian politik antara Sosro dengan tetangga kita*. Bila Sosro (Sukarno, Ed.) meninggalkan kita, berarti hukum karma berlaku. . . . Senjata terakhir dari kita dan Negara tetangga (Cina, Ed.) adalah ini juga; oleh sebab itu, yakinlah kawan-kawan, mudah-mudahan Sosro (Sukarno, Ed.) dan Tjeweng (Subandrio, Ed.) tidak akan mengkhianati kita. . . . tetapi bila mereka berkhianat, maka, dari negara tetangga (Cina, Ed.), perjanjian-perjanjian pasal yang telah kami sampaikan secara /R pada bulan Agustus yang lalu terpaksa diumumkan, dan ini adalah berarti *lonceng kematian dan kehancuran bagi Sosro/Tjeweng*”²⁴⁶

Kita harus mengasihani Aidit atas pernyataan yang bernada menyerah ini, yang dengan jelas menunjukkan sampai berapa jauh sudah hubungannya dengan Mao dan Cina menimbulkan kerusakan pada partainya. Tidak ada visi, tidak ada program dan tidak ada kebijakan-kebijakan praktis sebagai pedoman bagi partai kecuali saran-saran suram tentang membela diri dan harapan bahwa partai tidak akan dilarang. “Sebagai penutup, laksanakan semua yang kami terangkan dalam pasal 6; sesuaikan semua tindakan dan semua instruksi yang lalu dengan kondisi setempat. Agar dijaga keserentakan langkah bila nanti Partai tidak dibubarkan (legal bergerak). Kemudian semua CDB (Comite Daerah Besar) cepat segera muncul kembali.” Kata-kata penutup instruksi terakhir Aidit kepada para pengikutnya yang loyal sebelum ia menemui ajal ini, menyingkapkan semuanya: “Siapkan semua fakta-fakta dan dokumen untuk buku putih tentang khianat Dewan Jenderal.” Ini jelas tidak ada landasannya, karena seperti telah kita lihat, tidak ada bukti-bukti pengkhianatan yang ditemukan Untung dan anak buahnya dari jenderal-jenderal di Lubang Buaya sebelum membunuh mereka, karena tuduhan adanya Dewan Jenderal adalah ciptaan Aidit, sebuah tipu muslihat sebagai jalan pintas untuk merebut kekuasaan. Tentu Aidit tahu ini tidak benar, tetapi fiksi mengenai Dewan

Akibat-akibat Kudeta yang Gagal Itu: 2 Oktober 1965

Jenderal itu harus dipertahankan dan konspirasinya harus terus digembargemborkan agar dapat dihasilkan refleks Pavlov yang terus menerus dan tidak kendur-kendur dari para anggota partai, untuk siap berjuang menentang kincir angin Don Kisot.

Sebelum kita meninggalkan Aidit di tempat persembunyiannya di suatu tempat di Jawa Tengah dan menemui ajalnya di tangan pasukan Suharto beberapa hari kemudian, mari kita lihat instruksi-instruksi yang disebut pada akhir suratnya, yaitu apa yang harus dilakukan oleh komite daerah besar partai jika GESTAPU gagal di daerahnya, yang sekarang sudah terjadi. Perlu ditekankan bahwa partai itu sebelumnya yakin sekali bakal menang di Jakarta dan tidak menyiapkan rencana darurat jika gerakan itu gagal, dan Sudisman kelak mengeritik Aidit karena itu. Tentu Sudisman benar, karena kita telah melihat bahwa Aidit di Halim harus bertindak di luar rencana dan terpaksa mengambil langkah-langkah tanpa persiapan sebelumnya, sejak Presiden menghambat Rencana Besarnya pada pukul 11.00 pagi ketika ia mengambil kekuasaan penuh dengan memerintahkan Supardjo untuk segera menghentikan gerakan itu. Tidak ada rencana darurat untuk kemungkinan seperti itu dan Supardjo mengatakan kemudian bahwa Aidit seharusnya memerintahkan Untung untuk “mengamankan” Presiden dan terus jalan “tanpa” dia untuk mendudukkan Dewan Revolusi di tampuk kekuasaan.

Namun, CC PKI, sudah memperkirakan bahwa di beberapa tempat situasi mungkin berubah menjadi lain, upaya kelompok-kelompok revolusioner untuk merebut kekuasaan mungkin digagalkan oleh kekuatan-kekuatan reaksioner. Untuk menghadapi keadaan-keadaan tidak terduga seperti inilah CC PKI mengeluarkan instruksi-instruksi tertulis untuk Komite-komite Partai Daerah, selama Agustus dan September, bagaimana bertindak dalam situasi seperti itu. Namun, instruksi yang paling sensitif diberikan secara lisan dari mulut ke mulut, pada pertemuan-pertemuan tatap muka yang diadakan melalui jaringan Biro Khusus, meski Biro Khusus juga mengundang sejumlah pimpinan daerah ke Jakarta, atau mengirimkan orang-orangnya sendiri ke daerah untuk meneruskan instruksi-instruksi seperti itu kepada orang-orang tertentu dalam hirarki partai.

Salah satu dari instruksi-instruksi itu dikeluarkan oleh CC PKI untuk komite-komite partai di daerah pada 25 September 1965 dengan nama sandi Program K yang tampaknya disampaikan secara lisan pada 28 September 1965. Namun, CC PKI mengeluarkan instruksi-intruksi tertulis untuk melengkapi “instruksi-instruksi lisan” ini, dan dari dokumen inilah (DOKUMEN

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

No. 3) akan kita kutip apa yang harus dilakukan komite daerah bila terjadi kegagalan setempat.

Dokumen itu diawali dengan kata-kata yang sangat tegas bahwa CC PKI yakin sekali bahwa rencananya akan berhasil. Namun, harus disusun rencana garis perjuangan dan rencana pelaksanaan jika Komite Daerah menemui kegagalan, kata dokumen itu, bukan karena kesalahannya sendiri, karena "secara pasti tak mungkin akan gagal." Untuk tujuan ini, instruksi-instruksi berikut ini dikeluarkan sebagai pedoman, kata dokumen itu.

1) Apabila sesudah 1 Oktober 1965 dan seterusnya di salah satu CDB/komite daerah mengalami kegagalan karena hal-hal yang tidak disangka-sangka, misalnya tidak berdaya sama sekali, maka semua senjata yang telah diterimanya, harus segera cepat-cepat disingkirkan dan disimpan di tempat yang aman dan jauh tidak terduga sama sekali oleh siapapun secara terpecar; 2) dalam situasi seperti itu, komite daerah harus pura-pura membubarkan diri secara sukarela dan secara legal, dan benar-benar membuktikan telah membubarkan diri disaksikan pihak berwenang setempat; 3) kawan-kawan dari luar daerah bersangkutan, yang ditugaskan oleh rencana itu untuk datang dan menyelamatkan daerah bersangkutan dari jatuh ke dalam kendali kekuatan-kekuatan reaksioner, harus diberi, segera setelah mereka tiba, daftar nama-nama semua orang kontra-revolusioner dan instruksi-instruksi mengenai bagaimana orang-orang kontra-revolusioner ini harus disingkirkan; juga informasi harus diberikan kepada mereka mengenai tempat-tempat penyimpanan senjata; 4) kawan-kawan ini harus ditampung secara rahasia, di rumah anggota partai atau simpatisan partai, atau di rumah penginapan milik pemerintah; 5) bila sebuah unit partai harus dibubarkan di depan pihak berwenang setempat, anggota-anggotanya jangan sekali-kali gentar untuk menandatangani janji atau kesaksian yang diwajibkan oleh pihak berwenang; jika perlu mereka harus menandatangani dengan darah untuk menghilangkan kecurigaan; 6) bila, dalam pandangan pimpinan partai, situasi telah dapat dikuasai, semua anggota partai yang masih tinggal di tempat bersangkutan harus pindah ke tempat lain, untuk melaksanakan instruksi-instruksi lisan; 7) surat ini harus segera dibakar setelah dibaca, dengan disaksikan oleh semua pimpinan partai yang hadir.

Untungnya bagi Aidit, Presiden berhasil meyakinkan Kabinet Dwikora, yang bersidang di Istana Bogor pada 6 Oktober, 1965, untuk menerima usul Aidit tentang penyelesaian politik bagi akibat-akibat GESTAPU, seperti sangat diharapkan oleh Aidit. Ini adalah perkembangan yang sangat penting, karena Aidit meletakkan seluruh politik partainya, seperti terlihat dari suratnya

Akibat-akibat Kudeta yang Gagal Itu: 2 Oktober 1965

terakhir tertanggal 10 November 1965, “Wasiat Politik”-nya yang terakhir, di atas usul penyelesaian politiknya ini sebagai landasan. Penyelesaian semacam itu, dengan meletakkan GESTAPU pada tempat yang setara dengan operasi-operasi Suharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan subversif Dewan Jenderal, akan membangkitkan partai kembali dari kekalahan karena membebaskannya dari keterlibatan bersifat kejahatan dalam peristiwa itu. Dari sisi politik, moral, dan hukum, partai yang direhabilitasi dari sisi hukum akan mendapat kesempatan untuk memulihkan diri dan menyatukan anggotanya yang sudah kocar-kacir, seperti kata Aidit, siap untuk menghadapi kembali putaran roda nasib berikutnya. Seperti akan kita lihat, usul Njoto kepada Presiden dalam sidang kabinet pada 6 Oktober, tentang pembentukan *Barisan Sukarno*, untuk membawa revolusi ke tahap yang baru melalui cara-cara baru, adalah upaya untuk meletakkan landasan bagi perjuangan jangka panjang partai sampai tercapai kemenangan akhir, seperti dikatakan oleh Aidit dalam Instruksi-instruksi Tetap-nya tertanggal 10 November, 1965.

Sayangnya bagi Aidit, komite-komite daerah tidak dapat melaksanakan instruksi-instruksi tetap CC PKI itu, seperti telah diuraikan di atas. Serangan balasan AD dilancarkan cepat sekali dan mematikan, sehingga tidak ada peluang bagi komite setempat untuk bergerak. Seluruh struktur partai yang pernah sangat kokoh itu sudah hancur lebur sekarang, yang menelan biaya yang sangat besar dalam bentuk penderitaan manusia. Serangan balasan itu, yang membuka peluang bagi banyak orang untuk membalas dendam, yang tidak ada hubungannya dengan GESTAPU, menelan korban dalam jumlah yang sangat mengerikan.

Aidit tidak sempat menyaksikan kehancuran habis-habisan yang diderita partainya akibat perbuatannya, karena tidak lama setelah ia menulis instruksi-instruksi tetapnya pada 10 November, ia ditangkap pada 22 November 1965 dan kemudian ditembak mati oleh pasukan Yasir Hadibroto. Keadaan di sekitar penangkapan dan tembak matinya itu tidak sepenuhnya jelas hingga sekarang, lebih dari 30 tahun setelah peristiwa itu, dan ini adalah salah satu dari banyak *lacunae* (celah kosong) dalam pemahaman kita mengenai peristiwa GESTAPU.

Dari bukti-bukti yang tidak lengkap, tampaknya Aidit menulis suratnya di sebuah rumah di desa Sambeng di luar Solo. Kamarnya nyaman, dilengkapi almari berpintu ganda yang dibuat khusus untuk tempat bersembunyi dalam keadaan darurat. Bila dibuka, akan terlihat pakaian-pakaian tergantung di kapstok, tetapi di balik pakaian-pakaian itu ada sebuah dinding lagi yang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

memisahkan bagian depan almari itu dengan sebuah tempat bersembunyi di belakangnya. Bertindak berdasarkan informasi rahasia, pasukan KOSTRAD menggerebek kamar itu, yang tampaknya kosong, dan kemudian ketika hendak meninggalkan kamar itu mereka melihat sebuah cangkir kopi yang masih mengeluarkan asap di atas meja dan sepasang sandal di bawah kursi, yang menunjukkan bahwa Aidit pasti masih ada di tempat itu dan pergi bersembunyi ketika diperingatkan oleh tuan rumah. Kamar itu diperiksa dan almari itu dibuka dan kemudian disingkirkan dari dinding, dan di situ Aidit ditemukan sedang bersembunyi di celah rahasia dinding itu. Setelah Aidit ditangkap oleh Mayor Moes Subagio, ia konon menulis sebuah dokumen sepanjang 50 halaman, yaitu sebuah “pengakuan,” diambil fotonya ketika ia menandatangani dokumen itu, dan kemudian ditutup matanya, kembali diambil fotonya, dan kemudian ditembak, atas perintah Kolonel Yasir Hadibroto.

Setelah ini, Mayor Udara Sugianto menerbangkan Mayor Moes Subagio ke Jakarta, dengan pesawat bernama *Monitor*, untuk melapor kepada Jenderal Suharto bahwa Aidit telah ditembak mati, sambil membawa “pengakuan” Aidit dan sejumlah foto, salah satunya memperlihatkan Aidit sedang menandatangani kesaksiannya dan kemudian sebuah foto yang memperlihatkan Aidit dengan mata tertutup sebelum ditembak mati. Karena setiba mereka di KOSTRAD Jenderal Suharto tidak ada, “pengakuan” Aidit dan foto-foto diserahkan kepada Kolonel Wahono, Asisten Operasi, disaksikan oleh Kolonel Kemal Idris.²⁴⁷

Pada kesempatan dua kali saya berada di Jakarta untuk melakukan penelitian, pada 1968 dan 1971, saya mencari bahan-bahan ini tetapi sia-sia belaka, meski sebuah kantor berita Jepang menurunkan saripati “pengakuan” Aidit itu dalam *Asahi Evening News*, Tokyo.²⁴⁸



XII

PENGHANCURAN PKI: AGEN KEKUATAN ASING

PRESIDEN MEMBERI MANDAT KEPADA SUHARTO
UNTUK MEMULIHKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN:
2 OKTOBER

Harapan Aidit bagi penyelesaian politik akibat-akibat GESTAPU mulai pudar setelah Jenderal Suharto mengadakan pertemuan pertama dengan Presiden pada hari Sabtu, 2 Oktober, di Bogor. Sebuah pernyataan Presiden, yang disiarkan Minggu, 3 Oktober, pada pukul 01.30 siang, menunjukkan hakekat dari penyelesaian yang disepakati oleh kedua orang ini. Pernyataan itu mengatakan bahwa Presiden dalam keadaan aman dan sehat wal'afiat, dan bahwa ia masih tetap memegang kekuasaan tertinggi negara, pemerintah dan Revolusi Indonesia. Pernyataan itu selanjutnya mengatakan bahwa Presiden telah berkonsultasi dengan semua pimpinan Angkatan Bersenjata, Waperdam II Menteri Leimena, dan perwira-perwira lain pada Sabtu, 2 Oktober, "dengan maksud untuk segera mengatasi apa yang disebut Gerakan 30 September." Presiden meminta supaya rakyat tetap tenang dan menghindari semua konflik dan bentrokan bersenjata. Pimpinan AD berada sepenuhnya dalam tangannya, kata Presiden, tetapi ia telah mengangkat Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai *caretaker* AD untuk urusan sehari-hari, sedangkan Jenderal Suharto telah diangkat untuk "melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam kaitan dengan Gerakan 30 September."²⁴⁹ Dengan memberikan kepada Jenderal Suharto mandat yang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

besar itu berarti Presiden telah menyerah, sebuah berita yang pasti telah membuat Aidit terguncang sekali sampai ke ubun-ubun ketika mendengarnya dari berita radio yang disiarkan ke seluruh Indonesia. Jenderal Suharto dan AD tidak berminat pada penyelesaian politik apapun untuk peristiwa itu, tetapi pada pengejaran orang-orang yang telah membunuh keenam kolega mereka dan membawa mereka ke depan pengadilan.

Kemudian kembali ada pengumuman dari Presiden, yang disiarkan pada hari Minggu pagi, 3 Oktober; di situ Presiden mencoba melepaskan dirinya, dan AURI, dari keterlibatan dalam Gerakan 30 September. Presiden mengatakan bahwa ia mengeluarkan pernyataan itu untuk menghilangkan beberapa salah paham yang telah muncul sehubungan dengan Gerakan 30 September, dan yang telah menimbulkan ketegangan dan konflik di antara angkatan bersenjata. Untuk menghilangkan semua salah paham ini, Presiden mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai keterlibatan AURI dalam Gerakan 30 September tidak benar, dan bahwa ia pergi ke Halim pada 1 Oktober sepenuhnya atas kemauannya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia yakin, pada waktu itu, bahwa Halim adalah tempat yang terbaik baginya, karena dekat dengan pesawatnya, yang dapat membawanya untuk ke tempat yang aman jika diperlukan. Akhirnya, ia menyerukan kepada angkatan bersenjata, dan kepada rakyat seluruhnya, agar tetap waspada dan menolak setiap usaha untuk mengadu domba AURI dengan AD, karena konflik hanya akan menguntungkan Nekolim.

Kedua pernyataan Presiden ini adalah langkah “sinkretik” terakhir pemimpin besar *musjawarah* itu, yang berharap bahwa dengan mengangkat Pranoto ia dapat menentramkan Aidit dan Gerakan 30 September, sedangkan dengan mengangkat Suharto ia dapat menenangkan Nasution dan penentang-penentang Untung dalam AD. Ia sendiri akan memegang kembali peran lamanya sebagai pemimpin penyeimbang dan penengah, berdiri di atas semua golongan, dan mengadu satu kelompok dengan kelompok yang lain, permainan yang sangat dikuasainya. Selain itu, ia menempatkan AURI langsung di bawah kendalinya, agar ia memiliki di bawah kendalinya satu pemain lagi sebagai unsur penyeimbang, untuk mengendalikan AD dan melindungi Omar Dhani dari balas dendam AD, karena keterlibatannya dalam peristiwa itu.

Namun, unsur penyeimbang yang diharap Presiden dan Aidit itu tidak dapat lagi berjalan mulus, mantra itu tak yang dapat dimainkan kembali dalam kondisi baru sekarang ini. Jenderal Suharto tidak saja dengan serius melaksanakan tugasnya memulihkan keamanan dan ketertiban setelah Gerakan 30 September itu, tetapi juga berdasarkan mandatnya melancarkan operasi

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

untuk menghancurkan PKI dan menyapu bersih partai itu dari panggung nasional sebagai kekuatan politik. Tindakan ini mengubah untuk selamanya hakekat perpolitikan di Indonesia, karena menghancurkan segitiga besi yang terdiri dari tiga kekuatan utama yang saling bersaing di Indonesia dan dengan demikian menyingkirkan dari genggamannya Presiden Sukarno sumber utama kekuatannya sebagai unsur penyeimbang ketiga kekuatan utama itu, sebagai wasit. Sekarang AD, dan teman-temannya, menjadi kekuatan politik yang utama di negeri itu dan mendominasi percaturan politiknya untuk beberapa waktu. Jenderal Suharto tidak mau melakukan kesalahan fatal, yang dilakukan oleh Aidit di Halim, yakni menghentikan operasi-operasinya untuk memulihkan keamanan di tengah jalan, atas perintah Presiden. Selain itu, Presiden mendapat lawan baru, Suharto, sebagai dalang ulung yang lain dalam lakon wayang itu; dia juga orang Jawa, yang coba mengungguli dan mematikan langkah serigala tua itu pada setiap titik langkah, dan mengantisipasi setiap gerakannya. Bagi PKI, Suharto adalah seorang lawan yang gigih, yang berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa komplotan itu mendapat ganjaran yang setimpal bagi tindakan pengecut mereka membantai enam rekannya sesama jenderal, bagi persekongkolan mereka untuk menggulingkan pemerintah, dan untuk memastikan bahwa PKI tidak akan mampu menimbulkan luka-luka seperti itu lagi pada negeri ini di masa depan.

Dokumen-dokumen PKI menunjukkan dengan jelas bahwa partai itu adalah agen kekuatan asing, pertama agen Moskow dan kemudian agen Peking, dan bahwa partai itu dikendalikan oleh dan untuk kepentingan kedua kekuatan asing tersebut. Karena itu, dan karena loyalitas kepada kekuatan asing itulah, maka dari segi hukum, PKI tidak memiliki legitimasi untuk memainkan peran dalam kehidupan politik Indonesia, dan karena itu, secara hukum dapat dilarang sebagai agen kekuatan asing. Semua partai politik dan lembaga pemerintah yang lain di negeri itu mendesak dengan sangat pihak militer agar PKI dan doktrin Marxis-Leninisnya dilarang, dan partai itu dibubarkan dan dengan demikian disingkirkan dari kehidupan politik Indonesia. PKI secara resmi dinyatakan sebagai partai terlarang pada 5 Juli 1966, dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966.²⁵⁰

Di sini juga berakhir upaya terakhir Cina untuk menggunakan Indonesia guna mewujudkan kepentingan strategisnya sendiri di Asia Tenggara. Upaya sebelumnya dilakukan oleh Kerajaan Cina pada 1406, pada waktu Perang Paregreg, dengan memberikan status raja-bawahan kepada “Raja Timur” Wirabhumi, mengakui klaimnya atas mahkota kerajaan Majapahit dan men-

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dukungnya melalui diplomasi dan penggunaan kekuatan militer melawan Raja Majapahit Wikramawardhana. Namun, setelah pasukan Wikramawardhana, yang didukung oleh pasukan Bhre Tumapel dan Bhre Hyan Parameswara, menundukkan Wirabhumi dan sekutunya dari Cina, Wirabhumi ditawan oleh Raden Gajah, dipenggal dengan tuduhan melakukan pengkhianatan negara dan kepalanya dibawa ke ibukota sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengancam kesatuan kerajaan dengan bersekongkol dengan kekuasaan asing.²⁵¹

Ambisi Kerajaan Cina adalah membangun sebuah sistem kerajaan-bawahan di Asia Tenggara pada abad 14 dan 15, dengan cara memberikan status kerajaan-bawahan kepada berbagai wilayah kepangeranan Kerajaan Majapahit tetapi terletak di luar perbatasan, dan dengan demikian merenggut wilayah-wilayah itu dari ikatannya dengan kerajaan induk. Ini, dan beberapa kali pendaratan oleh angkatan laut kerajaan Cina di Sumatra dan Jawa, adalah beberapa dari faktor-faktor utama penyebab kemunduran dan akhirnya kematian Majapahit,²⁵² kemunduran dan akhirnya kematian ciptaan besar bersejarah bangsa Indonesia, yang dalam-dalam tertanam di kesadaran dan jiwa nasional hingga sekarang. Kerajaan itu berlandaskan pluralisme agama, budaya dan politik, dan gema pluralisme ini muncul kembali ketika pemerintahan Jenderal Suharto tumbang pada 1998, dan kemudian tercermin dalam kemenangan nasionalisme sekuler yang diwakili oleh PDI-P pimpinan Megawati Sukarnoputri yang muncul sebagai partai politik terbesar di Indonesia tahun 1999.²⁵³

NASUTION DAN AD MEMBALAS: 1-6 OKTOBER

Dari uraian pengalamannya jelas bahwa Jenderal Nasution sangat terkejut ketika pasukan Untung mengepung dan kemudian masuk ke rumahnya untuk menangkapnya sekitar pukul tiga pagi pada 1 Oktober 1965.²⁵⁴

Kisah terlukanya Jenderal Nasution, setelah luput dari bahaya pembunuhan oleh pasukan Tjakrabirawa pada pukul 03.00 pagi, mulai sekitar pukul 06.00 ketika ia meninggalkan rumah Dr. Leimena, di Jalan Teuku Umar 36, tempat ia bersembunyi, dan masuk lewat pagar ke rumahnya sendiri di Jalan Teuku Umar 40. Dari situ ia dibawa dengan mobil—ia bertiarap di lantai mobil—oleh Let. Kolonel Hidajat Wirasondjaja, Komandan Staf Markas Besar AD, ajudannya Mayor Sumargono dan ipar laki-laki Nasution, Bob Sunarjo

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

Gondokusomo, ke persembunyian baru, yang terletak tidak jauh dari SAB, Staf Angkatan Bersenjata. Mereka khawatir para pembunuh akan terus mengejar Nasution untuk kembali mencoba membunuhnya jika ia dibiarkan di rumahnya atau di sekitar situ.

Kekhawatiran mereka ternyata beralasan, karena tidak lama setelah Nasution lolos seorang anggota Tjakrabirawa datang ke rumahnya mencari dia dan menanyakan di mana Nasution. Setelah itu datang Let. Kol Ali Ebram, kepala unit intelijen Tjakrabirawa, disertai beberapa anak buahnya yang tanpa seragam, mengatakan kepada orang rumah bahwa Presiden memerintahkannya (Ali Ebram) untuk mencari keterangan di mana Nasution bersembunyi dan bagaimana keadaannya. Jelas, begitu Leimena menghubungi Presiden, yang saat itu bersiap-siap meninggalkan rumah Dewi, untuk menyampaikan bahwa Nasution meloloskan diri dan sekarang sedang bersembunyi, Presiden mengirimkan regu pembunuh untuk mengejarinya. Seperti diketahui, Presiden sangat khawatir ketika Supardjo melapor kepadanya di Halim pada sekitar pukul 10.30 bahwa Nasution lolos, karena ia tahu benar bahwa jenderal yang luka itu akan mengejar para pembunuhnya. Presiden menginginkan, dan ini tidak diragukan lagi, bahwa Nasution harus mati. Juga Mayjen Umar Wirahadikusumah, Panglima Kodam V Jaya, melihat sejumlah orang yang tampak mencurigakan dan bersenjata di sekitar rumah Nasution ketika ia berkeliling kota memantau keamanan pada waktu subuh 1 Oktober.

Ketika di tempatnya yang baru Nasution mendengar dari radio pada pukul 08.00 siaran ulang Komunike/Pengumuman Dewan Revolusi, yang ditandatangani Untung, ia memerintahkan kepada Let. Kol Hidajat Wirasondjaja untuk mencari informasi lebih lanjut tentang situasi Jakarta saat itu. Dalam hubungan ini, letkol itu pergi ke KOSTRAD, di situ ia bertemu dengan Suharto dan Umar, dan melaporkan kepada mereka mengenai keadaan Nasution dan bahwa ia sehat wal'afiat dan sedang bersembunyi, karena anak buah Untung masih mencari-cari dia. Mereka kemudian juga memberikan informasi kepada Hidajat mengenai apa yang telah terjadi, dan ini kemudian disampaikan Hidajat kepada Nasution sekembalinya dari KOSTRAD. Pada waktu bersamaan Nasution memperoleh informasi dari sumber-sumber lain mengenai operasi Untung dan, karena ada petunjuk-petunjuk keterlibatan PKI dalam kejadian itu, ia memerintahkan Hidajat untuk kembali ke KOSTRAD sekitar pukul 09.00. Sebagai Menko Hankam/KASAB Nasution memerintahkan Suharto untuk melaksanakan hal-hal berikut ini:

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

1. identifikasi dan lokalisir pasukan musuh
2. tutup semua jalan masuk ke kota Jakarta
3. minta bantuan dari pasukan dari Divisi Siliwangi
4. gunakan RRI Bandung untuk membantah adanya Dewan Jenderal
5. cari informasi tentang keadaan Presiden
6. hubungi segera Men/Pangal, Men/Pangak dan Panglima KKO Mayjen KKO Hartono.²⁵⁵

Sekembalinya dari KOSTRAD, Hidajat melaporkan kepada Nasution bahwa perintah Nasution telah disampaikannya kepada Jenderal Suharto, dan bahwa Suharto dalam kenyataan sudah mengambil alih komando dan sudah mengambil tindakan-tindakan, yang sejalan dengan garis yang ditentukan Nasution. Selain itu, kolonel itu juga melaporkan bahwa menurut informasi terbaru di KOSTRAD, masih belum jelas di mana Presiden berada.

Setelah mendengar laporan ini, kembali Nasution memerintahkan Hidajat untuk pergi ke KOSTRAD; ia berangkat naik sepeda motor ke KOSTRAD yang tidak terlalu jauh dari tempat persembunyian Nasution, dan kembali sekitar pukul 13.00 dengan laporan sebagai berikut tentang perkembangan keadaan hingga saat itu. Satu, KOSTRAD sudah melakukan kontak dengan pasukan pemberontak yang dikerahkan di Medan Merdeka dan berhasil meyakinkan mereka untuk berputar haluan; dua, kolonel itu pergi ke rumah Omar Dhani, tetapi ia tidak ada di rumah; tiga, Martadinata dipanggil Presiden ke Halim, dan nasib Presiden tampaknya suram; empat, situasi di Halim tampaknya sangat mencurigakan, terutama mengingat kehadiran Omar Dhani di situ; lima, pada saat itu Suharto di KOSTRAD merasa pasti Presiden ada di Halim, karena Presiden telah memerintahkan kepada Kolonel Widjanarko untuk meminta Jenderal Umar menghadap ke Halim; Suharto tidak mengizinkan Umar menghadap karena tidak jelas apakah Presiden dalam keadaan selamat, atau ditahan.

Begitu Untung menyiarkan susunan Dewan Revolusi pada pukul 14.00, Nasution memutuskan bahwa harus diambil tindakan cepat dan langsung terhadap Untung di semua front oleh AD, dan bahwa angkatan-angkatan lain harus diperintahkan untuk ikut-serta. Karena itu, sebagai Menko Hankam/KASAB, Nasution mengeluarkan perintah berikut untuk Suharto, Wakil Pangal Muljadi, dan Men/Pangak Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo.

Perintah Nasution diawali dengan kata-kata bahwa sudah jelas bahwa telah dilakukan usaha untuk menangkap dan membunuh sejumlah pimpinan

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

AD dan Menko Hankam/KASAB; juga sudah jelas bahwa Presiden ditahan di Halim; mengingat peran yang penting yang dimainkan militer dalam bidang urusan dalam negeri dan urusan luar negeri, Menko Hankam/KASAB mengeluarkan perintah berikut ini untuk semua Panglima Angkatan sebagai berikut:

1. Dengan semua kekuatan militer ABRI yang ada, melakukan operasi untuk:
 - a. membebaskan Presiden/Pangti kembali
 - b. pulihkan disiplin militer di semua unit sesuai SAPTAMARGA
 - c. Mayor Jenderal Suharto selaku Ketua memimpin segala operasi
2. secepatnya pulihkan hubungan baik dengan Men/Pangau
3. menjelaskan fakta yang sebenarnya dengan segala media kepada rakyat dan anak buah.²⁵⁶

Hari sekitar pukul 15.00 ketika Jenderal Nasution mengirim Kolonel Hidajat ke KOSTRAD dengan perintah di atas. Setelah turut dalam diskusi dengan staf Suharto, Hidajat kembali ke tempat persembunyian Nasution sekitar pukul 17.00 untuk melaporkan perkembangan keadaan yang mutakhir. Ia melaporkan bahwa sebagian besar pasukan di sekitar Medan Merdeka telah ditarik, tetapi stasiun radio dan gedung pusat komunikasi masih berada dalam tangan pasukan pemberontak. Situasi di KOSTRAD menjadi rumit karena Presiden mengangkat Jenderal Pranoto sebagai *caretaker* AD sementara nama Suharto, yang telah ditetapkan untuk mendukung posisi itu oleh Menko Hankam/KASAB bahkan tidak disebut-sebut. Mengingat komplikasi ini, Suharto dan para perwira meminta Nasution untuk pindah ke KOSTRAD, untuk membantu mereka mengatasi jalan buntu ini.

Dengan informasi dan permintaan ini dalam tangannya, Nasution pindah ke KOSTRAD sekitar pukul 18.00, didampingi oleh Kolonel Hidajat, ajudannya Sumargono dan beberapa pengawal. Suharto dan jenderal-jenderal yang lain menyambutnya dengan pelukan, dan kakinya yang cedera karena melompat dari pagar ketika meloloskan diri dari para pembunuhnya diobati.

Sementara itu, Widjanarko dan Martadinata muncul di KOSTRAD untuk menyampaikan kepada Suharto salinan perintah Presiden bahwa Presiden mengambil alih komando AD, dan mengangkat Pranoto sebagai *caretaker* untuk sementara, dan memerintahkan Suharto untuk segera menghadap Presiden di Halim.²⁵⁷ Widjanarko terlebih dahulu pergi ke rumah Pranoto dan karena

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Pranoto tidak ada di rumahnya, ia pergi ke KOSTRAD dan ternyata Pranoto ada di situ, di tengah-tengah kelompok anti-Untung.

Seperti telah kita lihat dalam uraian sebelumnya, Aidit mengirim Pranoto dari Halim ke KOSTRAD untuk mengambil-alih komando di situ setelah Aidit mendapat dari Supardjo salinan Perintah Harian Presiden yang mengangkat Jenderal Pranoto sebagai *caretaker* AD. Karena ternyata tidak mungkin mendapat dukungan Suharto bagi kudeta itu melalui upaya Latief untuk meyakinkan Suharto sekitar 17 jam sebelumnya, tampaknya sekarang terbuka kemungkinan untuk menetralsir Suharto dengan cara mengambil alih KOSTRAD dari tangannya melalui perintah Pranoto. Ini langkah Aidit yang sangat penting, mengingat latar belakang pertarungan kekuasaan antara dia dengan Presiden. Langkah itu jelas mengisyaratkan bahwa pada masa datang Pranoto akan mengikuti perintah Aidit, bukan perintah Presiden, dan bahwa pimpinan AD yang baru ini akan berpihak kepadanya, secara sukarela atau karena terpaksa, pada waktu penyelesaian akhir persoalan Presiden itu.

Namun, perkembangan keadaan tidak sesuai dengan perkiraan Aidit dan Pranoto. Begitu Widjanarko dan Martadinata muncul di KOSTRAD, Suharto mengajak kedua utusan Presiden itu ke sebuah ruangan untuk membicarakan implikasi-implikasi perintah Presiden itu, dan mengundang Nasution untuk hadir untuk membantu mengatasi krisis yang tengah dihadapi. Nasution, sebagai perwira paling senior dan masih menjabat Menko Hankam/KASAB mulai dengan pertanyaan bagaimana Presiden memutuskan pengangkatan itu dan apa peran kepala tiga angkatan yang lain di Halim, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan Angkatan Laut, dalam pengangkatan Pranoto. Martadinata menjawab bahwa Presiden meminta usul nama-nama calon untuk menggantikan Jenderal Yani, bahwa salah satu calon yang diusulkan adalah Jenderal Suharto, dan bahwa Presiden menolak usul itu karena Suharto sudah diangkat untuk posisi itu oleh Nasution, dan ini tidak dapat diterima Presiden. Nama-nama lain juga diusulkan, kata Martadinata, seperti Jenderal Adjie dan Jenderal Mursjid. Namun, Presiden mengangkat Pranoto, dan perintahnya disiarkan dengan segera, tidak oleh Radio Jakarta tetapi oleh stasiun radio AURI. Pada titik ini, Nasution mengkritik tajam Martadinata, karena ia dengan ikut dalam pengangkatan pengganti Yani telah campur tangan dalam persoalan murni intern Angkatan Darat. Hal ini membuat Martadinata tergerak untuk meminta maaf atas kesalahannya sambil memeluk Nasution. Suatu pemandangan yang mengharukan.

Hasil pembicaraan adalah keputusan bahwa pengangkatan oleh Presiden itu tidak dapat diterima oleh AD, karena operasi-operasi Suharto atas kudeta

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

Untung tengah berjalan, bahwa nasib jenderal-jenderal yang diculik belum diketahui, dan bahwa Pranoto tidak dapat meninggalkan KOSTRAD untuk melapor kepada Presiden di Halim. Pada titik ini, Nasution meminta Suharto untuk meminta Pranoto masuk ke dalam ruangan dan, di hadapan Suharto, meminta Pranoto membantunya mengatasi jalan buntu itu, yaitu dengan cara Pranoto hendaknya menanggukkan menerima pengangkatannya agar Suharto dapat menyelesaikan apa yang sedang dilakukannya sebagai pimpinan sementara AD. Seperti sudah dapat diperkirakan, Pranoto memberikan jawaban yang tidak jelas, karena pada malam sebelumnya ia telah bertemu Aidit di rumah Sjam dan menerima pengangkatan itu dari Aidit dalam rangka mengantisipasi pembersihan pimpinan puncak AD. Pranoto sekarang berhati-hati, karena ia tidak tahu pasti pada saat ini siapa yang akan ada di atas pada akhirnya, apakah kombinasi Aidit-Presiden ataukah persekutuan Nasution-Suharto. Karena jawaban yang tidak jelas itu, Suharto tidak mengizinkannya meninggalkan KOSTRAD bersama dengan Widjanarko dan Martadinata untuk menghadap Presiden di Halim. Kita telah melihat kedua utusan itu kembali ke Halim tanpa Pranoto, laporan Widjanarko kepada Presiden bahwa Pranoto tidak diizinkan Suharto meninggalkan KOSTRAD, dan pesan Suharto agar Presiden meninggalkan Halim karena ia akan mulai operasi terhadap Halim tidak lama lagi.²⁵⁸

Setelah pembicaraan dengan Pranoto ini, Suharto menyerahkan kepada Nasution, untuk dibacanya, teks pengumuman pertama Suharto kepada rakyat mengutuk kudeta Untung, sebelum disiarkan pada 19.00, setelah ia berhasil merebut stasiun radio dari tangan GESTAPU. Dalam pengumumannya Suharto mengatakan bahwa GESTAPU telah menculik enam jenderal dan merebut kekuasaan negara, tetapi Presiden selamat dan situasi di Jakarta dan propinsi berada di bawah kendalinya. Ia selanjutnya mengatakan bahwa ia telah mengambil alih komando AD untuk sementara, dan bahwa Angkatan Laut dan Kepolisian bekerja sama dengan AD untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Siaran ini jelas membawa dampak yang sangat besar di propinsi-propinsi, karena memberi tahu kelompok-kelompok pemberontak di situ bahwa GESTAPU di ibukota telah tumbang. Akibatnya, kelompok-kelompok yang belum memulai operasi menghentikan persiapan-persiapannya, sedangkan kelompok-kelompok yang sudah merebut kekuasaan mulai mundur untuk menghapus jejak.

Setelah siaran radio Suharto itu, Nasution, sebagai Menko Hankam/KASAB memerintahkan Angkatan Laut dan Kepolisian untuk bekerja sama

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

penuh dengan AD, sekarang di bawah Suharto, untuk menumpas GESTAPU di ibukota dan di seluruh negeri. Kesatuan langkah ketiga angkatan ini sangat penting karena ada laporan-laporan yang sampai ke KOSTRAD pada waktu itu, tentang keterlibatan PKI dan AURI dalam kudeta itu. Nasution berada di KOSTRAD sampai sekitar 01.00 pada 2 Oktober, dan mendapat laporan tentang kekalahan GESTAPU di Semarang, Bandung, Yogyakarta, Solo dan tempat-tempat lain. Ia juga mendapat laporan dari Kolonel Sarwo Edhy, Komandan RPKAD, mengenai direbutnya kembali stasiun radio dan Pusat Komunikasi, pembagian senjata kepada pemuda PKI oleh AURI, kedatangan kereta api dengan unit-unit AURI dari Jawa Tengah untuk melancarkan perjuangan mati-matian, dan laporan-laporan lain tentang kegiatan-kegiatan detik-detik terakhir kelompok Untung.

Jenderal Suharto kemudian memerintahkan kepada Sarwo Edhy untuk menyiapkan rencana serangan terhadap Halim, tetapi diputuskan untuk tidak menyerang selama Presiden masih berada di situ. Setelah tengah malam Widjanarko menelpon dari Bogor bahwa Presiden telah tiba dengan selamat di Istana Bogor; ini membuka jalan bagi pelaksanaan rencana serangan itu. Karena ada laporan-laporan tentang keterlibatan AURI dalam GESTAPU, Suharto dan Nasution mulai mempertimbangkan untuk mempersiapkan pertahanan markas KOSTRAD dan gedung-gedung yang lain dari kemungkinan serangan udara oleh Omar Dhani yang sudah terpojok. Dalam hubungan ini, langkah-langkah diambil untuk memastikan bahwa pesawat-pesawat tempur AURI tidak dapat mengudara untuk melakukan tugas pemboman. Sebagai Menko Hankam/KASAB Nasution juga mengeluarkan perintah telegraf membebaskan sejumlah unit AURI dari kewajiban mematuhi perintah Omar Dhani. Setelah ini tiba sebuah ultimatum dari Omar Dhani yang mengancam akan mengebom markas KOSTRAD di Jalan Medan Merdeka. Namun, ketika laporan-laporan intelijen yang masuk menunjukkan bahwa pesawat-pesawat tempur dan pembom di Jawa Timur telah dipersenjatai untuk tugas ini, sejumlah perwira senior KOSTRAD dipindahkan bersama operasi mereka ke Senayan.

Ketika makan pagi bersama Suharto pada 2 Oktober, Nasution mendapat laporan bahwa surat kabar pagi, *Warta Bhakti*, memuat perintah Presiden tentang pengangkatan Pranoto dan bahwa semua pasukan harus diam di tempat, karena tidak boleh ada pergerakan tanpa perintah dari komandan masing-masing. Karena jelas sekarang bagi Nasution bahwa Presiden telah menolak keberatannya atas pengangkatan Pranoto dan menolak pengangkatan Suharto, yang disampaikan Widjanarko setelah ia kembali ke Halim dari KOSTRAD,

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

Nasution belum bersedia menyerah. Ia meminta Mayjen Sarbini, dan perwira-perwira senior lain yang berada di KOSTRAD, untuk membujuk Jenderal Pranoto untuk mengumumkan secara terbuka bahwa ia menanggukuhkan menerima pengangkatannya, agar Jenderal Suharto dapat menyelesaikan tugas yang sedang dilaksanakannya. Pranoto kembali menunjukkan sikap keras kepala.

Untuk konsolidasi front bersama Angkatan Bersenjata melawan GESTAPU, Nasution menelpon Men/Pangak, Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo, yang pada hari sebelumnya bersama Presiden di rumah Susanto di Halim dan menyaksikan Presiden membawa kabinetnya ke bawah atap Dewan Revolusi dan pembicaraan-pembicaraan pribadi Presiden dengan Aidit melalui Supardjo. Nasution meminta Sutjipto untuk menerima Suharto di kantornya, yang akan menjelaskan kepadanya tentang perkembangan di KOSTRAD dan perlunya kerjasama antara kepolisian, AD dan AL untuk membasmi GESTAPU. Dalam percakapan telepon yang lama itu Sutjipto menjelaskan kepada Nasution tentang kejadian-kejadian di rumah Susanto, sehingga Nasution lebih mengerti seluruh peristiwa itu, keterlibatan Presiden di dalamnya, dan tangan tersembunyi Aidit dalam peristiwa itu. Namun, ketika Nasution mendapat telepon dari rumah sakit militer tentang keadaan putrinya Ade yang kritis, yang luka-luka oleh tembakan para pembunuh pada pagi hari itu, ia meninggalkan KOSTRAD menuju rumah sakit untuk berkumpul bersama keluarganya di sisi tempat tidur Ade. Ade meninggal akibat lukanya pada 6 Oktober 1965.

PUSAT PERSEKONGKOLAN PINDAH KE BOGOR: 2 OKTOBER

Dengan evakuasi Presiden dari rumah Susanto di Halim, pusat konspirasi pindah ke Istana Bogor, dan dari situ Presiden tidak saja melindungi para pendukung kudeta yang gagal itu, tetapi juga mengambil langkah-langkah baru untuk mempertahankan kebijakan dalam negeri dan luar negeri Indonesia yang progresif. Ia mengirim instruksi kepada Aidit, dan mendapat laporan dari Aidit, memberi perintah kepada Supardjo tentang pergerakan pasukannya, sementara pada waktu bersamaan ia tetap menolak tekanan Suharto, Nasution dan AD agar komplotan itu digulung. Presiden ternyata sangat kuat dalam perannya yang baru ini, paling tidak pada tahap-tahap awal, karena dikelilingi

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

oleh rekan-rekannya sesama anggota komplotan itu—Subandrio, Omar Dhani, Supardjo—yang memiliki sumberdaya yang sangat besar untuk memainkan permainan *Vivere Pericoloso* ini.

Setelah Nasution kembali dari rumah sakit ke KOSTRAD pada 2 Oktober, Pranoto melapor kepadanya bahwa Suharto dan dia akan pergi bersama-sama ke Bogor untuk membicarakan persoalan yang dihadapi dengan Presiden, dan kembali Nasution menyarankan agar dia menanggukuhkan menerima pengangkatannya sebagai *caretaker* AD, sampai Suharto selesai dengan tugasnya membersihkan akibat-akibat GESTAPU. Tidak lama kemudian masuk laporan dari Kolonel Sarwo Edhy bahwa ia telah menguasai Halim, tetapi upaya mencari jenasah para jenderal yang diculik itu belum berhasil. Sarwo Edhy juga melapor kepada Nasution bahwa dari Halim ia terbang dengan helikopter ke Bogor, dan di situ ia bertemu dengan Jenderal Ibrahim Adjie yang baru saja selesai menghadap Presiden, dan bahwa ia sendiri telah bertemu dengan Presiden. Dikatakannya kepada Presiden bahwa untuk memulihkan keamanan di Halim, pasukan Batalyon 454 harus ditarik seluruhnya dari situ. Presiden setuju, dan menambahkan bahwa ia akan memerintahkan kepada Brigjen Supardjo untuk menarik pasukan itu. Ketika Kolonel itu menanyakan mengapa harus Supardjo, di mana hirarki komando, Presiden menjawab bahwa hirarki tidak berlaku sekarang karena semua pasukan di Halim berada di bawah komando Supardjo.

Kemudian, Presiden memerintahkan Supardjo, yang sedang berada di istana saat itu, untuk menarik pasukannya, dan memberikan salinan asli perintah itu kepada Mayor Jenderal Sri Muljono Herlambang, karena Omar Dhani masih di Jawa Timur, dan satu salinan lagi kepada Sarwo Edhy. Untung, ketua Dewan Revolusi yang sekarang sudah bubar itu, menghilang dan Supardjo, karena hubungannya dengan perwira-perwira revolusioner di dalam angkatan bersenjata, menjadi satu-satunya alat utama bagi Presiden dalam manuvernya untuk menangkis tekanan Suharto.

Kolonel Sarwo Edhy juga melapor kepada Presiden setelah Halim dikuasainya bahwa ia mencari sia-sia mencari jenasah para jenderal yang diculik, menanyakan kepada Presiden tentang nasib mereka, dan dipotong dengan jawaban yang disertai amarah bahwa “hal seperti itu biasa dalam sebuah revolusi.” Sikap kasar Presiden, perintahnya kepada Supardjo dan perilakunya di Bogor membuat kolonel ini sangat terganggu, dan ia meninggalkan istana Presiden dengan hati sangat kecewa, setelah melihat dengan mata kepala sendiri betapa pongahnya dan bahkan kasarnya Presiden dalam melindungi anggota-anggota komplotan itu.

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

Suharto dan Pranoto pergi bersama-sama dari KOSTRAD ke Bogor menjelang senja pada 2 Oktober, untuk bertemu Presiden guna menyelesaikan konflik wewenang antara posisi *caretaker* AD yang menggantikan Yani, karena Suharto diangkat oleh Menko Hankam/KASAB Nasution, sedangkan Pranoto oleh Presiden. Tampaknya selama dalam perjalanan kedua jenderal itu telah mencapai kata sepakat. Suharto akan membiarkan Pranoto memegang posisi yang telah ditentukan oleh Presiden, sedangkan Pranoto berjanji akan mendukung pengangkatan Suharto sebagai penanggung jawab operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia. Dan seperti telah kita lihat, inilah yang terjadi, seperti terbukti dalam perintah Presiden yang dikeluarkan pada 3 Oktober 1965, pukul 01.30.²⁵⁹

Juga ada kemungkinan besar bahwa kedua jenderal itu membicarakan selama dalam perjalanan ke Bogor bukti-bukti yang ada di KOSTRAD mengenai dampak lebih luas GESTAPU, yang dilihat Pranoto selama dua hari ia berada di situ, dan setuju untuk mengutuk GESTAPU sebagai avonturisme dalam siaran radionya menerima pengangkatannya oleh Presiden sebagai *caretaker* AD. Pranoto bertemu dengan Supardjo di istana Presiden yang mendesak, melalui Endang, agar Pranoto mengumumkan bahwa ia adalah pimpinan AD dan menunjukkan segera wewenangnya dengan mengadakan pengangkatan-pengangkatan baru di lingkungan staf. Namun, Supardjo sangat kecewa ketika akhirnya ia mendengar pengumuman Pranoto di radio, karena Pranoto mengutuk GESTAPU sebagai perbuatan petualangan. Supardjo melihat kutukan ini sangat fatal akibatnya karena mengendorkan semangat gerakan revolusioner di propinsi-propinsi, terutama di Jawa, dan melihatnya sebagai salah satu faktor yang menyebabkan GESTAPU gagal di luar Jakarta.²⁶⁰

Dalam pertemuan dengan dua jenderal itu, Presiden sangat marah kepada Suharto karena Suharto tidak mau mematuhi perintahnya, yang disampaikan kepadanya oleh Widjanarko pada 1 Oktober, yakni tidak mengizinkan Jenderal Umar dan Jenderal Pranoto meninggalkan KOSTRAD dan menghadapnya di rumah Susanto di Halim. Presiden juga memarahi Suharto karena memerintahkan Sarwo Edhy menguasai Halim, dan sebelumnya menguasai stasiun radio dan Pusat Komunikasi. Namun, Suharto tetap pada pendiriannya bahwa kegiatan-kegiatan Omar Dhani jelas menunjukkan bahwa oknum-oknum AURI terlibat dalam GESTAPU, dan juga PKI, dan mendesak Presiden agar mengambil langkah tegas terhadap mereka. Presiden menjawab tuduhan-tuduhan Suharto dengan pernyataan berikut yang dikeluarkan pada 4 Oktober:

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

1. Tuduhan terhadap AURI tentang tersangkutnya dalam Gerakan 30 September, ini adalah tidak benar;
2. Kepergian saya di Pangkalan Udara Halim pada 1 Oktober pagi-pagi adalah kehendak saya sendiri, karena saya berpendapat Halim tempat yang terbaik bagiku ialah tempat dekat kapal udara yang dapat membawa saya setiap saat ke tempat lain kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan;
3. Kita harus tetap waspada jangan sampai AURI dan AD dapat diadudombakan, sehingga pihak Nekolim dan pihak-pihak lain akan mendapat keuntungannya. Maka saya perintahkan supaya semua anggota seluruh Angkatan Bersenjata bersatu padu demi keselamatan negara dan revolusi.”²⁶¹

Sementara itu, Omar Dhani kembali dari Madiun, tempat ia mendarat pada pagi hari 1 Oktober, setelah berputar-putar di atas Jawa selama enam jam dan mengancam akan menyerang KOSTRAD dengan roket. Jenderal Suharto sekarang berjumpa dengan Dhani di istana Presiden di Bogor, dan dengan mandat baru di tangan, sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) dan karena peristiwa GESTAPU, Suharto menanyakan kepada Dhani tentang dimana kira-kira jenazah para jenderal yang diculik. Dhani menjawab bahwa ia tidak tahu, tetapi berjanji akan menghubungi Supardjo, yang berada di istana, untuk mencari informasi tentang nasib para jenderal itu.

Dhani, tentu saja, tidak menyampaikan hal yang sebenarnya kepada Suharto. Sebelumnya, diterima radiogram dari Halim yang mengatakan bahwa jejak-jejak yang ditemukan menunjukkan ada tanda-tanda jenazah manusia. Radiogram diserahkan kepada Omar Dhani dan Presiden, dan kemudian dibahas oleh Presiden dengan Subandrio, Leimena, Omar Dhani dan Sabur. Setelah pembahasan itu, Presiden kemudian memerintahkan Kolonel Saelan dan satu regu dari resimen Tjakrabirawa untuk pergi ke Halim untuk mencari jenazah-jenazah itu, memindahkannya dan menghapus semua jejak.²⁶² Regu itu berangkat pada senja hari dari Bogor dan, karena gelap, regu itu membawa serta lampu sorot dan peralatan lainnya. Pada saat mereka tiba di Lubang Buaya muncul pula satu unit anak buah Sarwo Edhy di tempat itu, dan pencarian terpaksa dibatalkan. Namun, Sarwo Edhy dan anak buahnya kembali esok harinya, dan menemukan sumur berisi jenazah-jenazah itu dan melaporkan temuan yang mengerikan itu kepada Jenderal Suharto.

Suharto, Nasution dan perwira tinggi lainnya dari KOSTRAD pergi ke Lubang Buaya pada 4 Oktober, dan menemukan jenazah ke enam jenderal itu,

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

dan mayat Letnan Piere Tendean, ajudan Nasution. Pada malam harinya, pukul 20.00, Jenderal Suharto mengumumkan melalui siaran radio mengenai nasib keenam jenderal itu, penyiksaan yang dilakukan GERWANI sebelum mereka dibunuh, keterlibatan AURI dalam GESTAPU, dan bahwa AD dan angkatan-angkatan yang lain sedang menyelidiki hal itu dan bekerja keras untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di seluruh negeri.²⁶³

Sikap Presiden yang tidak menunjukkan kepekaan di istana Bogor, sikapnya yang menolak mengutuk GESTAPU, pembunuhan para jenderal, dan keterlibatan AURI dan PKI dalam peristiwa itu, meski sudah banyak bukti diajukan untuk itu, menimbulkan amarah para jenderal AD, sehingga mereka mengadakan pertemuan di KOSTRAD pada malam 3 Oktober untuk menghadapi Presiden. Karena Presiden telah menetapkan akan mengadakan sidang Kabinet Dwikora pada 6 Oktober, para jenderal itu memutuskan untuk mengadakan briefing khusus bagi semua menteri yang tinggal di Jakarta untuk memberi mereka informasi sebelum menghadiri sidang di Bogor, mengenai tujuan-tujuan GESTAPU dan pendukungnya, yakni AURI dan PKI. Briefing itu diadakan sesuai rencana pada 4 Oktober, dan beberapa anggota tim penyelidik dari Kodam V Jaya memaparkan bukti-bukti yang cukup banyak tentang keterlibatan AURI dan PKI dalam peristiwa itu, yang diperoleh dari beberapa pelaku yang tertangkap dan diinterogasi hingga saat itu. Penyelenggara briefing khusus itu mengundang Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo untuk memberikan informasi kepada para menteri tentang kejadian-kejadian di rumah Susanto di Halim pada 1 Oktober, dan ketua tim penyelidik Suharto memutar kaset yang berisi interogasi anggota satuan yang memimpin pembunuhan Jenderal Yani. Bukti-bukti yang dikemukakan sangat mengejutkan, dan meninggalkan kesan yang dalam pada semua yang hadir.

Para jenderal itu juga memutuskan untuk menyerahkan sebuah resolusi kepada Presiden, meminta agar tuduhan-tuduhan terhadap AD diselidiki oleh sebuah komisi yang tidak memihak. Resolusi itu menyatakan dengan tegas bahwa pimpinan puncak AD siap untuk diadili bila berbagai tuduhan itu dibuktikan benar oleh komisi, tetapi juga menuntut agar para penuduh diadili jika tuduhan-tuduhan itu terbukti tidak benar. Sementara Jenderal Suharto memimpin operasi pemulihan keamanan dan ketertiban dan membawa para pelaku kejahatan yang sangat mengerikan ini ke depan pengadilan, resolusi menyimpulkan bahwa harus diambil semua langkah yang diperlukan untuk menyadarkan Presiden bahwa GESTAPU adalah petualangan kontra-revolusioner yang dikendalikan dari belakang oleh PKI.

SIDANG PARIPURNA KABINET DI BOGOR 6 OKTOBER: PERSEKUTUAN SUKARNO-AIDIT BERTAHAN

Sidang kabinet itu, yang ironisnya diberi nama Paripurna, yang berarti sempurna atau lengkap, diadakan di istana Bogor pada 6 Oktober 1965. Sidang itu menjadi tempat konfrontasi besar yang pertama antara kedua kekuatan yang bertarung untuk mencapai supremasi sampai 11 Maret 1966, ketika Presiden menderita kekalahan mutlak dengan dilucutnya semua kekuasaannya oleh MPRS dan ia digantikan oleh Jenderal Suharto.

Sidang kabinet itu tidak menguntungkan bagi Jenderal Suharto dan pengikutnya di AD. Meski Jenderal Nasution menyerahkan sebuah resolusi, atas nama perwira-perwira tinggi, untuk dibahas oleh kabinet, dan Jenderal Suharto meminta agar PKI dibubarkan, dokumen-dokumen ini tidak mendapat perhatian yang semestinya. Jenderal Suharto menyerahkan, sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, sebuah laporan tertulis tentang penyelidikannya atas GESTAPU dan, berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, meminta kabinet membubarkan PKI. Ia memberikan laporan ini kepada Widjanarko, yang meneruskannya kepada Presiden untuk dimasukkan ke dalam agenda sidang.²⁶⁴

Justru, sidang itu didominasi oleh Aidit melalui suratnya kepada Presiden, yang disusun di Blitar pada 6 Oktober, yang mengusulkan penyelesaian politik bagi akibat-akibat GESTAPU. Surat itu tidak saja mewarnai jalan sidang kabinet itu, yang berisi alasan-alasan bagi Pengelabuan Besar dan sanggahan atas fakta-fakta yang sudah terbukti, tetapi juga menyebut kegiatan-kegiatan Jenderal Suharto dan Nasution sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan Dewan Jenderal, yang tidak pernah ada itu, pada hari-hari sebelum kudeta. Teori baru ini, yang dikemukakan Aidit kepada kabinet melalui suratnya kepada Presiden, menghembuskan kehidupan baru pada fiksi tentang adanya Dewan Jenderal. Seperti telah kita lihat, Aidit menciptakan fiksi ini pada bulan April untuk digunakannya sebagai alasan untuk menempuh jalan pintas menuju kekuasaan dan sekarang, setelah jalan pintas itu gagal, ia menganggap kegiatan-kegiatan Suharto, Nasution dan jenderal-jenderal lain sebagai bukti bahwa tuduhan-tuduhannya sebelumnya itu benar dan oleh karena itu menjustifikasi serangan *pre-emptive* yang dilakukannya. Jelas tidak ada kebenaran yang meyakinkan dalam kata-kata Aidit yang penuh muslihat itu. Kita telah menelusuri kegiatan-kegiatan Suharto dan Nasution secara rinci dan menemukan bahwa teori Aidit tidak benar, karena kedua jenderal itu baru

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

mulai mengambil langkah melawan Aidit pada 1 Oktober 1965 tengah hari, sedangkan Aidit sudah menciptakan tuduhan itu sejak April tahun itu.

Persiapan-persiapan untuk sidang kabinet diadakan begitu Subandrio dan Njoto kembali dari Medan pada 2 Oktober dan menghadap Presiden di istana Bogor tidak lama kemudian. Namun, ketika Njoto tiba pada 6 Oktober, tidak lama sebelum sidang dimulai, ia menghadap Presiden dan menyerahkan surat Aidit kepadanya di hadapan Subandrio, Leimena, Jusuf Muda Dalam dan Sabur. Selain itu, dalam diskusi mengenai surat Aidit itu, Njoto juga mengemukakan usul-usul secara lisan, yang memperluas usul Aidit tentang penyelesaian politik akibat-akibat GESTAPU.

Dalam sidang kabinet, Presiden meminta Njoto membacakan surat Aidit dan usul Aidit mengenai penyelesaian politik akibat-akibat GESTAPU, yang berisi butir-butir berikut: 1) penyelesaian diletakkan sepenuhnya dalam tangan Presiden; 2) pernyataan-pernyataan oleh siapa saja, yang bersifat mengutuk baik Dewan Jenderal atau pimpinan GESTAPU dilarang; 3) semua alat revolusi harus tetap bekerja seperti biasa seperti sebelum peristiwa itu; 4) Polisi, dibantu oleh Front Nasional, menjaga keamanan umum; 5) semua organ aparat revolusioner harus berlomba-lomba mewujudkan Panca Azimat Revolusi; 6) Dilarang tuduh menuduh dan salah menyalahkan.

Setelah kabinet sepakat mengenai ke enam butir ini, usul Nasution dan Suharto dipertimbangkan oleh kabinet berdasarkan keenam prinsip itu dan dinilai menghasut, karena melanggar butir 2 dan butir 6. Dalam diskusi, Presiden membela PKI mati-matian, dan mengatakan “bahwa ia tidak bersedia menuduh atau membubarkan PKI” karena partai itu “juga punya andil besar dalam Revolusi Indonesia,”²⁶⁵ dan bahwa makna peristiwa GESTAPU jangan dibesar-besarkan keluar batas. Ia juga menyesalkan Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo karena memberikan bukti-bukti mengenai kejadian di rumah Susanto pada 1 Oktober dalam pertemuan para jenderal yang diadakan Nasution pada 4 Oktober, dan kemudian berbicara tentang keterlibatan PKI dalam GESTAPU. Ketika ditanya dalam sidang kabinet mengenai pembubaran Dewan Revolusi Untung, Presiden menjawab bahwa ia tidak berniat membubarkan Dewan itu karena hanya orang-orang yang membentuknya yang berhak melakukan hal itu.

Makna dari pernyataan ini tidak dapat dianggap remeh, karena dapat membantu kita memahami manuver Presiden mulai dari saat itu sampai kejatuhannya dari kekuasaan pada Maret 1966. Pernyataan itu dengan jelas mengisyaratkan bahwa Presiden tetap berpegang teguh pada kesepakatannya dengan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Mao dan Aidit, terlepas dari kegagalan strategi Aidit di pusat komando Halim sebelum tengah hari pada 1 Oktober. Ia pada dasarnya berhasil menyelamatkan situasi di rumah Susanto dengan membawa kabinetnya ke bawah naungan Dewan Revolusi, dan mencoba membawa Dewan itu ke bawah kendalinya, dengan menggunakan kekuasaan penuh Presiden.

Tidak diragukan lagi bahwa manuver Presiden ini dapat berhasil, dan dia bersama Aidit akan mencapai saling pengertian, seandainya Jenderal Suharto tidak muncul ke atas panggung dan mencegah kesepakatan baru ini menjadi kenyataan. Mereka dikejar waktu. Pernyataan itu berarti bahwa Dewan Revolusi harus tetap ada sebagai badan hukum, tetapi sekarang di bawah kendali Presiden, untuk diaktifkan kembali bila timbul situasi baru sesuai dengan tuntutan gelombang pasang revolusioner baru, yang diperkirakan akan melanda pertama Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kemudian seluruh Indonesia.

Pada Sidang Paripurna Kabinet pada 6 Oktober itu, Presiden tidak saja menolak upaya-upaya Nasution dan Suharto untuk membela integritas dan nama baik AD, dan membawa para pembunuh enam jenderal ke pengadilan, karena ia sendiri tersangkut cukup intens dalam pembunuhan para jenderal itu, tetapi juga menerima usul Njoto agar dibentuk *Barisan Sukarno*, yang memiliki tiga tujuan pokok.

Pertama, mengerahkan kekuatan-kekuatan untuk membawa revolusi ke tahap berikutnya, yang ditandai oleh pertempuran-pertempuran jangka panjang dengan kaum reaksioner. Presiden yakin bahwa kegagalan GESTAPU hanya sebuah riak di samudera, "*eén rimpeltje in de ocean*," katanya dalam bahasa Belanda, dan bahwa revolusi harus diteruskan dalam bentuk dan dengan cara-cara lain.

Kedua, untuk melindungi Presiden dari demonstrasi berbagai organisasi massa yang bermunculan, ketika keterlibatan Presiden dan PKI dalam GESTAPU sudah menjadi rahasia umum, yang menuntut agar Presiden dan PKI, dibawa ke meja hijau.

Ketiga, menyediakan bagi Presiden kekuatan tandingan untuk menangkis tekanan yang semakin besar dari Angkatan Bersenjata, yang sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Suharto dan didorong oleh tiga tuntutan, yakni rehabilitasi AD, menghukum para pembunuh enam jenderal, dan pembubaran PKI. Njoto bahkan mengusulkan agar *Barisan Sukarno* diberi status resmi, ditempatkan di bawah kabinet, dan agar Letkol Shafiie, sebagai Menteri Negara Keamanan, memimpin lembaga perjuangan politik yang baru itu.²⁶⁶

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

Hasil sidang paripurna kabinet yang diadakan pada 6 Oktober itu, sikap Presiden melindungi PKI dan sikapnya meremehkan usul-usul Nasution dan Suharto, merupakan berita yang sangat merisaukan pihak-pihak yang menginginkan kehormatan AD dipulihkan dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar mengenai Dewan Jenderal, dan berusaha membawa PKI dan mereka yang terlibat ke depan pengadilan.

Karena itu, Jenderal Nasution mengirim nota yang terdiri dari lima butir kepada Presiden pada 10 Oktober, meminta agar: 1. menegakkan keadilan dengan segera mengadakan Mahkamah, karena bukti-bukti yang didapat sudah sangat banyak; 2. mengangkat segera Men/Pangad baru (Mayjen Suharto satu-satunya calon); 3. “*retooling*” dalam pimpinan AURI yang terlibat dalam GESTAPU; 4. pelaksanaan Pen Pres 7 terhadap orpol/ormas yang terlibat (PKI) dalam perencanaan dan pelaksanaan GESTAPU; 5. untuk mengatasi iklim fitnah yang jadi sumber penghasutan dari khianat dan aniaya besar ini (terhadap Angkatan Darat), perlu penertiban badan-badan intelijen dengan tenaga-tenaga yang berakhlak dan ahli. Akhirnya supplier fitnah inilah kiranya yang paling berdosa.²⁶⁷

Tekanan pada Presiden membawa hasil, karena semua kartu as sekarang berada dalam tangan AD. Ia membatalkan pengangkatan Jenderal Pranoto sebagai *caretaker* AD dan mengangkat Jenderal Suharto sebagai Men/Pangad baru pada 1 November 1965. Tidak lama setelah itu, Suharto memerintahkan staf Komando Operasi Tertinggi (KOTI) untuk menyiapkan kertas kerja untuk Presiden, berdasarkan bukti-bukti yang lebih dari cukup yang dikumpulkan oleh beberapa tim penyelidik hingga saat itu, yang membuktikan bahwa GESTAPU adalah gerakan kontra-revolusioner yang dibentuk oleh PKI di Jakarta dan juga di semua propinsi. Karena itu, laporan itu menuntut agar PKI dibubarkan dan para pemimpinnya dibawa ke depan pengadilan, dan memberikan bukti-bukti bahwa kedua tuntutan ini didasarkan pada dukungan yang kuat dari hampir semua organisasi massa dan politik yang muncul sementara itu di seluruh negeri. Kertas kerja itu diserahkan kepada Presiden, tetapi tidak ada jawaban dari Presiden.

Malahan, Presiden mengeluarkan perintah pada 21 Oktober yang tidak saja tidak menyinggung hal-hal yang diajukan oleh staf KOTI, tetapi juga menunjukkan bahwa ia akan mengambil langkah-langkah revolusioner yang baru, dan memulai petualangan-petualangan baru. Pernyataan Presiden itu mengatakan bahwa “apa yang dinamakan GESTAPU” jelas menunjukkan perlu adanya kewaspadaan untuk menyelamatkan revolusi dari bahaya NEKOLIM,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

sehingga revolusi dapat diselesaikan dengan segera. Untuk mewujudkan kondisi keamanan agar tujuan-tujuan revolusi dapat diwujudkan, perlu, kata pernyataannya:

1. selalu membina persatuan kesatuan dan persatuan seluruh kekuatan nasional progresif revolusioner atas dasar Panca Azimat revolusi;
2. menyingkirkan jauh-jauh tindakan destruktif seperti rasisme, pembakaran-pembakaran dan perusakan-perusakan;
3. menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan atas dasar balas dendam;
4. melarang semua demonstrasi yang tidak terlebih dahulu mendapat izin;
5. terus meningkatkan aks-aksi massa yang revolusioner secara konstruktif dan dengan disiplin nasional yang tinggi menghadapi Nekolim dan segala siasat subversifnya.²⁶⁸

Mematuhi perintah ini, Nasution menghadap Presiden untuk menghilangkan salah pengertiannya tentang AD, tetapi se usai pertemuan itu ia merasa semakin yakin bahwa Presiden sudah bertekad tidak akan menindak PKI dan para perwira yang terlibat GESTAPU, dan bahwa prasangka buruk Presiden terhadap AD tetap besar, sehingga mengaburkan penilaiannya dalam semua hal. Karena itu, para pimpinan ke empat angkatan memutuskan pembentukan sebuah komisi, yang akan disusun oleh OUDANG, dengan tugas menyelidiki ada tidaknya Dewan Jenderal. Penyelidikan yang dilakukan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada bukti-bukti yang mendukung tuduhan bahwa ada Dewan Jenderal dan rencananya untuk melancarkan kudeta, yang disebarkan sedemikian luasnya ke seluruh pelosok negeri oleh PKI pada sejak April 1965. Temuan komisi empat angkatan ini diserahkan kemudian kepada Presiden sebagai laporan tertulis, yang lagi-lagi tidak mendapat jawaban apapun dari Presiden.

Sementara kharisma Presiden dan *wahju tjakraningrat*-nya mulai pudar, demonstrasi-demonstrasi anti-Presiden bermunculan di mana-mana di seluruh Indonesia. Ketika kabinet bersidang kembali di Bogor pada 6 November, suasana di negeri itu sangat menegangkan. Meski pada mulanya mendukung dan mempercayai Presiden bahwa ia akan mampu “mengatasi persoalan-persoalan itu”—demonstrasi-demonstrasi, yang sebagian besar ditujukan pada tahap ini kepada PKI dan GESTAPU, berangsur-angsur mulai ditujukan ke arah Presiden, dengan tuntutan agar ia mengundurkan diri.

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

Demonstrasi-demonstrasi itu menjadi sangat vokal, berperan sebagai kelompok penekan yang efektif, dan mendominasi kehidupan politik di Jakarta dengan perjuangan anti-Sukarno dan anti-PKI yang dilancarkannya. Organisasi-organisasi yang paling lantang bersuara adalah organisasi buruh (KABI), guru (KAGI), mahasiswa (KAMI), sekolah lanjutan (KAPI), sekolah lanjutan dan pemuda (KAPPI), cendekiawan (KASI), wanita (KAWI), dan berbagai kelompok Islam. Pada 8 Oktober 1965, beberapa ribu Pemuda Ansor (pemuda partai Nahdlatul Ulama) membakar habis kantor pusat PKI di Jalan Kramat. Kelompok-kelompok ini bekerja sama dan membentuk sebuah Front Aksi untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan mereka, dan mengajukan tuntutan yang disebut *Tiga Tuntutan Rakyat*, TRITURA, yakni: 1. bubarkan PKI; 2. bersihkan kabinet dari unsur-unsur komunis dan anggota-anggota yang tidak kompeten; 3. turunkan harga kebutuhan pokok. Segera saja Jakarta dan berbagai kota di seluruh Indonesia diliputi oleh sentimen anti-komunis dan anti-Cina yang berkobar-kobar, yang diikuti kemudian oleh aksi bakar membakar rumah-rumah dan penghancuran nyawa dan harta yang tidak kenal ampun. Di berbagai propinsi “hari pembalasan telah tiba,” yang menenggelamkan negeri itu ke dalam teror dan pertumpahan darah.

Pada 9 November 1965, Jakarta menyaksikan demonstrasi besar-besaran yang pertama, yang diadakan di Lapangan Banteng oleh Badan Koordinasi Penumpasan Gerakan Kontra-Revolusi 30 September, dan menuntut pembubaran PKI segera. Presiden menjawab dalam waktu 24 jam, pada saat peringatan Hari Pahlawan, hanya dengan kata-kata bahwa ia akan “mempertimbangkan hal itu.” Ia dalam keadaan sangat gundah, ia terus-menerus mengulangi bahwa revolusi harus jalan terus, dan mengancam semua orang dengan tindakan balasan kilat. Di sinilah, untuk pertama kalinya, *wahju tjakraningrat* dan kharismanya, disaksikan oleh semua orang, tampak jelas mulai pudar.

MEMPERTAHANKAN STATUS HUKUM PKI

Karena AD sudah bertekad untuk menghancurkan PKI sebagai kekuatan politik di panggung nasional, melalui tindakan balasan tidak saja terhadap pimpinannya tetapi juga anggota-anggotanya—partai-partai politik dan orang perorangan tidak lama kemudian ambil bagian untuk menyelesaikan dendam pribadi—upaya Aidit, Lukman dan Njoto untuk mempertahankan legalitas PKI sia-sia belaka. Dalam situasi seperti ini, maka perhatian PKI tertuju terutama pada

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

upaya menyelamatkan nyawa pimpinan partai dan anggota-anggotanya. Tema utama ini tampak nyata dalam semua dokumen partai yang dikeluarkan menjelang akhir 1965.

Dokumen pertama adalah pernyataan Politbiro, yang dikeluarkan Aidit pada 6 Oktober, dan dibacakan oleh Njoto dalam sidang kabinet hari itu. Kemudian keluar pernyataan kedua Politbiro pada 10 Oktober 1965, yang mengatakan bahwa pembakaran terencana menghancurkan sampai runtuh kantor pusat partai dan rumah-rumah pribadi para pimpinan dan anggotanya, padahal partai mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden bahwa harus dicari penyelesaian politik bagi peristiwa 30 September.²⁶⁹ Pada 15 Oktober, CC PKI mengirimkan surat kepada presidium kabinet meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah terhadap “kaum anarkis dan elemen-elemen yang bertekad menghancurkan kekayaan” PKI, karena mereka melanggar hukum dan ketertiban.²⁷⁰

Pernyataan terakhir muncul dalam bentuk Seruan Komite Pembela Partai Komunis Indonesia, yang dikeluarkan di Jakarta pada 20 November 1965. Seruan itu dikeluarkan dalam upaya untuk menyangkal, butir demi butir, tuduhan-tuduhan bahwa PKI terlibat dalam Gerakan 30 September, dan kemudian mengajukan protes sangat keras atas likuidasi fisik anggota-anggotanya dan penghancuran harta milik mereka. Seruan itu mengatakan bahwa dengan dalih menumpas Gerakan 30 September:

“kaum reaksioner mencoba melakukan tindakan-tindakan represif terhadap seluruh PKI dan para pendukungnya di pabrik-pabrik dan pelabuhan-pelabuhan, di perkebunan-perkebunan, dan di pedesaan. Bahkan, mereka mencoba melarang Marxisme sebagai sebuah doktrin dan komunisme sebagai sebuah ideologi. Pada waktu terjadi peristiwa Madiun, Hatta melancarkan “kampanye melawan kaum Merah” atas dasar informasi yang digunakannya terlepas dari “apakah informasi itu benar atau tidak,” dan hari ini Hatta-Hatta kecil melakukan hal yang persis sama—”tuduhan terlibat langsung atau tidak langsung.”

Sama halnya dengan peristiwa Madiun yang didahului dengan penyebaran dokumen-dokumen palsu yang dikatakan dikeluarkan oleh PKI, sekarang juga ada dokumen-dokumen palsu yang disebar dan dikatakan dikeluarkan oleh PKI. Koran got bahkan menerbitkan dokumen-dokumen palsu, yang dikatakan ditemukan tidak saja di kantor pusat PKI tetapi juga di kantor Partindo, Perti dan PNI.

Dengan “alasan-alasan” yang tidak berdasar seperti diuraikan di atas, sejumlah partai politik, di atas semuanya IPKI, Partai Katolik, Partai

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

Protestan, Partai NU (sebuah partai Islam), dan PSII (juga sebuah partai Islam), menuntut pembubaran PKI . . .

Presiden Sukarno telah menyerukan agar keamanan dan ketertiban dijaga, dan PKI menjawab seruannya dengan perbuatan nyata. Tidak ada satupun pembakaran atau pelanggaran keamanan umum dilakukan oleh PKI. Semua tindakan semacam itu dilakukan oleh kaum Kanan. Hanya karena PKI mentaati seruan Sukarno maka PKI tidak melancarkan aksi membela diri habis-habisan. Tetapi jika penganiayaan anggota-anggota PKI terus berlangsung dan jika dilakukan, seperti pada masa lalu, berdasarkan “perkiraan” dan hasutan, maka lebih beralasan lagi bagi para anggota PKI untuk membela diri.

Komite Pembela PKI dibentuk karena PKI, sebuah partai revolusioner, diperlakukan secara tidak adil. Seruan ini ditujukan kepada semua orang yang masih mampu dan mau menggunakan akal nya.”²⁷¹

Ini jelas sebuah pengelabuan besar, seperti pengelabuan yang disampaikan kepada Presiden oleh Aidit dalam suratnya tertanggal 6 Oktober 1965, seperti telah dikutip di atas. Suharto dan militer lebih tahu situasi, karena jauh sebelum hari Presiden mengeluarkan pernyataannya, yakni tanggal 21 Oktober, mereka sudah berhasil menangkap dan memenjarakan anggota-anggota penting komplotan itu dan memperoleh kesaksian mereka. Bukti-bukti yang memberatkan Omar Dhani banyak sekali. Pertama, ia bersembunyi di Istana Bogor sejak ia kembali dari Madiun pada 2 Oktober, dan di situ ia menarik kembali Perintah Hariannya tanggal 1 Oktober yang menempatkan AURI di bawah naungan GESTAPU. Untuk melepaskan diri dari tekanan yang semakin besar dari KOSTRAD atas Presiden agar Omar Dhani diperiksa, Presiden memberinya tugas ke luar negeri pada 19 Oktober 1965, tetapi ia akhirnya ditangkap pada 21 April 1966.²⁷² Sejumlah menteri yang terlibat juga mencari perlindungan di bawah naungan Presiden, seperti menteri Oei Tjoe Tat, yang berperan sebagai kontak utama Subandrio dan PKI dengan Peking dan Kedutaan Besar Cina di Jakarta.²⁷³ Namun, karena tidak mendapat perlindungan langsung dari Presiden, nasib rekan-rekan sekomplotan dengan Dhani tidak terlalu baik. Latief ditangkap pada 9 Oktober, 1965, Untung pada 11 Oktober, Aidit pada 22 November 1965 dan tidak lama kemudian ditembak mati di sebuah desa dekat Solo. Kemudian ditangkap Njono, Sudisman dan Sjam, pada 9 Maret 1967, tengah malam, dan Lukman ditembak mati tanpa diadili. Supardjo ditangkap pada awal 1967.

Seandainya para pimpinan komplotan itu tidak ditangkap dan dibawa ke depan pengadilan terbuka, pengelabuan itu, bahwa PKI tidak terlibat dalam

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

GESTAPU, kemungkinan besar akan dipercaya. Namun, perlu diingat bahwa seluruh operasi Politbiro disusun sedemikian rupa, sehingga memberikan ruang bagi partai untuk menjauhkan diri dari tindakan Untung, dan menyediakan celah untuk mengundurkan diri jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Kita telah melihat betapa hati-hati dan lihai nya Aidit, bahkan pada waktu di Halim ia tetap berada di belakang layar dan membiarkan orang-orangnya di garis depan, Untung dan, di atas semuanya, Supardjo, untuk bertindak atas namanya. Kendali jarak jauhnya sedemikian sempurna, sehingga seandainya pimpinan komplotan itu tidak tertangkap dan dibawa ke depan pengadilan, boleh dikatakan tidak akan mungkin dibuktikan ada kaitan antara PKI dengan tindakan Untung. Namun, anggota-anggota komplotan yang tertangkap itu membuka mulut, memberikan kesaksian, dan membuktikan bahwa ada kaitan antara PKI dengan Gerakan 30 September, bahwa Biro Khusus dan Direktornya Sjam bertugas sebagai *liaison*, dan bahwa dalam kenyataan seluruh peristiwa itu disetujui oleh tiga rapat Politbiro, yang diadakan pada 11, 26, dan 28 Agustus. Pertemuan pertama Politbiro diadakan lima hari setelah Aidit kembali dari Peking dan dalam hanya tiga hari setelah tercapai kesepakatan dengan Presiden di Istana Bogor pada 8 Agustus 1965.

Berbeda dengan setelah Peristiwa Madiun 1948, anggota-anggota komplotan itu dibawa ke depan pengadilan. Dua anggota Politbiro, Njono dan Sudisman, Direktur Biro Khusus, Sjam, dan pemimpin-pemimpin yang lain memberikan kesaksian bahwa Gerakan 30 September adalah ciptaan PKI dan bahwa partai itu mencoba melakukan *coup d'état* pada 1965 sebagai jalan pintas menuju kekuasaan. Suharto dan militer mengharapkan pengadilan terbuka atas anggota-anggota komplotan itu dapat menghindari terulangnya “Legenda Madiun” dan mengakhiri tuduhan-tuduhan bahwa proses pengadilan atas PKI setelah peristiwa GESTAPU tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan tuduhan-tuduhan palsu, dan bahwa partai itu korban tidak berdosa “Teror Putih.” Namun, dongeng itu sulit lenyap di Indonesia, seperti terlihat dari perdebatan dalam masyarakat luas tentang GESTAPU yang mengguncang negeri itu pada waktu buku ini ditulis pada 2001, sekitar 36 tahun kemudian.

PEMBANTAIAN BESAR-BESARAN TIADA TARA

Pembantaian yang menimpa PKI akibat GESTAPU terjadi sangat cepat dan tanpa ragu-ragu. Berdasarkan mandat yang diperoleh Jenderal Suharto dari

Penghancuran PKI: Agen Kekuatan Asing

Presiden pada hari pertama kudeta, yaitu 2 Oktober 1965, maka Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) meluncurkan, mendukung dan mendorong kampanye teror yang tidak ada tara dalam sejarah modern Indonesia: PKI dilarang dan kemudian secara fisik dihancurkan sebagai organisasi politik. Operasi-operasi militer disertai oleh balas dendam pribadi dan kelompok, dengan akibat banyak orang yang tidak berdosa lenyap, terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa. Sebuah penelitian oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh Komando Operasi Tertinggi (KOTI) pada 23 Desember 1965 melaporkan dalam *Angkatan Bersendjata* pada 10-11 Februari 1966, jumlah korban tewas dalam pembantaian itu: Jawa Timur 54.000; Bali 12.500; Jawa Tengah 10.000; Sumatra Utara 2.000. Jumlah total korban adalah 78.500 orang. Sejak itu perkiraan tentang jumlah korban jiwa dalam pembantaian itu berkisar antara 200.000 hingga 400.000. Selain itu, beribu-ribu kader PKI dari berbagai daerah di Indonesia dan pimpinan kudeta dari pihak militer, dijatuhi hukuman penjara puluhan tahun yang harus dijalankan di kamp-kamp pengasingan.²⁷⁴

Penelitian ilmiah yang paling menyeluruh tentang pembantaian itu, yang terjadi setelah GESTAPU gagal, dilakukan oleh Hermawan Sulistyono dan diterbitkan pada Juli 2000. Penelitiannya didasarkan pada perkiraan-perkiraan jumlah korban oleh sekitar 50 peneliti yang telah mempelajari besaran pembantaian itu. Perkiraan-perkiraan ini berkisar dari perkiraan rendah sebesar 70.000 (menurut Brackman), hingga satu juta (menurut Mody, Pluvier, Robinson dan Tornquist).²⁷⁵

Baru sekitar 30 tahun kemudian, pada Juli 1995, sebagai jawaban atas kecaman yang luas tentang pelanggaran HAM di Indonesia, pemerintah Presiden Suharto mencabut kode ET, yang berarti Eks Tahanan Politik, dari kartu penduduk sekitar 1,3 juta warganegara, yang telah ditahan karena dianggap tersangkut GESTAPU, tetapi tidak pernah di bawa ke depan pengadilan.

Namun, tahanan yang paling terkenal, Kolonel Abdul Latief yang bertugas menangkap keenam jenderal pada waktu kudeta 1965, dibebaskan dari penjara Cipinang, Jakarta, tidak lama setelah diwawancarai pada 24 Mei 1998.²⁷⁶ Seperti telah kita lihat, Latief mengatakan dalam wawancara itu, bahwa pada 30 September 1965, pada malam menjelang kudeta, ia menghadap Jenderal Suharto dan melaporkan kepadanya tentang rencana Untung, dan lain-lain, untuk menangkap pucuk pimpinan Angkatan Darat karena berkomplot menentang Presiden Sukarno. Karena Suharto “sudah tahu lebih

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dahulu” tentang kejadian-kejadian ini, dan karena ia “tidak melaporkan” hal ini kepada atasannya, Latief menuntut agar Suharto ditahan dan dibawa ke depan pengadilan atas tuduhan tersangkut pembunuhan enam jenderal itu. Namun, Latief tidak menyebutkan dalam wawancaranya itu bahwa atasan Suharto, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata sendiri, Presiden Sukarno, tidak saja “sudah tahu lebih dahulu” tentang tindakan Untung, tetapi juga kenyataan bahwa enam jenderal itu “dibersihkan” atas dasar perintah eksplisit kepada Untung pada 4 Agustus 1965, seperti dikatakan Widjanarko dalam kesaksiannya yang dikutip dalam buku ini. Kolonel Latief tidak dapat memberikan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Jenderal Suharto terlibat GESTAPU, bahkan juga tidak dalam bukunya yang terbit baru-baru ini di Jakarta pada tahun 2000.



XIII

KESIMPULAN

MENGAPA AIDIT GAGAL?

Penulis percaya bahwa tindakan Aidit meletakkan kesalahan atas kegagalan GESTAPU terutama pada pundak Presiden benar adanya, karena Presiden tidak memenuhi janjinya untuk membentuk Kabinet Gotong Royong setelah pembersihan dilakukan (DOKUMEN No. 2), dan karena Presiden berubah sikap tentang rencana kepergiannya ke Cina untuk beristirahat di Danau Angsa. Mengapa Presiden melakukan hal itu, hanya dapat dijawab dengan rekaan saja, karena rahasia ini dibawanya sampai ke dalam kubur di Blitar tempat ia dimakamkan pada 1970. Kemungkinan besar sebabnya, selain dari sebab-sebab lain, adalah kesehatannya yang membaik setelah ia jatuh pingsan pada 4 Agustus 1965. Seperti diceritakan Dr. Leimena kepada penulis pada 1968, dan seperti kesaksian Dr. Mahar kemudian, Presiden berada dalam keadaan sekuat “banteng,” penuh semangat, kekuatan dan kharisma, selama beberapa minggu menjelang kudeta. *Wahju tjakraningrat* belum meninggalkannya. Dalam kondisi seperti itu ia tidak ingin beristirahat tetapi bertekad untuk tetap memegang kekuasaan dan mengemudikan negara. Jelas, ia ingin memimpin negara sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi, meski berpasangan dengan Aidit sebagai perdana menteri, ke tahap berikut revolusi. Ia ingin tetap setia pada gelar kehormatan yang dipanggulnya—Pemimpin Besar Revolusi dan Penyambung Lidah Rakyat—yang sangat dicintainya itu.

Jika ini memang tujuan-tujuan Presiden yang sebenarnya, ia seharusnya mendukung—begitu Supardjo melapor kepadanya di Pusat Komando Halim pada pukul 10.30 atau sekitar itu—pembentukan Dewan Revolusi, menem-

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

patkan dirinya sendiri sebagai pimpinannya, sebagai Presiden, membentuk Kabinet Gotong Royong dengan Aidit sebagai perdana menteri, dan kemudian mengumumkan pemerintahan baru itu melalui siaran radio ke seluruh negeri. Ini akan memberikan isyarat yang benar bagi Aidit, untuk datang dengan “tangan terbuka” menghadap Presiden dan melangkah bersamanya dan bukan menentanginya, seperti dikatakan Supardjo dalam OTOKRITIK-nya (DOKUMEN No. 4). Hal itu juga akan dengan jelas memberi isyarat kepada Jenderal Suharto di KOSTRAD tentang ke arah mana Presiden bergerak dan angin bertiup, yang sudah menunggu-nunggu untuk melihat kepada siapa Presiden memihak, isyarat yang menuntunnya untuk mengikuti bintang pedomannya dan, kemungkinan besar memihak Presiden. Namun ketika berada di Pusat Komando Halim, Presiden menyetujui pembersihan itu namun menegaskan kembali posisinya sebagai kepala negara dengan menolak mengakui Dewan Revolusi, yang menyebabkan Aidit kehilangan pegangan dan memperkuat tekadnya untuk maju terus tanpa Presiden.

Meski Presiden menyelamatkan situasi pada waktu makan siang di rumah Susanto dengan membawa kabinetnya ke bawah naungan Dewan Revolusi dan mengangkat calon Aidit, Pranoto, sebagai *caretaker* AD, Aidit ternyata tidak menyadari bahwa Presiden sebenarnya sudah mulai masuk perangkapnya (Aidit). Ia seharusnya bersikap terbuka kepada Presiden, mendukung seperti kata Supardjo dalam OTOKRITIK-nya dan mengakuinya sebagai kepala negara. Sudah jelas bahwa Presiden tidak dapat disingkirkan di bawah kondisi yang telah diciptakannya di Halim pada saat itu. Ada kemungkinan besar bahwa Presiden dan Aidit dapat mencapai kesepakatan dalam sebuah tawar menawar yang baru—Presiden mengakui Dewan Revolusi dan membentuk kabinet Gotong Royong, sedangkan Aidit membiarkan Presiden tetap menjadi kepala negara—seandainya Jenderal Suharto tidak campur tangan dalam proses itu, yaitu seandainya Presiden dan Aidit memiliki waktu yang lebih banyak untuk mewujudkan hasil tawar menawar itu. Dalam pandangan Supardjo, di sinilah letak bagian dari tanggung jawab Aidit dalam kegagalan GESTAPU.

Dalam OTOKRITIK-nya Supardjo selanjutnya berbicara tentang strategi yang seharusnya diambil Aidit, setelah Aidit kehilangan pilihan untuk melangkah bersama Presiden menuju penyelesaian politik pasca penculikan para jenderal di Pusat Komando Halim sekitar pukul 10.30, dan sebelum Presiden sempat memanggil menteri-menterinya. Di sini Supardjo menyiratkan bahwa Aidit seharusnya terus melangkah, dan secara radikal, “tanpa” Presiden. Langkah radikal seperti itu berarti Presiden harus dilumpuhkan, dengan

Kesimpulan

memerintahkan Untung untuk menangkapnya, atau menggunakan Pemuda Rakjat dan Gerwani dari Pondok Gede untuk menurunkan Presiden dari kekuasaan. Ini lalu diikuti dengan menempatkan Omar Dhani di kursi Presiden, seperti telah direncanakan, membentuk kabinet baru, dan menerbitkan dekrit tentang pembentukan tentara rakyat dengan segera,²⁷⁷ untuk menghadapi seluruh negeri dengan sebuah *fait accompli* pemerintah baru itu. Andaikan ini dilakukan sebelum tengah hari pada hari itu, dan andaikan ini disertai seruan Presiden baru bagi pembangkangan umum di propinsi-propinsi dan ambil alih kekuasaan setempat, yang landasannya telah digariskan oleh Biro Khusus sejak Agustus, GESTAPU mungkin sekali berhasil.

Terlepas dari seberapa jauh skenario radikal ini dapat diterima Supardjo, ia sendiri sebenarnya menilai skenario itu dalam OTOKRITIK sebagai penuh persoalan, karena, dalam pandangannya, Omar Dhani tidak bersedia menentang Presiden di bawah kondisi yang ada di Halim pada waktu itu. Karena itu, strategi Aidit untuk melangkah terus “tanpa” Presiden, dengan mencoba menyingkirkannya, tidak realistis.

Jadi, satu-satunya yang konstan dalam cakrawala politik Indonesia pada waktu kudeta 30 September 1965 adalah bintang pedoman Presiden Sukarno. Aidit harus membayar mahal karena melanggar aksioma ini dengan mencoba maju terus tanpa Presiden, sementara Jenderal Suharto mendulang manfaat politik yang besar karena mematuhinya, yang memungkinkannya berkuasa selama tiga puluh tahun.

Namun, keadaan penuh dengan ketidakpastian bagi Aidit. Seluruh negeri berada dalam jangkauannya. Jika dicari satu faktor tunggal yang menjelaskan tentang nasib malang yang menimpa Aidit, maka barangkali faktor itu adalah keadaan psikologis orang nomor satu komunis itu. Dialah yang memimpin PKI bangkit dari bencana Peristiwa Madiun 1948, dan membawanya ke kejayaan dan kekuatan pada 1965, tidak melalui penerapan perjuangan kelas yang sengit, tajam, dan militan, tetapi dengan menggunakan elemen-elemen terbaik alam pikiran dan tindakan sinkretik dalam tradisi Jawa, yang dilambangkan dalam kata-kata yang sangat disukainya, bahwa ia “meng-indonesiakan Marxisme.” Di Halim ia membuang semua pengalaman selama hidupnya ini, yang telah demikian banyak berguna bagi partainya di masa lalu, karena ia dijerumuskan ke dalam tindakan tergesa-gesa yang sebenarnya tidak perlu terjadi oleh Mao dan kepentingan-kepentingan strategis Cina, sebuah kekuatan asing.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Jadi, berdasar analisis ini, antara pukul 11 pagi hingga pukul 2 siang, pada 1 Oktober 1965-lah ia kehilangan pegangan, yang berakibat menimbulkan kutukan yang tidak ada duanya dan kehancuran atas partai yang telah dipimpinnya dengan brilian selama 15 tahun, karena ia tidak mau bersikap terbuka kepada Presiden dan merangkulnya.

Apakah ada seorang Aidit lain, yang tidak saja seorang Indonesia yang baik tetapi juga barangkali seorang Leninis atau Maois yang lebih baik, yang bersedia melumpuhkan Presiden pada saat yang tepat dan bukannya mengadakan musyawarah berlarut-larut dengan dia, yang dapat memimpin PKI keluar dari Zaman Kegelapan? Peking, Moskow dan pimpinan PKI bawah tanah di Indonesia, semua memberikan jawaban positif dan menerbitkan program masing-masing hingga menjelang akhir 1970. Namun, pada waktu PKI pecah, ada dua partai komunis yang saling bersaing, dan realitas dominan pada waktu itu adalah pertarungan sengit antara pengikut Peking dan Moskow untuk menentukan di bawah hegemoni ideologi dan arahan strategi dan taktik siapa PKI akan bangkit kembali.²⁷⁸ Namun, militer Indonesia sudah siap menghadapi situasi ini, seperti tampak dalam komentar tentang pertarungan Cina-Soviet untuk mempengaruhi kebijakan PKI yang dilontarkan melalui Radio Jakarta pada 16 September 1968, yang berbunyi bahwa “setiap bantuan dari Partai Komunis,” apakah dari Cina atau Uni Sovyet, Vietnam atau tempat lain, “akan mempercepat kehancuran total strategi sisa-sisa PKI.”

TIDAK ADA SITUASI REVOLUSIONER DI INDONESIA

Sementara Supardjo melontarkan kritik atas tindakan Aidit di Halim dari segi pertimbangan strategi dan taktik, kritik yang paling pedas dari segi doktrin diarahkan kepada Aidit oleh kawan-kawannya yang tetap loyal kepada Moskow. Setelah kudeta yang gagal itu, mereka berkeliling di Jawa Tengah dan Timur, kembali membentuk kelompok dan menamakan diri Kelompok Marxis-Leninis Partai Komunis Indonesia, dan menerbitkan tulisan-tulisan yang sangat kritis atas Aidit dan kebijakannya.

Analisis mereka yang tajam mengatakan bahwa *coup d’etat* diilhami oleh Peking, dan dilakukan bukan untuk merespon kondisi-kondisi objektif yang ada di Indonesia pada waktu itu, tetapi untuk mewujudkan aspirasi Peking untuk menjadi pemimpin Gerakan Asia-Afrika, dan juga kepentingan strategisnya di Asia Tenggara. Setelah Aidit kembali dari Pekinglah Politbiro

Kesimpulan

partai bergegas tanpa pikir panjang mempersiapkan segala sesuatunya bagi kudeta itu, dengan atau tanpa Sukarno, dan bahkan melawan dia. Bahkan, kata dokumen itu, tidak ada sama sekali kondisi objektif untuk revolusi pada waktu itu:

“Dan semua ini terjadi ketika tidak ada situasi revolusioner sama sekali, tidak ada keadaan tidak stabil di pihak penguasa, massa rakyat tidak siap untuk perjuangan bersenjata. Hanya ada bahaya persekongkolan kontra revolusi dan ada penyakit ginjal Presiden Sukarno. Seandainya terjadi revolusi, revolusi tidak akan bertumpu pada massa rakyat revolusioner, tetapi didasarkan pada penyakit ginjal Sukarno. Ini benar-benar sebuah taruhan yang sangat besar yang tidak ada hubungannya dengan teori Marxis tentang pergolakan bersenjata.”²⁷⁹

Jadi, karena tidak ada situasi revolusioner, dalam pandangan mereka, tidak ada alasan bagi PKI untuk terus melangkah untuk melancarkan kudeta. Selain itu, dokumen tersebut bahkan meragukan rencana-rencana yang disusun Dewan Jenderal, yang tercermin dalam kata-kata bahwa bahkan di dalam Dewan itu tidak ada kata sepakat di antara pucuk pimpinan Angkatan Darat mengenai sifat tindakan mereka dan kapan akan dilakukan:

“Beberapa berpendapat kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan bertepatan dengan perayaan hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober, beberapa lagi condong pada hari lain, karena menurut mereka Hari Angkatan Bersenjata harus dijadikan ajang peragaan kekuatan, untuk mencegah pembentukan Kabinet Gotong-Royong.”²⁸⁰

Sementara AD sudah pasti memiliki rencana-rencana untuk menghadapi untuk menangkis perebutan kekuasaan oleh PKI jika Presiden wafat tiba-tiba, parade militer yang direncanakan diadakan pada 5 Oktober 1965 akan dijadikan sebuah peragaan kekuatan, untuk menunjukkan kemampuan militer. Selain itu, Sudisman memberi kesaksian bahwa tidak ada bukti-bukti adanya Dewan Jenderal dan rencananya untuk menumbangkan Sukarno, seperti yang digambarkan Aidit di hadapan Politbiro.²⁸¹ Dan kita tahu dari kesaksian Walujo bahwa Aidit menciptakan konsep Dewan Jenderal itu pada April 1965 agar ada dalih untuk mendorong partai agar segera bertindak. Kita juga tahu bahwa Dr. Subandriolah dan Badan Pusat Intelijennya, yang mengangkat teori konspirasi yang mempertentangkan AD dengan Presiden secara meyakinkan sekali, meski ia tidak memiliki bukti-bukti yang mendukung teori itu, seperti

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

diakuinya sendiri dalam sidang perkaranya.²⁸² Namun, seperti dapat diperkirakan, AD tidak mau menodai dirinya dalam sidang-sidang itu dengan bukti-bukti tentang niatnya melawan PKI, dan mengenai rencana-rencana yang mungkin dimilikinya mengenai tindakan yang akan diambilnya jika Presiden tiba-tiba wafat. Topik ini adalah sebuah *lacunae* yang serius dalam tulisan-tulisan tentang GESTAPU, dan hendaknya dijadikan subjek kegiatan penelitian. Diharapkan bahwa dengan jatuhnya Jenderal Suharto dari kekuasaan pada 1998, dan dengan banyaknya suara dari berbagai pihak yang meminta Presiden Wahid membentuk Komisi Kebenaran untuk membuka kembali kasus GESTAPU, arsip militer akan dibuka untuk kegiatan penelitian untuk menggali penjelasan-penjelasan bagi topik yang penting ini.

Hal yang ingin ditekankan dalam kesimpulan ini adalah melihat peranan utama yang dimainkan oleh evaluasi tentang kesehatan Presiden dalam asal-usul kudeta PKI itu. Dari bukti-bukti medis yang dikemukakan dalam sidang pengadilan militer dapat disimpulkan bahwa dokter-dokter Cina telah “menyunting” penilaian mereka tentang kesehatan Presiden dengan tujuan agar Aidit memiliki dalih untuk mendorong PKI melakukan tindakan mendahului untuk merebut kekuasaan. Seperti telah disebutkan di atas, konspirasi itu berawal di Peking dalam pertemuan Aidit dengan Mao di kantor partai di Zhongnanhai pada awal Agustus 1965. “Dua dokter” yang dikirim Mao bersama Aidit ke Jakarta bertugas menyiapkan bagi Aidit “bukti” yang paling mendesak dan meyakinkan untuk mendorong Politbiro PKI menerima Rencana Besar itu untuk segera mengambil tindakan mendahului sebagai jalan pintas untuk merebut kekuasaan.

Dr. Mahar memberi kesaksian bahwa ketika Presiden mendapat serangan yang paling gawat 4 Agustus 1965, bahwa Dr. Darjono dari Resimen Tjakrabirawa memanggilnya untuk segera datang ke Istana. Ketika Dr. Mahar masuk ke kamar tidur Presiden dan bertemu dengan tim dokter dari Cina yang sudah berada di situ, ada suasana kurang menyenangkan mengenai status mereka, karena tidak seorang pun dapat menjelaskan kepada Mahar apakah mereka diundang secara resmi oleh Pemerintah Indonesia atau secara pribadi oleh Presiden, atau ditawarkan oleh Peking dalam rangka “bantuan dari negara sahabat,” atau ungkapan rasa khawatir pribadi. Setelah pertemuan itu, Dr. Mahar terus merawat Presiden dan pada 17 Agustus, hanya beberapa hari sebelum pertemuan yang diperluas Politbiro PKI memutuskan akan meneruskan persiapan-persiapan kudeta, dengan atau tanpa Presiden, Aidit secara khusus menemui Dr. Mahar dan menanyakan apa pendapatnya

Kesimpulan

mengenai kondisi Presiden. Dr. Mahar memberi tahu Aidit bahwa menurut hasil pemeriksaannya sendiri, keadaan Presiden sudah lebih baik akhir-akhir ini, bahwa ada kemungkinan besar Presiden dapat sembuh, tetapi ia tidak memperhatikan apa reaksi Aidit sebenarnya setelah mendapat informasi ini.

Jelas, kemungkinan Presiden dapat pulih tidak sejalan dengan skenario Aidit, karena PKI sudah merencanakan mengirim Presiden ke Danau Angsa di Cina karena alasan kesehatan, atau menyingkirkannya setelah Kabinet Gotong Royong terbentuk, sesuai nasihat Mao kepada Aidit dalam pertemuan mereka berdua. Adanya Presiden yang aktif-bergelora ternyata penuh risiko bagi Peking dan PKI, seperti dapat mereka saksikan sendiri dengan terheran-heran dalam perilaku Presiden yang berubah-ubah di Pusat Komando Halim dan kemudian di rumah Susanto di Halim pada 1 Oktober. Dari *OTOKRITIK* Supardjo jelas bahwa memang Presiden yang kembali bersemangat itu, dengan kepulihan kesehatannya sebagai penyebab utama, yang, dengan mengambil inisiatif pada pukul 11.00 di Halim, menghancurkan harapan-harapan Mao dan Aidit bahwa Indonesia yang revolusioner akan bergabung dalam revolusi-revolusi dukungan Peking di Asia Tenggara.

Kecaman-kecaman terhadap Aidit tidak kenal ampun:

“Penyebab utama kekalahan Gerakan 30 September bukan bahwa musuh yang kita hadapi lebih kuat, atau bahwa kita tidak berani, atau pejuang-pejuang kita tidak memiliki keberanian. Sebab-sebab subjektif terletak pada kecerobohan di pihak sejumlah pucuk pimpinan Partai, pada kekacauan ideologi, politik, dan organisasi, yang adalah hasil objektif dari ideologi borjuis-kecil tentang revolusi, pada semangat revolusioner yang berlebihan, keinginan untuk mencapai kemenangan dengan cepat, pada memaksakan melancarkan revolusi yang gagal, pada pertaruhan dengan kekuatan-kekuatan yang saling mengimbangi, pada mencari kepuasan dalam berangan-angan melakukan petualangan, dsb.

Kekeliruan-kekeliruan utama ini mencetuskan reaksi berantai kekeliruan-kekeliruan serius yang lain ketika gerakan

Pada hari-hari yang tegang itu Partai, setelah memberikan dukungan pada tindakan Kolonel Untung, melakukan kesalahan-kesalahan politik berikut ini:

- (a) Penyusun dan peserta langsung dalam tindakan Untung tidak mempertimbangkan perlunya menarik massa rakyat ke pihak mereka agar dapat memastikan dukungan dari kekuatan-kekuatan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

progresif di seluruh negeri. Setelah berhasil merebut RRI, mereka tidak menawarkan kepada rakyat program sosial-ekonomi, dan tidak menyerukan kepada kaum petani dan kaum buruh untuk waspada terhadap bahaya persekongkolan Dewan Jenderal. Mereka bukannya mengeluarkan dekrit bagi pembentukan tentara rakyat, mereka malahan membuat sebuah keputusan yang memberikan dorongan baru pada pihak militer. Setelah ini, sulit untuk memperoleh dukungan massa rakyat bagi Gerakan 30 September.

- (b) Ketika semua pemimpin politik menyangkal ikut dalam Dewan Revolusi, pimpinan Partai mengeluarkan pernyataan, yang sudah terlambat, bahwa tidak beralasan untuk mengira bahwa Partai ikutserta dalam Gerakan 30 September. Namun, pimpinan Partai tidak menyangkal tuduhan-tuduhan bahwa Partai mendukung pembersihan yang dilakukan Untung dan pengikut-pengikutnya. . . . Di sinilah letak kesalahan-kesalahan utama berikut ini yang dilakukan oleh Partai: sikap pasif dan panik pimpinan Partai dalam situasi darurat, yang mengakibatkan menyerahkan semua kekuasaan kepada Presiden Sukarno dan keputusan politiknya, tetapi tanpa berpijak pada kekuatan massa rakyat....²⁸³

Singkatnya, para pengecam Aidit menuduhnya sebagai penyebab gagalnya GESTAPU, pencipta dan pendorongnya yang paling gigih, akibat semangat revolusioner yang berlebih-lebihan, keinginan cepat-cepat memperoleh kemenangan, upaya untuk secara prematur mempercepat jalannya revolusi, pertarungan atas kekuatan-kekuatan yang saling mengimbangi, dan angan-angan petualangan.

KESALAHAN FATAL: AIDIT BERTARUH DENGAN KESEHATAN PRESIDEN

Jadi, kesimpulan akhir, mau tidak mau adalah bahwa satu-satunya langkah darurat yang dapat membenarkan Aidit melancarkan GESTAPU—Dewan Jenderal ciptaan Aidit dan dokumen Gilchrist ciptaan Mayor Louda, seperti telah kita lihat—adalah ketakutannya yang realistis bahwa jika Presiden meninggal tiba-tiba, atau lumpuh secara permanen, lingkaran setan pertarungan perebutan kekuasaan antara PKI dan AD akan menghasilkan buah yang jelas tidak pasti. Karena itu, Aidit benar ketika ia bersikeras, dalam tiga

Kesimpulan

sidang Politbiro yang diadakan pada Agustus 1965, bahwa PKI jangan, dan tidak boleh, mengambil risiko berdasarkan kondisi kesehatan Presiden, dan melancarkan tindakan mendahului segera terhadap para jenderal terlepas dari apakah Presiden meninggal atau hidup. Aidit juga benar, dalam pandangannya sendiri, dengan sikapnya menolak bertaruh atas dasar kepulihan kesehatan Presiden, sebuah prognosis yang ditawarkan kepadanya oleh Dr. Mahar pada 17 Agustus 1965. Ia jelas sangat khawatir mengenai kemungkinan harus berhadapan dengan Presiden yang kuat dan punya tekad setelah pembersihan para jenderal, yang mungkin tidak akan mau menempuh jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan Demokrasi Rakyat dan bekerja di bawah hegemoni PKI dan menurut *diktat* Aidit. Karena itu, Aidit benar ketika ia tetap berjalan di jalan yang diputuskannya pada awal operasi, melakukan tawar-menawar dengan Presiden di Halim: mendorongnya untuk beristirahat di Cina atau menurunkannya sama sekali dari atas panggung.

Namun, seperti terjadi pada 1 Oktober 1965, jelas terlihat bahwa Presiden tidak dapat disingkirkan, Omar Dhani menolak mendukung rencana Aidit, sementara di pihak lain, Presiden mulai masuk perangkap Aidit, dan karena itu Aidit seharusnya mengubah strategi, yakni berjalan “dengan” Presiden dan merangkulnya, seperti disarankan Supardjo, untuk membuat kesepakatan baru. Namun, ini seharusnya sudah dilakukan sejak awal gerakan itu, yang jelas sebelum pasukan Jenderal Suharto muncul sebagai sebuah ancaman yang meyakinkan untuk menggagalkan kemungkinan-kemungkinan terwujudnya kesepakatan antara Presiden dan Aidit. Benar bahwa Aidit tidak akan memperoleh semua yang diharapkannya, tetapi ia akan mendapat tambahan waktu untuk melakukan manuver-manuver berikut bersama Presiden. Jadi, kesehatan Presiden yang berangsur pulih menjadi faktor pengendali yang berperan pada hari kudeta itu, pada 1 Oktober 1965 yang penuh dengan hal-hal di luar perkiraan itu.

Maka, berdasarkan analisis ini, Aidit barangkali seharusnya memperhatikan prognosis Dr. Mahar pada 17 Agustus 1965 tentang kemungkinan pulihnya kesehatan Presiden. Ia seharusnya membantu Presiden dengan segala cara untuk melumpuhkan AD dan dengan demikian menyingkirkan hambatan utama pada jalan damai menuju kekuasaan bagi partainya. Setelah itu, Aidit seharusnya menghentikan upayanya untuk menyisihkan Presiden dari kepemimpinan negara, dan justru harus bekerja sama dengan Presiden untuk menempatkan PKI dan struktur kekuasaan dan membentuk Tentara Rakyat, yang terdiri dari buruh dan tani. Namun, dalam kondisi baru ini, tujuan PKI

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

tidak lagi melancarkan revolusi agraria yang tidak perlu itu sebagai jalan menuju kekuasaan, karena partai sudah memegang kendali kekuasaan untuk beberapa lama, tetapi melaksanakan kolektivisasi tanah di pedesaan dan nasionalisasi sumberdaya alam, industri, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, dan menjaga AD tetap berada di tempatnya.

Bagi PKI, mundur dari posisi “revolusioner” ini pada dasarnya berarti kembali pada strategi Moskow, yakni peralihan damai menuju Demokrasi Rakyat yang ditinggalkannya pada 1964. Strategi ini, setelah Presiden berhasil melumpuhkan komando AD pada 1 Oktober, jelas sangat mungkin, jalan menuju kekuasaan yang berbiaya dan berisiko lebih rendah. Supardjo memiliki pandangan ke depan dan keberanian untuk menyarankan strategi ini ketika menghadap Presiden di Pusat Komando Halim pada 10.30 pada 1 Oktober 1965, pada saat Aidit tengah berupaya menyingkirkan Presiden dari kekuasaan, ketika Supardjo menantang Aidit agar bergabung dengan Presiden, untuk mencegah upaya Aidit menyingkirkan Presiden. Bahkan pada waktu itu belum terlambat bagi Aidit untuk putar haluan. Namun, untuk hal tersebut, Aidit saat itu tidak siap, dan ketika ia sudah siap pada petang hari, semua sudah terlambat, karena kekuasaan telah berpindah dari tangan Presiden dan Aidit ke tangan Jenderal Suharto, dan tidak ada waktu lagi bagi Aidit dan Presiden untuk melaksanakan kesepakatan baru di antara mereka. Di sinilah letak bagian dari tanggung jawab Aidit atas kegagalan GESTAPU.

Perkembangan keadaan kemudian membuktikan bahwa Dr. Mahar benar mengenai kesehatan Presiden, karena Presiden masih dikaruniai hidup lima tahun lagi setelah Aidit tertangkap di desa Sambeng dekat Surakarta pada 22 November 1965, dan kemudian ditembak mati. Presiden Sukarno wafat pada 21 Juni 1970. Pada waktu itu Aidit seharusnya sudah memegang kendali kekuasaan melalui jalan damai, dan menghindarkan partainya dari derita kekalahan dan kemudian dilenyapkan, dan menghindarkan negeri itu dari pembantaian dan pertumpahan darah mengerikan yang terjadi setelah itu.

Di pihak lain, sudah pasti bahwa pada waktu itu semua penjara dan kamp-kamp kerja paksa sudah dipenuhi oleh tahanan politik, yaitu “musuh rakyat,” ketika perjuangan kelas makin memuncak pada tahap-tahap awal pemerintahan diktator proletariat menancapkan kaki di bawah naungan sistem Demokrasi Rakyat, seperti diperlihatkan sejarah dunia komunis kepada kita. Jumlah tahanan politik jelas akan mencapai jutaan orang, jauh lebih besar dari jumlah korban pembantaian yang ditimbulkan oleh GESTAPU yang gagal itu. Seperti terlihat dari berbagai tulisan akhir-akhir ini, pembentukan pemerin-

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

tahan diktator Marxis dalam abad lalu ternyata sangat mahal biayanya, dan eksperimen-eksperimen kaum Marxis yang gagal dalam rekayasa sosial pada skala yang paling luas yang mungkin dilakukan, meninggalkan warisan berupa penderitaan yang mengerikan dan hancurnya kemanusiaan saat umat manusia memasuki abad XXI.²⁸⁴

Kata penutup, penelitian ini memberikan acungan jempol kepada Jenderal Suharto, yang telah melakukan intervensi pada waktu yang tepat, yang menghancurkan kemungkinan bagi pembentukan kubu Sukarno-Aidit di rumah Susanto di Halim pada petang hari 1 Oktober 1965, yang merencanakan membentuk “*duumvirate*” [pemerintahan bersama] yang akan membawa Indonesia melangkah menuju pembangunan sistem Demokrasi Rakyat. Tindakan Suharto menyelamatkan negeri ini dari keharusan mengalami kemunduran pembangunan sekitar 20 tahun, karena semua ini, dan semua sistem-sistem seperti ini, dan setelah ia sendiri jatuh pada 1988, negeri itu melangkah lagi ke jalan menuju bentuk pluralisme politik dan demokrasi, dan memasuki tahap mekanisme pasar ke dalam perekonomiannya. Pada waktu itu, matilah sudah model pembangunan Marxis-Leninis. Musim Semi Praha Dubcek dan Sosialisme Berwajah Kemanusiaan-nya; “Komunisme Goulash” Kadar di Hungaria; “Perestroika” Gorbachev di Rusia; “mengejar kekayaan itu mengasyikkan” Deng Ziao-Ping di Cina; “Ladang Pembantaian” Pol Pot di Kamboja; dan “komune desa” Ho Chi-minh di Vietnam, semua ini adalah batu nisan di pekuburan model pembangunan Marxis-Leninis.

Duumvirate Sukarno-Aidit akan menerapkan varian model komunis ini pada Indonesia, seandainya tidak digagalkan oleh Jenderal Suharto dan militer yang mendukungnya pada 1 Oktober 1965 yang penuh dengan hal-hal yang tidak diperkirakan itu. Inilah makna sebenarnya dari hari itu bagi sejarah Indonesia modern.



CATATAN

1. D. N. Aidit, *Perhebat Ofensif Revolusioner Disegala Bidang*, hlm. 16. Juga sebuah *Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia*, berjudul "To Brothers At Home and Comrades Abroad," *Information Bulletin, Documents of the Communist and Workers' Parties*, Prague: Peace and to Socialism Publishers, Vol. 5, No. 18 (106), 1967, hlm. 55.
2. *Harian Rakjat*, Djakarta, 7 Mei 1965.
3. *Harian Rakjat*, Djakarta, 7 Mei 1965.
4. Untuk teori demokrasi nasional, lihat A. Sobolev, "National Democracy the Way to Social Progress," *World Marxist Review*, Vol. 6, No. 2, Februari 1963, hlm. 37-46; William Shinn, "The National Democratic State: A Communist Program For Less-Developed Areas," *World Politics*, Vol. XV, No. 3, April 1963, hlm. 282-292; Justus M. van der Kroef, "The Communist. Concept of 'National Democracy,'" *Studies on the Soviet Union*, Vol. 4, No. 2, 1964, hlm. 39-63; Justus M. van der Kroef, "On 'National Democracy' II, Evolution of the Concept," *Survey*, April 1963, hlm. 134-145.

Untuk kebijakan PKI, lihat Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism: A History*, New York: Praeger, 1966; Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia: 1951-1963*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1964; Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1965; Ruth T. McVey, "Indonesian Communism and the Transition to Guided Democracy," dalam A. Doak Barnett (ed.). *Communist Strategies in Asia: A Comparative Analysis of Governments and Parties*. New York: Praeger, 1963; Justus M. van der Kroef, *The Communist Party of Indonesia: Its History Program and Tactics*, Vancouver: University of British Columbia, 1963; Leslie H. Palmier, *Communists in Indonesia*, London: Weidenfeld and Nicolson, 1973.
5. "Madju Terus," Dokumen-dokumen Kongres Nasional Ke-VII (Luarbiasa) Partai Komunis Indonesia, *Bintang Merah*, Nomor Spesial, Jajasan "Pembaruan," Jakarta, 1963, Ad-Art (Konstitusi) PKI, Preambul, hlm. 316-322.

Catatan

6. *Declaration of Twelve Communist and Workers' Parties of the Socialist Countries*, Jullundur: Punjab Book Centre, tanpa tahun (1957?).
7. *Documents of the Meeting of Representatives of the Communist and Workers' Parties: Moscow, November-Desember 1960*, New Delhi: The Communist Party of India, 1960.

PKI menjalankan strategi transisi damai setelah Aidit tiba kembali di Jakarta dari Kongres XX Partai Komunis Uni Sovyet. Pleno VI Politbiro PKI, pada bulan Juli 1956, mengeluarkan resolusi resmi tentang hal itu, dan Kongres Nasional VI Nasional PKI, yang diadakan tangga 7 hingga 14 September, mengubah AD/RT PKI dan memasukkan strategi ini ke dalam Preambul.

“... adalah mungkin bahwa sistem Demokrasi Rakyat sebagai tahap transisi menuju Sosialisme di Indonesia dapat dicapai dengan jalan damai, melalui parlemen. PKI berusaha sekuat tenaga untuk membuat kemungkinan ini menjadi kenyataan. Jika tergantung pada PKI, jalan damai inilah, melalui parlemen, yang akan dipilih.”

Lihat Dokumen-dokumen-Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia, Jakarta, 7-14 September 1959, *Bintang Merah* Nomor Spesial, Jajasan “Pembaruan”, Jakarta, 1960, Konstitusi PKI: Preambul, hlm. 264-270.

8. Untuk evolusi dan penerapan kebijakan ini di India, lihat Victor M. Fic, *Peaceful Transformation to Communism In India: Strategy of the Communist Party*, Bombay: Nachiketa Publications, 1969.

Bukti bahwa strategi ini telah berhasil bila dijalankan dengan semestinya harus dilihat dalam kenyataan bahwa Partai Komunis memperoleh kekuasaan dengan cara damai di salah satu negara bagian India, yaitu Kerala, melalui proses pemilihan umum pada tahun 1956. Untuk penerapan teori itu di Kerala dan analisis faktor-faktor yang memungkinkan pembentukan secara damai pemerintahan komunis yang pertama di salah satu negara bagian India, lihat Victor M. Fic, *Kerala: Yenana of India*. Bombay: Nachiketa Publications, 1970.

Dalam buku itu penulisnya mengatakan bahwa banyak negara-bagian India lainnya yang seharusnya dapat diperintah oleh kaum komunis seandainya model Kerala diterapkan dengan tepat di situ. Dan meski cabang partai komunis setempat memperoleh kekuasaan di Bengali Barat dan hingga hari ini masih memerintah, dan di Andhra Pradesh, tempat partai komunis berkuasa untuk beberapa waktu, India tidak mengalami perluasan lebih lanjut pemerintahan oleh kaum komunis.

Skisma ideologis Cina-Sovyet, yang mulai terjadi pada 1959, adalah penyebab kegagalan komunisme di seluruh India. Dampaknya membelah

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Partai Komunis ke dalam dua kubu, yang bertarung satu sama lain dalam perang saudara yang berlarut-larut setelah kubu pro-Peking membuang legalitas dan mencetuskan pemberontakan agraria yang sia-sia dan banyak makan korban di beberapa negara-bagian, seperti di Telengana, Naxalbari dan tempat-tempat lain di India. Lihat Sohail Jawaid, *The Naxalite Movement in India: Origin and Failure of the Maoist Revolutionary Strategy in West Bengal, 1967-1971*, New Delhi: Associated Publishing House, 1979; Sumanta Banerjee, *In the Wake of Naxalbari: A History of the Naxalbari Movement In India*, Calcutta: Subarnarekha, 1980; Asit Sen, *An Approach to Naxalbari*, Calcutta: Institute of Scientific Thoughts, 1980; Samar Sen, Debabrata Panda dan Ashish Lahiri (ed.), *Naxalbari and After: A Frontier Anthology*, Vols. I & II, Calcutta: Kathashilpa, 1978.

Kepustakaan tentang kehancuran Partai Komunis India, karena kecerobohan petualangan revolusioner Peking, banyak sekali. Lihat Vimla Saran, *Sino-Soviet Schism: A Bibliography, 1956-1964*, The Jawaharlal Nehru University London: Asia Publishing House, 1971.

Sedangkan penelitian dalam buku ini menunjukkan bagaimana kecerobohan kebijakan-kebijakan Cina menghancurkan Partai Komunis Indonesia, yang pernah merupakan salah satu partai terbesar dan paling kuat di luar Blok Komunis.

9. Atmadji Sumarkidjo, *Mendung di Atas Istana Merdeka*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 137.
10. Perubahan besar dalam kebijakan PKI tampak jelas dari perbandingan tiga pidato Aidit pada bulan September 1963 di Peking, yang berisi dukungannya atas konsep Moskow tentang transisi damai, dengan laporannya pada Pleno CC PKI II bulan Desember 1963, yang berisi serangan yang tajam atas Moskow dan mengadopsi konsep Peking tentang perang agraria revolusioner.

Untuk penjelasan mengenai strategi front persatuan dan transisi damai menuju komunisme, yang diikuti PKI di bawah arahan Moscow, lihat D. N. Aidit, *The Indonesian Revolution and the Immediate Tasks of the Communist Party of Indonesia*, Foreign Languages Press, Peking, 1964.

PKI bergabung dengan Peking dan mengadopsi konsep strategi Cina sebagai hasil dari laporan Aidit pada Desember 1963. Lihat D. N. Aidit, *Set Afire the Banteng Spirit: Ever Forward, No Retreat*, Political Report to the Second Plenum of the Seventh Central Executive Committee of the Communist Party of Indonesia, Enlarged with the Members of the Central Auditing Commission and the Central Control Commission, Djakarta, 24-26 Desember 1963, Foreign Languages Press, Peking, 1964.

Untuk pembahasan menyeluruh pergeseran kebijakan PKI dari Moscow ke Peking, lihat Antonie C. A. Dake, *In the Spirit of the Red*

Catatan

Banteng. Indonesian Communists Between Moscow and Peking: 1959-1965, The Hague, Mouton, 1973.

11. “*Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia*,” *op. cit.*, hlm. 53-54.
12. “Chou Tells Soek: Add Your ‘Crushers’ to Forces,” *The Straits Times*. Singapura, Juni 2, 1965.
13. Aristides Katoppo (ed.), *Menyingkap Kabut Halim 1965*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 47.
14. Untuk pembentukan Biro itu, tujuannya, fungsinya, metode pengadaan perwira dan personalia militer lainnya, lihat *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, Jakarta: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Kopkamtib, Tim Pemeriksa Pusat, 1972, hlm. 1-149.

Penerbitan ini berdasarkan penyelidikan atas protokol, berita acara oleh tokoh-tokoh PKI, dokumen resmi sidang perkara mereka, tetapi di atas semuanya, berdasarkan rapat-rapat Politbiro PKI dan dokumen-dokumen intern rahasia partai lainnya. Dokumen-dokumen ini disita ketika militer menggerebek markas besar partai di Jl. Kramat Raya 81, Jakarta, ketika gedung itu dibakar oleh mahasiswa yang berdemonstrasi tidak lama setelah kudeta itu gagal.

Nugroho Notosusanto mengatakan pada penulis pada September 1968, ketika penulis mengadakan penelitian lapangan di Pangkalan AU Halim dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan kudeta yang gagal itu, bahwa pihak militer menyimpan dokumen-dokumen ini di tempat yang aman di Kebayoran, di pinggir Jakarta, untuk dipilah-pilah, dipelajari dan dirawat.

Namun, sebelum kudeta dilaksanakan, PKI tidak saja menyebar pemimpin-pemimpinnya ke berbagai “pos komando di seluruh negeri,” tetapi juga memindahkan sekretariat partai dari Kramat Raya 81 ke Kajuawet pada 28 September 1965; di situ sebuah markas besar darurat telah disiapkan di bawah pimpinan Sudisman, dan sejumlah dokumen-dokumen penting partai dibawa ke situ. Tempat ini juga diserbu kemudian oleh militer; dan dokumen-dokumen yang berhasil diselamatkan juga disimpan di Kebayoran, menurut wawancara saya dengan Kolonel Djiwo Sugondo, anggota Tim Pemeriksa Pusat, atau TEPPERPU di bawah Brigjen A. Tahir (di kantornya di Jakarta pada 29 April 1971).

Selama kunjungan ke Jakarta pada 1996-1997 penulis mencari semua dokumen PKI ini, menghubungi para mantan Pangkopkamtib untuk menanyakan lokasi dokumen dan untuk mohon izin untuk membacanya, tetapi tanpa hasil.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Dalam sidang pengadilannya Sjam menguraikan secara rinci tentang pembentukan Biro Khusus, tujuannya, teknik rekrutmen personelnya, nama-nama perwira Angkatan Bersenjata yang dilatih dan diikutsertakan dalam pembersihan pucuk komando AD, diskusi dalam pertemuan mereka dan keputusan yang mereka ambil. Lihat, *Pengadilan Perkara Sjam, Sidang Pertama*, 19 Februari 1968, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.00 GMT. *Pengadilan Perkara Sjam, Sidang Kedua*, 20 Februari 1968, disiarkan pada hari yang sama, 12.30 GMT. *Pengadilan Perkara Sjam, Sidang Ketiga*, 20 Februari 1968, disiarkan pada Februari 21, 1968, 00.01 GMT. *Pengadilan Perkara Sjam, Sidang Keempat*, 21 Februari 1968, disiarkan 22 Februari 1968, 00.01 GMT. *Pengadilan Perkara Sjam, Sidang Kelima*, 23 Februari 1968, disiarkan 23 Februari 1968, 12.00 GMT. *Pengadilan Perkara Sjam, Sidang Keenam*, 23 Februari 1968, disiarkan Februari 24, 1968, 00.01 GMT. *Pengadilan Perkara Sjam, Sidang Ketujuh*, 24 Februari 1968, disiarkan 24 Februari 1968, 12.00 GMT.

Untuk kesaksian Sjam lihat juga “MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA. Putusan Nomor: PTS-027/MLB-I/K/1968. Perkara KAMARUSAMAN bin AHMAD MUBAIDAM, alias SJAM, DJIMIN, ALI MUCHTAR, ALI SASTRA, SJAMSUDIN dan KARMAN,” Jakarta, 1968. Dokumen ini dirujuk kemudian dalam penelitian ini sebagai “Perkara KAMARUSAMAN,” *op. cit.*

15. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, op. cit.*, hlm. 83.

Untuk melihat evolusi kebijakan-kebijakan PKI terhadap personil Angkatan Bersenjata, sejak percobaan pertama PKI untuk mengadakan pemberontakan bersenjata, yang dilakukan Musso di Madiun pada 1948, lihat *ibid.*, hlm. 4-15.

Pada 1957 Administrasi Perang Pusat mengeluarkan perintah melarang anggota Angkatan Bersenjata terlibat dalam politik atau menjadi anggota partai politik, *ibid.*, hlm. 13.

16. Perkara KAMARUSAMAN, *op. cit.*, hlm. 129-130.
17. Perkara KAMARUSAMAN, *op. cit.*, hlm. 86.
18. Perkara KAMARUSAMAN, *op. cit.*, hlm. 42-43. Juga *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, op. cit.*, hlm. 21-24.
19. Ladislav Bittman, *The Deception Game, Czechoslovak Intelligence in Soviet Political Warfare*, Syracuse, N.Y.: Syracuse Research Corporation, 1972, hlm. 106-122. Bittman adalah perwira dinas rahasia Ceko yang melarikan diri ke Barat, dan setelah memberi kesaksian mengenai pengalamannya di depan Kongres AS menerbitkan beberapa penelitian.

Ketika Jenderal Ivan Agayants mengirimkan kawat ke Praha menyetujui saran Louda bahwa *Operation Palmer* diperluas dengan

Catatan

merekayasa “bukti-bukti” konspirasi Inggris-Amerika melawan Indonesia, Major Louda, perwira pada Departemen Disinformasi di Praha, yang merancang projek itu, mengatakan: “Sukarno sudah matang untuk menerima bukti-bukti baru apa saja tentang konspirasi Amerika. Mari kita siapkan kenikmatan itu untuk dia,” *op. cit.*, hlm. 119.

Bittman, pada akhir babnya berjudul “Indonesian Boomerang,” menulis: “Selama hampir setahun, dengan hanya peralatan yang sangat primitif dan segelintir agen, dinas rahasia Cekoslowakia dan Sovyet sukses dalam mempengaruhi pendapat umum dan para pemimpin Indonesia, termasuk Sukarno sendiri. . . . *Operation Palmer* dilaksanakan pada waktu yang tepat. Operasi itu berhasil menunggangi puncak gelombang sentimen anti-Amerika, dan memperkuat pandangan-pandangan Sukarno and Subandrio, dua tokoh politik paling terkemuka di Indonesia saat itu. Disinformasi tentang konspirasi mengenai upaya pembunuhan dan rencana palsu invasi Inggris-Amerika diterima dengan hati gembira oleh Sukarno. Ia disanjung dan terpancing hingga percaya bahwa dengan menggagalkan rencana Amerika dan melancarkan pertempuran yang gilang-gemilang melawan imperialisme, ia akan dapat meningkatkan prestisenya di Dunia Ketiga. Dari segi tujuan semula, dinas rahasia menilai operasi itu telah luar biasa berhasil. Pada akhir Agustus 1965, hubungan Amerika-Indonesia mencapai titik terendahnya dalam sejarah. Serangan-serangan terbuka terhadap CIA melebihi apa yang semula diperkirakan Sovyet.

Namun, sukses ini bersifat relatif dan sementara. Departemen disinformasi Cekoslowakia dan Sovyet, mabuk kegembiraan oleh kemungkinan memperoleh kemenangan yang bakal diraihinya dalam pertempuran melawan musuh utamanya AS itu, dengan sengaja menutup mata pada bahaya bahwa akibat-akibatnya juga dapat memperuncing ketegangan dalam negeri dan memperbesar pengaruh Cina di negeri itu. Partai Komunis Indonesia dan Peking menyatakan telah berhasil meraih kemenangan politik dari provokasi anti-Amerika itu; PKI pada 30 September 1965, melakukan serangan dan gagal total. Hasilnya, setengah juta orang komunis dan simpatisannya di Indonesia meregang nyawa.

Pada Agustus dan awal September 1965, *Operation Palmer* masih tetap dianggap sebagai *tour de force* (misi yang luar biasa hebatnya) bagi dinas rahasia Ceko dan Sovyet, dan Mayor Louda dipuji-puji sebagai penggagasnya. Pada bulan Oktober, tidak seorang pun mau menyebutkan operasi itu lagi . . . ,” *op. cit.*, hlm. 121-122.

Bittman mengutip rekayasa Dokumen Gilchrist sebagai studi kasus, satu dari sekian banyak operasi disinformasi Sovyet dan Ceko dalam Perang Dingin dalam bukunya yang lain berjudul *Archiv Mezinarodni dezinformace: cerna propaganda, aktivni opatreni a tajne akce* (Terj. Arsip

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Disinformasi Internasional: Propaganda Hitam, Langkah-langkah Aktif dan Operasi Rahasia), Praha: Mlada Fronta, 2000, hlm. 17-28.

Dalam buku ini Bittman menjelaskan operasi pusat disinformasi Praha tempat dokumen-dokumen palsu dan propaganda hitam disiapkan selama Perang Dingin. Katanya, pada musim panas 1965 Jenderal Ivan Agajans (Agayants), yang berasal dari Armenia, bertubuh tinggi, kurus dan berkumis tipis, kepala departemen disinformasi KGB, berkunjung ke markas dinas rahasia Ceko di Praha untuk melihat operasi disinformasi di situ. Karena di semua negara satelit departemen disinformasi melakukan operasi menurut rencana jangka panjang yang disiapkan KGB, jenderal itu datang untuk memastikan bahwa instruksi KGB dilaksanakan dengan benar oleh departemen disinformasi Praha.

Menurut Bittman, departemen disinformasi di Praha berkantor di lantai bawah tanah seminari “U krizovniku,” tempat menyimpan banyak sekali mesin ketik buatan luar negeri berbagai jenis, kertas kop orisinil yang digunakan Presiden, perdana menteri, duta besar, dan dinas rahasia berbagai negara, dan juga menyimpan koleksi tandatangan asli dari seluruh penjuru dunia yang besar sekali. Koleksi tandatangan yang unik ini selalu diperbarui dan ditambah dengan tandatangan para presiden baru dan para pejabat baru pemerintah negara-negara asing, yang dikumpulkan oleh dinas rahasia Ceko dari balasan atas surat-surat ucapan-ucapan selamat resmi yang dikirim negara-negara asing kepada Pemerintah Ceko pada hari libur nasional, pada Hari Natal, Tahun Baru, dan hari-hari raya yang lain.

Kantor dinas rahasia di Praha ini, dilengkapi dengan semua peralatan teknis yang diperlukan untuk merekayasa “bukti-bukti yang meyakinkan,” dan para ahli disinformasi bekerja dengan bantuan sebuah “ban berjalan,” seperti di pabrik, demikian kata Bittman, dan di situlah Mayor Louda merancang Dokumen Gilchrist pada tahun 1965, yang berhasil mengecoh dan dijadikan kunci utama bagi strategi Presiden Sukarno dan Aidit. *Ibid.*, hlm. 17-18.

20. *Pengadilan Perkara Dr. Subandrio, Sidang Kedua, 2 Oktober 1966*, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 2 Oktober 1966, 12.07 GMT.

Dalam membuat surat palsu itu, Mayor Louda berhasil cukup telak. Surat palsu itu ditulis di atas kertas kop bertanda air Kedutaan Besar Inggris. Menurut pendapat MI5 Inggris, si pemalsu kenal gaya surat konsulat, tetapi tata bahasa dan susunan kalimatnya kaku, seperti diceritakan oleh Brigjen Nugroho Notosusanto kepada penulis pada waktu wawancara dengannya di kantornya di Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan-Keamanaan, Medan Merdeka Barat 2, Jakarta, 30 April 1971.

Catatan

21. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 87-88. Sebuah lembaga yang terdiri dari tujuh jenderal memang benar ada. Lembaga itu disebut WANJAKTI, Dewan Penasehat untuk Promosi dan Rotasi Tugas, tetapi kegiatannya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut karier perwira tinggi.
22. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 90-91. Lihat *Pengadilan Perkara Dr. Subandrio*, Hari Kelima, 8 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 13.00; laporan interogasi Heru. Juga *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 88-89.
23. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 91, 96.
24. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 92.
25. *Pengadilan Perkara Dr. Subandrio*, Sidang Kedua, 2 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.07 GMT. Juga *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 93-94.
26. *Pengadilan Perkara Dr. Subandrio*, Hari Kedua, 2 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 9.30 GMT.
27. "Tesis PKI pada Ulang Tahunnya yang ke-45," *Harian Rakjat*, 7 Mei 1965.
28. Untuk uraian tentang metode yang digunakan oleh para operator Biro Khusus untuk "mendorong, mengindoktrinasi, meyakinkan, melakukan penetrasi, mengontrol atau menetralsir" para anggota Angkatan Bersenjata yang dijadikan target, lihat *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 25-73.
29. "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia," *op. cit.*, hlm. 58-59.
30. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 44.
31. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Pertama, Februari 23, 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 20.30. Juga *Perkara KAMARUSAMAN*, *op. cit.*, hlm. 45-46.
32. *Pengadilan Perkara Omar Dhani*, Sidang Kelima, Desember 7, 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.15 GMT; kesaksian Leo Wattimena.
33. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 94.
34. *Pengadilan Perkara Omar Dhani*, Sidang Kelima, Desember 7, 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.15 GMT; kesaksian Leo Wattimena.
35. Catatan tertulis pembicaraan Aidit dengan Mao tidak pernah dapat penulis peroleh, dan karena itu disertakan *caveat*. Maka rekonstruksi yang disajikan dalam penelitian ini bersifat sementara dan dapat berubah sampai ada bukti-bukti baru. Rekonstruksi berdasarkan sumber-sumber berikut: 1. "Indon Coup Planned by Aidit and Mao: Army Newspaper Reveals What Took Place Between the Two" *The Straits Times*, Singapura,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

26 April 1966. Artikel ini dalam *The Straits Times* mengutip sebuah laporan oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya dan diterbitkan dalam *Angkatan Bersendjata*, Jakarta, 25 April 1966; 2. "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Indonesian Communist Party" *op. cit.*; 3. Katoppo, *op. cit.*; 4. surat Aidit kepada para kader PKI 10 November 1965, dilampirkan sebagai Dokumen No. 2 dalam penelitian ini.

36. "Indon Coup Planned by Aidit and Mao: Army Newspaper Reveals What Took Place Between the Two," *The Straits Times*, Singapura, 26 April 1966. Artikel ini dalam *The Straits Times* mengutip sebuah laporan oleh seseorang yang tidak mau diketahui namanya, seperti telah disebutkan di atas, diterbitkan dalam *Angkatan Bersendjata*, Jakarta, 25 April 1966.

Penulis yang tidak diketahui namanya itu, kemungkinan besar merupakan sumber militer, yang menggunakan catatan pertemuan antara Mao dengan Aidit yang, tampaknya, berada dalam tangan TEPERPU tetapi tidak diterbitkan seluruhnya karena pertimbangan-pertimbangan kebijakan tingkat tinggi negara yang menyangkut sebuah negara tetangga yang sangat kuat.

37. "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia," *op. cit.*, hlm. 46-47.
38. *Angkatan Bersendjata*, Jakarta, 25 April 1966, dikutip dalam "Indon Coup Planned by Aidit and Mao," *The Straits Times*, Singapura, 26 April 1966.
39. Untuk pembicaraan Chen Yi dengan Subandrio mengenai tempat peristirahatan bagi Presiden di Danau Angsa Cina, lihat Katoppo, *op. cit.*, hlm. 47-48.
40. "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Indonesian Communist Party" *op. cit.*, hlm. 46-47.
41. Rekonstruksi kesepakatan Mao-Aidit ini berdasarkan surat Aidit kepada para kader PKI November 10, 1965, disertakan sebagai Dokumen No. 2 dalam penelitian ini. Surat itu menyebutkan usul Mao yang "diteruskan secara rahasia pada bulan Agustus" kepada Sukarno setelah pembicaraannya dengan Mao, dan juga menyebutkan pasal-pasal "perjanjian politik" antara Sukarno dengan Cina. Seperti akan kita lihat, Aidit menyerahkan usul Mao kepada Sukarno di Istana Bogor pada tanggal 8 Agustus, dan menjadi perantara yang menyampaikan jawaban Sukarno menerima usul itu kepada Mao melalui saluran partai.

Karena ini merupakan kesepakatan pribadi antara Sukarno dan Mao, dengan PKI berperan sebagai partner yang diam tak bersuara, maka komunikasi kedua belah pihak tidak menggunakan saluran "diplomati resmi," yaitu kementerian luar negeri Subandrio di Indonesia dan Kedutaan Besar RRC di Jakarta. Selain itu, Aidit menggunakan

Catatan

pemancar radio Angkatan Udara Indonesia, melalui Heru Atmodjo, Asisten Direktur Intel AURI, untuk berkomunikasi langsung dengan para pemimpin Cina di Peking, seperti diceritakan oleh Nugroho Notosusanto pada penulis pada tanggal 3 April 1971.

Menyesali dalam suratnya kegagalan GESTAPU, Aidit mengatakan bahwa "... memang dalam praktek tidak semua persiapan perkiraan yang lalu, sesuai dengan kenyataan yang telah kita perkirakan, baik dari partai-partai sekawan, maupun dari Sosro (Sukarno, ed.) dan Tjeweng (Subandrio, ed.); jelas tidak membuktikan kesetiakawanan apalagi memenuhi janji yang telah diucapkan. . . ."

Menyinggung kemungkinan menculik Sukarno dengan helikopter dari Bogor dan membawanya ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, tempat basis-pangkalan untuk perjuangan jangka panjang akan didirikan, "sebab dari sana semua persetujuan Sosro dengan tetangga akan digugat terus. Jelasnya dalam memperjuangkan konsep partai kita tidak peduli akan korban, bila perlu Sosro jadi korban, bila dia tidak memenuhi semua perjanjian."

"Bulan yang menentukan adalah Desember dan Januari 1966, oleh sebab itu perlu dijaga jangan Sosro sampai terdesak oleh DJ dan Partai-partai kontra revolusioner."

"Hingga kini belumlah ada tanda-tanda bahwa Sosro telah meninggalkan kita, tapi harus diingat kekuatan kita sekarang hanya satu: **perjanjian politik Sosro dengan tetangga** (Cina, ed.); bila Sosro meninggalkan kita berarti hukum karma berlaku . . . Senjata terakhir dari kita dan Negara tetangga adalah ini juga; oleh sebab itu yakinlah kawan-kawan mudah-mudahan, Sosro dan Tjeweng tidak akan mengkhianati kita, bila hingga sekarang dia plintat-plintut, memang karena DJ ada di depan hidungnya, tetapi bila nanti mereka berkhianat, maka dari negara tetangga perjanjian-perjanjian pasal yang telah kami sampaikan secara /R pada bulan Agustus yang lalu terpaksa diumumkan dan ini adalah berarti **lonceng kematian dan kehancuran bagi Sosro dan Tjeweng**. (Huruf tebal dalam surat asli, ed.). Sepucuk surat yang ditulis "di suatu tempat di Indonesia, 10 November 1965, dan ditandatangani oleh D. N. Aidit, Ketua." Surat itu ditujukan kepada "Seluruh CDB PKI se Indonesia." Lihat Dokumen 2. Salinan surat ini penulis peroleh dari kantor Brigjen A. Tahir (TEPERPU) pada tanggal 29 April 1971.

Sosro adalah salah satu nama yang diberikan kepada Sukarno waktu ia lahir, yaitu Karno Sosro. Namun, karena semangat juangnya, yang membantunya mengatasi penyakit yang dideritanya semasa kecil, ayahnya mengubah namanya menjadi Sukarno, berdasarkan nama dari Karna, salah satu ksatria gagah berani dalam Mahabharata.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

42. Jaringan yang dibangun Aidit memainkan peran penting sepanjang hari kudeta tanggal 1 Oktober 1965 itu. Selama berjalannya kudeta itu Aidit mengulurkan “kertas-kertas kecil” berisi catatan perkembangan keadaan dari jendela rumah Suwardi di Halim, markas besarnya bersama Lukman tempat mereka dari situ mengendalikan akibat-akibat politik dari kudeta itu. Lukman meninggalkan rumah itu pagi-pagi sekali untuk pergi ke kota, meninggalkan Aidit sendirian. Tidak mengherankan jika Peking hanya dua jam di belakang kejadian-kejadian di Halim, yang memberikan waktu yang diperlukan kurir untuk menempuh jarak dari kota ke Halim dan kembali, untuk menerjemahkan pesan-pesan itu, mengurai sandinya, dan untuk hal-hal teknis lainnya.

Seorang perempuan yang menyajikan teh dan makanan kecil untuk Aidit selama ia berada di rumah itu melihat banyak kurir berkendara sepeda motor, dengan mobil atau berjalan kaki, pergi ke jendela itu untuk menyerahkan pesan kepada Aidit, dan menerima dari dia kertas-kertas kecil dan kemudian pergi lagi. Penulis menwawancarai dan memotret perempuan itu, di depan rumah Aidit, lihat Gambar IX, selama penelitian yang dilakukannya di Pangkalan Udara Halim pada 20 September 1968.

Salah satu penghubung Aidit dari Halim ke kontak komunikasinya dengan Cina di kota adalah sopir Subandrio, yang muncul di depan jendela rumah Suwardi beberapa kali pada hari itu, ketika Subandrio masih di Sumatra. Tidak mungkin bahwa pada 1 Oktober, Aidit menggunakan pemancar Angkatan Udara di Halim, melalui Heru, meski ia mungkin menggunakannya sebelumnya.

Penghubung Aidit, dan juga jaringan-jaringan yang lain, terus beroperasi agak lama setelah GESTAPU gagal pada 1 Oktober 1965, dan sampai Kedutaan Besar Cina di Jakarta digerebek oleh Pasukan Keamanan Indonesia pada 1966. Dalam penggerebekan itu, disita sebuah peta yang berisi garis besar jaringan kurir, informan dan nama-nama mereka di Jakarta, yang terkait erat sekali dengan anggota pengurus PKI. Jaringan itu dijalankan oleh orang-orang Indonesia berkewarganegaraan Cina, hanya menggunakan sumber daya manusia dan tidak menggunakan peralatan elektronik untuk melakukan kontak. Sebuah wawancara dengan Kolonel Najjar Kandar, Deputy Kepala Staf, di kantornya di Jakarta pada 29 April 1971. Menurutnya, Aidit dan para petinggi PKI lainnya sudah mengadakan kontak dengan perwira-perwira intelijen Cina di Jakarta melalui beberapa dari saluran-saluran ini.

43. “Appeal of the Marxist-Leninist Group of Indonesian Communist Party,” *op. cit.*, hlm. 46-47. Untuk asal-usul Poros Jakarta-Peking, lihat Justus M. van der Kroef, “The Sino-Indonesian Partnership,” *Orbis*, University of Pennsylvania, Summer 1964, hlm. 332-356.

Catatan

44. *The Straits Times*, Singapura, 24 Mei 1965. Dalam pidatonya Aidit mengulangi tuntutanannya agar dibentuk Angkatan Kelima dan kaum buruh dan tani dipersenjatai untuk melawan imperialisme Inggris-Amerika, tetapi jelas maksudnya juga untuk memungkinkan PKI mengadakan revolusi agraria bila upaya memperoleh kekuasaan dengan cara damai gagal.
45. Sheldon W. Simon, *The Broken Triangle: Peking, Jakarta and the PKI*, Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1969, hlm. 100.
46. Dan tidak lama setelah GESTAPU gagal pada 1 Oktober, 1965, seruan semacam itu dikumandangkan oleh PKI, kemungkinannya besar sekali bahwa ke-14 kader itu dipanggil pulang untuk memimpin operasi dalam rangka membuka tahap-tahap perang gerilya yang telah mulai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah terowongan, yang dibangun dengan gaya Vietcong, ditemukan oleh pihak militer dalam sebuah operasi bernama "Operasi Trisula" dan dimuat dalam *Antara*, Jakarta, 12 Agustus 1968.

Terowongan-terowongan ini diperlengkapi dengan amunisi, makanan, obat-obatan, tempat tidur rumah sakit, mesin ketik dan berbagai jenis persediaan lainnya yang diperlukan untuk melancarkan perang gerilya dalam waktu lama. Dekat Klaten, ditemukan sebuah Sekolah Pertahanan Rakyat, yang memberi pelajaran tentang taktik, berbagai senjata, teknik-teknik yang digunakan Vietcong dalam mengerahkan dan menyebarkan pejuang, cara menggali tempat menyembunyikan senjata dan amunisi dan tentang aspek-aspek lain perang gerilya. Buku-buku teks untuk mengajarkan perang gerilya berdasarkan pengalaman Vietcong juga ditemukan di Sekolah Tentara Pembebasan Rakyat di wilayah Blitar, Jawa Timur. Para kader PKI yang telah kembali mungkin bertugas sebagai instruktur di sekolah-sekolah ini.

Setelah petualangannya di Vietnam, adik Aidit belajar di Lomonosov University di Moskow, mendapat gelar MA dalam filologi; dan kemudian mendapat gelar doktor dalam kesusasteraan dari Hanoi State University. Ketika terjadi Revolusi Kebudayaan ia berkunjung ke Cina, dan di situ ia bertemu dengan kakaknya Sobron, yang sekarang tinggal di Paris. Asahan Aidit, sekarang bernama Asahan Alham, menerbitkan sebuah buku, sebuah kombinasi otobiografi dan fiksi tentang pengalaman-pengalamannya berjudul *Perang dan Kembang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2001.

47. Sheldon W. Simon, *op. cit.*, hlm. 97. Berbicara di depan mahasiswa PKI pada 25 September 1965, Sukarno menyatakan bahwa "kita sekarang sedang memasuki tahap kedua Revolusi Indonesia, yakni pelaksanaan Sosialisme," dan menambahkan bahwa jenderal-jenderal yang menentang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

ini harus dihancurkan. John O. Sutter, "Two Faces of Konfrontasi: 'Crush Malaysia' and the Gestapu." *Asian Survey*, University of California, Berkeley, Vol. IV, No. 10, October 1966, hlm. 538.

48. DOKUMEN No. 2, terlampir.
49. DOKUMEN No. 2. Dalam wawancara dengan Kolonel Sugondo pada tanggal 29 April 1971, penulis meminta salinan catatan pembicaraan Aidit-Mao 5 Agustus, pembicaraan Aidit--Sukarno 7-8 Agustus, dan kesepakatan Sukarno dengan Mao, tetapi dijelaskan bahwa sejauh ini dokumen-dokumen itu belum berhasil ditemukan, dan sampai ada bukti-bukti baru, rekonstruksi pembicaraan-pembicaraan ini masih bersifat sementara dan dapat berubah.

Namun, Kolonel Sugondo mengatakan kepada penulis bahwa menurut Jenderal Sutopojuwono dan Jenderal Tahir, para pemeriksa MAHMILLUB memperoleh banyak bukti baru dan penting tentang hubungan Sukarno dan Aidit dengan Mao melalui sebuah pertukaran hasil tawar menawar, yakni Dr. Subandrio, yang telah dijatuhi hukuman mati, memberikan kesaksian lebih jauh dengan imbalan tidak jadi ditembak mati. Karena sebab-sebab yang sudah jelas dan dapat dipahami, bukti kesaksian tambahan ini tidak mungkin dapat dimasukkan ke dalam berkas sidang perkara. Sayang, kesaksian tambahan ini juga kemudian tidak diterbitkan, barangkali karena pertimbangan "kebijakan tingkat tinggi negara" yang melibatkan sebuah negara asing, seperti kata seorang pemeriksa kepada penulis.

Ketika dalam penjara militer di Bandung, Subandrio diwawancarai oleh Frank Hawkins pada 11 Oktober 1970. Bekas menteri luar negeri yang sangat 'powerful' itu mengatakan bahwa Sukarno adalah atasan yang sulit untuk dilayani karena ia demikian "besar" dan ingin melakukan semuanya sendiri. Subandrio selanjutnya mengatakan bahwa ia telah menyerahkan permintaan mengundurkan diri sebanyak empat kali kepada Presiden Sukarno, dan bahwa konfrontasi dengan Malaysia sangat keliru dan fatal bagi Indonesia dan menyebabkan kejatuhan Sukarno. Seandainya kudeta itu berhasil, kata Subandrio, Indonesia akan berada di bawah komunisme tetapi, "saya tidak ingin Indonesia diperintah oleh orang-orang Komunis baik sebelum maupun sesudah 1965. . . . Di sisi positifnya, gerakan itu (GESTAPU, ed.) mengakibatkan terkuburnya partai komunis. Jika kami memetik pelajaran, kami harus membayar untuk itu." Mengenai pembunuhan enam jenderal, "Kami telah membayar sesedikit mungkin. Kematian para jenderal adalah harga yang harus kami bayar, untuk menyelamatkan negeri ini dari komunisme."

Sebulan setelah akhir sidang pengadilannya pada 26 Oktober 1966, Subandrio menulis surat kepada Presiden Suharto meminta grasi atas hukuman matinya, dengan alasan bahwa ia tidak terlibat dalam kudeta

Catatan

tersebut karena ia berada di luar Jakarta, di Sumatra, pada waktu itu. Namun permohonannya tidak dijawab. "Subandrio Talks in the Death Cell," *The Straits Times*, Singapura, 12 Oktober 1970.

50. Menurut kesaksian Pono, rencana awal PKI, ketika menghembuskan desas-desus tentang konspirasi Dewan Jenderal untuk menggulingkan Sukarno, hanyalah untuk memberikan "bukti-bukti" kepada Presiden sehingga ia sendiri yang turun tangan memprakarsai pembersihan para jenderal. Namun, ketika Aidit kembali dari Cina, inisiatif melawan AD diambil alih oleh PKI karena dianggap sebagai sesuatu yang sangat mendesak, dengan Aidit memimpin seluruh operasi melalui Biro Khusus. Wawancara dengan Kolonel D. Sugondo, di Jakarta pada 29 April 1971. Juga Bittman, *op. cit.*, hlm. 119.

Dr. Subandrio memberi kesaksian pada 2 Oktober 1966 bahwa Badan Pusat Intelijen yang dipimpinnya tidak memiliki bukti-bukti tentang adanya Dewan Jenderal. *Pengadilan Perkara Dr. Subandrio*, Sidang Kedua, 2 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 2 Oktober 1966, 12.07 GMT. Juga Sudisman memberikan kesaksian, pada 27 Februari 1967, bahwa PKI tidak memiliki bukti-bukti mengenai adanya Dewan Jenderal.

Asumsi bahwa dokter-dokter Cina telah "menyunting" hasil-hasil penilaian mereka atas kesehatan Presiden untuk menyediakan alasan yang masuk akal, bahkan yang "tak dapat dipungkiri," bagi Aidit untuk meyakinkan CC PKI, seperti akan kita lihat sebentar lagi, bahwa PKI harus mengambil tindakan mendahului terhadap AD, diperkuat oleh Dr. Mahar Mardjono. Sebagai dokter pribadi Presiden, Dr. Mahar memimpin tim dokter Indonesia yang menjaga kesehatan Presiden selama kesehatannya dalam krisis, mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat antara timnya dengan tim Cina tentang prognosis kesehatan Presiden. Dr. Mahar percaya bahwa dokter-dokter Cina terlalu melebih-lebihkan ketika memberikan kepada Aidit prognosis mereka tentang kesehatan Presiden. Ia memberitahukan hal ini kepada Jenderal A. H. Nasution tidak lama setelah kudeta. Aristides Katoppo (ed.), *Menyingkap Kabut Halim 1965*, *op. cit.*, hlm. 46-47. Kolonel Sugondo juga yakin bahwa beberapa anggota tim dokter Cina bukanlah pakar kedokteran. (*loc. cit.*).

51. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 81. Menurut sumber ini, "sekitar tanggal 8 Agustus"-lah Presiden membahas dengan Brigjen Sabur dan Untung, untuk pertama kali, niatnya untuk membersihkan para jenderal.

Namun, Kolonel Bambang Setyono Widjanarko, Ajudan Presiden Sukarno, memberi kesaksian bahwa Brigjen Sabur dan Untung dipanggil untuk menghadap Presiden di kamar tidurnya di Istana Merdeka di Jakarta

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pada tanggal 4 Agustus 1965, dan di situ Presiden bertanya pada “Untung, apakah ia bersedia menerima perintah bahwa langkah tegas harus diambil terhadap para jenderal Angkatan Darat yang tidak loyal. Untung menjawab ia bersedia.” Lihat Rahadi S. Karni (ed.), *The Devious Dalang*. The Hague: Interdoc Publishing House, 1974, hlm. 19-20. Tanggal 4 Agustus adalah hari Presiden jatuh sakit, pingsan empat kali dan muntah-muntah.

Menyadari keadaannya yang genting dan mungkin takut ia tidak akan hidup lebih lama, Presiden Sukarno mungkin ingin “membersihkan kandang” sebelum terlambat, untuk meninggalkan “warisan berupa sebuah revolusi,” dengan Aidit sebagai penanggung jawab dan Indonesia berderap melangkah di barisan terdepan *the new emerging forces*, kekuatan-kekuatan baru yang tengah muncul.

52. Bekas Ajudan Dr. Subandrio, Marsma Tranggono, memberi kesaksian bahwa ia mendengar secara tidak sengaja penerjemah langsung itu menterjemahkan pernyataan Chen Yi ini untuk Subandrio ketika berada dalam satu mobil dengan mereka saat kunjungan Chen Yi ke Jakarta untuk turut hadir merayakan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 1965. Aristides Katoppo (ed.), *Menyingkap Kabut Halim 1965*, op.cit., hlm. 47-48.
53. “Appeal of the Marxist-Leninist Group of Indonesian Communist Party,” *op. cit.*, hlm. 57.
54. Untuk mengetahui tekad Presiden Sukarno untuk meloloskan diri dari kungkungan segitiga besi itu, lihat Sheldon W. Simon, *The Broken Triangle, Peking, Jakarta and the PKI*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1969.
55. *The New China News Agency* (NCNA), Peking, 18 dan 19 Agustus 1964.
56. “Soekarno Flies to Cambodia in Cloud of Secrecy,” *The Straits Times*, Singapura, 2 Maret 1965.
57. “Mao-Soek in Pact to Partition Malaysia: 10,000 Indonesians for Invasion,” *The Straits Times*, Singapura, 8 Februari 1965. Sebuah laporan dari korespondennya di New York yang semua muncul dalam *The New York Herald Tribune* pada hari sebelumnya.

Juga Denis Warner, “Subandrio on the China Alliance,” *The Straits Times*, Singapura, 6 April 1965.

58. “Why Soek Wants the Big Bang,” *The Straits Times*, Singapura, 16 Januari 1965. Sebuah laporan korespondennya di Manila dalam sebuah artikel, yang muncul dalam majalah mingguan *The Examiner*, terbit di Manila hari sebelumnya.

Catatan

Brigjen Hartono penanggung jawab proyek nuklir Indonesia, yang memainkan sebuah peran psikologis yang penting dalam mendorong aspirasi Presiden Sukarno untuk memimpin dunia Asia-Afrika masuk ke orbit Peking. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 94-97. Untuk penilaian atas “kemampuan nuklir” Jakarta oleh Pemerintah Amerika, lihat DOKUMEN No. 19.

59. NCNA, 3 Desember 1964; Indonesian Information Service, 3 Desember 1964. Juga David Paul Mozingo, *Chinese Policy Towards Indonesia 1949-1967*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1976, hlm. 208-209.
60. “Soekarno Quits UN,” *The Straits Times*, Singapura, 3 Januari 1965. “Soek Predicts UN Loss of Authority in Asia Because Indon Walkout,” *The Straits Time*. Singapura, 11 Januari 1965. Juga Alastair M. Taylor, “Sukarno: First United Nations Dropout,” *International Journal*, Toronto, No. 20, Spring 1965, hlm. 206-213.
61. “Aidit in New Bid to Arm Workers, Peasants,” *The Straits Times*, Singapura, 19 Januari 1965.
62. “Peking to Jakarta: US\$ 100 Million Worth of Credits,” *The Straits Times*, Singapura, 30 Januari 1965.
63. “Chou to Visit Indonesia in April,” *The Straits Times*, Singapura, 29 Januari 1965.
64. *The Working People’s Daily*, Rangoon, Burma, 12 Februari 1969.
65. “Subandrio: The Big Fix,” *The Straits Times*, Singapura, 5 Juni 1965.
66. Untuk pertemuan Sukarno dengan Chou En-lai di Shanghai pada Juli 1965, lihat Laporan Kesaksian Bambang Widjanarko pada 3 Oktober 1970, dikutip dalam Rahadi S. Karni (ed.), *The Devious Dalang*, The Hague: Interdoc Publishing House, 1974, hlm. 18-19. Untuk pengakuan Sukarno sendiri bahwa ia seorang Marxis, lihat *op. cit.*, hlm. 39. Diyakini bahwa Njoto memiliki pengaruh ideologis yang besar atas Presiden Sukarno. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 28.

Menurut Kolonel D. Sugondo, sebuah pesawat Hercules milik AURI membawa kiriman senjata ke Jakarta, sementara kiriman kedua diurus oleh Lloyd Shipping Company. Kapal perusahaan itu, *Gunung Kerintji*, tiba di Shanghai pada 1 Oktober 1965, dan membongkar muatannya di pelabuhan Tanjung Priok 10 hari kemudian. Senjata-senjata ini adalah AK buatan Rusia, dan tidak digunakan dalam operasi Untung karena datang terlambat. Pengapalan itu diurus oleh Budiardjo, anggota CC PKI, yang bekerja di perusahaan pelayaran negara, manifestnya mencantumkan muatannya berupa “bahan bangunan” untuk Markas Besar New Emerging Forces. Sesampai di pelabuhan, izin sandarnya diurus oleh seorang anggota pengurus SOBSI, Munir. Istri Budiardjo,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Carmel, adalah warganegara Inggris dan mengajar di universitas. Untuk pengalamannya setelah GESTAPU gagal, lihat bukunya Carmel Budiardjo, *Surviving Indonesia's Gulag: A Western Woman Tells Her Story*, London: Cassell, 1996. Wawancara saya dengan Kolonel D. Sugondo diadakan di kantornya di TEPERPU, Jakarta, pada 29 April 1971.

67. Kesaksian Widjanarko dalam S. Karni, *op. cit.*, hlm. 82-85.
68. Kesaksian Widjanarko dalam S. Karni, *op. cit.*, hlm. 99-105.
69. Kesaksian Widjanarko dalam S. Karni, *op. cit.*, hlm. 188-190.
70. "Subandrio Fails in Red China: No Military Support," *The Straits Times*, Singapura, 31 Januari 1965.
71. "No Peking Arms Aid to Soek," *The Straits Times*, Singapura, 2 Februari 1965.
72. "Bandoeng Disunity: Preview for Algiers," *The Sunday Times*, Singapura, 25 April 1965; "Bandung: Communist Show All the Way," *The Straits Times*, Singapura, 18 April 1965; "Soek's 'Crush Malaysia' Campaign: Second Bid to Get Backing," *The Straits Times*, Singapura, 16 April 1965.
73. "PKI Paper Hits Out: Afro-Asian Islamic Conference Rebuked for Not Supporting Jakarta on Malaysia," *The Straits Times*, Singapura, 18 Maret 1965.
74. "Climb Down Move on Soek and Mao: India a Lackey," *The Straits Times*, Singapura, 16 Juni 1965; "Ben Bella Out," *The Straits Times*, Singapura, 20 Juni 1965; "Algiers Showdown: Sukarno Leaves Jakarta," *The Straits Times*, Singapura, 27 Juni 1965; "Algiers: India Leads Move to Declare a Long Recess," *The Straits Times*, Singapura, 26 Juni 1965.
75. "Soek Turns Boo Boys on Indian Embassy," *The Straits Times*, Singapura, 24 Juni 1965.
76. "Nasution: We Will Not Start Open War Against Malaysia," *The Straits Times*, Singapura, 19 Juni 1965.
77. Frederick P Bunnell, "Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965. President Sukarno Moves from Non-Alignment to Confrontation," *Indonesia* 2, Oktober 1966, hlm. 65.
78. Untuk evolusi aliansi strategis Cina-Indonesia, lihat J. Soedjati Djiwandono, *Konfrontasi Revisited: Indonesia's Foreign Policy Under Sukarno*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996; J. A. C. Mackie, *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute, 1963-1966*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974; Jan M. Pluvier, *Confrontation: A Study in Indonesian Politics*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1965; James Harold dan Denis Shell-Smith, *The Undeclared War: The Story of the Indonesian Confrontation of Malaysia, 1962-1966*, Kuala Lumpur: The University of Malaya Cooperative

Catatan

Bookshop, 1979; Simon, Sheldon W., *The Broken Triangle: Peking, Jakarta and the PKI*, Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1969.

Untuk kebijakan Moskow dan Peking untuk Indonesia selama periode ini, lihat Justus M. van der Kroef, "Soviet and Chinese Influence in Indonesia," dalam Alvin Z. Rubinstein, (ed.), *Soviet and Chinese Influence in the Third World*, New York: Praeger, 1975, hlm. 51-87; David Paul Mozingo, *Chinese Policy Towards Indonesia: 1949-1967*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1976; Ruth T. McVey, *The Soviet View of the Indonesian Revolution: A Study in the Russian Attitude Towards Asian Nationalism*, Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1957; Arnold C. Brackman, *Southeast Asia's Second Front: The Power Struggle in the Malay Archipelago*, New York: Praeger, 1966; George McTurnan Kahin, *The Asian-African Conference: Bandung, Indonesia, April 1955*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1956; Michael Leifer, "Pattern of Indonesian Foreign Policy," dalam F. S. Northedge (ed.), *The Foreign Policies of Powers*, London: Faber and Faber, 1974; Peter Howard, "Moscow, Jakarta and the PKI," *Mizan*, Vol. 11, No. 2, Maret-Oktober 1966, hlm. 156-161; Peter Howard, "Russia, China and Southeast Asia," *Mizan*, Vol. 10, No. 4, Juli-Agustus 1968, hlm. 156-161; Peter Howard, "The USSR and Indonesia," *Mizan*, Vol. 9, No. 1, Mei-Juni 1967, hlm. 108-117; Guy Pauker, "The Soviet Challenge in Indonesia," *Foreign Affairs*, Vol. 40, No. 4, Juli 1962, hlm. 612-627; Justus M. van der Kroef, "The Sino-Indonesian Partnership," *Orbis*, No. 8, Summer 1964, hlm. 332-356.

79. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 45, 82-83, 91.
80. *Antara*, Warta Berita, 5 Juni 1965.
81. *Pikiran Rakyat*, 7 Juni 1965.
82. Anderson, Benedict R. O'G. dan Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1971, hlm. 99.
83. M. M. Ehermann, "The Indonesian Military in the Politics of Guided Democracy: 1957-65." Tesis M.A. tidak diterbitkan, Ithaca: Cornell University Press, 1967, hlm. 213.
84. Wawancara dengan Brigjen Nugroho Notosusanto di Jakarta, 30 April 1971.
85. *The New York Times*, 25 Agustus 1965.
86. *Antara*, Jakarta, 2 Agustus 1966.
87. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 16-18. Juga wawancara saya dengan Brigjen Nugroho Notosusanto, di Jakarta, 30 April 1971.
88. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 163-166.
89. *Ibid.* Kolonel Bambang S. Widjanarko, Ajudan Presiden, memberi

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

kesaksian bahwa ia hadir dalam sejumlah pertemuan ketika Presiden memerintahkan Untung, Brigjen Sabur dan jenderal-jenderal yang lain untuk mengambil langkah pembersihan kilat atas jenderal-jenderal yang tidak loyal. Lihat Karni, *op. cit.*, hlm. 10-13, 76, 105, 163, 168, 170. Widjanarko yakin bahwa Brigjen Sabur bekerja sama dengan Untung dan Supardjo merencanakan dan melaksanakan pembersihan para jenderal itu dan bahwa Brigjen Sabur juga adalah anggota konspirasi PKI itu, *op. cit.*, hlm. 67.

90. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 168.
91. Kesaksian Widjanarko in Karni, *op. cit.*, hlm. 71, 170-171.
92. Kesaksian tertulis Brigjen Sugandhi kepada TEPERPU; salinan diperoleh dari Brigjen Nugroho Notosusanto dalam wawancara di Jakarta pada tanggal 30 April 1971.
93. DOKUMEN No. 5.
94. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 21, 27-28, 58-59. Isi surat itu pasti penting sekali bagi Presiden Sukarno dilihat dari kenyataan bahwa ketika angin baik bertiup ke arah Jenderal Suharto pada pukul 16.00 pada 1 Oktober, dan Presiden Sukarno sadar bahwa permainan sudah berakhir, ia memerintahkan Kolonel Suparto untuk segera bergegas ke rumah Ratna Sari Dewi—tempat ia berada malam sebelumnya. Suparto diperintahkan mencari di situ jas yang dipakai Presiden Sukarno di Stadion Senayan pada malam sebelumnya dan membawa jas itu segera kepadanya di rumah Komodor Susanto di Halim. Ketika kolonel itu tiba kembali dan menyerahkan jas itu, Presiden Sukarno memasukkan tangannya ke dalam saku jas, mengeluarkan surat itu dan merobek-robeknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan demikian menghancurkan bukti yang mungkin dapat digunakan untuk menuduhnya sebagai ikut terlibat dalam pembunuhan para jenderal.

Tidak jelas apakah surat itu kemudian direkatkan kembali, ketika pasukan Suharto menduduki rumah itu pada malam 1 Oktober, setelah Presiden Sukarno berangkat menuju Bogor pada pukul 11.30 malam. Dalam wawancara saya dengan Brigjen Nugroho Notosusanto di Jakarta pada 21 April 1971, saya tanya tentang nasib surat itu, dan dari jawabannya saya mendapat kesan bahwa TEPERPU mungkin berhasil mendapatkannya, atau paling tidak tahu mengenai isinya.

Saya selanjutnya mendapat kesan bahwa meski ada bukti lain yang lebih menyudutkan lagi Presiden Sukarno dalam kaitan dengan pembunuhan para jenderal, oditur-oditur militer sudah mendapat perintah dari Suharto agar tidak menuduhnya. Apakah ini ungkapan jiwa besar bagi seseorang yang telah demikian banyak berbuat bagi bangsa itu, atau sebuah langkah politik, tidak jelas bagi saya pada waktu itu.

Catatan

Namun, penelitian lebih dalam tentang GESTAPU meyakinkan saya bahwa keduanya benar, dalam arti, jiwa besar bagi seseorang yang telah demikian banyak berbuat bagi bangsa itu mungkin lebih besar kadarnya, dan bahwa dalam kenyataan Suharto melindungi Presiden Sukarno agar ia sendiri nanti tidak turut disidangkan. Saksi utama tentang peran Presiden Sukarno dalam GESTAPU, Kolonel Bambang S. Widjanarko, ajudannya, baru dipanggil untuk memberi kesaksian pada bulan Oktober 1970, setelah Sukarno wafat. Lihat Karni, *op. cit.*, hlm. 38.

Sekitar 35 tahun kemudian, Suharto sendiri jatuh dari kekuasaan setelah rezimnya jatuh pada tahun 1998. Ia menghadapi penyelidikan tentang tuduhan-tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dalam mengelola dana yayasan-yayasan miliknya, pelanggaran HAM, korupsi dan pelanggaran-pelanggaran lain selama kekuasaannya yang lama itu. Presiden Wahid menyatakan pada 24 Mei 2000 bahwa ia akan memaafkan Suharto jika ia ternyata bersalah, tetapi setelah Suharto mengembalikan semua kekayaannya yang tidak halal itu, untuk mewujudkan 'rekonsiliasi nasional.' "President Abdurrahman Wahid Will Pardon Soeharto," *The Jakarta Post*, Jakarta, 24 Mei 2000.

95. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 56, 76.
96. "MAHMILLUB, Berkas No. PTS-027/MMLB-I/K/1968, Jakarta. Perkara: Kamarusaman bin Ahmad Mubaidam, Alias Sjam, Djimin, Ali Muchtar, Ali Sastra, Sjamsudin dan Karman," *op. cit.*, hlm. 69-73. Juga *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, *op. cit.*, hlm. 85-87.
97. Hubungan budaya, seni dan politik telah dibahas oleh Victor M. Fic, dalam bukunya *From Majapahit and Sukuh to Megawati Sukarnoputri: The Continuity and Change in Religion, Culture and Politics of Indonesia: 1200 A.D. to 2000 A.D.* New Delhi: Abhinav Publications, 2003.
98. Rekonstruksi pertemuan yang penting ini, dan juga rekonstruksi dua rapat CC PKI berikutnya, 26 dan 28 pada Agustus, didasarkan pada sumber-sumber berikut:
 - a. *Pengadilan Perkara Njono, Sidang Pertama dan Sidang Ketiga*, 14 dan 15 Februari 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.10 GMT; kesaksian Njono dan kesaksian Peris Pardede selama dua hari ini. Kesaksian Mayor Sujono pada 16 Februari 1966, disiarkan pada 17 Februari 1966, pada 5.07 GMT.
 - b. *Pengadilan Perkara Sudisman, Sidang Ketiga*, 6 Juli 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.30 GMT. *Pengadilan Perkara Sudisman, Sidang Keenam*, 7 Juli 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 23.00 GMT, kesaksian Peris Pardede. *Pengadilan Perkara Sudisman, Sidang Ketujuh*, 8 Juli 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.15 GMT, kesaksian Sjam.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- c. "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia," *op. cit.*, *passim*.
- d. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, *passim*.
- e. *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1966.

Sementara ada sejumlah hal yang tidak konsisten dalam uraian di atas menyangkut hal-hal tertentu, yang muncul dalam ketiga rapat CC PKI itu, yang menyebabkan rekonstruksi rapat-rapat itu tidak terlalu akurat di sana-sini, namun, secara keseluruhan, uraian-uraian ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang garis-besar Rencana Besar PKI yang akan diuraikan di sini.

- 99. "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia," *op. cit.*, hlm. 58.
- 100. "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia," *op. cit.*, hlm. 58.
- 101. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 95. Strategi ini sukses, dan berhasil mengelabui banyak spesialis Amerika tentang Indonesia sehingga mereka percaya bahwa GESTAPU sebenarnya adalah persoalan intern Angkatan Darat. Penelitian terkemuka yang menganut pandangan ini adalah "Cornell Paper" yang ditulis Benedict R. O'G. Anderson & Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1971.

Argumen dalam "Cornell Paper" ini selanjutnya diperluas oleh Rudolf Mrazek, dalam bukunya berjudul *The United States and the Indonesian Military 1945-1965: A Study of an Intervention*, Vol. I & Vol. II. Prague: The Czechoslovak Academy of Sciences, The Oriental Institute, 1978. Ciri utama dari penelitian Mrazek untuk "membuktikan" intervensi Amerika dalam persoalan militer Indonesia ialah kata-kata yang tertera, "*local army friends*" (teman-teman Angkatan Darat setempat), yang berarti pucuk pimpinan AD, sebagai alat bagi kebijakan Amerika Serikat. Mrazek mengambil kata-kata ini dari Dokumen Gilchrist yang dipalsukan oleh Mayor Louda, seorang perwira dinas rahasia Cekoslowakia.

Sepanjang menyangkut Dewan Jenderal, Mrazek tidak memberikan bukti bahwa Dewan itu ada, tetapi mempercayai desas desus, yang direkayasa oleh Aidit seperti telah kita lihat, bahwa "Pada musim kemarau 1965, hampir tidak ada seorang pun yang dapat meyakinkan mereka (Untung dan para perwira progresif-revolusioner lainnya, ed.) bahwa tidak ada pembentukan Dewan Jenderal oleh pimpinan Angkatan Darat, dan bahwa jenderal-jenderal itu bersekongkol dengan impe-

Catatan

rialisme Amerika dan C.I.A. menentang prinsip-prinsip dasar nasionalisme Indonesia dan semangat *jago-satria*,” *op. cit.*, Vol. II, hlm. 157-1588.

Mrazek juga menafsirkan GESTAPU sebagai konflik intern AD, yang dipicu oleh pemberontakan resimen Tjakrabirawa di bawah Untung, pasukan pengawal Presiden, yang kemudian menimbulkan “ledakan yang besar dan dahsyat yang mengguncang sendi-sendi masyarakat Indonesia.” *op. cit.*, Vol. II, hlm. 160. Tidak ada sepele kata pun tentang Aidit sebagai otak di balik “persoalan intern Angkatan Darat” itu, yang bekerja melalui Biro Khusus dan Sjam, padahal bukti-bukti yang dapat dipercaya mengenai ini banyak sekali, dalam bentuk berkas-berkas sidang perkara dan bukti-bukti lain yang tersedia ketika Mrazek menulis, misalnya, *OTOKRITIK* Supardjo.

Ini juga berlaku bagi pernyataan Mrazek bahwa hingga saat ia menulis bukunya itu—yang terbit tahun 1978—“Tidak ada bukti yang pasti tentang keterlibatan Presiden Sukarno yang telah diterbitkan untuk umum hingga saat ini, dan pertanyaan itu tetap belum terjawab,” *op. cit.*, Vol. II, hlm. 163. Ia dapat sebenarnya membaca buku Rahadi S. Karni, *The Devious Dalang*, yang terbit pada 1974 di Belanda, yang pasti mudah diperolehnya. Misalnya, Karni mengutip kesaksian Widjanarko bahwa Presiden Sukarno memerintahkan Untung pada tanggal 4 Agustus 1965 untuk melakukan pembersihan pucuk pimpinan Angkatan Darat, dan aspek-aspek lain dari keterlibatan langsung Presiden dalam GESTAPU, sebagai salah seorang pengambil inisiatif bersama Aidit.

Selain tidak ada bukti-bukti dokumen untuk membuktikan tuduhan Dokumen Gilchrist, adanya Dewan Jenderal dan tuduhannya tentang asal-usul GESTAPU, penelitian Mrazek kehilangan kredibilitasnya karena mengutip sumber-sumber pribadi tanpa menyebutkan nama.

Namun, kita harus mengerti akar dari sikap anti-Amerika Mrazek yang kuat tentang kebijakan Amerika Serikat untuk Indonesia, terutama kebijakan militernya. Tidak lama setelah masuk Oriental Institute di Praha pada 1968, apa yang disebut “normalisasi” melanda studi dunia Timur yang mencoba menghentikan kecenderungan liberal Musim Semi Praha Dubcek. Orang-orang yang diangkat partai untuk mengambil alih pimpinan Oriental Institute memecat, karena alasan-alasan politik, banyak sekali spesialis melalui “*proverka*” yang kejam itu, yaitu penyaringan kandidat berdasar sikap politik. Mereka yang tidak lulus tidak boleh menerbitkan hasil penelitian mereka, bahkan hasil penelitian pribadi mereka, dan sebagian besar terpaksa bekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Selain itu, ideolog-ideolog yang mengelola lembaga tersebut pada waktu itu mengarahkan kegiatan lembaga itu pada penelitian tentang dan pemberian dukungan pada gerakan-gerakan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

revolusioner di Dunia Ketiga, mengikuti garis strategi Moskow, dan berjuang melawan “petualangan” pengikut Mao dan imperialisme Amerika di bagian-bagian dunia itu.

Sikap anti-Amerika Mrazek tentang militer Indonesia tentu saja bertambah kuat ketika ia sekolah pasca sarjana di Cornell University pada 1970, dan kemudian ketika menulis penelitiannya yang sekarang ini di bawah Jaroslav Cesar, ideolog kepala Institute itu, yang mengarahkan penelitian itu dengan ketat agar sesuai dengan garis partai.

Untuk keadaan Oriental Institute pada masa “normalisasi,” lihat Filipisky (ed.), *Cesti a slovensti orientaliste, afrikaniste a iberoamerikan* (Terj. Spesialis Ceko dan Slowakia dalam Studi Oriental, Afrika, dan Amerika Latin). Sebuah buku kenangan diterbitkan pada perayaan 650 tahun Charles University di Praha, Praha: Nakladatelstvi Libri, 1999. Pendahuluan oleh Jiri Becka dan Miloslav Krasa, hlm. 38.

102. Rekonstruksi rapat-rapat kelompok Sjam berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari sidang-sidang berikut: *Pengadilan Perkara Sjam, Sidang Pertama*, 19 Februari 1968, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri 12.00 GMT. *Sidang Kedua*, 20 Februari 1968, disiarkan pada hari yang sama, 12.30 GMT. *Sidang Ketiga*, 20 Februari 1968, disiarkan pada 21 Februari 1968, 00.01 GMT. *Sidang Keempat*, 21 Februari 1968, disiarkan pada 22 Februari 1968, 00.01 GMT. *Sidang Kelima*, 23 Februari 1968, disiarkan pada 23 Februari, 1968, 12.00 GMT. *Sidang Keenam*, Februari 23, 1968, disiarkan pada 24 Februari, 1968, 00.01 GMT. *Sidang Ketujuh*, 24 Februari 1968, disiarkan pada 24 Februari 1968, 12.00 GMT.

Lihat juga “MAHMILLUB, Berkas No. PTS-027/MMLB-I/K/1968, Jakarta. *Perkara KAMARUSAMAN bin Ahmad Mubaldam, Alias Sjam, Djimin, Mi Muchtar, Ali Sastra, Sjamsudin dan Karman*. Laporan sidang selanjutnya dikutip sebagai “Perkara Sjam,” *op. cit.*

103. Sunardi, I. D. M., *Lecture on the September 30 Movement, The Indonesian Communist Party and the Elimination of the Communists in Indonesia*. Jakarta: Department of Information, Republic of Indonesia, 1969, hlm. 28-29. Juga *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, op. cit.*, hlm. 94.
104. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, op. cit.*, hlm. 76. Tampaknya kutipan ini diambil dari pernyataan Aidit, yang dibuatnya ketika ia ditemukan di tempat persembunyiannya di sebuah desa dekat Solo pada November 1965, dan sebelum ditembak mati oleh pasukan Yasir Hadibroto.
105. *Pengadilan Perkara Njono, Sidang Ketiga*, 15 Februari 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.10 GMT, bukti diberikan oleh Pardede pada 15 Februari 1966.

Catatan

106. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, op. cit.*, hlm. 77-78.
107. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, op. cit.*, hlm. 78. Pernyataan seperti ramalan ini menjadi kenyataan pada 1 Oktober 1965 pukul 10.30 pagi di Pangkalan Udara Halim, tempat rencana-rencana PKI mengalami kegagalan. Sementara Presiden mendukung pembersihan dan mengatakan kepada Supardjo di situ bahwa dalam situasi seperti itu mau tidak mau “darah akan tertumpah” dan bahwa pembersihan itu hanya “riak kecil di permukaan samudera,” ia menolak mengakui Dewan Revolusi sebagai “kekuasaan politik tertinggi negara.” Di sini rencana PKI kacau balau, padahal sejak dari awal manuvernya lihai, dan brilian.
108. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, op. cit.*, hlm. 77-78.
109. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, op. cit.*, hlm. 77-78. Juga *Pengadilan Perkara Njono, Sidang Ketiga*, 15 Februari 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.10 GMT, bukti diberikan oleh Pardede pada 15 Februari 1966.
110. *Pengadilan Perkara Njono, Sidang Ketiga*, 15 Februari 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.10 GMT, bukti diberikan oleh Pardede pada 15 Februari 1966.
111. “Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia,” *op. cit.*, hlm. 57.
112. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 19-20.
113. *Pengadilan Perkara Sudisman, Sidang Ketiga*, 6 Juli 1967, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.10 GMT.
114. *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya, op. cit.*, hlm. 72-73.
115. *Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, op. cit.*, hlm. 84-85. Juga *Pengadilan Perkara Dr. Subandrio*, 3 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 9.30.

Maksud kunjungan Subandrio ke Sumatra tidak sepenuhnya jelas. Menurut pengacara yang menanyai Widjanarko pada 22 Oktober 1970, ada pertemuan di Istana Merdeka pada 26 September 1965, yang dihadiri oleh Presiden, Waperdam I Subandrio dan Waperdam II Leimena, yang diberi tanggung jawab atas wilayah-wilayah berikut: Leimena—Jakarta; Subandrio—Sumatra; Presiden — Jawa Tengah atau Bali. Lihat Karni, *op. cit.*, hlm. 72. Kemungkinan besar kunjungan Subandrio ke Medan ada kaitannya dengan kemungkinan bahwa Presiden atas kehendaknya sendiri, atau setelah dipaksa, diterbangkan ke Cina untuk “perawatan kesehatan,” yaitu pensiun sukarela atau dipaksa, sesuai dengan rencana Marsekal Chen Yi dan Subandrio pada pertengahan Agustus. Diperlukan bukti-bukti lebih lanjut untuk menjelaskan pernyataan yang penuh teka-teki ini.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

116. *Perkara Sjam*, *op. cit.*, hlm. 20-21.
117. *Sidang Mahmillub, Sidang Kedua di Medan*, 6 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 7 Oktober 1966, 12.18 GMT
118. Anatomi *coup* ini berdasarkan bukti-bukti tentang sepuluh kali rapat anggota komplotan yang terungkap pada waktu *Pengadilan Perkara Sjam*, diperkuat oleh kesaksian mereka yang hadir dalam sepuluh pertemuan itu: Untung, Supardjo, Latief, Heru, Sigit, Sujono dan anggota komplotan yang lain. Lihat *Perkara Sjam, Sidang Pertama*, 19 Februari 1968, Radio Djakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.00 GMT. *Sidang Kedua*, 20 Februari 1968, disiarkan pada hari yang sama, 12.30 GMT. *Sidang Ketiga*, 20 Februari 1968, disiarkan 21 Februari 1968, 00.01 GMT. *Sidang Keempat*, 21 Februari 1968, disiarkan 22 Februari 1968, 00.01 GMT. *Sidang Kelima*, 23 Februari 1968, disiarkan 23 Februari 1968, 12.00 GMT. *Sidang Keenam*, 23 Februari 1968, disiarkan 24 Februari 1968, 00.01 GMT. *Sidang Ketujuh*, 24 Februari 1968, disiarkan 24 Februari 1968, 12.00 GMT.

Lihat juga *Perkara KAMARUSAMAN*, *op. cit.*, *passim*.

119. Kepustakaan tentang kudeta Komunis Februari 1948 di Cekoslowakia cukup luas, dan buku yang terbaik adalah buku Karel Kaplan, *Pet kapitolo unoru* (Terj. Lima Bab tentang Februari). Brno: Doplnek, 1996. Tetapi bahkan buku yang sebaik inipun tidak memberikan jawaban yang meyakinkan atas pertanyaan mengapa Benes menyerah pada Gottwald, menerima pengunduran diri para menteri partai-partai demokrasi dan mengangkat sebuah kabinet yang didominasi Komunis, padahal ia telah menegaskan berkali-kali bahwa ia tidak akan menerima pengunduran diri para menteri partai-partai demokrasi dan menentang tekanan-tekanan untuk menjadikan negerinya komunis.

Jawaban lengkap untuk pertanyaan ini terkubur dalam arsip-arsip di Moskow. Namun, bukti-bukti yang bocor ke masyarakat luas sejauh ini menunjukkan bahwa pada Januari 1948 Molotov menugaskan seorang Jenderal KGB, Pavel Sudoplatov, ke Praha untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Benes agar Benes mempercepat pengalihan damai kekuasaan ke dalam tangan Gottwald, karena Kremlin telah memutuskan untuk memasukkan negerinya ke dalam blok Sovyet karena alasan-alasan strategis. Dan ketika Benes mengulur-ulur waktu dan enggan membentuk kabinet dengan anggota yang terdiri dari sebagian besar orang Komunis, V Zorin, yang bertugas menjalankan misi di Praha untuk mengawasi pengalihan kekuasaan itu, mengirimkan pesan yang keras kepada Benes pada Februari 22 agar ia melakukan apa yang seharusnya dilakukannya atau kalau tidak akan menanggung sendiri akibatnya. Lihat Victor M. Fic, "Zlom v Benesove Strategii: Nedele odpoledne, 22 unora 1948" (Terj. Hancurnya Strategi Benes: Minggu Petang, Februari 22, 1948). Sebuah

Catatan

makalah disajikan dalam International Conference on The Czechoslovak 'Februari 1948,' yang diadakan di Praha Februari 19 - 21, 1998. Juga Pavel dan Anatoli Sudoplatov, *Special Tasks*. New York: Little Brown, 1994, hlm. 234-235.

Ada banyak sekali persamaan antara *coup* yang sukses di Praha pada 1948 dan *coup* yang gagal di Jakarta pada 1965, dalam arti keduanya dilakukan oleh partai komunis lokal untuk kepentingan strategis kekuasaan asing, yaitu di Praha kepentingan Uni Sovyet dan di Jakarta kepentingan Cina.

120. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 60-62.
121. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 62-63.
122. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 63-64.
123. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 64.
124. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 64-65.
125. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 65-67.
126. Ini contoh yang baik mengenai kekacauan intern Angkatan Darat dan sampai seberapa jauh Biro Khusus berhasil menyusupi korps perwiranya dan prajuritnya di Jawa Tengah dan Timur.

Kegagalan dinas intelijen AD, di bawah Mayjen S. Parman, menangkap Untung adalah sebuah contoh lain mengenai kekacauan di tingkat pucuk pimpinannya. Kita telah melihat sebelumnya Presiden mengeluarkan perintah pada Untung, di tengah kehadiran Brigjen Sabur dan jenderal-jenderal yang lain sejak Agustus 4, untuk segera mengambil langkah membersihkan jenderal-jenderal yang tidak loyal, dan sudah pastilah informasi semacam ini sampai ke telinga S. Parman. Terlepas dari semua itu, Jenderal Yani sudah diberi tahu oleh Brigjen Sugandhi tentang kudeta yang akan dilakukan itu pada pagi 30 September 1965, sebagai hasil bincang-bincangnya dengan Sudisman dan Aidit hari sebelumnya.

127. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 66-68.
128. *Pengadilan Perkara Sudisman, Sidang Ketujuh*, 22 Juli 1967, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, disiarkan 24 Juli 1967, 13.31 GMT.
129. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 68.
130. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 68-9.
131. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 69-72.
132. *Pengadilan Perkara Supardjo, Hari Kedua*, 24 Februari 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 9.30.
133. *Pengadilan Perkara Sudisman, Sidang Ketujuh*, 8 Juli 1967, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.15 GMT, kesaksian Sjam.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

134. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 85-87.
135. *Pengadilan Perkara Supardjo, op. cit.*, hlm. 28, Untung memberi kesaksian.
136. Katoppo, *op. cit.*, hlm. 127.
137. Ringkasan kesaksian Njono dibacakan oleh seorang jurubicara Angkatan Darat pada jumpa pers di Jakarta pada 3 Desember 1965. Kesaksian ini dilaporkan dalam sebuah artikel, "Soek Would Have Been Killed or Jailed If the Coup Had Succeeded," *The Straits Times*, Singapura, 4 Desember 1965, yang menafsirkan istilah "diamankan" yang digunakan Njono sebagai berarti dibunuh atau dipenjarakan.
138. Laporan Brigjen Sabur kepada Presiden di Bogor pada 2 Oktober 1965, dalam kesaksian Widjanarko, Karni, *op. cit.*, hlm. 88-89.
139. *Pengadilan Perkara Dr. Subandrio, Sidang Kesebelas*, 10 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 10 Oktober 1966, 12.12 GMT. Bigjen D. I. Pandjaitan, yang bertanggung jawab atas logistik, tahu mengenai pengadaan senjata secara gelap dari Cina ini dan meminta diadakan penyelidikan resmi atas hal itu. Sutter, *op. cit.*, hlm. 538. Barangkali karena alasan ini maka namanya dimasukkan ke dalam daftar nama jenderal yang akan dibersihkan ketika Aidit mendengar tentang permintaan untuk penyelidikan ini dari Dr. Subandrio.
140. Justus M. van der Kroef, "The Sino-Soviet Rupture," *The China Quarterly*, London, No. 33, Januari-Maret 1968, hlm. 19-20.
141. Misi Suharto untuk berunding tentang penyelesaian pemberontakan PKI di Madiun dibahas oleh Ann Swift, *op. cit.*, hlm. 75.
142. W. F. Wertheim, "Whose Plot? New Light on the 1965 Events," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 2, 1979, hlm. 201.

Dalam artikel ini pengarang mengemukakan teori yang paling tidak dapat dipertahankan tentang kudeta PKI 1965, yang terdiri dari elemen-elemen utama sebagai berikut: 1. kudeta itu adalah konflik intern Angkatan Darat, PKI terlibat sedikit sekali; 2. Sjam, seorang yang misterius, seorang mata-mata ganda, dan melalui dia AD memanipulasi PKI; 3. komplotan itu adalah konspirasi beberapa elemen AD untuk memprovokasi, melalui Sjam, PKI memunculkan sikapnya agar partai itu dapat dihancurkan; 4. jenderal-jenderal dikorbankan untuk memancing PKI keluar ke permukaan.

Dalam Conference on Asian History, yang diselenggarakan oleh Fakultas Sejarah, University of Malaya, Kuala Lumpur, 5-10 Agustus 1968, Professor Wertheim mengajukan argumen bahwa Sjam adalah tokoh fiksi yang diciptakan oleh AD alias tokoh ini sebenarnya tidak ada. Setelah konferensi saya menulis surat kepada Kolonel Nugroho Notosusanto

Catatan

bahwa menurut rencana saya akan berkunjung ke Jakarta untuk melihat dokumen-dokumen yang digunakan penuntut umum untuk membangun tuduhannya untuk Sjam dalam sidangnya di depan pengadilan militer pada tahun itu. Selain itu, saya minta izin untuk mengunjungi Pangkalan AU Halim, untuk masuk dan memotret, ke rumah yang digunakan Aidit untuk tempat mengendalikan operasi 1 Oktober 1965, rumah yang digunakan sebagai markas oleh Untung dan Supardjo, yaitu CENKO II dan rumah Susanto, tempat Presiden Sukarno menjadi tuan rumah dalam acara makan siang yang terkenal itu pada hari tersebut.

Ketika undangan tiba, saya berangkat dari Singapura, tempat saya mengajar sebagai profesor ilmu politik di Nanyang University, ke Jakarta pada minggu ketiga September 1968, untuk membuktikan siapa Sjam sebenarnya, sampai saya puas, dan mengunjungi tempat-tempat di Halim tersebut dan memotretnya. Setelah mendapat izin, pengawal membawa saya ke Istana Presiden, tempat berkas pemeriksaan dan bukti-bukti pribadi mengenai Sjam disimpan dalam sebuah kamar yang terkunci, yang tersusun tinggi di atas tiga kereta dorong. Setelah menghabiskan satu hari memeriksa dokumen-dokumen itu, saya meninggalkan istana dengan keyakinan penuh bahwa tokoh Sjam itu benar-benar ada.

Hari berikutnya saya mengunjungi Halim, dan di situ kepada saya ditunjukkan kantor Omar Dhani, di gedung administrasi pangkalan udara itu, dan juga kamar tempat Brigjen Supardjo melapor kepada Presiden pada 1 Oktober 1965 bahwa para jenderal telah diamankan.

Akhirnya, saya berkunjung ke markas besar pelaku-pelaku utama di Halim, dan tata letaknya saya pelajari. Ini terutama penting untuk rumah Susanto, markas Presiden Sukarno, tempat Supardjo masuk lewat pintu belakang untuk menyampaikan pesan-peran dari Aidit, melalui Untung, dan kemudian membawa kembali jawaban-jawaban Presiden. Saya juga mempelajari kamar tidur di rumah Susanto, tempat Presiden beristirahat dan menerima Supardjo, Omar Dhani, Nyonya Dewi dan lain-lain untuk pembicaraan empat mata. Beberapa foto yang diambil pada waktu itu direproduksi dalam penelitian ini, sebagai Gambar.

143. W. F. Wertheim, "Suharto and the Untung Coup: The Missing Link," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 1, No. 2, 1970, hlm. 54.
144. Kutipan ini diambil dari permohonan banding yang diajukan Latief pada 5 Mei 1978 kepada mahkamah militer di Jakarta, yang mempersoalkan yurisdiksi untuk mengadilinya dan mengemukakan bahwa Suharto juga seharusnya diadili karena dia "sudah tahu sebelumnya" mengenai pembersihan itu, dan karena ia tidak melaporkan dengan segera hal itu kepada Jenderal Yani, atasannya. Permohonan banding itu adalah sebuah dokumen sepanjang 60 halaman, sebagian dikutip dalam "Documents:

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

The Latief Case: Suharto's Involvement Revealed," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 2, 1979, hlm. 249.

145. "Documents: The Latief Case: Suharto's Involvement Revealed," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 2, 1979, hlm. 249.
146. Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo, Men/Pangak, mengungkapkan kemungkinan nama Suharto ditambahkan kemudian pada daftar nama jenderal-jenderal yang akan "diamankan"; lihat W. E Wertheim, "Suharto and the Untung Coup: The Missing Link," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 1, No. 2, 1970, hlm. 53.

Seperti halnya dengan Presiden Sukarno, demikian pula halnya dengan Mayjen Suharto: Tampaknya ada bukti-bukti yang tidak dikeluarkan oleh penuntut umum pada waktu sidang perkara anggota komplotan itu. Suharto sendiri menyinggung kemungkinan ini dalam wawancaranya dengan *Der Spiegel* pada 1970. Jika pada awalnya Suharto percaya bahwa Latief datang ke rumah sakit untuk menjenguk putranya, ia mengatakan di kemudian hari bahwa ia menyadari Latief datang untuk membunuhnya. Lihat "Documents: The Latief Case: Suharto's Involvement Revealed," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 2, 1979, hlm. 249.

Namun, Latief dengan tegas menyangkal bahwa maksudnya pergi ke rumah sakit itu pada 30 September adalah untuk membunuh Suharto; ia mengatakan, "Tidak dapat dibayangkan bahwa saya berencana untuk mencederai orang yang sangat saya hormati, yang telah saya kenal sejak lama dan pernah menjadi komandan saya, pada masa lalu. Selain itu, logis bahwa seandainya saya benar-benar berencana membunuh Jenderal Suharto, *tindakan saya itu akan merupakan kesalahan yang sangat besar yang akan menyebabkan kegagalan seluruh gerakan 1 Oktober 1965*,. saya sangat yakin bahwa jika ada orang yang dapat dikatakan loyal pada pimpinan Presiden Sukarno, dialah orangnya." *loc. cit.*

Sampai Latief dan Suharto berbicara dan memberikan keterangan yang lebih rinci tentang kejadian-kejadian yang penting ini—Latief tentang pertemuan terakhir komplotan itu pada 30 September dan tiga pertemuannya dengan Suharto, dan Suharto tentang tiga pertemuannya ini dengan Latief—tidak akan mungkin diketahui apa sebenarnya yang terjadi pada akhir September 1965 itu.

Untuk memperoleh informasi otentik mengenai peristiwa-peristiwa ini dari sisi Presiden Suharto, saya menulis sepucuk surat kepadanya pada tanggal 31 Oktober 1996, meminta waktu untuk wawancara; surat itu saya antar sendiri ke tempat kediamannya di Jalan Cendana No. 8, Jakarta, ketika saya berkunjung ke Jakarta pada 1996 (Dokumen No. 7). Sayang, tidak ada jawaban.

Catatan

Dan meskipun Kolonel Latief menerbitkan buku dua tahun kemudian, setelah diwawancarai untuk pertama kalinya setelah ia dibebaskan dari penjara pada Mei 1998, ia sayangnya tidak memberikan bukti-bukti baru tentang tiga pertemuannya dengan Suharto pada akhir September 1965. Lihat *Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G 30 S*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000.

147. Patrick Walters, "Jail Walls Hold Coup Secrets," *The Australian*, 25 Mei 1998; juga Patrick Walters, "Suharto's Secret Role in Coup," *The Australian*, Mei 25, 1998. Artikel-artikel ini melaporkan wawancara pertama dengan Latief di penjara Cipinang, Jakarta, pada 24 Mei 1998, tempat ia mendekam selama 20 tahun sejak 1978, di samping 11 tahun dalam sel penjara Salemba, karena peranannya dalam GESTAPU. Dalam wawancara yang diberikan tiga hari setelah tumbanganya Jenderal Suharto dari tampuk kekuasaan, Latief menyerukan agar Suharto diadili karena tidak melaporkan kepada Jenderal Yani, atasannya, rencana komplotan untuk membersihkan pucuk pimpinan Angkatan Darat, yang disampaikan kepadanya oleh Latief ketika mereka bertemu di rumah sakit militer di Jakarta pada 30 September 1965.
148. "Documents: The Latief Case: Suharto's Involvement Revealed," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 2, 1979, hlm. 249.
149. "Documents: The Latief Case: Suharto's Involvement Revealed," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 2, 1979, hlm. 249.
150. Patrick Walters, "Jail Walls Hold Coup Secrets," *The Australian*, 25 Mei 1998.
151. Perkara Sjam, *op. cit.*, hlm. 72. Juga *Pengadilan Perkara Dr. Subandrio, Hari Ketujuh*, 10 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 9.00, pernyataan Brigjen Amir Machmud, Panglima Kodam Jaya.
152. Supardjo dalam *OTOKRITIK* (Dokumen No. 4)
153. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 71-72.
154. "MAHMILLUB. Nomor PTS-19/MLB-II/SPD/1967, Perkara Mustapa Sjarif Supardjo," hlm. 15. Selanjutnya disebut *Perkara Supardjo, op. cit.*.
155. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Keduabelas*, 10 Oktober, 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, Siaran Langsung, 13.00 GMT.
156. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 71.
157. *Pernyataan Jenderal Nasution, op. cit.*, hlm. 1. Lihat juga Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 209, bahwa Ali Ebram ada di rumah Haryati di Grogol saat itu. Tampaknya, Untung juga memerintahkan kepada Latief untuk mencari Nasution yang terluka di rumah sakit militer di Jakarta.
158. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 206-207.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

159. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Keduabelas*, 10 Oktober , 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 13.00 GMT; pernyataan tertulis Presiden Sukarno.
160. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Pertama, 23 Februari 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 9.30. Juga *Perkara Supardjo, op. cit.*, hlm. 17.
161. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Ketujuh*, Desember 8, 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.14 GMT, kesaksian Jenderal Sunarjo.
162. Widjanarko bersaksi bahwa Presiden tiba di rumah Susanto membawa satu salinan daftar anggota Dewan Revolusi dalam sakunya, yang diperolehnya dari Supardjo di Pusat Komando Operasi. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 29-9, 65-67.
163. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Kedua, 24 Februari 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 9.00, kesaksian Supardjo. Juga *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 126.
164. *Perkara Supardjo, op. cit.* , hlm. 16.
165. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Kedua, 24 Februari 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 9.00, kesaksian Supardjo. Juga *Perkara Sjam, op. cit.*, kesaksian Supardjo, hlm. 136.
166. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Pertama, 23 Februari 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 9.30. Juga *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 126.
167. Dokumen No. 4
168. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Pertama, 23 Oktober, 1967. Radio Jakarta, Siaran Langsung, Siaran Dalam Negeri, 20.30.
169. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 90.
170. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 74-75.
171. Dokumen No. 9. Juga “Dekrit No. 1 Tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia,” dalam Boerhan dan Soebekti, *Fakta dan latar belakang “Gerakan 30 September,”* Lembaga Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Kosgoro, Jakarta, 1966, hlm. 167-170.
172. “Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia,” *op. cit.*, hlm. 58-59.
173. *Perkara Supardjo, op. cit.*, hlm. 178.
174. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 109-110.
175. Saya pergi ke rumah itu pada 20 September 1968 untuk melihat keadaan fisik dan susunan kamar tamu, kamar makan, kamar tidur, pintu depan dan pintu belakang, dan dapur, dan kemudian berjalan dari rumah itu ke CENKO II, markas besar Supardjo, Untung, Sjam, Latief, Heru dan

Catatan

lain-lain, dan juga pergi ke markas Aidit, dengan mobil. Untuk foto-foto semua lokasi ini, lihat Gambar X, IX, I, dan II.

176. Rekonstruksi hal-hal yang terjadi di rumah Susanto pada petang hari 1 Oktober 1965, yang dicoba dilakukan di sini, berdasarkan berkas MAHMILLUB yang mengadili tertuduh, dan juga wawancara yang diberikan pada penulis oleh dua pelaku langsung yang hadir di situ pada saat kejadian.

Wawancara pertama adalah dengan Dr. Johannes Leimena, Waperdam II, di kediamannya di Jakarta pada 28 September 1968, dari pukul 6.30 hingga 8.30 pagi. Wawancara kedua dengan Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, di kediamannya di Jakarta pada 21 September 1968, dari pukul 8.30 hingga 10.00 pagi.

Dari kedua wawancara ini penulis mendapat kesan ada suasana yang amat tegang dalam pertarungan kekuasaan selama petang hari yang panjang itu, langkah dan reaksi setiap pemain dan nuansanya, dan juga suasana keseluruhan, yang tidak dapat ditangkap oleh berkas-berkas pengadilan karena bahasa “birokrasi”-nya.

Namun, sumber yang paling penting adalah Kesaksian Widjanarko dalam S. Karni, *op. cit.*, hlm. 28-29, 63-66.

177. Kesaksian Widjanarko dalam S. Karni, *op. cit.*, hlm. 28-29, 64.
178. Kesaksian Widjanarko in Karni, *op. cit.*, hlm. 64-65.
179. Wawancara dengan Dr. Johannes Leimena di kediamannya di Jakarta, Jalan Teuku Umar No. 36, pada 20 September 1968, dari pukul 6.30 hingga 8.30 pagi hari.
180. Kesaksian Widjanarko dalam S. Karni, *op. cit.*, hlm. 62-63.
181. Menurut Widjanarko daftar akhir anggota Dewan Revolusi, seperti disiarkan pada pada pukul 2.00 siang, mendapat persetujuan dari Presiden, S. Kami, *op. cit.*, hlm. 206-207.
182. Untuk Dekrit No. 1 Dewan Revolusi, lihat *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, *op. cit.*, hlm. 11-112.
183. *Perkara Sjam*, 20 Februari 1968, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 00.01 GMT. Juga *Pengadilan Perkara Sudisman, Sidang Ketujuh*, Juli 8, 1967, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.15 GMT; kesaksian Sjam. Ia menyebutkan bahwa Aidit juga mengubah teks asli Dekrit No. 1 Dewan Revolusi.

Tidak ada seorang pun dapat mengubah daftar anggota ini, kecuali Aidit. Sudisman bersaksi bahwa Sjam terus menerus berhubungan dengan Audit, tidak mengambil keputusan atas inisiatif sendiri dan hanya

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

bertindak setelah ada persetujuan Aidit. Ini memperlambat respon komplotan itu pada arus kejadian yang sangat cepat, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkannya bila ada kesempatan yang terbuka untuk kepentingan tujuan mereka, yang dinilai Sudisman salah satu faktor penyumbang pada kegagalan gerakan itu.

Supardjo percaya bahwa faktor lain yang juga turut menyumbang pada kegagalan GESTAPU adalah perdebatan-perdebatan teramat panjang di CENKO II tentang hal-hal yang harus cepat diputuskan. Perdebatan dan diskusi demikian “tak berudjung-pangkal sehingga kita bingung melihatnya, siapa sebetulnya komandan: Kawan Sjamkah, kawan Untungkah, Latiefkah, atau Pak Djojo? (Sujono, ed.). *OTOKRITIK* (Dokumen No. 4).

184. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 115.
185. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 90-91.
186. Kesaksian Widjanarko dalam S. Karni, *op. cit.*, hlm. 81.
187. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 73.
188. Wawancara dengan Dr. Johannes Leimena, 20 September 1968.
189. Wawancara dengan Dr. Johannes Leimena, 20 September 1968
190. Wawancara dengan Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo, 21 September 1968. Juga *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Keduabelas*, 10 Desember 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 13.00 GMT; kesaksian tertulis Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo.
191. Wawancara dengan Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo, 21 September 1968.
192. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Kedua, Februari 24, 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 20.30.
193. Supardjo, *OTOKRITIK* (Dokumen No. 4). Namun, Sjam mengatakan bahwa ia mengusulkan kepada Supardjo di CENKO II agar ia mengajukan kepada Presiden tiga calon: Rukman, Pranoto dan Suharto. *Perkara Sjam, op. cit.*, hlm. 73. Ada kemungkinan besar bahwa Supardjo sengaja tidak mengusulkan Suharto, karena malam sebelumnya Suharto menolak upaya Latief untuk memperoleh dukungan bagi operasi pembersihan itu, sementara ia sudah bertemu dengan Rukman di Bandung pada 25 Agustus, didampingi oleh Sjam, yang berhasil menarik partisipasi Rukman untuk menetralsir Divisi Siliwangi selama pembersihan yang akan dilakukan.
194. Wawancara dengan Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo, 21 September 1968.

Catatan

195. Sabur mengatakan kepada Widjanarko bahwa Supardjo ikut dalam diskusi tentang pengangkatan pengganti Yani. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 27-8.
196. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Keduabelas*, 10 Desember 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 13.00 GMT; kesaksian tertulis Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo.
197. Dokumen No. 4.
198. Katoppo, *op. cit.*, hlm. 128.
199. Dokumen No. 4.
200. Wawancara dengan Dr. Johannes Leimena, 20 September 1968.
201. Katoppo, *op. cit.*, hlm. 129.
202. Wawancara dengan Sutjipto Judodihardjo, 21 September 1968.
203. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Ketiga, 25 Februari 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 20.20, kesaksian Widjanarko. Juga Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 22-23.
204. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 22.
205. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Ketiga, 25 Februari 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 20.20, kesaksian Widjanarko.
206. *Perkara Sjam*, *op. cit.*, hlm. 73.
207. *OTOKRITIK Supardjo* (Dokumen No. 4).
208. *Perkara Sjam*, *op. cit.*, hlm. 73-74.
209. *Perkara Sjam*, *op. cit.*, hlm. 73.
210. Katoppo, *op. cit.*, hlm. 129-130.
211. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 30.
212. *Perkara Sjam*, *op. cit.*, hlm. 74.
213. *Perkara Sjam*, *op. cit.*, hlm. 74.
214. Surat Aidit kepada Presiden dari Blitar pada 6 Oktober 1965 (Dokumen No. 1).
215. *Perkara Sjam*, *op. cit.*, hlm. 74.
216. Pada malam *coup* itu para pemimpin Cina mengundang sekitar 200 tamu dari 20 delegasi dari berbagai organisasi dari Indonesia ke Peking untuk ikut-serta dalam perayaan Hari Nasional Cina pada 1 Oktober 1965. Beberapa dari mereka murni bersangkut paut dengan perdagangan, militer, pertukaran budaya, dan urusan lainnya, tetapi beberapa delegasi yang lain beranggotakan orang-orang yang sangat anti-PKI. Tampaknya, program “bantuan persahabatan” ini dimaksudkan untuk membantu PKI, dalam arti orang-orang itu diundang ke luar negeri agar mereka tidak campur tangan dalam kudeta, dan barangkali tidak membiarkan mereka

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

kembali pulang setelah gerakan itu dengan tuduhan “musuh rakyat,” untuk kepentingan PKI. John O. Sutter, “Two Faces of KONFRONTASI: ‘Crush Malaysia’ and the Gestapu,” *Asian Survey*, Oktober 1966, hlm. 539, dan komunikasi pribadi, 3 Juni 2003.

Dari pihak Indonesia, resepsi Hari Nasional itu dihadiri oleh Komodor Udara Sri Bimo Ariotedjo, Komandan Sekolah Komando Angkatan Udara, dan lebih dari 50 perwira dan kadet, Waperdam III Chairul Saleh dan Dr. Sjarif Thajeb, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dari pihak Cina, hadir Mao, Liu Shao-chi, Chen Yi, Chou En-lai, dan lain-lain.

Para pemimpin Cina mengetahui seluk beluk kegagalan GESTAPU. Ini tercermin dalam sebuah laporan tentang pertemuan beberapa anggota misi Indonesia ke Cina dengan pucuk pimpinan pemerintahan itu pada 1 Oktober, 1965, pada waktu resepsi perayaan Hari Nasional Cina; pada kesempatan itu, kegagalan GESTAPU dan keterlibatan Aidit disinggung. Ketika kegagalan GESTAPU dibahas, Chou En-lai meragukan bahwa Aidit mau melibatkan diri dalam suatu perebutan kekuasaan, karena ia seorang komunis yang sudah terlalu berpengalaman untuk dapat terjebak dan mau menjadi bagian dari petualangan semacam itu. Katoppo, *op. cit.*, hlm. 47-48.

Namun, dari diskusi-diskusi dan analisis kita dalam buku ini, kita tahu tidak saja betapa dalamnya keterlibatan Aidit, tetapi juga keterlibatan Mao, Chen Yi dan Chou En-lai dalam perencanaan “petualangan” itu.

217. Dokumen No. 2.
218. *OTOKRITIK* Supardjo, Dokumen No. 4.
219. *Perkara Sjam*, *op. cit.*, hlm. 75.
220. *Perkara Sjam*, *op. cit.*, hlm. 75-76.
221. Hughes, *op. cit.*, hlm. 72.
222. Hughes, *op. cit.*, hlm. 65.
223. Hughes, *op. cit.*, hlm. 65.
224. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 88-89.
225. Hughes, *op. cit.*, hlm. 74.
226. Hughes, *op. cit.*, hlm. 73.
227. Hughes, *op. cit.*, hlm. 73.
228. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Ketiga*, 6 Desember 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.10 GMT.
229. *OTOKRITIK* Supardjo (Dokumen No. 4).
230. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 30-32.
231. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 72.

Catatan

232. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Keduabelas*, 10 Desember 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 13.00 GMT, kesaksian tertulis Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo.
233. Wawancara dengan Dr. Johannes Leimena, 20 September 1968.
234. *Pengadilan Perkara Supardjo*, Hari Keempat, 26 Februari 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 20.30; Widjanarko memberikan kesaksian.
235. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 32.
236. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 32.
237. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Keduabelas*, 10 Desember 1960, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 13.00 GMT; pernyataan Heru.
238. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Ketujuh*, 12 Desember 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.14 GMT; kesaksian Suwondho.
239. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Ketujuh*, 12 Desember 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.14 GMT; kesaksian Wonoindarsono.
240. OTOKRITIK Supardjo (Dokumen No. 4)
241. Untuk kegagalan gerakan ini di Jawa, lihat Hughes, *op. cit.*, hlm. 141-162.
242. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Keempat*, 6 Desember 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.50 GMT; kesaksian Jenderal Sarwo Edhy, tertanggal 15 Oktober 1966, menelusuri gerak-gerik Aidit di Jawa.
243. *Pengadilan Perkara Omar Dhani, Sidang Keempat*, 6 Desember 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 12.50 GMT; kesaksian Jenderal Sarwo Edhy, tertanggal 15 Oktober 1966, menelusuri gerak-gerik Aidit di Jawa.
244. Untuk kegiatan Aidit di Solo, lihat berkas Pengadilan Perkara Utomo Ramelan, yang digelar di Solo sejak 5 Juni 1967, dalam "MAHMILLUB, Berkas No. PTS-021/MMLB-IV/UR/1967." Juga "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia," *op. cit.*, hlm. 59-60.
245. "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia," *op. cit.*, hlm. 60.
246. Dokumen No. 2.
247. Katoppo, *op. cit.*, hlm. 148-149.
248. Tarzie Vittachi, *The Fall of Sukarno*, New York: Praeger, 1967, hlm. 85-90.
249. *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, *op. cit.*, hlm. 22-23.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

250. *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, *op. cit.*, hlm. 47-49.
251. I Gusti Putu Phalgunadi, *The Pararaton: A Study of Southeast Asian Chronicle*. New Delhi: Sundeep Prakashan, 1996, hlm. 17. Juga Slametmuljana, *The Story of Majapahit*, Singapura: The Singapura University Press, 1976, hlm. 184-186, 193.
252. Slametmuljana, *op. cit.*, "The War with the Tartars," hlm. 67-73.
253. Victor M. Fic, *From Majapahit and Suku to Megawati Sukarnoputri: Continuity and Change in Pluralism of Religion. Culture and Politics of Indonesia. From the XV to the XXI Century*, New Delhi: Abhinav Publications, 2003, hlm. 69.
254. Catatan pribadi tentang peristiwa-peristiwa itu dibuat Jenderal A. H. Nasution pada 7 September 1966, selanjutnya disebut "Pernyataan Jenderal Nasution." Diperoleh dari Kolonel D. Sugondo/TEPERPU.
255. "Pernyataan Jenderal Nasution," hlm. 2.
256. "Pernyataan Jenderal Nasution," hlm. 3-4.
257. Dokumen No. 14.
258. Untuk keterangan Widjanarko tentang kepergiannya ke KOSTRAD lihat Karni, *op. cit.*, hlm. 77-79.
259. *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, *op. cit.*, hlm. 22-23.
260. OTOKRITIK (Dokumen No. 4).
261. "Pernyataan Jenderal Nasution," hlm. 12.
262. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 25-27.
263. Untuk pidato Suharto, lihat *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, *op. cit.*, Lampiran 14, hlm. 24.
264. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 24-25.
265. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 25, 54.
266. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 54-55.
267. "Pernyataan Jenderal Nasution," hlm. 15.
268. "Pernyataan Jenderal Nasution," hlm. 16.
269. "Appeal of the Committee for the Defense of the CP of Indonesia," *Information Bulletin*, Peace and Socialism Publishers, Prague, Czechoslovakia, No. 5 (69), 1966, hlm. 46-50.
270. "Appeal of the Committee for the Defense of the CP of Indonesia," *Information Bulletin*, Peace and Socialism Publishers, Prague, Czechoslovakia, No. 5 (69), 1966, hlm. 46.

Catatan

271. "Appeal of the Committee for the Defense of the CP of Indonesia," *Information Bulletin*, Peace and Socialism Publishers, Prague, Czechoslovakia, No. 5 (69), 1966, hlm. 47-48.
272. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 185.
273. Kesaksian Widjanarko dalam Karni, *op. cit.*, hlm. 188-189.
274. Tentang pembantaian, lihat Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killings: Studies From Java and Bali*. Monash Papers on Southeast Asia No. 21, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990. Kisah pengalaman pribadi dalam salah satu dari kamp itu diberikan oleh Carmel Budiardjo, *Surviving the Indonesian Gulak: A Western Woman Tells Her Story*, London: Cassell, 1996. Juga Krisnadi, I. G., *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979*, Jakarta: LP3S, 2001.

Dalam pidato pada 10 Desember 1999, Presiden Wahid membuka pintu bagi kepulangan sekitar 400 keluarga dari pengasingan di Belanda, Peking, Vietnam, Cuba dan negara-negara lain, dalam pernyataannya yang mendapat sambutan tepuk tangan yang meriah, "Siapa saja yang ingin pulang, silakan pulang." Bekas duta besar untuk Cuba, A. M. Hanafi, kembali ke Jakarta pada 24 November 1999, setelah mendapat surat jaminan pribadi Presiden. Ibarruri Sudharsono, anak perempuan D. N. Aidit, yang diberi nama pemimpin revolusi Spanyol yang terkenal itu, dan sudah sejak umur delapan tahun hidup di luar negeri, merasakan tarikan dari tanah airnya dan berharap dapat kembali untuk berziarah ke makam ayahnya yang ditembak mati pada November 1965.

Beberapa analis percaya bahwa bila akibat-akibat dari GERAKAN ini tidak dipelajari dengan mendalam, masa depan Indonesia sebagai negara demokrasi akan tetap goyah. Ariel Heryanto, dari National University di Singapura, percaya bahwa "Kita belum benar-benar menyelesaikan kejadian pada 1960-an itu, dari segi moral, etika, ataupun intelektual." Margot Cohen, "Healing Old Wounds: Wahid Encourages 1960s Exiles to Make Their Way Home," *The Far Eastern Economic Review*, Hong Kong, Desember 30, 1999, hlm. 18.

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, pergi ke Belanda pada 14 Januari 2000 untuk menghimbau semua orang yang terhalang pulang yang berjumlah sekitar 600 dan hidup di luar negeri untuk kembali pulang. *The Jakarta Post*, 15 Januari 2000. Tidak lama setelah GESTAPU gagal, banyak anggota korps diplomatik yang hidup di pengasingan, misalnya Djawoto, Duta Besar di Peking; Sukrisno, Duta Besar di Vietnam Utara; A. M. Hanafi, Duta Besar di Cuba; dan S. Tahsin, Duta Besar di Mali.

Selain itu, banyak bekas tahanan politik yang dijebloskan ke kamp-kamp Pulau Buru, sekarang menerbitkan buku kenangan mereka

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- tentang peristiwa 1965. Untuk catatan Omar Dhani tentang peristiwa di Halim, lihat Aristides Katoppo (ed.), *Menyingkap Kabut Halim 1965*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Untuk catatan Omar Dhani yang lain, berdasarkan pembelaannya dalam sidang perkaranya, lihat Benedicta Surodjo dan JVM Soeparno, *Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku-Pledoi Omar Dhani*, Jakarta, 2001. Latief menerbitkan catatannya sebagai *Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G 30 S*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000. Tidak disangsikan lagi, akan banyak lagi catatan-catatan semacam itu yang akan muncul.
275. Hermawan Sulisty, *Palu Ari di Ladang Tebu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000, hlm. 44-46.
276. Patrick Walters, "Jail Walls Hold Coup Secrets," *The Australian*, Mei 25, 1998. Pada 5 Mei 1978 Latief menyerahkan permohonan banding sepanjang 60 halaman kepada sidang yang berisi informasi tentang temuannya dengan Jenderal Suharto pada 30 September 1965 di Rumah Sakit Angkatan Darat, Jakarta. Untuk ringkasan, lihat "Documents: The Latief Case: Suharto's Involvement Revealed," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 2, 1979, hlm. 248-251. Wertheim, berdasarkan dokumen Latief, menyusun argumen untuk alasan menangkap Jenderal Suharto dan membawanya ke depan pengadilan atas dasar "dia sudah tahu lebih dahulu" mengenai kudeta itu, dalam artikel-artikel berikut: Wertheim, W. F. "Suharto and the Untung Coup—The Missing Link," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 1, No. 2, 1970; Wertheim, W. F. "Was Suharto Terlibat?" *Information on Indonesia Quarterly*, Vol. 2, No. 1, 1972; Wertheim, W. F. "Whose Plot? New Light on the 1965 Events," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 2, 1979.
277. Kegagalan Aidit mengeluarkan dengan segera dekrit untuk pembentukan tentara rakyat dikecam dalam "Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Partai Komunis Indonesia," *op. cit.*, hlm. 54, 59-60.
278. Untuk kritik kebijakan Aidit oleh kelompok pro-Moskow di dalam PKI, dan kebijakannya yang baru, lihat "PKI's Political Bureau Statement: Lessons of Indonesian Events, issued by the Political Bureau in Central Java on Agustus 17, 1966," dalam *People's Democracy. The Organ of the Communist Party (Marxist) of India*, New Delhi, 12 Maret 1967; bagian dua pada 19 Maret 1967. Juga pada 29 Oktober 1967. Juga "To Brothers at Home and Comrades Abroad: Fighting Against Imperialism for Independence, Peace, Democracy and Socialism. For a Sound Indonesian Revolution," dalam *International Bulletin*, No. 18. Peace and Socialism Publishers, Prague, 1967.

Juga Boris Vetin, "Indonesia, Epilogue, Prologue . . ." *Moscow: Literarnaia Gazeta*, No. 13 dan 14, 1968; Boris Vetin, "Indonesia: The

Catatan

Year of the Last Hope,” *Literarnaiia Gazeta*, Vol. 33, Moscow, 1968; V. Shurygin, “Indonesian Communists’ Serious Losses from Maoism,” siaran berbahasa Inggris *Tass* pada 06.20 GMT pada 9 September 1968. *Summary of World Broadcasts*, Part I, *Russia*, *op. cit.*

Pada 1967, sayap PKI pro-Peking menyetujui programnya, seperti dilaporkan oleh Ibrahim Isa, “A Great Victory for the World’s Revolutionary People,” dalam *Peking Review*, No. 47, 17 November 1967, hlm. 16-20; Jusuf Adjitorop, “Victory Will Surely Belong to the Indonesian People,” dalam *Peking Review*, No. 9, 11 Maret 1968, hlm. 15-17. Juga “PKI Politburo Carries Out Self-Criticism,” Radio Tirana, Albania, dalam siaran berbahasa Inggris ke Afrika dan Asia, pada 04.00 GMT pada 8 Mei 1967; “The Indonesian Communist Party Statement” oleh Jusuf Adjitorop, Ketua delegasi CC PKI di Peking, pada Perayaan Ulang Tahun Ke 49 PKI, disiarkan oleh Radio Peking at 05.00 GMT pada 6 Juni 1969. *The Summary of World Broadcasts*, *op. cit.*, Part 3, The Far East, Second Series, FE/3 102, Juni 18, 1969. A. B. Reshnikov, seorang penulis Sovyet terkemuka, analisis dan ulasannya tentang kebijakan kedua sayap PKI itu dalam artikelnya “*Dva Dokumenta-Dva Kursa v Kommunistikheskom Dvizhenii Indonezii*” (Terj. Dua Dokumen-Dua Jalur dalam Gerakan Komunis di Indonesia). *Narody Azii I Afriki*, No. 1, Moscow, 1968.

Lihat juga ringkasan yang bagus sekali tentang akibat gagalnya GESTAPU, perpecahan PKI, dan konflik Cina-Sovyet tentang kontrol atas kebijakan-kebijakan masa depan kedua sayap itu, dalam Atmadji Sumarkidjo, *Mendung di atas Istana Merdeka*, *op. cit.*, hlm. 199 dan seterusnya.

279. “Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia,” *op. cit.*, hlm. 57-58.
280. “Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia,” *op. cit.*, hlm. 57-58.
281. *Pengadilan Perkara Supardjo*, 27 Februari 1967, Radio Jakarta, Siaran Langsung, 20.30; kesaksian Sudisman.
282. *Pengadilan Perkara Dr. Subandrio, Sidang Ketiga*, 2 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, disiarkan pada 4 Oktober 1966, 13.45 GMT.
283. “Appeal of the Marxist-Leninist Group of the Communist Party of Indonesia,” *op. cit.*, hlm. 54, 59-60.
284. Stephane Courtois (ed.), *The Black Book of Communism: Crime, Terror, Repression*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.



Blank

Dokumen-dokumen



DOKUMEN NO. 1

SURAT AIDIT KEPADA PRESIDEN SUKARNO TANGGAL 6 OKTOBER 1965*

Paduka yang Mulia,

- I. Tanggal 30 September tengah malam saya diambil oleh orang yang berpakaian Tjakrabirawa (tidak saya kenal) dengan keterangan: dipanggil ke Istana untuk sidang darurat kabinet, tetapi kendaraan tersebut menuju ke jurusan Jatinegara. Kemudian pindah mobil terus menuju ke sebuah kampung dan ditempatkan di sebuah rumah kecil. Di situ saya diberi tahu bahwa akan diadakan penangkapan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal. Tanggal 1 Oktober saya diberitahu bahwa tindakan terhadap Dewan Jenderal itu sudah berhasil. Saya bertanya, "Apakah sudah dilaporkan kepada PYM." Dijawab sudah dan beliau merestui.
- II. Tanggal 1 Oktober saya diberitahu: Pak Aidit sekarang juga harus ke Jateng dengan plane yang sudah disediakan oleh Pangau. Harap diusahakan supaya Yogyakarta dapat dijadikan tempat pengungsian Presiden. Atas permintaan ini pada malam itu juga saya diantar ke rumah anggota BPH Yogyakarta Sdr. Sutrisno.
- III. Pada tanggal 2 Oktober saya menuju Semarang untuk memberi instruksi kepada Komite PKI Jawa Tengah. Kepada Wakil Gubernur Sujono Atmo saya minta supaya Pemerintah Daerah Jawa Tengah berjalan sebagaimana biasa. Dari Semarang saya dan M.H. Lukman menuju Solo, bertemu dengan Utomo Ramelan. Pada tanggal 2 saya mendengar amanat Bung

* **Sumber:** diperoleh dari Letkol. Djiwo Sugondo, TEPERPU, Jakarta 29 April 1971.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Karno yang pertama. Bung Lukman saya instruksikan untuk segera ke Jakarta.

- IV. Pada tanggal 3-4-5 persoalan-persoalan pokok yang saya hadapi adalah:
1. Masalah mencegah pertempuran di antara pasukan-pasukan AD (Kodam Diponegoro).
 2. Mencegah bunuh-membunuh sebagai akibat provokasi golongan komunisto phobi dan Nasakom phobi.
 3. Memenuhi undangan sidang paripurna. Mengenai sidang Paripurna tak dapat dipenuhi sebab plane AURI rusak, tentang ini saya sudah mengirim kawat lewat saluran AURI kepada Pangau untuk diteruskan kepada Bung Karno.

Saya sekarang ada di Jawa Timur dengan tujuan membantu mencegah pertempuran bersenjata dalam Angkatan Darat, membantu mencegah bunuh-membunuh akibat provokasi golongan yang komunisto phobi dan membantu supaya pemerintah daerah dan kehidupan politik berjalan sebagaimana biasa.

- V. Sekarang pendapat saya tentang G30S.
1. Saya berpendapat G30S bukan kontra revolusi dan bukan gerakan yang ditujukan kepada Bung Karno. Saya, baik sebagai Ketua CC PKI maupun sebagai Menteri Kabinet Dwikora sangat menyesal bahwa saya tidak mengetahui lebih dahulu tentang adanya gerakan itu, sehingga tidak dapat menyalurkan potensi revolusioner yang besar ini ke arah yang wajar.
 2. Tidak dapat dibantah bahwa G30S adalah akibat daripada salah urus dalam Angkatan Darat:
 - a. di bidang sosial adanya AD yang merampok;
 - b. di bidang politik timbulnya G30S.

USUL

- VI. Keputusan PYM harus memuat:
1. Penyelesaian Dewan Jenderal dan G30S sepenuhnya harus berada dalam tangan PYM/Pangti/PBR.
 2. Untuk itu diperlukan ketenangan, oleh karena itu dilarang adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat mengutuk baik Dewan Jenderal maupun G30S.

Dokumen No. 1

3. Semua alat revolusi terutama ABRI, orpol, ormas, koran-koran, dan radio, supaya bekerja seperti biasa, kembali seperti sebelum G30S.
4. Masalah keamanan supaya diserahkan kepada AKRI dengan dibantu oleh Front Nasional.
5. Kepada semua alat revolusi diserukan supaya berkompetisi melaksanakan Lima Azimat Revolusi.
6. Dilarang tuduh menuduh dan salah-menyalahkan

Wassalam
Senantiasa

Blitar 6 Oktober 1965

(D.N. Aidit)



DOKUMEN NO. 2*

CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS INDONESIA

INSTRUKSI-INSTRUKSI TETAP

Kepada :
Seluruh CDB PKI
Se Indonesia

Kawan seperjuangan kaum Marxis/Leninis.

1. Akibat Gerakan 30 September, yang sebenarnya adalah 100% soal A.D. telah mendatangkan malapetaka besar pada PKI, walaupun semua soal ini dalam diskusi dan instruksi-instruksi yang lalu, telah kami perhitungkan, namun jelas semua tindakan kaum reaksioner khususnya Dewan Jenderal dapat mengecilkan anggota Partai yang masih belum berpengalaman.
2. Dalam menanggulangi hal-hal ini, memang dalam praktek tidak semua persiapan perkiraan yang lalu, sesuai dengan kenyataan yang telah kita perkirakan, baik dari partai-partai sekawan, maupun dari Sosro dan Tjeweng; jelas tidak membuktikan kesetiakawanan apalagi memenuhi janji yang telah diucapkan.
3. Karena itu sekali lagi CC Partai perlu menandakan, semua ini walaupun tinggal satu orang dari partai yang duduk akan tetap

* **Sumber:** Diperoleh dari Letkol Djiwo Sugondo di TEPPERPU, Jakarta 29 April 1971
catatan editor: Aidit menggunakan kode nama-nama berikut: Sosro=Sukarno; Tjeweng=Subandrio;
Tetangga=Cina; Mbah=Mao; Gatotkatja=Omat Dhani; grasshopper=helikopter

Dokumen No. 2

berjuang; apa yang sekarang terjadi adalah sebagai jenderal repetisi, tapi bila ucapan politik Sosro dapat diterima Dewan Jenderal, bahwa 30 September adalah “En Rimpel in’t grote Ocean” atau soal kecil ini untuk kita adalah sangat menolong, berarti dor-doran dan jor-joran yang sekarang sedang dihadapkan Dewan Jenderal terhadap Partai dan oknum-oknum kita, dapat terhenti sehingga kita dapat berkonsolidasi kembali.

4. Sebagai instruksi yang lalu, dan salinan kami pada Sosro yang kami sampaikan kepada CDB di Jawa, walaupun sekaligus belum tercapai CC partai yakin, usaha-usaha Sosro dan Tjeweng sedang mengarahkan kepada soal-soal yang kami usulkan pada tanggal 6 Oktober yang lalu; tapi kami lebih yakin, bahwa bila Sosro hingga kini belum secara tegas berbuat tak lain, karena dia tidak begitu saja, dapat melangkahi DJ yang berada di depan hidungnya.
5. Sosro telah menyetujui, sementara saya menyingkir ke tetangga sebenarnya asalkan dapat saya bertemu Mbah berarti tercapailah penyingkiran itu, juga pihak Gatotkotjo telah menyanggupi mengirim grasshooper belakang untuk membawanya dalam melangkahi daerah DJ bila ini berhasil berarti jaminan bagi perjuangan jangka panjang telah ada, sebab dari sana semua persetujuan Sosro dengan tetangga akan digugat terus jelasnya dalam memperjuangkan konsep partai kita tidak peduli akan korban, bila perlu Sosro jadi korban, bila dia tidak memenuhi semua perjanjian.
6. Bila ketua berhijrah ketetangga maka pokoknya pegangan adalah sebagai berikut:
 - Menjamin berlangsungnya Partai.
 - Daerah-daerah basis di Jawa tetap dipertahankan.
 - Pembubaran Partai dan lain-lain sebagai taktis demi terjaminnya perjuangan jangka panjang, kami anjurkan apel segera setelah itu dibuat CDB, CS dan lain-lain baru.
 - Mulai sekarang hindarkan perlawanan-perlawanan frontal kita bergerak dengan Program K, sesuai dengan instruksi CC Partai 25 September.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Tindakan-tindakan pengamanan, teror, sabotase dijalankan secara sistimatis untuk sekedar mengisi psywar sebagai kenyataan.
 - Usahakan agar Pemerintah dan Rakyat yakin, bahwa Partai kita masih tetap berdiri dan kuat karena itu saksi Agiprop tiap-tiap CDB harus di perkuat dan dikerahkan.
 - Khusus di Jakarta, baik DJ maupun Sosro/Tjeweng, harus tetap dapat rasakan bahwa kita adalah faktor bahaya besar dan tidak begitu saja dapat ditiadakan.
 - Tiap-tiap anggota Partai adalah Patriot, tiap-tiap anggota Partai adalah informan.
 - Tiap-tiap anggota Partai adalah jiwa perang, tiap-tiap anggota partai adalah penghubung.
 - Perlu dijamin, hubungan segitiga, Sosro dan Tjeweng, yang paling aman adalah melalui perwakilan Negara Tetangga.
7. Bulan yang menentukan adalah Desember dan Januari 1966, oleh sebab itu perlu dijaga jangan Sosro sampai terdesak oleh DJ dan Partai-partai kontra revolusioner.
8. Hingga kini belumlah ada tanda-tanda bahwa Sosro telah meninggalkan kita, tapi harus diingat kekuatan kita sekarang hanya satu; **perjanjian politik Sosro dengan tetangga**; bila Sosro meninggalkan kita, berarti hukum karma berlaku ingat “istilah R/ Tangku tentang Malaysia yang telah diumumkan pada tahun 1964”. Tujuan membentuk Malaysia “**To outvote the Chinese Majority**” sehingga hasilnya setahun kemudian Singapura keluar dari Malaysia.
9. Senjata terakhir dari kita dan Negara tetangga adalah ini juga; oleh sebab itu yakinlah kawan-kawan mudah-mudahan Sosro dan Tjeweng tidak akan mengkhianati kita, bila hingga sekarang dia plintat-plintut, memang karena DJ ada didepan hidungnya, tetapi bila nanti mereka berkhianat, maka dari negara tetangga perjanjian-perjanjian pasal yang telah kami sampaikan secara /R pada bulan Agustus yang lalu terpaksa diumumkan dan kini adalah berarti **lonceng kematian dan kehancuran bagi Sosro/Tjeweng**.

Dokumen No. 2

10. Sebagai penutup laksanakan semua yang kami terangkan dalam pasal 6; sesuaikan semua tindakan dan semua instruksi yang lalu dengan kondisi setempat. Agar dijaga keserentakannya bila nanti Partai tidak dibubarkan (legal bergerak) semua C.D.B. dapat segera muncul kembali. Siapkan semua fakta-fakta dan dokumen untuk buku putih tentang khianat D.J.
11. Selamat berjuang.

Ditempat, tanggal 10 Nopember 1965

K e t u a,
Ttd.

(D.N. AIDIT).



DOKUMEN 3*

KOMITE-CENTRAL PARTAI KOMUNIS INDONESIA KRAMAT RAYA 81 JAKARTA IV/4 Tel. : O.G. 448227

No. : 13/PI/65 Jakarta, 28 September '65
Lampiran : -
Hal : Petunjuk lanjutan Kepada :
Instruksi yang telah
Diberikan secara Semua C.D.B.
Lisan

Kawan-kawan kaum tani, pekerja yang heroik militan dan revolusioner, dengan ini kami berikan petunjuk lanjutan Instruksi, guna pedoman-pedoman realisasi keputusan CC yang telah kita maklumi bersama.

Dalam melaksanakan rencana kita nanti selanjutnya kita tidak pesimis, karena sudah jelas sudah mempunyai kekuatan dan sanggup untuk melaksanakan rencana kita sampai darah yang penghabisan dan pasti sukses. Namun demikian kita harus memperhitungkan juga garis perjuangan dan rencana kelanjutannya apabila disuatu tempat CDB terpaksa mengalami kegagalan (walaupun secara pasti tak mungkin akan gagal). Maka untuk itu bersama ini kami sampaikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila sesudah 1 Oktober 1965 dan seterusnya risalah satu CDB mengalami kegagalan akibat hal-hal yang tidak disangka-sangka sehingga misalnya tidak berdaya sama sekali, maka semua senjata api yang telah diterima harus segera cepat-cepat disingkirkan dan disimpan di tempat yang jauh tidak terduga sama sekali oleh siapapun secara terpancar.

Dokumen No. 3

2. Diwaktu keadaan begitu, dengan pura-pura secara legal bisa menyatakan membubarkan diri dengan disaksikan oleh instansi setempat.
3. Kawan-kawan dari luar daerah yang telah direncanakan (bukan penduduk aseli) yang sudah tiba ditempat harus sudah diberi daftar nama-nama kaum kontra-revolusioner beserta petunjuk-petunjuknya dan tempat senjata apinya yang telah tersimpan diberi petunjuk yang jelas.
4. Penempatan semua kawan-kawan dari luar daerah supaya ditempatkan secara rahasia pada anggota-anggota/simpatisan atau rumah-rumah Naga.
5. Dalam pembubaran diri dihadapan instansi (jika mungkin) tidak boleh gentar untuk menandatangani janji-janji/saksi-saksi apapun yang diinginkan kaum kontra-revolusioner, kalau perlu ditandatangani dengan darah guna sekedar untuk mengurangi kecurigaan mereka.
6. Setelah anggota CDB setempat dipandang sudah agak tenang, supaya semua anggota yang masih ada, menukar tempat tinggalnya pindah kedaerah lain untuk terus melaksanakan instruksi-instruksi yang sudah kita ketahui bersama.
7. Petunjuk ini setelah dipahami harus segera dibakar dengan disaksikan oleh semua anggota CDB.
8. Rencana jalan terus sampai titik darah penghabisan.

Berani Mati 5

C VI A.



DOKUMEN NO. 4

“OTOKRITIK” SUPARDJO*

**Pasar rumput rumah Saudara Sjafei.
Sekitar bulan November 66**

BEBERAPA PENDAPAT JANG MEMPENGARUHI GAGALNJA G-30-S DIPANDANG DARI SUDUT MILITER

Motto: Dalam kalah terkandung unsur2 menang (falsafah “satu petjah djadi dua”)

Kawan Pimpinan,

Kami berada di “Gerakan 30 September” selama satu hari sebelum peristiwa, “pada waktu peristiwa berlangsung” dan “satu hari setelah peristiwa berlangsung”. Dibandingkan dengan seluruh persiapan, waktu jang kami alami adalah sangat sedikit. Walaupun jang kami ketahui adalah hanja pengalaman selama tiga hari sadja, namun adalah pengalaman dari saat2 jang sangat

* “OTOKRITIK” ini ditulis Supardjo di rumah Letnan Angkatan Laut Nandang di pertengahan Oktober 1966 (Lihat *Pengadilan Perkara Supardjo*, file 1, hlm. 115-116). Supardjo mengirim dokumen ini untuk Omar Dhani di akhir November 1966, seminggu sebelum Omar Dhani diadili (mulai tanggal 5 Desember 1966). Dhani ditangkap 21 April 1966 (Lihat *Pengadilan Perkara Omar Dhani*, I, hlm. 562). Dokumen ini dikirim dalam surat tertutup, yang diselundupkan ke dalam penjara tempat Omar Dhani ditahan oleh jalur individual, namun berhasil dicegat dan disita petugas. Salinan “OTOKRITIK” ini dan surat tertutup pada Omar Dhani diperoleh dari Letkol. D. Soegondo selama wawancara di kantor TEPERPU, Jakarta, 29 April 1971. Namun surat pribadi Supardjo pada Omar Dhani tidak diperoleh dari cegatan petugas itu. (Lihat juga catatan kami Editor YOI di akhir dokumen ini).

Dokumen No. 4

menentukan. Saat2 dimana bedil mulai berbitjara dan persoalan2 militer dapat menentukan kalah menangnja aksi-aksi selandjutnja. Dengan ini kami sampaikan beberapa pendapat, dipandang dari sudut militer tentang kekeliruan2 jang telah dilakukan, guna melengkapi bahan-bahan analisis setjara menjeluruh oleh pimpinan dalam rangka menelaah peristiwa “G-30-S”.

Tjara menguraikannja, mula2 kami utarakan fakta2 peristiwa jang kami lihat dan alami, kemudian kami sampaikan pendapat kami atas fakta2 tersebut.

Fakta-fakta pada malam pertama sebelum aksi dimulai:

1. Kami djumpai kawan2 kelompok pimpinan militer pada malam sebelum aksi dimulai, dalam keadaan sangat letih disebabkan kurang tidur. Misalnja kawan Untung 3 hari ber-turut2 mengikuti rapat2 Bung Karno di-Senayan dalam tugas pengamanan.
2. Waktu laporan2 masuk, tentang pasukan sendiri dari daerah2, misalnja Bandung, ternyata mereka terpaksa melaporkan siap, sedangkan keadaan jang sebenarnya belum.
3. Karena tidak ada uraian jang djelas bagaimana aksi itu akan dilaksanakan, maka terdapat kurang kemufakatan tentang gerakan itu sendiri di kalangan kawan2 perwira di dalam Angkatan Darat. Sampai ada seorang kawan perwira jang telah ditetapkan duduk dalam team pimpinan pada saat2 jang menentukan menjatakan terang-terangan mengundurkan diri.
4. Waktu diteliti kembali ternyata kekuatan jang positip di pihak kita hanja satu kompi dari Tjakrabirawa. Pada waktu itu telah timbul keragu2uan, tetapi ditutup dengan sembojan “apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi”.
5. Dengan adanja kawan perwira jang mengundurkan diri, maka teror adanja prasangka dari team pimpinan terhadap kawan lain didalam kelompok itu. Saran2 dan pertanyaan2 dihubungkan dengan pengertian tidak kemantaban dari si-penanja. Misalnja, bila ada jang menjatakan bagaimana imbalanced kekuatan, maka dijawab dengan nada jang menekan: “Ja Bung, kalau mau revolusi banjak jang mundur tetapi kalau sudah menang, banjak jang mau ikut”. Utjapan2 lain: “Kita ber-revolusi mumpung kita masih muda, kalau sudah tua buat apa”.
6. Atjara persiapan di L.B. kelihatan sangat padat sampai djauh malam masih belum selesai, mengenai penentuan code2 jang berhubungan dengan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pelaksanaan aksi. Penentuan dari peleton2 jang harus menghadapi tiap2 sasaran, tidak dilakukan dengan teliti. Misalnja terdjadi bahwa sasaran2 utama mula2 diserahkan pelaksanaannja kepada peleton dari pemuda2 jang baru sadja pegang bedil, kemudian diganti dengan peleton lain dari tentara, tetapi inipun bukan pasukan jang setjara mental telah dipersiapkan untuk tugas2 khusus.

Fakta-fakta pada hari pelaksanaan:

- 7 Berita pertama jang masuk bahwa Djendral Nasution telah disergap, tetapi lari. Kemudian team pimpinan kelihatan agak bingung dan tidak memberikan perintah2 selanjutnja.
- 8 Menyusul berita bahwa Djendral Nasution bergabung dengan Djendral Suharto dan Djendral Umar di KOSTRAD. Setelah menerima berita ini pun, pimpinan operasi tidak menarik kesimpulan apa2.
- 9 Masuk berita lagi bahwa pasukan sendiri dari Jon Jateng dan Jon Jatim tidak mendapat makanan, kemudian menyusul berita bahwa Jon Jatim minta makan ke KOSTRAD. Pendjagaan RRI ditinggalkan tanpa adanja instruksi.
- 10 Menurut rentjana, kota Jakarta dibagi dalam tiga sektor: Selatan, Tengah dan Sektor Utara. Tetapi waktu sektor2 itu dihubungi semua tidak ada ditempat (bersembunji).
- 11 Suasana kota mendjadi sepi dan lawan selama 12 djam dalam keadaan panik.
- 12 Djam 19.00 (malam kedua). Djendral Nasution-Harto dan Umar membentuk suatu Komando. Mereka sudah memperlihatkan tanda2 untuk tegen-aanval pada esok harinja.
- 13 Mendengar berita ini Laksamana Omar Dhani mengusulkan kepada Kw Untung agar AURI dan pasukan "G-30-S" diintegrasikan untuk menghadapi tegen-aanval Nato cs (Nasution-Harto). Tetapi tidak didjawab setjara kongkrit. Dalam team pimpinan G-30-S ternjata tidak memiliki offensief-geest lagi.
- 14 Kemudian timbul persoalan ketiga. Ja, ini dengan hadirnja Bung KARNO di lapangan Halim. Bung Karno kemudian melantjarkan kegiatan sbb:
 - a). Memberhentikan gerakan pada kedua-belah fihak (dengan keterangan bila perang saudara berkobar, maka jang untung Nekolim).

Dokumen No. 4

- b). Memanggil Kabinet dan Menteri2 Angkatan. Nasution-Harto dan Umar menolak panggilan tsb. Djendral Pranoto dilarang oleh Nasution untuk memenuhi panggilan Bung Karno.
- c). Menetapkan caretaker bagi pimpinan AD.

Hari kedua:

- 15 Kawan2 pimpinan dari “G-30-S” kumpul di LB. Kesatuan RPKAD mulai masuk menjerang, keadaan mulai “wanordelijk” (katjau). Pasukan2 pemuda belum biasa menghadapi praktek perang sesungguhnya. Pada moment jang gawat itu, saya mengusulkan agar semua pimpinan saja pegang nanti bila situasi telah bisa diatasi, saja akan kembalikan lagi. Tidak ada djawaban jang kongkrit.
- 16 Kemudian diadakan rapat, diputuskan untuk memberhentikan perlawanan! masing-masing bubar, kembali ke rumahnja, sambil menunggu situasi. Bataljon Djateng dan sisa Bataljon Djatim jang masih ada akan diusahakan untuk kembali kedaerah asalnja.
- 17 Hari itu ddjugakeluar perintah dari Bung Karno agar pasukan berada di tempatnja masing2 dan akan diadakan perundingan. Tetapi fihak Nato tidak menghiraukan dan menggunakan kesempatan itu untuk terus mengobrak-abrik pasukan kita dan bahkan PKI.

Demikianlah fakta2 jang kami saksikan sendiri dan dari fakta2 ini tiap2 orang akan dapat menarik peladjaran atau kesimpulan jang ber-beda2.

Adapun kesimpulan jang dapat kami tarik adalah sbb:

- 1. Keletihan dari kawan2 team pimpinan jang memimpin aksi dibidang militer sangat mempengaruhi semangat operasi, keletihan ini mempengaruhi kegiatan2 pengomandoan pada saat2 jang terpenting dimana dibutuhkan keputusan2 jang tjepat dan menentukan dampaknja.
- 2. Waktu info2 masuk dari daerah2, sebetulnja daerah belum dalam keadaan siap sedia. Hal ini terbukti kemudian bahwa masih banjak penghubung2 belum sampai di- daerah2 jang dituju dan peristiwa sudah meletus (kurir jang ke Palembang baru sampai di Tandjung Karang. Di Bandung belum siap sepenuhnya tapi untuk tidak repot2 menghadapi pertanyaan2 dijawab sadja “sudah beres”.
- 3. Rentjana operasinja ternjata tidak djelas. Terlalu dangkal. Titik berat hanja pada pengambilan 7 Djendral sadja. Agaimana kemudian bila berhasil,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

tidak djelas, atau bagaimana kalau gagal djuga tidak djelas dan apa rentjananja bila ada tegenaanval, misalnja dari Bandung bahkan tjukup dengan djawaban “sudah, djangan pikir2 mundur!”, menurut lazimnja dalam operasi2 militer, maka kita sudah memikirkan pengunduran waktu kita madju dan menang dan sudah memikirkan gerakan madju menjerang waktu kita dipukul mundur.

Hal jang demikian, maksud kami persoalan mundur dalam peperangan bukanlah persoalan jang hina, tetapi adalah prosedur biasa pada setiap peperangan atau kampanye. Mundur bukan berarti kalah, adalah suatu bentuk dalam peperangan jg dapat berubah menjadi penjerangan dari kemenangan, membubarkan pasukan adalah menjerah dan kalah.

Hal ini djuga jang menjebabkan beberapa kawan militer mengundurkan diri, selain lawan tsb dihinggapi unsur ragu2, tetapi bisa ditutup bila ada rentjana jang djelas dan mejakinkan atas djalannja kemenangan.

4. Waktu dihitun2 kembali kekuatan jang bisa diandalkan hanja satu kompi dari Tjakrabirawa, satu Bataljon dari Djateng diperkirakan dapat digunakan dan satu Bataljon dari Djatim bisa digunakan sebagai figuren. Ditambah lagi dengan seribu lima ratus pemuda jang dipersendjatai. Waktu diadjukan pendapat, apakah kekuatan jang ada dapat mengimbangi, maka djawaban dengan nada menekan, bahwa mau revolusi sedikit jang turut, tetapi kalau revolusi berhasil tjoba lihat nanti banjak jang turut. Ada pula pendjelasan jang sifatnja bukan teknis, misalnja, “kita masih muda, kalau sudah tua, buat apa revolusi.” Kembali lagi mengenai masalah kekuatan kita, tjukup mempunjai kekuatan di Angkatan Darat jang tjukup tangguh. Dipandang dari segi teknis militer, maka serangan pokok, dimana komandan operasi tertinggi sendiri memimpin, harus memusatkan kekuatannja pada sasaran jang menentukan.

Saya berpendapat bahwa strategi kawan pimpinan adalah strategi “menyumut sumbu petasan” di Ibukota, dan diharapkan mertjonnja akan meledak dengan sendirinja, jang berupa pemberontakan rakjat dan perlawanan di daerah2 setelah mendengar isyarat tersebut. Disini terdapat sesuatu kekeliruan: pertama: tidak memusatkan induk kekuatan pada sasaran pokok. Kedua: tidak bekerdja dengan perhitungan kekuatan jang sudah kongkrit.

Dokumen No. 4

5. Kami dan kawan2 distaf melakukan kesalahan sbb: menilai kemampuan kawan pimpinan operasi terlalu tinggi. Meskipun fakta2 njata tidak logis. Tetapi pertjaja bahwa pimpinan pasti mempunyai perhitungan jang ulung, jang akan dikeluarkan pada waktunja. Sesuatu keajaiban, pasti akan diperlihatkan nanti, sebab pimpinan operasi selalu bersembojan, “Sudah kita mulai sadja, dan selandjutnja nanti djalan sendiri.” Kami sendiri mempunyai keyakinan akan hal ini, karena terbukti operasi jang dipimpin oleh partai sekawan, seperti kawan Mao Tsetung jang dimulai dengan satu regu, kemudian kita menumbangkan kekuatan Tjiang Kai-sek jang djumlahnja ratusan ribu. Setelah peristiwa jang pahit itu maka kita sekalian perlu kritis dan bekerdja dengan perhitungan2 jang kongkrit.
6. Apa jang kami lihat di L.B., sebetulnja taraf mempersiapkan diri sadja belum selesai. Pada malam terakhir bermatjam-matjam hal jang penting belum terselesaikan, umpama: Pasukan jang seharusnya datang, belum djuga hadir (dari AURI). Ketentuan atau petundjuk2 masih dipersiapkan. Peluru2 dipeti2 belum dibuka dan dibagikan. Dalam hal ini kelihatan tidak ada pembagian pekerdjaan, semua2 tergantung dari Djojo. Kalau Pak Djojo belum datang, semua belum berdjalan. Dan kalau Pak Djojo datang waktu sudah mendesak.

Ketika masuk berita bahwa Nasution tidak kena dan melarikan diri, kelompok pimpinan mendjadi terperandjat, kehilangan akal dan tidak berbuat apa2. Meskipun ada advis untuk segera melakukan offensif lagi, hanja dijawab: “Ja”, tetapi tidak ada pelaksanaannja. Selama 12 djam, djadi satu siang penuh, musuh dalam keadaan panik. Tentara2 di kota diliputi suasana tanda tanja, dan tidak sedikit jang kebingungan. (waktu ini kami diistana, djadi melihat sendiri keadaan dikota).

Disini kami mentjatat suatu kesalahan jang fundamentil jang pernah terdjadi dalam sesuatu operasi (kampanje), yakni: “tidat eitbuiten sesuatu sukses” (prosedur biasa dalam melaksanakan prinsip2 pertempuran jang harus dilakukan oleh tiap-tiap komandan pertempuran). Prinsip tersebut diatas, sebetulnja bersumber dari adjaran Marx jang mengatakan: “Bahwa setelah terdjadi sesuatu pemberontakan, tidak boleh ada sesaatpun dimana serangan terhenti. Ini berarti bahwa massa jang turut dalam pemberontakan dan mengalahkan musuh dengan mendadak, tidak boleh memberikan satu kesempatan pun kepada kelas jang berkuasa untuk mengatur kembali kekuasaan politiknya (konsolidasi-red.): Mereka harus menggunakan saat jang baik itu sepenuhnya, untuk mengachiri kekuasaan rezim dalam negeri”.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Kami berpendapat, bahwa sebab dari semua kesalahan ini karena staf pimpinan dibagi 3 sfaf, a). Kelompok Ketua, b). Kelompok Sjam cs, c). Kelompok Untung cs. Seharusnya operasi berada di satu tangan. Karena jang menonjol pada ketika itu adalah gerakan militer, maka sebaiknya komando pertempuran diserahkan sadja kepada kawan Untung dan kawan Sjam bertindak sebagai komisaris politik. Atau sebaliknya, kawan Sjam memegang komando tunggal sepenuhnya. Dengan sistim komando dibagi ber-sfaf2, maka ternyata pula terlalu banjak diskusi2 jang memakan waktu sangat lama sedangkan pada moment tsb dibutuhkan pengambilan keputusan jang tjepat, karena persoalan setiap menit ber-ganti2, susul-menjusul dan tiap-tiap taraf persoalan harus satu persatu setjepat mungkin ditanggulangi.

7. Setiap penjelenggara perang seharusnya jauh sebelumnja mempunjai "Picture of the Battle" (gambaran Perang). Apa jang mungkin terdjadi setelah peristiwa penjergapan, bagaimana situasi lawan pada setiap saat dan setiap taraf pertempuran, bagaimana situasi pasukan sendiri, bagaimana situasi di Djakarta, bagaimana situasi di Bandung (ingat pusat Siliwangi), bagaimana situasi di Djateng dan Djatim, dan bagaimana situasi di seluruh pelosok tanahair (dapat diikuti via radio). Dengan berbuat demikian kita bisa melihat posisi taktis di Djakarta dalam hubungnnja dengan strategi jang luas. Dan sebaliknya, perhubungan strategi jang menguntungkan atau merugikan dapat tjepat-tjepat kita merubah taktik kita dimedan pertempuran.

Pada waktu musuh panik seharusnya tidak diberi waktu. Kita harus masuk menjempurnakan kemenangan kita. Dalam keadaan demikian musuh dalam keadaan serba salah dan kita dalam keadaan serba benar. 1 Bataljon jang panik akan dapat dikuasai oleh hanya kekuatan 1 regu sadja. Tetapi hal jang menguntungkan ini tidak kita manfaatkan. Bahkan kita berlaku sebaliknya: 1). Komandan Sektor (Selatan/Tengah/Utara) dalam keadaan dimana kita sedang djaja, malah pada menghilang. Mereka bertugas diantaranya mengusul soal2 administrasi, terhadap pasukan jang beroperasi dan berada dimasing2 sektornja.

Tetapi semua sektor seperti jang telah ditetapkan, hanya tinggal diatas kertas saja. Dari sini kita menarik peladjaran dengan baik tidak adanja kontak antara satu sama lain (faktor verbinding-komunikasi), maka masing2 mendjadi terdjerumus dalam kedudukan terasing, sehingga buta situasi dan menimbulkan ketakutan. 2) Siaran radio RRI jang telah kita

Dokumen No. 4

kuasai tidak dimanfaatkan. Sepanjang hari hanya di pergunakan untuk membuatkan beberapa pengumuman saja. Radio stasion adalah alat penghubung (Mass media), seharusnya digunakan semaksimal mungkin oleh barisan Agitasi Propoganda. Bila dilakukan, keampuhannya dapat disamakan dengan puluhan divisi tentara. (Dalam hal ini lawan telah sukses dalam perang radio dan pers). 3). Pada djam2 pertama Nato cs menyusun komando kembali. Posisi jang sedemikian ialah posisi jang sangat lemah. Saat itu seharusnya pimpinan operasi musuh disergap tanpa chawatir resiko apa2 bagi pasukan kita.

8. Semua kematjetan gerakan pasukan disebabkan diantaranya tidak makan. Mereka tidak makan semendjak pagi, siang dan malam, hal ini baru diketahui pada malam hari ketika ada gagasan untuk dikerahkan menjerbu kedalam kota. Pada waktu itu Bataljon Djateng berada di Halim. Bataljon dari Djatim sudah ditarik ke-Kostrad dengan alasan makanan. Sebetulnja ada 2 djalan jang bisa ditempuh, pertama: komandan bataljon diberi wewenang untuk merekrui makanan ditempat2 dimana ia berada. Hubungan dengan penduduk atau mengambil inisiatip membuka gudang2 makanan, separo bisa dimakan dan selebihnja diberikan kepada rakjat jang membantu memasaknya. Dengan demikian ada timbal balik dan tjukup simpatik dan dapat dipertanggung-jawabkan. Jalan kedua: organisasi sektor seharusnya menjelenggarakan hal tsb.
9. Setelah menerima berita bahwa Djenderal Harto menyiapkan tegenaanval dan Laksamana Omar Dhani menekankan integrasi untuk melawan pada waktu itu, harus disambut baik. Dengan menerima itu maka seluruh kekuatan AURI diseluruh tanah air, akan turut serta. Tetapi karena tidak ada kepertjajaan, bahwa kemenangan harus ditempuh dengan darah, maka tawaran jang sedemikian pentingnja tidak mendapat djawaban jang positif. Pak Omar Dhani telah bertindak begitu djauh sehingga telah memerintahkan untuk memasang roket2 pada pesawat.
10. Faktor2 lain jang menjebabkan kematjetan, terletak pada tiada pembagian kerdja. Bila kita ikuti sadja prosedur staf jang lazim digunakan pada tiap2 kesatuan militer, maka semua kesimpang-siuran dapat diatasi. Seharusnya dilakukan tjara bekerja sbb: Pertama: perlu ditentukan siapa komandan jang langsung memimpin aksi (kampanje). Kawan Sjam-kah atau kawan Untung. Kemudian pembantu2nja atau stafnja dibagi. Seorang ditundjuk bertanggungjawab terhadap pekerdjaan intel (penjelidikan/informasi). Jang kedua, ditundjuk dan bertanggungjawab terhadap persoalan situasi

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

pasukan lawan maupun pasukan sendiri. Dimana, bagaimana bergeraknja pasukan lawan, bila demikian, apakah advisnja tentang pasukan sendiri kepada komandan. Kawan jang ketiga ditundjuk untuk bertanggungjawab terhadap segala sesuatunja jang berhubungan dengan perorangan (personil). Apakah ada anggota jang morilnja merosot. Djuga personil lawan menjadi persoalannja, umpamanja: soal tawanan, pemeliharaannja, pengamanannja dsb. Kemudian kepada kawan jang keempat, ditugaskan untuk memikirkan hal-hal jang ada sangkut pautnja dan logistik, pembagian sendjata dan amunisi, pakaian, makanan, kendaraan dsb. Karena menang kalahnja pertempuran pada dewasa ini tergantung djuga pada peranan bantuan rakjat, maka ditundjuk kawan jang kelima, untuk tugas seperti tersebut diatas. Djadi singkatnja, komandan dibantu oleh staf-1, staf-2, staf-3, staf-4 dan staf-5. Komandan bila terlalu sibuk, ia bisa menundjuk seorang wakilnja. Selanjutnja tjara bekerjanja komando staf, saja rasa tidak ada bedanja dengan prinsip2 pekerdjaan partai, berlaku djuga prinsip sentralisme demokrasi. Staf memberikan pandangan2nja dan komandan mendengarkan, mengolahnja didalam fikiran dan kemudian menentukan. Berdasarkan keputusan ini staf memberikan directiven untuk melaksanakan oleh echelon-echelon bawahan. Dengan tjara demikian maka seorang komandan terhindar dari pemikiran jang subjektif. Tetapi djuga terhindar dari suasana jang liberal. Apa jang terjadi pada waktu itu adalah suatu debat, atau diskusi jang langdradig (tak berudjung-pangkal), sehingga kita bingung melihatnja, siapa sebetulnja komandan: Kawan Sjamkah, kawan Untungkah, kawan Latifkah atau Pak Djojo? Mengenai hal ini perlu ada penindjauan jang lebih mendalam karena letak kegagalan dari kampanye diibukota sebagian besar karena tidak ada pembagian komando dan kerdja jang wajar.

11. Adalah hal jang remeh, tetapi hal ini perlu mendapat perhatian. Umpamanja, tjara2 diskusi terutama jang banjak dilakukan oleh Kw. Latif. Tidak mendahulukan soal2 jang lebih pokok untuk dipetjahkan terlebih dahulu. Soal2 jang masih bisa ditunda dibitjarakan kemudian. Diwaktu mulut meriam diarahkan kepada kita, maka jang urgen adalah bagaimana tindakan kita untuk membungkam meriam tsb, bukan membitjarakan soal2 lain jang sebetulnja bisa dibitjarakan kemudian.
12. Dengan kehadirannja Bung Karno di Halim, maka persoalannja telah menjadi lain. Pada waktu itu, kita harus tjepat dalam silat politik. Harus tjepat menentukan titik berat strategi kita. Apakah kita berdjalan sendiri,

Dokumen No. 4

apakah kita berdjalan dengan Bung Karno. Kalau kita merasa mampu, segera tentukan garis djalan sendiri. Kalau kita menurut perhitungan, tidak mampu untuk memenangkan revolusi sendirian, maka harus tjepat pula merangkul Bung Karno, untuk bersama2 menghantjurkan kekuatan lawan. Menurut pendapat saja pada saat2 itu situasi telah berubah dengan keterangan sbb:

- 1) Bung Karno: a) memanggil kabinet dan para Menteri Angkatan.
b) mengeluarkan surat perintah, kedua fihak agar tidak bertempur.
c) memegang sementara pimpinan AD dan menundjuk seorang caretaker untuk pekerdjaan intern AD.
- 2) Omar Dhani: Tidak mau kalau harus berhadapan dengan Bung Karno. Dan sarannja supaja bersama2 dengan Bung Karno melanjutkan Revolusi.
- 3) Ibrahim Adjie: Mengeluarkan pernjataan, bila terdjadi apa2 terhadap Bung Karno, maka Siliwangi akan bergerak ke Djakarta.
- 4) M. Subur: Menilpun RPKAD untuk siap sewaktu2 Bung Karno dalam bahaya.
- 5) Nato cs: Menolak panggilan Bung Karno untuk hadir di Halim.
- 6) G-30-S: Kw Sjam tetap revolusi harus djalan sendiri tanpa Bung Karno. Keadaan Jon Djateng sudah letih dan belum selesai memetjahkan soal bagaimana (bisa) makan.
- 7) “daerah”: Baru Nusatenggara jang memberikan reaksi. Bandung sepi. Djateng sepi, djuga Djatim sepi. Massa di Jakarta sepi.

Daerah2 di seluruh kepulauan Indonesia, pada waktu itu tidak terdengar tjetusan-tjetusan imbangan.

PERTIMBANGAN:

- Bila kita teruskan ber-revolusi sendiri, maka kita akan berhadapan dengan Bung Karno + Nato cs dengan Angkatan Daratnja.
- Bila kita rangkul Bung Karno, maka kontradiksi akan beralih di satu fihak golongan kiri + golongan demokratis revolusioner dan dilain fihak hanya golongan kanan saja. Tetapi dari kita tidak ada ketentuan garis mana jang harus ditempuh dan sementara itupun waktu berlalu terus, dan perkembangan semakin konkrit. Nato menyusun kekuatannja – Bung Karno telah mengumpulkan anggota kabinetnja jg diperlukan.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Pada saat itu sebetulnja situasipun belum terlalu terlambat. Ada tjelah2 dimana segera harus kita masuki dalam persoalan penundjukkan siapa jang mendjadi pengganti Pangad. Bung Karno minta tjalon dari kita. Dari fihak Bung Karno mentjalonkan: Ibrahim Adjie, dan 2. Mursid. Dari fihak kita mentjalonkan: Rukman, Pranoto dan Basuki Rachmat. Akhirnja disetudjui Pranoto. Seharusnja kita serahkan saja kepada Bung Karno. Dengan demikian kita tidak meminta terlalu banjak. Dan Bung Karno ada kekuatan dalam menjelesaikan masalah intern AD dan dapat menghalang-halangi glundungnja Aksi2 Nato cs. Tetapi walaupun demikian, bila Pak Pranoto waktu itu tjekatan dan dapat menggunakan wewenang, maka situasi tidak akan seburuk ini. Seharusnja dengan surat keputusan itu, ia tjepat pidato diradio dan umumkan pengangkatannja. Tindakan kedua supaja kedua fihak menaati perintah2 tidak saling bertempur. Pak Pran harus pula mulai menjusun kekuatan brigade2 di sekitarnja dan langsung ia pimpin. Dengan demikian maka langkah2 selanjutnja akan mempunjai kekuatan. Kemudian segera diisi dengan dalih2 sementara lowongan Staf SUAD jang kosong. Sajang sekali kesempatan jang terachir ini tidak dipergunakan. Pak Pranoto achirnja setelah terlambat mulai berpidato diradio. Itupun atas desakan saja melalui kawan Endang. Tetapi isi pidatonjapun tidak keruan, malah mengutuk G-30-S sebagai gerakan petualangan. Kata2 ini otomatis melumpuhkan perangsang2 revolusi didaerah2 terutama di Djateng. Idee seperti jang dilukiskan di atas, yaitu idee merangkul Bung Karno bukan semata2 fikiran kompromi jang negatip, tetapi sesuai “om te redder wat er te redder val”, membela apa jang masih dapat dibela. Andaikata kalah, harus ada pertanggungandjawab, maka hanja pelaksana2 G-30-S sadjalah jang tampil mempertanggungjawabkannja, sehingga keutuhan Partai tidak terganggu. Taktik tsb di atas tidak lain bila kita mengetahui akan mendapatkan hanja kulitnja telur sadja, maka lebih baik mendapatkan isinja, walaupun hanja separuh saja (beter een halve ei dan een lege dop).

13. Akhirnja Nato cs memegang inisiatip dan tidak menghiraukan apa2 dan mulai dengan tegen offensifnja. Kekuatan militer G-30-S mereka kedjar dan Dan kesempatan jang lama mereka tunggu2 tidak disia-siakan, yaitu: Mengobrak-abrik PKI.
14. Sementara itu semua slagorde G-30-S berkumpul di LB disana-sini mulai terdengar tembakan dari RPKAD jang mulai mentjari kontak tembakan.

Dokumen No. 4

Kw Sjam dan Kw Untung cs, mulai rapat tentang menentukan sikap. Maka di tempat tsb, komandan Jon Djateng dan seluruh anggota bataljonnya, komandan bataljon Djatim juga hadir tanpa pasukan. Kurang lebih seribu lima ratus Sukwan jang dilatih di LB. Melihat situasi jang gawat itu tidak ada pilihan lain: a) Bertempur mati2an atau b) Tjepat menghilang, menjelamatkan diri. Diskusi berdjalan lama tanpa keputusan. Achirnja kami sarankan agar seluruh komando diserahkan kepada kami dan nanti bila situasi telah dapat diatasi wewenang akan diserahkan kembali kepada Kw Untung. Kw Untung tidak setudju, karena bertempur terus pendapatnja sudah tidak ada dasar politiknya lagi. Apa jang dimaksud dengan kata2nja itu, kami tidak begitu mengerti. Di lain fihak kw Sjam tidak memberi reaksi atas usul kami. Kemudian saja desak lagi supaya segera mengambil keputusan, bila terlambat nanti, maka kita terdjepit dalam suatu sudut dimana tidak ada pilihan lain, melawanpun hantjur dan laripun hantjur. Karena posisi kita pada waktu itu sudah labil. Kemudian rapat memutuskan memberhentikan pertempuran dan setiap kawan diperintahkan kembali ketempat asal mereka masing2, dalam keadaan jang serba lambat ini kemudian kami ambil inisiatif untuk menjelamatkan kw Pimp (kw Sjam) dan masuk kekota Djakarta (tak terbatja). Kawan Untung dalam tjara membubarkan pasukannjapun jang melakukan kesalahan, seharusnya ia sebagai komandan langsung harus memberi petundjuk teknis bagaimana pelaksanaan menjebar dan menjusup kembali. Karena di LB banjak kawan2 Sukwan jang berasal dari luar kota Djakarta, bahkan ada jang dari Djateng, mereka tentunja merasa asing dan tidak tahu djalan. Karena peraturannja “Aur Manuk” sadja atau dilepaskan sekehendak masing2 maka banjak jang tertawan dan menjadi mangsa penjiksaan pasukan2 Nato cs.

15. Pada hari ketiga dan keempat, kami menjarankan kepada pimpinan untuk tampil kemuka mendampingi Bung Karno untuk mentjoba menolong apa jang perlu ditolong. Pada saat itu, situasi belum sama sekali hantjur. Kabinet dimana terdapat orang-orang revolusioner masih berdiri tetapi, usul kami ditunda2 sehingga surat kami kepada Bung Karno baru diterima satu bulan kemudian. Bung Karno dalam kedudukan jang sudah terdjepit, mungkin djuga mendjadi chawatir, bila saja dekat2 padanja.
16. Demikianlah proses aksi “G-30-S” dari sukses barulah terdesak dan semakin terdesak sehingga achirnja tidak berdaja dan menjerahkan, segala inisiatif kepada fihak lawan.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

17. Sebagai kesimpulan umum, maka kami berpendapat bahwa:
- a. Kita telah melakukan suatu politieke strategische verassing (serangan tiba2) jang dapat dipergunakan oleh propaganda lawan sehingga memberikan kepada PKI suatu kedudukan jang terpentjil.
 - b. Rentjana jang semula akan dilakukan: Revolusi bertingkat tiba2 dirobah mendjadi gerakan PKI seluruhnja. Bila gerakan dilakukan bertingkat, yakni taraf pertama hanja terbatas gerakan didalam tubuh AD dengan tehnisnja sbb: Setelah berhasil merebut pimpinan AD, maka mulai mengganti para Panglima dan para komandan jang mempunyai fungsi potensiil dengan unsur2, atau perwira2 demokratis revolusioner. Kemudian dalam taraf kedua baru revolusi jang dipimpin oleh Partai. Dimulai dengan gerakan2 massa jang dibajangi oleh militer2 jang progresip. Persis seperti jang dilakukan oleh lawan terhadap pemerintah sekarang. Bila rentjana revolusi bertingkat ini ditempuh, maka keuntungannja adalah sbb: Andaikata kita dipukul, maka partai jang tetap mempunyai legalitet dan untuk dapat melindungi kawan2 militer. Bila aksi taraf pertama berhasil, maka suatu pidjakkan jang baik untuk melontjat ketaraf revolusi berikunja. Menurut hemat kami, kegagalan revolusi kita kali ini disebabkan diantaranya, dipindahkannja rentjana operasi jang semula bersifat intern AD, mendjadi operasi jang langsung dipimpin oleh partai, sehingga menjebabkan terseretnya Partai dan diobrak-abriknja Partai.
 - c. Bidang persiapan, Gerakan 30 September dilakukan tanpa melalui proses persiapan jang teliti. Terlalu mempertjajai laporan2 dari kader2 bawahan. Seharusnja dalam keadaan bagaimanapun pimpinan harus memeriksa dengan mata kepada sendiri tentang persiapannja. Komandan harus hadir menjaksikan 3 markas sektor, meskipun untuk beberapa menit saja supaja ia yakin bahwa semua pos2 telah terisi. Begitu pula persiapan2 lainnja. Sudah mendjadi kebiasaan didalam ketentaraan dimanapun, melakukan pemeriksaan barisan, sebelum ia bertugas. Misalnja ada satu regu hendak patroli, maka komandan peleton melihat regu itu, memeriksa alat2 perlengkapannja regu itu, persediaan pelurunya, menanjakan apakah perintah2nja telah dimengerti dan baru regu itu bisa berangkat untuk patroli. Apalagi/seharusnja G-30-S, suatu gerakan jang menentukan djutaan nasib rakjaat. Gerakan jang bukan

Dokumen No. 4

sadja bernilai nasional tetapi djuga mendjadi harapan kaum proletar seluruh dunia, seharusnja kita djangan bertindak dengan gegabah.

- d. Dalam saat2 jang kritis, pimpinan operasi harus terdjun ditengah pasukan, menjemangati anak buah supaja mereka bangkit melawan, meskipun dengan risiko hantjur semua. Bila sampai terdjadi, hantjur tidak apa – kawan2 jang masih hidup akan melandjutkan usaha revolusi. Dan kalau kita bertindak demikian besar kemungkinan lawanlah jang akan angkat tangan, karena pada saat2 itu Nato belum mempunyai Grip terhadap TNI jang ada dikota. Suasana dimana2 belum mengutuk G-30-S.

Dalam tiap-tiap perang revolusioner, seorang pemimpin harus sanggup membangkitkan dikalangan pengikutnja:

1. Djiwa kepahlawanan.
 2. Kebulatan pikiran dan tekad.
 3. Semangat berkorban.
- e. Ada hal jang perlu dipeladjadi setjara mendalam. Kawan2 jang selama ini hidup diorganisasi tentara bordjuis, sangat sulit dan mirip tidak sampai hati untuk mendahului teman2 seangkatannja. Hal ini terdjadi djuga pada bataljon jang berasal dari Djateng, dan djuga pada peristiwa jang kami dengar kemudian, waktu menghadapi Pangdam Surjosupeno. Mungkin letaknja pada kelemahan pandangan ideologi-kelemahan dalam pandangan klas. Adjaran Marxisme-Leninisme bahwa “Kalau tidak mereka jang kita basmi, maka merekalah jang akan membasmi kita”. Belum meresap, dan belum mendjadi kejakinan kawan2 di ABRI pada umumnja. Dari pengalaman ini maka pendidikan ideologi dan kesadaran pandangan klas perlu mendjadi program Partai.
- f. Strategi jang dianut dalam gerakan keseluruhan adalah sematjam strategi: “Bakar Petesan”. Tjukup sumbunja dibakar di Djakarta dan selandjutnja mengharap dengan sendirinja bahwa mertjonnja akan meledak didaerah2. Ternjata tjara ini tidak berhasil. Ada 2 sebab. Mungkin sumbunja kurang lama membakar atau mesiu jang ada dalam tubuh mertjon itu sendiri dalam keadaan masih basah, kami hubungkan ini dengan pekerjaan2 di waktu jang lampau, tjara2 menarik kesimpulan ttg kawan2 jang di ABRI dan massa adalah subjektif. Dari pengalaman ini kita harus bikin kebiasaan membesar2kan situasi jang sebenarnja. Biasanja kalau ada 10 orang

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

saja dalam satu peleton jang sudah dapat kita hubungi, dilaporkan bahwa seluruh peletonnja sudah kita (kawan).

Kalau ada seorang Dan Jon jang kita hubungi, maka ada perhitungan bahwa seluruh bataljon itu sudah kawan. Kekeliruan strategi G-30-S itu disebabkan djuga banjak kawan2 dari ABRI maupun dari daerah2 jang melaporkan bahwa massa sudah tidak dapat ditahan lagi. Bila pimpinan tidak mengambil sikap, maka rakjat akan djalan sendiri (ber-revolusi). Mengikuti suara2 jang belum diperiksa kebenarannya berarti kita kena “agitasi” massa, sama halnja tidak mendjalankan “Garis massa” setjara tepat.

- g. Melihat kemampuan dan kebenaran organisasi Partai diwaktu2 jl maka asalkan saja kita taktis menggerakkannya, kami rasa PKI tidak perlu kalah. Saja ibaratkan seorang pemasak jang mempunyai bumbu, sajur2 jang serba tjukup, tetapi kalau tidak pandai menilai temperatur dari panasnja minjak, besarnya api, bilamana bumbu-bumbu itu ditjemplungkan dan mana jang didahulukan dimasak maka masakan itupun tidak akan enak, satu tjontoh misalnja. Kami membawahi 18 bataljon, 3 diantaranya bisa dikerahkan untuk tugas2 revolusi, dan sudah dipersiapkan lengkap dengan pesawat angkutan Hercules berkat solidaritas dari kawan2 periwra di AD jang mempunyai kedudukan Komando, tetapi semua ini tidak dimanfaatkan, sehingga bukan kita jang menghantjurkan lawan “satu demi satu”, tetapi sebaliknya kita jang dihantjurkan setjara “satu demi satu”.

Sekian, dan kami tutup dengan sembojan:

“Sekali gagal, akal bertambah”!

“Madju terus pada djalan pengrevolusioneran”!



SALINAN*

Yth. Pak Omar Dhani

Bersama ini kami kirim dua bentuk surat:

- a. Surat pribadi
- b. Laporan kegiatan

Mohon surat pribadi itu jangan digunakan dalam rangkaian pembelaan, rnengingat dapat membotjorkan posisi saja dan untuk keselamatan diri saja. Mengenai laporan kegiatan dapat Bapak “akui, bahwa ini diterima pada waktu Bapak belum keluar negeri sebagai laporan dari saja.

Bila Bapak repot membuatkan keterangan seperti jang saja minta. tjukup bila pada laporan kegiatan tersebut dibubuhi sadja ACC (yang menjangkut Bapak) dan ditanda tangani, kemudian dikirim kepada kami kembali.

Bila Bapak sempat membuat keterangan khusus desnoods tidak usah ditik, maka akan lebih baik dan laporan kegiatan tersebut dapat Bapak tahan.

Sekian agar djadi maklum.

Hormat kami:

Ttd

(SUPARDJO)

Disalin sesuai dengan aslinja:

Oleh

PANITERA

J. ISMEDT Bc HK

KAPTEN UD LOK/473544



* SuratPengantar Supardjo kepada Omar Dhani ini diperoleh dari arsip pribadi Dr. Asvi Warman Adam yang diperoleh dari arsip KITLV, Leiden, Belanda. Sedangkan isi dokumen OTOKRITIK Supardjo kami dapatkan dari Penulis.

DOKUMEN NO. 5

PERNYATAAN BRIGADIR JENDERAL H. SUGANDHI³

- Sugandhi : “Man, ini ada apa kok di kampung-kampung ada persiapan dan pembuatan sumur”?
- Sudisman : “Sudahlah, jij ikut kita sadja!”
- Sugandhi : “ndak bisa Man saja ikut PKI, karena saja punja agama”.
- Sudisman : “Kalau jij ndak mau memang kamu sudah ditjekoki Nasution”.
- Sugandhi : “Bukan soal ditjekoki, tapi soalnya adalah ideologi”.
Tapi bila jij akan meneruskan rentjanamu, pasti kau akan digilas dan akan Habis Man”.
- Sudisman : “ndak bisa, kita akan pegang inisiatif, siapa yang memulai dan pukul dulu itu jang menang. Pertjajalah pada kita, semuanya sudah kita perhitungkan dengan masak-masak.”

Sebentar kemudian datanglah DN Aidit mendekati saja dan menanjakan pada saja sebagai berikut:

- DN Aidit : “Bung, Harian-mu masih reaksioner? Sudah bitjara dengan Sudisman? Kita akan mulai sebentar lagi dalam satu, dua, tiga hari ini. Dan ini semua Bung Karno sudah tahu. Lebih baik Saudara ikut sadja kita!”
- Sugandhi : “Sudisman sudah bicara sama saja, tapi saja tak mau ikut PKI. Memangnya PKI mau adakah coup? Saja (AB) pra doktrin sendiri jalah Saptamarga”.
- DN Aidit : “Bung, djangan bilang coup. Itu perkataan djahat. PKI akan perbaiki istilah jang dipakai ndandani). Revolusi jang dirongrong oleh Dewan Djenderal. Dua-tiga hari ini kita akan mulai. Bung

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

ikut apa ndak? Ini semua Bung Karno sudah saja beritahu semuanya”.

Dan tanggal 30 September dengan Presiden:

- Sugandhi : “Pak, PKI akan coup Bapak sudah tahu? Saja telah dihubungi sendiri oleh Sudisman dan Aidit”.
- Presiden : “Kamu djangan PKI-phobi (dengan nada marah). Kau tahu Dewan Djenderal? Kau tahu Djenderal-djenderal brengsek? Kamu hati-hati kalau ngomong”.
- Sugandhi : “Kalau ada Djenderal-djenderal brengsek ja dipetjat sadja to Pak, kan wewenang ada ditangan Bapak Dewan Djenderal itu ndak ada Pak. Jang ada adalah Wandjakti jang tugasnja membantu Men/Pangad untuk peneropongan Kolonel-kolonel yang akan dinaikkan djadi Djenderal, djadi bukan untuk tudjuan lain”.
- Presiden : “Wis kowe ora usah tjampur, diam sadja kamu. Kowe wis ditjekoki Nasution ja”.
- Sugandhi : “Betul Pak. DD itu tidak ada. Kan Pak Yani sudah bitjara sendiri dan menjatakan pada Bapak, bahwa DD tida ada. Dan lagi Pak Yani itu kan orang yang sangat setia pada Bapak, boleh dibilang rehterhand”.
- Presiden : “Sudah kamu djangan banjak bitjara, djangan ikut-ikut. Kamu tahu dalam Revolusi menurut Thomas Carlyle, seorang Bapak dapat makan anaknya sendiri. Kamu tahu”.
- Sugandhi : “Waduh, kalau begitu Bapak ini sudah jadi PKI”
- Presiden : “Diam kamu, tak tempeleng pisan kowe mengko. Sudah pulang sana. Jang ngati-ati.”

Demikianlah lebih kurang kata-kata jang dipakai. Dan Brigdjen Sugandhi telah melaporkan hal-hal itu kepada Men/Pangad pada tanggal tanggal 30 September, dan pada saja (red: Nasution) sesudah 1 Oktober.



DOCUMENT No. 6

THE GILCHRIST DOCUMENT

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

Perkara H. Dr. Subandrio

Turunan

March 24, 1965

Draft

Telegram to:

FOREIGN OFFICE

Date: March 24, 1965

Security classification, if any:

TOP SECRET, PERSONAL

Addressed to FOREIGN OFFICE,

FOR SIR HAROLD CACCIA

Telegram No. Date: March 24, 1965

I discussed with the American Ambassador the questions set out in your No. 67786/65.

The Ambassador agreed in principal with our position but asked for time to investigate certain aspects of the matter.

To my question on the possible influence of Bunker's visit, to Jakarta, the Ambassador stated that he saw *no chance of improving* the situation, and that there was therefore no reason for changing our joint plans. On the contrary, the visit of the U.S.S. President's personal onvoy would give us more time to prepare the operation in the outmost detail.

The Ambassador felt that further measures were necessary to bring our efforts into closer alignment. In this connection, he said that it would be useful to impress again on our local army friends that extreme care, discipline and coordination of action were essential for the success of the enterprise.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

I promised to take all necessary measures. I will report my own views personally in due course.

GILCHRIST

Document No. 18 n 371

Diturun dari photocopy

Panitera,

S. Madidy BC/HK

Kap. CKH. Nro. 250718

NOTE: The spelling errors have been left in the above text as it is not clear whether these are mere typos made by the typist who had typed this document for me in Jakarta in 1971, or mistakes committed by the forger of the original.

Dokumen No. 6

Terjemahan:

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA
Perkara H. Dr. Subandrio

TURUNAN
24 Maret 1965

Draft

Telegram kepada: SANGAT RAHASIA, PRIBADI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TANGGAL: 24 Maret 1965

Kepada KEMENTERIAM LUAR NEGERI
Untuk SIR HAROLD CACIA
Telegram No.....tanggal: 24 Maret 1965

Saya telah mendiskusikan dengan Duta Besar Amerika tentang masalah yang Saudara kemukakan No. 67786/65.

Duta Besar Amerika pada prinsipnya telah menyetujui tentang posisi kita, tetapi meminta waktu untuk menyelidiki segi-segi tertentu dari masalah tersebut.

Atas pertanyaan saya mengenai pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh kunjungan Bunker ke Jakarta, Duta Besar Amerika menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya harapan untuk memperbaiki situasi dan karenanya tidak ada alasan untuk mengubah rencana-rencana kita bersama.

Sebaiknya kunjungan pribadi Presiden Amerika Serikat tersebut akan memberi waktu lebih banyak untuk mempersiapkan gerakan sampai pada perincian yang sekecil-kecilnya.

Duta Besar merasa bahwa usaha-usaha lebih jauh adalah perlu untuk lebih mendekatkan usaha-usaha bersama. Dalam hubungan ini ia mengatakan bahwa sangat berguna untuk memberikan kesan kepada our local army friends (kawan-kawan dari Angkatan Darat di sini) bahwa ketelitian, disiplin, dan kerja sama dari segala tindakan sangat penting untuk berhasilnya tujuan. Saya berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Saya akan melaporkan pendapat saya sendiri secara pribadi pada saatnya.

Gilchrist



DOCUMENT No. 7

BROCK UNIVERSITY

Department of Political Science
ST. CATHARINES, Ontario
Canada

President H. Mohammad SOEHARTO October 31, 1996
Jl. Cendana No. 8
Menteng
JAKARTA
Indonesia

Dear President Soeharto:

On August 5, 1968, I presented a paper at the Conference on Asian History, held in Kuala Lumpur, entitled *THE SEPTEMBER 30 MOVEMENT IN INDONESIA: A Coup That Failed: 1965*.

Subsequently to that, the late General Nugroho Notosusanto invited me to visit Jakarta to study the *Coup* in *situ*, i.e., at PENAS and then at the Halim Air Base. I also studied the protocols of Sjam before he was tried.

The paper developed an argument, based upon primary sources, that the *Coup* had been planned by the PKI, which used a group of radical officers as an instrumentality to achieve its objectives. Until today, this paper is the only study which focuses exclusively on the PKI, the objective of its *Coup*, the method of its execution, and on the KOSTRAD operations, under your command, to foil it.

Given the importance which these events of 1965 hold for the contemporary political developments in Indonesia, I am hoping to publish the paper in Jakarta in English, as well as having it translated into Indonesian.

Dokumen No. 7

In view of this, I would be most grateful if you would kindly grant me an interview during November of this year, at your convenience. This would enable me, in my next study now under preparation, to highlight the central role which you had played in this most important event in Indonesia's history since independence, in which you had laid the foundation to the New Order.

I could be reached at the following address in Jakarta: Menteng Regency Apartments, Jalan R.P. Soeroso 10-12, Jakarta 10350, Tel. 351-5701; Fax: 315-5654.

Please accept a copy of my paper with my compliments, and as an expression of my highest regards for you.

Respectfully Yours

Victor M. Fic

Professor Emeritus

1 enclosure

Terjemahan

.....

Oktober 31, 1996

Kepada Yth.

Bapak Presiden H. Mohammad Soeharto

Jl. Cendana No. 8, Menteng

Jakarta

Indonesia

Dengan hormat,

Pada 5 Agustus 1968, saya menyajikan sebuah makalah di hadapan Conference on Asian History, yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, berjudul *GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DI INDONESIA: Sebuah Coup Yang Gagal: 1965*

Tidak lama kemudian, almarhum Jenderal Nugroho Notosusanto mengundang saya untuk berkunjung ke Jakarta untuk melakukan penelitian atas kudeta tersebut *in situ*, yaitu di PENAS dan kemudian di Pangkalan Udara Halim. Saya juga melakukan penelitian atas berkas-berkas mengenai Sjam sebelum ia dibawa ke depan pengadilan.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Makalah saya tersebut mengemukakan sebuah argumen, berdasarkan sumber-sumber primer, bahwa kudeta itu direncanakan oleh PKI, yang menggunakan sekelompok perwira radikal sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya. Hingga hari ini, makalah ini adalah makalah satu-satunya yang memusatkan perhatian secara eksklusif pada PKI, pada tujuan kudeta yang dilancarkannya, pada metode yang digunakannya, dan pada operasi-operasi KOSTRAD, di bawah komando Bapak pada waktu itu, untuk menggulungnya.

Mengingat pentingnya arti dari peristiwa-peristiwa pada tahun 1965 tersebut bagi perkembangan kehidupan politik di Indonesia zaman sekarang ini, saya merencanakan akan menerbitkan makalah tersebut di Jakarta dalam bahasa Inggris, dan disamping itu makalah itu juga akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Bersama ini, saya dengan penuh hormat mengajukan permohonan untuk sudi kiranya Bapak Presiden mengizinkan saya mewawancarai Bapak pada bulan November tahun ini, pada waktu yang Bapak tentukan. Wawancara ini akan memungkinkan pemaparan, dalam penelitian saya yang akan datang dan yang sekarang sedang dalam persiapan, peran utama yang telah Bapak mainkan dalam peristiwa yang paling penting dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan, yang Bapak siapkan landasan di atasnya bagi Orde Baru.

Saya dapat dihubungi pada alamat berikut ini di Jakarta: Menteng Regency Apartments, Jalan R.P Soeroso 10-12, Jakarta 10350, Tel. 351-5701; Fax: 315-5654.

Terlampir saya sampaikan dengan hormat salinan makalah saya tersebut, dan sebagai ungkapan rasa hormat saya kepada Bapak.

Hormat saya,
Victor M. Fic
Guru Besar Emeritus

1 lampiran



DOKUMEN NO. 8

KOMUNIKE/PENGUMUMAN 30 SEPTEMBER LEWAT RRI DJAKARTA

“Djakarta 1 Oktober, Antara: ‘Gerakan 30 September’ mengeluarkan suatu komunike yang menjelaskan perkembangan-perkembangan terakhir yang terjadi di Indonesia.

“Komunike itu mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota RI, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari Angkatan-Angkatan Bersendjata lainnya.

“Gerakan 30 September yang dikepalai oleh Letkol. Untung Komandan Batalyon Tjakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada Jenderal-Jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal”, kata komunike tersebut.

“Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September, sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan Gerakan 30 September.

“Komunike tersebut mengatakan bahwa ‘Dewan Jenderal’ adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu.

“Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, ‘Dewan Jenderal’ merencanakan pameran kekuatan (*machtsvertoon*) pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar di Jakarta, ‘Dewan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Jenderal' bahkan telah merencanakan untuk mengadakan coup sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah coup kontra-revolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan 'Gerakan 30 September' yang ternyata berhasil dengan baik.

"Menurut keterangan yang didapat dari Letkol Untung, Komandan 'Gerakan 30 September' Gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada 'Dewan Jenderal' yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat, yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letkol Untung secara pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Tjagrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia.

"Komandan 'Gerakan 30 September' ini selanjutnya menrangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap 'Dewan Jenderal' akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan langsung kepada kaki-tangan dan simpatisan-simpatisan 'Dewan Jenderal' yang ada di daerah-daerah. Menurut keterangan Komandan 'Gerakan 30 September, sebagai follow-up tindakannya akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di Pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Propinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan dan Dewan Revolusi Desa.

"Anggota-anggota Dewan Revolusi itu akan terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Partai-partai, Ormas-ormas, surat kabar-surat kabar, majalah-majalah dapat meneruskan kegiatannya asal dalam jangka waktu akan ditetapkan kemudian menyatakan kesetiannya kepada Dewan Revolusi Indonesia.

"Dewan Revolusi Indonesia yang akan dibentuk oleh 'Gerakan 30 September' akan dengan konsekwen melaksanakan "Panca Azimat Revolusi", melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPR-GR dan putusan-putusan DPA," demikian kata Komandan 'Gerakan 30 September'.

"Dewan Revolusi tidak akan merobah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif anti-nekolim, dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Juga politik mengenai Konferensi AA ke-II dan Conefo serta konfrontasi terhadap "Malaysia" tidak akan berubah, dan KIAPMA (*red: Konferensi tentang basis-basis militer asing*) serta kegiatan-kegiatan internasional di Indonesia, tetap akan diselenggarakan.

"Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September juga menyerukan seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk

Dokumen No. 8

menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat ‘Dewan Jenderal’ dan kakitangan-kakitangannya, agar dapat melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam arti yang sesungguhnya.

“Kepada para perwira, bintanga dan tamtama Angkatan Darat diseluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh ‘Dewan Jenderal’ dan kakitangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menterlantarkan nasib anak buah, hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal.

“Angkatan Darat bukan untuk Jenderal-Jenderal tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita Revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata diluar Angkatan Darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terimakasihnya atas bantuan mereka dalam tindakan pembersihan terhadap kaki tangan dan simpatisan Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat, dan mengharap supaya dalam Angkatan masing-masing juga diadakan tindakan pembersihan terhadap kakitangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal.

“Dalam waktu singkat Komandan Letnan Kolonel Untung akan mengumumkan Dekrit Pertama tentang ‘Dewan Revolusi Indonesia’ yang kemudian akan disusul oleh dekrit-dekrit lain.

“Komunike ini dikeluarkan di Djakarta, 30 September 1965, Bagian Penerangan ‘Gerakan 30 September’.

“Komunike ini disiarkan ulang oleh RRI, Djakarta, hari ini pukul pukul 08. pagi.



DOKUMEN NO. 9

DEKRIT NO.1 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA * (1 Oktober 1965)

- I. Demi keselamatan negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan negara Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya, demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal yang telah merencanakan coup menjelang hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Sejumlah jenderal telah ditangkap, alat komunikasi dan obyek-obyek vital lainnya di Ibukota telah jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh AD untuk mengakhiri perbuatan sewenang-wenang Jenderal-jenderal Anggota Dewan Jenderal serta Perwira-perwira lainnya yang menjadi kakitangan dan simpatisan anggota Dewan Jenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan bersenjata di luar Angkatan Darat.
- II. Untuk melancarkan tindak lanjut daripada tindakan 30 September 1965, maka oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil dan orang-orang militer yang mendukung. Gerakan 30 September tanpa

* *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya.* Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1966, hlm. 9-10. Pertamakali disiarkan oleh RRI, Jakarta pada pukul 11.00 pagi, 1 Oktober 1965.

Dokumen No. 9

reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum Majelis Permusjawaratan Rakjat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya. Dewan Revolusi dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September.

- III. Dengan jatuhnya segenap Kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri yang baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan routine menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas Menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia cq. Menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.
- IV. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah-daerah dibentuk Dewan Revolusi Propinsi (paling banyak 25 orang), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 orang), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang) dan Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang), terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di Propinsi dan Kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) masing-masing sedangkan di Kecamatan dan Desa dibantu oleh Pimpinan Front Nasional setempat yang terdiri dari orang-orang yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.
- V. Presidium Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari Komandan dan Wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September, Komandan dan Wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Revolusi Indonesia.
- VI. Segera sesudah pembentukan Dewan Revolusi Daerah, Ketua Dewan Revolusi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Dewan Revolusi yang setingkat di atasnya tentang susunan lengkap anggota Dewan. Dewan-dewan Revolusi Propinsi harus mendapat pensahan tertulis dari

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Presidium Dewan Revolusi Indonesia, Dewan-dewan Revolusi Kabupaten harus mendapat pensahan tertulis dari Dewan Revolusi Propinsi, dan Dewan Revolusi Kecamatan dan Desa harus mendapat pensahan tertulis dari Dewan Revolusi Kabupaten.

Jakarta, 1 Oktober 1965

PRESIDIUM GERAKAN 30 SEPTEMBER

Komandan : Letnan Kolonel Untung
Wakil Komandan : Brigjen Supardjo
Wakil Komandan : Letnan Kolonel Udara Heru
Wakil Komandan : Kolonel Laut Sunardi
Wakil Komandan : Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas.

(Diumumkan oleh bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965)



DOKUMEN NO. 10

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT PENGUMUMAN NO. 027/PENG/PUS/1965*

1. Pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu gerakan kontra revolusioner yang menamakan dirinya “gerakan 30 September” di Jakarta.
2. Mereka telah melakukan penculikan-penculikan terhadap beberapa Perwira Tinggi yaitu:
 1. Letnan Jenderal A. Yani
 2. Mayor Jendeeral Suprpto
 3. Mayor Jenderal S. Parman
 4. Mayor Jenderal Haryono M.T.
 5. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
3. Mereka dapat memaksa dan mempergunakan Studio RRI Jakarta dan Kantor Besar Telekomunikasi Jakarta.
4. P.Y.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin besar Revolusi Bung Karno, dengan Y.M. Menko Hankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution dapat diamankan dan ada dalam sehat wal’afiat.
5. Pimpinan Angkatan Darat untuk sementara dipegang oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima KOSTRAD.
6. Situasi umum telah dapat dikuasai kembali dan tindakan-tindakan pengamanan sedang giat dilakukan. Kepada masyarakat ramai diserukan, agar tetap tenang dan terus melakukan tugasnya masing-masing sebagaimana biasa.

Jakarta, 1 Oktober 1965

PIMPINAN SEMENTARA ANGKATAN DARAT
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
MAYOR JENDERAL TNI



* Puspenad-Fakta-fakta persoalan sekitar “Gerakan 30 September”.

DOKUMEN NO. 11

KEPUTUSAN NO. 2 PENURUNAN DAN PENAIKAN PANGKAT*

- I. Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965 diambil-alih oleh Gerakan 30 September yang Komandannya adalah Perwira dengan pangkat Letnan Kolonel, maka dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi pangkat dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang di atas Letnan Kolonel atau setingkat. Semua Perwira yang tadinya berpangkat di atas Letnan Kolonel harus menyatakan kesetiaannya secara tertulis kepada Dewan Revolusi Indonesia dan baru sesudah itu ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Letnan Kolonel adalah pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Negara Republik Indonesia.
- II. Karena Gerakan 30 September pada dasarnya adalah gerakan daripada Prajurit bawahan, terutama daripada Tamtama dan Bintara, maka dengan ini dinyatakan, bahwa semua Tamtama dan Bintara dari semua Angkatan Bersenjata RI yang mendukung Gerakan 30 September dinaikkan satu tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September 1965.
- III. Semua Tamtama dan Bintara yang langsung ambil bagian dalam gerakan pembersihan terhadap anggota Dewan Jenderal pada tanggal 30 September 1965 malam di Jakarta, dinaikkan pangkatnya dua tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September 1965.

Jakarta, 1 Oktober 1965

KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER
Ketua Dewan Revolusi Indonesia

ttd

(Letnan Kolonel Untung)



* Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1995 Melalui RRI pada jam 13.00 WIB.

DOKUMEN NO. 12

PERINTAH HARIAN MEN/PANGAU

Nomor: 445/Pen/1965

1. Pada tanggal 30 September 1965 malam telah diadakan gerakan oleh Gerakan 30 September untuk mengamankan dan menyelamatkan Revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi terhadap Subversi CIA. Dengan demikian telah diadakan pembersihan dalam tubuh Angkatan Darat daripada anasir-anasir yang didalangi oleh Subversi asing yang membahayakan Revolusi Indonesia.
2. Dengan diadakannya gerakan tersebut, maka subversi asing dan antek-anteknya tidak akan tinggal diam dan kemungkinan besar akan meningkatkan gerakannya yang anti revolusioner.
3. Angkatan Udara Republik Indonesia sebagai alat Revolusi selalu dan tetap akan menyokong dan mendukung tiap gerakan yang progresif revolusioner. Sebaliknya Angkatan Udara Republik Indonesia akan menghantam tiap usaha yang membahayakan Revolusi Indonesia.
4. Dengan ini kami perintahkan kepada warga AURI waspada terhadap provokasi-provokasi dan perongrongan-perongrongan dan untuk lebih meningkatkan kesiap-siagaan terhadap segala kemungkinan baik dari dalam maupun dari luar.

Menteri/Panglima Angkatan Udara
Republik Indonesia

Ttd

OMAR DHANI

LAKSAMANA MADYA UDARA

Dikeluarkan di : Departemen AURI
Tanggal : 1 Oktober 1965
Jam : 09.30



DOKUMEN NO. 13

PERNYATAAN PRESIDEN SUKARNO¹

“Komandan Resimen Tjakrabirawa, mengumumkan petang ini bahwa Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno berada dalam keadaan sehat wal’afiat dan tetap memegang Pimpinan Negara dan Revolusi.

Pernyataan ini disiarkan melalui RRI Djakarta, dan sebelumnya Letkol M. Santoso, Kepala Staf Resimen Tjakrabirawa, mengadakan konferensi pers sekitar pukul 11 siang untuk membacakan pernyataan itu, atas nama Brigjen Sabur, Komandan Resimen².

Pernyataan itu mengatakan: “Untuk menghindari interpretasi-interpretasi dan laporan-laporan yang keliru, kami umumkan bahwa Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno berada dalam keadaan sehat wal’afiat dan tetap memimpin negara dan Revolusi!”



¹ Wawancara dengan Nugroho Notosusanto, Jakarta, 30 April 1970

² Redaksi YOI: *tetapi ternyata siaran itu diblokir oleh Untung atas perintah Aidit hingga pukul 1.00 siang karena satu dan lain sebab.*

DOKUMEN NO. 14

PERINTAH HARIAN PRESIDEN

Kami Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi dengan ini mengumumkan:

1. Bahwa kami berada dalam dalam keadaan sehat wal'afiat dan tetap memegang Pimpinan Negara dan Revolusi. Bahwa Pimpinan Angkatan Darat Republik Indonesia sementara berada langsung dalam tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI.

Bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk untuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamodro Ass. III Men/Pangad.

2. Kepada seluruh Angkatan Bersenjata saya perintahkan mempertinggi kesiap-siagaan kembali dan tetap tinggal di pos masing-masing dan hanya bergerak atas perintah.
3. Diperintahkan kepada seluruh rakyat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional sekompak-kompaknya.

Dikeluarkan di Djakarta
Tanggal: 1 Oktober 1965

Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi

Ttd

SOEKARNO



DOKUMEN NO. 15

PERNYATAAN RESMI MEN/PANGAL

1. Karena ternyata bahwa kejadian tanggal 1 Oktober 1965 di Ibukota yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”, tidak saja merupakan persoalan intern Angkatan Darat Republik Indonesia, tetapi telah merupakan persoalan Nasional yang membahayakan Revolusi, maka dengan ini kami Menteri/Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia menyatakan:
 - a. Tidak menyetujui dan tidak membenarkan apa yang menamakan diri “Gerakan 30 September”
 - b. Tidak tahu menahu susunan maupun personalia dari apa yang dinamakan Dewan Revolusi Indonesia yang dibentuk oleh Gerakan tersebut.
2. Demi keamanan Revolusi serta langsungnya Pimpinan Revolusi oleh Pimpinan Besar Revolusi Bung Karno, maka Angkatan Laut Republik Indonesia bekerjasama dengan Angkatan Darat Republik Indonesia untuk membasmi apa yang menamakan “Gerakan 30 September”.

Jakarta, 1 Oktober 1965
Menteri/Panglima Angkatan Laut
Republik Indonesia
Ttd
E. MARTADINATA
LAKSAMANA MADYA LAUT

Dikeluarkan di : Departemen AURI
Tanggal : 1 Oktober 1965
Jam : 09.30



DOKUMEN NO. 16

PERNYATAAN MEN/PANGAU Nomor: 005/207/65

1. AURI tidak turut campur dalam Gerakan 30 September.
2. AURI setuju dengan tiap gerakan pembersihan yang diadakan di dalam tubuh tiap alat revolusi sesuai dengan garis Pemimpin Besar Revolusi.
3. AURI tidak turut campur dengan urusan rumah tangga lain Angkatan.
4. AURI tidak tahu menahu mengenai "Dewan Revolusi Indonesia" maupun mengenai susunan personalianya.

PAU Halim Perdanakusuma, 2 Oktober 1965

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

OMAR DHANI
LAKSAMANA MADYA UDARA

Dikeluarkan di : Departemen AURI
Tanggal : 1 Oktober 1965
Jam : 09.30



DOKUMEN NO. 17

RADIOGRAM DARI MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN

Kepada:
Para Deandak
Para Pangdak
Seluruh Staf Depak
Dan Seluruh Anggota AKRI

Isi:

- Satu** - Tidak benar bahwa kami duduk di dalam apa yang menyebutkan diri Dewan Revolusi Indonesia ttk
- Dua** - Dicantumkan nama kami jelas adalah di luar pengetahuan kami ttk
- Tiga** - Angkatan Kepolisian RI di bawah pimpinan kami tetap taat tanpa reserve Kepada pimpinan paduka YM Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno ttk.
- Empat** - Kami minta agar supaya AKRI turut serta memulihkan keadaan sebagai semula ttk

Jakarta, 1 Oktober 1965

MENTERI/PANGLIMA
ANGKATAN KEPOLISIAN

ttd

IRJEN. POL SUTJIPTO JUDODIHARDJO



DOCUMENT No. 18¹

September 1, 1965

PROSPECTS FOR AND STRATEGIC IMPLICATIONS OF A COMMUNIST TAKEOVER IN INDONESIA

The Problem

To estimate the chances and implications of
a Communist takeover in Indonesia within
the next two or three years

Discussion

I. Prospects for a Communist Takeover

1. Sukarno is the unchallenged leader of Indonesia and will almost certainly remain so until death or infirmity removes him from the scene. He is developing in Indonesia an authoritarian government of the "national-front" type on which the Indonesian Communist Party (PKI) exerts the strongest influence, though under his own continued domination. The past year or two have been characterized by rapid progress toward this objective. The PKI now claims 3,000,000 members and is by far the best organized and most dynamic political entity in Indonesia. With Sukarno's support, the Communists and their sympathizers have come to occupy a major

1. Edward C. Kee (Editor), *Foreign Relations 1964-1968, Vol. XXVI, Indonesia; Malaysia; Singapore; Philippines*. Washington: The United States Government Printing Office, 2001. Document 137. Dated September 1, 1965.

SOURCES: Department of State, INR/EAP Files-Lot 90 D 165, SNIE 55-65. Secret; Controlled Dissem. The Central Intelligence Agency and the intelligence organizations of the Departments of State and Defense, and the NSA prepared this estimate which was approved by the members of the U.S. Intelligence Board on September 10, except the representatives of the AEC and FBI who abstained on the grounds the topic was outside their jurisdiction. A note on the covering sheet indicates that this SNIE supplements NIE 54/55-65 (Document 126).

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

position in the central government and in numerous provincial and local administrations. Whatever its present influence on Sukarno, it is clear that the PKI finds Sukarno's policies, both domestic and foreign, compatible with its own interests. It does not create these policies, but provides specific suggestions on method and timing which Sukarno finds acceptable. His own predilections, skilfully played upon by the PKI, have brought his foreign policy into close harmony with that of the Communist states of Asia.

2. Communist fortunes in Indonesia will probably continue to prosper so long as Sukarno stays in power. As in the past, however, he will probably move cautiously in expanding PKI participation in the government so as to avoid creating excessive domestic unrest or encouraging a coalition of non-Communist elements. If Sukarno lives, it is probable that in two or three years the Indonesian state will be sufficiently controlled by the Communists to be termed a Communist state, even though Sukarno remains the acknowledged leader. It will probably not be possible, however, to detect any precise moment at which the Communists "take over", unless Sukarno chooses to proclaim it. We believe that domestic political considerations and his desire to bequeath his personal political concepts to Indonesia will lead him to refrain from such an announcement. Conceivably, the PKI leaders could become powerful enough to threaten Sukarno's own dominance, but since his policies are likely to remain along lines generally favorable to them, they are unlikely to take risks in order to seize power.
3. In the event of Sukarno's early death or incapacity, the PKI drive to power would probably be slowed for a time. Though there would be considerable political turmoil and perhaps some violence, the successor government would probably be headed at first by a coalition of familiar non-Communist military and civilian names. The PKI could probably not be denied an important share in this government, both because of its established position and because the military would probably be reluctant to risk civil war to initiate a roll back of the Communists. On the other hand, the party would no longer benefit from Sukarno's patronage and would have to rely entirely on its own strengths and capabilities, which though considerable would probably be insufficient to encourage an open

challenge to the military. Hence, we believe that the PKI would not attempt to seize full power by force in the months following Sukarno's death if that occurred at any early date.

4. The longer Sukarno lives, the better will be the position of the PKI after his death. Another two or three years of his rule are likely to weaken anti-Communist elements in the army and elsewhere to the point where, at his death, the Communists would have a good chance of taking over full power. We do not exclude other possibilities, however, such as the emergence of a coalition of anti-Communists leading to a protracted stalemate or to a conflict which could break up the Indonesian state.

II. Implications

5. Sukarno's Indonesia already acts in important respects like a Communist state and is more openly hostile to the US than most Communist nations. Much of the damage that an avowedly Communist Indonesia could do to the Western position in the Far East is being done (e.g., "confrontation" of Malaysia and subversion and infiltration in the Philippines) and neither Sukarno nor any probable successor government is likely to abandon efforts to weaken the West in this area.
6. Nevertheless, the overt accession to communism of a country like Indonesia—large, populous, rich in resources, and strategically situated—would have an important impact on other countries in South and East Asia. Peking would be especially gratified by the triumph of one of its closest associates and, for a time, would probably offer close cooperation in the Malaysian area. Both Peking and Hanoi would be encouraged in their struggle with the US in Vietnam, while the confidence of Laos, Thailand, and South Vietnam would be undermined. The advent of a Communist state on the Indian Ocean would make India increasingly nervous.
7. Given Indonesia's limited military capability and its many strategic vulnerabilities, a Communist Indonesia would pose only a potential threat to the Western position in Southeast Asia and to important world sea and air lanes. The threat of a Communist Indonesia would be felt most immediately in Malaysia, the Philippines, and Australia,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

and would lead their governments to make urgent demands for substantial US and Commonwealth military support.

8. The conservative Malaysian government would despair of a satisfactory settlement of its dispute with Djakarta. Furthermore, it would expect intensification of Indonesian efforts to subvert the peninsular Malays, and increased cooperation between Djakarta and Peking in arming and training dissidents on the Thai-Malayan border and in northern Borneo. Singapore would face an intensified effort to subvert its Chinese population. Both governments would face increased pressure by all left-wing political and labor groups. The Commonwealth presence would probably make it possible for moderate governments in the two states to survive for the period of this estimate, but over a longer period the existence of a Communist Indonesia would cause their chances of survival to diminish.
9. The Philippine Government, already concerned about Indonesian infiltration of the southern islands as well as Djakarta's clandestine political activities in Manila itself, would show real alarm. Irritants in its relations with the US would probably be submerged for a time in a sense of common danger. The Australians would fear for East New Guinea and their lines of communication to Europe and the Far East.
10. As a major Communist state led by a markedly independent and self-reliant party, Indonesia would become the object of more intense Sino-Soviet rivalry. Moscow would probably increase its military and economic assistance in hopes of encouraging the development of a second Asian Communist power center to compete with Peking. For its part, the PKI would probably take a friendlier attitude toward Moscow in the interest of material gain. Peking would, of course, increase its efforts to tie Djakarta even more closely to Chinese policy in the Far East. But it is likely that PKI foreign policy decisions, like those of Sukarno, would stress Indonesian national interests above those of Peking, Moscow, or international communism in general. The pursuit of these national interests would be more likely to lead to friction with the Chinese Communists than with the Soviets. Thus, Indonesia's formal accession to communism, while immediately strengthening the Communist side, would contribute over the longer run to transforming the Communist world into a looser association of sovereign states.

Dokumen No. 18

11. A Communist Indonesia would probably not become of major military significance to either Moscow or Peking during the period of this estimate. An Indonesia openly led by the PKI might ask for security guarantees from Moscow and Peking, and such requests might, in the circumstances, be difficult to reject. We believe that the PKI leaders would be sufficiently nationalistic to refuse to grant air or naval bases or missile sites to either Moscow or Peking, though it is possible that they would permit one or both to use existing Indonesian bases for logistical purposes, thereby greatly extending the range, for example, of their submarines. In any bargaining with Moscow or Peking on the subject of bases or missile sites, the Indonesians would undoubtedly be favorably impressed by offers of nuclear weapons in exchange. It is extremely doubtful, however, that Moscow would make such an offer, and, over the next two or three years, unlikely that Peking would be in a position to do so.
12. In the short term, Indonesia's formal accession to communism would have a heavy impact on world politics. It would be seen as a major change in the international balance of political forces and would inject new life into the thesis that communism is the wave of the future. But while Communists around the world would be encouraged, and their opponents disturbed, this event would not by itself cause other nations to follow suit or even necessarily to alter their foreign policies.
13. The longer term impact of a Communist Indonesia would depend primarily on the degree of success or failure which the PKI met as it moved to energize and unite the Indonesian nation. If these efforts succeeded, Indonesia would provide a powerful example for the underdeveloped world and hence a credit to communism and a setback for Western prestige. It is much more likely that the early years of a Communist Indonesia would be occupied with consolidating political control and resuscitating the Indonesian economy and that, during this period, Indonesia would be more liability than asset to the Communist powers.



Terjemahan

DOKUMEN No. 18¹

1 September 1965

PROSPEK DAN IMPLIKASI STRATEGIS PENGAMBILALIHAN KEKUASAAN OLEH KOMUNIS DI INDONESIA

Masalah
Prospek dan implikasi strategis
pengambilalihan kekuasaan oleh Komunis di Indonesia dalam dua atau tiga
tahun ke depan

Diskusi

I. Prospek Pengambilalihan Kekuasaan oleh Komunis

1. Sukarno adalah pemimpin Indonesia yang tidak ada tandingannya di Indonesia dan hampir pasti akan tetap memimpin Indonesia hingga wafatnya tiba atau penyakit menurunkannya dari pentas politik. Ia sedang mengembangkan di Indonesia sebuah pemerintahan otoriter dari jenis “front nasional” yang mendapat pengaruh paling kuat dari Partai Komunis Indonesia (PKI), meski tetap di bawah kendalinya. Masa selama satu dua tahun terakhir ini mencatat kemajuan-kemajuan pesat dalam upaya mencapai tujuan ini. PKI mengaku memiliki 3 juta anggota sekarang ini dan sejauh ini merupakan organisasi politik yang paling baik organisasinya dan paling dinamis di Indonesia. Dengan dukungan Sukarno, kaum Komunis dan para simpatisan mereka sekarang

¹ Edward C. Kee (Editor), *Foreign Relations 1964-1968, Vol. XXVI, Indonesia; Malaysia; Singapore; Philippines*. Washington: The United States Government Printing Office, 2001. Document 137. Tertanggal 1 September 1965.

Sumber: Department of State, INR/EAP Files-Lot 90 D 165, SNIE 55-65. Rahasia; Distribusi Terbatas. Central Intelligence Agency (CIA) dan badan-badan dinas rahasia di Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan, dan NSA menyiapkan perkiraan ini, yang disetujui oleh para anggota U.S. Intelligence Board [Dewan Dinas Rahasia Amerika Serikat] pada 10 September kecuali wakil-wakil dari AEC dan FBI yang abstain dengan alasan bahwa topik berada di luar yurisdiksi masing-masing mereka. Sebuah catatan untuk surat pengantar mengatakan bahwa SNIE ini melengkapi NIE 54/55-65 (Document 126).

Dokumen No. 18

menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan di pusat dan di berbagai propinsi dan kabupaten. Terlepas dari sampai seberapa jauh Sukarno dipengaruhi PKI, jelas bahwa bagi PKI kebijakan-kebijakan Sukarno, baik untuk dalam negeri maupun untuk luar negeri, sejalan dengan kepentingan-kepentingannya. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak diciptakan oleh PKI, tetapi PKI memberikan saran-saran mengenai metode dan waktu pelaksanaan, yang tampaknya dapat diterima oleh Sukarno. Sepak terjang Sukarno, yang didukung PKI dengan cerdas, membawa politik luar negerinya lebih dekat pada politik luar negeri negara-negara Komunis di Asia.

2. Masa depan Komunis di Indonesia kemungkinan besar akan tetap cerah selama Sukarno memegang kekuasaan. Namun, seperti pada masa lalu, ia kemungkinan akan melangkah dengan hati-hati sepanjang menyangkut memperluas peranan PKI dalam pemerintahan, untuk menjaga jangan sampai terjadi gejolak dalam negeri yang terlalu besar atau pembentukan koalisi di antara unsur-unsur non-Komunis. Jika Sukarno hidup, ada kemungkinan pengaruh Komunis di Indonesia dalam waktu dua atau tiga tahun masih tetap cukup besar sehingga Indonesia dapat disebut negara Komunis, tetapi Sukarno tetap diakui sebagai pemimpin. Namun, kemungkinan besar tidak akan mungkin dapat diketahui kapan persisnya akan terjadi “pengambil-alihan” oleh Komunis, kecuali jika Sukarno memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan mengenai hal itu. Kami yakin bahwa karena pertimbangan-pertimbangan politik dalam negeri dan keinginannya untuk mewariskan konsep-konsep politiknya pada Indonesia, ia tidak akan mengeluarkan pernyataan seperti itu. Bisa terjadi bahwa pengaruh para pemimpin PKI telah sedemikian besar sehingga mengancam posisi Sukarno, tetapi karena kebijakan-kebijakan Sukarno kemungkinan besar akan tetap berada pada jalur yang pada umumnya menguntungkan mereka, maka PKI kemungkinan besar tidak akan mengambil risiko dan merebut kekuasaan.
3. Dalam hal Sukarno wafat sebelum waktunya atau lumpuh, upaya PKI untuk memperoleh kekuasaan kemungkinan besar akan dikurangi untuk beberapa waktu. Meski akan timbul gejolak politik yang cukup besar dan barangkali penggunaan kekerasan, namun pemerintah yang baru kemungkinan besar pada awalnya akan dipimpin oleh sebuah koalisi yang terdiri dari tokoh-tokoh militer dan sipil non-Komunis yang sudah dikenal. PKI kemungkinan besar tidak akan dapat tidak diikutsertakan

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

dalam pemerintah yang baru ini, tidak saja karena posisinya yang kuat tetapi juga karena pihak militer kemungkinan tidak ingin mengambil risiko timbulnya perang saudara untuk menggulung kaum Komunis. Di pihak lain, PKI kehilangan tempat berlindungnya, Sukarno, dan harus bertumpu sepenuhnya pada kekuatan dan kemampuannya sendiri, yang meski cukup besar namun barangkali tidak akan cukup kuat untuk menghadapi pihak militer. Karena itu, kami percaya bahwa PKI tidak akan mencoba merebut kekuasaan dengan kekerasan dalam bulan-bulan setelah wafatnya Sukarno jika ini terjadi lebih cepat.

4. Jika Sukarno hidup lebih lama, posisi PKI akan lebih baik setelah kematiannya. Jika Sukarno berkuasa dua tiga tahun lagi, ini kemungkinan besar akan melemahkan unsur-unsur anti-Komunis dalam Angkatan Darat dan di tempat-tempat lain, sedemikian rupa, sehingga ketika Sukarno wafat, Komunis sudah memiliki kesempatan yang baik untuk mengambil alih kekuasaan. Namun, kami tidak mengenyampingkan kemungkinan-kemungkinan lain, seperti misalnya, munculnya koalisi anti-Komunis yang kemudian melahirkan jalan buntu yang berlarut-larut atau konflik yang dapat mengakibatkan terpecah belahnya Indonesia.

II. Implikasi

5. Indonesia di bawah Sukarno dari sisi berbagai aspek yang penting sudah berperilaku seperti sebuah negara Komunis, dan menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Amerika Serikat secara lebih terang-terangan dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara Komunis. Kegiatan-kegiatan yang merugikan posisi Barat di Timur Jauh yang dapat dilakukan oleh Indonesia Komunis kelak sekarang sebagian besar sudah dilakukan (misalnya, “konfrontasi” dengan Malaysia dan subversi dan infiltrasi di Filipina), dan baik Sukarno maupun pemerintah yang berikutnya di masa datang kemungkinan besar tidak akan menghentikan kegiatan-kegiatannya memperlemah posisi Barat di wilayah ini.
6. Namun, bergabungnya Indonesia—negara yang luas, berpenduduk besar, kaya sumberdaya, strategis letaknya itu—ke dalam kubu negara-negara komunis akan membawa dampak yang penting bagi negara-negara lain di Asia Selatan dan Asia Timur. Peking terutama akan sangat puas dengan kemenangan yang dicapai oleh salah satu sekutu terdekatnya itu dan kemungkinan, untuk beberapa waktu, akan menawarkan kerjasama yang

lebih erat untuk beroperasi di wilayah Malaysia. Baik Peking maupun Hanoi akan semakin mendapat dorongan semangat dalam perjuangan masing-masing melawan Amerika Serikat di Vietnam, sedangkan rasa percaya diri Laos, Thailand, dan Vietnam Selatan akan goyah. Munculnya sebuah negara Komunis di Samudera India akan membuat India semakin gugup.

7. Karena kemampuan militer Indonesia terbatas dan karena berbagai kelemahannya di bidang-bidang yang strategis, Indonesia Komunis tidak akan merupakan ancaman besar bagi posisi Barat di Asia Tenggara dan bagi jalur pelayaran dan penerbangan dunia. Ancaman dari Indonesia Komunis akan dirasakan langsung oleh Malaysia, Filipina, dan Australia, dan ini akan menyebabkan pemerintah negara-negara ini mendesak Amerika Serikat dan Persemakmuran untuk memberikan bantuan militer yang cukup besar.
8. Pemerintah Malaysia yang konservatif akan banyak menemui kesulitan dalam upayanya untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dalam perselisihannya dengan Jakarta. Selain itu, Malaysia yakin Indonesia akan meningkatkan kegiatan subversinya di semenanjung Malaya, dan meningkatkan kerjasama antara Jakarta-Peking dalam mempersenjatai dan melatih kelompok-kelompok pembangkang di perbatasan Thai-Malaya dan di Borneo Utara. Singapura akan harus berhadapan dengan kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi penduduknya yang keturunan Cina. Kedua pemerintah akan makin banyak dihadapkan pada tekanan-tekanan yang semakin besar dari sayap kiri dan serikat-serikat buruh. Kehadiran Persemakmuran kemungkinan besar akan memungkinkan pemerintah yang moderat di kedua negara itu untuk bertahan selama periode perkiraan ini, tetapi untuk jangka panjang kehadiran Indonesia Komunis akan memperkecil peluang bagi mereka untuk mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing.
9. Pemerintah Filipina, yang sudah dihadapkan pada infiltrasi yang dilakukan Indonesia di pulau-pulau sebelah selatan dan kegiatan-kegiatan gelap di bidang politik yang dilakukan Jakarta di Manila sendiri, akan sangat khawatir. Hal-hal yang mengganggu hubungannya dengan Amerika Serikat selama ini kemungkinan besar akan dikesampingkan untuk sementara untuk menghadapi bahaya bersama. Australia akan khawatir mengenai New Guinea Timur dan jalur komunikasi ke Eropa dan Timur Jauh.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

10. Sebagai sebuah negara Komunis yang penting yang dipimpin oleh sebuah partai yang sangat independen dan percaya pada diri, Indonesia akan menjadi objek persaingan Cina-Sovyet yang makin sengit. Moskow barangkali akan meningkatkan bantuan militer dan ekonominya dengan harapan akan dapat mendorong berkembangnya pusat kekuasaan Komunis Asia kedua untuk menyaingi Peking. Dalam hal ini, PKI kemungkinan akan bersikap lebih ramah kepada Moskow karena mengharapkan bantuan dari situ. Peking jelas akan meningkatkan upayanya untuk mengikat Jakarta lebih erat pada kebijakannya di Timur Jauh. Tetapi ada kemungkinan keputusan PKI di bidang politik luar negeri, seperti keputusan Sukarno, akan menekankan kepentingan nasional Indonesia, di atas kepentingan Peking, Moskow, atau komunisme internasional pada umumnya. Upaya mewujudkan kepentingan nasional ini kemungkinan akan menimbulkan gesekan dengan Komunis Cina dibandingkan dengan Sovyet. Dengan demikian, masuknya Indonesia ke dalam kubu komunis, meski langsung berpengaruh memperkuat pihak Komunis, dalam jangka panjang akan turut mengubah dunia Komunis menjadi sebuah himpunan negara-negara berdaulat yang longgar.
11. Indonesia Komunis kemungkinan tidak akan memiliki kekuatan militer yang berarti bagi Moskow atau Peking selama periode perkiraan ini. Indonesia yang secara terbuka dipimpin oleh PKI mungkin meminta jaminan keamanan dari Moskow dan Peking, dan permintaan itu mungkin, dalam situasi yang ada, sulit ditolak. Kami percaya bahwa PKI cukup berjiwa nasionalis sehingga akan menolak mengizinkan Moskow atau Peking mendirikan pangkalan angkatan udara atau angkatan laut atau landasan peluru kendali di wilayah Indonesia, tetapi ada kemungkinan PKI akan mengizinkan Moskow atau Peking untuk menggunakan pangkalan Indonesia yang ada untuk tujuan logistik, dan dengan demikian memperluas jangkauan kapal selam Moskow atau Peking, misalnya. Dalam perundingan dengan Moskow atau Peking tentang pangkalan atau landasan peluru kendali, Indonesia tidak diragukan lagi jelas akan mendapat kesan yang baik jika ditawarkan senjata nuklir sebagai imbalan. Namun, sangat diragukan bahwa Moskow akan menawarkan senjata nuklir kepada Indonesia, dan, dalam dua atau tiga tahun yang akan datang, Peking kemungkinan besar belum dalam posisi mampu menawarkan senjata nuklir.
12. Dalam jangka pendek, masuknya Indonesia secara resmi ke dalam kubu

Dokumen No. 18

komunis akan membawa dampak yang besar pada politik dunia. Hal itu akan dilihat sebagai perubahan besar dalam perimbangan kekuatan politik internasional dan akan menghidupkan kembali pemikiran bahwa komunisme adalah gelombang masa datang. Namun, meski negara-negara komunis di seluruh dunia akan semakin bersemangat, dan lawan-lawan mereka khawatir, kejadian ini sendiri tidak akan menyebabkan negara-negara lain akan juga menjadi komunis, atau mengubah politik luar negeri mereka.

13. Dampak jangka panjang Indonesia Komunis tergantung terutama pada sampai seberapa jauh PKI berhasil atau tidak berhasil menggerakkan dan mempersatukan bangsa Indonesia. Jika upaya ini berhasil, Indonesia akan menjadi contoh yang kuat bagi dunia sedang berkembang dan karena itu berarti kemenangan buat komunisme dan kekalahan bagi prestise Barat. Ada kemungkinan besar tahun-tahun awal Indonesia Komunis akan digunakan untuk konsolidasi kontrol atas kehidupan politik dan membangun kembali perekonomian Indonesia dan bahwa, selama periode ini, Indonesia kemungkinan besar akan lebih banyak menjadi beban bagi kekuatan-kekuatan Komunis daripada menjadi asetnya.



DOCUMENT No. 19¹

133. Memorandum from the Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (Barber) to the Assistant Secretary of Defense (McNaughton) /1/1-25237/65 Washington, August 11, 1965.

/1/ Source: Washington National Records Center, RG 330, OASD/ISA Files: 70 A 3717, 400.73 Indonesia. Secret. Prepared by Commander Gorman of the Arms and Trade Control Division.

SUBJECT

Indonesian Claims on Nuclear Capability

On 24 July Sukarno stated that Indonesia would build its own atomic bomb in the near future. He added it would not be used for aggressive purposes. Last November General Hartono, Director of the Army Arsenal, said Indonesia planned to explode a bomb in 1969. The same officer declared on 2 February 1965, that 200 scientists were working to produce bomb and promised a “surprise” at the Armed Forces Day celebration in October 1965. A third statement by Hartono made on 27 July stated that there is a good possibility that Indonesia will test an atomic bomb following the Afro-Asian conference in Algiers this coming November.

Indonesia does not have the capability to produce an atomic bomb without outside assistance. Therefore, Sukarno’s behavior may be explained by the following:

1. Just propaganda.
2. Forthcoming test of a Chinese bomb on Indonesian soil with Chinese cooperation.

¹ Edward C. Kee (Editor), *Foreign Relations 1964-1968, Vol. XXVI, Indonesia; Malaysia; Singapore; Philippines*, Washington: The United States Government Printing Office, 2001. Document 133.

Dokumen No. 19

3. Forthcoming test of a Chinese bomb with “Indonesian participation” and attendant publicity.
4. Sukarno may denounce the test ban and withdraw from it.

If (1) above is the case and Sukarno is making a strictly propaganda pitch (our Embassy in Djakarta suspects this), then no comment on the part of the United States is required.

Regarding (2), a test in Indonesia, our Embassy remains doubtful that a detonation will take place. Yet the Embassy allows that if the detonation is to be made almost purely for political purposes and if auxiliary scientific expertise needed to collect technical research data is held to a minimum or dispensed with entirely, it is conceivable that a ChiCom-Indonesian collaboration could successfully meet the deadline. Reporting for the ChiCom side, our Consul General in Hong Kong believes the ChiComs would recoil in horror from conducting a test in Indonesia, mainly on security grounds. AmConGen Hong Kong notes that the ChiCom hypersensitivity on maintaining security with respect to conventional military developments is notorious and without question would be even greater with respect to nuclear weapons. AmConGen Hong Kong doubts that the ChiComs would expect that their role could be kept secret. If it became known this would defeat Sukarno’s presumed purpose, i.e., that it was solely an Indonesian nuclear breakthrough.

We cannot doubt that Sukarno would like to detonate a bomb in Indonesia. He would believe that it would enhance his prestige among the Afro-Asians and it would, quite frankly, shock the British and their Malaysian allies, along with Australia. It would add tremendous drive to Indonesia’s plan to set up the Conference of Newly Emerging Forces (CONEFO) as a rival and eventual successor to the UN. The problem is not whether Indonesia would detonate a bomb if they could but whether the ChiComs will help them. We don’t think they will. Nevertheless we have requested DIA to intensify their efforts in watching for indications of a preparation of an Indonesian testing site and association of Indonesians with the ChiCom test program.

If it is indicated that the ChiComs and Indonesians are preparing for a detonation then we should a) Coordinate early with the British on intelligence. b) Prepare a pre-emptive statement which would take much of the wind out of the Indonesian sails.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

Regarding (3), a test of a ChiCom bomb in China, with “Indonesian participation”,—we give this a better chance of being carried out than we do a detonation in Indonesia but we are doubtful it will be done. Besides the problem of security, there is the question of whether or not Peiping really wants another Asian state to claim the status of being a nuclear power. AmConGen Hong Kong believes that Peiping is trying to reduce Asian, and especially Japanese, criticism of its nuclear program and wonders if ChiCom nationalistic and chauvinistic pride might not cause them to take a dim view of an additional Asian country attempts to climb on the nuclear bandwagon. We don’t think Peiping wants Indonesia alongside—at least for the present. However, we have asked DIA carefully watch for any Indonesian participation in the ChiCom test program.

If there is an indication of this, we should prepare a pre-emptive statement which would denounce the Indo-ChiCom collaborative effort.

The final case is that Sukarno may denounce the test ban treaty and withdraw from it. There is a good chance that this might happen. State believes that recent Indonesian pronouncements regarding atomic bombs point toward the possibility that Sukarno might regard a denunciation of the test ban treaty as valid and dramatic material for use in his 17 August Independence Day speech. State particularly notes Foreign Minister Subandrio’s recent statement to the effect that the only real way of removing the threat of nuclear war is for all nations to have their own stocks of nuclear weapons. We recommend:

- a) Watch Sukarno’s 17 August speech. In addition to possibility of a test ban denunciation, it may indicate more about a future detonation.
- b) Prepare a contingent statement in case Indonesia withdraws from the TBT.

/2/ In an August 19 memorandum to Barber (1-25438), Acting Director of the Far East Division of ISA William C. Hamilton, wrote “there is enough of a possibility that Indonesians may acquire an atomic device and explode it for psychological reasons to warrant an investigation by the intelligence community and to prepare a public position.” Hamilton suggested consulting the Department of State (ibid.). On September 22 Barber wrote Deputy Assistant Secretary of State for International Organization Affairs Joseph J. Sisco a letter stating that “there was a very

Dokumen No. 19

real possibility that an atomic bomb will be set off in Indonesia in October, with Chinese assistance.” Barber hoped that the United Nations could pass a strongly worded resolution condemning any such test (ibid.).

Arthur W. Barber

/3/ Printed from a copy that indicates Barber signed the original.



Terjemahan

DOKUMEN No. 19¹

133. Memorandum dari Deputy Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Keamanan Internasional (Barber) kepada Asisten Menteri Pertahanan (McNaughton) /1/

1-25237/65 Washington, 11 Agustus 1965.

/1/ **Sumber:** Washington National Records Center, RG 330, OASD/ISA Files: 70 A 3717, 400.73 Indonesia. Rahasia. Disiapkan oleh Mayor Gorman, Divisi Pengendalian Persenjataan dan Perdagangan.

PERIHAL

Indonesia Mengaku Memiliki Kemampuan Nuklir

Pada tanggal 24 Juli Sukarno mengatakan bahwa Indonesia akan membuat bom atom miliknya sendiri dalam waktu dekat. Ia menambahkan bahwa bom atom itu tidak akan digunakan untuk tujuan agresi. Pada bulan November yang lalu, Jenderal Hartono, Direktur Persenjataan Angkatan Darat, mengatakan Indonesia merencanakan uji coba sebuah bom pada tahun 1969. Ia juga menyatakan pada tanggal 2 Februari 1965, bahwa 200 ilmuwan sedang giat bekerja membuat bom itu dan menjanjikan sebuah “surprise” pada peringatan Hari Angkatan Perang pada bulan Oktober 1965. Dalam pernyataan yang ketiga pada tanggal 27 Juli Hartono mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Indonesia akan melakukan uji coba bom atom setelah konferensi Asia-Afrika

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

di Aljazair pada bulan November mendatang ini.

Indonesia tidak memiliki kemampuan memproduksi bom atom tanpa bantuan dari luar. Karena itu, perilaku Sukarno dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Propaganda belaka.
2. Uji coba bom Cina yang akan datang di wilayah Indonesia atas kerjasama dengan Cina.
3. Uji coba bom Cina yang akan datang dengan “partisipasi Indonesia” dan dampak publisitas yang dihasilkan
4. Sukarno mungkin mengutuk larangan uji coba dan menarik diri dari larangan uji coba.

Jika (1), Sukarno semata-mata melakukan propaganda (Kedutaan kita di Jakarta memperkirakan inilah sebenarnya yang dilakukan Sukarno), maka tidak perlu langkah apapun dari pihak Amerika Serikat.

Jika (2), uji coba di Indonesia, Kedutaan kita tetap meragukan bahwa akan ada uji coba. Namun Kedutaan memperkirakan bahwa jika uji coba dilakukan hampir sepenuhnya untuk tujuan politik dan jika tenaga ahli tambahan yang dibutuhkan untuk menghimpun data teknis penelitian diupayakan sesedikit mungkin, atau sama sekali tidak digunakan, ada kemungkinan kerjasama Cina Komunis dan Indonesia akan berhasil sesuai batas waktu. Melaporkan dari sisi Cina Komunis, Konsul Jenderal kita di Hong Kong percaya bahwa Cina Komunis tidak akan mau mengadakan uji coba di Indonesia, terutama karena pertimbangan keamanan. Konsul Jenderal Hong Kong juga mengatakan bahwa Cina Komunis sangat merahasiakan perkembangan dalam bidang militer konvensional, dan karena itu tidak diragukan bahwa Cina akan jauh lebih sensitif lagi dalam hal senjata nuklir. Konsul Jenderal Amerika di Hong Kong meragukan bahwa Cina Komunis akan mengharapkan bahwa perannya dapat dirahasiakan. Jika peran itu diketahui masyarakat luas, itu akan menggagalkan maksud yang diperkirakan menjadi tujuan Sukarno, yaitu bahwa uji coba itu adalah terobosan nuklir oleh Indonesia sendiri.

Kita tidak dapat meragukan bahwa Sukarno ingin meledakkan bom di Indonesia. Ia percaya bahwa ledakan itu akan meningkatkan prestisenya di antara negara-negara Asia-Afrika, dan akan merupakan kejutan besar bagi Inggris dan sekutunya Malaysia dan Australia. Ledakan itu akan lebih

mendorong lagi rencana Indonesia untuk mendirikan Conference of Newly Emerging Forces (CONEFO) sebagai tandingan, dan kelak sebagai pengganti, PBB. Persoalannya bukan apakah Indonesia akan meledakkan bom jika dapat, tetapi apakah Cina Komunis akan membantu Indonesia. Menurut pendapat kami, Cina Komunis tidak akan membantu. Namun, kami telah meminta DIA untuk meningkatkan upayanya untuk mengamati kalau-kalau ada tanda-tanda bahwa Indonesia sedang menyiapkan lokasi untuk uji coba bom dan sedang menjalin kerjasama program uji coba dengan Cina.

Jika ada tanda-tanda bahwa Cina Komunis dan Indonesia sedang menyiapkan uji coba bom maka kita harus a) melakukan koordinasi secepatnya dengan dinas rahasia Inggris; b) menyiapkan pernyataan yang mendahului sehingga Indonesia kehilangan nilai kejutan dari uji coba itu.

Jika (3), uji coba bom Cina Komunis di Cina, dengan “partisipasi Indonesia”,—menurut perkiraan kami ini ada kemungkinan besar akan dilakukan dibandingkan dengan uji coba di Indonesia, tetapi kami ragu apakah Cina akan melakukannya. Selain masalah keamanan, ada masalah apakah Peiping benar-benar ingin ada negara Asia lain yang juga dapat mengaku dirinya sebagai kekuatan nuklir, atau tidak. Konsul Jenderal Amerika Hong Kong percaya bahwa Peiping sedang mencoba meredam kritik dari Asia, terutama dari Jepang, atas program nuklirnya, dan bertanya-tanya apakah kebanggaan nasional dan chauvinis Cina Komunis tidak akan menyebabkannya tidak terlalu antusias melihat negara Asia yang lain mencoba untuk juga menjadi kekuatan nuklir. Menurut hemat kami, Peiping menginginkan Indonesia di sampingnya—setidak-tidaknya untuk saat ini. Namun, kami telah meminta DIA untuk mengamati kalau-kalau ada tanda-tanda Indonesia ikutserta dalam program uji coba Cina Komunis.

Jika ada tanda-tanda, kita sebaiknya menyiapkan pernyataan yang mendahului mengutuk kerjasama Indonesia dan Cina Komunis itu.

Terakhir, Sukarno mungkin mengutuk perjanjian larangan uji coba dan mengundurkan diri dari perjanjian itu. Ada kemungkinan besar ini akan terjadi. Departemen Luar Negeri percaya bahwa pernyataan-pernyataan Indonesia baru-baru ini mengenai bom atom menunjukkan kemungkinan bahwa Sukarno menganggap kutukan atas perjanjian uji coba sah dan sebagai bahan yang dramatis untuk digunakan dalam pidatonya dalam perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Departemen Luar Negeri memusatkan perhatian terutama pada pernyataan Menteri Luar Negeri Subandrio baru-baru ini bahwa satu-satunya cara yang realistis untuk menghilangkan ancaman perang nuklir adalah bahwa

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

semua negara di dunia hendaknya memiliki persenjataan nuklir masing-masing. Kami menyarankan:

- a) Simak pidato 17 Agustus Sukarno. Selain itu, kemungkinan akan ada kutukan atas larangan uji coba, pidato itu mungkin berisi petunjuk tentang uji coba bom di masa datang.
- b) Siapkan pernyataan jika Indonesia keluar dari perjanjian larangan uji coba bom.

/2/ Dalam sebuah memorandum tertanggal 19 Agustus kepada Barber (1-25438), Penjabat Direktur Divisi Timur Jauh ISA William C. Hamilton, menulis, “ada cukup kemungkinan bahwa Indonesia mungkin memperoleh senjata atom dan meledakkannya atas dasar pertimbangan psikologis sehingga ada baiknya masyarakat intelijen melakukan penyelidikan dan menyiapkan posisi kebijakan.” Hamilton menyarankan agar berkonsultasi dengan Departemen Luar Negeri (ibid.). Pada tanggal 22 September Barber menulis sepucuk surat kepada Deputy Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Organisasi Internasional Joseph J. Sisco yang berbunyi bahwa “ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa sebuah bom atom akan diledakkan di Indonesia pada bulan Oktober, dengan bantuan Cina.” Barber berharap bahwa PBB dapat mengeluarkan resolusi yang cukup keras mengutuk uji coba semacam itu. (ibid.).

Arthur W Barber

/3/ Dicitak dari sebuah salinan yang menunjukkan Barber menandatangani aslinya.



DOCUMENT No. 20¹

CIA ASSETS IN INDONESIA

136. Editorial Note

On August 23, 1965, James C. Thomson, Jr., Donald Ropa, and Chester L. Cooper of the National Security Council Staff sent the President's Special Assistant for National Security Affairs McGeorge Bundy a memorandum highlighting the principal events and issues for U.S. policy and relations with Asia for the previous week. The report on Indonesia, written in unmistakable Komer style, follows: August 17th has come and gone with relatively little change in Indo/U.S. relations; Sukarno was milder than many had anticipated, although Marshall Green seems a bit shocked by his first full exposure to the Bung's [Sukarno's] Marxian rhetoric. George Ball has stimulated a new State effort at the old question of Whither Indonesia?, and this can be educational for all hands as well as putting the brake on any 7th floor tendency towards impulsive action. Thomson is keeping his nose under this tent (Johnson Library, National Security File, Name File, Cooper Memos). The reference to Ball's re-examination of U.S. policy towards Indonesia is elaborated upon in William Bundy's foreword to Marshall Green, 'Indonesia'—Crisis and Transformation, 1965-1968, pages x-xii. Bundy recalls that Ball convened in late August 1965 "an impromptu meeting of about a half-dozen officials in his office." Ball asked wasn't it true that in terms of size and importance "Indonesia was objectively at least on a par with the whole of Indochina?"

1. Edward C. Kee (Editor), *Foreign Relations 1964-1968, Vol. XXVI, Indonesia; Malaysia; Singapore; Philippines*. Washington: The United States Government Printing Office, 2001. Document No. 136.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

The consensus of the meeting was that it was. Ball then asked was not “a far-left, if not a totally communist, takeover there, on existing trends, only a matter of time, with immense pincer effects on the position of the non-communist countries of Southeast Asia?” Bundy recalls that the consensus held that the scenario described by Ball was inevitable. Then Ball asked was there something that could be done to slow or counter this trend. The consensus was, “there was not a single friendly element or favorable factor that could be effective, even if it were wise to seek to galvanize it.” In discussing Indonesia at an historical conference at Annapolis in 1995, Bundy also recalled that Ball asked the Central Intelligence Agency’s representative if the Agency could use its assets to reverse this trend in Indonesia. Bundy recalled that the representative replied the Agency did not have good assets in Indonesia and was unable to make much of an impact.



Terjemahan

DOKUMEN No. 20¹

SUMBER DAYA CIA DI INDONESIA

136. Catatan Editor

Pada tanggal 23 Agustus 1965, James C. Thomson, Jr., Donald Ropa, dan Chester L. Cooper, dari Staf Dewan Keamanan Nasional (National Security Council) mengirimkan sebuah memorandum kepada Asisten Khusus Presiden untuk Urusan Keamanan Nasional (National Security Affairs) McGeorge Bundy berisi hal-hal penting mengenai berbagai peristiwa dan persoalan bagi kebijakan dan hubungan Amerika Serikat dengan Asia selama periode minggu lalu. Laporan mengenai Indonesia, yang jelas sekali ditulis dengan gaya Komer, seperti berikut

¹ Edward C. Kee (Editor), *Foreign Relations 1964—1968, Vol. XXVI, Indonesia; Malaysia; Singapore; Philippines*. Washington: The United States Government Printing Office, 2001. Document No. 136

ini: 17 Agustus sudah datang silih berganti tanpa ada perubahan yang berarti dalam hubungan Indo/AS; Sukarno lebih lunak daripada yang diperkirakan banyak orang, meski Marshall Green tampaknya agak terkejut ketika pertama kali mendengar pidato-pidato Marxis Bung Karno. George Ball mendorong upaya baru Departemen Luar Negeri untuk menjawab pertanyaan lama “Ke mana Indonesia?”, dan ini dapat menjadi bahan pelajaran bagi semua pihak dan juga akan mengerem kecenderungan Lantai 7 untuk mengambil tindakan impulsif. Thomson tetap bertahan dengan pendapatnya (Johnson Library, National Security File, Name File, Cooper Memos). Rujukan pada upaya meninjau kembali kebijakan AS tentang Indonesia yang dilakukan Ball diuraikan lebih rinci dalam kata pengantar William Bundy bagi buku yang ditulis Marshall Green, ‘Indonesia’- Crisis and Transformation, 1965-1968, halaman x-xii. Bundy menulis bahwa Ball mengadakan pada akhir Agustus 1965 “sebuah pertemuan informal yang dihadiri oleh enam pejabat di kantornya.” Ball menanyakan apakah jika dilihat dari sisi luas wilayah dan perannya, Indonesia secara objektif setara dengan seluruh Indocina? Konsensus rapat adalah Indonesia memang setara dengan seluruh Indocina. Ball kemudian menanyakan, bukankah “pengambil-alihan oleh kelompok ekstrem kiri, jika tidak oleh kelompok komunis sejati di situ, dalam perkembangan situasi seperti sekarang ini, hanya tinggal menunggu waktu saja, yang akan memojokkan negara-negara non-komunis di Asia Tenggara?” Bundy menulis bahwa pertemuan sepakat bahwa skenario yang dikemukakan Ball tidak dapat dihindari. Kemudian Ball mengajukan pertanyaan apakah ada yang dapat dilakukan untuk memperlambat atau menangkis kecenderungan ini. Konsensus yang dicapai adalah, “sama sekali tidak ada unsur bersahabat atau faktor yang menguntungkan yang dapat memberikan hasil yang efektif, andaikan masuk akal untuk mencoba menggunakannya.” Dalam sebuah diskusi mengenai Indonesia dalam sebuah konperensi sejarah di Annapolis pada 1995, Bundy juga menulis bahwa Ball pernah bertanya pada wakil Central Intelligence Agency (CIA) apakah CIA dapat menggunakan sumberdayanya untuk menghentikan dan membalikkan arah perkembangan di Indonesia ini. Bundy menulis bahwa wakil CIA itu menjawab bahwa CIA tidak memiliki sumberdaya yang baik di Indonesia dan tidak akan mampu menghasilkan dampak yang berarti.



DAFTAR PUSTAKA

Prepared by T. A. Legowo

- Aass, Swein. *Det indonesiske kommunist parti (PKI) och jordsporsmalet 1920- 1965*. Norway: Institute for landbruksokonomi, The School of Agriculture, 1976.
- Abiyoso, Anis dan Y. Ahmadun. *Teror Subuh di Kanigoro*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.
- Aidit, D.N. *Aidit Accuses Madiun: D. N. Aidit's Defense Plea at the Trial in the Jakarta State Court on February 24, 1955*. Djakarta: Pembaruan, 1955.
- , *D. N. Aidit: Izbrannye Proizvedeniia. Stat'i i rechi*. Moskva: Izdatelstvo Inostrannoi Literatury, 1962.
- , *Kaum Tani Mengganjang Setan2 Desa*. Djakarta: Pembaruan, 1964.
- , *Kratkaia Istoriia Komunisticheskoi Partii Indonezii*. Moskva: Izdatelstvo Inostrannoi Literatury, 1956.
- , *Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia*. Djakarta?: n.p., 1957.
- , *Peladjaran dari Sejarah PKI*. Djakarta: Pembaruan, 1960.
- , *Pemecahan Masalah Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Indonesia*. Djakarta: Pembaruan, 1964.
- , *Setuju Manipol Harus Setuju Nasakom*. n.p., 1962.
- , *Berani, Berani, Sekali Lagi Berani*. n.p., 1963.
- , *Dekon Dalam Ujian*. n.p., 1963.
- , *Langit takkan runtuh*. Djakarta: Pembaruan, 1963.
- , *PKI dan Angkatan Darat SESKOAD*. Djakarta: Pembaruan, 1963.
- , *PKI dan Polisi*. Djakarta: Pembaruan, 1963.
- , *Problems of the Indonesian Revolution*. Djakarta: Demos,

Daftar Pustaka

- 1963.
- , *Aidit Membela Pancasila*. n.p., 1964.
- , *The Indonesian Revolution and the Immediate Tasks of the Communist Party of Indonesia*. Peking: Foreign Language Press, 1964.
- , *Kibarkan Tinggi Pandji-Pandji Revolusi Indonesia*. n.p., 1964.
- , *Kobarkan Semangat Banteng*. n.p., 1964.
- , *Partai Komunis Indonesia. Untuk Bekerja lebih baik di kalangan kaum tani*. Tjetakan ke 3. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1964.
- , *Perhebat Ofensif Revolusioner Disegala Bidang*. n.p., 1965.
- , & MH. Lukman, dan Njoto. *41 Tahun PKI*. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1961.
- , *The Selected Works of D. N. Aidit*. Washington: U.S. Joint Publications Research Service, 1960-1961.
- Anderson, Benedict R. O'G. and Ruth T. McVey. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1971.
- , "What Happened in Indonesia? Letter to the Editors". *The New York Times Book Review*. June 1, 1978.
- Anderson, David Charles. "The Military Aspects of Madiun Affair". *Indonesia*, 21, 1976.
- Atmowiloto, Arsewendo. *Pengkhianatan G 30 S/PKI*. Novel diangkat dari film dengan judul yang sama skenario Arifin C. Noer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Aveling, Harry. *Gestapu: Indonesian Short Stories on the Abortive Coup*. Honolulu: Southeast Asian Studies Program, University of Hawaii, 1975.
- Bahar, Yusni Y. *Indonesia Membangun*. Jakarta: Ikhwan, 1983.
- Banerjee, Sumanta. *In the Wake of Naxalbari: A History of the Naxalbari Movement in India*. Calcutta: Subarnarekha, 1980.
- Bass, Jerome R. "The PKI and the Attempted Coup". *Journal of Southeast Asian Studies*. Singapore: University of Singapore, Vol. 1, No. 1, March 1970.

Daftar Pustaka

- Benda, Harry J. and Ruth T. McVey. *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1969.
- Berkas Perkara terdakwa Njono bin Sastroredjo alias Tugimin alias Rukmo dalam Peristiwa Gerakan 30 September tanggal 1-10-1965* di Djakarta (1968).
- Berkas Perkara terdakwa Wirjomartono alias Sujono alias Sumarsono dalam Peristiwa Gerakan 30 September, 1-10-1965* di Jogjakarta (1968).
- Berkas Perkara Utomo Ramelan*. Jilid 1 (1968).
- Bittman, Ladislav. *Archiv Mezinarodni dezinformace: cerna propaganda, aktivni opatreni a tajne akce* (Tr. Archive: International Disinformation: Black Propaganda, Active Measures and Secret Operations), Praha: Mlada Fronta, 2000.
- , *The Deception Game. Czechoslovak Intelligence in Soviet Political Warfare*. Syracuse, N.Y.: Syracuse Research Corporation, 1972.
- Blumberger, J. Th. Petrus. *De communistische beweging in Nederlandsch-Indie*. Haarlem, Netherlands: HD. Tjeenk Willink & Son, 1928.
- Boerhan dan Soebekti. *Fakta dan Latarbelakang GERAKAN 30 SEPTEMBER*. Djakarta: Lembaga Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, 1966.
- Bourchier, David. *Dynamics of Dissent in Indonesia: Sawito and the Phantom Coup*. Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1984.
- Brackman, Arnold C. *The Communist Collapse in Indonesia*. New York: W.W. Norton and Co. Inc., 1969.
- , *Indonesian Communism: A History*. New York: Praeger, 1963.
- , *Indonesia: The Gestapu Affair*. New York: American-Asian Educational Exchange, 1969.
- Brands, H.W. "The Limits of Manipulation: How the United States Didn't Topple Sukarno", *Journal of American History*. 76, 3, December, 1989.
- Brooks, Karen. "The Rustle of Ghosts: Bung Karno in the New Order". *Indonesia*. 60, October 1995.
- Bruyn, W.K.H. *Feuilletau de Naar de Sovjet Republiek Indonesia*. Den Haag:

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Nationaal Comite Handhaving Rijksreëheid, 1947.
- Budiardjo, Carmel. "Did Sukarno Master-Mind the 1965 *Coup* attempt?" *Tapol*, No. 50, 1982.
- , *Surviving Indonesia's Gulag: A Western Woman Tells Her Story*. London: Cassell, 1996.
- Bunnell, Frederick P. "The CIA-Deputy Directorate for Plans: 1961 Secret Memorandum on Indonesia: A Study in the Politics of Policy Formation in the Kennedy Administration". *Indonesia*. 22, 1976.
- , "American "Low Posture" Policy toward Indonesia in the Months Leading up to the 1965 *Coup*". *Indonesia*. 50, October 1990.
- , "Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965. President Sukarno Moves from Non-Alignment to Confrontation", *Indonesia* 2, October 1966.
- Burhan. *Gerakan 30 September: Fakta dan Latar belakang*. Djakarta: Lembaga Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Kosgoro, 1966.
- Caldwell, Malcolm. *Ten Years of Military Terror in Indonesia*. Nottingham: Spokesman, 1975.
- Castles, Lance. "The Fate of Private Entrepreneur." In Tan Tjin-Kie (Ed.), *Sukarno's Guided Indonesia*. Brisbane: 1967.
- Cayrac-Blanchard, F. Le *Parti Communiste Indonesien*. Paris: Armand Colin, 1973.
- CC PKI. *Konstitusi Partai Komunis Indonesia*. Djakarta: PKI, 1961.
- Central Intelligence Agency. *Indonesia 1965: The Coup that Backfired*. Washington: Central Intelligence Agency, 1968.
- , Office of Current Intelligence, "Intelligence Memorandum: The Succession Problem in Indonesia", December 30, 1964, NSF, *Indonesia*, Vol. 3, No. 148, LBJ Library.
- , Office of National Estimates, "Special Memorandum No. 4-65: Principal Problems and Prospects in Indonesia", January 26, 1965, NSF, *Indonesia*, Vol. 3, No. 152, LBJ Library.
- Chaloemtiarana, Thak. *Gestapu: Catalyst for Revolution: An Analytical Study of the Fall of Sukarno*. n.p., 1968.
- Cheah, Boon Khen. *From PKI to the Commintern 1924-1941: The Apprenticeship of the Malayan Communist Party: Selected*

Daftar Pustaka

- Documents and Discussion*. Southeast Asia Program Series, No. 8. Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 1992.
- Cheng, Hsueh-chia. *Whither Indonesia: PKI and CCP*. Taipei: Asian Peoples' Anti-Communist League, 1960.
- Cominos, Antony. *Dwipa Nusantara Aidit: An Annotated Bibliography*. Townsville, Australia: James Cook University of North Queensland, 1987.
- Comite Central PKI. *Kehidupan Partai*. Zug, Switzerland: Inter Documentation Co., 1972?.
- Communist Party of Indonesia Documents on Microfiche*. Zug: Inter Documentation Company, 1969.
- Corsino, MacArthur F. *A Conceptual Framework for Studying the International Relations of A Communist Revolutionary Movement: The Partai Komunis Indonesia*. n.p., 1977.
- , *A Communist Revolutionary Movement as an International Stateactor: The Case of the PKI-Aidit*. Singapore: Maruzen Asia, 1982.
- Courtois, Stephane (Ed.), *The Black Book of Communism: Crime, Terror, Repression*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Cribb, Robert. *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Clayton, Vic., Australia: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.
- Crouch, Harold. "Another Look at the Indonesian 'Coup'." *Indonesia*, 5, 73.
- Dahm, Bernhard. *History of Indonesia in the Twentieth Century*. n.p., 1971.
- Dake, Antonie C. A. *In the Spirit of the Red Banteng: Indonesian Communists between Moscow and Peking 1959-1965*. The Hague: Mouton, 1973.
- Dalim, Sudisman. "Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS), Suatu Perjuangan Dalam Bidang Pers untuk Menghadapi PKI". *Persepsi*, Vol. 1, No. 3, 1979.
- Datrank. Wartawan Pancasilais kontra PKI Manuskrip. n.p., n.d.
- Departemen Penerangan. *Djangan Sekali-sekali Meninggalkan Sejarah* (Never Leave History). Djakarta: Departemen Penerangan, 1966.
- , *Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-*

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- ketentuan Tentang Larangan Terhadap Kegiatan Sisa-sisa G 30 S/ PKI*. Jakarta: Departemen Penerangan, 1988.
- , *Pidato Laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengembangan Ketetapan-Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/ 1966 di hadapan Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 Maret 1967*. Djakarta: Departemen Penerangan, 1967.
- , *PWI Benar-benar Menjadi Alat Revolusi*. Djakarta: Departemen Penerangan, 1965.
- Departemen Agitrop Partai Komunis Indonesia. *Serba-Serbi Dokumen Partai 1961*. Djakarta: Depagitprop CC PKI, 1962.
- Dewan Redaksi API. *Harian "API" Mengganyang Nekolim-PKI-Gestapu*. Djakarta: Merdeka Press, 1965.
- Dewan Redaksi Merdeka. *Masalah Pembubaran PKI*. Djakarta: Merdeka Press, 1966.
- Dharsono, HR. *Tidak Sedjengkal Tanahpun Kita relakan untuk dipakai arena pertentangan agama*. Bandung: Balebandung, 1968.
- Dijk, C. van. *The Indonesian Communist Party (PKI) and Its Relations With the Soviet Union and the People's Republic of China*. The Hague: International Documentation and Information Centre (INTERDOC), Van Stolkweg, 1972.
- Dinas Sejarah TNI AD. *Pemberontakan G 30 S/PKI dan Penumpasannya*. Djakarta: Dinas Sejarah TNI AD, 1982.
- Dingley, S. "The Peasants' Movement in Indonesia." In Dombal and Macheriakov (Eds.), *Farmers' and Peasants' International Library of Revolutionary Farmers and Peasants Movements*. Berlin: RL Praeger, 1972.
- Dinuth, Alex (Ed.), *Salinan Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G 30 S/PKI*. Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional, 1993.
- Dinuth, Alex. *Sekitar Padnas, Bahaya Latent & Tapol G 30 S/PKI*. Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional, 1993.
- Djanwar. *Mengungkap Pengkhianatan/Pemberontakan G 30 S/PKI Dalam Rangka Mengamankan Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Yrama1, 1986.
- Djojoprajitno, Sudyono. *PKI Sibar contra Tan Malaka: Pemberontakan 1926 & Kambing Hitam Tan Malaka*. Djakarta: Jajasan Massa, 1962.
- "Documents. The Latief Case: Suharto's Involvement Revealed." *Journal*

Daftar Pustaka

- of *Contemporary Asia*. Vol. 9, No. 2, 1979.
- Dokumen-dokumen Kongres Nasional ke VII Partai Komunis Indonesia*. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1960.
- Dydo, Todurian. *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI*. Jakarta: Golden Dragon Press, 1989.
- Edman, Peter. *Communism a la Aidit: The Indonesian Communist Party. Townsville, Qld., Australia: James Cook University of North Queensland*, 1987.
- . *Communism a la Aidit: The Indonesian Communist Party under D. N. Aidit, 1950-1965*. Monograph Series/Centre for Southeast Asian Studies, 0158-6041; No. 23. Townsville, Qld., Australia: James Cook University of North Queensland, 1987.
- Ehermann, M. M. *The Indonesian Military in the Politics of Guided Democracy: 1957-65. Unpublished M.A. Thesis*, Ithaca: Cornell University, 1967.
- Feith, Herbert. "Dynamics of Guided Democracy." In Ruth T. McVey (Ed.), *Indonesia*, New Haven: Yale University Press, 1967.
- . "President Soekarno, The Army and The Communists: The Triangle Changes Shape". *Asian Survey*. Vol. IV, No. 8, August 1964.
- Fessen, Helmut. *Probleme der Klassenstruktur und des Klassenkampfes auf dem Indonesischen Dorf 1945 bis 1960*. Berlin: Humboldt University, 1966.
- Fic, Victor M. *Peaceful Transformation to Communism in India: Strategy of the Communist Party*. Bombay: Nachiketa Publications, 1969.
- . *Kerala: Yenan of India*. Bombay: Nachiketa Publications, 1970.
- . *From Majapahit and Sukuh to Megawati Sukarnoputri: Continuity and Change in Pluralism of Religion, Culture and Politics of Indonesia, From the XV to the XXI Century*. New Delhi: Abhinav Publications, 2003.
- . *The Tantra: The Origin, Theories and Arts of the Hindu and Buddhist Tantra. Their Diffusion from India to Nepal, Tibet, Mongolia, China, Japan and Indonesia*. New Delhi: Abhinav Publications, 2003.
- Finch, Susan and Daniel S. Lev. *Republic of Indonesia Cabinets 1945-*

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

1965. Ithaca and London: Cornell University Press, 1970.
- Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1966.
- Gestapu: Indonesian Short Stories on the Abortive Coup of 30th September 1965*. Honolulu: Southeast Asian Studies Program, University of Hawaii, 1975.
- Ghazali, Zulfikar. "Pola Kepemimpinan PKI 1945-1966". *Persepsi*. Vol. 1, No. 3, 1979.
- Gonggong, Anhar. "Ancaman Bahaya Laten Komunis Terhadap Kehidupan Pancasila dan Pembangunan Nasional". *Persepsi*. Vol. 8, No. 1, 1986.
- Gordon, Alec. "Some Problems of Analyzing Class Relations in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia*. Vol. 8, No. 2, 1978.
- Green, Marshall. *Dari Sukarno ke Suharto: G 30 S-PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.
- , *Indonesia: Crisis and Transformation, 1965-1968*. Washington: Compass Press, 1990.
- Griffith, William E. *Sino-Soviet Relations, 1964-1965*. London: Information Bulletin, Congress for Cultural Freedom, 1966.
- Gunawan, Basuki. *Kudeta-Staatsgreep in Djakarta: de Achtergronden van de 30 September beweging in Indonesia*. Meppel: J. A. Boom en Zoon, 1968.
- Hardjanto, Eddy. "Kemelut Ekonomi serta Agitasi PKI pada masa Orde Lama." *Persepsi*. Vol. 9, No. 3, 1987.
- Hausewedell, Peter Christian. "Sukarno: Radical or Conservative? Indonesian Politics 1964-1965". *Indonesia*. 15, April 1973.
- Hering, B. B. *The PKI-Baroe*. Occasional Paper/Centre for Southeast Asian Studies, No. 20, Townsville, Qld., Australia: Southeast Asian Studies Committee, James Cook University of North Queensland, 1985.
- Hering, B. B. *The PKI's Aborted Revolt*. Occasional Paper/Centre for Southeast Asian Studies, No. 17. Townsville, Queensland: Centre for Southeast Asian Studies, James Cook University of North Queensland, 1986.
- Hindley, Donald, "Alirans and the Fall of the Old Order". *Indonesia*. 9, April 1970.
- , *Communist Party Strategy in Indonesia 1948-1959*. n.p.,

Daftar Pustaka

- 1959?.
- . "The PKI and the Peasants." *Problems of Communism*. Vol. 11, No. 6, 1962.
- . "President Sukarno and the Communists: The Politics of Domestication." *American Political Science Review*, Vol. 61, No. 4, 1962.
- . *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. Berkeley, California: University of California Press, 1964.
- . "Indonesian Politics 1965-67: the September 30 Movement and the fall of Sukarno." *World Affairs*. No. 24, August, 1968.
- Holtzappel, Coen. "The 30th September Movement: A Political Movement of the Armed Forces or an Intelligence Operation?" *Journal of Contemporary Asia*. Vol. 9, No. 2, 1979.
- Huehne, Eva. *Marxism and Religion: The Ideological Polemic—A Study of the Limitations of Orthodox Marxism with Reference of Relations between PKI and the Islamic Groups in Indonesia 1955-1965*. n.p., 1987.
- Hughes, John. *The End of Sukarno: A Coup That Failed: A Purge That Ran Wild*. Sydney: Angus & Robertson, 1968.
- Indonesian Organization for Afro-Asian People's Solidarity (IOAAPS). *Suara Rakyat Indonesia*. Peking: IOAAPS, n.d.
- Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati. *Laporan Penelitian Reaksi Masyarakat Beragama Terhadap Ex Tahanan G 30 S/PKI*. New Delhi, India: Library of Congress Office, 1979.
- Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah. *Reaksi Masyarakat Beragama Terhadap Ex-Tahanan G 30 S/PKI*. New Delhi, India: Library of Congress Office, 1979.
- Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Tim. *Bayang-Bayang PKI*. Jakarta: ISAI, 1995.
- Jajasan Lembaga Penyelidikan Islam. *Setahun Lobang Buaja*. Djakarta: Jajasan Lembaga Penyelidikan Islam, 1966.
- Jawaid, Soheil. *The Naxalite Movement in India: Origin and Failure of the Maoist Revolutionary Strategy in West Bengal, 1967-1971*. New Delhi: Associated Publishing House, 1979.
- Katoppoa Aristides (Ed.), & Purnama Kusumaningrat, JMV. Soeparno, Moh.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Cholil. *Menyingkap Kabut Halim 1965*. Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Kee, Edward C. (Editor). *Foreign Relations 1964-1968*, Vol. XXVI, Indonesia; Malaysia; Singapore; Philippines. Washington: The United States Government Printing Office, 2001.
- Koch, C. J. *The Year of Living Dangerously*. Melbourne: Nelson Publisher, 1986.
- Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI)*. New Delhi, India: Library of Congress Office, 1979.
- , *Tata cara Pemberian "Surat Keterangan Tidak Terlibat G 30 S/PKI"*. New Delhi, India: Library of Congress Office, 1978.
- Kopkamtib. *Kontra Revolusi Gestapu PKI*. Djakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1966.
- , *Naskah tentang PKI*. Djakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Krisnadi, I. G. *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979* (Tr. Buru Island's Political Detainees 1969-1979). Jakarta: LP3S, 2001.
- Kroef, Justus Maria van der. *Communist Theory and Practice in Indonesia*. Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, University of Pennsylvania, 1961.
- , *The Communist Party of Indonesia: Its History, Program and Tactics*. Vancouver: Publication Centre, University of British Columbia, 1965.
- , "Indonesian Communism under Aidit." *Problems of Communism*. Vol. 7, No. 6, 1958.
- , "Communist Policy and Tactics in Indonesia." *Australian Journal of Politics and History*. November 1959.
- , "Agrarian Reform and the Indonesian Communist Party." *Far Eastern Survey*, No. 29, 1960.
- , "Dilemmas of Indonesian Communism." *Pacific Affairs*. Vol. 35, No. 2, 1962.
- , "Lenin, Mao and Aidit." *The China Quarterly*. Vol. 17, No. 2, 1962.
- , "Peasant and Land Reform in Indonesian Communism." *Journal of Southeast Asian History*. Vol. 4, No. 1, 1963.
- , "'Gestapu' in Indonesia." *Orbis*. Vol. 10, No. 2, 1966.

Daftar Pustaka

- Kusumasumantri, Iwa. *Pokok-Pokok Ilmu Politik dan Ringkasan Pemberontakan PKI*.
- Labrousse, Piere. "The Second Life of Bung Karno: Analysing the Myth (1978-1981)". *Indonesia*. 57, April 1994.
- Langenberg, Michael van. "Dr. Subandrio—An Assessment". *The Australian Quarterly*. December 1966.
- Latief, Abdul. *Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G 30 S*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000.
- Leclerc, J. *La pensee des cummunistes Indonesiens: l'indonesienstion marxisme-leninisme a' travers les textes d'Aidit (1962-65). Essei d'approche et d'interpretation*. Paris: Unpublished Doctoral Thesis, 1969.
- Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa. *LPKB Ganjang Gestapu*. Djakarta: Kompartimen Perhubungan Dengan Rakjat, 1965.
- Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). *Ringkasan Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia: 1926-1948-1965*. Jakarta: LSIK, 1988.
- Lev, Daniel S. "Indonesia 1965: The Year of Coup." *Asian Survey*. February 1966.
- Lewis (Ed.). *Peasant Rebellion and Communist Revolution in Asia*. Stanford: Stanford University Press, 1974.
- Lie, Oei Hong. *The Sukarno Controversies of 1980/81*. The University of Hull, Centre for Southeast Asian Studies, Occasional Paper No. 4, 1982.
- Madju Terus. *Dokumen-dokumen Kongres Nasional Ke VII (Luarbiasa) Partai Komunis Indonesia*. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1963.
- Mahajani, Usha. "Indonesia's New Order and the Diplomacy of Aid". *Australian Outlook*. August 1967.
- Maksum, Agus Sunyoto, and A. Zainuddin. *Lubang-Lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun*. Jakarta: Grafiti Press, 1990.
- Malaka, Tan. *From Jail to Jail*. Translated, edited and introduced by Helen Jarvis. Athens: Ohio University, Center for International Studies, 1991.
- . *Menuju Republik Indonesia*. Jakarta & Leiden: Jajasan Massa & Koninklijk, 1962.
- Manus, MPB & Nana Nurliana. "Doktrin Dua Kubu pada masa Orde Lama

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang.” *Persepsi*. Vol. 3, No. 1, 1979.
- , & Nana Nurliana, Jenny Malik, dan Tri Wahyuning. “Penyusupan PKI ke dalam tubuh GERWANI/Gerakan Wanita Indonesia.” *Persepsi*. Vol. 8, No. 1, 1986.
- Marsudi, Jamal. *Menjungkap Tabir Fakta-fakta Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun*. Djakarta: Merdeka Press, 1965.
- Masykuri. *Piere Tendean*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983.
- May, Brian. *The Indonesian Tragedy*. Singapore: Graham Bash, 1978.
- McGlyn, John H. *Reflections on Rebellion: Stories from the Indonesian Upheavals of 1948 and 1965*. Athens, Ohio: Ohio University, Center for International Studies, 1983.
- McVey, Ruth T. *The Development of the Indonesian Communist Party and Its Relations with the Soviet Union and the Chinese People’s Republic*. Cambridge, Mass.: Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology, 1954.
- , “Indonesian Communism and the Transition to Guided Democracy.” In D. Barnett (Ed.), *Communist Strategies in Asia*. London: 1963.
- , “The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army”. *Indonesia*. 11, April 1971.
- , *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1965.
- , *The Strategic Triangle: Indonesia*. London: n.p., 1965.
- , “Indonesian Communism and China.” In Tang Tsou (Ed.), *China in Crisis*, Vol. 2. Chicago: 1969.
- , *The Soviet View of the Indonesian Revolution*. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project, New York, 1969.
- , “The Social Role of Indonesian Communism.” *Berichten uit het Verre Osten Centre d’Etude du Sud-Est Asiatique et de l’Extreme Orient*. Vol. 3, No. 35, 1970.
- , “The Enchantment of the Revolution: History and Action in an Indonesian Communist Text.” In Reid and Marr (Eds.), *Perception of the Past in Southeast Asia*. Singapore: Heinemann

Daftar Pustaka

- Educational Book [Asia], 1979.
- . "Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution". *Indonesia*. 50, October 1990.
- . "The Wayang Controversy in Indonesian Communism", in Mark Hobart and Robert Taylor (Eds.). *Context, Meaning, and Power in Southeast Asia*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1986.
- Moeljanto, DS and Taufiq Ismail. *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif LEKRA PKI dkk*. Bandung: Mizan, 1995.
- Morrien, Joop. "Aroen": *Jan Stam, rebel in Indonesie en Nederland*. Amsterdam: Pegasus, 1984.
- Mortimer, Rex. "Class, Social Cleavage and Indonesian Communism." *Indonesia*. 8, 1969.
- . "The Downfall of Indonesian Communism." *In Socialist Register*. London: 1969.
- . *The Indonesian Communist Party and Land Reform, 1959-1965*. Clayton, Vic., Australia: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1972.
- . *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics 1959- 1965*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1974.
- . "Traditional Models and Communist Movement: Change and Protest in Indonesia." In John Lewis (Ed.), *Peasant Rebellion and Communist Revolution in Asia*. Stanford: Stanford University Press, 1974.
- . *The Ideology of Communist Party of Indonesia under Guided Democracy 1959-1965*. Microform. Clayton, Vic., Australia: Monash University, 1970.
- Mozingo, David Paul. *Sino-Indonesian Relations: An Overview 1955-1965*. Santa Monica: Rand Corporation, 1965.
- . *Chinese Policy Towards Indonesia 1949-1967*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1976.
- Mrazek, Rudolf. *The United States and the Indonesian Military 1945-1965. A Study of an Intervention*. Vol. I & Vol. II. Prague: The Czechoslovak Academy of Sciences, The Oriental Institute, 1978.
- Mudjiono. *Ceramah Bahaya Laten PKI Bahan Bacaan*. New Delhi, India: Library of Congress Office, 1982.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Nadesan, Alexander. *The Role of the Partai Nasional Indonesia (PNI) during the October Coup of 1965 and the General Elections of 1971*. n.p., 1975.
- Narto, Sumi. Sawito, *Ratu Adil, Guruji (Penguasa Jagad Raya), Tertuduh*. Semarang: Aneka, 1978.
- Nasution, A. H. *Statement of General A. H. Nasution*. September 7, 1966. ----- . *Keterangan-Keterangan Bekas Menko/Hankam berhubungan dengan Pel-Nawaksara*. Jakarta: 1967.
- . *Dari Kup 1 Oktober ke Sidang Istimewa MPRS 1967*. n.p., n.d.
- Netherlands 1927: Communism in Netherlands East Indies*. London: Public Record Office, 1927.
- Notosusanto, Nugroho. *The Coup Attempt of the "September 30 Movement" in Indonesia*. Djakarta: Pembimbing Masa, 1968.
- . "Bahan Ceramah tentang Latar Belakang Politik G 30 S/PKI." In *Kursus Kewaspadaan Nasional Lemhanas in Jakarta*. Jakarta: Lemhanas, 1981.
- . *Kesaktian Pancasila di Bumi Pertiwi*. Jakarta: Penerbit Almanak, 1984.
- . *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- . *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa, 1989.
- . dan Marwati Djuned Pusponegoro. *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid V. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1975.
- . dan Marwati Djuned Pusponegoro. *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid VI. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1975.
- . dan Ismail Saleh. *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1968.
- Notosutarjo, A. Hadji. *Peristiwa Madiun, Tragedi Nasional*. Djakarta: Endang Pemuda, Api Islam, 1966.
- Nyoto. *BPS Aksi Reaksi*. Djakarta: PT Rakjat, 1965.
- Oei Tjoe Tat. *Memoar Oei Tjoe Tat. Pembantu President Sukarno*. Jakarta: Hasta Mitra, 1995.
- Oejeng Soewargana. *Kegagalan Coup G-30*. Bandung (Mimeographed), 1969.

Daftar Pustaka

- Paget, Roger K. "The Military in Indonesian Politics: The Burden of Power." *Pacific Affairs*. Vol. 40, No. 3/4, 1967/68.
- Palmier, Leslie. *Communists in Indonesia*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1973.
- Panitia Hari Peringatan Kesaktian Pancasila. *Monumen Pancasila Sakti*. Jakarta: Panitia Hari Peringatan Kesaktian Pancasila, 1985.
- Pantjawarsa Hari Peringatan Kesaktian Pantjasila. Djakarta: Panitia Pusat Peringatan Hari-Hari Bersedjarah, 1970.
- Partai Komunis Indonesia. "*Aidit, D. N. Set Afire the Banteng Spirit! Ever Forward, No Retreat.*" Political Report to the Second Plenum of the Seventh Central Committee of the Communist Party of Indonesia. Enlarged with Members of the Central Auditing Commission and the Central Control Commission. Djakarta, 23-26 December, 1963. Peking & Zug: Foreign Language Press & Inter Documentation Co., 1964.
- , "*Build the PKI Along the Marxist-Leninist Line to Lead the People's Democratic Revolution in Indonesia.*" Five important documents of the political bureau of the CC PKI. Published by the Delegation of the CC PKI. Peking: Foreign Language Press, 1971.
- , *PKI Buletin Partai Komunis Indonesia*. Zug: Inter Documentation Co., 1973.
- , *ABC Politik*. Tjetakan ketiga. Djakarta: Depagitprop CC PKI, 1962.
- , *Eighth Plenum of the Central Committee of the Communist Party of Indonesia. Political Reports and Resolutions*. Djakarta, Aug. 6-7, 1959. Supplement to 'Review of Indonesia', No. 9, Sept. to Oct. 1959. Zug: Inter Documentation Co., 1959.
- , *Ever Forward to Storm Imperialism and Feudalism*. Documentation of the Second Plenum of the Central Committee of the Communist Party of Indonesia, Djakarta, end December, 1960. Jakarta & Zug: Jajasan Pembaruan & Inter Documentation Co., 1961.
- , *PKI Bulletin Partai Komunis Indonesia*. Ithaca: Photo Service Cornell University, 1978.
- , *Programme of the Communist Party of Indonesia*. Zug: Inter Documentation Co., 1954.
- , *Publications of Communist Party of Indonesia*. 156

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

microfilms. Zug, Switzerland: Inter Documentation Company AG, 1967?.

-----, *Strengthen the National Unity and Community Unity*. Documents of the Third Plenum of the Central Committee of the Communist Party of Indonesia, Djakarta, end December, 1961. Jakarta & Zug: Jajasan Pembaruan & Inter Documentation Co., 1962.

Pauker, Guy J. "The Soviet Challenge in Indonesia." *Foreign Affairs*. July, 1962.

-----, *The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia*. Mem. RM 5753. Santa Monica: Rand Corp., 1969.

Perkara Dr. H. Subandrio dalam Peristiwa Gerakan 30 September. n.p., 1968.

Perkara MS. Supardjo dalam Peristiwa Gerakan 30 September. n.p., 1968.

Perkara Omar Dhani dalam Peristiwa Gerakan 30 September. n.p., 1968.

Perkara Sudisman dalam Peristiwa Gerakan 30 September. n.p., 1968.

Perkara Utomo Ramelan dalam Peristiwa Gerakan 30 September. n.p., 1968.

Phalgunadi, I Gusti Putu. *The Pararaton: A Study of Southeast Asian Chronicle*. New Delhi: Sundeep Prakashan, 1996.

Pidato dan Pernyataan Resmi di sekitar Peristiwa "Gerakan 30 September". n.p., 1965.

Pinardi. *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*. "Sebuah case-study tentang proloog-peristiwa-epiloog dan beberapa analisa tentang sebab dan akibat pemberontakan P.K.I. Muso yang dilakukan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah pada bulan September 1948." Djakarta: Inkopak-Hazera, 1966.

Pluvier, Jan M. *Confrontations: A Study in Indonesian Politics*. London: Oxford University Press, 1965.

Ponniah, Caesarlin Nesamalar. *Konfrontasi: Perceptions of the Partai Komunis Indonesia 1963-1965*. n.p., 1986.

Prah, K. K. *The Social Background of Coups d'etat (Brazil, Indonesia and Ghana)*. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1973.

Proses Pengadilan Mahmilub otak penggerakan pelaksana Peristiwa Gerakan 30 September/PKI, Kamaruzaman alias Sjam. n.p., 1968.

Puar, Yusuf A. *Supersemar*. Jakarta: Pustaka Antara, 1976.

Pusat Pendidikan Kehakiman AD. *Gerakan 30 September di hadapan*

Daftar Pustaka

- Mahmilub (Perkara Untung)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966.
- . *Gerakan 30 September di hadapan Mahmilub (Perkara Njono)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966.
- . *Gerakan 30 September di hadapan Mahmilub (Perkara Subandrio)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966.
- . *Fakta-fakta Persoalan Sekitar "Gerakan 30 September"*. Djakarta: Pusat Penerangan Angkatan Darat, 1965.
- Pusat Penerangan Angkatan Darat. *Fakta-fakta Persoalan Sekitar 'Gerakan 30 September'*. Djakarta: Pusat Penerangan Angkatan Darat, 1965.
- Ra'anan, Uri. "The Coup that Failed: A Background Analysis." *Problems of Communism*, Vol. 15, No. 2, 1966.
- Reid, Anthony. "Marxist Attitudes to Social Revolution 1946-48." *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, Vol. 8, No. 1, 1974.
- Rey, Lucien. "Dossier of the Indonesian Drama". *New Left Review*, New Delhi, 1966.
- Rochijat, Pipit. "Am I PKI or Non-PKI?", *Indonesia* 40, October 1980.
- Roeder, O. G. *The Smiling General: President Suharto of Indonesia*. Djakarta: Gunung Agung, 1966.
- Rosamona. *Matinya Aidit, Marsekal Lubang-Buaja*. Djakarta: Inkopak-Hazera, 1967.
- Sahab, AH. *Pemberontakan G 30 S/PKI*. Jakarta: Islamic Research Institute, 1982.
- Said, Tribuana dan DS Moeljanto. *Perlawanan Pers Indonesia (BPS) terhadap gerakan PKI*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983.
- Saran, Vimla. *Sino-Soviet Schism: A Bibliography, 1956-1964*. *The Jawaharlal Nehru University*, London: Asia Publishing House, 1971.
- Schrieke, Bertram Johannes Otto. *Het Communisme ter Sumatra's Westkust*. Weltevreden: Landsdrukkerij, 1928.
- Scott, Peter Dale. "The United States and the Overthrow of Sukarno". *Pacific Affairs*, Vancouver: University of British Columbia, Vol. 58, No. 2, Summer 1985.
- Sekretariat Negara. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1994.
- Seksi Penerangan. *Tjatatatan Kronologis di sekitar Peristiwa G-30-S/PKI*.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Djakarta: Komando Operasi Tertinggi, 1965.
- , *Hakekat Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966, Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966*. Djakarta: Komando Ganjang Malaysia, 1966.
- Sen, Asit. *An Approach to Naxalbari*. Calcutta: Institute of Scientific Thoughts, 1980.
- Sen, Samar, Debabrata Panda and Ashish Lahiri (Eds.), *Naxalbari and After: A Frontier Anthology*. Vols. I & II, Calcutta: Kathashilpa, 1978.
- Sendam VIII/Brawidjaja. *Operasi Trisula Kodam VIII/Brawidjaja*. Surabaya: Jajasan Tjandrawilwal-tikta, 1969.
- Simon, Sheldon W. *The Broken Triangle, Peking, Djakarta and the PKI*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1969.
- Siswojo, P. Bambang. *Menelusuri Peran Bung Karno dalam G 30 S/PKI*. Solo: Mayasari, 1989.
- , *Bung Karno Dalang G 30 S/PKI?* Solo: Mayasari, 1988.
- Soe Hok Gie. *Di bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang*. Jakarta: Frants Fanon Foundation, 1990.
- , *Simpang Kiri Dari Sebuah Jalan* (Pemberontakan PKI di Madiun September 1948). *History Department Thesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1969.
- Slametmuljana. *The Story of Majapahit*. Singapore: The Singapore University Press, 1967.
- Soedjono. *Monumen Pancasila Sakti*. Jakarta: PT Rosda Jayaputra, 1983.
- Soekarno. *Nationalism, Islam and Marxism*. Translated by Karel H. Warouw and Peter D. Weldon, with an Introduction by Ruth T. McVey, Second Printing. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1970.
- Soekito, Wiratmo. "Pengaruh Marxisme sebagai Ideologi Terhadap Gagasan-gagasan Soekarno." *Persepsi*, Vol. 1, No. 3, 1979.
- Soerjono (Pseudonym). "On Musso's Return." *Indonesia* 29, 1980.
- Soerojo, Soegiarso. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*. Djakarta: Soegiarso Soerojo, 1988.
- Surodjo Benedicta & JMV Soeparno. *Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku:Pledoi Omar Dhani*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001.
- Soetanto, Soetopo. "G 30 S 1965, Simpang Kiri Sebuah Jalan: Suatu

Daftar Pustaka

- Refleksi Untuk Mengamankan Pancasila.” *Persepsi*, Vol. 9, No. 3, 1987.
- Sophiaan, Manai. *Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G 30 S/PKI*. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994.
- Staf Angkatan Bersenjata. *Amanat-Amanat Penting di saat Penghancuran Gestapu*. Jakarta: Direktorat Penerangan ABRI, 1965.
- , *40 Hari Kegagalan “G 30 S” 1 Oktober-10 November 1965*. Djakarta: Pusat Sedjarah Angkatan Bersenjata, 1965.
- Suara Rakyat Indonesia. *Bunga Rampai: Kumpulan Prosa, Puisi, Esei*. Collection of items previously published in Suara Rakyat Indonesia and API. Peking: Suara Rakyat Indonesia, 1978.
- Subandrio, Ali Said, dan Darmawati Ahmad. *Sangkur Adil Pengupas Fitnah Chianat*. Djakarta: Etika, 1967.
- Sudisman. *Analysis of Responsibility: Defence Speech of Sudisman, General Secretary of the Indonesian Communist Party at His Trial Before the Special Military Tribunal, Jakarta, 21 July 1967*. Melbourne: The Works Co-operative, 1975.
- , *Basmi Penyakit Pulasiri*. Djakarta: Depagitprop CC PKI, 1964.
- , *Kerapian Organisasi*. Djakarta: Pembaruan, 1964.
- Sudoplatov, Pavel and Anatoli. *Special Tasks*. New York: Little Brown, 1994.
- Sukarno. *Tahun Vivere Pericoloso*. Djakarta: Departemen Penerangan RI, 1964.
- , *Tjapailah Bintang-bintang di Langit (Tahun Berdikari)*. Djakarta: Departemen Penerangan RI, 1965.
- Sulastomo. *Hari-Hari Panjang 1963-1966*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit: Di Ladang Tebu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000.
- Sumarkidjo, Atmadji. *Mendung Di Atas Istana Merdeka*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Sunardi, IDM. *Lecture on the September 30 Movement. The Indonesian Communist Party and the Elimination of the Communist in Indonesia*. Djakarta: Department of Information, Republic of Indonesia, 1969.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Sundhaussen, Ulf. *The Political Orientations and Political Involvement of the Indonesian Officer Corps 1945-1966*. Ph.D. Thesis, Monash: Monash University, 1971.
- Sutter, John O. "Two Faces of 'Konfrontasi': Crush Malaysia and the GESTAPU". *Asian Survey*. October 1966.
- Svensson, Tommy. *Peasants and Politics in Twentieth-Century Java: A Study of Agrarian Systems and Peasant Movements in West, Central and East Java in Comparative Perspective, 1912-66*. Gothenburg: Gothenburg University, Southeast Asian History Project, Department of History, 1978.
- Swift, Elizabeth Ann. *The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1989.
- Taintor, Mavis Bunker. *An Ecological Model of Peasant Revolution: The Indonesian Communist Experience 1952-1965*. Ann Arbor, Mich.: University Microfilms International, 1980.
- Teperda. *Laporan Tentang "G 30 S"/PKI Surakarta, No-020/1/1967*. Djateng: Teperda, 1967.
- The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies From Java and Bali*. Clayton, Vic., Australia: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.
- The Special Bureaus of the Communist Party of Indonesia*. Jakarta: Operational Command for the Restoration of Security and Order, 1972?
- Tichelman, Fritjof. *Socialisme in Indonesie, Holland & Cinnaminson*, USA: Dordrecht & Foris Publication, 1985.
- Tim Redaksi. "Peranan TNI AD Menghadapi PKI Sebelum Tahun 1965." *Persepsi*. Vol. 12, No. 1, 1990.
- Tjataan Chronologis Mengenai Kedjadian "G 30 S"*. Jogjakarta: Pekuper Daerah Istimewa Jogjakarta, 1965.
- Tjataan/Fakta sekitar Peristiwa "Gerakan 30 September" jang terjadi di daerah Djawa Tengah*. No. B-PPD/0071/12/1965 (1965).
- Tornquist, Olle. *Den indonesiska kommunismen under befrielsekampen. Teoretiska och strategiska problem 1914-50*. En forstudie. Gothenburg: Gothenburg University, Ekonomisk-Historiska Institutionen, 1975.
- , *Summary of the Marxist Milestone: Why Did the World's*

Daftar Pustaka

- Third Largest Communist Party Fail?* Working Group for the Study of the Development Strategies. Uppsala: University of Uppsala, 1982.
- , *Dilemmas of the Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia*. London & Totowa, N.Y. Zed Books & US Distributor. Biblio Distribution Center, 1984.
- Tumakaka JK. *Sosialisme Indonesia: Penerbitan Khusus*. Djakarta: Departemen Penerangan RI, 1961?
- Utrecht, Ernst. "The Military Coup of October 1st, 1965, in Djakarta." *Internationales Asien Forum*, Vol. 4, 1973.
- , "An Attempt to Corrupt Indonesian History, Review of Dake: In the Spirit of Red Banteng and Karni: The Devious Dalang." *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 5, No. 1, 1975.
- , "The Communist Party of Indonesia (PKI)." *Ten Years of Military Terror in Indonesia*. Ed. M. Caldwell, Nottingham: Spokesman, 1975.
- , "The Indonesian Army." *Southeast Asia Monograph Series*, Vol. 1, No. 4 North Queensland: James Cook University of North Queensland, 1979.
- , *Indonesie's Nieuw Orde: Ontbinding en Neokolonisatie*. Amsterdam: Van Gennep, 1970.
- Ungkapan fakta-fakta sekitar Peristiwa G 30 S/PKI*. Jateng: Peperda, 1966.
- Vittachi, Tarzie. *The Fall of Sukarno*. New York: Praeger, 1967.
- Walkin, Jacob. "The Moeslem-Communist Confrontation in East Java 1964-65." *Orbis*, Vol. 13, No. 3, 1969.
- Weinstein, Franklin B. *Indonesia Abandons Confrontation*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1969.
- Wertheim, W. F. "Indonesia Before and After the Untung Coup." *Pacific Affairs*. Vol. 39, Nos. 1-2, 1966.
- , "Suharto and the Untung Coup: The Missing Link." *Journal of Contemporary Asia*. Vol. 1, No. 2, 1970.
- , "Was Suharto Terlibat?", *Information on Indonesia Quarterly*. Vol. 2, No. 1, 1972.
- , *Evolution and Revolution: The Rising Wave of Emancipation*. Middlesex: Penguin, 1974.
- , "Whose Plot? New Light on the 1965 Events." *Journal*

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

of Contemporary Asia. Vol. 9, No. 2, 1979.

Widjanarko, Bambang S. *The Devious Dalang: Sukarno and the so-called Untung Putsch Eye Witness Report*. The Hague: Interdoc Publication House, 1974.

Williams, Michael C. *Sickle and Crescent: The Communist Revolt of 1926 in Banten*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1982.

Williams, Michael. "Sneevliet and the Birth of Asian Communism." *New Left Review*. No. 123, 1980.

Wiriamihardja, TA Subrata. *Peran serta Mahasiswa Universitas Tarumanegara dalam Perjuangan Orde Baru*. Jakarta: UPT Penerbitan, Universitas Tarumanegara, 1990.

Yamin, Muhammad. Tan Malaka. *Bapak Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbitan khusus Yayasan Massa, 1981.

Yani, YR. *Dari Hati ke Hati*. Djakarta: Yasaguna, 1966.



INDEKS

- Abang, Kopral Muhammad, 155
Acton, Lord, xxxiv
Adjie, Mayjen Ibrahim, 22, 66, 210, 214, 241, 270, 274
Adjitorop, Jusuf, 115, 339
Agami Jawi, xxvi
Agayants, Jenderal Ivan, 65, 107, 304, 306
Aidit, D.N., xxviii, xxix, xxxii, xxxiv, xxxv, xxxvi, xlii, xliii, xlv, xlv, 4-6, 8-23, 25-31, 33, 36, 40, 43-46, 50-52, 56, 59, 64-71, 75, 78, 82-92, 94, 96-97, 99, 100-101, 104-106, 110, 112-114, 116-119, 121-124, 126-135, 138-140, 143, 152, 155-159, 168, 169, 170, 176-180, 185, 188, 192, 194-216, 202, 205, 208, 218-236, 238-239, 242, 249, 256, 260, 263, 264, 265, 267-271, 276-277, 279, 284-286, 293-295, 300-308, 310-321, 323, 324, 325, 326-329, 331-339; alasan-alasan dibalik kega-galan Aidit, 289-292; bertaruh dengan kesehatan presiden, 296-299; didesak Mao memukul lebih dulu, 76-81; keku-asaan kembar bersama presiden, 187-189; memasang perangkat di rumah Susanto, 171-175; mengangkat presi-den kembali, 189-193; mengirim surat kebohongan besar kepada presiden, 250-254; menyalahkan presiden atas kegagalan GESTAPU, 254-262; me-nyerang presiden untuk kedua kalinya, 203-209; menyerang presiden, 183-186; terbang ke Yogya membentuk pemerintahan sementara, 227-232, 243-248; tidak mau merangkul presiden, 200-203; tiga opsi melengserkan presiden, 147-154
Ali-Surachman, xlii
Amerika Serikat, xxxiv, xxxix
AMPERA, 148, 171
Ancaman dari Utara, 5, 105
Anderson, Benedict R. O'G., xxxviii, xl, xli, 317, 320
Angkatan Bersenjata, 3, 7, 10-11, 15, 17, 19, 22, 48, 55, 56, 58, 61-64, 67, 69-72, 80, 83, 96, 102, 106, 107, 109, 110, 115, 119-121, 126-127, 133, 139-140, 144, 145, 148, 152, 156, 163, 169, 175, 179, 184, 186, 188, 190, 193, 203, 205, 206-207, 213-235, 237, 238, 244, 263-264, 267, 273-274, 276, 280, 288, 293, 304, 307
ANGKATAN BERSENJATA, 61, 102
Angkatan Darat: xxviii, xxix, xxix, xxxv, xxxix, xl, xliii, xlv, xlv:7, 107, 159, 195, 240, 263, 269, 275-276, 282, 290, 314; enam jenderal, pembunuhan terha-dap, xxix, xxxv, 1, 71, 89, 119, 167, 271, 277, 280, 288, 312; pucuk pimpin-an/komando puncak, 3-6, 7, 12, 15, 19, 28, 45, 50, 65, 68, 69, 71, 89, 90, 98, 102, 104, 107-108, 119, 124, 126, 128, 131-132, 150, 153, 157, 159, 173, 218-320, 277
Angkatan Kelima, 6, 59, 77, 81, 90, 96, 101, 102, 106, 155, 156
Angkatan Laut, 17, 62, 72, 101, 102, 104, 107, 127, 186, 215, 216, 266, 270-272
Angkatan Kepolisian, 6, 16, 17, 42, 62, 67, 68, 72, 107, 127, 186, 216, 270-272

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Anwas Tanuamidjaja, Komisioner Polisi, 10, 72, 153, 186, 203, 205
 Asahan Aidit 84, 311
 Asia-Afrika, 8, 79, 98, 99, 315; Gerakan, 79, 229
Asian Survey, xxxvii, xxxviii, , 312, 334
 Asmrani, Devi, 42
 Asmu, 132
 ASPAC, xxxvi, xxxviii
 Atmo, Sujono, 248, 251
 Atmodjo, Letkol Udara Heru, 10, 31, 72, 129, 143, 153, 155, 169-170, 174, 176, 183, 186, 198, 203, 205, 207, 220, 307, 309-310, 324, 330, 335
 AURI, 10, 17, 23, 25, 62, 65-66, 68, 71-72, 75, 76, 97, 102, 107, 109, 120, 127, 128, 131, 144, 147, 149, 153, 155-157, 168, 175-176, 178, 183, 186, 192-193, 201-202, 211, 220, 225, 228-229, 236, 238-240, 243-244, 251-252, 264, 270, 272, 275-277, 281, 285, 309, 315
- Badan Pusat Intelijen/BPI, 7, 67, 72, 116, 293, 313
 Bahar, 65
Barisan Sukarno, 281
 Batalyon, 454, 139-142, 145-146, 154, 168, 209, 221, 223, 227, 235, 274; dan 530, 140, 141, 142, 145, 146, 154, 168, 227
 Batalyon 530 Diponegoro, 18, 24, 139, 191, 209, 223, 234, 235
 Ben Bella, 74, 99, 316
 Benda, Harry, xxxi, xlv
 Benes Eduard, 85, 137, 324
 Bhimasakti, pasukan 141, 142, 146, 167
 Biro Khusus xxviii, xlii, xlv, 3, 10, 14, 27, 31, 33, 36, 45, 65-68, 70-72, 87- 88, 112, 115, 119-123, 130, 132, 134, 136-137, 140, 148-149, 153, 155, 184, 188, 205, 215, 227-228, 231, 246, 248, 253, 259, 286, 291, 303, 304, 307, 313, 315, 320-323, 325; didirikan, 61-64
 Bob Sunarjo Gondokusomo, 266
 Brackman, Arnold C., xl, 162, 287, 300, 317
- Brass, Jeremo, xlv
 Brezhnev, Leonid, xxxvii, xlv
 Budiardjo, 315
 Budiardjo, Carmell, 316, 337
 Busri Boer, Brigjen, 49
- Cady, John F., 35
 Canaille, Suparto, 106
 Candi Sukuh, xxv
 Carlyle, Thomas, 45, 85, 110
 Cekoslowakia, 305, 324
 CENKO I, 15, 144, 148, 153, 168, 169, 170, 171, 181, 183, 191
 CENKO II, 15, 20-22, 31, 144, 167, 171, 180-184, 191, 195, 198, 200, 205, 207-214, 222-224, 226, 228, 230, 327, 330, 332; menyimpulkan GESTAPU telah gagal, 222-227
 CGMI xlv, xlv
 Chairul Saleh, 97, 106, 108, 145, 178, 334
 Chen Yi, Marsekal, xxix, 11, 12, 43, 79, 80, 86, 88, 91, 93, 98, 132, 149, 308, 314, 323, 334
 Chou En-lai, 59, 95, 96, 98, 101, 156, 315, 334
 CIA, xlv, 4, 7, 34, 175, 305
 Cina, xxiv, xxviii, xxix, xxxvi, xxxvii, 6, 11-14, 16, 17, 24, 25, 30, 43, 56, 73, 104, 111, 114, 132, 149, 150, 151, 155-156, 163, 166, 171, 174, 178, 179, 183, 186, 192, 195, 228, 229, 236, 241, 255-258, 283, 285, 289, 291, 292, 295, 297, 299, 301, 302, 305, 308-311, 316, 323, 325, 326, 334; dokter-dokter, 8, 9, 75, 77, 115, 124, 202, 294, 313; Kerajaan di Cina 265, 266; Para pemimpin Cina, 59, 100, 309, 333, 334; Partai Komunis Cina, xxxvi, 38, 92; strateginya terhadap Indonesia, 74-103
 Cohen, Margot, 337
 Confusionisme, xxvi
 Cornell Paper, xxxii, xxxvii, xxxix, xl, xli, xlv, xlv, 3, 320
 Courtois, Stephane, 339
 Cribb, Robert, 337
 CSIS, 32, 38, 41

Indeks

- Dahlan Ravi, 133
 Dai Bingguo, 38
 Dake, Antonie, C.A., 302
 Danau Angsa, xxix, 12, 17, 25, 43, 80, 86, 88, 132, 149, 241, 289, 295, 308
 Dange, S.A., 55
 Demokrasi: Nasional 52, 53, 115, 118, 300: Rakyat 5, 28, 29, 52-53, 55, 133, 149, 151, 163, 166, 182, 186, 201, 203, 297-299, 301; Terpimpin, xxvii, xlv, 8, 53, 90, 91, 186
Der Spiegel, 328
 Dewan Jenderal xxxv, xliii, xlv, 1, 6, 7, 9, 15, 16, 45, 65-72, 74, 88, 106-111, 116, 117, 122, 125-129, 132, 137, 138, 141, 145-147, 159-162, 170, 176, 177, 184, 202, 218, 234, 250-253, 258, 261, 278, 279, 281, 282, 293, 296, 313, 320, 321
 Dewan Revolusi 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 129, 131-134, 142, 143, 146-149, 151-153, 163-166, 169, 171-172, 174-200, 203-209, 212, 213, 215-216, 218, 220, 222-224, 227-229, 234, 238, 244-246, 248, 254-256, 259, 267, 268, 273, 279, 280, 289, 290, 296, 323, 330, 331; *Dekrit No. 1*, 19, 21, 149, 153, 169, 181, 184, 186, 187, 191, 196, 201, 203, 204, 218, 220, 246, 330, 331; *Keputusan No. 1*, 203, 206; Ketua Dewan Revolusi, 177, 186, 188, 203, 223, 274; Presidium Dewan Revolusi, 143, 186, 203, 204
 Dewanto, Komodor, 155
 Dhani, Omar, 9, 10, 14, 16-18, 21, 23, 24, 27, 31, 33, 36, 39, 71-72, 75, 101-102, 107-109, 143, 145, 149, 152-155, 156, 165-171, 174-176, 178-179, 183-184, 188, 190, 192, 195, 197-199, 202, 203, 205, 206, 208, 210-213, 215, 220, 225, 226, 228-229, 236, 239, 240, 251-252, 255-256, 264, 268, 272, 274-276, 285, 291, 297, 307, 327, 329, 330, 332-334, 335, 338; mempersenjatai pasukan penculik, 155-156
 diktator, 4, 29, 52, 123, 298, 299; militer 123; proletariat 52, 298
 Dinas Rahasia Cekoslowakia, 7, 304-306, 320
 Djarkashi, Kapten, 214
 Djiwandono, Soedjati, 38, 39, 316
 Djukardi, Kolonel, 122
 Doktrin, 6, 58, 62, 64, 100, 104, 106, 107, 110, 128, 182, 229, 265, 284, 307; Angkatan Darat, 106, 107, 229; TRI UBAYA ÇAKTI, 105
 Dokumen Gilchrist, 7, 65, 68, 69, 72, 74, 107, 122, 202, 305, 306, 320, 321
 DOKUMEN No. 1, 252, 256, 333, 343
 DOKUMEN No. 2, 25, 43, 135, 150, 289, 302, 312, 308, 334, 335, 346
 DOKUMEN No. 3, 260, 350
 DOKUMEN No. 4, 26, 152, 167, 214, 290, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 352
 DOKUMEN No. 5, 45, 318, 368
 DOKUMEN No. 6, 7, 370
 DOKUMEN No. 7, 328, 373
 DOKUMEN No. 8, 376
 DOKUMEN No. 9, 149, 153, 330, 379
 DOKUMEN No. 10, 382
 DOKUMEN No. 11, 148, 206, 383
 DOKUMEN No. 12, 175, 384
 DOKUMEN No. 13, 179, 385
 DOKUMEN No. 14, 213, 336, 386
 DOKUMEN No. 15, 215, 387
 DOKUMEN No. 16, 216, 244, 388
 DOKUMEN No. 17, 215, 389
 DOKUMEN No. 18, 4, 390
 DOKUMEN No. 19, 315, 401
 DOKUMEN No. 20, 408
 Dubcek, , 30, 299, 321
 Dul Arief, Letnan, 141, 147, 169
 Ebram, Letkol Ali, 16, 172, 267, 329
 Edhy, Kolonel Sarwo, 235, 272, 274, 275, 276, 335
 Ehermann M.M., 317
 Endo Sulistio, 132
 Eropa Timur, 76, 95, 182
 Front Nasional, 48, 67, 94, 95, 185, 204, 205, 236, 252, 279
 Ganis Harsono, 91
 Gatotkaca, pasukan, 141, 142, 147, 167

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- George, Ball, 7
 GERAKAN 30 SEPTEMBER, xxxiii, xxxiv, xxxv, 14, 24, 147, 172, 175, 179, 185, 186, 207, 234, 237-238, 244, 248-249, 252, 263, 264, 276, 284, 286, 295, 296, 319-320, 323, 330, 331, 335, 336; Lihat juga PKI; GESTAPU
 GERWANI, 27, 169, 192, 248, 277, 291
 GESTAPU, xxvii, xxxv, xxxvi, xxxvii, xxxviii, xxxix, xl, xli, xlii, xlv, xlv, xlvii: 1-4, 14, 17-19, 22-25, 27, 29, 31-34, 37-44, 46, 50-51, 63, 89, 118, 120, 135, 141, 143, 147, 149, 152, 154, 163, 167, 169, 170, 172, 175, 180, 181, 188, 190, 193, 196, 197, 202-205, 209, 212-213, 215-216, 218-220, 222-227, 231-232, 235, 241, 246, 250, 252-256, 258-261, 263, 271-291, 294, 296, 298, 309, 310-312, 316, 319-321, 329, 332, 334, 337, 339; tiga teori asal-usul, 24; lihat GERAKAN 30 SEPTEMBER; PKI; G-30-S
 Ghosh, Ajay, 55
 Gintings, Brigjen Djamin, 104
 Gorbachev, 30, 299
 Gottwald, 85, 137, 324
 Gus Dur, 38, 40, 47
 Hadisubeno, 66
 Hanafi, A. M. 337
 Hanafie, Kapten Udara, 225
 Handoko, Komodor 155
Harian Rakjat, xxxvii, xlv, 300, 307
 Harjono, Mayjen MT., 14-15, 66, 104, 106, 145, 168
 Harjowisastro, 67
 Hartono, Brigjen, 315
 Haryati, Ibu, 16, 152, 172, 173, 174, 177, 329
 Hasim, 140, 231
 Hayam Wuruk, xxv
 Herlambang, Sri Mulyono, 96, 274
 Hidajat Wirasondjaja, Let. Kol, 267
 Hindu-Jawa, xxv, xxvi
 HMI, xlv
 Ho Chi Minh, 30, 299
 Hongaria, 30, 55
 Hughes, John, 334, 335
 Idris, Kolonel Kemal, 262
 Indonesia: dalam strategi Cina, 11, 93, 73-103: Revolusi, 9, 11, 53, 56, 70, 76, 83, 86, 89, 90, 100, 115, 118, 153, 175, 185, 187, 198, 204, 263, 279, 311, 330
 Inggris-Amerika, 3, 5, 65, 74, 84, 100, 104, 107, 305, 311
 IPPI, xlv
 ISEAS, xxxi, xxxvi, xlv
 Jakarta-Peking, Poros, 82, 97, 98, 106, 107, 310
 Jasin, Brigjen, 66
 Johnson, Presiden, 7
 Joshi, P.C., 55
Journal of Contemporary Asia, 326-329, 338
 Judodihardjo, Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto, 7, 31, 34, 194, 199, 203, 208, 210-213, 215-216, 273, 277, 279, 328, 331-335
 Jusuf Muda Dalam, 109, 279
 Kabinet Dwikora, 17-19, 21, 31, 52-55, 72, 97, 118, 129, 131, 146, 163, 164, 178, 180, 181, 184-186, 196-197, 201, 203, 204, 208-210, 214, 218, 220, 222, 231, 245, 252-254, 277
 Kabinet Gotong Royong, 5, 12-13, 17, 21, 25-26, 53-55, 57, 72, 80, 83, 86, 88, 89, 115, 117-119, 123, 132, 146, 150-151, 154, 163, 166, 171, 173-175, 188, 196, 199, 210, 289, 290, 295
 Kadar, 30, 299
 Kahin, George McT, xxxviii, xxxix, xl, xli, 317
 Kamarusaman, Sjam, xxviii, xxix, xxxi, xlv 10, 13-16, 18, 20, 22-23, 31, 33, 35-36, 56, 59, 62-63, 66, 71, 112, 118-127, 130-133, 136-148, 153-154, 157-158, 160, 167-169, 171, 176, 180-184,

Indeks

- 191, 200, 205, 209, 211, 214, 218, 222, 224-225, 227- 228, 230-231, 236, 238, 244, 271, 286, 304, 319, 321-327, 329-334
- Kamboja, 30, 88, 91, 104, 299
- Karni, Rahadi S., 314-319, 321, 323, 326, 329-337
- Kartodirdjo, Sartono, xlvii
- Katoppo, Aristides, 303, 308, 313, 314, 326, 333, 334, 335, 338
- Koentjaraningrat, xxvi
- Kolomongso*, wayang kulit, 18, 19, 49, 194, 196, 238
- Konference on Asian History, xlv, xlvii
- Konferensi Asia-Afrika, 98; Konferensi Asia-Afrika II, 74, 99
- Konfrontasi xxxvii: dengan Malaysia, 8, 78, 95, 100, 101, 158, 312
- Korea Utara, 98
- KOSTRAD, 14, 18, 22- 24, 26, 31, 105, 120, 146-147, 154, 157-160, 167-168, 195-197, 205, 208- 212, 214, 216-221, 223, 225-227, 231, 234-235, 239, 240-241, 262, 267-277, 285, 290, 336
- KOTI, 68, 281, 287
- kudeta, 1-5, 7-8, 20-22, 24-25, 28, 34, 36, 43, 66, 81, 109-111, 116, 120-123, 125, 127- 129, 132-133, 157, 159, 161-163, 170, 174, 176, 184, 196, 208, 210, 219, 220, 224, 234, 270-273, 278, 282, 286-289, 291-294, 297, 310, 312-313, 324-326, 333, 338; akibat-akibat kude-ta yang gagal, 243-262; diinspirasi oleh Cina, 292-293; langkah-langkah rinciannya, 136-156; Untung 219, 271; yang gagal, xxxiii, xxxv, xxxvi, xxxvii, xxxviii, 22, 49-50, 114, 243, 273, 303; sebagai masalah intern AD, xxxix, xxxv, xxxix, xlvi, 5, 119, 121, 143, 125, 227, 232, 214
- kultus Bhima, xxv
- Kuntjoro, Kapten, 147, 225
- Kusumowidagdo, 96
- Latief, Kolonel A., xxviii, 10, 14, 15, 23, 31-33, 36, 39, 71, 120, 137-144, 147, 154, 157-164, 167-169, 172, 176, 183, 190, 204, 205, 211, 218, 220, 223, 224, 230, 270, 285, 288, 324, 327-330, 332, 338; mengunjungi Suharto, 157-160; gagal mengajak Suharto, 161-164
- Leimena, Dr. Johannes 16, 17, 24, 25, 31, 34, 106, 108, 113, 172, 178, 193, 194, 197-199, 203, 207, 210, 216, 226, 236, 239-241, 263, 266-267, 276, 279, 289, 323, 331-333, 335
- Lenin 77, 84, 187
- Lev, Daniel, xxxviii, xlvii
- Lon Nol, Marsekal, 88
- Louda, Mayor, 65, 107, 296, 305, 306, 320
- Lubang Buaya xlv, 16, 31, 40, 41, 120, 127, 128, 131, 147, 163, 169, 176, 230, 231, 235, 258, 276, 277
- Lukman, 13, 31, 51, 63, 75, 115, 118, 121, 131, 132, 136, 153, 183, 227-228, 248-253, 284, 286, 310
- Machmud, Brigjen Amir, 204, 329
- Mackie, J.A.C., xlvi, 316
- Mahabharata, ajaran moral, 12, 18, 141, 148, 171, 173, 309
- MAHMILLUB, xxxvi, xlii, xlvi, xlvii, 33, 43, 44, 50, 312, 319, 322, 324, 329, 331, 335
- Majapahit, xxiv, xxv, xxviii, xli, 265, 266, 319, 336
- Malik Fajar, Abdul 46
- Mangil, 106, 236
- Mao Tse-tung, xxix, xlv, 4, 8, 10-13, 30, 43, 50, 56, 76-89, 93, 98, 100, 114, 118, 119, 130, 150, 153, 173, 174, 182, 187, 192, 201-203, 205, 229, 241, 256, 258, 280, 291, 292, 294-295, 302, 307-308, 312, 314, 316, 322, 334, 339
- Mardjono, Dr. Mahar, 25, 28, 29, 75, 203, 289, 294, 295, 297, 298, 313
- Martadinata, Laksamana Madya R.E., 10, 17, 31, 102, 143, 194, 197, 199, 203, 212, 215-217, 221, 225, 268, 269, 270, 271
- Marxisme-Leninisme 30, 37, 38, 39, 54,

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- 64, 67, 77, 85, 245, 265, 292, 299
McVey, Ruth T. xxxviii, xl, 300, 317, 320
Megawati, Sukarnoputri, xxiv, xxv, xxvii, 2
40, 42, 46, 47, 48, 49, 266, 319, 336
Modern Indonesia Project xxxviii, xl
Moerdani, Benny, 105
Moertopo, Ali, 105, 234
Moes Subagio, Mayor, 262
Mokoginta, 104
Moskow, 5, 7-8, 28, 34, 54, 56, 61, 73, 75-
78, 81, 88, 91, 95, 99, 115, 182, 249-
250, 265, 292, 298, 302, 311, 317, 322,
324, 338
Mrazek, Rudolf, 320, 321, 322
Muljadi, Wakil Pangal, 268
Mursjid, Mayjen, 22, 96, 108, 109, 211,
270
Musso, 120, 158, 304
Musyawarah Besar, 12 20, 31, 194, 208

NASAKOM, 51, 53, 59, 84, 117, 118, 142,
143, 146, 156, 204, 205, 250, 252
Nasser, 99
Nasution, Jenderal A.H., xliii, xlv, 12, 14,
16, 18, 22, 24, 33, 46, 56, 66, 71, 100,
106-111, 127, 145, 148, 154, 168-173,
176, 179, 197, 208, 209, 211, 214, 217,
219-222, 225, 237, 241, 264, 266, 273,
274, 275, 277-282, 313, 316, 329, 336;
dan AD membalas, 266-272
Nasution, Mualif, 108, 109
Nekolim, 105, 106, 177, 264, 276, 282
Njono, 33, 39, 62, 75, 102, 115, 128, 131,
151, 153, 183, 227, 228, 232, 286, 319,
322, 323, 326
Njoto, xliii, 10, 13, 51, 63, 81, 82, 96, 115,
118, 121, 131, 132, 136, 149, 150, 194,
203, 229, 253, 254, 261, 279, 280, 281,
284, 315
non-Blok 94, 95, 98, 105
Notosusanto, Nugroho, xxxii, xl, xli, 31,
32, 34, 35, 303, 306, 309, 317, 318,
326

Oei Tjoe Tat, 97, 285

OPERASI TAKARI, 155, 170, 171
Operation Palmer, 304, 305
OTOKRITIK, 17, 26-27, 33, 36, 46, 152,
167, 181, 182, 188, 200, 202, 214, 290,
291, 295, 321, 329, 332-336

P.B.K.A xlv, xlv
Pakta Warsawa xlv
Palmer, Bill, 65
Pandjaitan, Catherine, 41
Pandjaitan, Brigjen D.I., 14, 15, 41, 66,
106, 145, 168, 178, 326
Pangkalan Udara Halim, 15, 19, 31, 72, 89,
101, 111, 120, 142, 144, 145, 147, 153,
167, 174, 175, 216, 276, 310, 323
Pardede, Peris, 124, 131, 132, 319
Parman, Mayjen S., 14, 15, 44, 66, 68, 104,
106, 325
Pasopati, pasukan, 15, 141, 144, 145, 147,
157, 167
PBB, 11, 77, 92, 94, 96
Peking, xxix, xlv, 5, 6, 8, 10, 11, 34, 43,
50, 54-56, 59, 61, 73-82, 84, 87-88,
90, 91, 93-103, 105-107, 115, 118-119,
130, 156, 182-183, 205, 228-229, 238,
255-257, 265, 285-286, 292, 294-295,
302-303, 305, 309-311, 314-317, 333,
337, 339
Pemuda Rakjat, xliii, 27, 95, 120, 127,
131, 146, 147, 150, 176, 191, 192, 201,
235, 237, 243, 248, 291
Perpecahan Cina-Soviet, 56
PKI, xxviii, xxix, xxx, xxxii, xxxiv, xxxv,
xxxvi, xxxvii, xxxviii, xxxix, xli, xlii,
xliii, xlv, xlv, 2-11, 13-14, 17, 19, 23,
28, 31-36, 38-46, 75-90, 93-95, 97,
100-102, 106, 108-111, 148-151, 153-
154, 156, 158, 163, 165, 173, 180-182,
187, 188, 190, 201, 202, 204-206, 208,
213, 231-232, 236, 238, 241, 243, 246-
252, 254-261, 263, 265, 267, 272, 275,
277-287, 291-298, 300-320, 323, 326,
333, 334, 338, 339; Angkatan Darat se-
bagai target, 65-73; CC PKI, xxviii, 32,
51, 52, 56, 62, 68, 124, 133-134, 151,
153, 154, 256, 260, 302, 319, 320, 339;

Indeks

- dilemma antara jalan damai dan kekerasan, 51-53; infiltrasi ke tubuh Angkatan Bersenjata, 61-73; kehancuran, 263-268; mempertahankan status hukum, 283-285; membentuk “Komando Pembersihan, 3, 14, 119, 125, 130, 136-146 190; mengubah poros ke Peking, 54-60; ofensif revolusioner, ofensif revolusioner, 5, 51-61, 72, 77, 245, 300 51-60; pembantaian tiada tara, 286-28; perbedaan pandangan yang tajam dan konflik intern, 248-250; perwira progresif-revolusioner 81, 112, 115, 119, 124-125, 128-131, 134, 320; Politbiro, 3, 4, 10, 13, 14, 31, 39, 51, 62, 63, 67, 88-89, 114-119, 121, 123-133, 136, 144, 149-150, 153, 182-184, 187-189, 191, 202, 227, 247-248, 250, 284, 286, 292- 294, 296, 301, 303; politbiro dan rencana besarnya, xxviii, 114-135; Rencana Besar 13, 17, 114-115, 134, 136, 151-153, 167, 178, 189, 199, 202, 208, 259, 294, 320; sepuluh rapat, 136-156; tindakan pre-emptive, xxxv, xlii, 3, 4, 11, 13, 45, 50, 115-117, 119, 123, 125, 129-130, 137-139, 141, 148, 159-160, 162, 202, 279
- pluralisme xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, 30, 266, 299
- Pluvier, Jan M., 317, 287
- Pol Pot, 30, 88, 299
- Pondok Gede, 13, 15, 27, 31, 101, 102, 139, 141-147, 153, 161, 167-169, 176, 191, 223, 225, 243, 291
- Pono, 10, 31, 62, 63, 66, 71-72, 120-132, 137-138, 141-142, 147, 153-154, 160, 167, 231, 313
- Pradigdo, Sujono, 10, 62, 63, 64
- Pranoto, Mayjen, xxviii, xxix, 10, 13, 15, 22, 24, 26, 36, 71, 112, 148, 153, 168, 171, 188, 210-213, 217, 220-222, 224-225, 227, 246-247, 263, 264, 269-275, 281, 290, 332
- Prapantja, Mpu xxxviii, xli
- Pulau Buru, 337
- Puspojudo, Wilujo, 97
- Pyongyang, 91, 105
- Rachmat Kartakusumah, 104
- Rachmat, Mayjen Basuki, 24, 204, 205, 210, 212, 234
- Radio Jakarta, 33, 209, 246, 270, 292, 304, 306, 307, 313, 319, 322, 323-326, 329-335, 339
- Ramelan, Utomo, 249, 251, 335
- Ramin, 62, 63
- Ratna Sari Dewi, 318
- Reshnikov, 339
- Rewang, 124, 133
- Ripka Tjiptaning Proletariyati, 40, 41
- RPKAD, 147, 214, 223, 230, 235, 272
- Rudiat Sukirno, 122
- Rukman, Mayjen, 14, 121, 122, 123, 127, 133, 140, 181, 211, 214, 332
- Rusain Widjajasatra, 132
- Rusmin, Komodor Udara, 66
- Sabur, Brigjen, 21, 87, 106, 108-109, 173, 178-180, 184, 189, 195- 200, 209, 212, 214, 216, 221-222, 226, 235, 236, 239, 240, 241, 276, 279, 313, 318, 325, 326, 333
- Saelan, Kolonel, 111, 171-173, 178, 209, 236, 240, 276
- Sakirman, 115, 131, 132
- Saleh, Ismail, xlii
- Salim, 63, 132, 140
- Sanjaya, xxiv
- Sanusi, Anwar 115, 131
- Sarbupri, xliii
- Scalapino, Prof Robert, xxxvii
- Shiwaisme, xxiv, xxv: Tantrayana xxv
- Sigit, Mayor Infanteri Agus, 120, 137, 138, 139, 140, 141, 324
- Sihanouk, Norodom, 88
- Siliwangi, Divisi, 14, 120-124, 127, 133, 139, 140, 144, 146, 214, 235, 268, 332
- Silverstein, Joseph xxxi
- Siswadi, Komodor Udara 10
- Siswomihardjo, Brigjen Soetojo, 14, 15, 41, 66, 104, 106, 145, 169

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Sjafiuddin 96, 106, 107
 Sobirin Mochtar , Brigjen, 24, 234
 Sobolev, A., 300
 Sobron Aidit, 311
 SOBSI, 39, 67, 68, 151, 248, 315
 Stalin, 84, 85
 Subandrio, xxix, xxxvi, xlii, xliii, xlv, xlvii,
 7, 12, 33, 40, 43, 65-70, 74-76, 80, 87,
 91-93, 95, 96-98, 106, 108, 115-116,
 132, 149, 150, 156, 178, 194, 199, 203,
 205, 229, 241, 256, 257, 258, 274, 276,
 279, 285, 293, 305-310, 312-316, 323,
 326, 329, 339
 Subardjono, 214
 Sudiono, Kolonel Udara, 10
 Sudisman, 20, 33, 44, 63, 109-111, 115,
 131-132, 231, 259, 286, 293, 303, 313,
 319, 323, 325, 331-332, 339
 Sudoplatov , Pavel, 324
 Sugandhi, Brigjen H., 33, 44, 45, 109-111,
 318, 325
 Sugondo, Kolonel Djiwo 31, 34, 43, 303,
 312-316, 336
 Suharto, xxvii, xxviii, xxix, xxxiv, 2, 15,
 18, 19, 22-24, 26, 28-30, 32, 34, 38, 40,
 43, 44, 46, 47, 49, 111, 154, 157, 159,
 161, 167-168, 193, 195, 196, 197, 205,
 216-209, 211-214, 216-221, 223-226,
 228, 231, 233, 239-248, 253-257, 259,
 261-281, 285-288, 290-291, 294, 297-
 299, 312, 318-319, 326-329, 332, 336,
 338; kuda hitam, 157-164; mengikuti
 arah presiden, 233-238; mencegah
 formasi duumvirat Sukarno-Aidit, 217-
 221; sebagai Pangkopkamtib 276, 303;
 Suhri, 96
 Sujatno, Sersan Anis., 15, 31, 144, 171
 Sujeta, Gubernur Bali, 106
 Sujono, 10, 62-64, 72, 101-102, 138, 139,
 141-144, 146-147, 153-155, 169, 183,
 204, 205, 207, 223, 224, 227-231, 324,
 332
 Sujono, Mayor Udara, 22, 31, 120, 137,
 153, 204
 Sukarni, 145
 Sukarno, xxiv, xxv, xxvii, xxviii, xxix,
 xxxii, xxxiv, xxxvi, xxxviii, xlii, xliii,
 xlv, xlvii, 1-5, 7, 8, 10-11, 13, 14, 16,
 18, 20, 21, 29, 30, 33, 36, 42, 43, 47,
 50, 59, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 77- 91,
 93, 96-101, 104, 108-109, 116, 118,
 122, 125-126, 130, 149, 153, 156, 158,
 159, 163, 195, 200, 204, 206, 209, 217-
 218, 228-229, 237, 243, 248, 249, 253-
 254, 258, 261, 266, 278, 280, 283, 285,
 288, 293, 296, 298-299, 305, 306, 308,
 309, 311-316, 318-318, 321, 327-328,
 330, 335-336; berseberangan dengan
 AD, 104-113; berseberangan dengan
 Suharto, 216; dan Kekuasaan Kembar
 187, 187, 188; jatuh pingsan di istana
 negara, 74-76; meloloskan diri dari
 peangkap Aidit, 163-193; memberi
 mandat kepada Suharto untuk
 memulihkan keamanan dan ketertiban,
 263-265; memerintahkan hentikan
 semua aksi, 175-180; memerintahkan
 Untung membersihkan para jenderal,
 108-109; mengutip Carlyle, 109-113;
 menuju Bogor, 239-242; menyerahkan
 kabinetnya ke tangan Aidit, 197-199;
 meraih ke kembali Wahyu
 Cakraningrat, 209-215; pensiun ke
 danau Angsa, Cina, 12-14, 16, 17, 24,
 75, 80, 88, 91, 97, 101, 115, 149, 150-
 151, 178, 192, 195, 202, 257, 289, 311,
 323, 334; perjanjian rahasia dengan
 Mao, 82-90
 Sukendro, Brigjen Achmad, 66, 68, 145
 Sukrisno, Mayor Udara Gathut, 141, 147,
 225
 Sulisty, Hermawan, 37, 287, 338
 Sumargono, Mayor, 266
 Sumarkidjo, Atmadji, 302, 339
 Sumirat, Komisaris Polisi, 106, 194, 195,
 236
 Sunardi, Kolonel Laut, 34, 72, 153, 186,
 203, 205, 220
 Sunarjo, Brigjen, 108, 109
 Supardjo, xxviii, xlvii, 10, 14, 16, 17, 20-
 24, 26-28, 31, 33, 36, 46, 71, 109, 111,
 120-123, 143-146, 149, 150, 152-155,
 158, 160, 164-173, 176-184, 180, 186,
 188-193, 195-208, 210-214, 217-224,

Indeks

- 226-236, 238-239, 243, 244, 246, 256, 259, 267, 270, 273-276, 286, 289, 290-292, 295, 297, 298, 307, 318, 321, 323-327, 329, 330, 332-335, 339;
meninggalkan Aidit bergabung dengan Presiden, 180-182
- Suparto, Kolonel, 215, 240, 318
- Supeno, Major Infanteri Bambang, 147, 176, 191, 209
- Supoyo, Komisioner Polisi Iman, 10, 72
- Suprpto, Mayjen, 14, 15, 66, 104, 106, 145, 169, 211
- Suradi, Kapten Infanteri, 141, 147
- Suradi, Komodor 72
- Susanto, Komodor, 15, 153, 195, 318;
rumah; xlvii, 16-18, 20, 21, 25-26, 29, 31, 150, 152-154, 165, 166-168, 170-173, 178-179, 192-202, 204-205, 207-212, 215-217, 220-222, 225-226, 229, 236, 239, 242, 273, 275, 277, 279, 280, 290, 299, 327, 330, 331
- Sutardhio, Brigjen, 108
- Sutardjo, Brigjen, 17, 31, 194
- Sutarto, Brigjen Polisi, 67, 72, 108, 116, 204
- Suwardi, rumah sersan, 154, 183, 189, 191, 202, 224, 228, 229, 245, 250, 310
- Suwardiningsih, 132
- Suwarno, Kapten, 149
- Suwarto, Brigjen, 104
- Tahir, Brigjen A., xxxii, 31, 34, 303, 309, 312
- Tahsin, S., 337
- TAKARI xlii, xliii: pidato, 203: operasi 147, 148, 155, 170, 171, 203
- Tan Min Hsuen 81
- Taoisme xxvi
- TAP MPRS 40, 41, 47: No. XXV 38, 39
- Tata Dunia Baru, 91
- Tendean, Letnan Pierre, 16, 277
- Tentara Rakyat, 6, 11, 27, 28, 59, 77, 78, 83, 94, 101, 106, 291, 296, 297, 338
- TEPERPU xxxii, 31, 34, 42, 43, 303, 308, 316, 318, 336
- The Jakarta Post* 319, 337
- the New Emerging Forces, 11, 74, 77, 84, 91, 94, 96, 97, 105, 314
- The New York Times*, 317
- The Straits Times*, 303, 307, 308, 311, 313-316, 326
- Tjakrabirawa, resimen, xlv, 1, 9, 16, 31, 71, 87, 138, 146, 154, 171, 179, 180, 241, 251, 266, 267, 276, 294, 321
- Tornquist 287
- Uni Soviet xxxvii, 9, 55, 91
- Untung, Letkol, xxviii, xxix, xxxii, xl, xlv, xlvii, 1, 3, 9-15, 17, 20-24, 27, 31, 33, 36, 39, 68, 71, 75, 81, 87-89, 101, 106, 108, 111, 112, 114, 118, 120, 128-129, 132, 137-144, 147-150, 153-154, 158, 160, 163-165, 167, 168-173, 175-177, 179-180, 183, 186-190, 192, 195, 198, 201, 203, 205, 208, 210-213, 217, 218, 219-221, 223-225, 227, 228, 230, 233, 234, 238, 246-249, 258-260, 264, 266-268, 270-272, 274, 279, 285, 286, 288, 291, 295-296, 313-315, 318, 320-321, 324-330, 332, 338; kelompok 12, 15, 89, 246, 225, 272
- Vetin, Boris, 338
- Vietnam, 30, 84, 91, 98, 104, 115, 229, 238, 250, 292, 299, 311, 337
- Vittachi, Tarzie, 335
- Wahid, Presiden, xxvii, xlviii, , 37, 38, 46, 294, 319, 337
- Wahjudi, Kapten Artileri 120, 136, 137, 138, 139, 141
- Wahono, 262
- Walters, Patrick, 329, 338
- Walujo 6, 10, 14, 31, 62, 63, 66, 72, 75, 88, 114, 120-121, 132, 142, 148, 153-155, 207, 228, 231, 244, 293
- Wang Hsin Te, 81
- Wattimena, Komodor Leo, 72, 150, 152, 155, 166, 178, 204, 205, 225, 307
- Wertheim, xlvii, W. F. 338

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Widjanarko, Kolonel Bambang Setyono,
24, 43, 109, 111, 112, 24, 43, 106, 109,
111-112, 177, 195, 197, 212, 216, 220,
221, 225, 226, 235-236, 239, 240, 241,
268, 269-273, 275, 278, 288, 313, 315-
319, 321, 323, 326, 329-337
- Widjojo, Letjen Agus, 41
- Wikana, 158
- Wikramawardhana, 266
- Wirabhumi, 265, 266
- Wirahadikusumah, Mayjen Umar 194, 195,
204, 205, 214 216, 219, 267,
- Wirasondjaja, Hidajat, 266
- Wisnu, Kolonel, 150, 153, 225
- Wisnuisme, xxiv, xxv
- Wonindarsono, Komodor, 245, 335
- Wu Chieh Ping, 111
- Yani, Amelia, 41
- Yani, Letjen A., xxix, xlv, 13-15, 18, 22,
41, 44, 45, 66, 68, 69, 104, 105, 107,
108-111, 148, 154, 168, 172, 210, 212,
219, 277, 325, 327, 329, 333
- Yasir Hadibroto, 261, 262, 322
- Zorin, V., 324



PERIHAL PENULIS DAN PEMBERI PENGANTAR



Victor Miroslav FIC

Ia lahir tanggal 5 Januari 1922 di Dambořice, Cekoslowakia, dan kemudian menjadi warga negara Kanada.

Riwayat Pendidikan:

1945-1948	University of Political and Social Sciences, Prague, Czechoslovakia
1945-1953	University of British Columbia, Vancouver, Canada
1945-1958	Columbia University, New York, USA

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- 1945-1959 University of Mysore, Mysore, India
1945-1960 Indian School of International Studies (now Jawaharlal Nehru University), New Delhi, India

Gelar-gelar Akademis:

- 1) B.A. (Honours), 1950, Political Science, University of British Columbia, Vancouver B.C., Canada
- 2) M.A., 1953, Political Science and Slavonic Studies, University of British Columbia, Vancouver B.C., Canada
- 3) M.A., 1956, International Relations, Columbia University, New York, USA
- 4) Certificate of the Russian Institute, 1956, Columbia University, New York, USA
- 5) Diploma in Indology (Post Graduate), 1959, University of Mysore, Mysore, India
- 6) Ph.D., 1964, South Asian Studies, Indian School of International Studies, New Delhi, India
- 7) Ph.D., 1968, International Relations and Law, Columbia University, New York, USA

Karier Akademik:

- 1961-1963 Visiting Professor, Department of History, University of Rangoon, Rangoon, Burma
- 1963-1966 Visiting Professor, Department of Political Science, Nanyang University, Singapore
- 1966-1967 Visiting Professor, Faculty of Law, University of Singapore, Singapore
- 1967-1968 Visiting Professor, Department of History, University of Singapore, Singapore
- 1967-1969 Professor, Department of Government and Public Administration, Nanyang University, Singapore
- 1969-1971 Foundation Chair Professor, Political Science, Nanyang University, Singapore
- 1970-1971 Director, Institute of Asian Studies, Faculty of Graduate Studies, Nanyang University, Singapore
- 1965-1968 Teaching Staff (Hon.), School of Foreign Service, Ministry of Foreign Affairs, government of Singapore, Singapore
- 1971-1987 Professor, Department of Politics, Brock University, St. Catharines, Ont., Canada
- 1982-1993 Teaching Staff (Hon.), Canadian Forces Command and Staff School, Department of National Defence, Toronto, Canada
- 1990-1993 Director, Centre for Canada and Asia Pacific Studies. Brock University

Perihal Penulis dan Pemberi Kata Pengantar

- 1993-1994 Adjunct Professor, Department of Politics, Brock University
1993-1994 Visiting Professor, Burapha University, Bangsaen, Thailand
1996-1997 Senior Researcher, Centre for Strategic and International Studies,
Jakarta, Indonesia
1987-Professor Emeritus, Department of Politics, Brock University, St.
Catharines, Ont., Canada

Buku-buku yang dipublikasikan:

Tidak termasuk: a) artikel-artikel dan resensi buku yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal; b) paper-paper yang dibacakan dalam konferensi-konferensi, seminar-seminar dan workshop-workshop.

- 1) *Peaceful Transformation to Communism in India: Strategy of the Communist Party*, Nachiketa Publications, Bombay, India, 1969, pp. ix + 478.
- 2) *Kerala: Yenana of India*, Nachiketa Publications, Bombay, India, 1970, pp. xiv + 575.
- 3) *The Prague Spring: A Study in Social Change*, Nachiketa Publications, Bombay, India, 1970, pp. 75.
- 4) *Strategies for Social Change: Focus Upon Malaysia and Singapore*, (Ed.), Canadian Council for Southeast Asian Studies, Brock University, St. Catharines, Canada, 1974, pp. 131.
- 5) *The September 30th Movement in Indonesia: 1965. A Gamble That Failed*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, Nanyang University, 1968, str. 127.
- 6) *Violations of Civil and Political Rights in Czechoslovakia and the Helsinki Agreement*, The Council of Free Czechoslovakia, Washington, USA, 1977, pp. 191.
- 7) *Persecution of the Movement for Civil and Political Rights in Czechoslovakia: 1977-1980*. The Czechoslovak National Association of Canada, Toronto, 1980, pp. 56
- 8) *Political Prisoners in Czechoslovakia, Violations of the Helsinki Agreement: Documents*, Brock University, St. Catharines, Canada, 1982, pp. 20.
- 9) *Revolutionary War for Independence and the Russian Question: Czechoslovak Army in Russia 1914-1918*, Abhivan Publications, New Delhi, India, 1977, pp. xi + 267.
- 10) *The Czechoslovak Legion and the Bolsheviks: The Origin of Their Armed Conflict: March-May 1918*, Abhinav Publications, New Delhi, India, 1978, pp. xviii + 509.
- 11) *The Collapse of American Diplomacy in Russian and Siberia: Wilson's Decision Not To Intervene; March-October 1918*. East European

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi

- Monographs, Boulder, Col., Distributed by Columbia University Press, New York, 1995, pp. xvi + 494.
- 12) *The Rise of the Constitutional Alternative to Soviet Rule in 1918: The Provisional Governments of Siberia and All-Russia. Their Quest for Allied Intervention.* East European Monographs, Bolder, Col., Distributed by Columbia University Press, New York, 1998, pp. 505.
 - 13) *Nove usporadani sveta: Globalizace, nebo stret civilizaci? Proc nebyla vyze roku 1928 uspesna?* (Tr. The New World Order: Why Did the Vision of 1928 Fail?).
 - 14) *Ceskoslovenska strana narodne socialni v exile. Nastin vyvoje její organizacni struktury a strategie boje za demokracii ve vladi: 23. unor 1948-16. brezen 1990.* (Tr. The Czechoslovak National and Social Party in Exile: An Outline of the Evolution of its Organizational Structure and Strategy of the Struggle for Democracy: February 28, 1948-March 16, 1990). Brno: PRIUS, 2002, pp. 1-143.
 - 15) *FROM MAJAPAHIT AND SUKUH TO MEGAWATI SUKARNOPUTRI. Continuity and Change in Pluralisme of Religion, Culture and Politics of Indonesia. From the XV to the XXI Century.* New Delhi: Abhinav Publications, 2003, pp. 360
 - 16) Col. Illus. 45, B/W Illus. 38, Maps 3.
 - 17) *THE TANTRA: Its Origin, Theories, Art and Diffision From India To Nepal; Tibet, Mongolia, China, Japan and Indonesia.* New Delhi: Abhinav Publications, 2003, pp. 144, Col. Illus, 42, Maps 2.,
 - 18) *THE ANATOMY OF THE JAKARTA COUP: OCTOBER 1, 1965. The Collusion with China which Destroyed President Sukarno and the Communist Party of Indonesia.* New Delhi: Abhinav Publications, 2003, pp. 550.

Catatan:

Karya-karyanya mengenai legiun Cekoslowakia di Russia tahun 1914-1918, dan karya-karyanya dalam mendukung gerakan HAM dan Piagam 1977 di Cekoslowakia, Fic dianugerahi “the Order of T. G. Masaryk” oleh Presiden Vaclav Havel pada 20 Oktober 1998.

Perannya dalam Organisasi Profesi:

- 1) President, Canadian Association of Asian Studies, 1974-1976
- 2) President, Canadian Council on Southeast Asian Studies, 1976-1978
- 3) Member of the Board, The Indo-Canadian Shastri Institute, 1972-88
- 4) Member, Canadian Political Science Association, 1971-92
- 5) Member of the Board, The Edward Benes Institute, Prague, 1998.



John O. Sutter

Ia sejak remaja telah menjadi aktivis untuk ‘good government and human welfare’ dalam kampanye pemilihan kakeknya dan ayahnya untuk menjadi pejabat resmi dalam pemerintahan Saint Louis County (Kabupaten), Missouri. Bertahun-tahun kemudian, di era 1990-an, ia menjadi aktivis dalam ‘national initiative campaign’ [referendum yang datangnya dari warga negara] di Amerika Serikat.

Ia mendapat gelar bachelor (dalam ilmu politik) dan master (dalam ekonomi dan sejarah) dari Washington University di St. Louis. Sejak masa mudanya ia juga seorang aktivis dalam urusan-urusan internasional, termasuk enam perjalanan ilmiahnya di Indonesia antar tahun 1950-1984, tiga perjalanan terakhir bersama The Asia Foundation.

Tahun 1950-an merupakan “Indonesia Decade,” bagi dirinya, yaitu bekerja sebagai Vice Consul di Surabaya, Economic & Legal Officer di Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta (ketika ia mengaudit kursus-kursus dalam ilmu ekonomi dan koperasi di Universitas Indonesia), dan menjadi konsultan untuk Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (yang kemudian bernama LIPI), belajar Bahasa, sejarah dan kebudayaan Indonesia di Yale University dan Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies, dan meraih Ph.D., dalam ilmu Pemerintahan di Cornell University dengan sebuah disertasi “setebal ensiklopedi” berjudul: *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940 — 1955* (1959, 1312 halaman.)

Selama empat dekade ia bekerja sebagai “Asianist/Asiawan”, termasuk di antaranya delapan tahun bekerja di Malay(sia), dan dua dekade ia dan keluarganya tinggal di Borneo dan menyaksikan secara langsung gelora *Konfrontasi Indonesia-Malaysia*.

Sejak 1987 ia aktif menjadi seorang globalist/duniawan, menjadi penulis utama buku, *Federalism and the Right of People to Self-Government*. Sekarang ini, dengan berkantor di San Francisco, ia menjadi President of the Democratic World Federalists dan Editor jurnal empat bulannya, “*Toward Democratic World Federation*”.

Kerjasama Dr. Sutter dengan Professor Victor M. Fic bermula pada tahun 1968, sebagaimana tergambarkan dalam “Kata Pengantar” buku ini.

